



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
 - b. bahwa untuk mendeskripsikan pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE guna menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi ke dalam strategi kebijakan dan program pembangunan Daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021- 2026;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.
8. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain

arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE.

9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan pembangunan SPBE yang terintegrasi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Pembangunan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini:

- a. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu;
- b. mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE; dan
- c. mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Arsitektur SPBE mencakup kerangka dasar yang memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu; dan
- b. Peta Rencana SPBE memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi.

BAB II

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. Referensi Arsitektur SPBE; dan
 - b. Domain Arsitektur SPBE.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur SPBE yang memuat:
 - a. Referensi Arsitektur proses bisnis;
 - b. Referensi Arsitektur data dan informasi;

- c. Referensi Arsitektur layanan SPBE;
 - d. Referensi Arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. Referensi Arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. Referensi Arsitektur keamanan SPBE.
- (3) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE yang memuat:
- a. Domain Arsitektur proses bisnis;
 - b. Domain Arsitektur data dan informasi;
 - c. Domain Arsitektur layanan SPBE;
 - d. Domain Arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. Domain Arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. Domain Arsitektur keamanan SPBE.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
- a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Daerah; dan
 - c. RPJMD.

Pasal 6

- (1) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan/atau RPJMD.
- (2) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi pada paruh waktu, tahun terakhir pelaksanaan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan reviu perubahan terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah;
 - c. perubahan pada referensi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f; atau
 - d. perubahan rencana strategis Daerah.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Daerah;
 - b. perubahan rencana strategis Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.
- (6) Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan oleh Bupati.
- (7) Bupati dapat mendelegasikan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Perencanaan.

- (8) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah ditetapkan dan dapat dilanjutkan kembali selama tujuan dan sasaran masih belum tercapai dan tidak ada perubahan mendasar terhadap hasil reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5).

BAB III

SISTEMATIKA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE DAERAH

Pasal 7

- (1) Sistematika Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
- A. Buku I Kondisi Arsitektur Existing SPBE
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Visi Misi dan Strategi SPBE
 - c. Bab III : Analisa Kondisi Existing SPBE
 - d. Bab IV : Analisa Kesenjangan SPBE
 - B. Buku II Arsitektur Target SPBE
 - a. Bab I : Konsep Solusi SPBE
 - b. Bab II : Arsitektur Target SPBE
 - c. Bab III : Penutup.
 - C. Buku III Peta Rencana SPBE
 - a. Bab I : Portofolio Inisiatif SPBE
 - b. Bab II : Roadmap dan Estimasi Anggaran
 - c. Bab III : Penutup
- (2) Ketentuan mengenai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap relevansi dan efektifitas Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penanggung jawab monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - b. Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Organisasi.
- (3) Penanggung jawab monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 11

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRINOWATI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



BUKU I
KONDISI ARSITEKTUR
EKSISTING SPBE
2023



Pemerintah Kabupaten Sragen

RINGKASAN EKSEKUTIF

Adanya amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (IPPD) menjadi dasar dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen . Secara umum, SPBE merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Masyarakat & Swasta). Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE.

Implementasi SPBE dievaluasi secara berkala oleh evaluator dari Kemenpan-RB dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan dari implementasi SPBE. Dalam menanggapi amanat SPBE ini Pemerintah Kabupaten Sragen berinisiatif untuk mengimplementasikan SPBE dengan semangat *continuous improvement*. Salah satu tahapan yang dilakukan yaitu dengan menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Tujuan dari disusunnya dokumen perencanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengimplementasikan SPBE selama 5 tahun kedepan agar dalam pelaksanaannya seluruh instansi internal yang terlibat dapat saling bersinergi. Selain itu, dengan adanya perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian indeks SPBE secara bertahap.

Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Kabupaten Sragen berpedoman pada Perpres 95/2018, mengikuti Visi, Misi, Tujuan & Strategi SPBE Nasional serta berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, Arsitektur dan Peta Rencana ini menggunakan *reverse engineering* dari 47 indikator yang menjadi pokok dari evaluasi SPBE. Sehingga dapat dipastikan apa yang tertuang dalam dokumen ini telah memenuhi konteks evaluasi dalam SPBE. Secara umum, Arsitektur SPBE ini mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data & Informasi, Arsitektur Layanan Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Keamanan Informasi dan Audit TIK. Arsitektur SPBE diharapkan dapat menghadirkan transformasi digital dalam layanan internal maupun publiknya.

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	8
1.3. Landasan Hukum	9
1.4. Landasan Teori	10
1.4.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	10
1.4.2. The Open Group Architecture Framework (TOGAF)	13
1.4.3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	13
1.4.4. Referensi Arsitektur SPBE Nasional	16
Bab II Visi dan Misi Strategi SPBE	28
2.1. Visi	29
2.2. Strategi Peningkatan SPBE	30
2.3. Inisiatif Strategis SPBE	32
Bab III Analisa Kondisi Eksisting SPBE	34
3.1. Kebijakan & Manajemen	35
3.1.1. Kebijakan	35
3.1.2. Manajemen	35
3.2. Arsitektur SPBE	36
3.2.1. Arsitektur Proses Bisnis	36
3.2.1.1. Katalog Proses Bisnis	37
3.2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis	95
3.2.2. Arsitektur Data dan Informasi	99
3.2.2.1. Katalog Data dan Informasi	99
3.2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi	142
3.2.3. Arsitektur Layanan SPBE	145
3.2.3.1. Katalog Layanan	145
3.2.3.2. Analisis Diagram Layanan	167
3.2.3.3. Diagram Layanan SPBE yang menjadi indikator dalam evaluasi	170
3.2.3.1.1. Layanan Perencanaan SPBE	170
3.2.3.1.2. Layanan Penganggaran SPBE	173
3.2.3.1.3. Layanan Keuangan SPBE	175
3.2.3.1.4. Layanan Pengelolaan Aset SPBE	179
3.2.3.1.5. Layanan Kepegawaian SPBE	182
3.2.3.1.6. Layanan Kinerja Pegawai SPBE	188
3.2.3.1.7. Layanan Kearsipan Dinamis SPBE	191
3.2.3.1.8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah SPBE	194
3.2.3.1.9. Layanan Pengaduan Publik SPBE	200
3.2.3.1.10. Layanan Data Terbuka SPBE	202
3.2.3.1.11. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi SPBE	204
3.2.3.1.12. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SPBE	206
3.2.3.1.13. Layanan JDIH SPBE	209
3.2.3.1.14. Layanan Publik SPBE (Bidang Perizinan)	212
3.2.3.1.15. Layanan Publik SPBE (Bidang Pendidikan)	215

3.2.4. Arsitektur Aplikasi Eksisting	217
3.2.4.1. Katalog Aplikasi Eksisting	217
3.2.4.2. Analisis Diagram Aplikasi Eksisting	248
3.2.1. Arsitektur Infrastruktur SPBE	252
3.2.5.1. Pusat Komputasi (Pusat Data)	252
• Lokasi Pusat Data Kabupaten	252
• Katalog Fasilitas Komputasi Eksisting	264
3.2.5.2. Sistem Integrasi	265
3.2.5.2.1. Jaringan Intra Pemerintah	265
3.2.5.2.2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	272
3.2.5.2.3. Katalog Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Eksisting	272
3.2.5.2.4. Katalog Sistem Integrasi Pada JIP Eksisting	273
3.2.5.3. Platform	273
3.2.5.3.1. Katalog Komputasi Awan Eksisting	274
3.2.5.3.2. Katalog Perangkat Keras Server Eksisting	274
3.2.5.3.3. Perangkat Keras Storage	277
3.2.5.3.4. Perangkat Keras Jaringan	277
3.2.5.3.5. Perangkat Keras Keamanan	277
3.2.5.3.6. Katalog Perangkat Peripheral Eksisting	278
3.2.5.3.7. Perangkat Lunak	279
3.2.2. Arsitektur Keamanan	280
3.2.6.1. Standar Keamanan	282
3.2.6.2. Penerapan Keamanan	282
3.2.6.2.1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	283
3.2.6.2.2. Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	283
3.2.6.2.3. Peningkatan Keamanan SPBE	283
3.2.6.2.4. Penanganan Insiden Keamanan SPBE	284
3.2.6.2.5. Audit Keamanan SPBE	284
Bab IV Analisa Kesenjangan SPBE	285
4.1. Analisa Kesenjangan SPBE	286

Bab I Pendahuluan

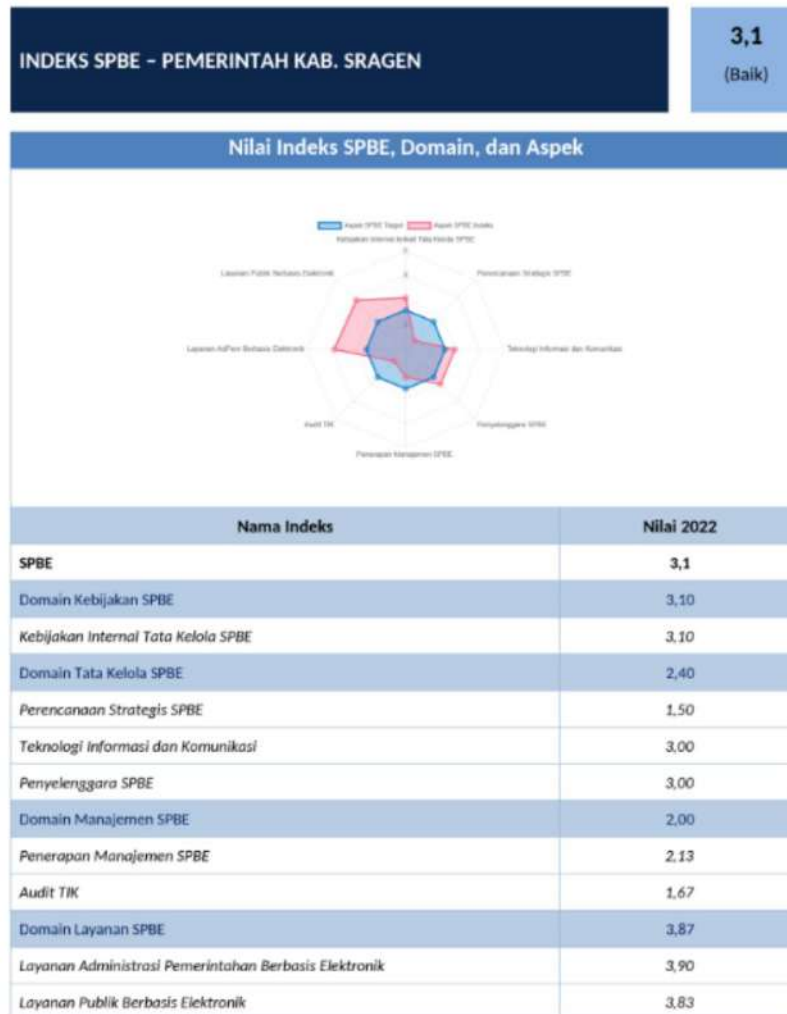
1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sragen terletak secara geografis antara 110°45' BT dan 111°10' BT serta 7°15' LS dan 7°30' LS. Jika dilihat secara kewilayahan, Kabupaten Sragen termasuk ke dalam wilayah Subosukowonosraten (Kota Surakarta-Kabupaten Boyolali-Kabupaten Sukoharjo-Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sragen-Kabupaten Klaten) yang total mencakup 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (196 desa dan 12 kelurahan, 2.519 dukuh dan 5.328 RT). Kabupaten Sragen adalah salah satu dari tiga puluh lima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan manusia, Sragen juga memiliki potensi yang besar dalam bidang perdagangan, industri, dan pariwisata. Keuntungan letak geografisnya dan ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadikan Sragen sebagai tujuan investasi yang sangat menarik dengan peluang pengembangan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan pariwisata. Karakteristik dan keragaman potensi yang dimiliki Kabupaten Sragen memberikan peluang pengembangan pembangunan di Kabupaten Sragen, salah satunya dalam menciptakan budaya digital baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah mengembangkan Kantor Maya sebagai bagian dari sistem jaringan yang mencakup seluruh satuan kerja serta 208 desa/kelurahan. Setiap tahun, sistem ini terus ditingkatkan guna meningkatkan efektivitasnya. Penggunaan sistem online ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar antara satuan kerja, tetapi juga memberikan manfaat ekonomis dengan mengurangi biaya pengiriman surat dinas, undangan, dan disposisi melalui aplikasi Surya/Surat Maya dan Kantaya (kantor maya). Selain itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, informasi terkini mengenai pembangunan daerah dan program Pemerintah Kabupaten Sragen dapat diakses melalui website pemerintah kabupaten. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sragen telah mengatur pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Bupati Sragen Nomor 37 Tahun 2017, dan hal ini diawasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberhasilan penerapan ini diukur melalui capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, menandakan kemajuan yang telah dicapai sejak tahun 2018.

Tantangan era digital saat ini dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sragen juga mendorong kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menyusul peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dengan acuan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Terdapat tiga unsur utama yang menjadi fokus penerapan SPBE, yaitu: 1) Tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; 2) Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai fasilitator dalam pelaksanaannya; dan 3) Kemudahan dalam layanan pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat.

Komitmen kepala daerah Pemerintah Kabupaten Sragen menjadi salah satu kunci dalam menciptakan budaya digital dalam sistem pemerintahannya. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sragen meraih indeks SPBE nasional untuk kategori kabupaten/kota dengan perolehan nilai 3,1 dari hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh evaluator eksternal Kemenpan-RB.



Gambar 1.1.1. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022

Kunci kemudahan maupun kecepatan pelayanan publik terletak pada teknologi dan digitalisasi. Seperti halnya di negara Denmark masih bertengger di urutan nomor satu dunia dalam hal indeks *e-Government*. Indeks *e-Government* yang tinggi ini nyatanya juga berdampak pada aspek pelayanan yang lain. Secara umum, hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada Tahun 2022 di Pemerintah Kabupaten Sragen akan menjadi *baseline* dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Dokumen ini disusun untuk menentukan strategi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di Pemerintah Kabupaten Sragen lima tahun mendatang serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Selain itu, diharapkan juga dapat mewujudkan terciptanya digitalisasi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi nasional. Implementasi SPBE diharapkan sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**"Menuju Kabupaten Sragen Mandiri,
Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong"**

Berdasarkan dengan visi tersebut, perlu adanya peningkatan pelayanan administrasi pemerintah dan pelayanan publik dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, seperti: penetrasi teknologi yang serba disruptif, serta adanya perkembangan *Internet of Things* (IoT) yang menjadikan perubahan semakin cepat. Pemanfaatan IoT menghasilkan kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data *basic*. Lebih jauh, pelayanan administrasi pemerintahan perlu didukung dengan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi (*cloud computing*), hingga kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Perubahan ini dapat diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan. Di satu sisi dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, perlu didukung dengan komitmen dan perencanaan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu upaya mewujudkan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah dengan birokrasi pemerintahan yang fokus pada orientasi pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan TIK. Saat ini, pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan (*Smart Government*) atau yang lebih dikenal dengan istilah SPBE dimanfaatkan untuk mendukung fungsi dan layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Aktivitas pemerintahan ini telah lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat. Ketidakteraturan dalam proses pengembangan aplikasi SPBE menjadi permasalahan tersendiri pada proses pemeliharaan. Belum tersedianya kebijakan, panduan dan standar yang jelas terkait implementasi *Smart Government* menjadikan proses pengelolaan tidak berjalan dengan efektif.

Faktanya, kini masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, birokrasi yang cepat dan efektif sehingga SPBE menjadi tuntutan yang harus diterapkan dengan serius. Adanya SPBE diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sehingga lebih efektif dan efisien baik dalam waktu layanan, percepatan proses, alur birokrasi, serta transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan.



Gambar 1.1.2. Kebijakan Pengembangan SPBE

Pembangunan SPBE yang akan dibangun maupun yang sudah ada harus mendukung proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, diperlukan suatu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Sragen. Sebagai langkah menuju pembangunan panduan yang dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Sragen menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sragen. Harapannya dengan adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, pengembangan SPBE dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023-2027 yaitu:

1. Penyusunan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengimplementasikan SPBE;
2. Terwujudnya implementasi SPBE yang terarah dan komprehensif; dan
3. Terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023-2027 sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
2. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Sragen agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan

3. Menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023-2027 guna optimalisasi layanan masyarakat yang semakin baik di Pemerintah Kabupaten Sragen.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
21. Instruksi Presiden RI Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
22. Instruksi Presiden RI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
23. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 57/kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
24. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Pelayanan Izin Penelitian Online di Kabupaten Sragen
27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen
28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Secara Elektronik
30. Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
31. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
32. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Nomor 82 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab. Sragen

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018, SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE pemerintah daerah sehingga SPBE menjadi terpadu dan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat

dan pemerintah daerah. Satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh dapat menghasilkan proses birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

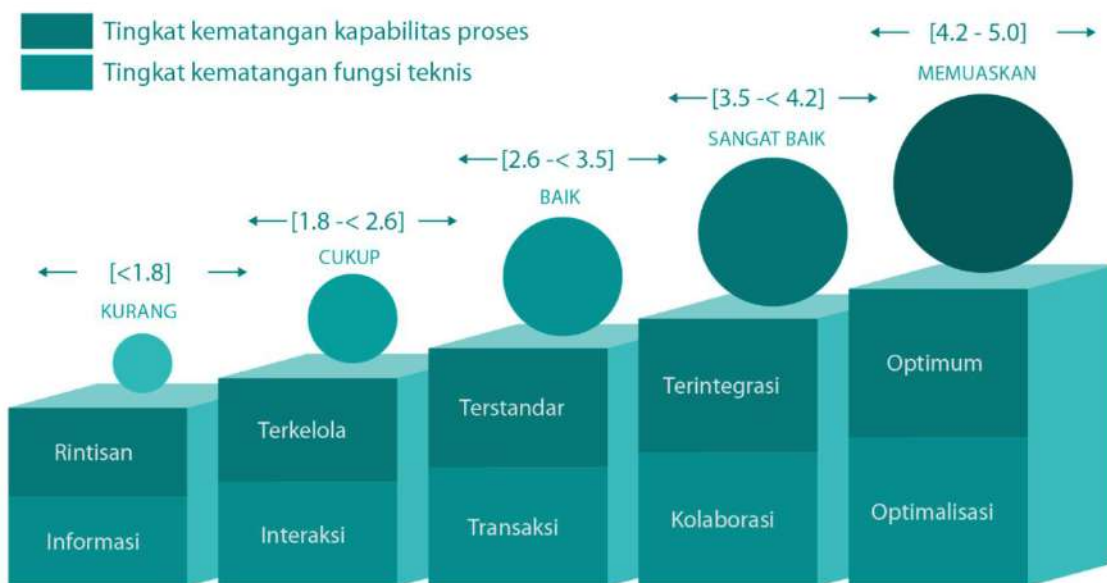


Gambar 1.4.1.1. Ruang Lingkup Arsitektur SPBE Nasional

Secara umum implementasi SPBE terdapat tiga tahapan penting dalam kesuksesan SPBE, yaitu:

1. Perencanaan: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kontrak;
2. Pelaksanaan: Manajemen Proyek/Kegiatan, Manajemen Rekanan, dan Tim Pelaksana (jumlah & kompetensi); dan
3. Evaluasi: Monitoring dan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui capaian progres penerapan Arsitektur SPBE khususnya *Roadmap*, Kondisi permasalahan *eksisting* SPBE, Inisiatif perbaikan program.

Saat ini, kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE untuk mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarah pada pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.



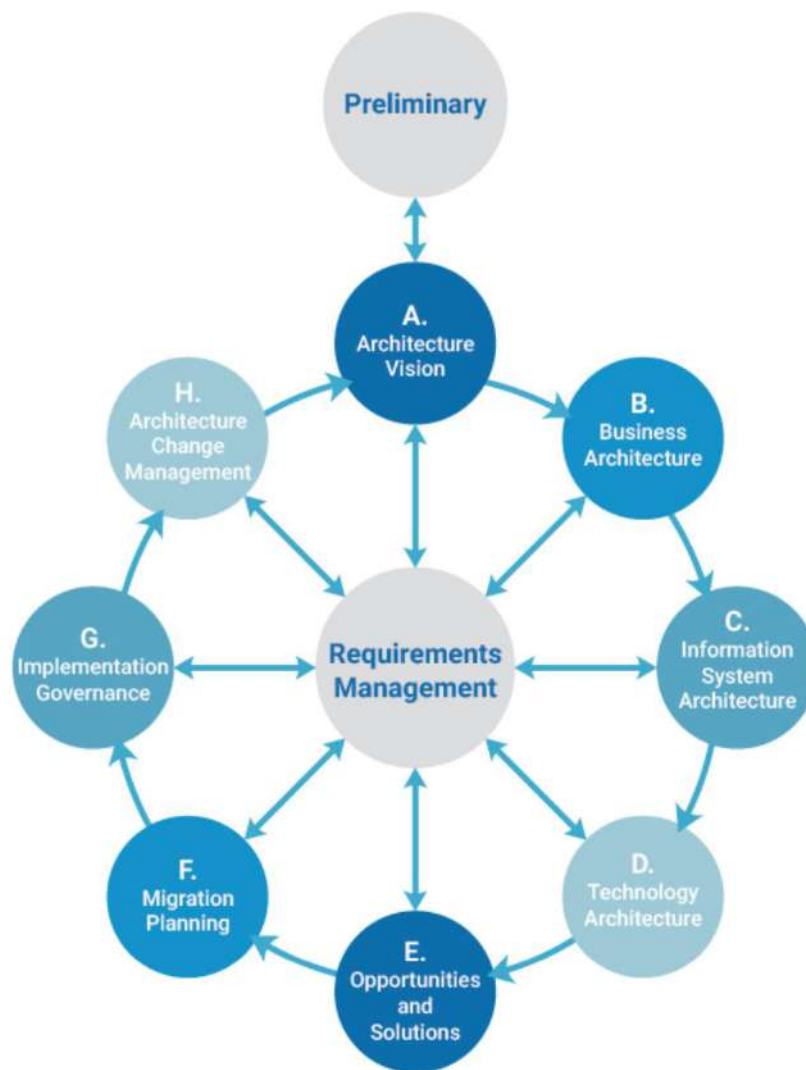
Gambar 1.4.1.2. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Adapun kondisi tingkat kematangan penerapan yang terdapat pada SPBE dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.1.1. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat		Karakteristik
1	Rintisan	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
	Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Layanan SPBE dalam bentuk satu arah.
2	Terkelola	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi.
	Interaksi	<ul style="list-style-type: none"> Layanan SPBE dalam bentuk dua arah.
3	Terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait.
	Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4	Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif.
	Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain.
5	Optimum	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
	Optimalisasi	<ul style="list-style-type: none"> Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

1.4.2. The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

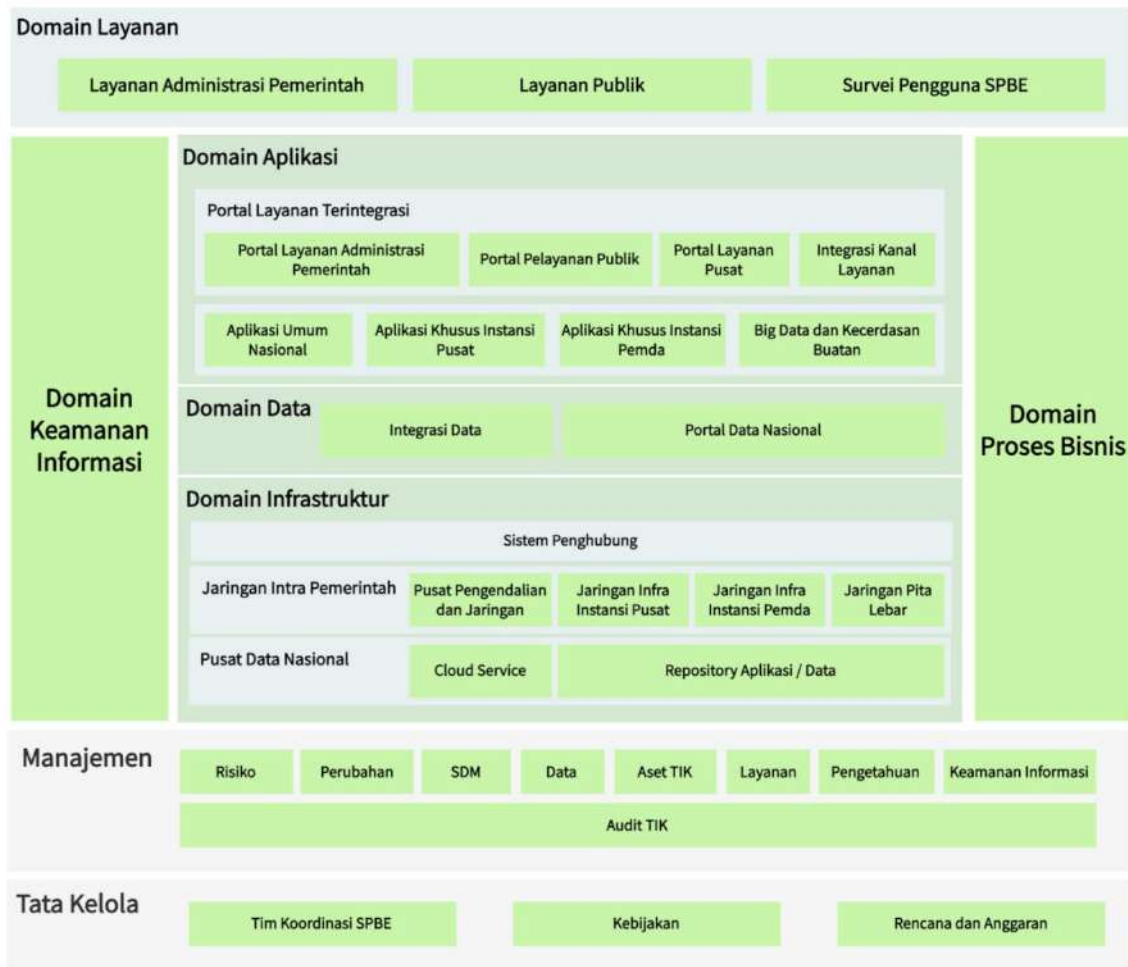


Gambar 1.4.2.1. Domain Arsitektur TOGAF

Penyusunan arsitektur SPBE ini mengadopsi konsep metode pengembangan arsitektur IT (*Architecture Development Method*) yang ada dalam *framework* TOGAF. Konsep ini mendefinisikan secara mendetail dimulai dari arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur sistem dan data, arsitektur teknologi (infrastruktur dan keamanan), portofolio solusi dan peta rencana. Penyusunan Arsitektur SPBE pemerintah Kabupaten Sragen harus mampu memenuhi tujuan dari perkembangan teknologi dan visi SPBE yang ingin diadopsi oleh pemerintah daerah di masa mendatang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SPBE eksisting.

1.4.3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Keberhasilan penerapan SPBE Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan alur pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur SPBE yang terperinci sehingga dapat menjadi acuan pengembangan SPBE oleh seluruh *stakeholder*. Gambaran mengenai cakupan arsitektur SPBE Nasional yang perlu diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.3.1. Domain Arsitektur SPBE Nasional

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, serta keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah. Setiap *layer* arsitektur yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang selanjutnya saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain lainnya. Langkah awal proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE yang harus disusun terlebih dahulu dengan mendefinisikan tata kelola. Tata kelola adalah serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam institusi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Penerapan tata kelola dimulai dengan membentuk tim koordinasi SPBE dan jadwal kegiatan, menetapkan kebijakan SPBE, dan menyusun rencana dan anggaran SPBE.

Langkah kedua dalam proses penyusunan arsitektur SPBE yaitu dengan menentukan bentuk-bentuk manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di perangkat daerah. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan seluruh *stakeholder* untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan

pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun 8 (delapan) proses penentuan manajemen, yaitu:

- Manajemen Resiko
- Manajemen Keamanan Informasi
- Manajemen SDM
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen Data
- Manajemen Layanan
- Manajemen Aset TIK
- Manajemen Perubahan

Arsitektur proses bisnis menjadi hal pertama yang perlu dikelola. Proses bisnis perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal dan pelayanan yang efektif dan efisien. Arsitektur proses bisnis selanjutnya menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain. Adapun beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain, yaitu:

- Portal layanan administrasi pemerintah;
- Portal layanan publik;
- Portal pusat layanan; dan
- Integrasi kanal layanan.

Aplikasi juga dapat dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu aplikasi yang bersifat khusus dan umum. Adapun berdasarkan penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aplikasi umum nasional;
- Aplikasi khusus instansi pemda.

Pembangunan aplikasi mengacu pada data yang dikelola oleh perangkat daerah. Selain itu, pada arsitektur data memungkinkan adanya integrasi data dengan portal data nasional. Arsitektur lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah arsitektur infrastruktur. Arsitektur ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan dalam pelayanan. Arsitektur infrastruktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu: infrastruktur jaringan dan infrastruktur pusat data daerah. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada perangkat daerah termasuk didalamnya pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemerintah daerah, dan jaringan pita lebar. Sedangkan untuk infrastruktur pusat data daerah didalamnya terdapat *cloud services* dan repositori aplikasi/data.

Arsitektur terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah arsitektur keamanan informasi, dimana aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilingkupi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah sistem informasi. Aspek-aspek ini, meliputi: privasi/kerahasiaan yang menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak kecuali untuk pihak yang memiliki kewenangan. Kelima arsitektur yang telah disebutkan (arsitektur proses bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan informasi) adalah domain yang dikelola untuk meningkatkan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah. Pengembangan domain layanan tentunya mengedepankan aspek kemudahan bagi pengguna layanan tersebut. Adapun klasifikasi layanan yang diberikan oleh instansi pusat adalah layanan administrasi pemerintahan, layanan publik, dan survei penggunaan aplikasi SPBE. Secara umum,

arsitektur SPBE Nasional terdiri dari enam komponen berupa taksonomi referensi arsitektur di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dalam setiap domain arsitektur SPBE Nasional.

1.4.4. Referensi Arsitektur SPBE Nasional

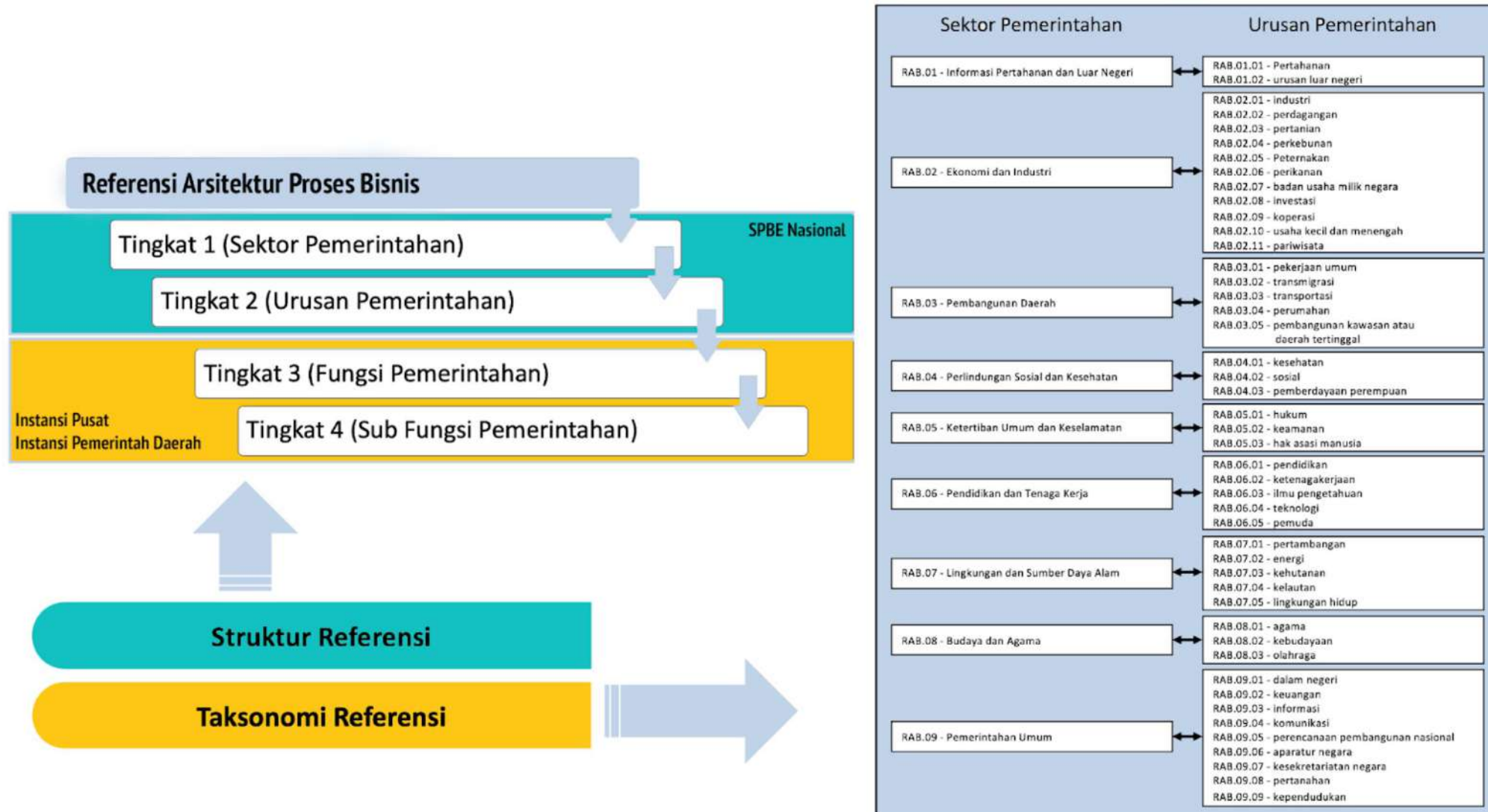
Referensi Arsitektur SPBE Nasional merupakan taksonomi dalam SPBE yang terdiri dari Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB - 01), Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD - 02), Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL - 03), dan Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA - 04), Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI - 05), Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK - 06). Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL) merupakan arsitektur yang berfokus pada desain layanan yang dapat digunakan oleh beberapa aplikasi untuk melakukan tugas yang sama. Setiap layanan yang ada memungkinkan aplikasi untuk saling berbagi informasi dan membangun integrasi. Adapun kondisi tingkat kematangan yang terdapat pada RAL Level 1 SPBE dapat dilihat pada tabel berikut.

A. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur proses bisnis 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Sektor pemerintahan: mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Urusan pemerintahan: menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Fungsi pemerintahan: menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional; dan
- d. Sub fungsi pemerintahan: menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Adapun penjelasan mengenai referensi arsitektur proses bisnis dapat dilihat pada gambar berikut:



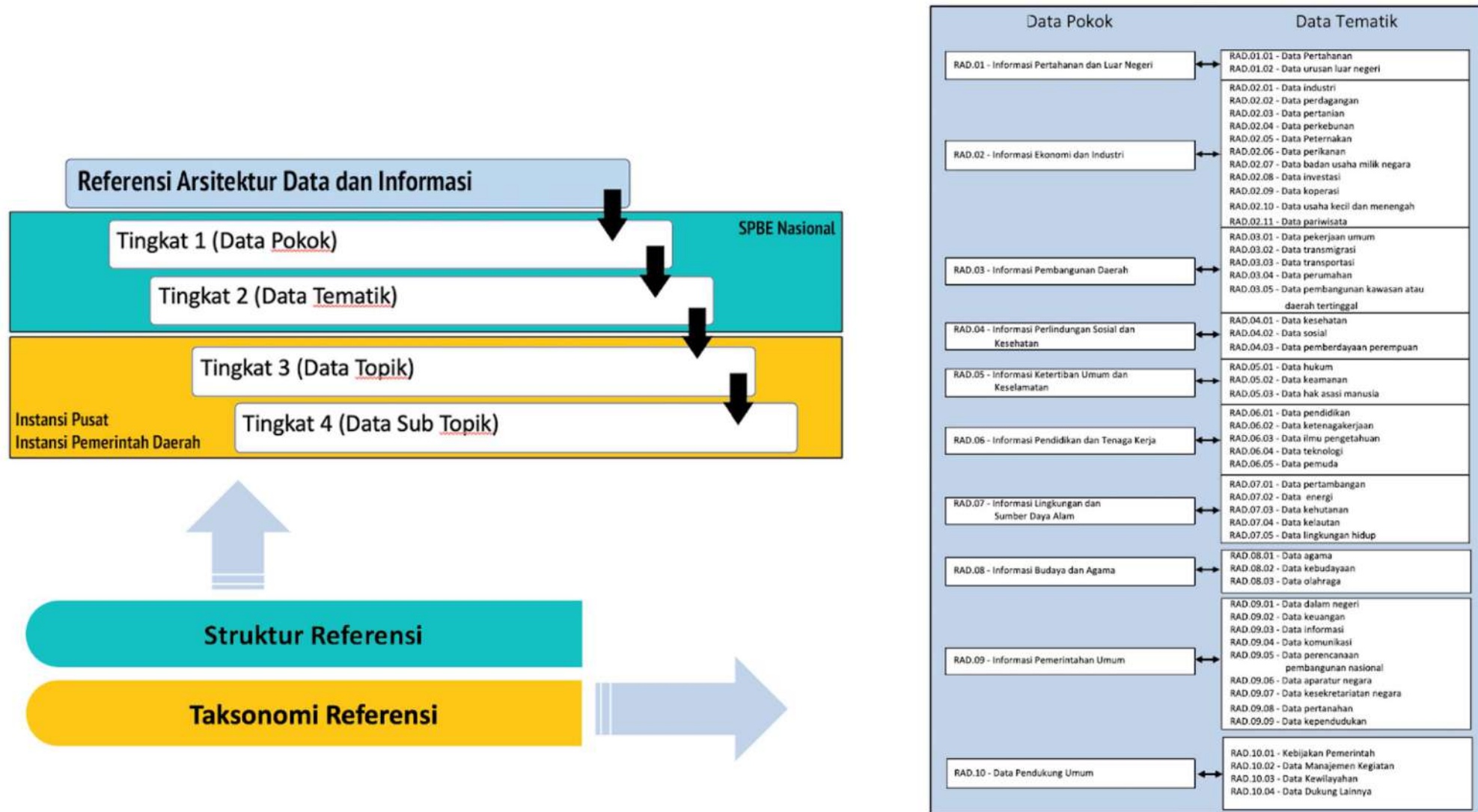
Gambar 1.4.4.1. Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

B. Struktur Referensi Arsitektur Data (RAD)

Domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur data dan informasi berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Data pokok: mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Data tematik: menjelaskan urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Data topik: menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional; dan
- d. Data sub topik: menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Adapun penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur data dapat dilihat pada gambar berikut:



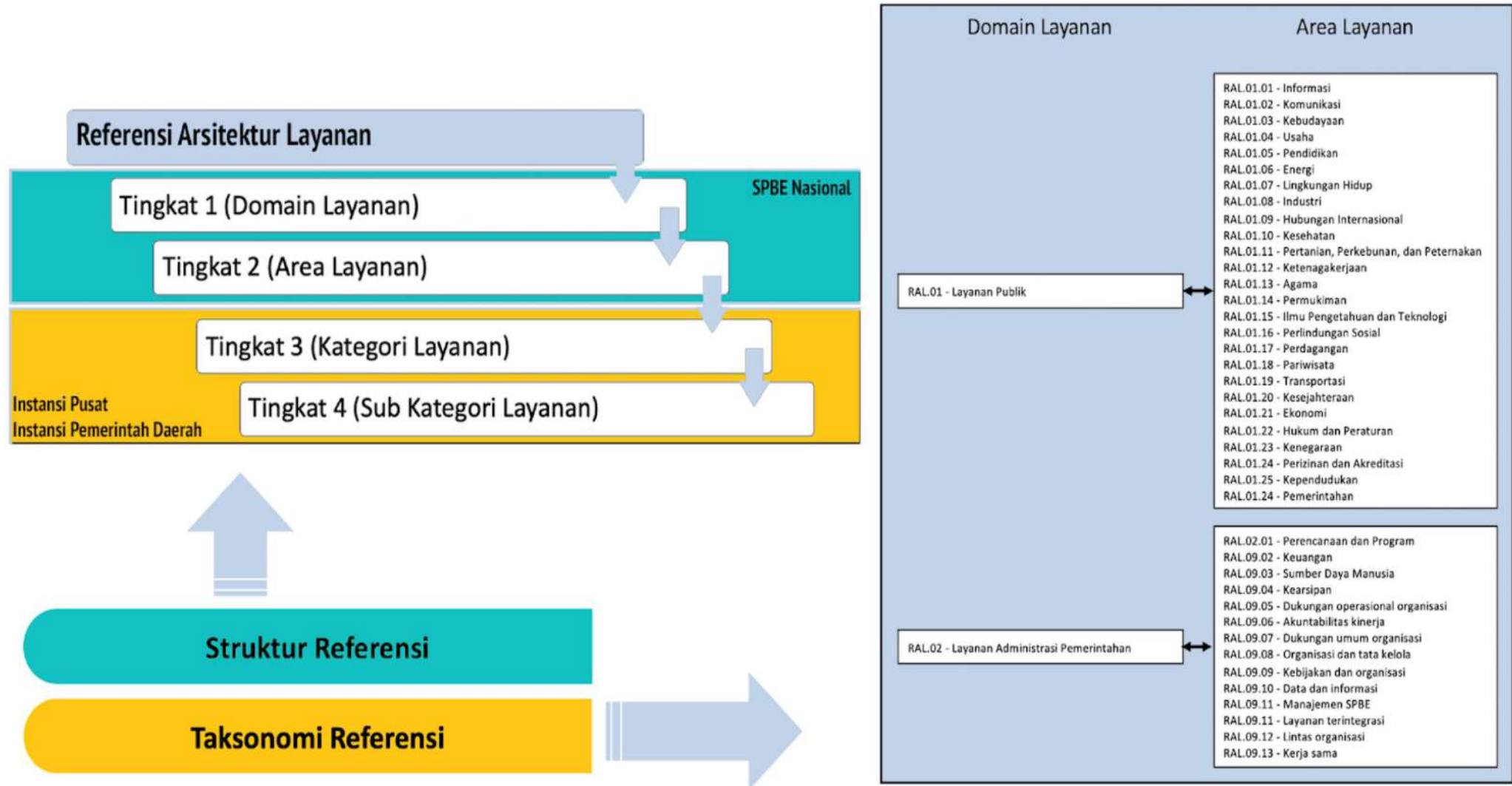
Gambar 1.4.4.2. Taksonomi Referensi Arsitektur Data (RAD)

C. Struktur Referensi Arsitektur Proses Layanan (RAL)

Domain arsitektur layanan SPBE diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat struktur, yaitu:

- a. Domain layanan: mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area layanan: menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori layanan: menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. Sub kategori layanan: menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional nasional.

Adapun penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur layanan dapat dilihat pada gambar berikut:



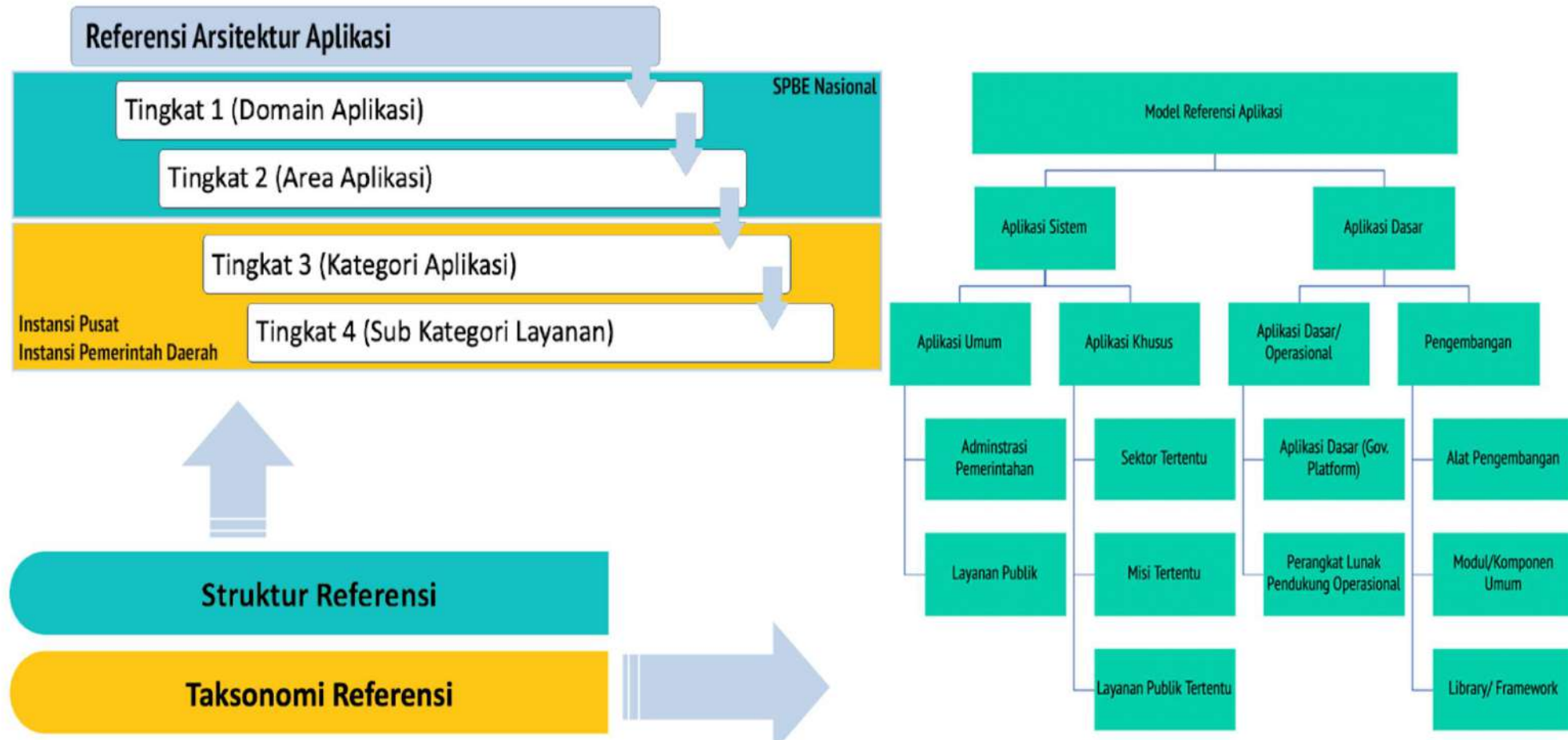
Gambar 1.4.4.3. Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

D. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan kedalam 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Domain aplikasi: mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area aplikasi: menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori aplikasi: menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. Sub kategori aplikasi: menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur aplikasi dijelaskan pada gambar berikut:



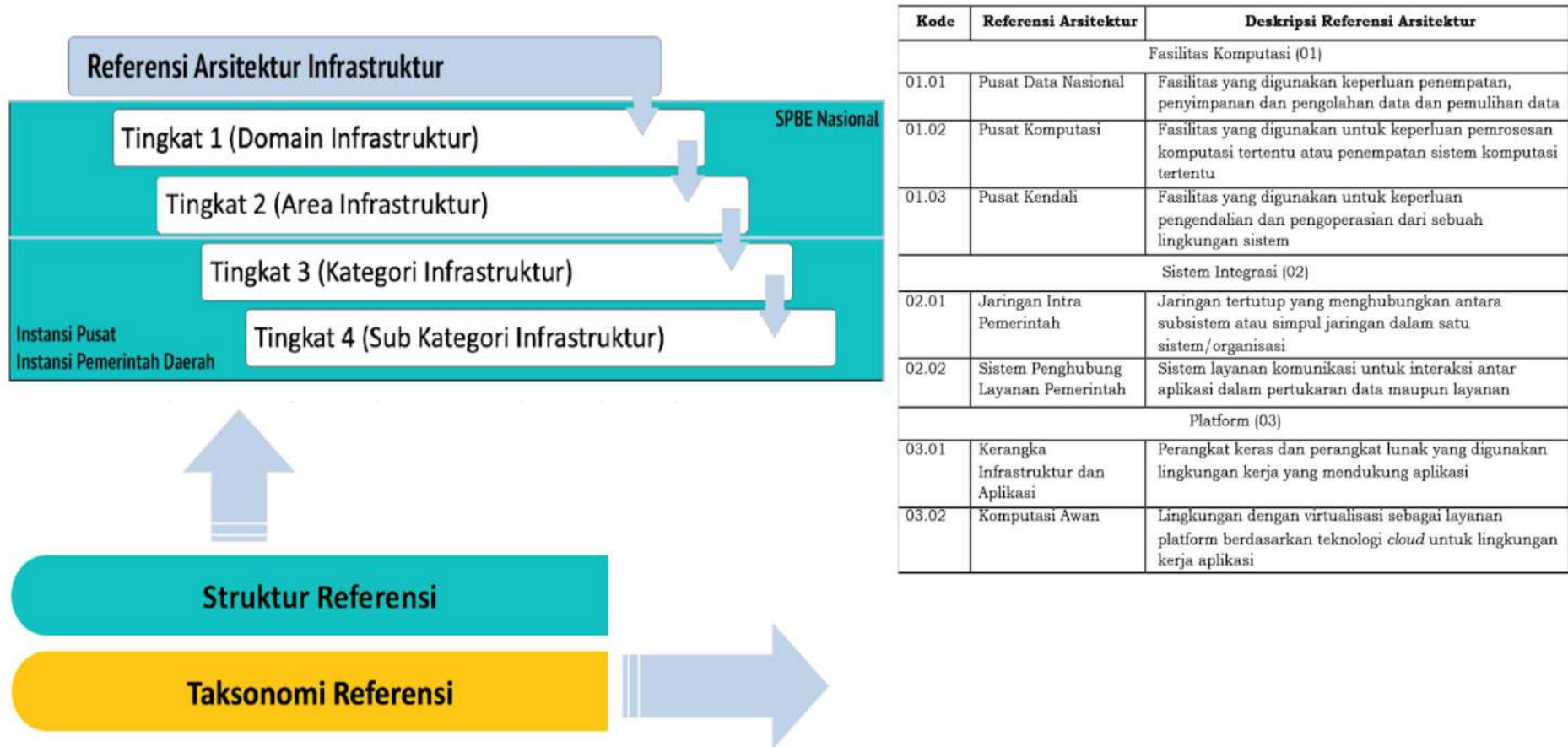
Gambar 1.4.4.4. Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

E. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Domain arsitektur infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. Domain infrastruktur, mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area infrastruktur, menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi, data dan informasi yang kemudian dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua) dan menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- c. Kategori infrastruktur, menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga) yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur infrastruktur dijelaskan pada gambar berikut:



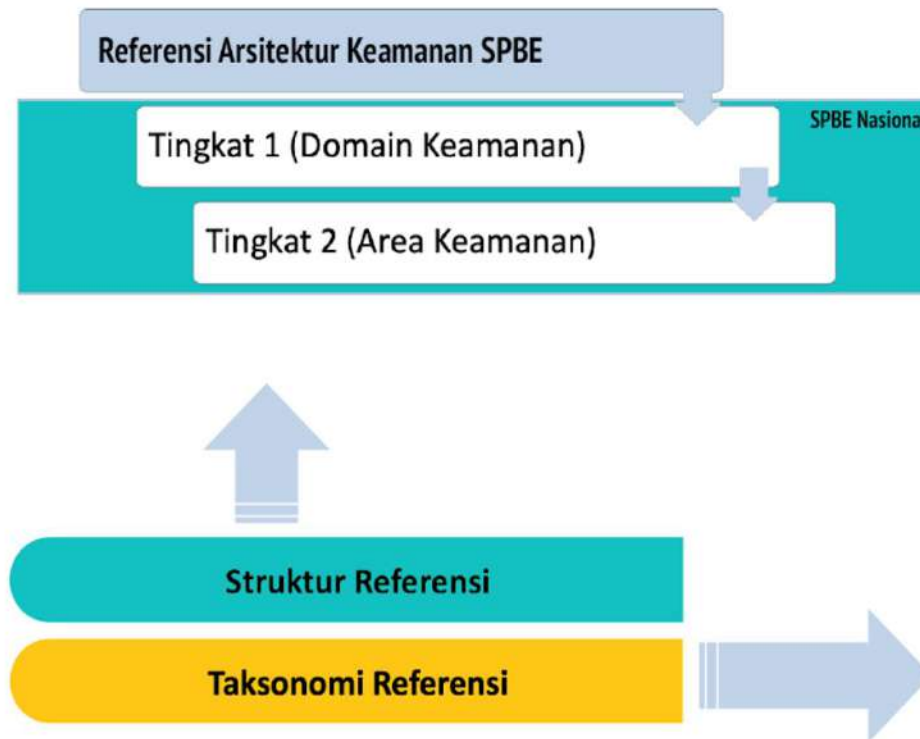
Gambar 1.4.4.5. Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

F. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Informasi

Domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional yang selanjutnya merupakan substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur keamanan SPBE berupa 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Domain keamanan: mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan, dan pertimbangan kelayakan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- b. Area keamanan: mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur keamanan informasi dijelaskan pada gambar berikut.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Uji kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Gambar 1.4.4.6. Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Informasi (RAK)

Bab II Visi dan Misi

Strategi SPBE

2.1. Visi

Secara umum, arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen juga harus mengacu pada visi SPBE Nasional yaitu:

"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi."

Berdasarkan hal tersebut, visi SPBE Nasional ini perlu diselaraskan, disinkronisasikan, dan diharmonisasikan dengan visi dan misi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen guna mendefinisikan arsitektur dan peta rencana SPBE yang sesuai. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026:

"Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong"

Mengacu pada dua hal tersebut pondasi strategi dalam arsitektur dan peta jalan SPBE, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024-2026. Lebih jauh, visi Pemerintah Kabupaten Sragen tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Kabupaten Sragen guna menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Berbagai upaya pencapaian visi SPBE dan strategi pencapaian implementasi SPBE yang dapat digunakan antara lain, yaitu:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola SPBE yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, merujuk pada visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen antara lain, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sebagai turunan dari visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatkan kapasitas SDM TIK.



Gambar 2.1.1. Unsur-unsur dalam SPBE

2.2. Strategi Peningkatan SPBE

Berdasarkan hasil Evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022, strategi peningkatan indeks SPBE meliputi 4 domain, yaitu: kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan. Secara khusus, perlu adanya peningkatan indeks SPBE khususnya pada domain kebijakan dan manajemen agar mencapai target level 4 (empat).



Gambar 2.2.1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen
(Sumber: laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Sragen, 2022)

Merujuk pada Gambar 2.2.1. dapat disimpulkan bahwa anggota dalam Tim Koordinasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen belum sepenuhnya aktif berkolaborasi dalam penerapan tata kelola dan manajemen SPBE. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan indeks pada seluruh domain SPBE perlu dilakukan beberapa *best practices* yang dirinci pada Tabel berikut.

Tabel 2.2.1. Strategi Peningkatan Indeks SPBE

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
1	Indikator 1 sampai 10 terkait Kebijakan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu atas regulasi <i>eksisting</i> yang terkait SPBE, memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam pedoman evaluasi SPBE; Melakukan revisi/perbaikan regulasi SPBE Daerah sesuai dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat. 	Diskominfo
2	Indikator 16 terkait Layanan Pusat Data	<ol style="list-style-type: none"> Server Pemerintah Kabupaten Sragen terintegrasi dengan jaringan Pusat Data Nasional; dan Melakukan evaluasi atas operasional Pusat Data milik Pemerintah Kabupaten Sragen. 	Diskominfo
3	Indikator 17 terkait Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan konektivitas ke seluruh perangkat daerah (<i>Metro Area Network</i>) yang terpusat di Diskominfo sebagai 	Diskominfo

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
	Intra Pemerintah	NOC nya; 2. Memastikan seluruh ruangan perangkat daerah tercover radius <i>Access Point</i> ; dan 3. Melakukan evaluasi atas operasional Jaringan Intra milik Pemerintah Kabupaten Sragen.	
4	Indikator 19 terkait Tim Koordinasi SPBE	Mendefinisikan jadwal kegiatan program kerja Tim Koordinasi SPBE dan disahkan dalam Surat Keputusan Bupati.	Tim Koordinasi SPBE
5	Indikator 20 terkait Kolaborasi Penerapan SPBE	1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE.	Tim Koordinasi SPBE
6	Indikator 21 - 28 terkait Manajemen SPBE	1. Mengkaji manajemen SPBE dan menerapkannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai pedoman yang ditetapkan; 2. Melakukan kegiatan manajemen SPBE secara berkelanjutan; dan 3. Melakukan reviu dan perbaikan atas penerapan manajemen SPBE.	OPD Terkait

2.3. Inisiatif Strategis SPBE

Berdasarkan telaah visi SPBE Nasional dan visi pemerintah Kabupaten Sragen serta analisis hasil evaluasi SPBE terakhir diperoleh sepuluh inisiatif sebagai prioritas pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu:

1. Reviu kebijakan terkait SPBE yang sudah ada;
2. Melakukan efisiensi proses bisnis dengan melakukan digitalisasi pada proses bisnis yang kompleks guna memberikan pelayanan administrasi internal maupun publik yang lebih prima;
3. Pengembangan aplikasi khusus guna mendukung implementasi layanan tematik SPBE, aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Sragen setidaknya harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 4 (empat), dimana aplikasi khusus harus dapat terintegrasi dengan aplikasi lain baik yang dikelola oleh internal pemda maupun yang dikelola oleh instansi lain;
4. Pengembangan *platform* integrasi layanan elektronik yang sudah berjalan dengan menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh perangkat daerah, seperti: optimalisasi berbagai SOP yang sudah ada terutama yang berkaitan dengan pihak ketiga dan pelaksanaan berkelanjutan;
5. Peningkatan dan optimalisasi kapasitas (pusat data, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah) untuk optimalisasi layanan elektronik di internal Pemerintah Kabupaten yang berkelanjutan;
6. Penyesuaian tim Koordinasi SPBE (terutama pembentukan pokja);

7. Optimalisasi forum kolaborasi penerapan SPBE baik dengan internal maupun dengan instansi pusat;
8. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;
9. Menyusun pedoman, penerapan & optimalisasi manajemen SPBE; dan
10. Melakukan audit atas operasional SPBE yang meliputi audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan secara berkala.

Bab III Analisa

Kondisi *Eksisting*

SPBE

3.1. Kebijakan & Manajemen

3.1.1. Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Sragen telah menerapkan beberapa layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik. Pengembangan layanan SPBE telah didukung oleh kebijakan internal SPBE yang terlihat pada hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022, dimana domain kebijakan memperoleh nilai 3.10 (penilaian kebijakan dasar untuk penerapan SPBE dinilai sudah maksimal). Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan internal SPBE dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.1 Mandatori Kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen

No.	Mandatori	Keterangan
1.	Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Sudah Ada
2.	Kebijakan Manajemen Data	Sudah Ada
3.	Kebijakan Arsitektur SPBE	Sudah Ada
4.	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Sudah Ada
5.	Kebijakan Layanan Pusat Data	Sudah Ada
6.	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah Ada
7.	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sudah Ada
8.	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Sudah Ada
9.	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Sudah Ada
10.	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah Ada

Berdasarkan sepuluh mandatori kebijakan internal SPBE, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyusun seluruh kebijakan tersebut.

3.1.2. Manajemen

Pengembangan dan penerapan SPBE tentu harus diimbangi dengan penerapan manajemen guna memastikan operasional SPBE dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ekspektasi. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022 khususnya pada domain manajemen SPBE memperoleh nilai 2.00. Layanan SPBE tanpa didukung dengan penerapan manajemen yang optimal dapat berimplikasi pada pelayanan yang kurang baik. Terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPBE, yakni: SDM (*people*) → Manajemen (*process*) → Layanan IT (*technology*). Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan penerapan manajemen yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1. Mandatori Manajemen SPBE Kabupaten Sragen

No.	Mandatori	Keterangan
1.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Sedang diterapkan
2.	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Belum diterapkan
3.	Penerapan Manajemen Data	Belum diterapkan
4.	Penerapan Manajemen Aset TIK	Belum diterapkan
5.	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Belum diterapkan
6.	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Belum diterapkan
7.	Penerapan Manajemen Perubahan	Belum diterapkan
8.	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	Belum diterapkan

Berdasarkan dari delapan mandatori Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Sragen belum menerapkan mandatori manajemen SPBE dan kedepannya perlu adanya penerapan manajemen SPBE secara optimal dapat meningkatkan kualitas layanan publik, menghilangkan duplikasi data, membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi kompleksitas birokrasi, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah.

3.2. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan SPBE yang optimal. Selain itu, Arsitektur SPBE ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

3.2.1. Arsitektur Proses Bisnis

Secara umum, arsitektur proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Sragen.

3.2.1.1. Katalog Proses Bisnis

Katalog proses bisnis berisi deskripsi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen. Katalog disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Sragen, dimana Level 1,2, dan 3 mengacu pada kodifikasi arsitektur proses bisnis SPBE nasional serta untuk level 4 hingga level 5 mengacu pada proses bisnis Kabupaten Sragen. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog proses bisnis Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun katalog proses bisnis selengkapnya ditunjukkan pada link: <https://bit.ly/metadataspbesragen>.

Tabel 3.2.1.1.1. Daftar Proses Bisnis yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.01	Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.01.01	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Dalam Negeri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.01.01.01	Penyediaan Informasi Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	SRG.01.01. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Dalam Negeri		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.01.01.02	Penyediaan Informasi Izin Usaha Industri (IUI)	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	SRG.01.01. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Dalam Negeri		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.01.01.03	Penyediaan Informasi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	SRG.01.01. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Dalam Negeri		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.01.02	Pengendalian Izin Usaha Industri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.01.02.01	Penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	SRG.01.02. Pengendalian Izin Usaha Industri		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.01.02.02	Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	SRG.01.02. Pengendalian Izin Usaha Industri		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.01.02.03	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	SRG.01.02. Pengendalian Izin Usaha Industri		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.01.02.04	Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	SRG.01.02. Pengendalian Izin Usaha Industri		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.01.03	Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.01.03.01	Pengelolaan Rencana Pembangunan Industri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	SRG.01.03. Perencanaan dan Pembangunan Industri		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.02	Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.02.01	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.02.01.01	Penyediaan Informasi Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	SRG.02.01. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.03	Penggunaan Produk Dalam Negeri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.06 Penggunaan Produk Dalam Negeri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.03.01	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.06 Penggunaan Produk Dalam Negeri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.03.02	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.06 Penggunaan Produk Dalam Negeri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.04	Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.04.01	Pengembangan Ekonomi Kreatif	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.04.01.01	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital	SRG.04.01. Pengembangan Ekonomi Kreatif		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.04.02	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.04.02.01	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital	SRG.04.02. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.05	Pembinaan Perdagangan Regional	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.01 Pembinaan Perdagangan Regional			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.05.01	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.01 Pembinaan Perdagangan Regional			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.05.01.01	Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.01 Pembinaan Perdagangan Regional	SRG.05.01. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.06	Pengelolaan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.06.01	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.06.02	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.06.02.01	Pengawasan Pupuk Pestisida Bersubsidi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan	SRG.06.02. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.06.02.02	Pengelolaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan	SRG.06.02. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.06.02.03	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan	SRG.06.02. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.06.03	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.06.03.01	Pengawasan Metrologi Legal berupa Tera dan Tera Ulang	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan	SRG.06.03. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.06.03.02	Pengelolaan Metrologi Legal berupa Tera dan Tera Ulang	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan	SRG.06.03. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.07	Perdagangan Dalam Negeri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.03 Perdagangan Dalam Negeri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.07.01	Pemasaran Produk Dalam Negeri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.03 Perdagangan Dalam Negeri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.07.01.01	Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.03 Perdagangan Dalam Negeri	SRG.07.01. Pemasaran Produk Dalam Negeri		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.08	Ekspor Impor	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.04 Ekspor Impor			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.08.01	Pengembangan Ekspor	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.04 Ekspor Impor			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.08.01.01	Pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.04 Ekspor Impor	SRG.08.01. Pengembangan Ekspor		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.08.01.02	Promosi Dagang Produk Ekspor Unggulan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.04 Ekspor Impor	SRG.08.01. Pengembangan Ekspor		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.08.01.03	Promosi Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.04 Ekspor Impor	SRG.08.01. Pengembangan Ekspor		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.09	Pembinaan Pertanian Regional	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.09.01	Penyuluhan Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.10.01	Pengelolaan Sarana Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.10.01.01	Pembangunan Prasarana Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	SRG.10.01. Pengelolaan Sarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.10.01.02	Pengawasan Sarana Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	SRG.10.01. Pengelolaan Sarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.10.01.03	Pengelolaan Mikro Organisme	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	SRG.10.01. Pengelolaan Sarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.10.01.04	Pengelolaan Peredaran Benih/Bibit Ternak	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	SRG.10.01. Pengelolaan Sarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.10.01.05	Pengelolaan Peredaran Hijauan Pakan Ternak	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana	SRG.10.01. Pengelolaan Sarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				Pertanian			
SRG.10.01.06	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	SRG.10.01. Pengelolaan Sarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.10.01.07	Pengelolaan Tumbuhan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	SRG.10.01. Pengelolaan Sarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.10.01.08	Pengembangan Prasarana Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	SRG.10.01. Pengelolaan Sarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11	Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.01	Penanganan Kerawanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.01.01	Pengelolaan Peta Kerentanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	SRG.11.01. Penanganan Kerawanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.01.02	Pengelolaan Peta Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	SRG.11.01. Penanganan Kerawanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.02	Pengawasan Keamanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.02.01	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	SRG.11.02. Pengawasan Keamanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.03	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.03.01	Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	SRG.11.03. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.04	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.04.01	Pencapaian Target Konsumsi Pangan Angka Kecukupan Gizi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	SRG.11.04. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.11.04.02	Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	SRG.11.04. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.04.03	Penyaluran Pangan Lain	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	SRG.11.04. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.11.04.04	Penyaluran Pangan Pokok	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	SRG.11.04. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.12	Pembinaan Peternakan Regional	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.12.01	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.12.01.01	Pelayanan Jasa Laboratorium Daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional	SRG.12.01. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.12.01.02	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional	SRG.12.01. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.12.01.03	Pengawasan Pemasukan Hewan Daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional	SRG.12.01. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.12.01.04	Pengawasan Pengeluaran Hewan Daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional	SRG.12.01. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.12.01.05	Pengawasan Produk Hewan Daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional	SRG.12.01. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.12.01.06	Pengelolaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional	SRG.12.01. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.12.01.07	Pengelolaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional	SRG.12.01. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.12.01.08	Penjaminan Kesehatan Hewan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional	SRG.12.01. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.12.01.09	Penjaminan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional	SRG.12.01. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.13	Perikanan Budidaya	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.13.01	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.13.02	Penyaluran Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.14	Pembinaan Perikanan Regional	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.14.01	Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.14.01.01	Pemberdayaan Nelayan Kecil	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional	SRG.14.01. Pengelolaan Perikanan Tangkap		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.14.01.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan Danau	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional	SRG.14.01. Pengelolaan Perikanan Tangkap		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.14.01.03	Pengelolaan Penangkapan Ikan Genangan Air Lain	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional	SRG.14.01. Pengelolaan Perikanan Tangkap		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.14.01.04	Pengelolaan Penangkapan Ikan	RAB.02 Ekonomi dan	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan	SRG.14.01. Pengelolaan		Dinas Ketahanan Pangan,

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Rawa	Industri		Perikanan Regional	Perikanan Tangkap		Pertanian dan Perikanan
SRG.14.01.05	Pengelolaan Penangkapan Ikan Sungai	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional	SRG.14.01. Pengelolaan Perikanan Tangkap		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.14.01.06	Pengelolaan Penangkapan Ikan Waduk	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional	SRG.14.01. Pengelolaan Perikanan Tangkap		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.15	Pengelolaan Hasil Perikanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.15.01	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.15.01.01	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Usaha Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	SRG.15.01. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.15.01.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Usaha Pengolahan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	SRG.15.01. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.15.01.03	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Usaha Skala Mikro dan Kecil	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	SRG.15.01. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.15.01.04	Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	SRG.15.01. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
SRG.16	Pembinaan Penanaman Modal Regional	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.16.01	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.16.01.01	Pembuatan Peta Potensi Investasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	SRG.16.01. Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.16.01.02	Penetapan Pemberian	RAB.02 Ekonomi dan	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan	SRG.16.01. Pengembangan		Dinas Penanaman Modal

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal	Industri		Penanaman Modal Regional	Iklm Penanaman Modal		dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.16.02	Pengendalian Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.16.02.01	Pengendalian Penanaman Modal Kewenangan Daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	SRG.16.02. Pengendalian Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.16.03	Promosi Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.16.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	SRG.16.03. Promosi Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.17	Manajemen Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.17.01	Pelayanan Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.17.01.01	Pelayanan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	SRG.17.01. Pelayanan Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.17.02	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.17.02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Non Perizinan Terintegrasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	SRG.17.02. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.18	Manajemen Perizinan Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.03 Manajemen Perizinan Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.18.01	Pelayanan Perizinan Penanaman	RAB.02 Ekonomi dan	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.03 Manajemen			Dinas Penanaman Modal

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Modal	Industri		Perizinan Penanaman Modal			dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.18.01.01	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.03 Manajemen Perizinan Penanaman Modal	SRG.18.01. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.18.02	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Terintegrasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.03 Manajemen Perizinan Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
SRG.19	Pembinaan Koperasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.01 Pembinaan Koperasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.19.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.01 Pembinaan Koperasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.19.02	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.01 Pembinaan Koperasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.20	Pengawasan Koperasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.20.01	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.20.01.01	Pengelolaan Koperasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi	SRG.20.01. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.20.01.02	Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi	SRG.20.01. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.20.02	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.20.02.01	Penilaian Kesehatan Koperasi	RAB.02 Ekonomi dan	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04	SRG.20.02. Penilaian		Dinas Koperasi, UKM,

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Industri		Pengawasan Koperasi	Kesehatan KSP/USP Koperasi		Perindustrian dan Perdagangan
SRG.21	Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.21.01	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.21.01.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Izin Usaha Toko Swalayan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah	SRG.21.01. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.21.01.02	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah	SRG.21.01. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.21.01.03	Penerbitan Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah	SRG.21.01. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.22	Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.22.01	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.22.01.01	Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Kemitraan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	SRG.22.01. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.22.01.02	Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Kemudahan Perizinan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	SRG.22.01. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.22.01.03	Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Pendataan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	SRG.22.01. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.22.01.04	Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kepentingan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	SRG.22.01. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.22.02	Pengembangan UMKM	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.22.02.01	Pengembangan Usaha Mikro Orientasi Peningkatan Skala Usaha	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	SRG.22.02. Pengembangan UMKM		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
SRG.23	Pembinaan Pariwisata Regional	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.23.01	Pemasaran Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.23.01.01	Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Daya Tarik Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	SRG.23.01. Pemasaran Pariwisata		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.23.01.02	Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Destinasi Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	SRG.23.01. Pemasaran Pariwisata		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.23.01.03	Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Kawasan Strategis Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	SRG.23.01. Pemasaran Pariwisata		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.23.01.04	Pemasaran Pariwisata Luar Negeri Daya Tarik Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	SRG.23.01. Pemasaran Pariwisata		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.23.01.05	Pemasaran Pariwisata Luar Negeri Destinasi Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	SRG.23.01. Pemasaran Pariwisata		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.23.01.06	Pemasaran Pariwisata Luar Negeri Kawasan Strategis Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	SRG.23.01. Pemasaran Pariwisata		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.23.02	Peningkatan Daya Tarik Destinasi	RAB.02 Ekonomi dan	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan			Dinas Pariwisata, Pemuda

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Pariwisata	Industri		Pariwisata Regional			dan Olah Raga
SRG.23.02.01	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	SRG.23.02. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.23.02.02	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	SRG.23.02. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.23.02.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	SRG.23.02. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.24	Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.24.01	Penataan Bangunan dan Lingkungan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.24.02	Penataan Bangunan Gedung	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.24.02.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	SRG.24.02. Penataan Bangunan Gedung		Dinas Pekerjaan Umum
SRG.24.02.02	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	SRG.24.02. Penataan Bangunan Gedung		Dinas Pekerjaan Umum
SRG.24.02.03	Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	SRG.24.02. Penataan Bangunan Gedung		Dinas Pekerjaan Umum
SRG.24.03	Pengelolaan Sistem Drainase	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.24.04	Pengembangan Jasa Konstruksi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur			Dinas Pekerjaan Umum

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				Pekerjaan Umum			
SRG.24.04.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	SRG.24.04. Pengembangan Jasa Konstruksi		Dinas Pekerjaan Umum
SRG.24.05	Penyelenggaraan Jalan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.25	Pengelolaan Air Limbah Domestik	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.25.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.25.01.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik	SRG.25.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Dinas Pekerjaan Umum
SRG.25.02	Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.25.02.01	Pengumpulan Limbah B3	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik	SRG.25.02. Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.25.02.02	Penyimpanan Sementara Limbah B3	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik	SRG.25.02. Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.26	Pengelolaan Sumber Daya Air	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.26.01	Pengelolaan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai (WS)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.26.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya			Dinas Pekerjaan Umum

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				Air			
SRG.26.03	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.26.04	Pengembangan Sistem Drainase	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pekerjaan Umum
SRG.27	Pembinaan Transmigrasi Regional	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.02 Transmigrasi	RAB.03.02.01 Pembinaan Transmigrasi Regional			Dinas Tenaga Kerja
SRG.27.01	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.02 Transmigrasi	RAB.03.02.01 Pembinaan Transmigrasi Regional			Dinas Tenaga Kerja
SRG.27.01.01	Penataan Persebaran Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.02 Transmigrasi	RAB.03.02.01 Pembinaan Transmigrasi Regional	SRG.27.01. Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja
SRG.28	Bidang Transmigrasi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.02 Transmigrasi	RAB.03.02.02 Bidang Transmigrasi			Dinas Tenaga Kerja
SRG.28.01	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Bidang Transmigrasi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.02 Transmigrasi	RAB.03.02.02 Bidang Transmigrasi			Dinas Tenaga Kerja
SRG.28.01.01	Pelatihan Unit Kompetensi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.02 Transmigrasi	RAB.03.02.02 Bidang Transmigrasi	SRG.28.01. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Bidang Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja
SRG.29	Pengelolaan Transportasi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi			Dinas Perhubungan
SRG.29.01	Pengelolaan Pelayaran	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi			Dinas Perhubungan
SRG.29.01.01	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	SRG.29.01. Pengelolaan Pelayaran		Dinas Perhubungan
SRG.29.02	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi			Dinas Perhubungan
SRG.29.02.01	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	SRG.29.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
SRG.29.02.02	Manajemen dan Rekayasa Lalu	RAB.03 Pembangunan	RAB.03.03	RAB.03.03.02	SRG.29.02. Penyelenggaraan		Dinas Perhubungan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Lintas Jaringan Jalan	dan Kewilayahan	Transportasi	Pengelolaan Transportasi	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
SRG.29.02.03	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	SRG.29.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
SRG.29.02.04	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	SRG.29.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
SRG.29.02.05	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	SRG.29.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
SRG.29.02.06	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	SRG.29.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
SRG.29.02.07	Pengelolaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	SRG.29.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
SRG.29.02.08	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	SRG.29.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
SRG.29.02.09	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	SRG.29.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
SRG.29.02.10	Penyediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang/ Barang Antar Kota	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	SRG.29.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
SRG.30	Pengembangan Kawasan Permukiman	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.30.01	Kawasan Permukiman	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.30.01.01	Peningkatan Kualitas Kawasan	RAB.03 Pembangunan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03	SRG.30.01. Kawasan		Dinas Permukiman dan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Permukiman Kumuh	dan Kewilayahan		Pengembangan Kawasan Permukiman	Permukiman		Penataan Ruang
SRG.30.02	Kawasan Permukiman Kumuh Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.30.02.01	Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman	SRG.30.02. Kawasan Permukiman Kumuh Daerah		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.30.03	Pengembangan Permukiman	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.30.03.01	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman	SRG.30.03. Pengembangan Permukiman		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.31	Penyelenggaraan Perumahan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.31.01	Pengembangan Perumahan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.31.01.01	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	SRG.31.01. Pengembangan Perumahan		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.31.01.02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Program Relokasi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	SRG.31.01. Pengembangan Perumahan		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.31.01.03	Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	SRG.31.01. Pengembangan Perumahan		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.31.01.04	Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Program Relokasi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	SRG.31.01. Pengembangan Perumahan		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.31.02	Perumahan Daerah	RAB.03 Pembangunan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05			Dinas Permukiman dan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		dan Kewilayahan		Penyelenggaraan Perumahan			Penataan Ruang
SRG.31.02.01	Pencegahan Perumahan Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	SRG.31.02. Perumahan Daerah		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.32	Pembinaan Pembangunan Regional	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional			Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.01	Manajemen Pembangunan Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional			Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.01.01	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.01. Manajemen Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.01.02	Pengelolaan Pendanaan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.01. Manajemen Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.01.03	Pengelolaan Perencanaan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.01. Manajemen Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.01.04	Pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.01. Manajemen Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.02	Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional			Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.32.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.02. Penelitian dan Pengembangan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.02.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.02. Penelitian dan Pengembangan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.02.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.02. Penelitian dan Pengembangan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.02.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.02. Penelitian dan Pengembangan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.02.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Peraturan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.02. Penelitian dan Pengembangan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.02.06	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.02. Penelitian dan Pengembangan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.02.07	Pengembangan Inovasi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.02. Penelitian dan Pengembangan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.32.02.08	Pengembangan Teknologi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	SRG.32.02. Penelitian dan Pengembangan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.33	Pembangunan Desa dan Kawasan	RAB.03 Pembangunan	RAB.03.05	RAB.03.05.03			Dinas Pemberdayaan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Pedesaan	dan Kewilayahan	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan			Masyarakat dan Desa
SRG.33.01	Administrasi Pemerintahan Desa	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.03 Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.33.01.01	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.03 Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	SRG.33.01. Administrasi Pemerintahan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.33.02	Penataan Desa	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.03 Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.33.02.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.03 Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	SRG.33.02. Penataan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.33.03	Peningkatan Kerjasama Desa	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.03 Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.33.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.03 Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	SRG.33.03. Peningkatan Kerjasama Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.34	Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.34.01	Pemberdayaan Lembaga Adat	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan	RAB.03.05.04 Pemberdayaan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
			Kawasan Atau Daerah Tertinggal	Masyarakat Desa			
SRG.34.01.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lembaga Adat	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa	SRG.34.01. Pemberdayaan Lembaga Adat		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.34.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.34.02.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Desa	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa	SRG.34.02. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.34.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.34.03.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa	SRG.34.03. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SRG.35	Tata Ruang Tanah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.01	Penatagunaan Tanah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.01.01	Penggunaan Tanah Hamparan Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.01. Penatagunaan Tanah		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.02	Peningkatan Pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.02.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang/Badan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.02. Peningkatan Pelayanan Bidang		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
					Perumahan dan Kawasan Permukiman		
SRG.35.03	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.04	Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.04.01	Pemanfaatan Ruang Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.04. Penyelenggaraan Penataan Ruang		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.04.02	Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.04. Penyelenggaraan Penataan Ruang		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.04.03	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.04. Penyelenggaraan Penataan Ruang		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.04.04	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.04. Penyelenggaraan Penataan Ruang		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.04.05	Perencanaan Tata Ruang Daerah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.04. Penyelenggaraan Penataan Ruang		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.05	Penyelesaian Ganti Kerugian	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.05.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.05. Penyelesaian Ganti Kerugian		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.06	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.06.01	Penyelesaian Masalah Santunan Tanah Pembangunan Pemda	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.06. Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.07	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.08	Redistribusi Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.08.01	Penetapan Subjek dan Objek Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.08. Redistribusi Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.09	Redistribusi Tanah	RAB.03 Pembangunan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang			Dinas Permukiman dan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		dan Wilayah		Tanah			Penataan Ruang
SRG.35.09.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.09. Redistribusi Tanah		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.10	Redistribusi Tanah Absentee	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah			Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.35.10.01	Penetapan Subjek dan Objek Tanah Absentee	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	SRG.35.10. Redistribusi Tanah Absentee		Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
SRG.36	Pembinaan Kependudukan Regional	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.01	Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.01.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	SRG.36.01. Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.01.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	SRG.36.01. Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.02	Pendaftaran Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	SRG.36.02. Pendaftaran Penduduk		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.02.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	SRG.36.02. Pendaftaran Penduduk		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.03	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.03.01	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	SRG.36.03. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.03.02	Pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	SRG.36.03. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.03.03	Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Wilayah	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	SRG.36.03. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.03.04	Pengumpulan Data Kependudukan	RAB.03 Pembangunan	RAB.03.07	RAB.03.07.01 Pembinaan	SRG.36.03. Pengelolaan		Dinas Kependudukan dan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		dan Kewilayahan	Kependudukan	Kependudukan Regional	Informasi Administrasi Kependudukan		Pencatatan Sipil
SRG.36.04	Pengelolaan Profil Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SRG.36.05	Pengendalian Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.36.05.01	Pemetaan Pengendalian Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	SRG.36.05. Pengendalian Penduduk		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37	Keluarga Berencana	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.01	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.01.01	Pembangunan Keluarga Kesejahteraan Keluarga	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.01. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.01.02	Pembangunan Keluarga Pembinaan Ketahanan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.01. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
							dan Perlindungan Anak
SRG.37.01.03	Peningkatan Peran Serta Ormas pada Pembangunan Kesejahteraan Keluarga	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.01. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.01.04	Peningkatan Peran Serta Ormas pada Pembangunan Pembinaan Ketahanan Keluarga	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.01. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.02	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.02.01	Pemberdayaan Peran Serta Ormas pada Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.02. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.02.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.02. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.02.03	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.02. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.02.04	Pengelolaan Advokasi Pengendalian Penduduk dan KB	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.02. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
							Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.02.05	Pengelolaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.02. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.02.06	Pengendalian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.02. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.02.07	Pengendalian Pelayanan KB	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.02. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.37.02.08	Peningkatan Peran Serta Ormas pada Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	SRG.37.02. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.38	Pembinaan Kesehatan Regional	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional			Dinas Kesehatan
SRG.38.01	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional			Dinas Kesehatan
SRG.38.01.01	Pengembangan Mutu Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.01. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.38.01.02	Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.01. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.38.01.03	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan UKM	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.01. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan		Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.38.01.04	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan UKP	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.01. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.38.01.05	Perencanaan Pendayagunaan SDM Kesehatan UKM	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.01. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.38.01.06	Perencanaan Pendayagunaan SDM Kesehatan UKP	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.01. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.38.02	Sediaan Makanan Minuman Bidang Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional			Dinas Kesehatan
SRG.38.02.01	Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Post Market Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.02. Sediaan Makanan Minuman Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.38.02.02	Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Post Market Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.02. Sediaan Makanan Minuman Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.38.02.03	Penerbitan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Produk Makan Minum	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.02. Sediaan Makanan Minuman Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.38.02.04	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.02. Sediaan Makanan Minuman Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.38.02.05	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.02. Sediaan Makanan Minuman Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.38.02.06	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	SRG.38.02. Sediaan Makanan Minuman Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.39	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan
SRG.39.01	Sediaan Alat Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan
SRG.39.01.01	Pemberian Izin Toko Alat Kesehatan dan Optikal	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat	SRG.39.01. Sediaan Alat Kesehatan		Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				Kesehatan			
SRG.39.02	Sediaan Farmasi Bidang Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan
SRG.39.02.01	Pemberian Izin Apotek	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan	SRG.39.02. Sediaan Farmasi Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.39.02.02	Pemberian Izin Toko Obat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan	SRG.39.02. Sediaan Farmasi Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.39.02.03	Pemberian Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan	SRG.39.02. Sediaan Farmasi Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.40	Kesehatan Masyarakat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat			Dinas Kesehatan
SRG.40.01	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat			Dinas Kesehatan
SRG.40.01.01	Advokasi Peran serta Masyarakat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	SRG.40.01. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.40.01.02	Kemitraan Peran serta Masyarakat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	SRG.40.01. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.40.01.03	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	SRG.40.01. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.40.01.04	Pengelolaan Kesehatan Promotif Preventif Daerah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	SRG.40.01. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.40.01.05	Peningkatan Peran serta Masyarakat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	SRG.40.01. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
SRG.40.02	Pemenuhan Upaya Kesehatan	RAB.04 Perlindungan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan			Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Masyarakat	Sosial dan Kesehatan		Masyarakat			
SRG.40.02.01	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM Rujukan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	SRG.40.02. Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
SRG.41	Pelayanan Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan
SRG.41.01	Pemenuhan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan
SRG.41.01.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	SRG.41.01. Pemenuhan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
SRG.41.02	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan
SRG.41.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKP	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	SRG.41.02. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan		Dinas Kesehatan
SRG.41.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	SRG.41.02. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan		Dinas Kesehatan
SRG.41.03	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan
SRG.41.03.01	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	SRG.41.03. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
SRG.42	Pembinaan Sosial Regional	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional			Dinas Sosial
SRG.42.01	Pemberdayaan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional			Dinas Sosial
SRG.42.01.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	SRG.42.01. Pemberdayaan Sosial		Dinas Sosial
SRG.42.01.02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	SRG.42.01. Pemberdayaan Sosial		Dinas Sosial
SRG.42.02	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional			Bagian Kesejahteraan Rakyat

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.42.02.01	Pengelolaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	SRG.42.02. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Bagian Kesejahteraan Rakyat
SRG.42.03	Penanganan Bencana Sosial Regional	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional			Dinas Sosial
SRG.42.03.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	SRG.42.03. Penanganan Bencana Sosial Regional		Dinas Sosial
SRG.42.03.02	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	SRG.42.03. Penanganan Bencana Sosial Regional		Dinas Sosial
SRG.43	Manajemen Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial			Dinas Sosial
SRG.43.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial			Dinas Sosial
SRG.43.01.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	SRG.43.01. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Dinas Sosial
SRG.43.02	Rehabilitasi Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial			Dinas Sosial
SRG.43.02.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	SRG.43.02. Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial
SRG.43.02.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	SRG.43.02. Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial
SRG.43.02.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	SRG.43.02. Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial
SRG.43.02.04	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	SRG.43.02. Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial
SRG.44	Penanganan Fakir Miskin	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.05 Penanganan Fakir Miskin			Dinas Sosial
SRG.44.01	Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.05 Penanganan Fakir Miskin			Dinas Sosial
SRG.44.01.01	Pengelolaan Data Fakir Miskin	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.05 Penanganan Fakir Miskin	SRG.44.01. Perlindungan dan Jaminan Sosial		Dinas Sosial
SRG.45	Penanggulangan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana			Satuan Polisi Pamong Praja

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.45.01	Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana			Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.45.01.01	Pemadaman Bahan Berbahaya dan Beracun	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.01. Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.45.01.02	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.01. Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.45.01.03	Pencegahan Bahan Berbahaya dan Beracun	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.01. Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.45.01.04	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.01. Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.45.01.05	Penyelamatan Bahan Berbahaya dan Beracun	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.01. Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.45.02	Penanganan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana			Dinas Sosial
SRG.45.02.01	Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.02. Penanganan Bencana		Dinas Sosial
SRG.45.03	Penanggulangan Bencana Daerah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SRG.45.03.01	Pelayanan Evakuasi Korban Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.03. Penanggulangan Bencana Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SRG.45.03.02	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.03. Penanggulangan Bencana Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SRG.45.03.03	Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.03. Penanggulangan Bencana Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SRG.45.03.04	Pelayanan Pencegahan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.03. Penanggulangan Bencana Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SRG.45.03.05	Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.03. Penanggulangan Bencana Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.45.03.06	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	SRG.45.03. Penanggulangan Bencana Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SRG.46	Pemberdayaan Perempuan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.46.01	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.46.01.01	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Ormas	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	SRG.46.01. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.46.01.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Hukum Ormas	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	SRG.46.01. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.46.01.03	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Ormas	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	SRG.46.01. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.46.01.04	Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Ormas	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	SRG.46.01. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.46.01.05	Pengembangan Lembaga Penyedia	RAB.04 Perlindungan	RAB.04.03	RAB.04.03.02	SRG.46.01.		Dinas Pengendalian

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Layanan Pemberdayaan Perempuan	Sosial dan Kesehatan	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.47	Kesetaraan Gender	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.03 Kesetaraan Gender			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.47.01	Pengarusutamaan Gender	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.03 Kesetaraan Gender			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.47.01.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lembaga Pemerintah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.03 Kesetaraan Gender	SRG.47.01. Pengarusutamaan Gender		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.48	Perlindungan Anak	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.48.01	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.48.01.01	Pelebagaan PHA Lembaga Dunia Usaha	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	SRG.48.01. Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.48.01.02	Pelebagaan PHA Lembaga Non Pemerintah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	SRG.48.01. Pemenuhan Hak Anak (PHA)		dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.48.01.03	Pelebagaan PHA Lembaga Pemerintah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	SRG.48.01. Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.48.01.04	Pengelolaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	SRG.48.01. Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.48.02	Perlindungan Khusus Anak	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.48.02.01	Pencegahan Kekerasan Anak	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	SRG.48.02. Perlindungan Khusus Anak		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.48.02.02	Pengelolaan Layanan Anak Pemerlu Perlindungan Khusus	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	SRG.48.02. Perlindungan Khusus Anak		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.48.02.03	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak Pemerlu Perlindungan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	SRG.48.02. Perlindungan Khusus Anak		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Khusus		Perempuan				Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.48.02.04	Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Anak Pemerlu Perlindungan Khusus	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	SRG.48.02. Perlindungan Khusus Anak		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.49	Perlindungan Hak Perempuan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.05 Perlindungan Hak Perempuan			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.49.01	Perlindungan Perempuan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.05 Perlindungan Hak Perempuan			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.49.01.01	Pencegahan Kekerasan Perempuan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.05 Perlindungan Hak Perempuan	SRG.49.01. Perlindungan Perempuan		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SRG.50	Ketentraman, Ketertiban Umum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum			Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.50.01	Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum			Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.50.01.01	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	SRG.50.01. Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.50.01.02	Pemberdayaan Masyarakat	RAB.05 Ketertiban Umum	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01	SRG.50.01. Manajemen		Satuan Polisi Pamong Praja

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Pencegahan Kebakaran	dan Keselamatan		Ketentraman, Ketertiban Umum	Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran		Praja
SRG.50.02	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum			Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.50.02.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	SRG.50.02. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.50.02.02	Penegakan Peraturan Bupati/Walikota	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	SRG.50.02. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.50.02.03	Penegakan Perda Kabupaten/Kota	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	SRG.50.02. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Satuan Polisi Pamong Praja
SRG.51	Penegakan Hukum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.04 Penegakan Hukum			Bagian Hukum
SRG.51.01	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Penegakan Hukum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.04 Penegakan Hukum			Bagian Hukum
SRG.51.01.01	Fasilitasi Hukum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.04 Penegakan Hukum	SRG.51.01. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Penegakan Hukum		Bagian Hukum
SRG.51.01.02	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.04 Penegakan Hukum	SRG.51.01. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Penegakan Hukum		Bagian Hukum
SRG.52	Manajemen Tenaga Pendidikan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Manajemen Tenaga Pendidikan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.52.01	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Manajemen Tenaga Pendidikan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.52.01.01	Pemerataan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Manajemen Tenaga Pendidikan	SRG.52.01. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.52.01.02	Pemerataan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Manajemen Tenaga Pendidikan	SRG.52.01. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.52.01.03	Pemerataan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Manajemen Tenaga Pendidikan	SRG.52.01. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.52.01.04	Pemerataan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Manajemen Tenaga Pendidikan	SRG.52.01. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.52.01.05	Pemerataan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Manajemen Tenaga Pendidikan	SRG.52.01. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.52.01.06	Pemerataan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Manajemen Tenaga Pendidikan	SRG.52.01. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.53	Pembinaan Pendidikan Regional	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.53.01	Pengelolaan Pendidikan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.53.01.01	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional	SRG.53.01. Pengelolaan Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.53.02	Pengembangan Kurikulum Non Formal/Kesetaraan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.53.02.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan Non Formal	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional	SRG.53.02. Pengembangan Kurikulum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.53.03	Pengendalian Perizinan Pendidikan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.53.03.01	Penerbitan Izin Pendidikan Nonformal Penyelenggara Masyarakat	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional	SRG.53.03. Pengendalian Perizinan Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.54	Pendidikan Anak Usia Dini	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Anak Usia Dini			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.54.01	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Anak Usia Dini			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.54.02	Pengembangan Kurikulum PAUD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Anak Usia Dini			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.54.02.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	RAB.06 Pendidikan dan	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan	SRG.54.02. Pengembangan		Dinas Pendidikan dan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Pendidikan Anak Usia Dini	Tenaga Kerja		Anak Usia Dini	Kurikulum PAUD		Kebudayaan
SRG.54.03	Pengendalian Perizinan Pendidikan PAUD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Anak Usia Dini			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.54.03.01	Penerbitan Izin PAUD Penyelenggaran Masyarakat	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Anak Usia Dini	SRG.54.03. Pengendalian Perizinan Pendidikan PAUD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.55	Pendidikan Dasar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.55.01	Pengelolaan Pendidikan SD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.55.02	Pengembangan Kurikulum SD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.55.02.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Dasar	SRG.55.02. Pengembangan Kurikulum SD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.55.03	Pengendalian Perizinan Pendidikan SD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.55.03.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Penyelenggara Masyarakat	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Dasar	SRG.55.03. Pengendalian Perizinan Pendidikan SD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.56	Pendidikan Menengah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.05 Pendidikan Menengah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.56.01	Pengelolaan Pendidikan SMP	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.05 Pendidikan Menengah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.57	Bidang Ketenagakerjaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan			Dinas Tenaga Kerja
SRG.57.01	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan			Dinas Tenaga Kerja
SRG.57.01.01	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	SRG.57.01. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja
SRG.57.02	Penempatan Tenaga Kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan			Dinas Tenaga Kerja
SRG.57.02.01	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	SRG.57.02. Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.57.02.02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	SRG.57.02. Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja
SRG.57.02.03	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	SRG.57.02. Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja
SRG.57.03	Perencanaan Tenaga Kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan			Dinas Tenaga Kerja
SRG.57.03.01	Pengelolaan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	SRG.57.03. Perencanaan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja
SRG.58	Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional			Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.01	Hubungan Industrial	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional			Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.01.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.01. Hubungan Industrial		Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.01.02	Pencegahan Perselisihan Mogok Kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.01. Hubungan Industrial		Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.01.03	Pencegahan Perselisihan Penutupan Perusahaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.01. Hubungan Industrial		Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.01.04	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.01. Hubungan Industrial		Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.01.05	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.01. Hubungan Industrial		Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.01.06	Penyelesaian Perselisihan Mogok Kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.01. Hubungan Industrial		Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.01.07	Penyelesaian Perselisihan Penutupan Perusahaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.01. Hubungan Industrial		Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.02	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Regional	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional			Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.02.01	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.02. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Regional		Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.02.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	RAB.06 Pendidikan dan	RAB.06.02	RAB.06.02.02 Pembinaan	SRG.58.02. Pelatihan Kerja		Dinas Tenaga Kerja

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Swasta	Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan Regional	dan Produktivitas Tenaga Kerja Regional		
SRG.58.02.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.02. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Regional		Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.03	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional			Dinas Sosial
SRG.58.03.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.03. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Dinas Sosial
SRG.58.04	Penempatan Tenaga Kerja Regional	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional			Dinas Tenaga Kerja
SRG.58.04.01	Pelayanan Antar Kerja Daerah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	SRG.58.04. Penempatan Tenaga Kerja Regional		Dinas Tenaga Kerja
SRG.59	Pembinaan Pemuda Regional	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.59.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.59.01.01	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Daerah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional	SRG.59.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.59.01.02	Pengelolaan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional	SRG.59.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.59.01.03	Pengelolaan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional	SRG.59.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.59.01.04	Pengelolaan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional	SRG.59.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.59.01.05	Pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional	SRG.59.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.59.02	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.59.02.01	Pembinaan Organisasi Kepramukaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional	SRG.59.02. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.59.02.02	Pengembangan Organisasi Kepramukaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional	SRG.59.02. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.60	Pembinaan Olahraga Regional	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.01 Pembinaan Olahraga Regional			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.60.01	Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.01 Pembinaan Olahraga Regional			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.60.02	Pembinaan Olahraga Rekreasi	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.01 Pembinaan Olahraga Regional			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.60.03	Pembinaan Organisasi Olahraga	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.01 Pembinaan Olahraga Regional			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.61	Peningkatan Prestasi Olahraga	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.03 Peningkatan Prestasi Olahraga			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.61.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.03 Peningkatan Prestasi Olahraga			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.61.01.01	Pengelolaan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.03 Peningkatan Prestasi Olahraga	SRG.61.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.61.01.02	Pengembangan Olahraga Prestasi Daerah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.03 Peningkatan Prestasi Olahraga	SRG.61.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
SRG.62	Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.01.01	Pembinaan dan Pengawasan Usaha	RAB.07 Lingkungan dan	RAB.07.05 Lingkungan	RAB.07.05.01 Pembinaan	SRG.62.01. Pembinaan dan		Dinas Lingkungan Hidup

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	dan Kegiatan Izin Lingkungan	Sumber Daya Alam	Hidup	Lingkungan Hidup Regional	Pengawasan Izin Lingkungan		
SRG.62.02	Pembinaan dan Pengawasan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.02.01	Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan Kegiatan izin PPLH	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.02. Pembinaan dan Pengawasan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.03	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.03.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.03. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.04	Pengelolaan Persampahan	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.04.01	Pembinaan Pengelolaan Sampah Diselenggarakan Swasta	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.04. Pengelolaan Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.04.02	Penerbitan Izin Pemrosesan Akhir Sampah Diselenggarakan Swasta	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.04. Pengelolaan Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.04.03	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah Diselenggarakan Swasta	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.04. Pengelolaan Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.04.04	Penerbitan Izin Pengangkutan Sampah Diselenggarakan Swasta	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.04. Pengelolaan Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.04.05	Pengawasan Pengelolaan Sampah	RAB.07 Lingkungan dan	RAB.07.05 Lingkungan	RAB.07.05.01 Pembinaan	SRG.62.04. Pengelolaan		Dinas Lingkungan Hidup

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Diselenggarakan Swasta	Sumber Daya Alam	Hidup	Lingkungan Hidup Regional	Persampahan		
SRG.62.04.06	Pengelolaan Sampah Daerah	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.04. Pengelolaan Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.05	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.05.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.05. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.06	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.06.01	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.06. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.06.02	Penanggulangan Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.06. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.06.03	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.06. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.07	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.07.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.07. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.08	Peningkatan Pelatihan Lingkungan Hidup Masyarakat	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.08.01	Pelatihan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan	RAB.07.05 Lingkungan	RAB.07.05.01 Pembinaan	SRG.62.08. Peningkatan		Dinas Lingkungan Hidup

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Lembaga Kemasyarakatan	Sumber Daya Alam	Hidup	Lingkungan Hidup Regional	Pelatihan Lingkungan Hidup Masyarakat		
SRG.62.09	Peningkatan Pendidikan Lingkungan Hidup Masyarakat	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.09.01	Pendidikan Lingkungan Hidup Lembaga Kemasyarakatan	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.09. Peningkatan Pendidikan Lingkungan Hidup Masyarakat		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.10	Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.10.01	Penyuluhan Lingkungan Hidup Lembaga Kemasyarakatan	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.10. Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.11	Perencanaan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.11.01	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.11. Perencanaan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.62.11.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	SRG.62.11. Perencanaan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.63	Pelestarian Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.03 Pelestarian Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.63.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.03 Pelestarian Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup
SRG.63.01.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.03 Pelestarian Lingkungan Hidup	SRG.63.01. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Dinas Lingkungan Hidup
SRG.64	Pembinaan Kebudayaan Regional	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.64.01	Pengelolaan Permuseuman	RAB.08 Budaya dan	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan			Dinas Pendidikan dan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		Agama		Kebudayaan Regional			Kebudayaan
SRG.64.01.01	Pengelolaan Museum	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional	SRG.64.01. Pengelolaan Permuseuman		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.64.02	Pengembangan Bahasa dan Sastra	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.64.02.01	Pengelolaan Bahasa dan Sastra	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional	SRG.64.02. Pengembangan Bahasa dan Sastra		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.64.03	Pengembangan Kebudayaan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.64.03.01	Pelestarian Kesenian Tradisional Pelaku Masyarakat	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional	SRG.64.03. Pengembangan Kebudayaan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.64.03.02	Pembinaan Lembaga Adat	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional	SRG.64.03. Pengembangan Kebudayaan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.64.03.03	Pengelolaan Kebudayaan Pelaku Masyarakat	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional	SRG.64.03. Pengembangan Kebudayaan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.64.04	Pengembangan Kesenian Tradisional	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.64.04.01	Pembinaan Kesenian Masyarakat	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional	SRG.64.04. Pengembangan Kesenian Tradisional		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.65	Pelestarian Cagar Budaya	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.03 Pelestarian Cagar Budaya			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.65.01	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.03 Pelestarian Cagar Budaya			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.65.01.01	Penetapan Cagar Budaya	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.03 Pelestarian Cagar Budaya	SRG.65.01. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.65.01.02	Pengelolaan Cagar Budaya	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.03 Pelestarian Cagar Budaya	SRG.65.01. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.66	Manajemen Budaya	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.04 Manajemen Budaya			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.66.01	Pembinaan Sejarah	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.04 Manajemen Budaya			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SRG.66.01.01	Pembinaan Sejarah Lokal Daerah	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.04 Manajemen Budaya	SRG.66.01. Pembinaan Sejarah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.67	Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional			Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.01	Pembinaan Perpustakaan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional			Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.01.01	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	SRG.67.01. Pembinaan Perpustakaan		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.01.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	SRG.67.01. Pembinaan Perpustakaan		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.02	Pengelolaan Arsip	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional			Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.02.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	SRG.67.02. Pengelolaan Arsip		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.02.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	SRG.67.02. Pengelolaan Arsip		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.02.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	SRG.67.02. Pengelolaan Arsip		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.03	Perizinan Penggunaan Arsip	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional			Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.03.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Tertutup	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	SRG.67.03. Perizinan Penggunaan Arsip		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.04	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional			Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.67.04.01	Pemusnahan Arsip Lingkungan Pemerintah Daerah	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	SRG.67.04. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.04.02	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	SRG.67.04. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.67.04.03	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	SRG.67.04. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
SRG.68	Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum			Sekretariat Dewan
SRG.68.01	Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum			Sekretariat Dewan
SRG.68.01.01	Fasilitasi Tugas DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	SRG.68.01. Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD		Sekretariat Dewan
SRG.68.01.02	Pembentukan Peraturan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	SRG.68.01. Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD		Sekretariat Dewan
SRG.68.01.03	Pembentukan Peraturan DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	SRG.68.01. Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD		Sekretariat Dewan
SRG.68.01.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	SRG.68.01. Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD		Sekretariat Dewan
SRG.68.01.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	SRG.68.01. Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD		Sekretariat Dewan
SRG.68.02	Pengelolaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum			Bagian Umum dan Protokol

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.68.02.01	Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	SRG.68.02. Pengelolaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Bagian Umum dan Protokol
SRG.68.02.02	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	SRG.68.02. Pengelolaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Bagian Umum dan Protokol
SRG.69	Pembinaan Otonomi Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.03 Pembinaan Otonomi Daerah			Bagian Pemerintahan
SRG.69.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.03 Pembinaan Otonomi Daerah			Bagian Pemerintahan
SRG.70	Pembinaan Keuangan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah			Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
SRG.70.01	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah			Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
SRG.70.01.01	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	SRG.70.01. Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
SRG.70.01.02	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	SRG.70.01. Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
SRG.70.01.03	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	SRG.70.01. Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
SRG.70.02	Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah			Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
SRG.70.03	Perekonomian dan Pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah			Bagian Perekonomian
SRG.70.03.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	SRG.70.03. Perekonomian dan Pembangunan		Bagian Perekonomian
SRG.71	Pengadaan dan Manajemen Aset	RAB.09 Pemerintahan	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan			Badan Pengelola

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		Umum		dan Manajemen Aset			Keuangan dan Pendapatan Daerah
SRG.71.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset			Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
SRG.71.02	Penunjang Urusan Pemerintah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset			Bagian Umum dan Protokol
SRG.71.02.01	Administrasi Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	SRG.71.02. Penunjang Urusan Pemerintah		Bagian Umum dan Protokol
SRG.71.02.01.01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	SRG.71.02. Penunjang Urusan Pemerintah	SRG.71.02.01. Administrasi Barang Milik Daerah	Bagian Umum dan Protokol
SRG.71.02.01.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	SRG.71.02. Penunjang Urusan Pemerintah	SRG.71.02.01. Administrasi Barang Milik Daerah	Bagian Umum dan Protokol
SRG.71.02.01.03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	SRG.71.02. Penunjang Urusan Pemerintah	SRG.71.02.01. Administrasi Barang Milik Daerah	Bagian Umum dan Protokol
SRG.71.02.01.04	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	SRG.71.02. Penunjang Urusan Pemerintah	SRG.71.02.01. Administrasi Barang Milik Daerah	Bagian Umum dan Protokol
SRG.71.02.01.05	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	SRG.71.02. Penunjang Urusan Pemerintah	SRG.71.02.01. Administrasi Barang Milik Daerah	Bagian Umum dan Protokol
SRG.71.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
SRG.72	Pengelolaan Informatika	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika			Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.72.01	Aplikasi Informatika	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika			Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.72.01.01	Pengelolaan e-Government	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika	SRG.72.01. Aplikasi Informatika		Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.72.01.02	Pengelolaan Nama Domain	RAB.09 Pemerintahan	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02	SRG.72.01. Aplikasi		Dinas Komunikasi dan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		Umum		Pengelolaan Informatika	Informatika		Informatika
SRG.72.02	Pengelolaan Jaringan TIK	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika			Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.72.02.01	Pengelolaan Pusat Data Pemda	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika	SRG.72.02. Pengelolaan Jaringan TIK		Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.72.03	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika			Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.72.03.01	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemda	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika	SRG.72.03. Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi		Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.72.04	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika			Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.73	Pengelolaan Data Statistik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik			Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.73.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik			Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.73.01.01	Pembangunan Metadata Statistik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	SRG.73.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.73.01.02	Pengembangan Infrastruktur Portal Data	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	SRG.73.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.73.01.03	Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	SRG.73.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.74	Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik			Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.74.01	Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik			Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.74.01.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	SRG.74.01. Informasi dan Komunikasi Publik		Dinas Komunikasi dan Informatika
SRG.75	Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional			Bagian Pembangunan
SRG.75.01	Pengelolaan Administrasi pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional			Bagian Pembangunan
SRG.75.02	Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional			Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.75.02.01	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	SRG.75.02. Perencanaan Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.75.02.02	Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	SRG.75.02. Perencanaan Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.75.02.03	Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	SRG.75.02. Perencanaan Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
SRG.76	Pengelolaan Program Kerja Organisasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Pengelolaan Program Kerja Organisasi			Bagian Organisasi
SRG.76.01	Penataan Organisasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan	RAB.09.05.07 Pengelolaan Program			Bagian Organisasi

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
			Pembangunan Nasional	Kerja Organisasi			
SRG.76.01.01	Monev Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Pengelolaan Program Kerja Organisasi	SRG.76.01. Penataan Organisasi		Bagian Organisasi
SRG.76.01.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Pengelolaan Program Kerja Organisasi	SRG.76.01. Penataan Organisasi		Bagian Organisasi
SRG.76.01.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Pengelolaan Program Kerja Organisasi	SRG.76.01. Penataan Organisasi		Bagian Organisasi
SRG.77	Pengelolaan Aparatur Negara	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.77.01	Kepegawaian ASN Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.77.01.01	Pengadaan Kepegawaian ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	SRG.77.01. Kepegawaian ASN Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.77.01.02	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	SRG.77.01. Kepegawaian ASN Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.77.01.03	Pengembangan Kompetensi ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	SRG.77.01. Kepegawaian ASN Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.77.01.04	Promosi ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	SRG.77.01. Kepegawaian ASN Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.77.02	Pengembangan SDM ASN	RAB.09 Pemerintahan	RAB.09.06 Aparatur	RAB.09.06.01			Badan Kepegawaian dan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		Umum	Negara	Pengelolaan Aparatur Negara			Pengembangan SDM
SRG.77.02.01	Pengembangan Kompetensi Fungsional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	SRG.77.02. Pengembangan SDM ASN		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.77.02.02	Pengembangan Kompetensi Manajerial	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	SRG.77.02. Pengembangan SDM ASN		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.78	Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara			Bagian Umum dan Protokol
SRG.78.01	Administrasi Kepegawaian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara			Bagian Umum dan Protokol
SRG.78.01.01	Monev Penilaian Kinerja Pegawai	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.01. Administrasi Kepegawaian		Bagian Umum dan Protokol
SRG.78.01.02	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.01. Administrasi Kepegawaian		Bagian Umum dan Protokol
SRG.78.01.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.01. Administrasi Kepegawaian		Bagian Umum dan Protokol
SRG.78.01.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.01. Administrasi Kepegawaian		Bagian Umum dan Protokol
SRG.78.01.05	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.01. Administrasi Kepegawaian		Bagian Umum dan Protokol
SRG.78.01.06	Peningkatan Sarpras Disiplin Pegawai	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.01. Administrasi Kepegawaian		Bagian Umum dan Protokol
SRG.78.02	Kepegawaian Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.78.02.01	Mutasi ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.02. Kepegawaian Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.78.02.02	Pemberhentian Kepegawaian ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.02. Kepegawaian Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.78.02.03	Penilaian Kinerja Aparatur	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.02. Kepegawaian Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.78.03	Pengembangan SDM	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		Umum	Negara	Aparatur Sipil Negara			Pengembangan SDM
SRG.78.03.01	Kelembagaan Kompetensi Fungsional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.03. Pengembangan SDM		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.78.03.02	Kelembagaan Kompetensi Manajerial	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.03. Pengembangan SDM		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.78.03.03	Sertifikasi Kompetensi Fungsional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.03. Pengembangan SDM		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.78.03.04	Sertifikasi Kompetensi Manajerial	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	SRG.78.03. Pengembangan SDM		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
SRG.79	Pengawasan Aparatur Negara	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.09 Pengawasan Aparatur Negara			Inspektorat
SRG.79.01	Pengelolaan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.09 Pengawasan Aparatur Negara			Inspektorat
SRG.79.01.01	Pendampingan dan Asistensi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.09 Pengawasan Aparatur Negara	SRG.79.01. Pengelolaan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi ASN		Inspektorat
SRG.80	Ketahanan Nasional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.80.01	Manajemen Budaya Ketahanan Nasional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.80.01.01	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Budaya	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	SRG.80.01. Manajemen Budaya Ketahanan Nasional		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.80.02	Manajemen Ketahanan Ekonomi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.80.02.01	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	SRG.80.02. Manajemen Ketahanan Ekonomi		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.80.03	Manajemen Sosial Ketahanan Nasional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.80.03.01	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Sosial	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	SRG.80.03. Manajemen Sosial Ketahanan Nasional		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.80.04	Peningkatan Fasilitas Penanganan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Konflik Sosial	Umum	Kesekretariatan Negara	Nasional			dan Politik
SRG.80.04.01	Pengelolaan Kebijakan Teknis Penanganan Konflik Sosial	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	SRG.80.04. Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.80.05	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.80.05.01	Pengelolaan Kebijakan Teknis Kewaspadaan Nasional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	SRG.80.05. Peningkatan Kewaspadaan Nasional		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.81	Pengawasan Pemerintahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan			Inspektorat
SRG.81.01	Pengelolaan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan			Inspektorat
SRG.81.01.01	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	SRG.81.01. Pengelolaan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi		Inspektorat
SRG.81.02	Penyelenggaraan Pengawasan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan			Inspektorat
SRG.81.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	SRG.81.02. Penyelenggaraan Pengawasan		Inspektorat
SRG.81.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	SRG.81.02. Penyelenggaraan Pengawasan		Inspektorat
SRG.82	Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.82.01	Penguatan Ideologi Pancasila	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.82.01.01	Pengelolaan Kebijakan Teknis	RAB.09 Pemerintahan	RAB.09.07	RAB.09.07.07	SRG.82.01. Penguatan		Badan Kesatuan Bangsa

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Bidang Ideologi Pancasila	Umum	Kesekretariatan Negara	Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	Ideologi Pancasila		dan Politik
SRG.82.02	Penguatan Karakter Kebangsaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.82.02.01	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Karakter Kebangsaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	SRG.82.02. Penguatan Karakter Kebangsaan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.83	Fasilitasi politik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitasi politik			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.83.01	Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitasi politik			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.83.01.01	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Etika Budaya Politik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitasi politik	SRG.83.01. Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.83.01.02	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitasi politik	SRG.83.01. Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.83.01.03	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Pemantauan Situasi Politik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitasi politik	SRG.83.01. Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.83.01.04	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Pemilihan Umum	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitasi politik	SRG.83.01. Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.83.01.05	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Pemilihan Umum Kepala Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitasi politik	SRG.83.01. Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.83.01.06	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Politik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitasi politik	SRG.83.01. Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.83.01.07	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Peningkatan Demokrasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitasi politik	SRG.83.01. Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
SRG.83.01.08	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Perwakilan dan Partai Politik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitasi politik	SRG.83.01. Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.84	Organisasi Masyarakat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.09 Organisasi Masyarakat			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.84.01	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.09 Organisasi Masyarakat			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.84.01.01	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan Ormas	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.09 Organisasi Masyarakat	SRG.84.01. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SRG.84.01.02	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan Ormas	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.09 Organisasi Masyarakat	SRG.84.01. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis

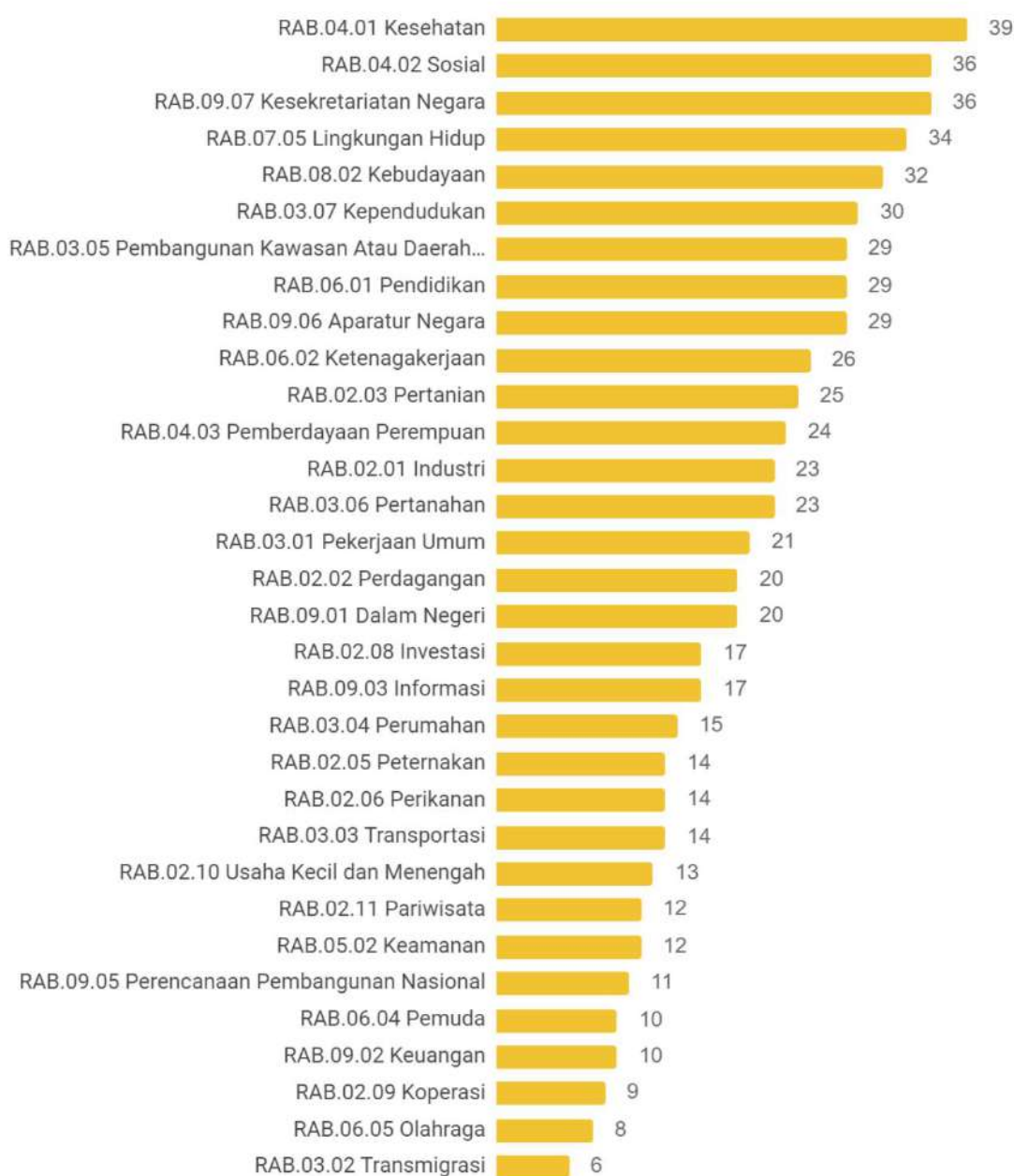
Merujuk pada hasil pemetaan proses bisnis pada sub bab sebelumnya, dapat dianalisis pengelompokan Level 1 RAB Nasional sebagai berikut:



Grafik 3.2.1.2.1. Grafik Jumlah Proses Bisnis RAB berdasarkan Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Sragen

Berdasarkan Level 1 RAB Nasional, sebagian besar proses bisnis masuk dalam RAB.02 Ekonomi dan Industri dan RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan. Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

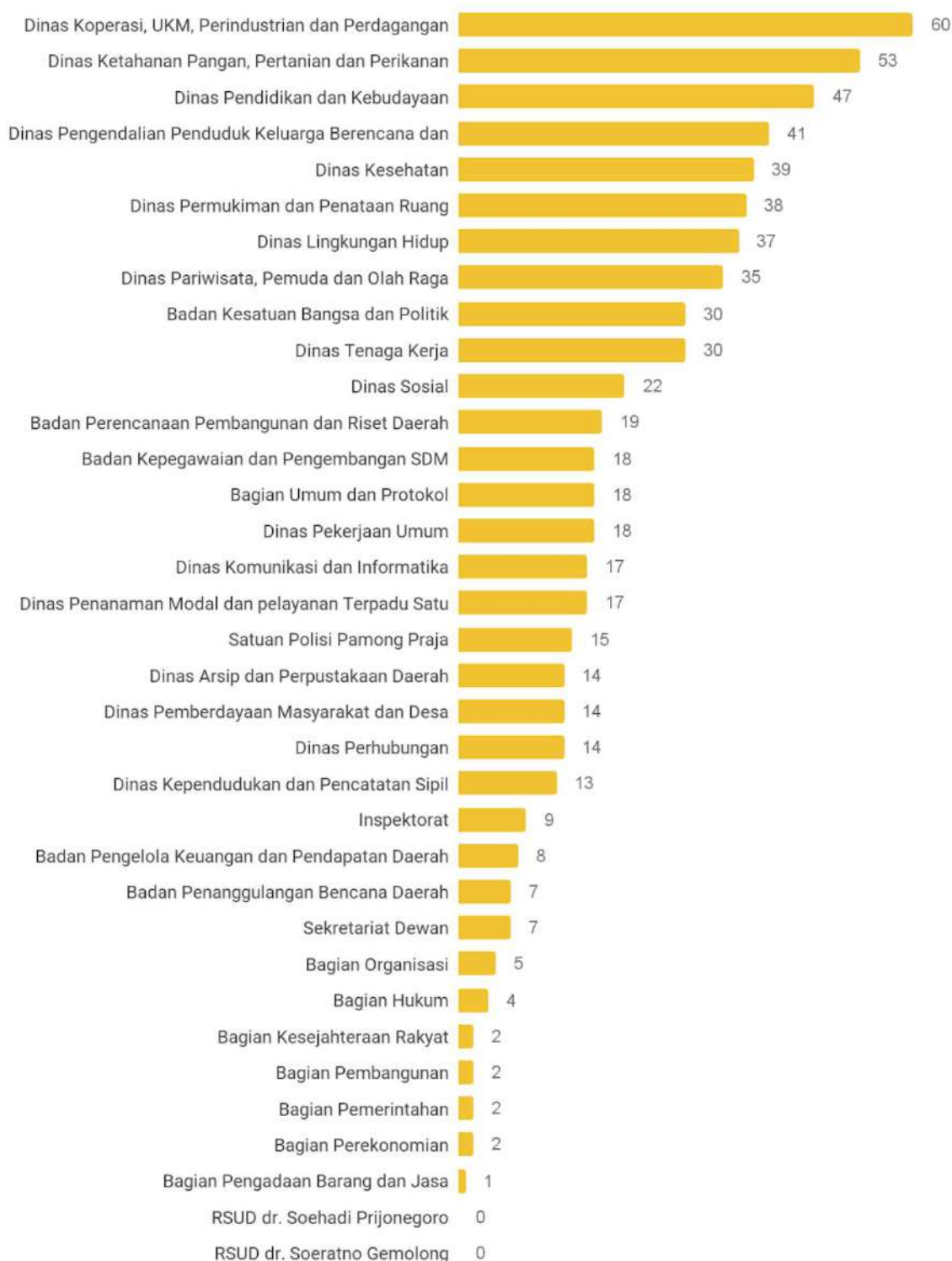
RAB Level 2



Grafik 3.2.1.2.2. Grafik Jumlah Proses Bisnis berdasarkan RAB Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Sragen

Berdasarkan level 2 RAB nasional, kategori terbanyak terdapat pada RAB.04.01. Kesehatan sejumlah 39 proses bisnis, RAB.04.02 Sosial sejumlah 36 proses bisnis dan RAB.09.07 Kesekretariatan Negara dengan jumlah 36 proses bisnis. Urusan proses bisnis dengan jumlah paling sedikit terdapat pada RAB.03.02 Transmigrasi dengan jumlah 6 proses bisnis. Tentunya varietas jumlah proses bisnis tergantung pada tipe perangkat daerah. Kondisi ini dapat berubah sesuai perkembangan dan inovasi daftar metadata probis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Unit Kerja



Grafik 3.2.1.2.3. Grafik Jumlah Proses Bisnis pada Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 3.2.1.2.3. Kepemilikan proses bisnis didominasi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sejumlah 60 Proses Bisnis dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sejumlah 53 proses bisnis. Sedangkan Dinas yang memiliki proses bisnis paling sedikit terletak pada Sekda-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki 1 proses bisnis. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro dan RSUD dr. Soeratno Gemolong sejumlah 0 proses bisnis. Rumah Sakit merupakan unit yang mengelola sumber daya fisik (manusia, uang, mesin/alat

kesehatan/aset, material seperti obat, reagen, alat tulis kantor, barang habis pakai dan sejenisnya). Proses bisnis Rumah Sakit melibatkan data terstruktur yang dapat dikelola dengan relational database management system, selain itu terdapat proses bisnis yang melibatkan data yang tidak terstruktur seperti alur kerja, surat disposisi, email, manajemen proyek, kolaborasi, *team work*, manajemen dokumen dan sejenisnya. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan proses bisnis pada perangkat daerah sangat beragam dan tergantung pada karakteristik serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen.

3.2.2. Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur data memberikan gambaran mengenai daftar data pokok yang dimiliki seluruh perangkat daerah. Daftar data ini perlu dikumpulkan, disimpan, diproses, dan disajikan secara elektronik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi pemerintah dapat diakses dengan mudah, aman, dan terintegrasi secara efektif di antara lembaga pemerintah yang berbeda.

3.2.2.1. Katalog Data dan Informasi

Data dan Informasi dalam Arsitektur SPBE merupakan suatu kumpulan data pokok (*by name, by address*) hasil *output* dari pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Setiap data yang dikelola berupa data yang bersifat publik, terbatas, dan rahasia berdasarkan dari hasil survei terhadap seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen Selanjutnya daftar data yang ada diselaraskan dengan referensi arsitektur data SPBE Nasional. Tabel 3.2.2.1.1. merupakan ringkasan dari katalog data dan informasi Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun katalog data dan informasi selengkapnya ditunjukkan pada link: <https://bit.ly/metadataspbsragen>.

Tabel 3.2.2.1.1. Daftar Data dan Informasi yang dikelola oleh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-001	Data Cuti Pegawai	e-Cuti	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Cuti Pegawai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-002	Data Kartu Asuransi (KARIS)	KARISMA PATEN	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Aparatur Negara	Layanan Kartu Asuransi (KARIS)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-003	Data Kartu Pegawai (KARPEG)	KARISMA PATEN	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Aparatur Negara	Layanan Kartu Pegawai (KARPEG)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-004	Data Kartu Suami/Istri (KARSU)	KARISMA PATEN	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Aparatur Negara	Layanan Kartu Suami/Istri (KARSU)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-005	Data Presensi Pegawai	SAKTI	Terbatas	Harian	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Absensi Pegawai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-006	Data Profil Kepegawaian	SIMPEG	Terbatas	Realtime	Kepegawaian ASN Daerah	Layanan Profil Pegawai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-007	Data Tunjangan Hari Tua (TASPEN)	KARISMA PATEN	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Aparatur Negara	Layanan Tunjangan Hari Tua (TASPEN)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-008	Data Usulan Alih Jabatan Fungsional / Pemberhentian Jabatan		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-009	Data SK Alih Jabatan Fungsional / Pemberhentian Jabatan		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-010	Data Surat Pemerintah Pemeriksaan		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-011	Data BAP Pemeriksa		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-012	Data BAP PD		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-013	Data SK Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat	I DIS	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-014	Data SK Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	I'DIS	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-015	Data Usulan Kenaikan Jabatan		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
					Pengadaan Kepegawaian ASN				
DATA-SRG-016	Data SK Kenaikan Jabatan		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-017	Data SK Kenaikan Jabatan Utama		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-018	Data Kinerja Harian		Terbatas	Harian	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-019	Data Perhitungan TPP	SIMANIS	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-020	Data Usulan Kenaikan Pangkat	SIASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-021	Data Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat	SIASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-022	Data SK Kenaikan Pangkat	SIASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-023	Data Usulan Pengangkatan		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-024	Data SK Pengangkatan		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-025	Data ANJAB ABK		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-026	Data Usulan Formasi	e-Formasi	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-027	Data Surat Kesanggupan Bupati		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-028	Data Surat Pengajuan		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-029	Data SK MenpanRB	SSCASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-030	Data SK Penetapan Formasi		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-031	Data Formasi	SSCASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-032	Data SK Panitia Seleksi	SSCASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-033	Data CASN	SSCASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-034	Data Hasil Ujian CAT	SSCASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-035	Data Pemberkasan ASN	e-DOCU	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-036	Data SK Pengangkatan CASN	CASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-037	Data SK Pengakatan ASN	CASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-038	Data SK Persetujuan Teknis	CASN	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengadaan Kepegawaian ASN	Layanan Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
DATA-SRG-039	Data Potensi Konflik Gangguan Kamtibmas	SRIKANDI MANAH	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Kebijakan Teknis Penanganan Konflik Sosial	Layanan Pelaporan Potensi Konflik Gangguan Kamtibmas	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
DATA-SRG-040	Data Surat Keterangan Keberadaan Ormas		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan Ormas	Layanan Pencatatan Keberadaan Ormas	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
DATA-SRG-041	Data Desa Tangguh Bencana	SI SUSANA	Terbuka	Realtime	Pelayanan Pencegahan Bencana	Layanan Informasi, Komunikasi, dan Edukasi Kebencanaan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DATA-SRG-042	Data Informasi Kebencanaan	SI SUSANA	Terbuka	Realtime	Pelayanan Pencegahan Bencana	Layanan Informasi, Komunikasi, dan Edukasi Kebencanaan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DATA-SRG-043	Data Kejadian Bencana	SI SUSANA	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana	Layanan Respon Cepat Laporan Kejadian Bencana	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DATA-SRG-044	Data Anggaran SKPD	FMIS	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-045	Data Arsip Usulan Pergeseran Anggaran	e-GESER	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Pergeseran Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-046	Data Aset Tetap	SIMDA BMD	Terbatas	Tahunan	Pengadaan dan Manajemen Aset	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Aset Tetap	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-047	Data Barang Habis Pakai	SIMBAPER	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-048	Data Barang Persediaan	SIMBAPER	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-049	Data Dana Desa	OMSPAN	Terbatas	Enam Bulanan	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-050	Data Dana Transfer	SIMTRADA	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-051	Data Dana Transfer DAK Fisik	OMSPAN	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-052	Data Dana Transfer DAK Non Fisik	ALADIN	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-053	Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	SIPD	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-054	Data Gaji Pegawai	SIM GAJI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-055	Data Informasi Tanah Milik Pemerintah	SI INTAN ASRI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Informasi Tanah Milik Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-056	Data Neraca	FMIS	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Layanan Penyusunan Neraca	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-057	Data Pelaporan Penyusunan CALK	e-GESER SIKD	Terbatas	Tahunan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-058	Data Pelaporan Penyusunan LAK	e-GESER SIKD	Terbatas	Tahunan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-059	Data Pelaporan Penyusunan LO	e-GESER SIKD	Terbatas	Tahunan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Operasional (LO)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-060	Data Pelaporan Penyusunan LPE	e-GESER SIKD	Terbatas	Tahunan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-061	Data Pelaporan Penyusunan LPSAL	e-GESER SIKD	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-062	Data Pelaporan Penyusunan LRA	SINERGI 5/423 e-GESER SIKD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-063	Data Pelaporan Penyusunan Neraca	e-GESER SIKD	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Layanan Penyusunan Neraca	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-064	Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	SI INTAN ASRI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Informasi Tanah Milik Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-065	Data Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK)	FMIS	Terbatas	Tahunan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-066	Data Penyusunan Laporan Operasional (LO)	FMIS	Terbatas	Tahunan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Operasional (LO)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-067	Data Penyusunan Laporan Perubahan Entitas (LPE)	FMIS	Terbatas	Tahunan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-068	Data Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	FMIS	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-069	Data Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-070	Data Perbup Penjabaran APBD	SIPD	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Penetapan APBD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-071	Data Perbup Perubahan Penjabaran APBD	SIPD	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Perubahan APBD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-072	Data Perda APBD	SIPD	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Penetapan APBD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-073	Data Perda Perubahan APBD	SIPD	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Perubahan APBD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-074	Data Purna Pensiun	e-SKPP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-075	Data Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	e-SKPP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-076	Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	FMIS e-POS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-077	Data STS	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-078	Data BKU	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
					Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah				Pendapatan Daerah
DATA-SRG-079	Data SPJ	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-080	Data Laporan Keuangan unaudited	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-081	Data Laporan Keuangan Audited	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-082	Data Perda Pertanggungjawaban APBD	JDIH	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-083	Data Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	JDIH	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-084	Data SPD	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-085	Data SPP	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-086	Data SPM	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-087	Data Lembar Verifikasi PPKSKPD	e-POS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
					Daerah				
DATA-SRG-088	Data Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM	e-POS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-089	Data Rekening Giro OPD / Pihak ke 3	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-090	Data Ceklis SPP	e-POS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-091	Data Ringkasan SPP	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-092	Data Rincian SPP	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-093	Data Salinan DPA	FMIS	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penatausahaan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-094	Data RKA SKPD	SIPD	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-095	Data RAPBD	SIPD	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-096	Data APBD	SIPD	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-097	Data Rancangan KUA / PPAS	SIPD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-098	Data Nota Kesepakatan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-099	Data KUA dan PPAS	SIPD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-100	Data Usulan RKBMD		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-101	Data Belanja Modal	SIMDA BMD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-102	Data Kartu Inventaris Barang	SIMDA BMD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-103	Data Kartu Inventaris Ruangan	SIMDA BMD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-104	Data Usulan Penghapusan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-105	Data SK Rusak Berat		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-106	Data Surat Persetujuan Usulan Penghapusan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-107	Data Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
						Pakai			
DATA-SRG-108	Data Dokumen Risalah Lelang		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-109	Data SK Penghapusan Aset	SIMDA BMD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-110	Data Penghapusan Aset	SIMDA BMD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
DATA-SRG-111	Data Capaian Program Unggulan Bupati	SENGGUH	Terbuka	Enam Bulanan	Pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Pengendalian dan Evaluasi Program Unggulan Bupati	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-112	Data Capaian RKPD	EMONEVRKPD	Terbuka	Tahunan	Pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Pengendalian dan Evaluasi RKPD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-113	Data Dokumen Renja	Si-RENJA SIPD	Terbatas	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-114	Data Dokumen Renstra OPD	SIPD	Terbatas	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-115	Data Dokumen RKPD	SIPD	Terbatas	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-116	Data Dokumen RPJMD	SIPD	Terbatas	Lima Tahunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-117	Data Inovasi	SI-RISMA	Terbatas	Tahunan	Manajemen Pembangunan Daerah	Layanan Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-118	Data Kinerja dan Serapan Anggaran	KE-KER	Tertutup	Tahunan	Manajemen Pembangunan Daerah	Layanan Pemantauan Kinerja dan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-119	Data Nilai Kematangan Inovasi	SI-RISMA	Terbatas	Tahunan	Manajemen Pembangunan Daerah	Layanan Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-120	Data SK Bupati Tim Penyusun		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-121	Data Agenda Kerja		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-122	Data Draft Rancangan Awal Renstra PD	SIPD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-123	Data SE Bupati		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-124	Data Draft Rancangan Renstra PD	SIPD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-125	Data Draft Akhir Renstra PD	SIPD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-126	Data Perbup Bupati Renstra PD	SIPD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-127	Data SK Tim Penyusunan Rancangan Teknokratik		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-128	Data Rancangan Teknokratik RPJMD		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-129	Data Dokumen Teknokratik RPJMD		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-130	Data SK Tim Perumus		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-131	Data SK Tim Penyusun		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-132	Data Dokumen Time Schedule		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-133	Data Rancangan Awal RPJMD	SIPD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-134	Data SE Bupati Penyempurnaan Ranwal Renstra PD		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-135	Data BA Desk Renstra		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-136	Data Dokumen RTRW		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-137	Data Dokumen Rancangan RPJMD	SIPD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-138	Data BA Musrengbang RPJMD		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-139	Data Dokumen Akhir RPJMD	SIPD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-140	Data Perda RPJMD		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-141	Data Dokumen Renstra		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
DATA-SRG-142	Data Bantuan Hukum		Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Konsultasi Produk Hukum	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-143	Data Informasi dan Dokumentasi Hukum	JDIH	Terbuka	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Pemberian Informasi Hukum	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-144	Data Konsultasi Produk Hukum		Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Konsultasi Produk Hukum	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-145	Data Penyusunan Produk Hukum Daerah	SIPP DEH	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-146	Data Surat Usulan Bempemperda		Terbatas	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-147	Data Naskah Akademik		Terbatas	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-148	Data Draft Produk Hukum	SIPP DEH	Terbatas	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-149	Data Nomor Registrasi		Terbatas	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-150	Data Salinan Perda	JDIH	Terbatas	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-151	Data Metadata	JDIH	Terbatas	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-152	Data Dokumen Produk Hukum		Terbatas	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-153	Data Draft Peraturan Kepala Daerah	SIPP DEH	Terbatas	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-154	Data Salinan Peraturan Kepala Daerah	JDIH	Terbatas	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-155	Data Peraturan Kepala Daerah		Terbatas	Realtime	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Bagian Hukum
DATA-SRG-156	Data Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-157	Data Capaian Reformasi Birokrasi		Terbatas	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-158	Data Kelembagaan	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-159	Data Kematangan Organisasi Daerah	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-160	Data Kepuasan Masyarakat	SUKMA	Terbuka	Tahunan	Monev Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	Layanan Kepuasan Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	Bagian Organisasi

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
					Laksana				
DATA-SRG-161	Data Komponen SAKIP	e-SAKIP	Terbatas	Tiga Bulanan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-162	Data Manajemen Resiko Tugas Aparatur	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-163	Data Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-164	Data Monitoring dan Pengendalian Tugas Perangkat Daerah	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-165	Data Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-166	Data Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-167	Data Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-168	Data Penjaminan Mutu Pelayanan Perangkat Daerah	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-169	Data Perencanaan Pembangunan Daerah	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-170	Data SOP Pelayanan Perangkat Daerah	SIKOD ELEGAN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Organisasi
DATA-SRG-171	Data RPJMD	e-SAKIP ESR Menpan	Terbuka	Lima Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-172	Data Renstra	e-SAKIP ESR Menpan	Terbuka	Lima Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan	Bagian Organisasi

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
								Pembangunan Nasional	
DATA-SRG-173	Data Cascading	e-SAKIP ESR Menpan	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-174	Data IKU	e-SAKIP ESR Menpan	Terbuka	Lima Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-175	Data RENJA	e-SAKIP ESR Menpan	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-176	Data RKT	e-SAKIP ESR Menpan	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-177	Data Perjanjian Kinerja	e-SAKIP ESR Menpan	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-178	Data Renaksi	ESR Menpan	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-179	Data Monev Realisasi Kinerja	ESR Menpan	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-180	Data LKJIP Kabupaten	ESR Menpan	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-181	Data Hasil Reviu Kabupaten	ESR Menpan	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan	Bagian Organisasi

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
								Nasional	
DATA-SRG-182	Data LHE Perangkat Daerah	ESR Menpan	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-183	Data LPPD	ESR Menpan	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Organisasi
DATA-SRG-184	Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	LKPJ	Terbatas	Tahunan	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Pemerintahan
DATA-SRG-185	Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	ELPPD	Terbatas	Tahunan	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Pemerintahan
DATA-SRG-186	Data Pelayanan Dasar Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Sosial dan Trantibulinmas)	SPM	Terbatas	Tiga Bulanan	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Pemantauan 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Sosial dan Trantibulinmas)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Bagian Pemerintahan
DATA-SRG-187	Data Perencanaan Program dan Kegiatan OPD	SIPD	Terbatas	Tahunan	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Perencanaan Program dan Kegiatan OPD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pemerintahan
DATA-SRG-188	Data Peta Digital Penggunaan Lahan Sragen	PENGAMAN SANTET	Terbuka	Tahunan	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Fasilitas Sewa Tanah Eks Bondo Desa	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 Data Pertanahan	Bagian Pemerintahan
DATA-SRG-189	Data Dokumentasi Arsip Pengadaan	SIMPAN ASET	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengarsipan Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-190	Data Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	SULTAN	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-191	Data Monitoring Evaluasi Pengadaan	AMEL	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
	Barang dan Jasa					dan Jasa			
DATA-SRG-192	Data Paket Pengadaan	LPSE SIRUP SIKAP	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-193	Data Penilaian Kinerja Penyedia	LPSE SIRUP SIKAP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-194	Data Penyedia	LPSE SIRUP SIKAP	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-195	Data Rencana Umum Pengadaan	LPSE SIRUP SIKAP	Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-196	Data Model Dokumen Pemilihan	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-197	Data Kaji Ulang	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-198	Data Dokumen Teknis	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-199	Data Dokumen Kualifikasi	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-200	Data Dokumen Administrasi	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-201	Data Dokumen Penawaran Harga	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-202	Data BA Hasil Non Tender	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-203	Data Dokumen SPPBJ	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-204	Data Dokumen Kontrak	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-205	Data Dokumen PPK	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-206	Data BA Kaji Ulang		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-207	Data BA Hasil Tender	LPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DATA-SRG-208	Data Arsip Surat Masuk	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-209	Data Arsip Statis	INLISLITE	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Layanan Arsip Statis	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-210	Data Disposisi Surat	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-211	Data Katalog Buku	INLISLITE	Terbuka	Realtime	Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Layanan Online Public Access Catalog	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-212	Data Koleksi Buku	iSRAGEN	Terbuka	Realtime	Pembinaan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Online	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-213	Data Koleksi Buku Perpustakaan Keliling		Terbuka	Realtime	Pembinaan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Keliling	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-214	Data Lokasi Perpustakaan Keliling		Terbuka	Realtime	Pembinaan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Keliling	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-215	Data Peminjaman Buku Perpustakaan	INLISLITE	Terbatas	Realtime	Pembinaan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Umum	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-216	Data Surat Masuk dan Surat Keluar	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-217	Data TTE		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-218	Data Buku Agenda Keluar	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-219	Data Kartu Kendali Keluar	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-220	Data Surat Keluar	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-221	Data Buku Agenda Masuk	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-222	Data Kartu Kendali Masuk	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-223	Data Lembar Disposisi	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
DATA-SRG-224	Data Digitalisasi Arsip Kependudukan	TERPANA DOA	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Digitalisasi Arsip Kependudukan	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DATA-SRG-225	Data Kartu Keluarga (KK)	PELITA BARATA E-OFFICE	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penataan Pendaftaran Penduduk	Layanan Dispensasi Pindah Online Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian DUKCAPIL	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DATA-SRG-226	Data Kartu Tanda Penduduk (KTP)	PELITA E-OFFICE	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penataan Pendaftaran Penduduk	Layanan Dispensasi Pindah Online Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian DUKCAPIL	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DATA-SRG-227	Data Nomor Antrian Pelayanan Kependudukan	SIANTON	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pengambilan Nomor Antrian Online	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DATA-SRG-228	Data Pengajuan Pembuatan Dokumen Kependudukan	PANDU ONLINE SIAK	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Layanan Pengajuan Pembuatan Dokumen Kependudukan	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DATA-SRG-229	Data Pengiriman Dokumen Adminkuk Masyarakat	PELANDUK POS	Terbatas	Realtime	Pengumpulan Data Kependudukan	Layanan Pengiriman Dokumen Adminkuk Masyarakat	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DATA-SRG-230	Data Surat Keterangan Kematian	PELITA	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian DUKCAPIL	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DATA-SRG-231	Data Surat Keterangan Lahir	BARATA	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian DUKCAPIL	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DATA-SRG-232	Data Surat Keterangan Pindah	E-OFFICE	Terbatas	Realtime	Penataan Pendaftaran Penduduk	Layanan Dispensasi Pindah Online	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DATA-SRG-233	Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PSC 119 SUKOWATI/MA WAS SUKOWATI 119	Terbuka	Realtime	Pelayanan Kesehatan	Layanan Kegawatdaruratan Medis Terpadu	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	Dinas Kesehatan
DATA-SRG-234	Data Kasus Demam Berdarah Dengue	SIPENEBAR	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan	Layanan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	Dinas Kesehatan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-235	Data Kejadian Kegawatdaruratan	PSC 119 SUKOWATI/MA WAS SUKOWATI 119	Terbuka	Realtime	Pelayanan Kesehatan	Layanan Kegawatdaruratan Medis Terpadu	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	Dinas Kesehatan
DATA-SRG-236	Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKN)	SIPENTURA	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan	Layanan Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKN)	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	Dinas Kesehatan
DATA-SRG-237	Data Ketersediaan Tempat Tidur	PSC 119 SUKOWATI/MA WAS SUKOWATI 119	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan	Layanan Kegawatdaruratan Medis Terpadu	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	Dinas Kesehatan
DATA-SRG-238	Data Laka Lantas	PSC 119 SUKOWATI/MA WAS SUKOWATI 119	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan	Layanan Kegawatdaruratan Medis Terpadu	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	Dinas Kesehatan
DATA-SRG-239	Data Penanggulangan Demam Berdarah Dengue	SIPENEBAR	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan	Layanan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	Dinas Kesehatan
DATA-SRG-240	Data Posisi Ambulance	PSC 119 SUKOWATI/MA WAS SUKOWATI 119	Terbuka	Realtime	Pelayanan Kesehatan	Layanan Kegawatdaruratan Medis Terpadu	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	Dinas Kesehatan
DATA-SRG-241	Data Rekomendasi Surat Izin Praktik Kesehatan	SI-AN SEHAT	Terbatas	Realtime	Pembinaan Kesehatan Regional	Layanan Perizinan Fasilitas Kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	Dinas Kesehatan
DATA-SRG-242	Data Alokasi Pupuk Bersubsidi	SIMPI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sarana Pertanian	Layanan Pupuk Bersubsidi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-243	Data Hasil Pemeriksaan Ante Mortem		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Layanan Pemeriksaan Ante Mortem	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-244	Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Layanan Kesehatan Hewan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-245	Data Hasil Pemeriksaan Post Mortem		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Layanan Pemeriksaan Post Mortem	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-246	Data Pelaporan Pemotongan Hewan Rumah Potong Hewan (RPH)	REALTIS	Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Layanan Pelaporan Pemotongan Hewan Rumah Potong Hewan (RPH)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-247	Data Pembeli Benih Ikan Unggul		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Layanan Pembenihan dan Penjualan Benih Ikan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-248	Data Pembeli Benih Unggul Bersertifikat		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Layanan Penjualan Benih Unggul Bersertifikat	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-249	Data Pemetaan Aktivitas Tanam dan Panen	e-PANEN	Terbatas	Realtime	Pembinaan Pertanian Regional	Layanan Informasi Panen	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-250	Data Penjualan Benih Ikan Unggul		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Layanan Pembenihan dan Penjualan Benih Ikan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-251	Data Penjualan Benih Unggul Bersertifikat		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Layanan Penjualan Benih Unggul Bersertifikat	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-252	Data Penyuluh Pertanian	SIMLUHTAN	Terbatas	Realtime	Pembinaan Pertanian Regional	Layanan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-253	Data Perizinan Edar Pangan	OSS	Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Perizinan Edar Pangan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-254	Data Petani	SIMLUHTAN	Terbatas	Realtime	Pembinaan Pertanian Regional	Layanan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-255	Data Produksi Benih Ikan Unggul		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Layanan Pembenihan dan Penjualan Benih Ikan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-256	Data Produksi Benih Unggul Bersertifikat		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Layanan Penjualan Benih Unggul Bersertifikat	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-257	Data Produksi Hortikultura		Terbatas	Realtime	Ketahanan Pangan	Layanan Bantuan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 Data Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
						Perkebunan			
DATA-SRG-258	Data Produksi Perkebunan		Terbatas	Realtime	Ketahanan Pangan	Layanan Bantuan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 Data Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-259	Data Produksi Tanaman Pangan		Terbatas	Realtime	Ketahanan Pangan	Layanan Bantuan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 Data Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-260	Data Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	OSS	Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Layanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (Registrasi PSAT-PDUK)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-261	Data Registrasi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK)	OSS	Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Layanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (Registrasi PSAT-PDUK)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-262	Data Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) Tekstil		Terbatas	Realtime	Pengawasan Produk Hewan Daerah	Layanan Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) Tekstil	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-263	Data Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Mikro Organisme	Layanan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 Data Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-264	Data Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan		Terbatas	Realtime	Pembinaan Pertanian Regional	Layanan Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-265	Data Stok Benih Unggul Bersertifikat		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Layanan Penjualan Benih Unggul Bersertifikat	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-266	Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Layanan Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-267	Data Surat Rekomendasi Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak		Terbatas	Realtime	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Layanan Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-268	Data Surat Rekomendasi Pemasukan Pakan Ternak		Terbatas	Realtime	Pengawasan Pengeluaran Hewan Daerah Pengawasan Pemasukan Hewan Daerah	Layanan Pemberian Surat Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Bahan Pakan Hewan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-269	Data Surat Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Produk Asal Hewan		Terbatas	Realtime	Pengawasan Produk Hewan Daerah	Layanan Surat Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Produk Asal Hewan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-270	Data Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD)	ISIKHNAS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Layanan Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-271	Data Vaksinasi Penyakit Kuku dan Mulut (PMK)	ISIKHNAS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Layanan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DATA-SRG-272	Data Aduan Masyarakat	SP4N LAPOR LAPORGUB	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Pengaduan Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-273	Data Capaian Kemajuan Statistik Sektoral	INDEKS STATISTIK SEKTORAL	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Data Statistik	Layanan Capaian Kemajuan Statistik Sektoral	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-274	Data Disposisi Tepat Waktu	DISBOOK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Disposisi Online	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-275	Data Dokumen Penggunaan TTE	TTE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Tanda Tangan Elektronik	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-276	Data Evaluasi Smart City	EVALUASI SMARTCIT (KEMKOMINFO)	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan e-Government	Layanan Evaluasi Smart City	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-277	Data Evaluasi SPBE	EVALUASI SPBE (KEMENPANRB)	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan e-Government	Layanan Evaluasi SPBE	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-278	Data Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi	APLIKASI DEWAN TIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Jaringan TIK	Layanan Manajemen TIK	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-279	Data Menara Telekomunikasi	SITEPLAN	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informatika	Layanan Retribusi Menara Telekomunikasi dan Data Menara Telekomunikasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-280	Data Pengajuan Email	ANA A	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Jaringan TIK	Layanan Manajemen TIK	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-281	Data Pelayanan Publik	SEROJA	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi Publik	Layanan Pelayanan Publik Terpusat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-282	Data Pembelajaran IT (Information Technology)	BLC	Terbuka	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Fasilitas Pembelajaran IT (Information Technology)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-283	Data Pengajuan TIK	ANA A	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Jaringan TIK	Layanan Manajemen TIK	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-284	Data Permohonan Informasi	SEROJA	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi Publik	Layanan Pelayanan Publik Terpusat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-285	Data Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi	SIPRONATEL	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Jaringan TIK	Layanan Sistem Informasi Pelayanan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-286	Data Sektoral	SRAGEN SATU DATA	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data Statistik	Layanan Satu Data Tingkat Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-287	Data SPPD Dalam dan Luar Daerah	SPPD ONLINE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan SPPD Online	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-288	Data Surat Masuk dan Keluar Antar OPD	SURYA	Terbatas	Realtime	Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Kirim dan Terima Surat Online	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DATA-SRG-289	Data Aduan Masyarakat Distribusi Pupuk	SIAPPUBERS	Terbuka	Realtime	Pengawasan Pupuk Pestisida Bersubsidi	Layanan Aduan Distribusi Pupuk Bersubsidi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
DATA-SRG-290	Data Daftar Koperasi	SIKOPER	Terbuka	Realtime	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Layanan Informasi Koperasi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 Data Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
DATA-SRG-291	Data Harga Bahan Pokok Penting		Terbuka	Harian	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Layanan Informasi Harga Bahan Pokok Penting	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
DATA-SRG-292	Data Konsultasi Koperasi	SI BINA SERASI	Terbatas	Realtime	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Layanan Peningkatan Pemahaman Koperasi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 Data Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-293	Data Potensi Pasar		Terbuka	Harian	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	Layanan Retribusi Pasar	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
DATA-SRG-294	Data Retribusi Pasar		Terbuka	Harian	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	Layanan Retribusi Pasar	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
DATA-SRG-295	Data Surat Rekomendasi Merk dan Izin Edar Usaha		Terbatas	Realtime	Pengendalian Izin Usaha Industri	Layanan Pendampingan Merk dan Izin Edar Usaha	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
DATA-SRG-296	Data Lokasi Angkutan Sampah	SIBARES	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengelolaan Persampahan	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DATA-SRG-297	Data Pemenuhan Baku Mutu Emisi	OSS	Terbuka	Realtime	Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	Layanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DATA-SRG-298	Data Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	OSS	Terbuka	Realtime	Pembinaan dan Pengawasan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Layanan Persetujuan Lingkungan (SKKLH, PKPLH, dan NIB (SPPL))	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DATA-SRG-299	Data Persetujuan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Limbah	OSS	Terbuka	Realtime	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Layanan Persetujuan Teknis Kegiatan Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DATA-SRG-300	Data Persetujuan Teknis Kegiatan Pembuangan Limbah	OSS	Terbuka	Realtime	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Layanan Persetujuan Teknis Kegiatan Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DATA-SRG-301	Data Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3	OSS	Terbuka	Realtime	Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Layanan Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DATA-SRG-302	Data Retribusi Sampah	SIBARES	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengelolaan Persampahan	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DATA-SRG-303	Data Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)	OSS	Terbuka	Realtime	Pembinaan dan Pengawasan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Layanan Persetujuan Lingkungan (SKKLH, PKPLH, dan NIB (SPPL))	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DATA-SRG-304	Data Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan	OSS	Terbuka	Realtime	Pembinaan dan Pengawasan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Layanan Persetujuan Lingkungan (SKKLH, PKPLH, dan NIB (SPPL))	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
	Lingkungan Hidup (SPPL)								
DATA-SRG-305	Data Informasi Keolahragaan	SIDORA	Terbuka	Bulanan	Pembinaan Olahraga Regional	Layanan Informasi Database Keolahragaan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 Data Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
DATA-SRG-306	Data Informasi Pariwisata Air Panas Bayanan	SIPEPAYA	Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Layanan Informasi Pariwisata Air Bayanan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
DATA-SRG-307	Data Informasi Pariwisata Sragen	SITAGEN	Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Layanan Informasi Pariwisata Sragen	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
DATA-SRG-308	Data Informasi Pariwisata Terintegrasi	SIMPATI	Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Layanan Informasi Pariwisata Terintegrasi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
DATA-SRG-309	Data Kenaikan Gaji Berkala	KENAIKAN GAJI BERKALA	Tertutup	Bulanan	Kepegawaian ASN Daerah	Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Online	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
DATA-SRG-310	Data Pengelolaan Virtual Destinasi	VIRTUAL TOUR LAKASIWISATA	Terbuka	Bulanan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Layanan Virtual Tour Destinasi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
DATA-SRG-311	Data Sewa Gor dan Taruna		Terbuka	Bulanan	Pembinaan Olahraga Regional	Layanan Sewa Gor Diponegoro dan Taruna	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 Data Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
DATA-SRG-312	Data Tiket Pariwisata	e-TICKETING	Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Layanan Tiket Destinasi Pariwisata	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
DATA-SRG-313	Data Aduan Jalan Rusak	PATRIOT SRAGEN	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Jalan	Layanan Aduan Jalan Rusak	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-314	Data Aduan Pemoangan Pohon Turus Jalan		Terbuka	Realtime	Pengembangan Jasa Konstruksi	Layanan Penebangan Pohon	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-315	Data Alat Berat		Tertutup	Realtime	Pengembangan Jasa Konstruksi	Layanan Sewa Alat Berat	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-316	Data Jalan Rusak	PATRIOT	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Jalan	Layanan Aduan Jalan Rusak	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
		SRAGEN							
DATA-SRG-317	Data Pelanggan Penyedotan Kaku		Tertutup	Realtime	Pengembangan Jasa Konstruksi	Layanan Penyedotan Kaku	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-318	Data Pelanggan Sewa Alat Berat		Tertutup	Realtime	Pengembangan Jasa Konstruksi	Layanan Sewa Alat Berat	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-319	Data Pemohon Bangunan Gedung	SIMBG	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Layanan Persetujuan Bangunan dan Gedung	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-320	Data Pemohon Pemanfaatan Tanah Lambiran		Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Layanan Sewa Tanah Lambiran	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-321	Data Pemohon Sertifikat Laik Fungsi	SIMBG	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-322	Data Penyewa Bahu Jalan		Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Layanan Penyewaan Tanah Bahu Jalan	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-323	Data Persetujuan Bangunan Gedung	SIMBG	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Layanan Persetujuan Bangunan dan Gedung	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-324	Data Retribusi Bangunan Gedung	SIMBG	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Layanan Persetujuan Bangunan dan Gedung	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-325	Data Retribusi Sertifikat Laik Fungsi	SIMBG	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-326	Data Retribusi Sewa Alat Berat		Tertutup	Realtime	Pengembangan Jasa Konstruksi	Layanan Sewa Alat Berat	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-327	Data Retribusi Sewa Bahu Jalan		Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Layanan Penyewaan Tanah Bahu Jalan	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-328	Data Retribusi Sewa Tanah Lambiran		Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Layanan Sewa Tanah Lambiran	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-329	Data Sertifikat Laik Fungsi	SIMBG	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
DATA-SRG-330	Data BUMDes	GAPURA DESA	Terbuka	Tahunan	Penataan Desa	Layanan Informasi Desa	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DATA-SRG-331	Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	EPDESKEL	Terbatas	Tahunan	Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	Layanan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
								Daerah Tertinggal	
DATA-SRG-332	Data Infografis Desa	GAPURA DESA	Terbuka	Tahunan	Penataan Desa	Layanan Informasi Desa	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DATA-SRG-333	Data Infografis Desa Membangun	INDEKS DESA MEMBANGUN	Terbatas	Tahunan	Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	Layanan Infografis Desa Membangun	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DATA-SRG-334	Data Kepala Desa dan Perangkat Desa	SUKAPEDES	Terbatas	Tahunan	Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Kepala Desa dan Perangkat Desa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DATA-SRG-335	Data Klinik BUMDes	KLINIK BUMDES DAS DES	Terbatas	Tahunan	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Layanan Klinik BUMDes	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DATA-SRG-336	Data Pengelolaan Aset Desa	SIPADES	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Pengelolaan Aset Desa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DATA-SRG-337	Data Pengelolaan Keuangan Desa	SISKEUDES	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Pengelolaan Keuangan Desa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DATA-SRG-338	Data Perencanaan Dinas PMD	SIPMONTOK	Tertutup	Tahunan	Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	Layanan Perencanaan dan Evaluasi Monitoring Keuangan Dinas PMD	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DATA-SRG-339	Data Perkembangan Desa	GAPURA DESA	Terbuka	Tahunan	Penataan Desa	Layanan Informasi Desa	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DATA-SRG-340	Data Profil Desa	PRODESKEL	Terbatas	Tahunan	Penyelenggaraan Penataan Desa	Layanan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DATA-SRG-341	Data Aduan Perizinan Tindak Lanjut	SIAP	Terbuka	Realtime	Manajemen Perizinan Penanaman Modal	Layanan Aduan Perizinan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-342	Data Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	SIPIPO	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Terintegrasi	Layanan Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-343	Data Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	SI PIONER	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Terintegrasi	Layanan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-344	Data Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	SIPIPO	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Terintegrasi	Layanan Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-345	Data Izin Praktik	SI PIONER	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Terintegrasi	Layanan Izin Praktik	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-346	Data Izin Reklame	SI PIONER	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Terintegrasi	Layanan Izin Reklame	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-347	Data Kegiatan DPMPTSP		Terbuka	Realtime	Pembinaan Penanaman Modal Regional	Layanan Informasi Kegiatan DPMPTSP	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-348	Data Kegiatan Penelitian	SIPIPO	Tertutup	Realtime	Pelayanan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Pembuatan Surat Keterangan Penelitian	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-349	Data Peneliti	SIPIPO	Tertutup	Realtime	Pelayanan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Pembuatan Surat Keterangan Penelitian	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-350	Data Perizinan Bangunan dan Gedung	SIMBG	Tertutup	Realtime	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal	Layanan Informasi Manajemen Bangunan Gedung	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-351	Data Perizinan dan Non Perizinan		Terbuka	Realtime	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-352	Data Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB)	OSS	Tertutup	Realtime	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-353	Data Perizinan Trayek	SI PIONER	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Terintegrasi	Layanan Izin Trayek	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-354	Data Persebaran Investasi	PASTI OL	Terbatas	Realtime	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Layanan Informasi Persebaran Investasi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-355	Data Peta Peluang Investasi	SI PELANGI	Terbatas	Realtime	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Layanan Informasi Peta Peluang Investasi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-356	Data Survei Kepuasan Masyarakat	SKM	Terbuka	Realtime	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-357	Data User Pengguna Aplikasi	SSO	Tertutup	Realtime	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Pengelolaan Akun	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-358	Data Persyaratan Perizinan	SI PIONER	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-359	Data Rekomendasi / Persetujuan Teknis	SI PIONER	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-360	Data Ketetapan Retribusi Daerah		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-361	Data SK Perizinan	SI PIONER	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-362	Data Sertifikat Standar	OSS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-363	Data Surat Perizinan	OSS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
DATA-SRG-364	Data Guru	DAPODIK	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pengelolaan Pendidikan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DATA-SRG-365	Data Penerimaan Siswa Jalur Afirmasi	PPDB-ONLINE	Terbuka	Realtime	Pembinaan Pendidikan Regional	Layanan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DATA-SRG-366	Data Penerimaan Siswa Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali	PPDB-ONLINE	Terbuka	Realtime	Pembinaan Pendidikan Regional	Layanan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-367	Data Penerimaan Siswa Jalur Prestasi	PPDB-ONLINE	Terbuka	Realtime	Pembinaan Pendidikan Regional	Layanan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DATA-SRG-368	Data Penerimaan Siswa Jalur onasi	PPDB-ONLINE	Terbuka	Realtime	Pembinaan Pendidikan Regional	Layanan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DATA-SRG-369	Data Sekolah	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pengelolaan Pendidikan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DATA-SRG-370	Data Siswa	DAPODIK	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pengelolaan Pendidikan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DATA-SRG-371	Data SK Guru Penerima Tunjangan Profesi	SIM TUNJANGAN	Terbatas	Realtime	Manajemen Tenaga Pendidikan	Layanan Tunjangan Profesi Guru	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DATA-SRG-372	Data Calon Siswa Baru	PPDB-ONLINE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DATA-SRG-373	Data Berkas Pendaftaran	PPDB-ONLINE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DATA-SRG-374	Data Identitas Aseptor Pemasangan KB MKJP		Terbatas	Realtime	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Layanan Pemasangan KB MKJP	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DATA-SRG-375	Data Jenis KB MKJP		Terbatas	Realtime	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Layanan Pemasangan KB MKJP	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DATA-SRG-376	Data Keluarga Penerima Pelayanan Konseling		Tertutup	Realtime	Pembangunan Keluarga Kesejahteraan Keluarga	Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-377	Data Korban Penerima Pelayanan Pendampingan	TESIA SIMFONI PPA	Tertutup	Realtime	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DATA-SRG-378	Data Masyarakat Penerima Pelayanan KB MKJP		Tertutup	Realtime	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Layanan Pemasangan KB MKJP	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DATA-SRG-379	Data Pendukung Kabupaten Layak Anak (KLA)		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Layanan KLA (Kabupaten Layak Anak)	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DATA-SRG-380	Data Tanggal E pired Pemasangan KB MKJP		Terbatas	Realtime	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Layanan Pemasangan KB MKJP	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DATA-SRG-381	Data Waktu Pemasangan KB MKJP		Terbatas	Realtime	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Layanan Pemasangan KB MKJP	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DATA-SRG-382	Data Aduan Kerusakan Alat Penunjang Kelalulintasan	SIAP-LALIN	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Transportasi	Layanan Pengaduan Kelalulintasan	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-383	Data Bot Berlalu Lintas	ROMANTIS SUKOWATI	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Transportasi	Layanan Bot-pedia Keselamatan Berlalu Lintas	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-384	Data Ensiklopedia Keselamatan Berlalu	ROMANTIS SUKOWATI	Terbuka	Realtime	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan	Layanan Pengetahuan dan Pembelajaran Keselamatan	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	Dinas Perhubungan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
	Lintas					Berlalu Lintas			
DATA-SRG-385	Data Hasil Uji Kendaraan	NGE-KIR ONLINE	Terbuka	Realtime	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Layanan Pendaftaran dan Pengecekan Hasil Uji KIR Kendaraan Bermotor	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-386	Data Nomor Antrian Uji Kendaraan	NGE-KIR ONLINE	Terbuka	Realtime	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Layanan Pendaftaran dan Pengecekan Hasil Uji KIR Kendaraan Bermotor	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-387	Data Nomor Induk Berusaha	OSS	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Layanan Perizinan Angkutan	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-388	Data Pelaporan Kegiatan Perbaikan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Transportasi	Layanan Sistem Informasi Laporan Kinerja	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.04 Data Dukung Lainnya	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-389	Data Pelaporan Pengamanan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Transportasi	Layanan Sistem Informasi Laporan Kinerja	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.04 Data Dukung Lainnya	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-390	Data Pelaporan Pengawasan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Transportasi	Layanan Sistem Informasi Laporan Kinerja	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.04 Data Dukung Lainnya	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-391	Data Pelaporan Pengendalian Angkutan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Transportasi	Layanan Sistem Informasi Laporan Kinerja	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-392	Data Pengelolaan Perparkiran	SIM PARKIR	Terbuka	Realtime	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan Pengelolaan Perparkiran	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-393	Data Pengenalan Rambu Lalu Lintas	ROMANTIS SUKOWATI	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Transportasi	Layanan Bot-pedia Keselamatan Berlalu Lintas	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	Dinas Perhubungan
DATA-SRG-394	Data Cetak Peta Informasi Tata Ruang Usaha Pertambangan Batuan	SIPETARUNG	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Perizinan Tata Ruang	RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 Data Pertahanan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
DATA-SRG-395	Data Izin Pemakaian Gedung	SIAGA SUKOWATI	Terbuka	Realtime	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Layanan Sewa Gedung	RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 Data Pertahanan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
DATA-SRG-396	Data Izin Pemakaian Taman dan Alun-Alun		Terbuka	Realtime	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Layanan izin Pemakaian Taman dan Alun-Alun	RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 Data Pertahanan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
DATA-SRG-397	Data Izin Pemakaman		Terbuka	Realtime	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Layanan Izin Pemakaman	RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 Data Pertahanan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
DATA-SRG-398	Data Perizinan Tata Ruang	SIPETARUNG	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Perizinan Tata Ruang	RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 Data Pertahanan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-399	Data Reforma Agraria	PAK TORA	Terbatas	Bulanan	Tata Ruang Tanah	Layanan Reforma Agraria	RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 Data Pertahanan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
DATA-SRG-400	Data Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	SIPETARUNG	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Perizinan Tata Ruang	RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 Data Pertahanan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
DATA-SRG-401	Data Surat Keterangan Peruntukan Ruang	SIPETARUNG	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Perizinan Tata Ruang	RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 Data Pertahanan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
DATA-SRG-402	Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	SIKS-NG SIKS-V2 DT Jateng	Terbuka	Tiga Bulanan	Penanganan Fakir Miskin	Layanan Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Dinas Sosial
DATA-SRG-403	Data Kartu Indonesia Sehat (KIS)	SIKS-NG SIKS-V2 DT Jateng	Terbuka	Tiga Bulanan	Penanganan Fakir Miskin	Layanan Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Dinas Sosial
DATA-SRG-404	Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)		Terbatas	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Dinas Sosial
DATA-SRG-405	Data Penerima Bansos APBD	SIKS-NG SIKS-V2 DT Jateng SIM SARASWATI	Terbuka	Tiga Bulanan	Penanganan Fakir Miskin	Layanan Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Dinas Sosial
DATA-SRG-406	Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)	SIKS-NG SIKS-V2 DT Jateng	Terbuka	Tiga Bulanan	Penanganan Fakir Miskin	Layanan Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Dinas Sosial
DATA-SRG-407	Data Penerima Terapi Bantuan APBD	DESA TUMIS	Terbuka	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Penerima Bantuan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Dinas Sosial
DATA-SRG-408	Data Program Keluarga Harapan (PKH)	SIKS-NG SIKS-V2 DT Jateng	Terbuka	Tiga Bulanan	Penanganan Fakir Miskin	Layanan Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Dinas Sosial
DATA-SRG-409	Data Kartu Identitas AK-1	e-MAKAR O	Tertutup	Harian	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Layanan Pendataan Informasi Pasar Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
DATA-SRG-410	Data Kartu Identitas Pencari Kerja Luar Negeri	SIAPKERJA	Tertutup	Harian	Pelayanan Antar Kerja Daerah	Layanan Antar Kerja Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
DATA-SRG-411	Data Lowongan Pekerjaan	LAPPAK SUKOWATI	Terbuka	Harian	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Layanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-412	Data Pelatihan Tenaga Kerja	LAPPAK SUKOWATI	Terbuka	Harian	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Layanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
DATA-SRG-413	Data Pencari Kerja	e-MAKAR O	Tertutup	Harian	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Layanan Pendataan Informasi Pasar Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
DATA-SRG-414	Data Penempatan Tenaga Kerja	LAPPAK SUKOWATI	Terbuka	Harian	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Layanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
DATA-SRG-415	Data Surat Keterangan Rekomendasi Paspur TKI	SIAPKERJA	Tertutup	Harian	Pelayanan Antar Kerja Daerah	Layanan Antar Kerja Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
DATA-SRG-416	Data Aduan Pegawai	WBS	Terbatas	Bulanan	Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu	Layanan Aduan Pegawai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-417	Data Gratifikasi	GOL KPK	Terbatas	Bulanan	Pengawasan Pemerintahan	Layanan Gratifikasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-418	Data Konsultasi Pengawasan	SORJAN	Terbatas	Bulanan	Pengawasan Aparatur Negara	Layanan Konsultasi Online	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	Inspektorat
DATA-SRG-419	Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)		Terbatas	Bulanan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	Inspektorat
DATA-SRG-420	Data Surat Keterangan Bebas Temuan		Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi ASN	Layanan Surat Keterangan Bebas Temuan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-421	Data Surat BA Tindak Lanjut Sementara		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-422	Data Form Rekap Tindak Lanjut		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-423	Data Dokumen Tindak Lanjut		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-424	Data Form Evaluasi Tindak Lanjut		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-425	Data Berita Acara Akhir		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-426	Data Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-427	Data Surat Permohonan Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-428	Data Surat Tugas		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-429	Data Program Kerja Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-430	Data Kertas Kerja Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-431	Data Konsep LHP		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-432	Data Laporan Hasil Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-433	Data Dokumen Draft Temuan Sementara		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-434	Data Dokumen Draft Temuan Akhir		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-435	Data BA Kesepakatan Hasil Temuan dan Tindak Lanjut		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-436	Data Kartu Penugasan Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-437	Data Formulir Anggaran Waktu		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-438	Data Surat Pernyataan Independensi		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-439	Data Surat Permintaan Dokumen		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-440	Data Pemeriksaan Pendahuluan		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	Inspektorat
DATA-SRG-441	Data Identitas Pasien	DAFTAR ONLINE	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan	Layanan Pendaftaran Online Pasien RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
DATA-SRG-442	Data Informasi Laporan Keuangan Rumah Sakit	SIMRS	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Manajemen Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
DATA-SRG-443	Data Informasi Pengelolaan Tempat	SIMRS	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Manajemen Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
	Tidur						Kesehatan		
DATA-SRG-444	Data Kunjungan	SIMRS	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Manajemen Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
DATA-SRG-445	Data Nomor Antrian Pasien	SIMRS	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan	Layanan Antrian Pelayanan Rawat Jalan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
DATA-SRG-446	Data Sebaran Diagnosa	SIMRS	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Manajemen Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
DATA-SRG-447	Data Antar Obat Pasien	SOBAT	Terbatas	Realtime	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Layanan Antar Obat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-448	Data Asuhan Keperawatan	SIPRADITA	Terbatas	Realtime	Pengembangan Mutu Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	Layanan Asuhan Keperawatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-449	Data Bill Pasien	SIM RS GOS	Terbatas	Realtime	Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Sekunder	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-450	Data BPJS Kesehatan	JKN MOBILE	Terbatas	Realtime	Pemenuhan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan BPJS Kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-451	Data BPJS Ketenagakerjaan	e-SEP	Terbatas	Realtime	Pemenuhan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan BPJS Ketenagakerjaan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-452	Data Chatbot Rumah Sakit Gemolong Sragen	GEMATI	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Informasi Chatbot Rumah Sakit Gemolong Sragen	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-453	Data Electronic Medical Record (EMR)	SIM RS GOS	Terbatas	Realtime	Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Sekunder	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-454	Data Informasi Fasilitas Kesehatan	HFIS	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Informasi Fasilitas Kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-455	Data Informasi Pelaporan Pemutusan BPJS Ketenagakerjaan	SIPP	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Informasi Pelaporan Pemutusan BPJS Ketenagakerjaan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-456	Data Informasi Rumah Sakit Online	SIRS ONLINE	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Informasi Rumah Sakit Online	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-457	Data Instalasi Gawat Darurat Pasien	PSC	Terbatas	Realtime	Pemenuhan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Instalasi Gawat Darurat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-458	Data Jadwal Dokter		Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Informasi Jadwal Dokter	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-459	Data Kepegawaian Rumah Sakit	SIDIAN SISDMK	Tertutup	Realtime	Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	Layanan Kepegawaian Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-460	Data Kerjasama dan Diklat Rumah Sakit		Terbatas	Realtime	Kemitraan Peran serta Masyarakat	Layanan Kerjasama dan Diklat Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-461	Data Kerusakan Alat Medis	AMAN POLL	Tertutup	Realtime	Sediaan Alat Kesehatan	Layanan Aduan Kerusakan Alat Medis dan Sarpras Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-462	Data Kerusakan Sarpras Rumah Sakit	AMAN POLL	Tertutup	Realtime	Sediaan Alat Kesehatan	Layanan Aduan Kerusakan Alat Medis dan Sarpras Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-463	Data Kesehatan Masyarakat Patient Center Care (PCC)		Terbuka	Realtime	Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Masyarakat Patient Center Care (PCC)	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-464	Data Kesehatan Warga Miskin	SARASWATI	Terbatas	Realtime	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Warga Miskin	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-465	Data Ketersediaan Obat	APOTIK ONLINE	Terbatas	Realtime	Sediaan Farmasi Bidang Kesehatan	Layanan Ketersediaan Obat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-466	Data Klaim BPJS	e-KLAIM V-CLAIM BPJS	Terbatas	Realtime	Pemenuhan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Klaim BPJS	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-467	Data Komunitas Warga Promosi Kesehatan	JIWA KORSA	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Layanan Jejaring Warga dan Komunitas Promosi Kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-468	Data Kritik dan Saran Rumah Sakit	AISHA	Terbatas	Realtime	Pembinaan Kesehatan Regional	Layanan Promosi dan Edukasi Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-469	Data Manajerial Direktur Rumah Sakit	AISHA	Tertutup	Realtime	Pembinaan Kesehatan Regional	Layanan Promosi dan Edukasi Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-470	Data Nomor Antrian Rumah Sakit	SIDATAN	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Pendaftaran Online Pasien RSUD dr. Soeratno Gemolong	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-471	Data Obat	SIM RS GOS	Terbatas	Realtime	Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Sekunder	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-472	Data Pasien Homecare	HORE RAMAH	Terbatas	Realtime	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Layanan Homecare	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-473	Data Pembelian Obat	APOTIK ONLINE	Terbatas	Realtime	Sediaan Farmasi Bidang Kesehatan	Layanan Ketersediaan Obat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-474	Data Podcast Promosi Kesehatan	PARAMITA	Terbuka	Realtime	Pembinaan Kesehatan Regional	Layanan Podcast Promosi Kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-475	Data Resep Obat	APOTIK ONLINE	Terbatas	Realtime	Sediaan Farmasi Bidang Kesehatan	Layanan Ketersediaan Obat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-476	Data Rujukan Pasien	SISRUTE	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan	Layanan Rujukan Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-477	Data Standar Pelayanan Rumah Sakit	SIMA A	Terbuka	Realtime	Pembinaan Kesehatan Regional	Layanan Pengembangan Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-478	Data Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan Wafat	LANTERA	Terbatas	Realtime	Pemenuhan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian RSUD dr. Soeratno Gemolong	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-479	Data Tagihan Rumah Sakit	LUPIS	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Tagihan Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
DATA-SRG-480	Data Tracking Barang Medis	SIUL	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Usulan dan Tracking Barang Medis	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-481	Data Usulan Barang Medis	SIUL	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Usulan dan Tracking Barang Medis	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
DATA-SRG-482	Data Pelanggaran Ketertiban, Perda dan Perkada	SI JAGA SUKOWATI SI PAKPOL	Tertutup	Realtime	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Ketertiban	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja
DATA-SRG-483	Data Pemadaman Kebakaran dan Evakuasi	SI JAGA SUKOWATI SI PAKPOL	Tertutup	Realtime	Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran	Layanan Penanganan Aduan Kebakaran dan Evakuasi	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja
DATA-SRG-484	Data Satlinmas	SI JAGA SUKOWATI SI PAKPOL	Tertutup	Realtime	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Ketertiban	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja
DATA-SRG-485	Data Sosialisasi Penanganan Kebakaran		Tertutup	Realtime	Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Kebakaran	Layanan Pelatihan Penanganan Kebakaran	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja
DATA-SRG-486	Data Tracking Pelanggar Ketertiban		Tertutup	Realtime	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Tracking Pelanggar Ketertiban	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja
DATA-SRG-487	Data Aspirasi Masyarakat	SIPPOKIR	Terbuka	Realtime	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Layanan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	Sekretariat Dewan
DATA-SRG-488	Data Dokumen Perda		Terbatas	Realtime	Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Pelaksanaan Rapat DPRD	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Sekretariat Dewan
DATA-SRG-489	Data Notulensi Sidang DPRD		Terbatas	Realtime	Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Layanan Pelaksanaan Sidang DPRD	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.04 Data Dukung Lainnya	Sekretariat Dewan
DATA-SRG-490	Data Produk Hukum Daerah		Terbatas	Realtime	Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Pelaksanaan Rapat DPRD	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	Sekretariat Dewan
DATA-SRG-491	Data Studi Banding DPRD		Terbatas	Realtime	Peningkatan Kapasitas DPRD	Layanan Kunjungan Kerja DPRD	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.04 Data Dukung Lainnya	Sekretariat Dewan

3.2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi

Merujuk pada hasil pemetaan data dan informasi pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut.



Grafik 3.2.2.2.1. Grafik Jumlah Daftar Data dan Informasi Berdasarkan Sifat dan Interval Update

Berdasarkan grafik 3.2.2.2.1. menunjukkan bahwa terdapat 491 data pokok *eksisting* yang berada di Pemerintah Kabupaten Sragen dengan 316 data (64,4) merupakan data yang bersifat terbatas, 114 Data (23,2) merupakan data yang bersifat terbuka, dan 61 Data (12,4) merupakan data yang bersifat tertutup. Merujuk grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki sifat terbatas atau dapat diartikan bahwa pemilik data hanya dapat membagikan data tersebut dengan akses data yang terbatas.

Adapun dari 491 data pokok mayoritas, sebanyak 381 data merupakan data dengan interval *update realtime*, 67 data merupakan data dengan interval *update Tahunan*, dan 18 data merupakan data dengan interval *update ulanan*, serta Interval *update data* terendah dengan interval *update nam ulan se umlah data* Secara umum, mayoritas data di Kabupaten Sragen harus di *update* secara *realtime* sehingga diperlukan digitalisasi proses bisnis untuk memudahkan pemrosesan pengolahan data.

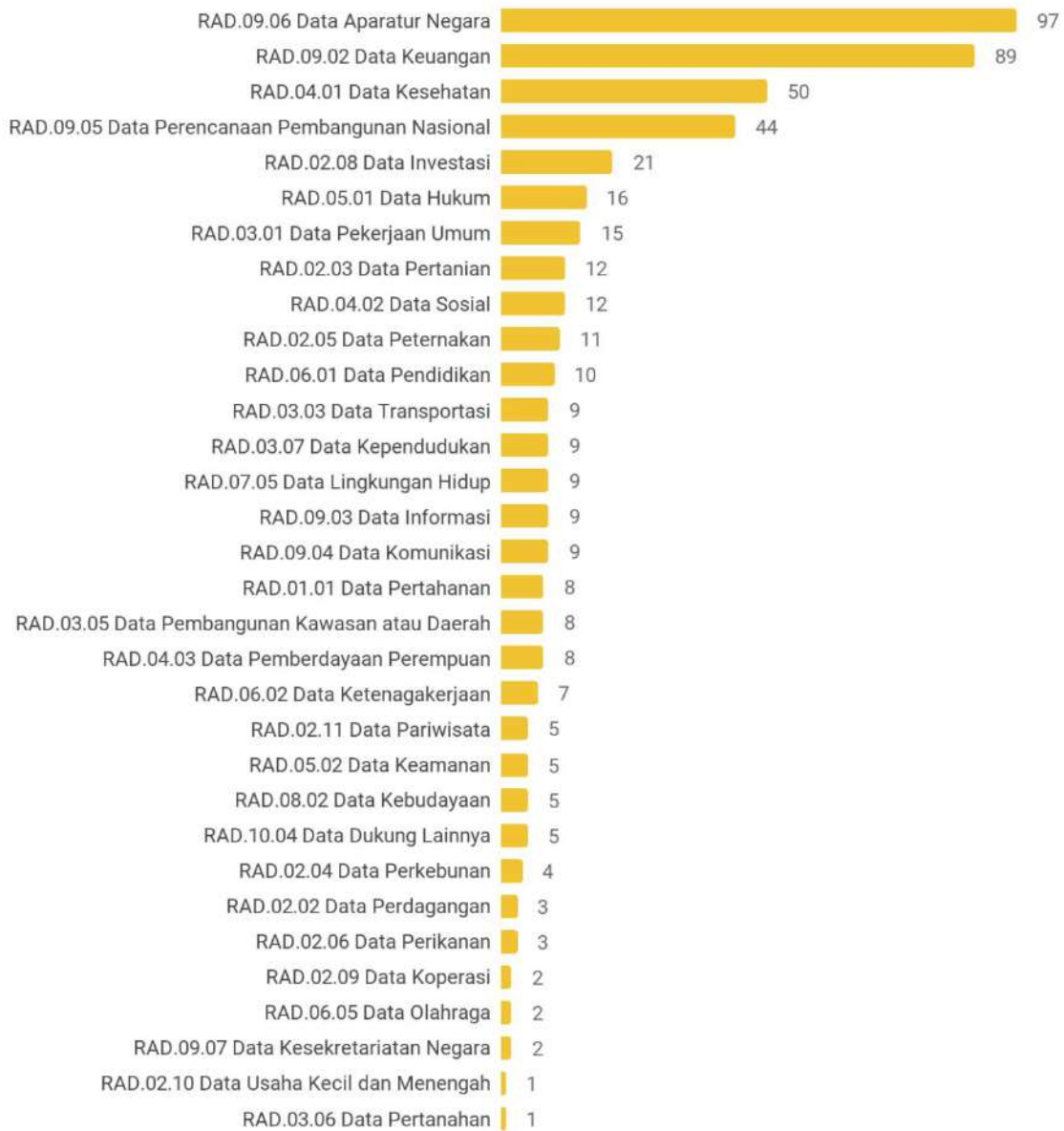


Grafik 3.2.2.2.2. Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Sragen

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.2. mayoritas data didominasi oleh RAD.09 n ormasi Pemerintahan Umum sejumlah 250 Data, RAD.04 n ormasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan sejumlah 70 Data dan RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri sejumlah 56 Data. Sedangkan RAD.0 n ormasi Buda a dan Agama dengan jumlah 5 data merupakan data RAD yang paling

sedikit. Kondisi ini tentu bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata arsitektur data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

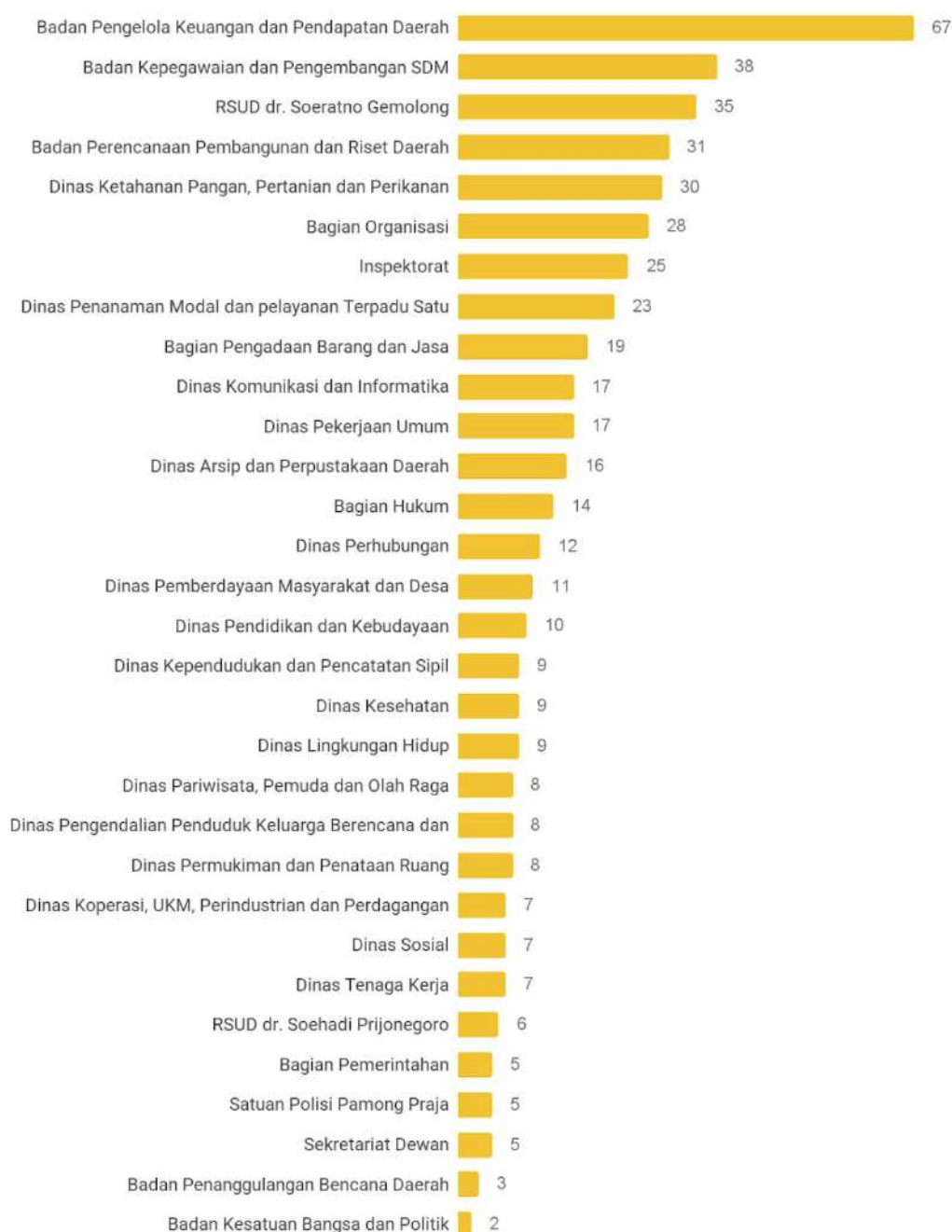
RAD Level 2



Grafik 3.2.2.2.3. Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Sragen

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.3. menunjukkan bahwa RAD level 2 didominasi oleh, RAD.09.06 Data Aparatur Negara sejumlah 97 data, RAD.09.02 Data Keuangan sejumlah 43 data, dan RAD.04.0 Data Kesehatan sejumlah 50 data. Sedangkan paling sedikit, yaitu: RAD.02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah dan RAD.03.06 Data Pertanahan dengan jumlah masing-masing 1 data. Merujuk pada referensi arsitektur data Nasional yang berjumlah 49 referensi, referensi arsitektur data Kabupaten Sragen terdiri atas 32 Referensi Arsitektur Data Nasional, sementara 17 referensi lainnya bukan merupakan referensi/urusan pemerintah kabupaten Sragen.

Produsen Data/Penanggung Jawab Data



Grafik 3.2.2.4. Grafik Jumlah Daftar Data di Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 3.2.2.4. menunjukkan bahwa mayoritas data terbanyak dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sejumlah 67 data, RSUD dr. Soeratno emolong sejumlah 35 data, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sejumlah 33 data dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sejumlah 30 data. Data paling sedikit yaitu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki jumlah 2 data. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan inventarisasi data di masing-masing perangkat daerah untuk memvalidasi apakah data yang dimiliki telah sesuai.

3.2.3. Arsitektur a anan SPBE

Layanan SPBE dapat memberikan manfaat seperti mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan, serta memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan layanan. Secara umum, arsitektur layanan menggambarkan kondisi mengenai layanan yang dihadirkan pada masing-masing perangkat daerah sesuai proses bisnis utamanya.

3.2.3.1. Katalog Layanan

Katalog ini berisi layanan merupakan proses pemerintahan yang memiliki pelanggan (*customer*), baik itu internal (perangkat daerah, ASN) maupun eksternal (instansi luar, swasta dan masyarakat). Berikut ini dijelaskan mengenai katalog layanan dari seluruh perangkat daerah, dimana RAL Level 1 & 2 mengacu pada kodifikasi referensi arsitektur layanan SPBE Nasional sedangkan Level 3 mengacu pada layanan yang ada di seluruh perangkat daerah. Berdasarkan hasil survei telah terinventarisir sejumlah 220 layanan dimana 175 layanan (79,55) telah terdigitalisasi. Tabel 3.2.3.2.1. merupakan ringkasan dari katalog layanan Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun katalog layanan selengkapnya ditunjukkan pada link: <https://bit.ly/metadataspbesragen>.

Tabel 3.2.3.1.1. Katalog Layanan yang dikelola oleh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
LA -SRG-001	Layanan Absensi Pegawai	Data Presensi Pegawai	SAKTI	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
LA -SRG-002	Layanan Cuti Pegawai	Data Cuti Pegawai	e-Cuti	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
LA -SRG-003	Layanan Kartu Asuransi (KARIS)	Data Kartu Asuransi (KARIS)	KARISMA PATEN	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
LA -SRG-004	Layanan Kartu Pegawai (KARPEG)	Data Kartu Pegawai (KARPEG)	KARISMA PATEN	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
LA -SRG-005	Layanan Kartu Suami/Istri (KARSU)	Data Kartu Suami/Istri (KARSU)	KARISMA PATEN	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
LA -SRG-006	Layanan Profil Pegawai	Data Profil Kepegawaian	SIMPEG	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
LA -SRG-007	Layanan Tunjangan Hari Tua (TASPEN)	Data Tunjangan Hari Tua (TASPEN)	KARISMA PATEN	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
LA -SRG-008	Layanan Kepegawaian	Data Usulan Alih Jabatan Fungsional / Pemberhentian Jabatan Data SK Alih Jabatan Fungsional / Pemberhentian Jabatan Data Usulan Kenaikan Jabatan Data SK Kenaikan Jabatan Data SK Kenaikan Jabatan Utama Data Usulan Kenaikan Pangkat Data Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Data SK Kenaikan Pangkat Data Usulan Pengangkatan Data SK Pengangkatan Data ANJAB ABK Data Usulan Formasi Data Surat Kesanggupan Bupati Data Surat Pengajuan Data SK MenpanRB Data SK Penetapan Formasi Data Formasi Data SK Panitia Seleksi Data CASN Data Hasil Ujian CAT Data Pemberkasan ASN Data SK Pengangkatan CASN Data SK Pengakatan ASN Data SK Persetujuan Teknis	SIASN e-Formasi SSCASN I DIS e-DOCU CASN SIMANIS	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
LA -SRG-009	Layanan Pelaporan Potensi Konflik Gangguan Kamtibmas	Data Potensi Konflik Gangguan Kamtibmas	SRIKANDI MANAH	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
LA -SRG-010	Layanan Pencatatan Keberadaan Ormas	Data Surat Keterangan Keberadaan Ormas		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
LA -SRG-011	Layanan Informasi, Komunikasi, dan Edukasi Kebencanaan	Data Informasi Kebencanaan Data Desa Tangguh Bencana	SI SUSANA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
LA -SRG-012	Layanan Respon Cepat Laporan Kejadian Bencana	Data Kejadian Bencana	SI SUSANA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
LA -SRG-013	Layanan Penatausahaan Keuangan	Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Data Dana Transfer DAK Fisik Data Dana Transfer DAK Non Fisik Data Dana Desa Data Dana Transfer Data Gaji Pegawai Data STS Data BKU Data SPJ Data Laporan Keuangan unaudited Data Laporan Keuangan Audited Data Perda Pertanggungjawaban APBD Data Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Data SPD Data SPP Data SPM Data Lembar Verifikasi PPKSKPD Data Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM Data Rekening Giro OPD / Pihak ke 3 Data Ceklis SPP Data Ringkasan SPP Data Rincian SPP Data Salinan DPA	SIPD FMIS SIM GAJI e-POS OMSPAN ALADIN SINERGI 5/423 SIMTRADA	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-014	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	Data Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Data Purna Pensiun	e-SKPP	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-015	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Aset Tetap	Data Aset Tetap	SIMDA BMD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-016	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	Data Barang Persediaan Data Barang Habis Pakai Data Usulan RKBMD Data Belanja Modal	SIMBAPER	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data Kartu Inventaris Barang Data Kartu Inventaris Ruangan Data Usulan Penghapusan Data SK Rusak Berat Data Surat Persetujuan Usulan Penghapusan Data Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah Data Dokumen Risalah Lelang Data SK Penghapusan Aset Data Penghapusan Aset				
LA -SRG-017	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Informasi Tanah Milik Pemerintah	Data Informasi Tanah Milik Pemerintah Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	SI INTAN ASRI	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-018	Layanan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Data Pelaporan Penyusunan CALK	e-GESER SIKD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-019	Layanan Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK)	Data Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) Data Pelaporan Penyusunan LAK	FMIS e-GESER SIKD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-020	Layanan Penyusunan Laporan Operasional (LO)	Data Penyusunan Laporan Operasional (LO) Data Pelaporan Penyusunan LO	FMIS e-GESER SIKD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-021	Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Data Penyusunan Laporan Perubahan Entitas (LPE) Data Pelaporan Penyusunan LPE	FMIS e-GESER SIKD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-022	Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	Data Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Data Pelaporan Penyusunan LPSAL	FMIS e-GESER SIKD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-023	Layanan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Data Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Pelaporan Penyusunan LRA	FMIS SINERGI 5/423 e-GESER SIKD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-024	Layanan Penyusunan Neraca	Data Neraca Data Pelaporan Penyusunan Neraca	FMIS e-GESER SIKD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
LA -SRG-025	Layanan Penyusunan Penetapan APBD	Data Perda APBD Data Perbup Penjabaran APBD	SIPD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-026	Layanan Penyusunan Perubahan APBD	Data Perda Perubahan APBD Data Perbup Perubahan Penjabaran APBD	SIPD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-027	Layanan Perencanaan Anggaran	Data Anggaran SKPD Data RKA SKPD Data RAPBD Data APBD Data Rancangan KUA / PPAS Data Nota Kesepakatan Data KUA dan PPAS Data SK Bupati Tim Penyusun Data Agenda Kerja Data Draft Rancangan Awal Renstra PD Data SE Bupati Data Draft Rancangan Renstra PD Data Draft Akhir Renstra PD Data Perbup Bupati Renstra PD Data SK Tim Penyusunan Rancangan Teknokratik Data Rancangan Teknokratik RPJMD Data Dokumen Teknokratik RPJMD Data SK Tim Perumus Data SK Tim Penyusun Data Dokumen Time Schedule Data Rancangan Awal RPJMD Data SE Bupati Penyempurnaan Ranwal Renstra PD Data BA Desk Renstra Data Dokumen RTRW Data Dokumen Rancangan RPJMD Data BA Musrengbang RPJMD Data Dokumen Akhir RPJMD Data Perda RPJMD	FMIS	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data Dokumen Renstra				
LA -SRG-028	Layanan Pergeseran Anggaran	Data Arsip Usulan Pergeseran Anggaran	e-GESER	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
LA -SRG-029	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Data Dokumen Renja Data Dokumen RKPD Data Dokumen RPJMD Data Dokumen Renstra OPD	SI-RENJA SIPD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
LA -SRG-030	Layanan Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi	Data Inovasi Data Nilai Kematangan Inovasi	SI-RISMA	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
LA -SRG-031	Layanan Pemantauan Kinerja dan Anggaran	Data Kinerja dan Serapan Anggaran	KE-KER	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
LA -SRG-032	Layanan Pengendalian dan Evaluasi Program Unggulan Bupati	Data Capaian Program Unggulan Bupati	SENGGUH	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
LA -SRG-033	Layanan Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Data Capaian RKPD	EMONEVRKPD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
LA -SRG-034	Layanan Konsultasi Produk Hukum	Data Konsultasi Produk Hukum Data Bantuan Hukum		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.28 Hukum	Bagian Hukum
LA -SRG-035	Layanan Pemberian Informasi Hukum	Data Informasi dan Dokumentasi Hukum	JDIH	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.28 Hukum	Bagian Hukum
LA -SRG-036	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Data Penyusunan Produk Hukum Daerah Data Surat Usulan Bemperperda Data Naskah Akademik Data Draft Produk Hukum Data Nomor Registrasi Data Salinan Perda Data Metadata Data Dokumen Produk Hukum Data Draft Peraturan Kepala Daerah	SIPP DEH JDIH	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.28 Hukum	Bagian Hukum

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data Salinan Peraturan Kepala Daerah Data Peraturan Kepala Daerah				
LA -SRG-037	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	Data Kematangan Organisasi Daerah Data Kelembagaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Data Monitoring dan Pengendalian Tugas Perangkat Daerah Data Penjaminan Mutu Pelayanan Perangkat Daerah Data SOP Pelayanan Perangkat Daerah Data Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Data Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah Data Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Data Manajemen Resiko Tugas Aparatur Data Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur Data Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah	SIKOD ELEGAN	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	Bagian Organisasi
LA -SRG-038	Layanan Kepuasan Masyarakat	Data Kepuasan Masyarakat	SUKMA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	Bagian Organisasi
LA -SRG-039	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Data Komponen SAKIP Data Capaian Reformasi Birokrasi Data RPJMD Data Renstra Data Cascading Data IKU Data RENJA Data RKT Data Perjanjian Kinerja Data Renaksi Data Monev Realisasi Kinerja Data LKJIP Kabupaten	e-SAKIP ESR Menpan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bagian Organisasi

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data Hasil Reviu Kabupaten Data LHE Perangkat Daerah Data LPPD				
LA -SRG-040	Layanan Fasilitasi Sewa Tanah Eks Bondo Desa	Data Peta Digital Penggunaan Lahan Sragen	PENGAMAN SANTET	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Bagian Pemerintahan
LA -SRG-041	Layanan Pemantauan 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Sosial dan Trantibulinmas)	Data Pelayanan Dasar Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Sosial dan Trantibulinmas)	SPM	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	Bagian Pemerintahan
LA -SRG-042	Layanan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	LKPJ	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bagian Pemerintahan
LA -SRG-043	Layanan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	ELPPD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bagian Pemerintahan
LA -SRG-044	Layanan Perencanaan Program dan Kegiatan OPD	Data Perencanaan Program dan Kegiatan OPD	SIPD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bagian Pemerintahan
LA -SRG-045	Layanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Data Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	SULTAN	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
LA -SRG-046	Layanan Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Data Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	AMEL	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
LA -SRG-047	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Paket Pengadaan Data Penyedia Data Rencana Umum Pengadaan Data Penilaian Kinerja Penyedia Data Model Dokumen Pemilihan Data Kaji Ulang Data Dokumen Teknis Data Dokumen Kualifikasi Data Dokumen Administrasi Data Dokumen Penawaran Harga Data BA Hasil Non Tender Data Dokumen SPPBJ	LPSE SIRUP SIKAP	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data Dokumen Kontrak Data Dokumen PPK Data BA Kaji Ulang Data BA Hasil Tender				
LA -SRG-048	Layanan Pengarsipan Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL)	Data Dokumentasi Arsip Pengadaan	SIMPAN ASET	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
LA -SRG-049	Layanan Arsip Statis	Data Arsip Statis		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
LA -SRG-050	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Data Arsip Surat Masuk Data Disposisi Surat Data TTE Data Buku Agenda Keluar Data Kartu Kendali Keluar Data Surat Keluar Data Buku Agenda Masuk Data Kartu Kendali Masuk Data Lembar Disposisi	SRIKANDI	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
LA -SRG-051	Layanan Online Public Access Catalog	Data Katalog Buku	INLISLITE	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
LA -SRG-052	Layanan Perpustakaan Keliling	Data Lokasi Perpustakaan Keliling Data Koleksi Buku Perpustakaan Keliling		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
LA -SRG-053	Layanan Perpustakaan Online	Data Koleksi Buku	iSRAGEN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
LA -SRG-054	Layanan Perpustakaan Umum	Data Peminjaman Buku Perpustakaan	INLISLITE	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
LA -SRG-055	Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian DUKCAPIL	Data Surat Keterangan Lahir Data Kartu Keluarga (KK) Data Surat Keterangan Kematian Data Kartu Tanda Penduduk (KTP)	BARATA PELITA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LA -SRG-056	Layanan Digitalisasi Arsip Kependudukan	Data Digitalisasi Arsip Kependudukan	TERPANA DOA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LA -SRG-057	Layanan Dispensasi Pindah Online	Data Surat Keterangan Pindah Data Kartu Keluarga (KK)	E-OFFICE	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data Kartu Tanda Penduduk (KTP)				
LA -SRG-058	Layanan Pengajuan Pembuatan Dokumen Kependudukan	Data Pengajuan Pembuatan Dokumen Kependudukan	PANDU ONLINE SIAK	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LA -SRG-059	Layanan Pengambilan Nomor Antrian Online	Data Nomor Antrian Pelayanan Kependudukan	SIANTON	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LA -SRG-060	Layanan Pengiriman Dokumen Admuduk Masyarakat	Data Pengiriman Dokumen Admuduk Masyarakat	PELANDUK POS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LA -SRG-061	Layanan Kegawatdaruratan Medis Terpadu	Data Kejadian Kegawatdaruratan Data Laka Lantas Data Posisi Ambulance Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan Data Ketersediaan Tempat Tidur	PSC 119 SUKOWATI/MAW AS SUKOWATI 119	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Dinas Kesehatan
LA -SRG-062	Layanan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue	Data Kasus Demam Berdarah Dengue Data Penanggulangan Demam Berdarah Dengue	SIPENEBAR	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Dinas Kesehatan
LA -SRG-063	Layanan Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKN)	Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKN)	SIPENTURA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Dinas Kesehatan
LA -SRG-064	Layanan Perizinan Fasilitas Kesehatan	Data Rekomendasi Surat Izin Praktik Kesehatan	SI-I AN SEHAT	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Dinas Kesehatan
LA -SRG-065	Layanan Bantuan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Data Produksi Tanaman Pangan Data Produksi Hortikultura Data Produksi Perkebunan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.08 Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-066	Layanan Informasi Panen	Data Pemetaan Aktivitas Tanam dan Panen	e-PANEN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-067	Layanan Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak	Data Surat Rekomendasi Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-068	Layanan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Data Penyuluh Pertanian Data Petani	SIMLUHTAN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-069	Layanan Kesehatan Hewan	Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-070	Layanan Pelaporan Pematangan Hewan Rumah Potong Hewan (RPH)	Data Pelaporan Pematangan Hewan Rumah Potong Hewan (RPH)	REALTIS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-071	Layanan Pembenihan dan Penjualan	Data Produksi Benih Ikan Unggul		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
	Benih Ikan	Data Pembeli Benih Ikan Unggul Data Penjualan Benih Ikan Unggul			Perikanan	dan Perikanan
LA -SRG-072	Layanan Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan	Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-073	Layanan Pemberian Surat Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Bahan Pakan Hewan	Data Surat Rekomendasi Pemasukan Pakan Ternak		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-074	Layanan Pemeriksaan Ante Mortem	Data Hasil Pemeriksaan Ante Mortem		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-075	Layanan Pemeriksaan Post Mortem	Data Hasil Pemeriksaan Post Mortem		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-076	Layanan Penjualan Benih Unggul Bersertifikat	Data Stok Benih Unggul Bersertifikat Data Produksi Benih Unggul Bersertifikat Data Pembeli Benih Unggul Bersertifikat Data Penjualan Benih Unggul Bersertifikat		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-077	Layanan Perizinan Edar Pangan	Data Perizinan Edar Pangan	OSS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-078	Layanan Pupuk Bersubsidi	Data Alokasi Pupuk Bersubsidi	SIMPI	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-079	Layanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (Registrasi PSAT-PDUK)	Data Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Data Registrasi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK)	OSS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-080	Layanan Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) Tekstil	Data Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) Tekstil		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-081	Layanan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	Data Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.08 Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-082	Layanan Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan	Data Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-083	Layanan Surat Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Produk Asal Hewan	Data Surat Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Produk Asal Hewan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
LA -SRG-084	Layanan Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD)	Data Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD)	iSIKHNAS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-085	Layanan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	Data Vaksinasi Penyakit Kuku dan Mulut (PMK)	iSIKHNAS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
LA -SRG-086	Layanan Capaian Kemajuan Statistik Sektoral	Data Capaian Kemajuan Statistik Sektoral	INDEKS STATISTIK SEKTORAL	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-087	Layanan Disposisi Online	Data Disposisi Tepat Waktu	DISBOOK	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-088	Layanan Evaluasi Smart City	Data Evaluasi Smart City	EVALUASI SMARTCIT (KEMKOMINFO)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-089	Layanan Evaluasi SPBE	Data Evaluasi SPBE	EVALUASI SPBE (KEMENPANRB)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-090	Layanan Fasilitas Pembelajaran IT (Information Technology)	Data Pembelajaran IT (Information Technology)	BLC	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-091	Layanan Kirim dan Terima Surat Online	Data Surat Masuk dan Keluar Antar OPD	SUR A	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-092	Layanan Manajemen TIK	Data Pengajuan Email Data Pengajuan TIK Data Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi	ANA A APLIKASI DEWAN TIK	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-093	Layanan Pelayanan Publik Terpusat	Data Pelayanan Publik Data Permohonan Informasi	SEROJA	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-094	Layanan Pengaduan Masyarakat	Data Aduan Masyarakat	SP4N LAPOR LAPORGUB	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-095	Layanan Retribusi Menara Telekomunikasi dan Data Menara Telekomunikasi	Data Menara Telekomunikasi	SITEPLAN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-096	Layanan Satu Data Tingkat Daerah	Data Sektoral	SRAGEN SATU DATA	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-097	Layanan Sistem Informasi Pelayanan	Data Rekomendasi Pendirian Menara	SIPRONATEL	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
	Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi	Telekomunikasi			Informasi	
LA -SRG-098	Layanan SPPD Online	Data SPPD Dalam dan Luar Daerah	SPPD ONLINE	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-099	Layanan Tanda Tangan Elektronik	Data Dokumen Penggunaan TTE	TTE	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
LA -SRG-100	Layanan Aduan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Data Aduan Masyarakat Distribusi Pupuk	SIAPPUBERS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
LA -SRG-101	Layanan Informasi Harga Bahan Pokok Penting	Data Harga Bahan Pokok Penting		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
LA -SRG-102	Layanan Informasi Koperasi	Data Daftar Koperasi	SIKOPER	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
LA -SRG-103	Layanan Pendampingan Merk dan Izin Edar Usaha	Data Surat Rekomendasi Merk dan Izin Edar Usaha		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
LA -SRG-104	Layanan Peningkatan Pemahaman Koperasi	Data Konsultasi Koperasi	SI BINA SERASI	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
LA -SRG-105	Layanan Retribusi Pasar	Data Retribusi Pasar Data Potensi Pasar		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
LA -SRG-106	Layanan Pengelolaan Persampahan	Data Lokasi Angkutan Sampah Data Retribusi Sampah	SIBARES	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
LA -SRG-107	Layanan Persetujuan Lingkungan (SKKLH, PKPLH, dan NIB (SPPL))	Data Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) Data Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Data Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	OSS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
LA -SRG-108	Layanan Persetujuan Teknis Kegiatan Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah	Data Persetujuan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Limbah Data Persetujuan Teknis Kegiatan Pembuangan Limbah	OSS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
LA -SRG-109	Layanan Persetujuan Teknis	Data Pemenuhan Baku Mutu Emisi	OSS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40	Dinas Lingkungan Hidup

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
	Pemenuhan Baku Mutu Emisi				Lingkungan Hidup	
LA -SRG-110	Layanan Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3	Data Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3	OSS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
LA -SRG-111	Layanan Informasi Database Keolahragaan	Data Informasi Keolahragaan	SIDORA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.35 Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
LA -SRG-112	Layanan Informasi Pariwisata Air Bayanan	Data Informasi Pariwisata Air Panas Bayanan	SIPEPA A	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
LA -SRG-113	Layanan Informasi Pariwisata Sragen	Data Informasi Pariwisata Sragen	SITAGEN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
LA -SRG-114	Layanan Informasi Pariwisata Terintegrasi	Data Informasi Pariwisata Terintegrasi	SIMPATI	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
LA -SRG-115	Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Online	Data Kenaikan Gaji Berkala	KENAIKAN GAJI BERKALA	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
LA -SRG-116	Layanan Sewa Gor Diponegoro dan Taruna	Data Sewa Gor dan Taruna		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.35 Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
LA -SRG-117	Layanan Tiket Destinasi Pariwisata	Data Tiket Pariwisata	e-TICKETING	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
LA -SRG-118	Layanan Virtual Tour Destinasi	Data Pengelolaan Virtual Destinasi	VIRTUAL TOUR LAKASIWISATA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
LA -SRG-119	Layanan Aduan Jalan Rusak	Data Aduan Jalan Rusak Data Jalan Rusak	PATRIOT SRAGEN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
LA -SRG-120	Layanan Penebangan Pohon	Data Aduan Pematangan Pohon Turus Jalan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
LA -SRG-121	Layanan Penyedotan Kakus	Data Pelanggan Penyedotan Kakus		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
LA -SRG-122	Layanan Penyewaan Tanah Bahu Jalan	Data Penyewa Bahu Jalan Data Retribusi Sewa Bahu Jalan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
LA -SRG-123	Layanan Persetujuan Bangunan dan Gedung	Data Pemohon Bangunan Gedung Data Persetujuan Bangunan Gedung Data Retribusi Bangunan Gedung	SIMBG	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
LA -SRG-124	Layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Data Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Data Sertifikat Laik Fungsi Data Retribusi Sertifikat Laik Fungsi	SIMBG	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
LA -SRG-125	Layanan Sewa Alat Berat	Data Pelanggan Sewa Alat Berat Data Alat Berat Data Retribusi Sewa Alat Berat		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
LA -SRG-126	Layanan Sewa Tanah Lambiran	Data Pemohon Pemanfaatan Tanah Lambiran Data Retribusi Sewa Tanah Lambiran		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
LA -SRG-127	Layanan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	EPDESKEKEL	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
LA -SRG-128	Layanan Infografis Desa Membangun	Data Infografis Desa Membangun	INDEKS DESA MEMBANGUN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
LA -SRG-129	Layanan Informasi Desa	Data Infografis Desa Data Perkembangan Desa Data BUMDes	GAPURA DESA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
LA -SRG-130	Layanan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Data Kepala Desa dan Perangkat Desa	SUKAPEDES	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
LA -SRG-131	Layanan Klinik BUMDes	Data Klinik BUMDes	KLINIK BUMDES DAS DES	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
LA -SRG-132	Layanan Pengelolaan Aset Desa	Data Pengelolaan Aset Desa	SIPADES	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
LA -SRG-133	Layanan Pengelolaan Keuangan Desa	Data Pengelolaan Keuangan Desa	SISKEUDES	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
LA -SRG-134	Layanan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Data Profil Desa	PRODESKEKEL	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
LA -SRG-135	Layanan Perencanaan dan Evaluasi Monitoring Keuangan Dinas PMD	Data Perencanaan Dinas PMD	SIPMONTOK	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
LA -SRG-136	Layanan Aduan Perizinan	Data Aduan Perizinan Tindak Lanjut	SIAP	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-137	Layanan Informasi Kegiatan DPMPTSP	Data Kegiatan DPMPTSP		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-138	Layanan Informasi Manajemen Bangunan Gedung	Data Perizinan Bangunan dan Gedung	SIMBG	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-139	Layanan Informasi Persebaran Investasi	Data Persebaran Investasi	PASTI OL	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-140	Layanan Informasi Peta Peluang Investasi	Data Peta Peluang Investasi	SI PELANGI	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-141	Layanan Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN)	Data Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	SIPIPO	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-142	Layanan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Data Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	SI PIONER	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-143	Layanan Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Data Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	SIPIPO	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-144	Layanan Izin Praktik	Data Izin Praktik	SI PIONER	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-145	Layanan Izin Reklame	Data Izin Reklame	SI PIONER	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-146	Layanan Izin Trayek	Data Perizinan Trayek	SI PIONER	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-147	Layanan Pembuatan Surat Keterangan Penelitian	Data Kegiatan Penelitian Data Peneliti	SIPIPO	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-148	Layanan Pengelolaan Akun	Data User Pengguna Aplikasi	SSO	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-149	Layanan Perizinan Berusaha	Data Nomor Induk Berusaha (NIB) Data Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) Data Persyaratan Perizinan Data Rekomendasi / Persetujuan Teknis Data Ketetapan Retribusi Daerah Data SK Perizinan Data Sertifikat Standart	OSS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data Surat Perizinan				
LA -SRG-150	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Data Perizinan dan Non Perizinan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-151	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat	Data Survei Kepuasan Masyarakat	SKM	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
LA -SRG-152	Layanan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru	Data Penerimaan Siswa Jalur onasi Data Penerimaan Siswa Jalur Prestasi Data Penerimaan Siswa Jalur Afirmasi Data Penerimaan Siswa Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali Data Calon Siswa Baru Data Berkas Pendaftaran	PPDB-ONLINE	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LA -SRG-153	Layanan Pengelolaan Pendidikan	Data Siswa Data Guru Data Sekolah	DAPODIK	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LA -SRG-154	Layanan Tunjangan Profesi Guru	Data SK Guru Penerima Tunjangan Profesi	SIM TUNJANGAN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LA -SRG-155	Layanan KLA (Kabupaten Layak Anak)	Data Pendukung Kabupaten Layak Anak (KLA)		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LA -SRG-156	Layanan Pemasangan KB MKJP	Data Masyarakat Penerima Pelayanan KB MKJP Data Identitas Aseptor Pemasangan KB MKJP Data Jenis KB MKJP Data Waktu Pemasangan KB MKJP Data Tanggal E pired Pemasangan KB MKJP		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LA -SRG-157	Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Data Korban Penerima Pelayanan Pendampingan	TESIA SIMFONI PPA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LA -SRG-158	Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Data Keluarga Penerima Pelayanan Konseling		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
						Perlindungan Anak
LA -SRG-159	Layanan Bot-Pedia Keselamatan Berjalan Lintas	Data Bot Berjalan Lintas Data Pengenalan Rambu Lalu Lintas	ROMANTIS SUKOWATI	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan
LA -SRG-160	Layanan Pendaftaran dan Pengecekan Hasil Uji KIR Kendaraan Bermotor	Data Nomor Antrian Uji Kendaraan Data Hasil Uji Kendaraan	NGE-KIR ONLINE	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan
LA -SRG-161	Layanan Pengaduan Kelalulintasan	Data Aduan Kerusakan Alat Penunjang Kelalulintasan	SIAP-LALIN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan
LA -SRG-162	Layanan Pengelolaan Perparkiran	Data Pengelolaan Perparkiran	SIM PARKIR	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan
LA -SRG-163	Layanan Pengetahuan dan Pembelajaran Keselamatan Berjalan Lintas	Data Ensiklopedia Keselamatan Berjalan Lintas	ROMANTIS SUKOWATI	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan
LA -SRG-164	Layanan Perizinan Angkutan	Data Nomor Induk Berusaha	OSS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan
LA -SRG-165	Layanan Sistem Informasi Laporan Kinerja	Data Pelaporan Pengamanan Data Pelaporan Kegiatan Perbaikan Data Pelaporan Pengawasan Data Pelaporan Pengendalian Angkutan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan
LA -SRG-166	Layanan izin Pemakaian Taman dan Alun-Alun	Data Izin Pemakaian Taman dan Alun-Alun		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.22 Pertanahan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
LA -SRG-167	Layanan Izin Pemakaman	Data Izin Pemakaman		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.22 Pertanahan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
LA -SRG-168	Layanan Perizinan Tata Ruang	Data Surat Keterangan Peruntukan Ruang Data Cetak Peta Informasi Tata Ruang Usaha Pertambangan Batuan Data Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Data Perizinan Tata Ruang	SIPETARUNG	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.22 Pertanahan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
LA -SRG-169	Layanan Reforma Agraria	Data Reforma Agraria	PAK TORA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.22 Pertanahan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
LA -SRG-170	Layanan Sewa Gedung	Data Izin Pemakaian Gedung	SIAGA SUKOWATI	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.22 Pertanahan	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
LA -SRG-171	Layanan Penanganan Fakir Miskin	Data Kartu Indonesia Sehat (KIS)	SIKS-NG	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Dinas Sosial

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Data Program Keluarga Harapan (PKH) Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Data Penerima Bansos APBD	SIKS-V2 DT Jateng SIM SARASWATI			
LA -SRG-172	Layanan Penerima Bantuan	Data Penerima Terapi Bantuan APBD	DESA TUMIS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Dinas Sosial
LA -SRG-173	Layanan Rehabilitasi Sosial	Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Dinas Sosial
LA -SRG-174	Layanan Antar Kerja Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)	Data Surat Keterangan Rekomendasi Paspor TKI Data Kartu Identitas Pencari Kerja Luar Negeri	SIAPKERJA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
LA -SRG-175	Layanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Data Penempatan Tenaga Kerja Data Pelatihan Tenaga Kerja Data Lowongan Pekerjaan	LAPPAK SUKOWATI	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
LA -SRG-176	Layanan Pendataan Informasi Pasar Kerja	Data Kartu Identitas AK-1 Data Pencari Kerja	e-MAKAR O	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
LA -SRG-177	Layanan Aduan Pegawai	Data Aduan Pegawai	WBS	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Inspektorat
LA -SRG-178	Layanan Gratifikasi	Data Gratifikasi	GOL KPK	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Inspektorat
LA -SRG-179	Layanan Konsultasi Online	Data Konsultasi Pengawasan	SORJAN	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Inspektorat
LA -SRG-180	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Data Form Rekap Tindak Lanjut Data Dokumen Tindak Lanjut Data Form Evaluasi Tindak Lanjut Data Berita Acara Akhir Data Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester Data Surat Permohonan Audit Data Surat Tugas Data Program Kerja Audit Data Kertas Kerja Audit Data Konsep LHP Data Laporan Hasil Audit		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara	Inspektorat

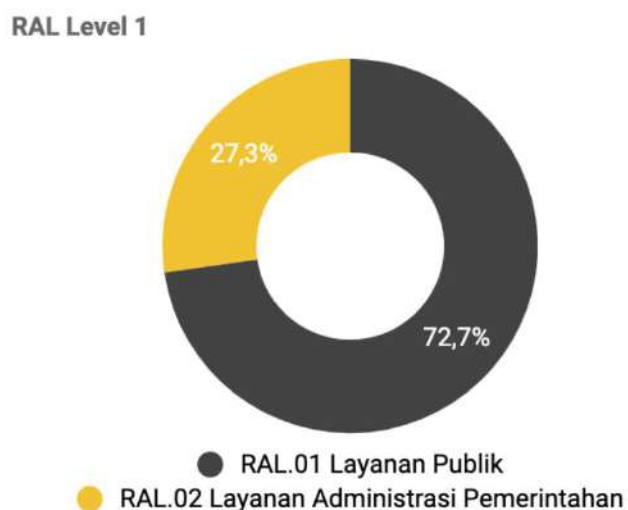
ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data Dokumen Draft Temuan Sementara Data Dokumen Draft Temuan Akhir Data BA Kesepakatan Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Data Kartu Penugasan Audit Data Formulir Anggaran Waktu Data Surat Pernyataan Independensi Data Surat Permintaan Dokumen Data Pemeriksaan Pendahuluan				
LA -SRG-181	Layanan Surat Keterangan Bebas Temuan	Data Surat Keterangan Bebas Temuan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Inspektorat
LA -SRG-182	Layanan Antrian Pelayanan Rawat Jalan	Data Nomor Antrian Pasien	SIMRS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
LA -SRG-183	Layanan Manajemen Rumah Sakit	Data Informasi Pengelolaan Tempat Tidur Data Sebaran Diagnosa Data Kunjungan Data Informasi Laporan Keuangan Rumah Sakit	SIMRS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
LA -SRG-184	Layanan Pendaftaran Online Pasien RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Data Identitas Pasien	DAFTAR ONLINE	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
LA -SRG-185	Layanan Aduan Kerusakan Alat Medis dan Sarpras Rumah Sakit	Data Kerusakan Alat Medis Data Kerusakan Sarpras Rumah Sakit	AMAN POLL	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-186	Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian RSUD dr. Soeratno Gemolong	Data Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan Wafat	LANTERA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-187	Layanan Antar Obat	Data Antar Obat Pasien	SOBAT	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-188	Layanan Asuhan Keperawatan	Data Asuhan Keperawatan	SIPRADITA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-189	Layanan BPJS Kesehatan	Data BPJS Kesehatan	JKN MOBILE	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-190	Layanan BPJS Ketenagakerjaan	Data BPJS Ketenagakerjaan	e-SEP	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
LA -SRG-191	Layanan Homecare	Data Pasien Homecare	HORE RAMAH	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-192	Layanan Informasi Chatbot Rumah Sakit Gemolong Sragen	Data Chatbot Rumah Sakit Gemolong Sragen	GEMATI	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-193	Layanan Informasi Fasilitas Kesehatan	Data Informasi Fasilitas Kesehatan	HFIS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-194	Layanan Informasi Jadwal Dokter	Data Jadwal Dokter		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-195	Layanan Informasi Pelaporan Pemutusan BPJS Ketenagakerjaan	Data Informasi Pelaporan Pemutusan BPJS Ketenagakerjaan	SIPP	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-196	Layanan Informasi Rumah Sakit Online	Data Informasi Rumah Sakit Online	SIRS ONLINE	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-197	Layanan Instalasi Gawat Darurat	Data Instalasi Gawat Darurat Pasien	PSC	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-198	Layanan Jejaring Warga dan Komunitas Promosi Kesehatan	Data Komunitas Warga Promosi Kesehatan	JIWA KORSA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-199	Layanan Kepegawaian Rumah Sakit	Data Kepegawaian Rumah Sakit	SIDIAN SISDMK	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-200	Layanan Kerjasama dan Diklat Rumah Sakit	Data Kerjasama dan Diklat Rumah Sakit		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-201	Layanan Kesehatan Masyarakat Patient Center Care (PCC)	Data Kesehatan Masyarakat Patient Center Care (PCC)		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-202	Layanan Kesehatan Sekunder	Data Electronic Medical Record (EMR) Data Bill Pasien Data Obat	SIM RS GOS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-203	Layanan Kesehatan Warga Miskin	Data Kesehatan Warga Miskin	SARASWATI	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-204	Layanan Ketersediaan Obat	Data Ketersediaan Obat Data Pembelian Obat Data Resep Obat	APOTIK ONLINE	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-205	Layanan Klaim BPJS	Data Klaim BPJS	e-KLAIM V-CLAIM BPJS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-206	Layanan Pendaftaran Online Pasien	Data Nomor Antrian Rumah Sakit	SIDATAN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25	RSUD dr. Soeratno Gemolong

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
	RSUD dr. Soeratno Gemolong				Kesehatan	
LA -SRG-207	Layanan Pengembangan Rumah Sakit	Data Standar Pelayanan Rumah Sakit	SIMA A	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-208	Layanan Podcast Promosi Kesehatan	Data Podcast Promosi Kesehatan	PARAMITA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-209	Layanan Promosi dan Edukasi Rumah Sakit	Data Manajerial Direktur Rumah Sakit Data Kritik dan Saran Rumah Sakit	AISHA	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-210	Layanan Rujukan Rumah Sakit	Data Rujukan Pasien	SISRUTE	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-211	Layanan Tagihan Rumah Sakit	Data Tagihan Rumah Sakit	LUPIS	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-212	Layanan Usulan dan Tracking Barang Medis	Data Usulan Barang Medis Data Tracking Barang Medis	SIUL	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD dr. Soeratno Gemolong
LA -SRG-213	Layanan Pelatihan Penanganan Kebakaran	Data Sosialisasi Penanganan Kebakaran		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja
LA -SRG-214	Layanan Penanganan Aduan Kebakaran dan Evakuasi	Data Pemadaman Kebakaran dan Evakuasi	SI JAGA SUKOWATI SI PAKPOL	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja
LA -SRG-215	Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Ketertiban	Data Pelanggaran Ketertiban, Perda dan Perkada Data Satlinmas	SI JAGA SUKOWATI SI PAKPOL	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja
LA -SRG-216	Layanan Tracking Pelanggar Ketertiban	Data Tracking Pelanggar Ketertiban		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja
LA -SRG-217	Layanan Kunjungan Kerja DPRD	Data Studi Banding DPRD		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Sekretariat Dewan
LA -SRG-218	Layanan Pelaksanaan Rapat DPRD	Data Dokumen Perda Data Produk Hukum Daerah		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Sekretariat Dewan
LA -SRG-219	Layanan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD	Data Aspirasi Masyarakat	SIPPOKIR	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Sekretariat Dewan
LA -SRG-220	Layanan Pelaksanaan Sidang DPRD	Data Notulensi Sidang DPRD		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Sekretariat Dewan

3.2.3.2. Analisis Diagram Layanan

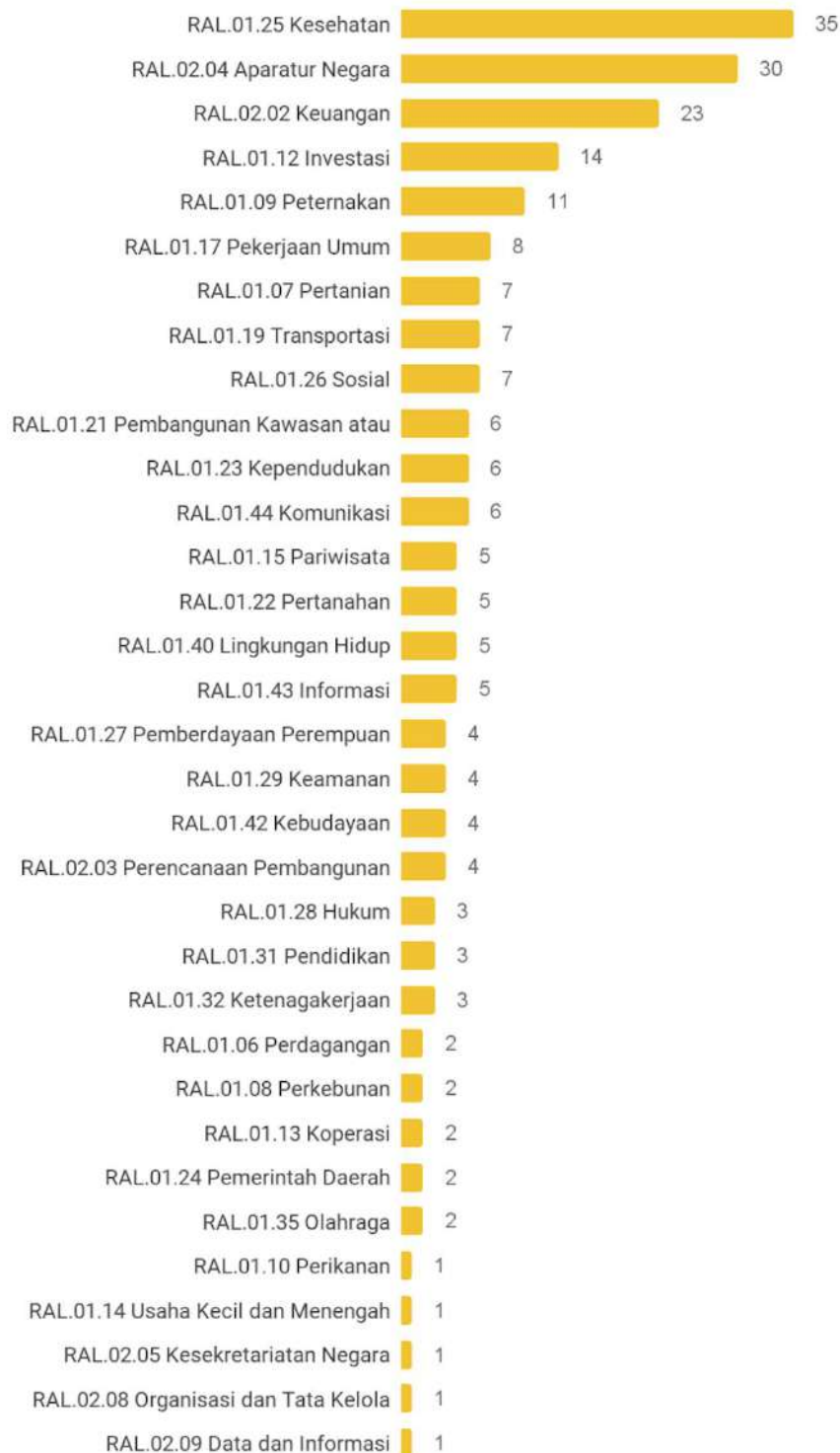
Merujuk pada hasil pemetaan layanan pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data *eksisting* dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 3.2.3.2.1. Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan RAL Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Sragen

Berdasarkan grafik 3.2.3.2.1 serta mengacu pada Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional (RAL Level 1) dari total 220 layanan yang dimiliki, terdapat 72,7 (160 Layanan) merupakan RAL.01 Layanan Publik dan sebesar 27,3 (60 Layanan) merupakan RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan. Mengacu pada referensi arsitektur ini, mayoritas layanan yang ada merupakan layanan publik untuk masyarakat dimana pemerintah Kabupaten Sragen dapat menjadikannya sebagai panduan untuk memfasilitasi kerjasama antara instansi pemerintah/perangkat daerah dalam pengembangan layanan publik dan juga membantu pemerintah dalam merancang dan mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan transparan.

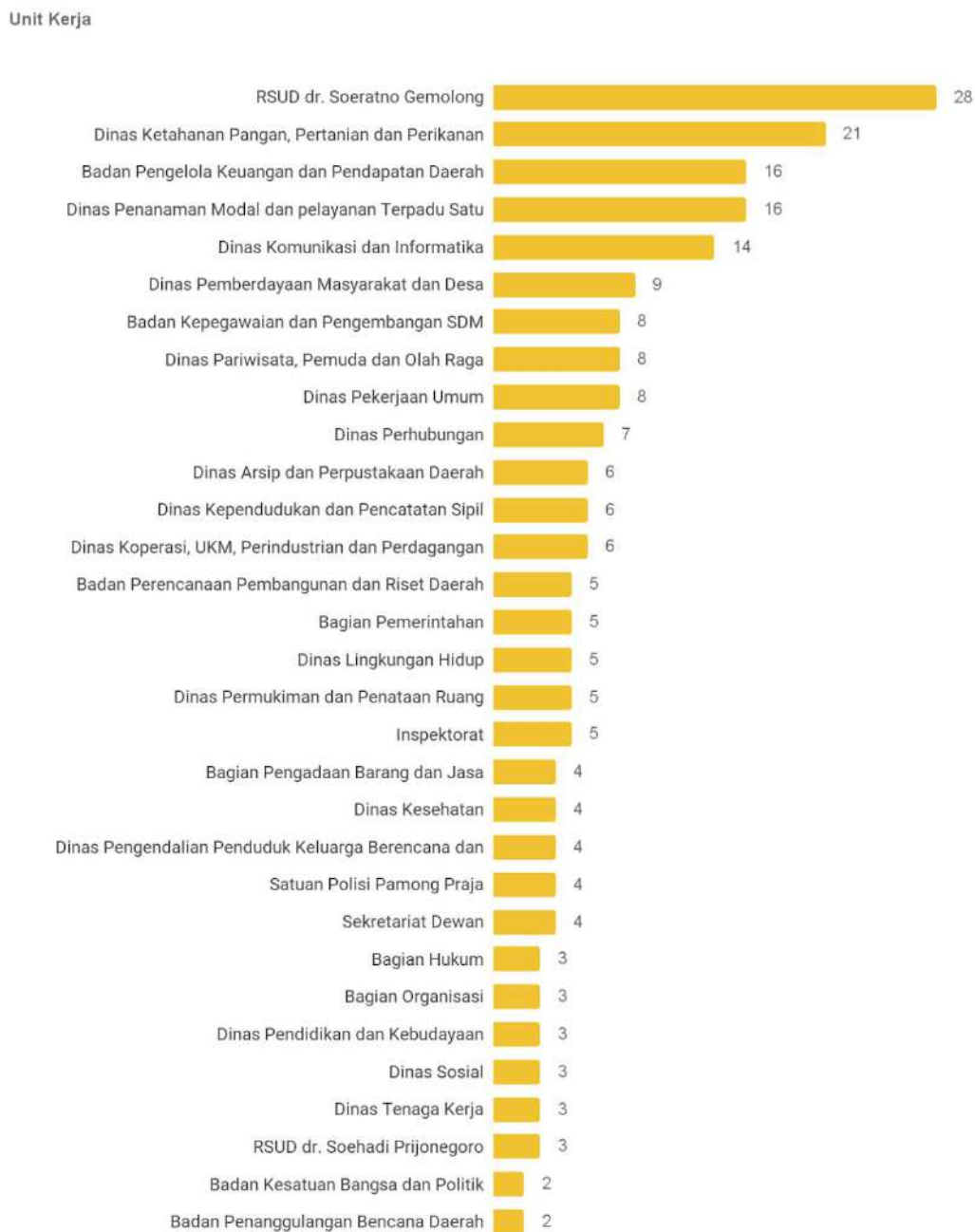
RAL Level 2



Grafik 3.2.3.2.2 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan RAL Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Sragen

Berdasarkan Grafik 3.2.3.2.2 dapat dilihat RAL Level 2 yang paling banyak adalah RAL.01.25. Kesehatan sejumlah 35 layanan, RAL.02.04 Aparatur Negara sejumlah 30 layanan dan RA .02.02 Keuangan sejumlah 23 layanan. Referensi Arsitektur Layanan Nasional di Pemerintah Kabupaten Sragen mencakup 33 Referensi dari 52 Arsitektur Layanan Nasional. Perbedaan pada jumlah layanan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah menyesuaikan pada tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini

tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.



Grafik 3.2.3.2.3. Grafik Jumlah Layanan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sragen

Berdasarkan grafik 3.2.3.2.3. menunjukkan bahwa layanan paling banyak dimiliki oleh RSUD dr. Soeratno emolong sejumlah 28 layanan dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sejumlah 21 layanan. Sedangkan paling sedikit berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya memiliki 2 layanan. Berdasarkan hasil survei, keseluruhan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah memerlukan verifikasi agar layanan dapat terstandarisasi serta memastikan layanan tersebut berjalan optimal.

3.2.3.3. Diagram Layanan SPB yang menjadi indikator dalam evaluasi

Diagram layanan SPBE menjelaskan hubungan antara layanan, data, dan aplikasi di masing-masing perangkat daerah khusus indikator 32 sampai 47 pada evaluasi SPBE. Hal ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan transformasi proses layanan. Diagram layanan SPBE juga menjelaskan layanan antar perangkat daerah yang memiliki irisan dan memetakan kepemilikan data pada masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat diidentifikasi data apa saja yang dapat di berbagai pakaikan antar perangkat daerah. Hasil identifikasi data menjadi dasar dalam penyusunan rencana integrasi antar sistem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Berikut ini merupakan gambaran keterkaitan layanan, data, aplikasi dan teknologi.

3.2.3.1.1. Layanan Perencanaan SPB

Sebagai upaya untuk menunjang layanan perencanaan SPBE, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai tugas bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja badan;
- b. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan; dan
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah.

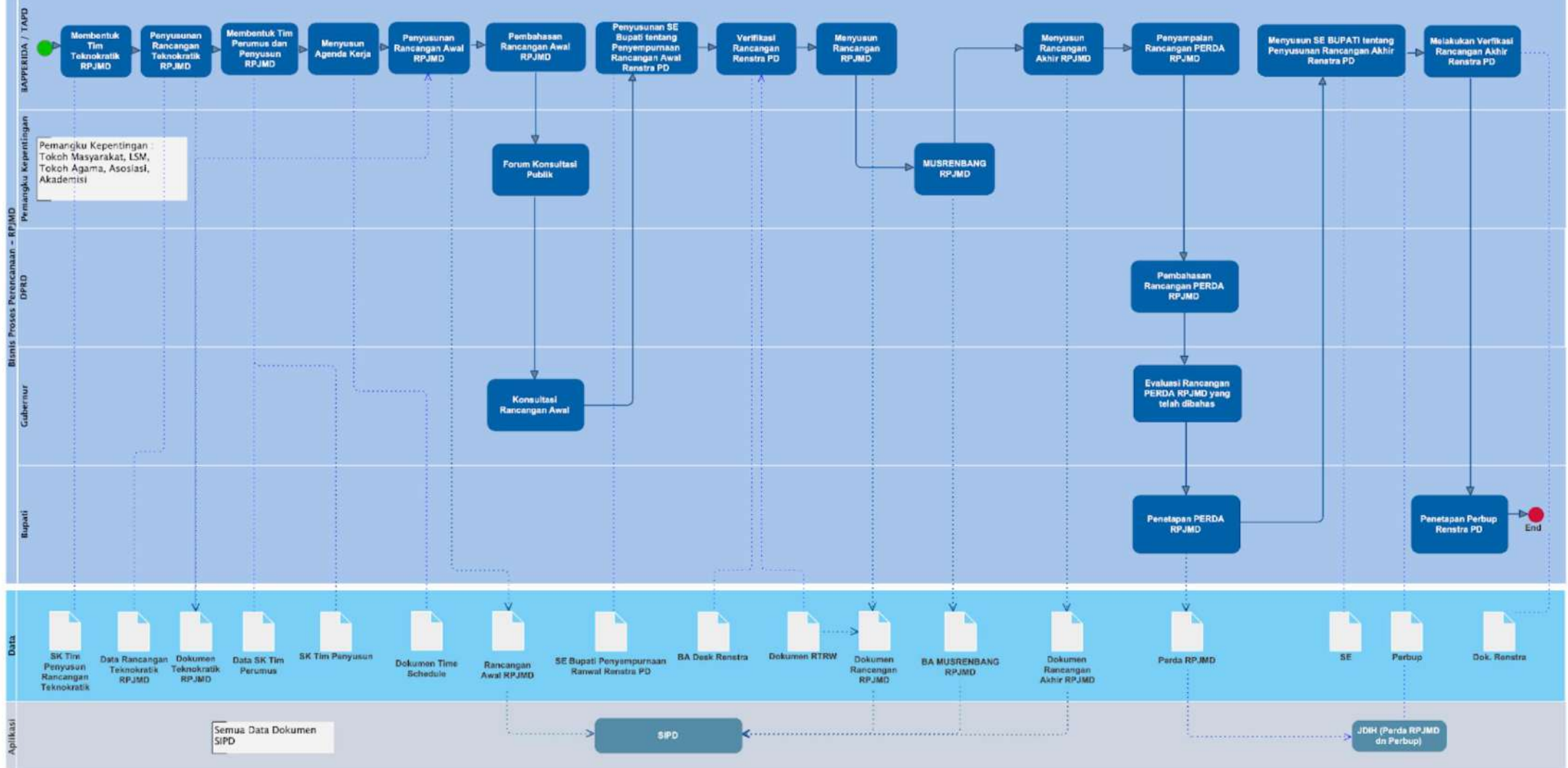
Berdasarkan fungsi tersebut, layanan perencanaan SPBE di Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah adalah:

Tabel 3.2.3.1.1.1 Layanan Perencanaan SPBE

No.	Deskripsi	Uraian
1.	Penyusunan Dokumen RPJMD	Proses perencanaan jangka menengah yang disesuaikan dan ditetapkan dengan kebutuhan daerah dan memuat komitmen untuk mencapai visi dan misi daerah.
2.	Penyusunan Dokumen Renstra	Proses perencanaan jangka panjang yang memuat tujuan, strategi, program, dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi daerah. Dokumen ini disusun sebelum pengembangan RPJMD.

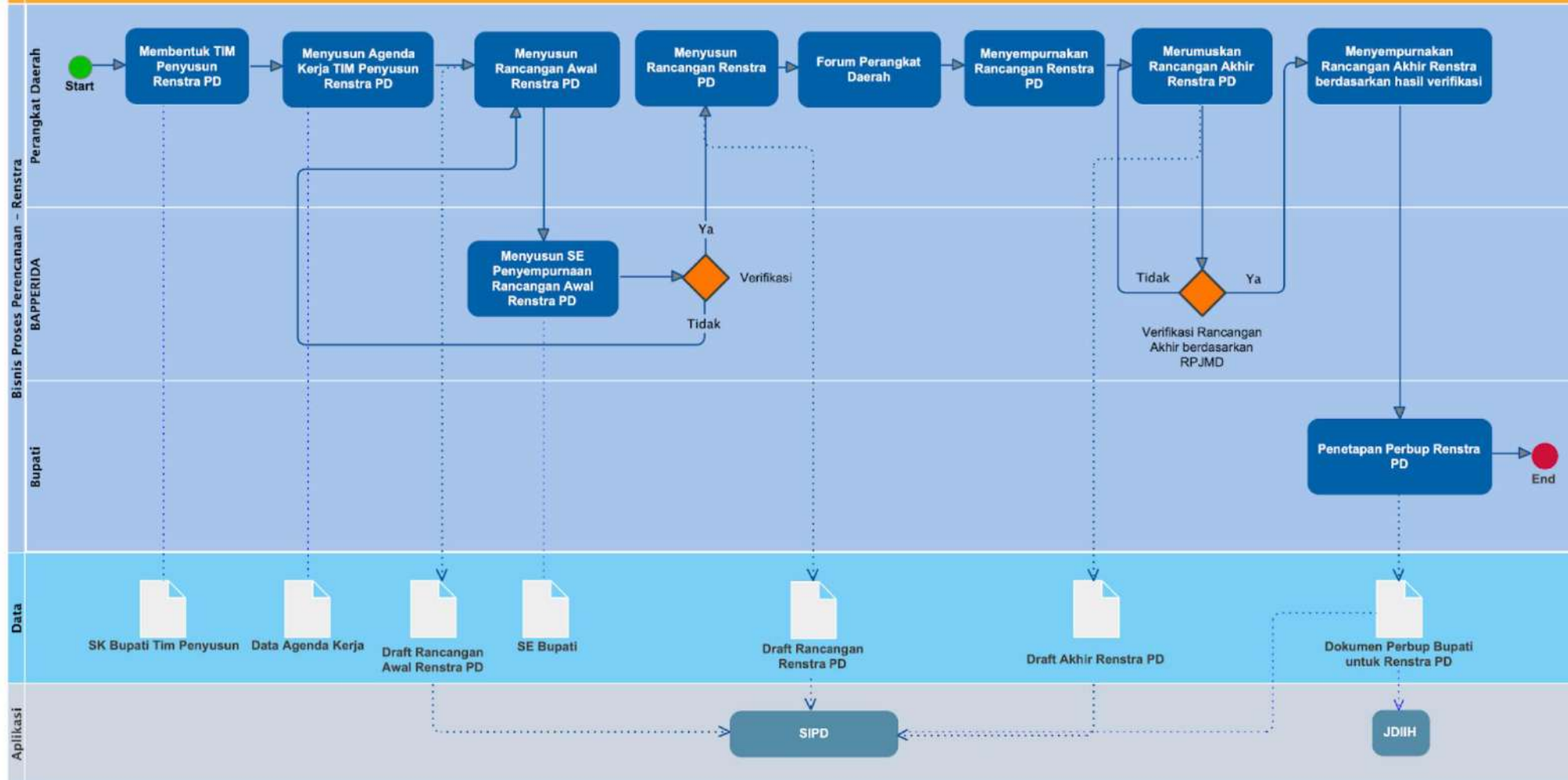
Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah memiliki 2 sub layanan yaitu Penyusunan Dokumen RPJMD, Penyusunan Dokumen Renstra, Pada layanan perencanaan ini Aplikasi yang digunakan adalah SIPD dan JDIH.

SRG.32.01.01 Pengelolaan Data dan Informasi Pemda Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah



Gambar 3.2.3.1.1.1 Penyusunan Dokumen RPJMD

SRG.32.01.01 Pengelolaan Data dan Informasi Pemda
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah



Gambar 3.2.3.1.1.2. Penyusunan Dokumen Renstra

3.2.3.1.2. Layanan Penganggaran SPB

Sebagai upaya untuk menunjang layanan penganggaran SPBE, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai tugas penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dengan fungsi sebagai berikut:

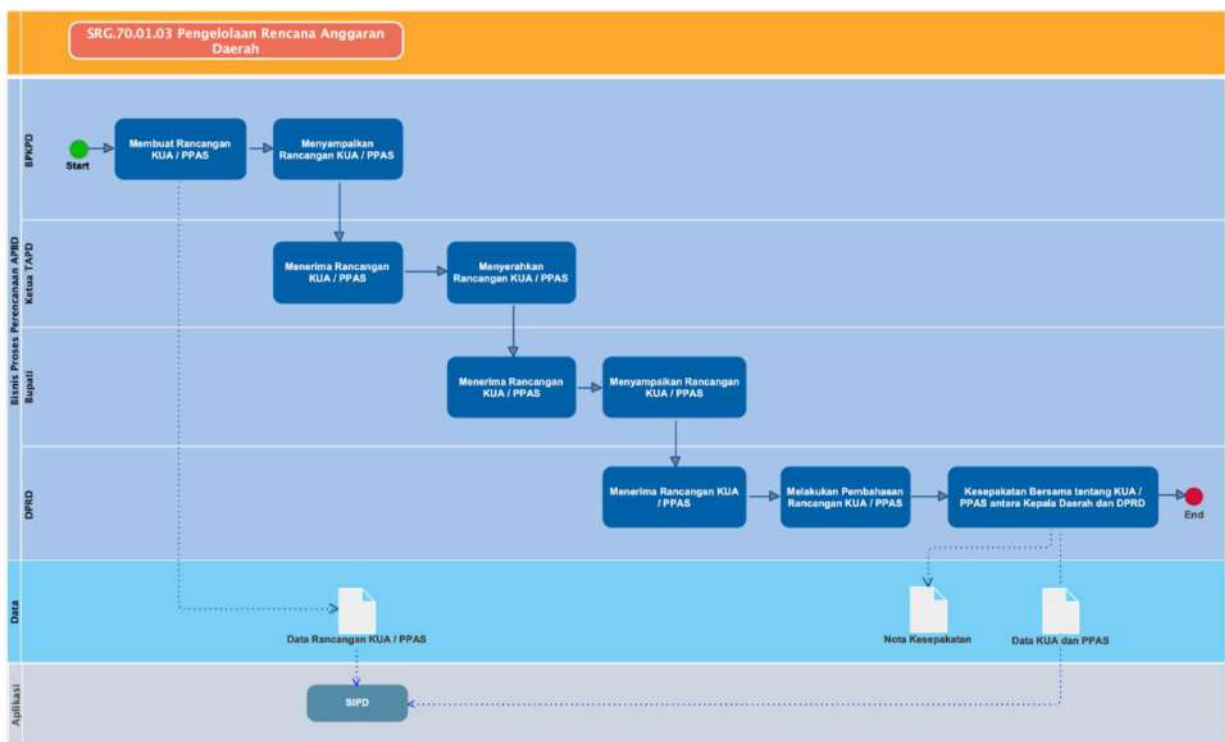
- a. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; dan
- c. Penyusunan Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan fungsi tersebut, layanan penganggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah:

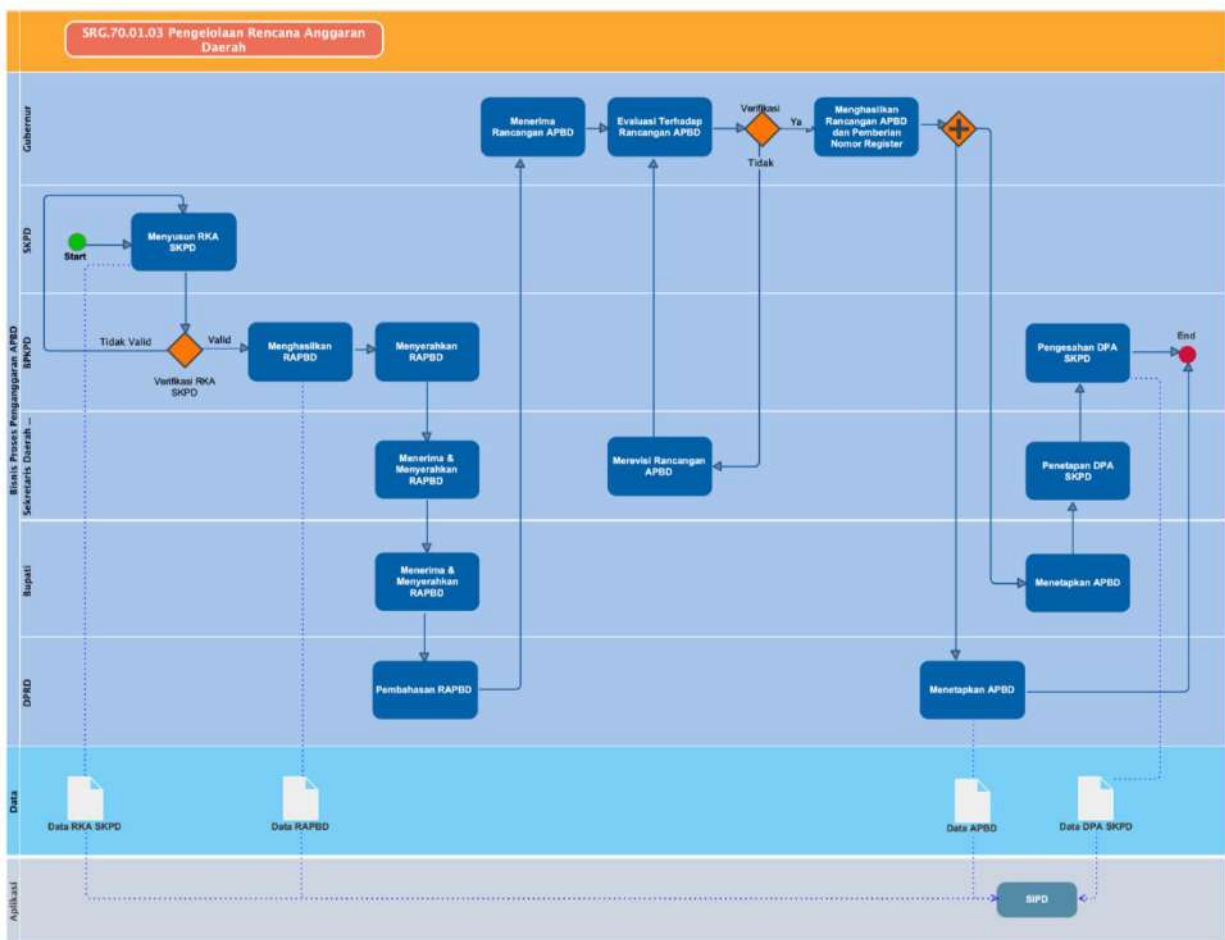
Tabel 3.2.3.1.2.1 Layanan Penganggaran

No.	Deskripsi	Uraian
1	Perencanaan APBD	Rencana keuangan pemerintah daerah yang memuat rincian sumber pendapatan dan alokasi belanja untuk tahun anggaran yang akan datang
2	Penganggaran APBD	Penyusunan rencana keuangan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran, yang mencakup sumber pendapatan dan alokasi belanja yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki 2 sub layanan yaitu Perencanaan APBD, Penganggaran APBD. Pada layanan penganggaran ini aplikasi yang digunakan adalah SIPD.



Gambar 3.2.3.1.2.1 Perencanaan APBD



Gambar 3.2.3.1.2.2 Penganggaran APBD

3.2.3.1.3. Layanan Keuangan SPB

Sebagai penunjang layanan keuangan SPBE yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Mengenai Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:

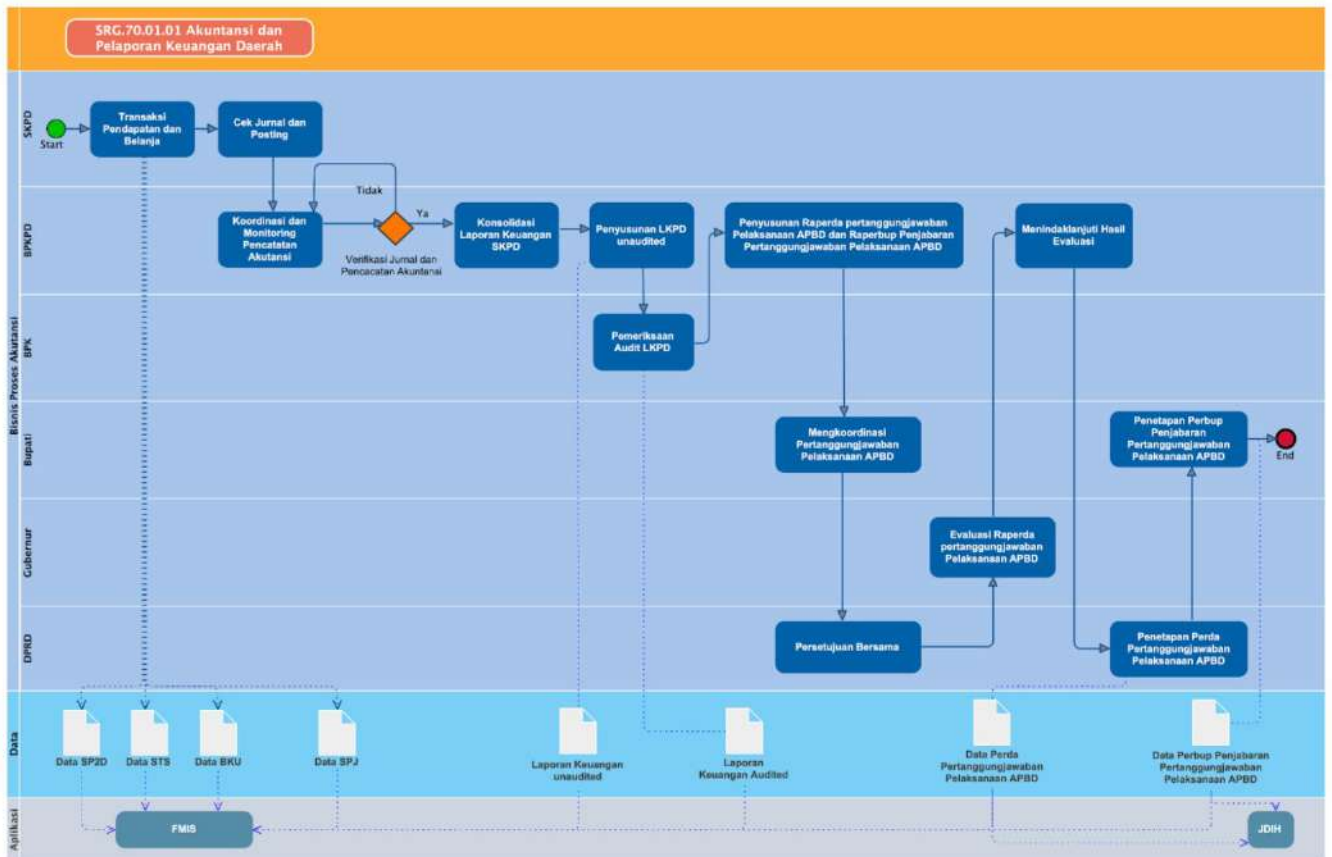
- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan keuangan yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

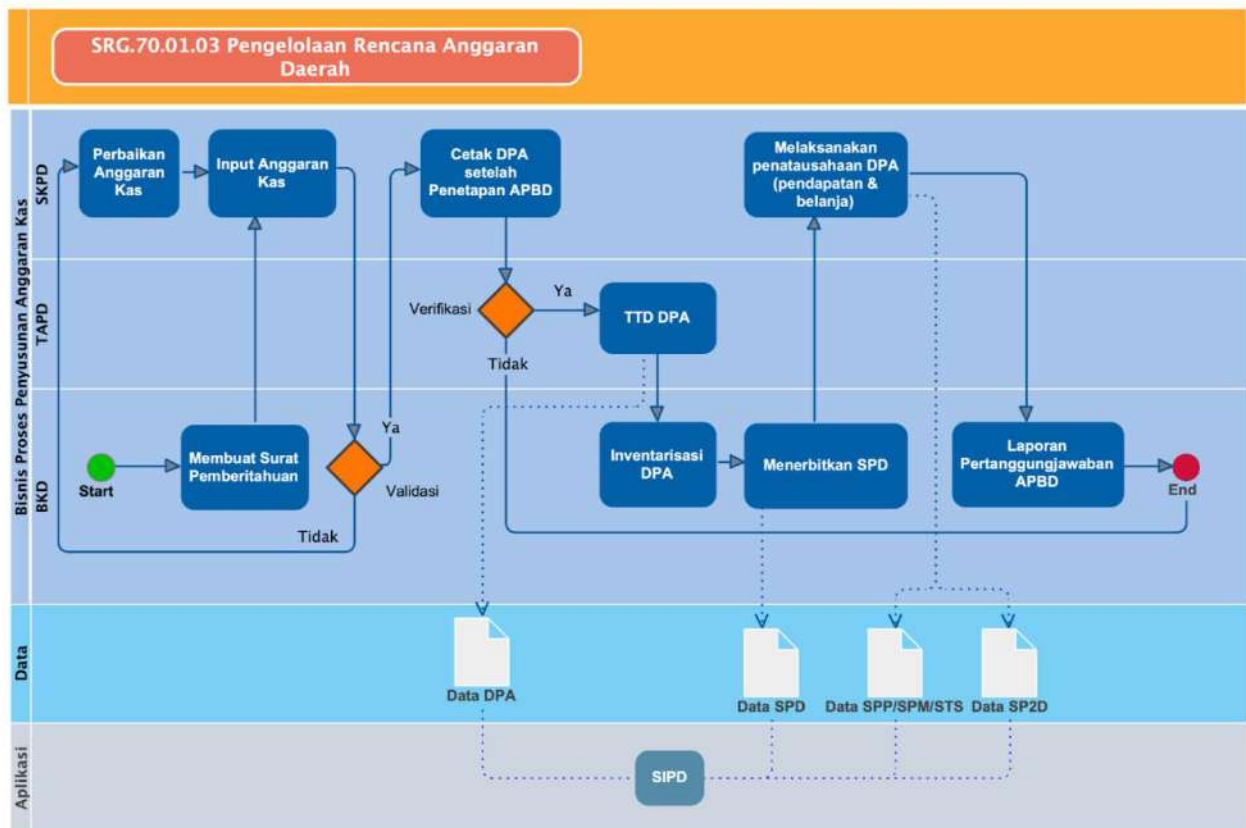
Tabel 3.2.3.1.3.1 Layanan Keuangan SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1	Akuntansi	Proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang terkait dengan aktivitas pemerintah.
2	Anggaran Kas	Proses anggaran kas adalah langkah-langkah merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengeluaran serta penerimaan uang tunai dalam suatu periode
3	Manajemen Keuangan SKPD	Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien
3	Manajemen Keuangan BPKPD	Proses manajemen keuangan di organisasi perangkat daerah melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab pemerintahan di tingkat daerah

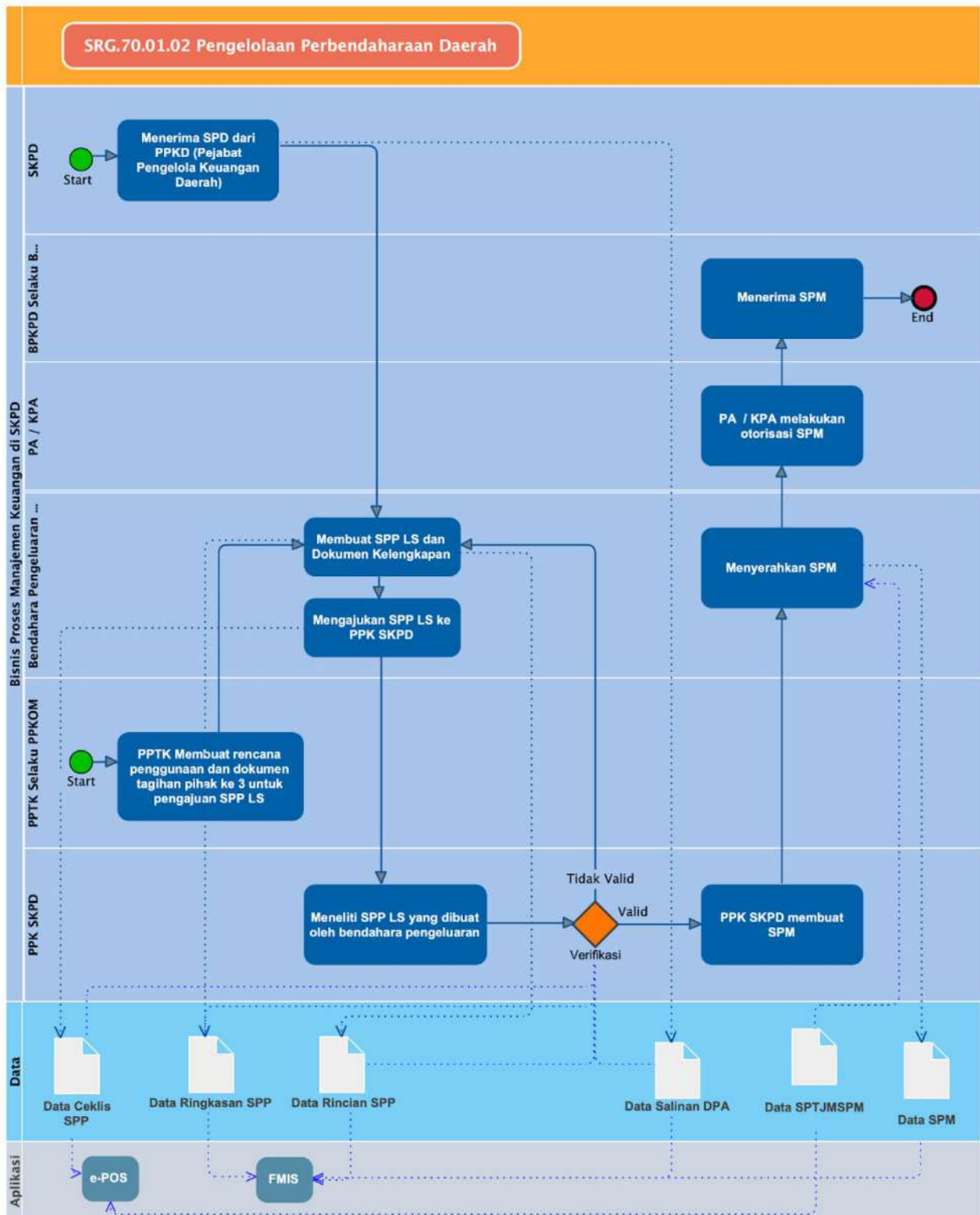
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki 4 sub layanan yaitu Penyusunan Anggaran Akuntansi, Anggaran Kas, Manajemen Keuangan SKPD dan Manajemen Keuangan BPKPD . Pada layanan Keuangan ini Aplikasi yang digunakan adalah FMIS, JDIH, SIPD, e-POS dan SP2D Online.



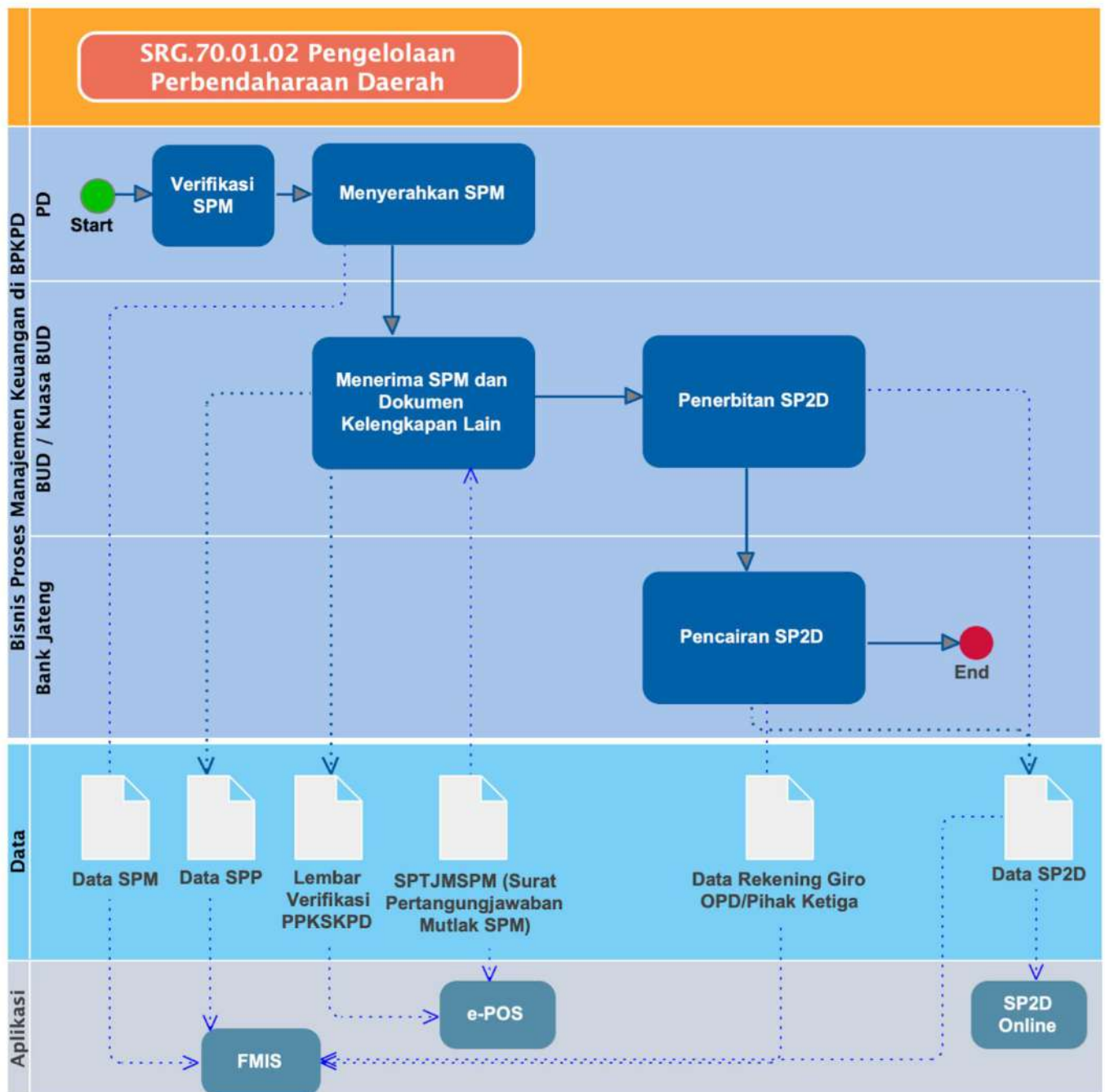
Gambar 3.2.3.1.3.1 Akuntansi



Gambar 3.2.3.1.3.1 Anggaran Kas



Gambar 3.2.3.1.3.2 Manajemen Keuangan di SKPD



Gambar 3.2.3.1.3.3 Manajemen Keuangan BPKPD

3.2.3.1.4. Layanan Pengelolaan Aset SPB

Layanan pengelolaan aset SPBE yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi antara lain:

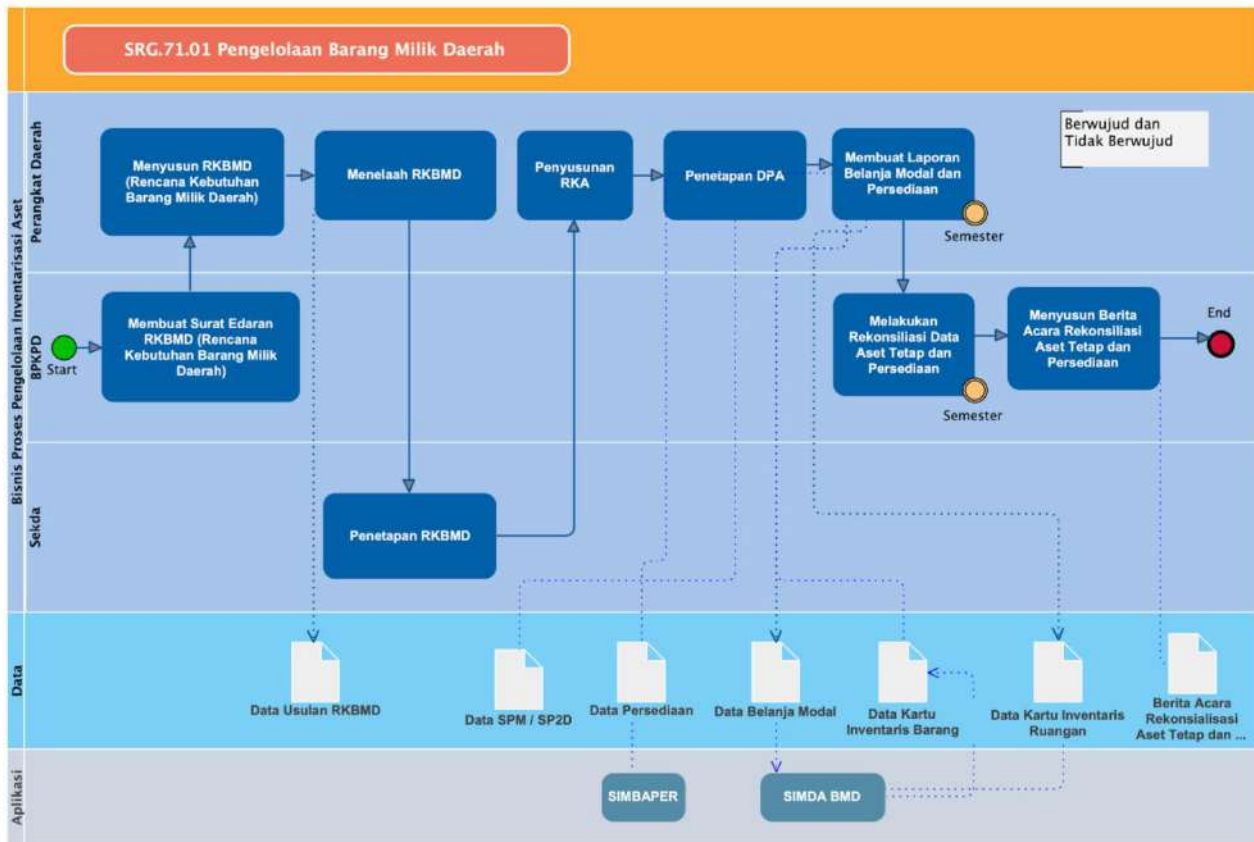
- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Aset Daerah; dan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Aset Daerah.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengelolaan aset yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

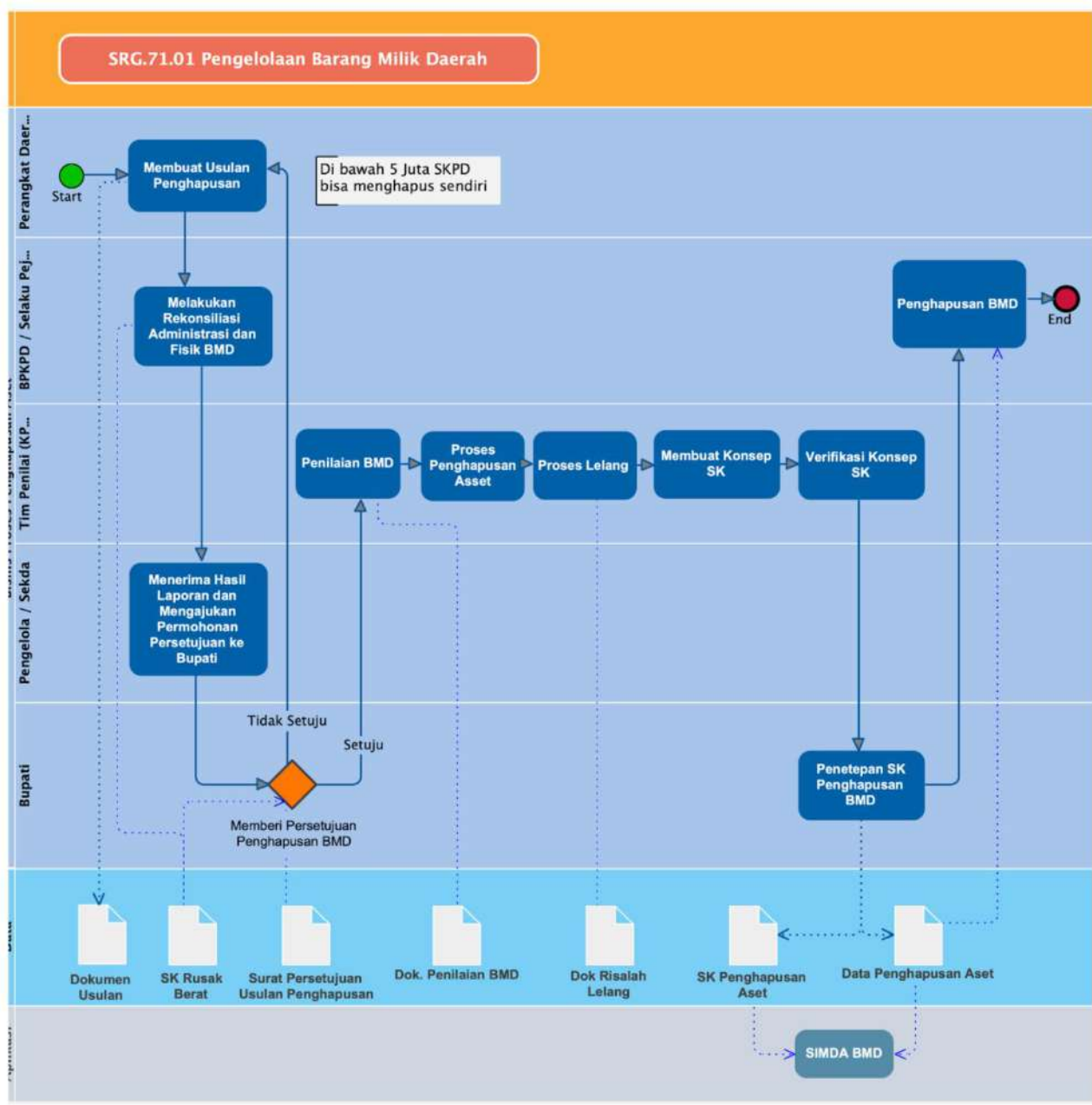
Tabel 3.2.3.1.4.1 Layanan Pengelolaan Aset SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1	Inventarisasi Aset	Penyusunan RKBMD (Rekening Barang Milik Daerah) adalah proses untuk mencatat dan mengelola aset-aset milik pemerintah daerah secara sistematis. Rekonsiliasi aset adalah proses membandingkan data fisik atau informasi aset yang ada dengan catatan keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan.
2	Penghapusan Aset	Penghapusan Aset adalah proses yang mengikuti aturan yang ketat yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memusnahkan atau menghilangkan aset yang tidak lagi diperlukan. Proses ini bertujuan untuk menghindari penggunaan ilegal, kegiatan pencurian atau penggelapan aset, dan mengikuti kewajiban hukum dari pemerintah daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki 2 sub layanan yaitu Inventarisasi Aset dan Penghapusan Aset. Layanan Pengelolaan aset ini Aplikasi yang digunakan adalah SIMDA BMD dan SIMBAPER.



Gambar 3.2.3.1.4.1 Inventarisasi Aset



Gambar 3.2.3.1.4.2 Penghapusan Aset

3.2.3.1.5. Layanan Kepegawaian SPB

Layanan Kepegawaian SPBE yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai fungsi sebagai berikut:

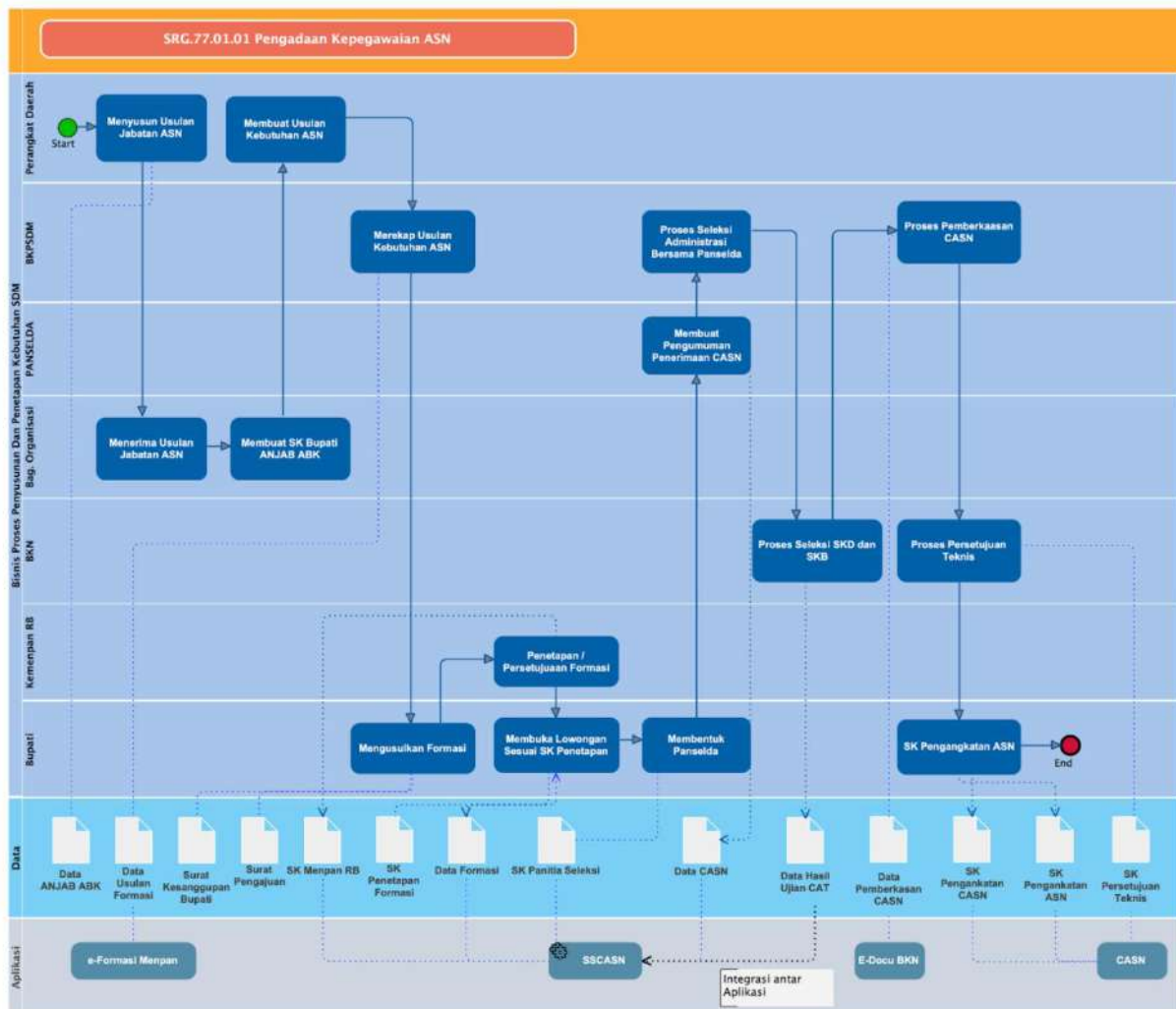
- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kepegawaian yang terdapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

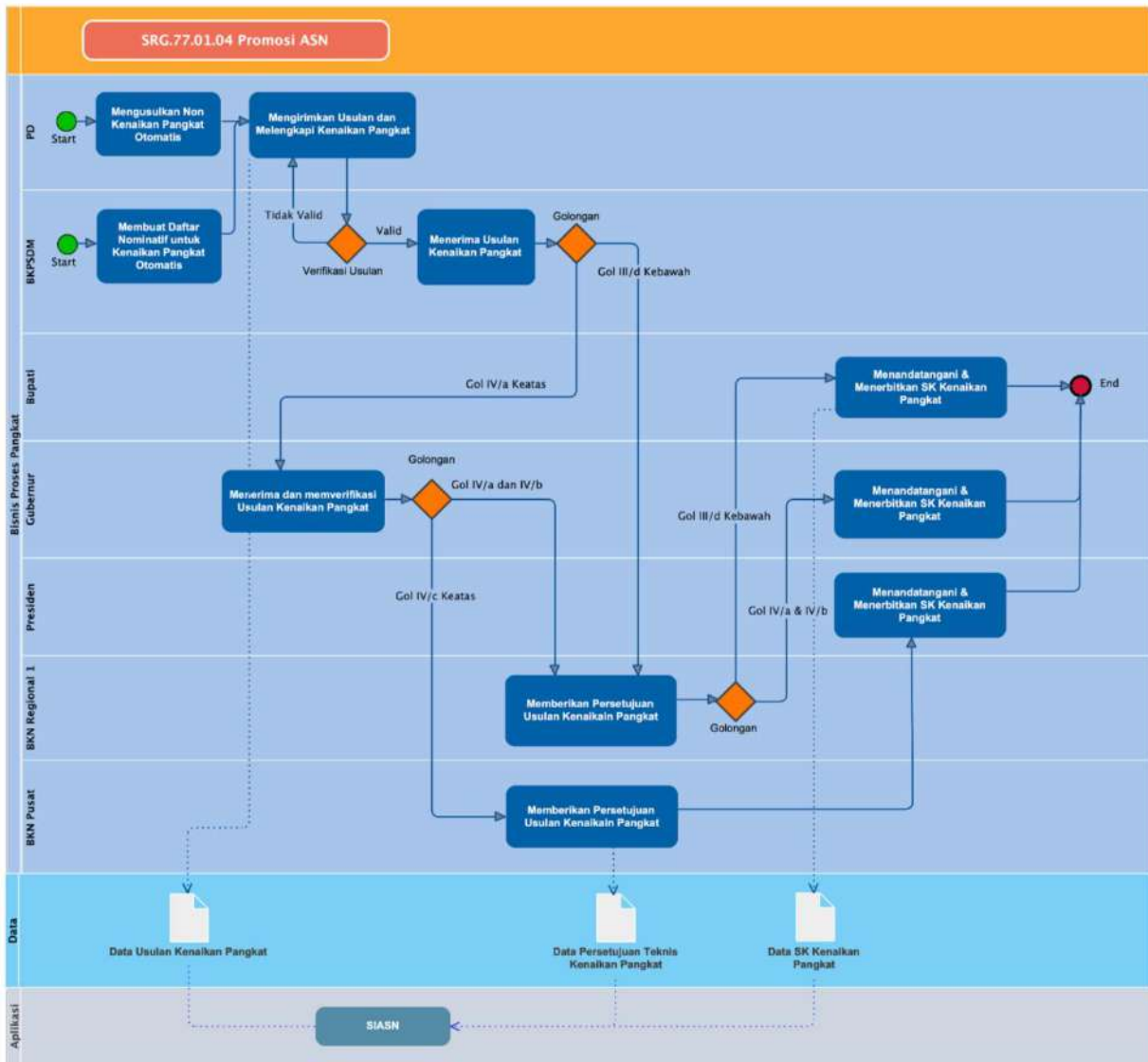
Tabel 3.2.3.1.5.1 Layanan Kepegawaian SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan SDM	Proses perencanaan dan penetapan kebutuhan tenaga kerja atau SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan oleh suatu instansi pemerintahan.
2	Pangkat	Tingkatan dalam hierarki pegawai negeri yang menunjukkan kedudukan seseorang dalam struktur pemerintahan.
3	Jabatan Fungsional	Jabatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat khusus dan memerlukan keahlian atau kompetensi tertentu dalam bidang tertentu.
4	Pengangkatan Pertama Kali	Proses pengangkatan seseorang menjadi pegawai negeri atau karyawan dalam suatu organisasi atau instansi.
5	Alih Jabatan Fungsional	Proses perpindahan atau peralihan seseorang dari satu Jabatan atau tingkatan pendidikan ke Jabatan yang lebih tinggi atau lebih rendah.

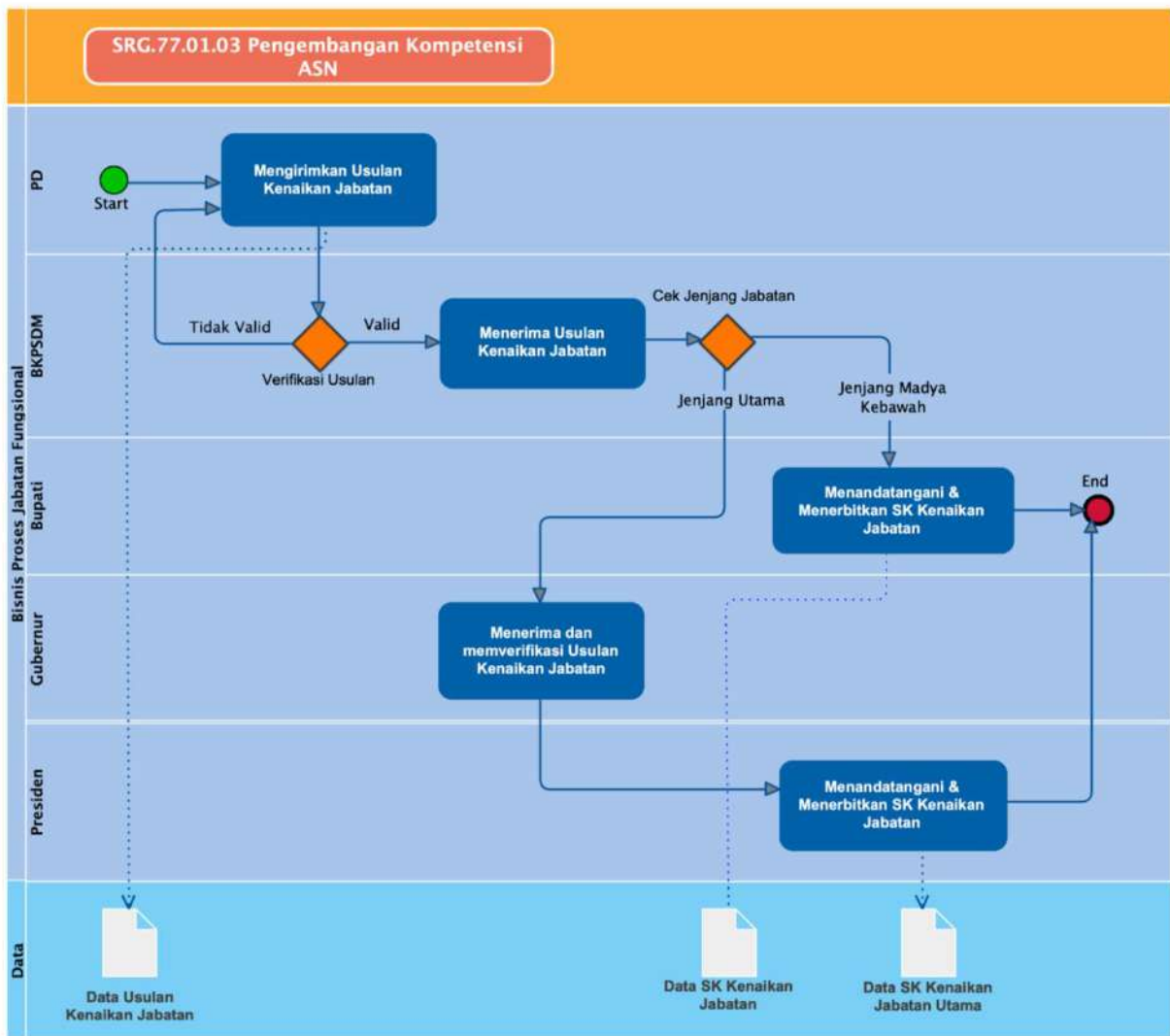
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 5 sub layanan yaitu Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan SDM, Pangkat, Jabatan Fungsional, Pengangkatan Pertama Kali dan Alih Jabatan Fungsional. Pada layanan Kepegawaian ini Aplikasi yang digunakan adalah e-Formasi Menpan, SSCASN, e-Docu BKN, SIASN, dan CASN



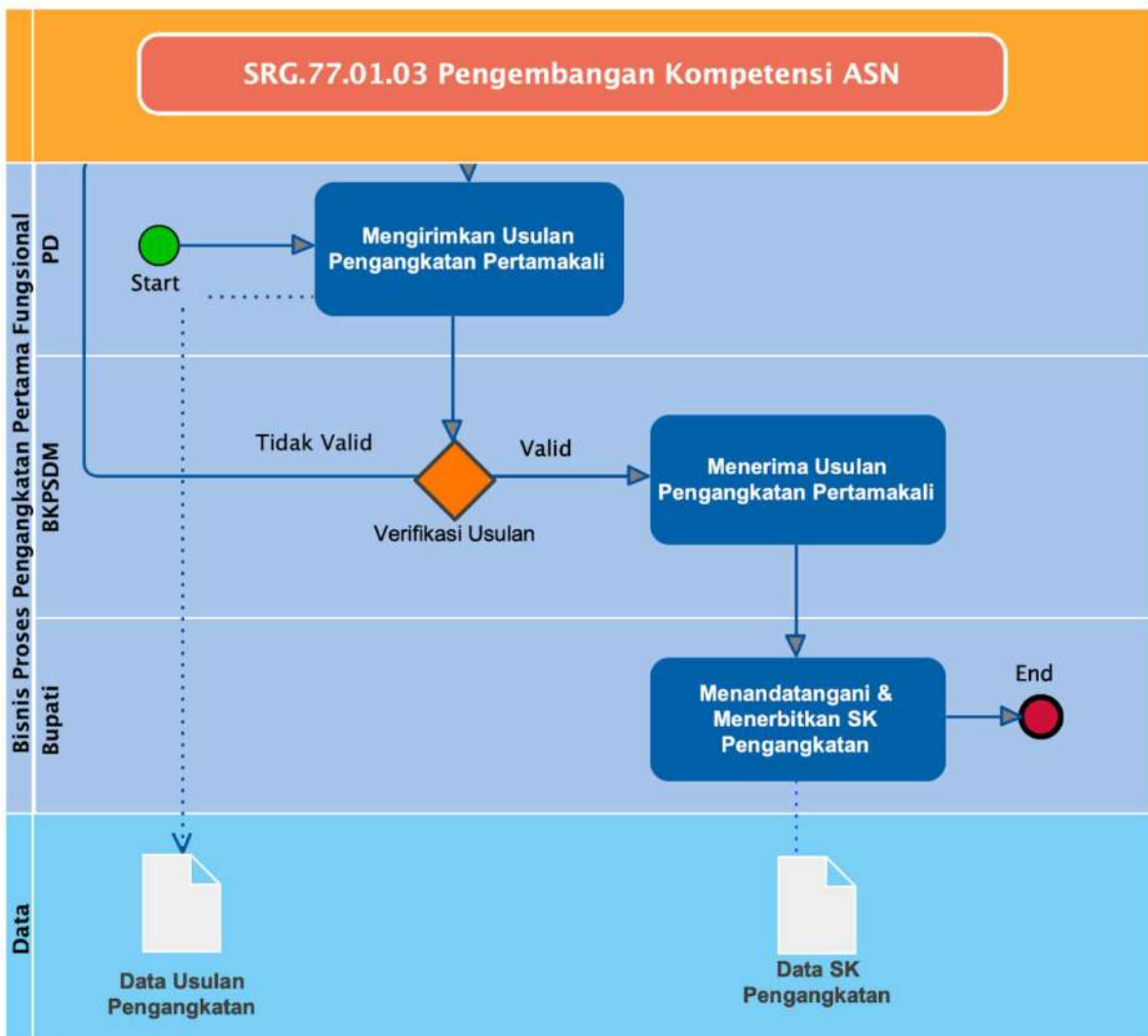
Gambar 3.2.3.1.5.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan SDM



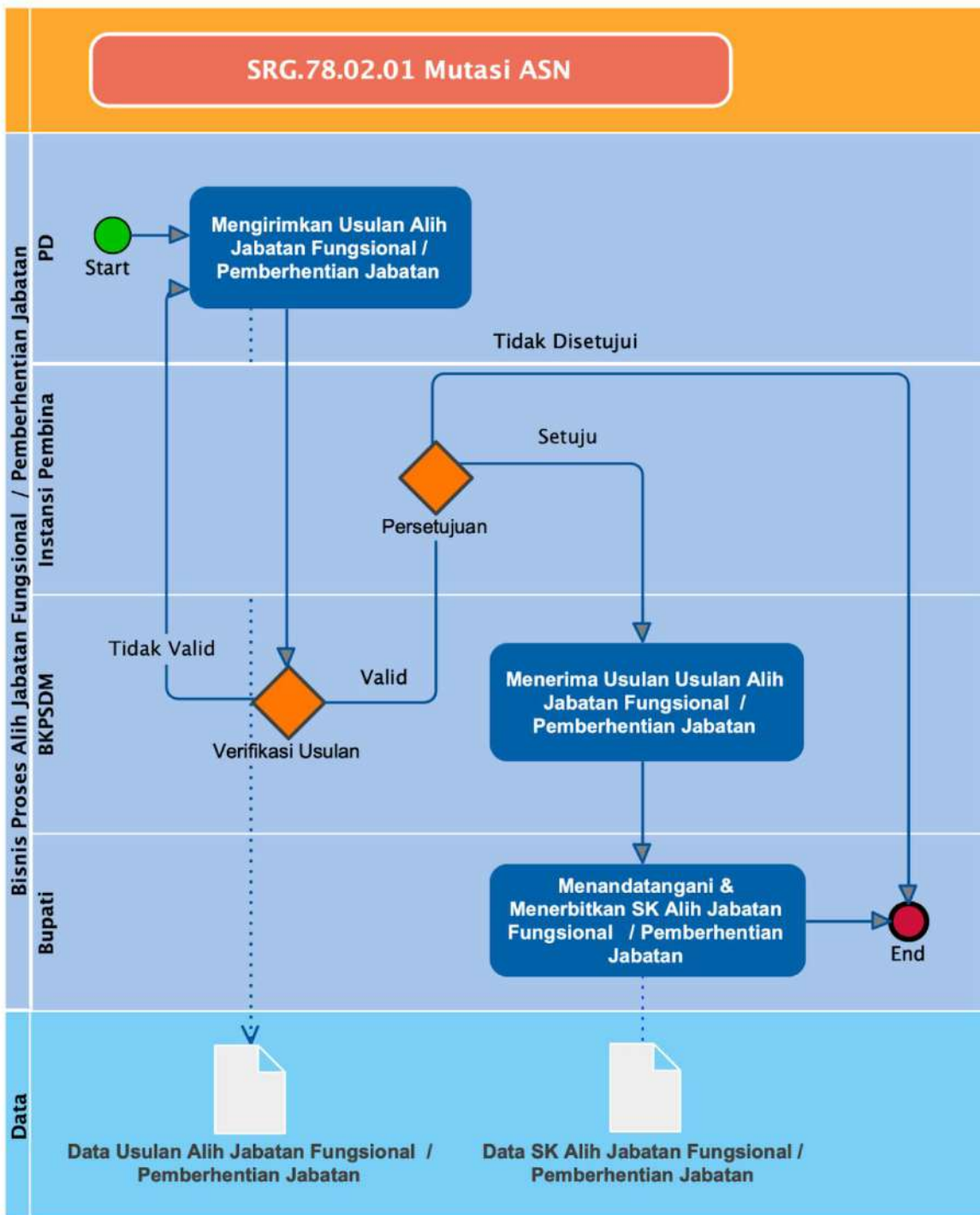
Gambar 3.2.3.1.5.2 Pangkat



Gambar 3.2.3.1.5.3 Jabatan Fungsional



Gambar 3.2.3.1.5.4 Pengangkatan Pertama Kali



Gambar 3.2.3.1.5.5 Alih Jabatan Fungsional

3.2.3.1.6. Layanan Kinerja Pegawai SPB

Layanan Kinerja Pegawai SPBE yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai fungsi sebagai berikut:

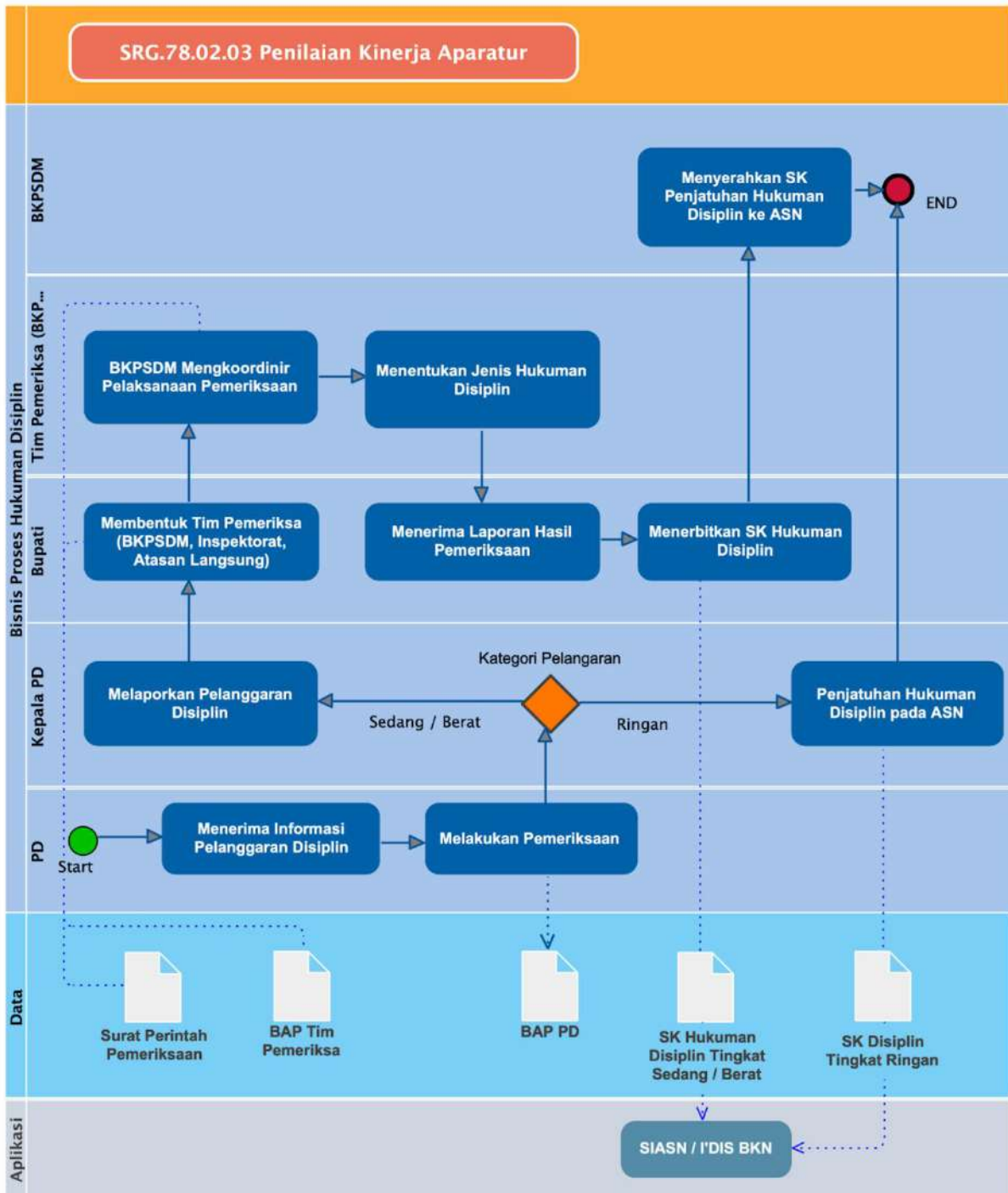
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; dan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kepegawaian yang terdapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

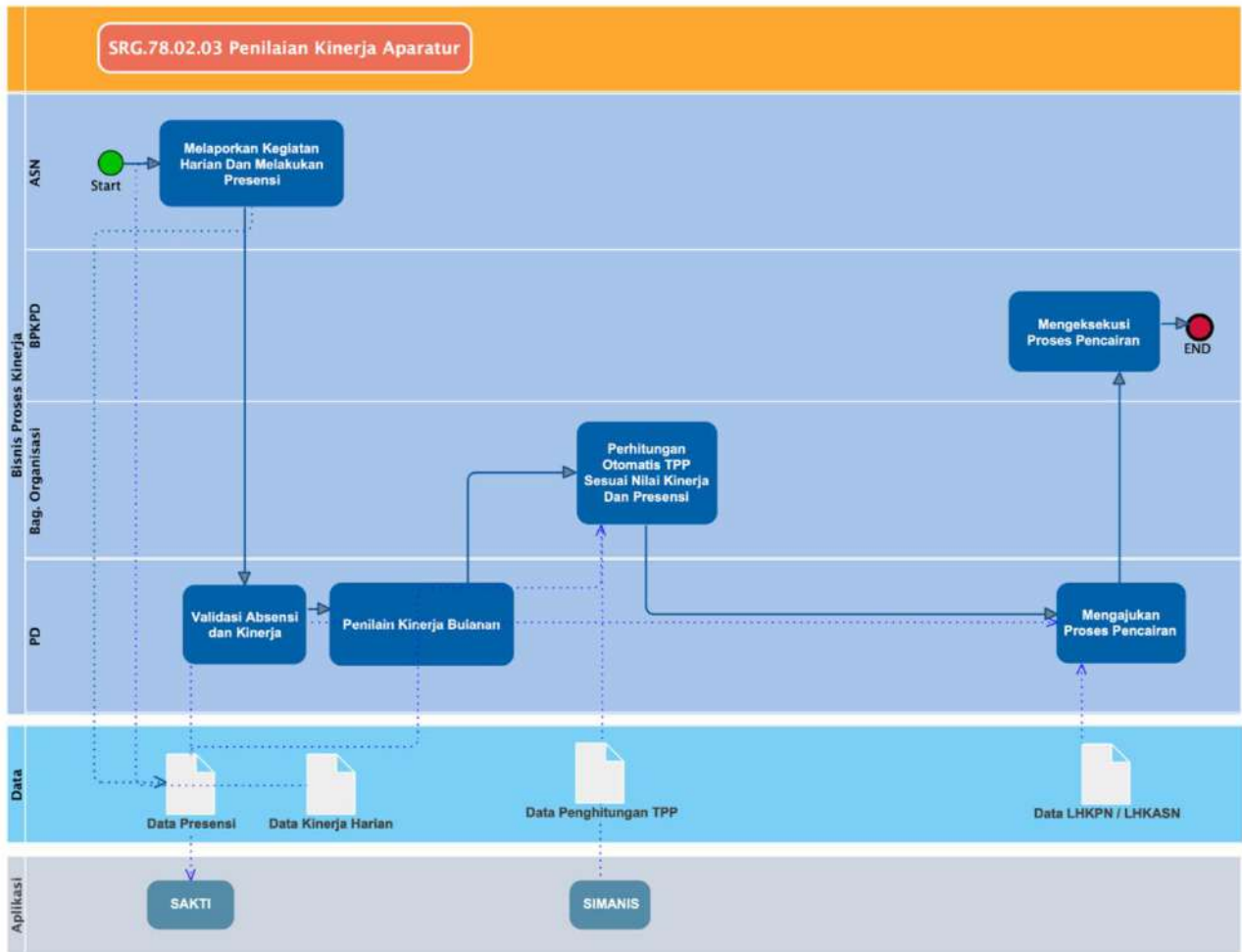
Tabel 3.2.3.1.6.1 Layanan Kinerja Pegawai SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1	Disiplin	Kinerja disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara) mengacu pada perilaku dan tindakan ASN dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku
2	Kinerja	Kinerja merujuk pada kemampuan atau hasil yang dicapai seseorang, tim, organisasi, atau sistem dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 2 sub layanan yaitu Layanan Disiplin dan Kinerja. Adapun layanan Kinerja Pegawai ini Aplikasi yang digunakan adalah I'DIS BKN, SAKTI dan SIMANIS.



Gambar 3.2.3.1.6.1 Disiplin



Gambar 3.2.3.1.6.1 Kinerja

3.2.3.1. . Layanan Kearsipan Dinamis SPB

Sebagai upaya untuk menunjang layanan kearsipan dinamis SPBE, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan dengan fungsi sebagai berikut:

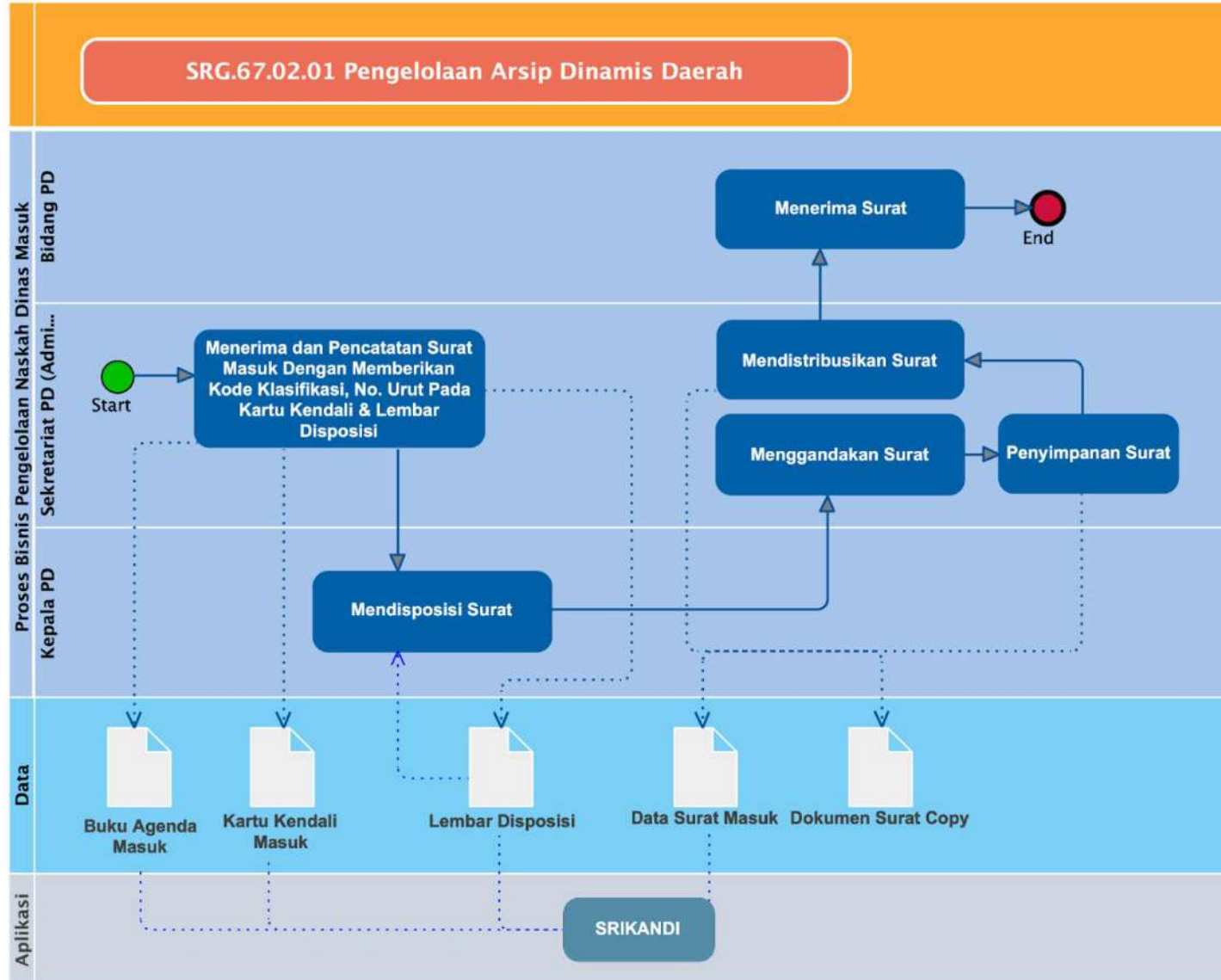
- a. Perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan;
- d. Pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Berdasarkan fungsi tersebut, layanan kearsipan dinamis yang terdapat di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah:

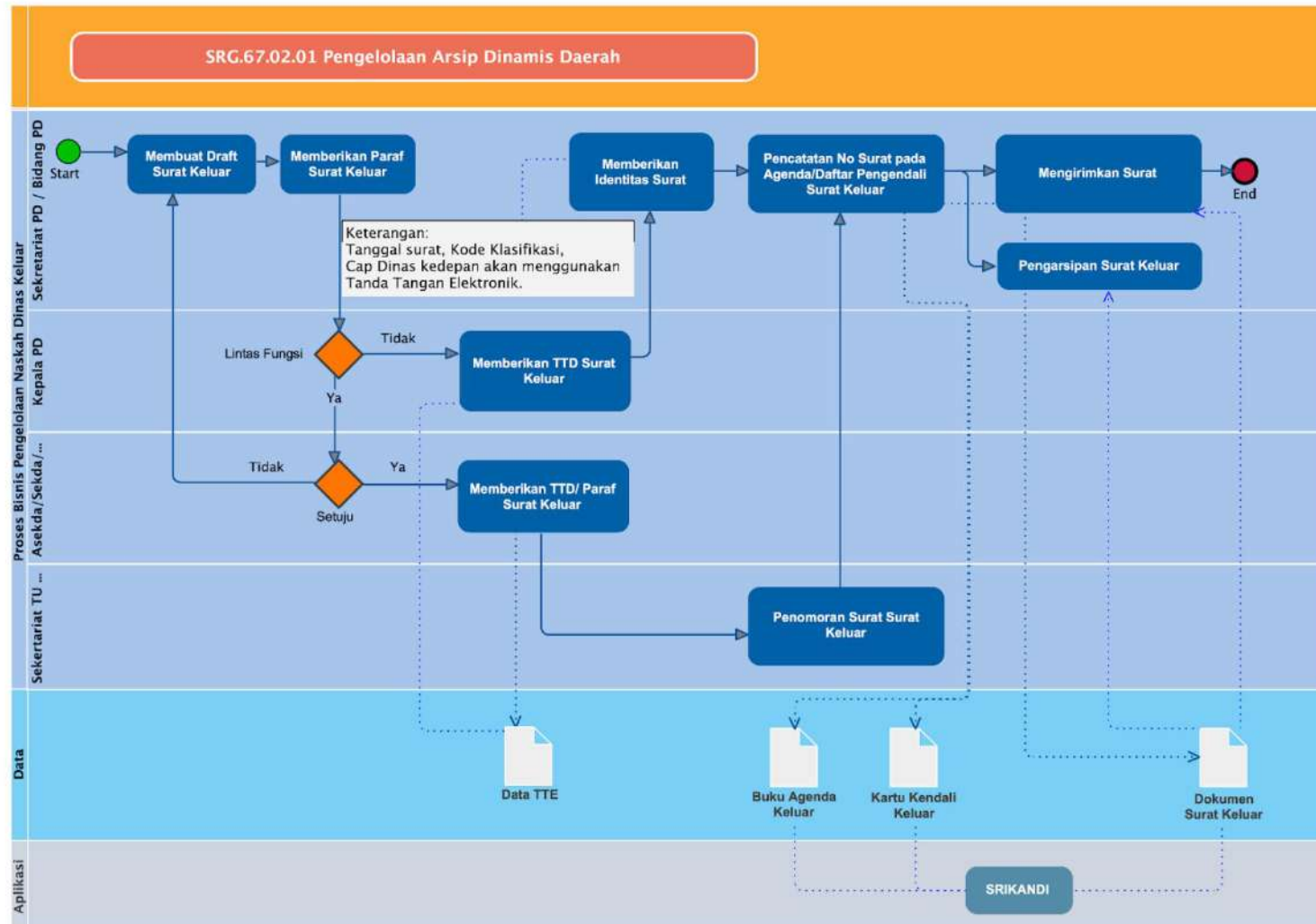
Tabel 3.2.3.1. .1 Layanan Kearsipan Dinamis

No.	Deskripsi	Uraian
1	Pengelolaan Naskah Dinas Masuk	Pengelolaan Naskah Dinas Masuk adalah suatu proses yang meliputi penerimaan, pengklasifikasian, pencatatan, penyimpanan dan pengarsipan naskah dinas yang masuk ke kantor.
2	Pengelolaan Naskah Dinas Keluar	Pengelolaan Naskah Dinas Keluar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pengelola untuk mengelola naskah dinas yang keluar dari sebuah instansi.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah memiliki 2 sub layanan yaitu Pengelolaan Naskah Dinas Masuk dan Pengelolaan Naskah Dinas Keluar. Adapun aplikasi yang digunakan Layanan Kearsipan Dinamis adalah SRIKANDI.



Gambar 3.2.3.1. .1 Pengelolaan Naskah Dinas Masuk



Gambar 3.2.3.1. .2 Pengelolaan Naskah Dinas Keluar

3.2.3.1. . Layanan Pengawasan Internal Pemerintah SPB

Layanan pengawasan internal pemerintah (SPIP) SPBE yang diampu oleh Inspektorat dengan tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun untuk menyelenggarakan tugas pokok, Inspektorat mempunyai fungsi:

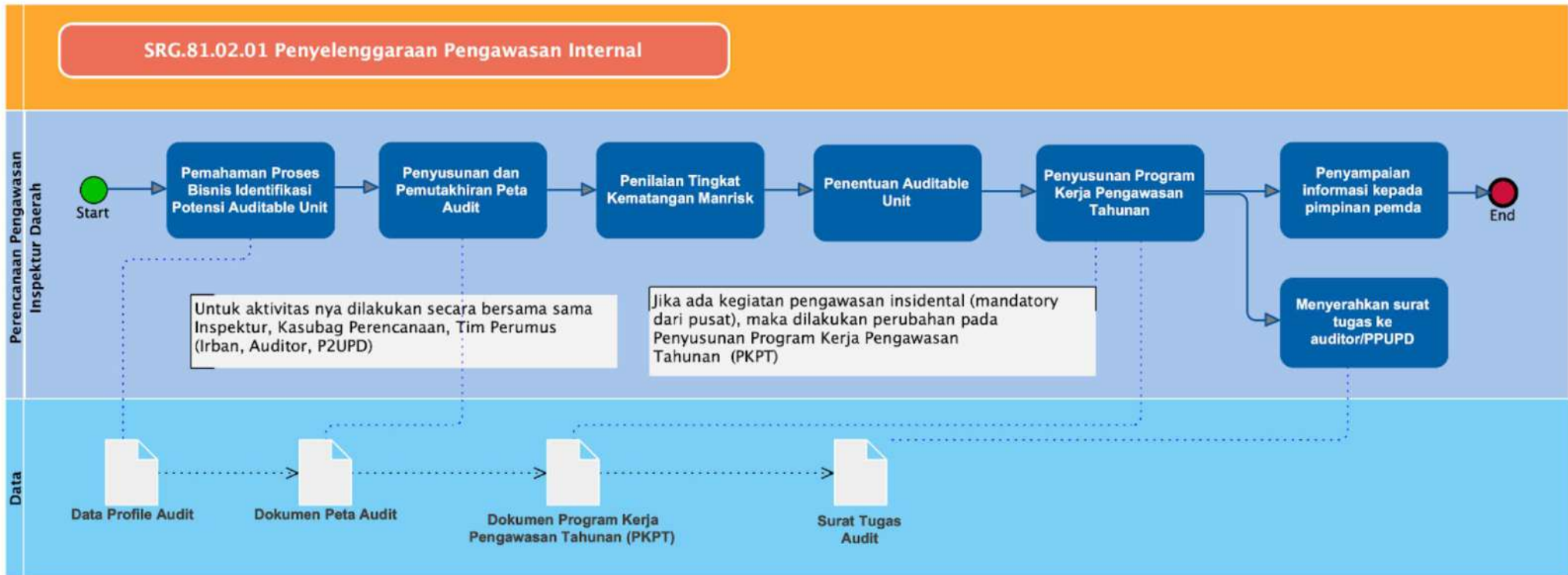
- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Pembangunan, Pemerintahan, dan Masyarakat;
- c. Pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan SPIP yang terdapat di Inspektorat adalah sebagai berikut:

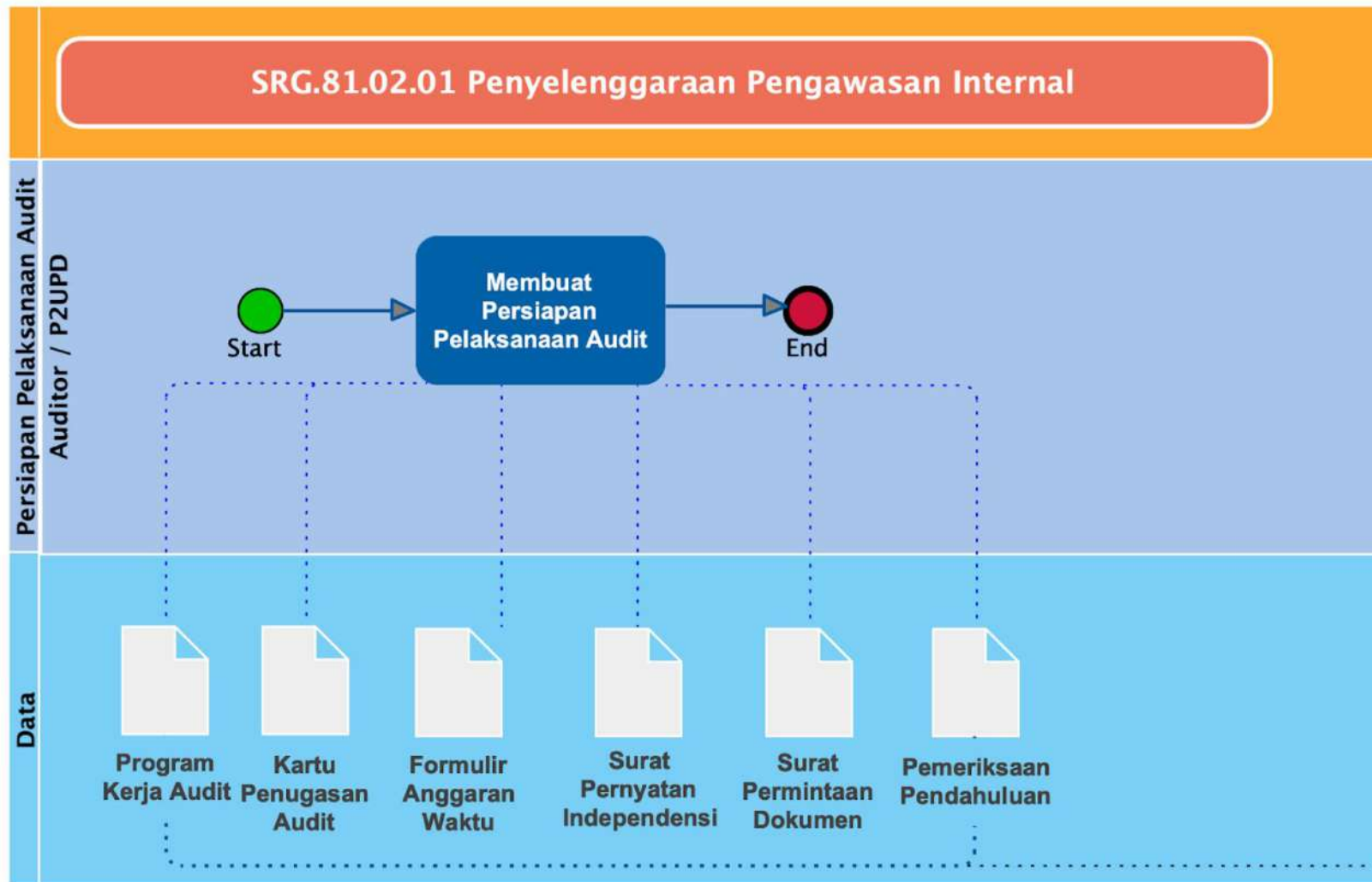
Tabel 3.2.3.1. .1 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1	Perencanaan Audit	Perencanaan Audit adalah proses menentukan tujuan audit, mengidentifikasi risiko, membangun rencana audit, dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit.
2	Persiapan Pelaksanaan Audit	Persiapan Pelaksanaan Audit adalah tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan audit, seperti identifikasi tujuan dan ruang lingkup audit, pemilihan auditor, pembuatan rencana audit, persiapan audit, pelaksanaan audit, dan penyusunan hasil audit.
3	Pelaksanaan Audit	Pelaksanaan Audit adalah proses yang menggunakan metodologi yang terencana untuk menilai pelaksanaan pemerintah dalam hal keuangan, operasional, manajemen dan lain-lain.
4	Tindak Lanjut Audit	Tindak Lanjut Audit adalah tindakan yang diambil berdasarkan hasil audit. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa temuan audit diatasi dan diselesaikan dengan benar.
5	Audit Khusus	Audit Khusus adalah suatu proses audit yang difokuskan pada satu atau beberapa aspek tertentu dari akun atau laporan keuangan.

Inspektorat memiliki 5 sub layanan pengawasan internal pemerintah yang meliputi: Perencanaan Audit, Persiapan Pelaksanaan Audit, Pelaksanaan Audit, Tindak Lanjut Audit dan Audit Khusus.

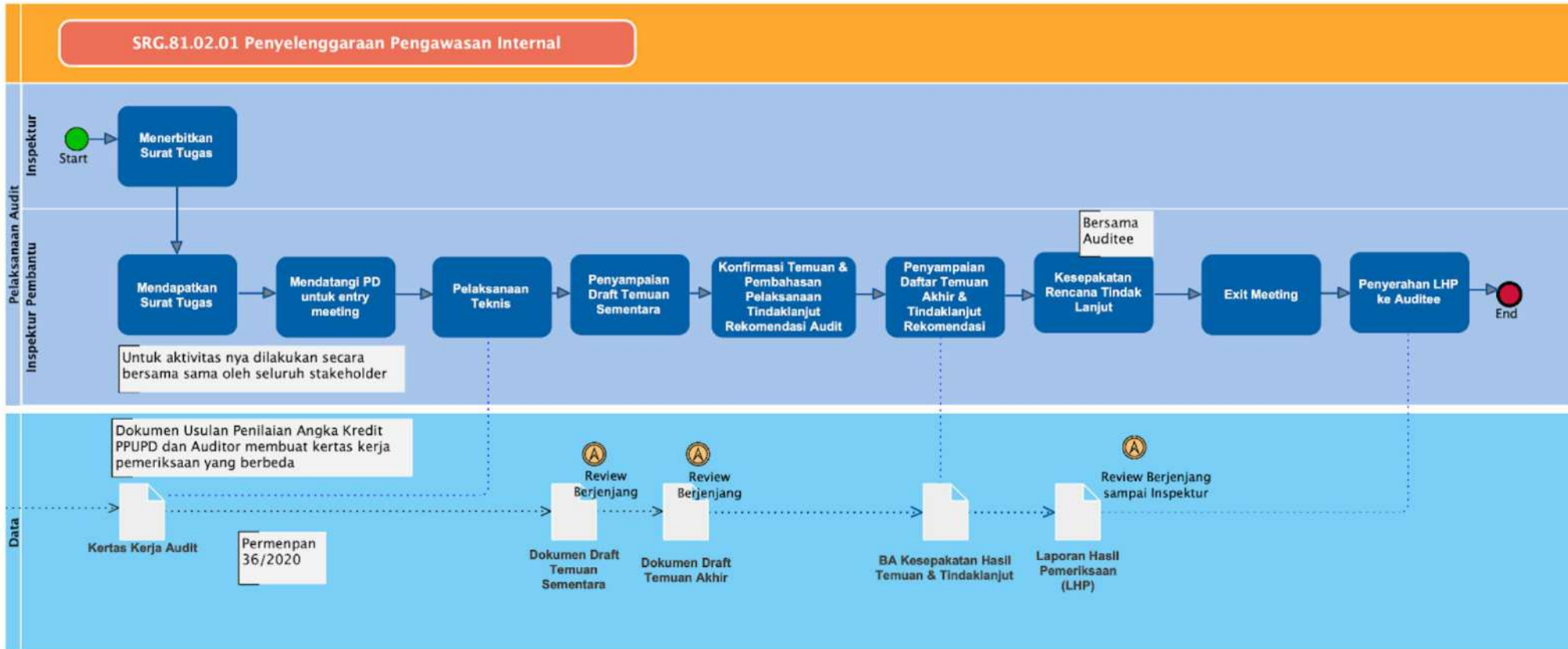


Gambar 3.2.3.1. 1. Perencanaan Audit

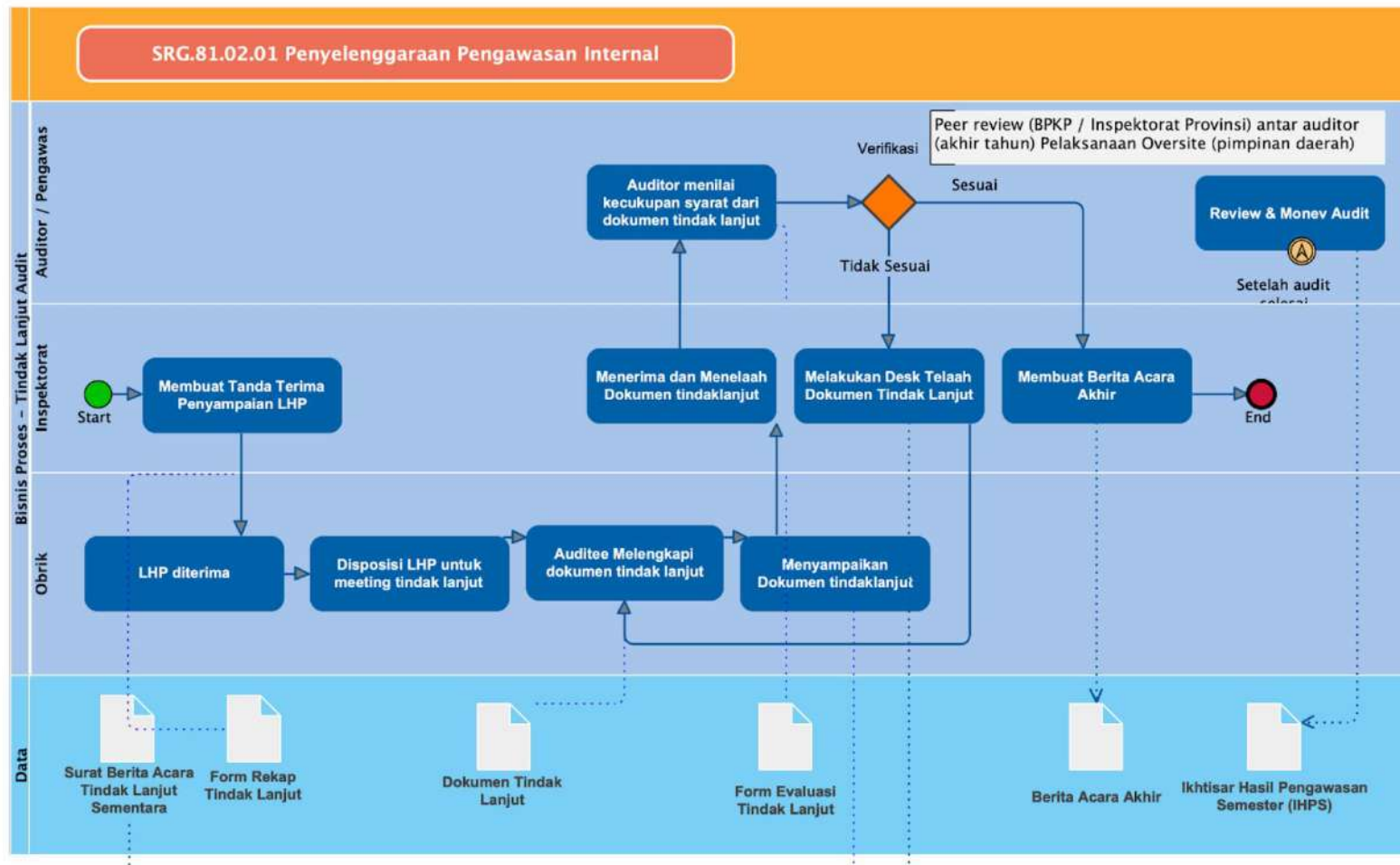


Gambar 3.2.3.1. .2. Persiapan Pelaksanaan Audit

SRG.81.02.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

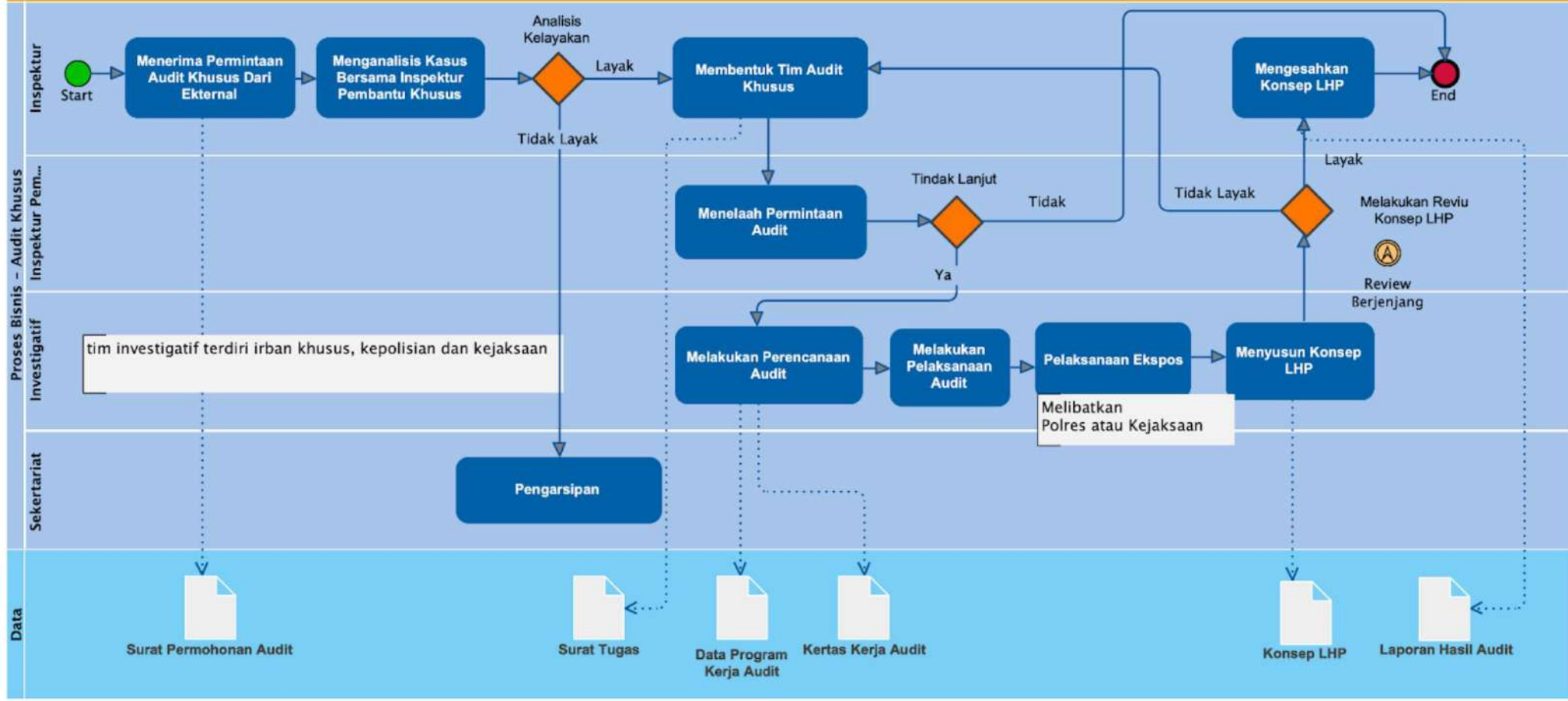


Gambar 3.2.3.1. 3. Pelaksanaan Audit



Gambar 3.2.3.1. .4. Tindak Lanjut Audit

SRG.81.02.02 Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu



Gambar 3.2.3.1. 5. Audit Khusus

3.2.3.1 . Layanan Pengaduan Publik SPB

Upaya untuk menunjang layanan pengaduan publik SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan kewenangan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

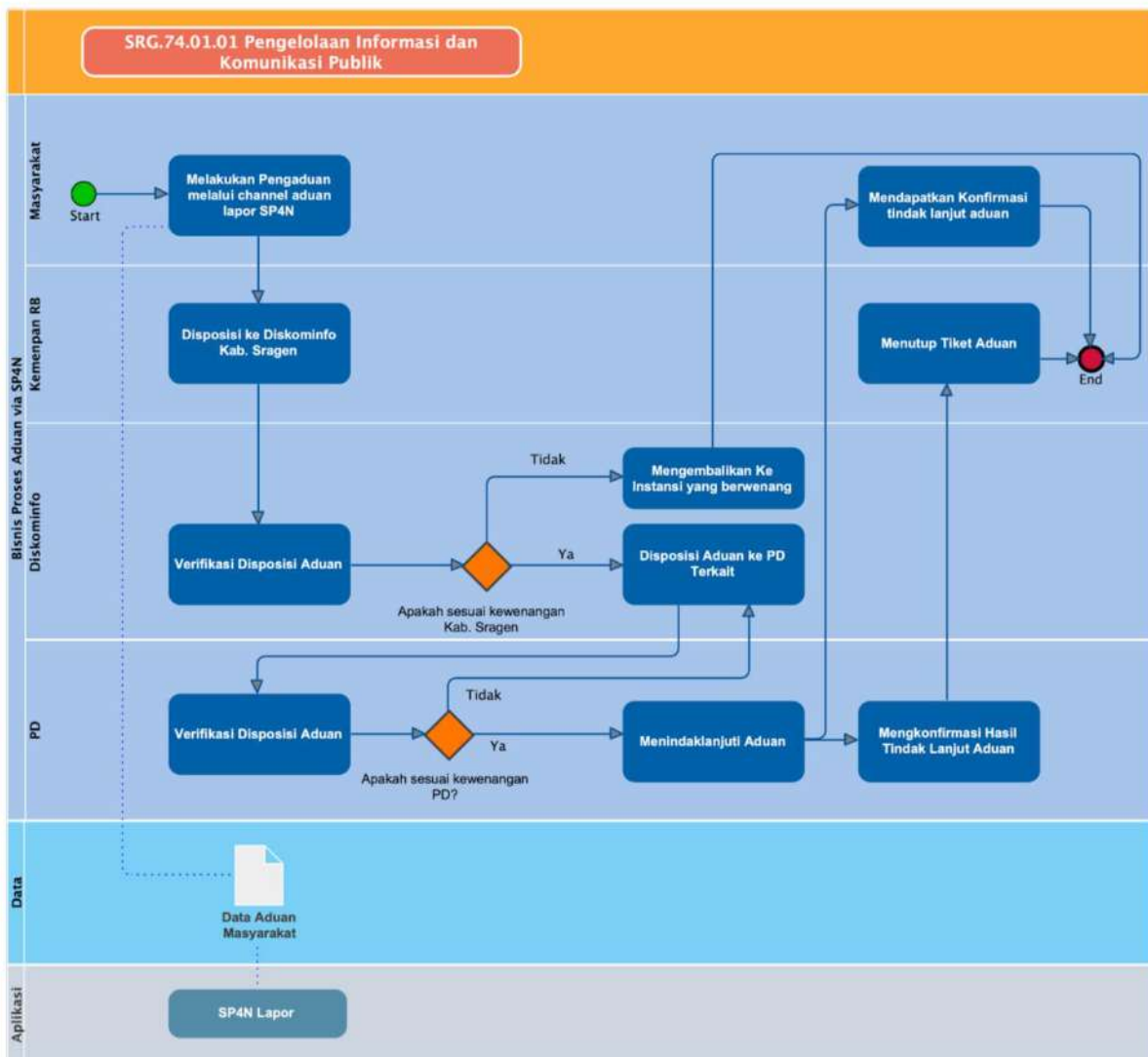
- a. Perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- e. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- f. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi.

Berdasarkan fungsi tersebut, layanan pengaduan publik SPBE yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.1 .1 Layanan Pengaduan Publik SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Pengaduan Publik via SP4N Lapor	Pengaduan Publik via SP4N Lapor adalah sistem layanan pengaduan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengirimkan laporan kepada instansi pemerintah berupa informasi, kritik, saran, dan lain sebagainya.

Diskominfo memiliki 1 sub layanan yaitu Pengaduan Publik via SP4N Lapor. Adapun aplikasi yang digunakan dalam layanan pengaduan publik adalah SP4N Lapor.



Gambar 3.2.3.1. .1. Pengaduan Publik via SP4N Lapor

3.2.3.1.1 . Layanan Data Terbuka SPB

Sebagai upaya untuk menunjang layanan data terbuka SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik yang merupakan kewenangan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

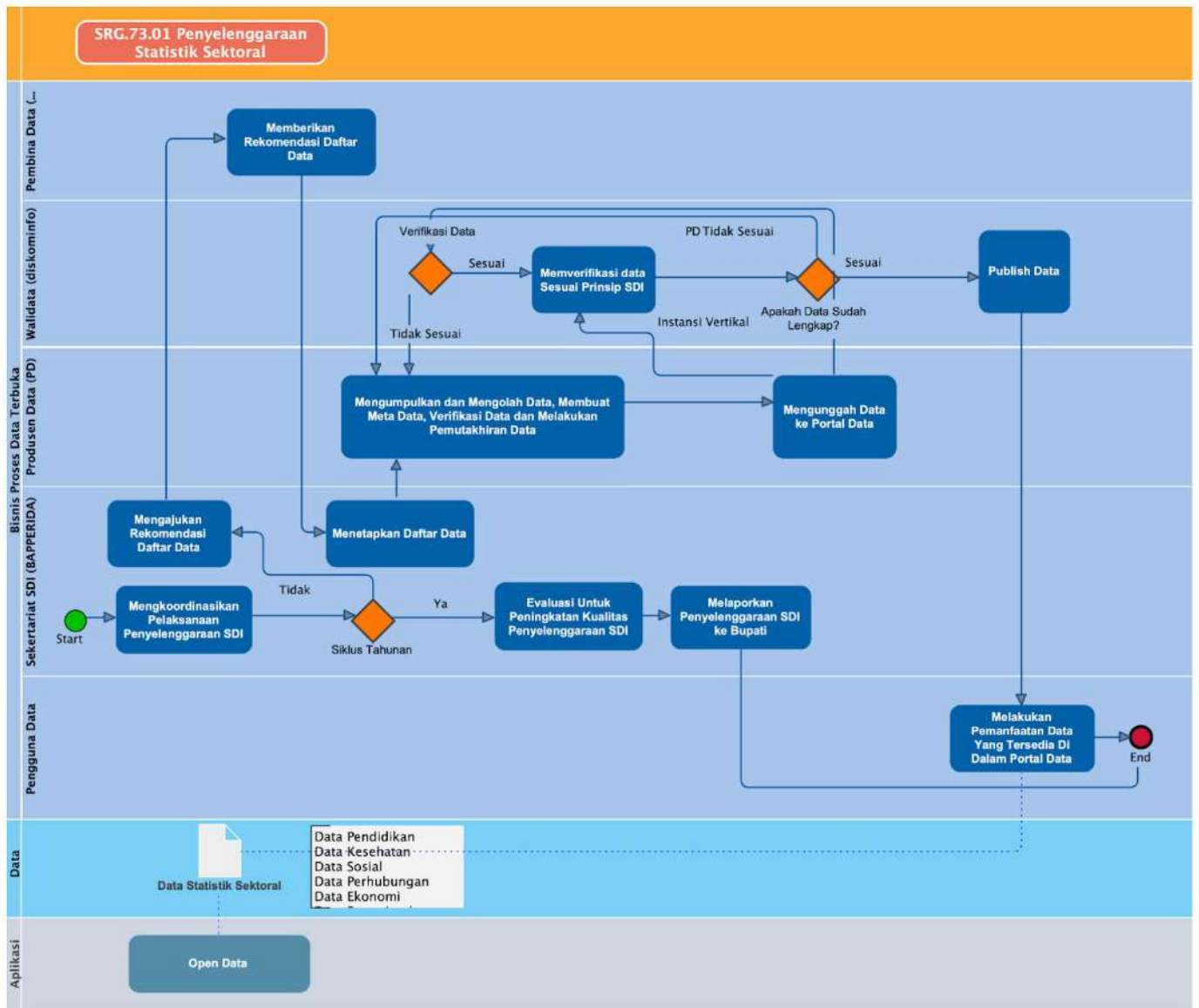
- a. Perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang *G I*
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- e. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- f. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi.

Berdasarkan fungsi tersebut, layanan data terbuka yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

Tabel 3.2.3.1.1 .1 Layanan Data Terbuka SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Layanan Data Terbuka	Layanan Data Terbuka adalah inisiatif yang menyediakan akses bebas dan tak terbatas ke sumber data yang dapat digunakan oleh publik. Tujuan utama yang diusung oleh layanan data terbuka adalah untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh pemerintah dan badan publik lainnya tersedia untuk publik secara bebas dan tak terbatas.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 sub layanan yaitu layanan Data Terbuka. Adapun aplikasi yang digunakan pada layanan data terbuka ini adalah Open Data.



Gambar 3.2.3.1.1 .1 Data Terbuka

3.2.3.1.11. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi SPB

Layanan akuntabilitas kinerja organisasi SPBE yang diampu oleh Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

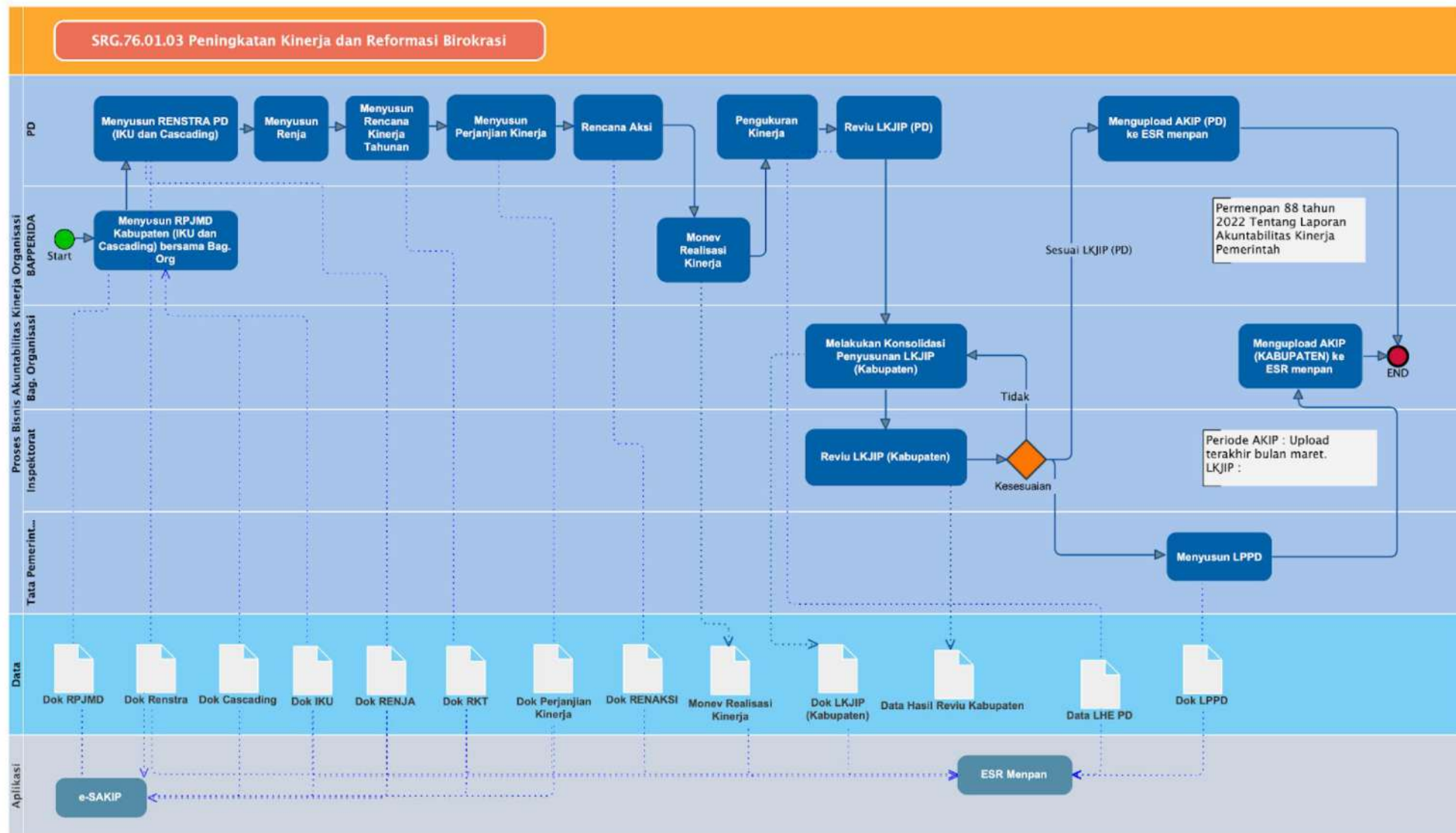
- a. Penyusunan program kerja Bagian Organisasi;
- b. Penyiapan bahan kebijakan bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- d. Perumusan kebijakan strategis, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang kelembagaan Pemerintah Daerah;
- e. Penataan kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- f. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- g. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah; dan
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang terdapat di Bagian Organisasi adalah:

Tabel 3.2.3.1.11.1 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Layanan yang menyediakan informasi mengenai kinerja suatu lembaga atau instansi pemerintahan dengan tujuan untuk memastikan bahwa lembaga atau instansi tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber daya publik yang dimilikinya

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah memiliki 1 sub layanan yaitu Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Aplikasi yang digunakan adalah SI-SAKIP dan ESR-Menpan.



Gambar 3.2.3.1.11.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

3.2.3.1.12. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SPB

Layanan pengadaan barang dan jasa SPBE yang diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengkajian dan standarisasi, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

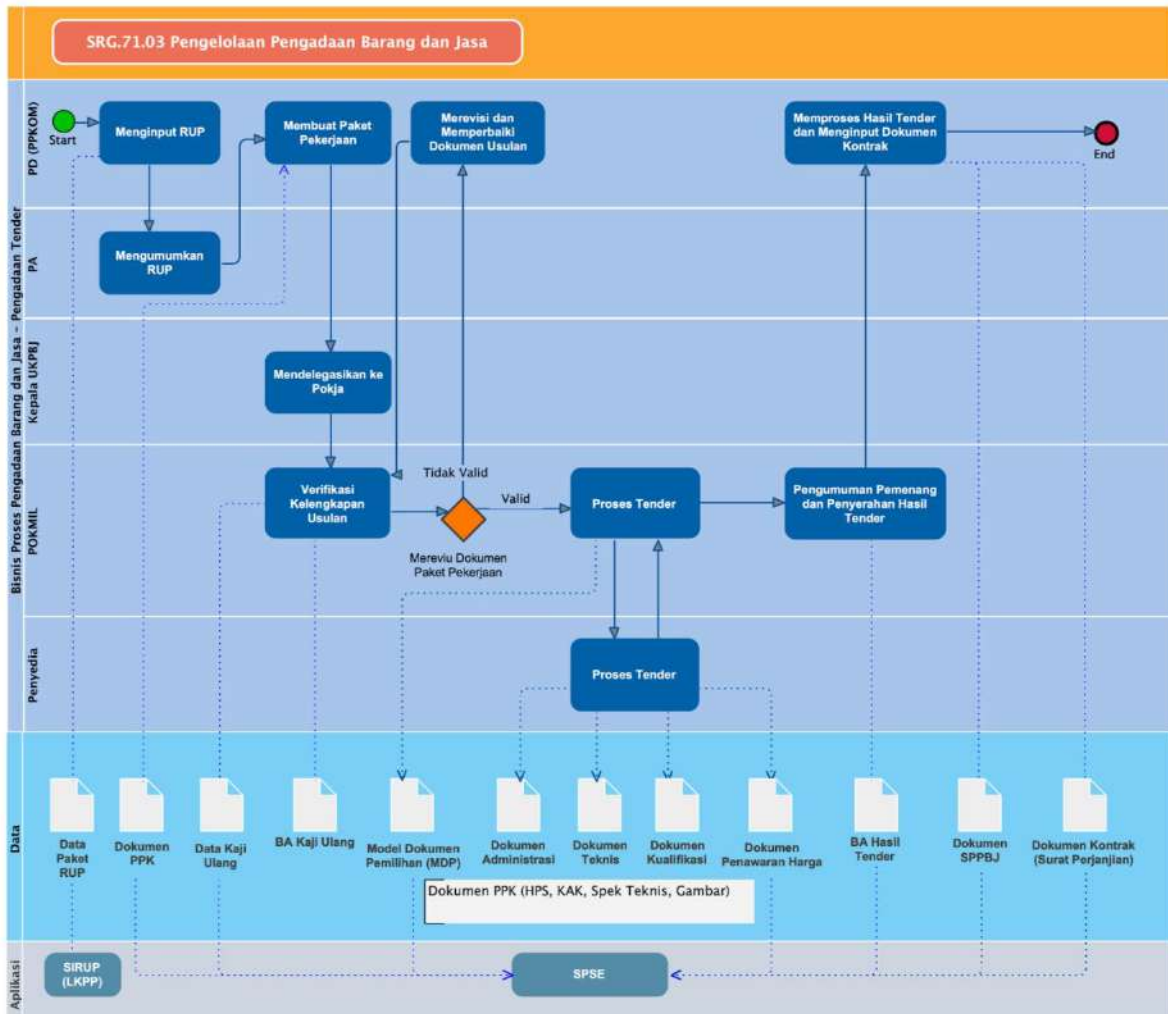
- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan di bidang pengkajian dan standarisasi pengadaan barang/jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan di bidang perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan dibidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengadaan barang dan jasa yang terdapat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

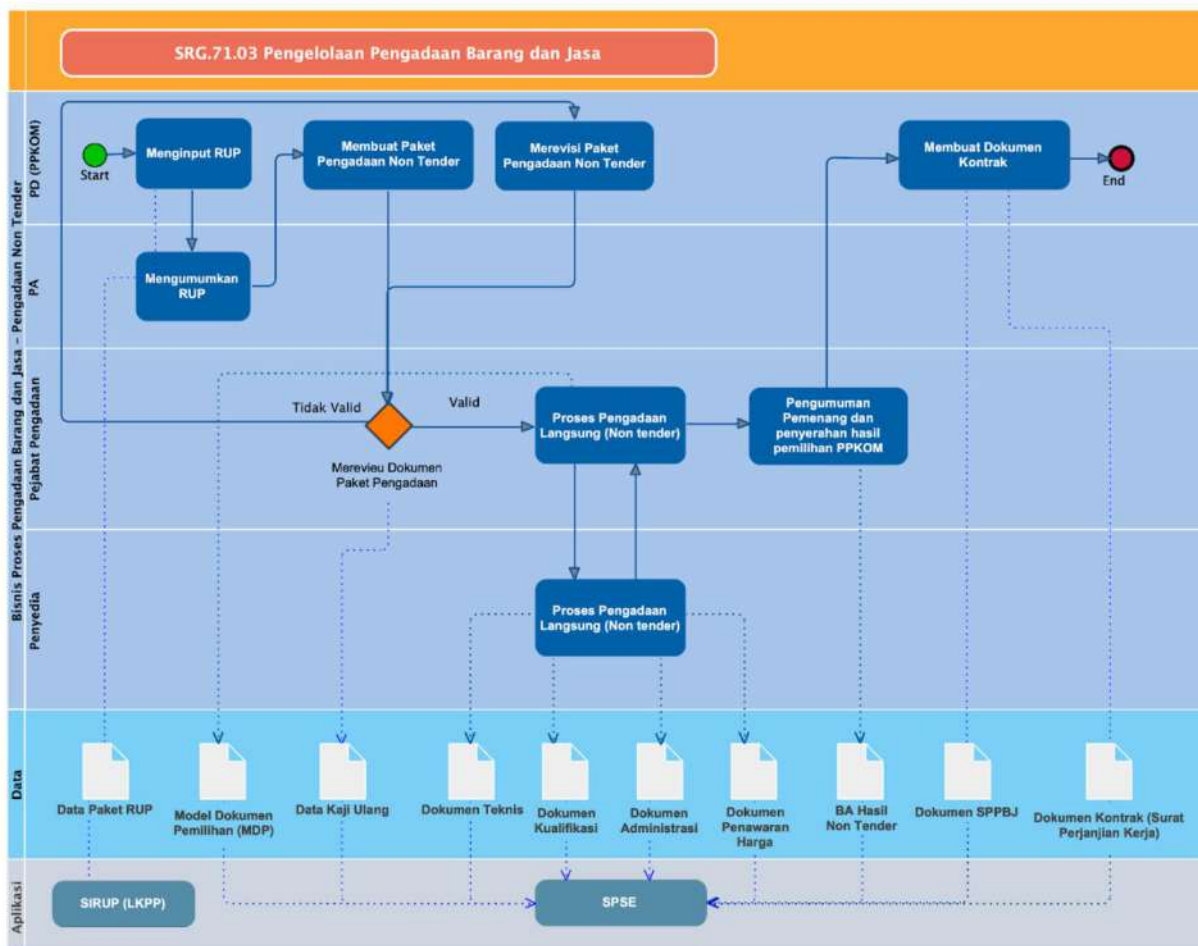
Tabel 3.4.1.12.1 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Pengadaan Barang dan Jasa (Tender)	Proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara pembukaan lelang atau tender terbuka
2.	Pengadaan Barang dan Jasa (Non Tender)	Proses pengadaan barang atau jasa yang tidak melalui proses lelang atau tender

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki 2 sub layanan yaitu Pengadaan Barang dan Jasa (Tender) dan Pengadaan Barang dan Jasa (Non Tender). Pada layanan pengadaan ini Aplikasi yang digunakan adalah SPSE dan SIRUP (LKPP).



Gambar 3.4.1.12.1. Pengadaan Barang dan Jasa (Tender)



Gambar 3.4.1.12.2. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Tender)

3.2.3.1.13. Layanan DI SPB

Layanan JDIH SPBE yang diampu oleh Bagian Hukum melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, sebagai wakil pemerintah pusat bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan Jaringan Dokumentasi serta Informasi Hukum. Adapun untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum melaksanakan fungsi sebagai berikut :

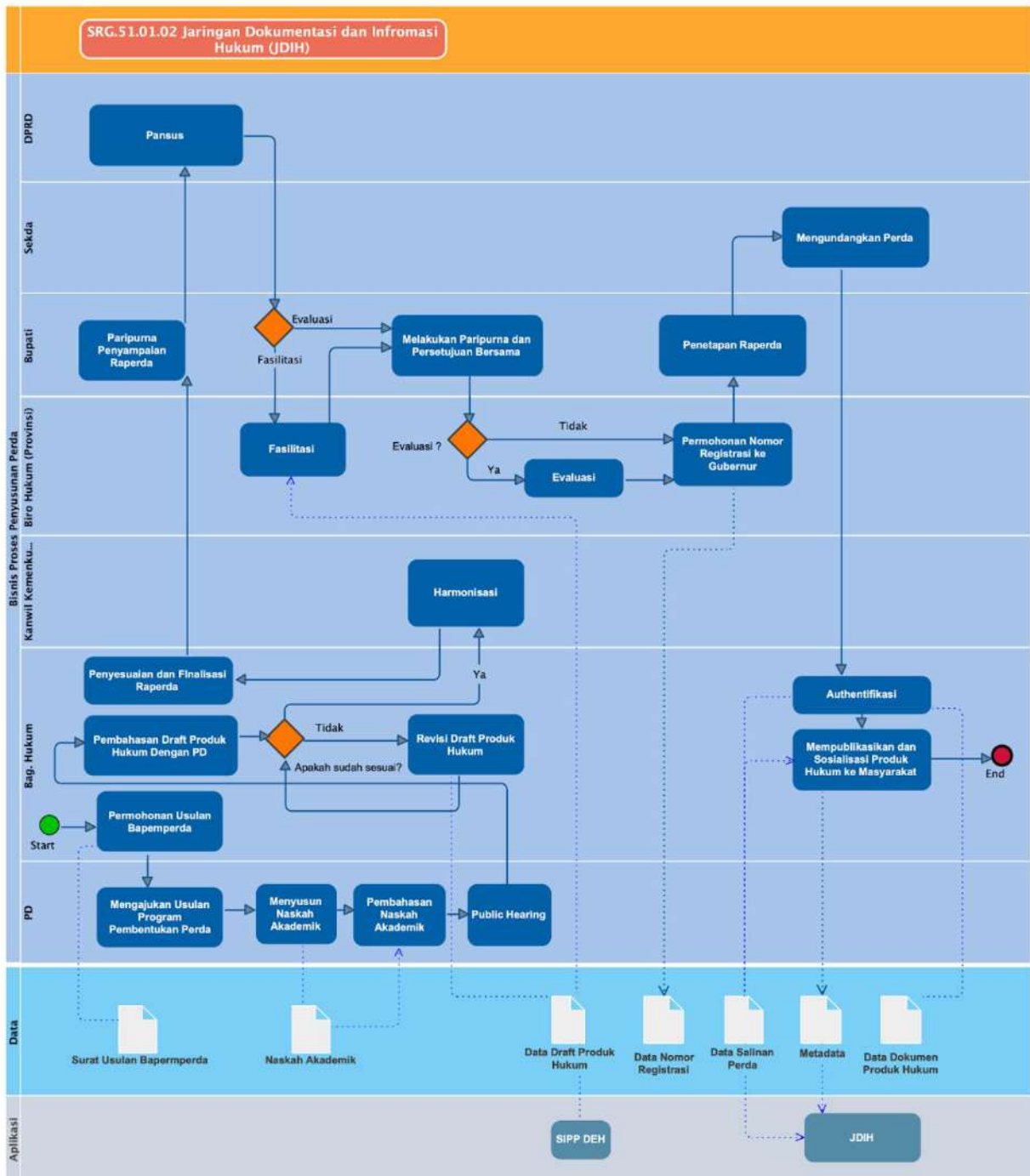
- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum; dan
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan JDIH SPBE yang terdapat di Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

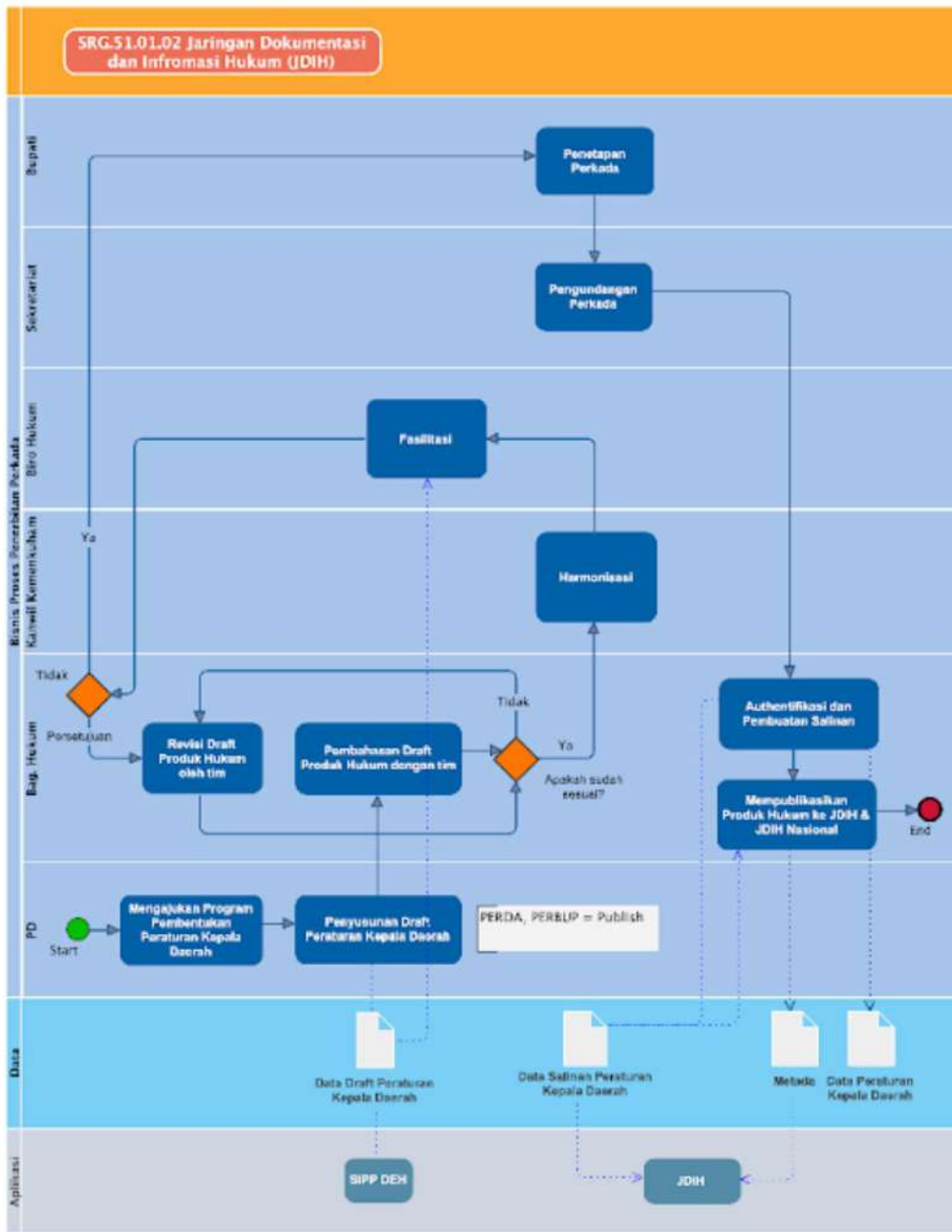
Tabel 3.2.3.1.13.1 Layanan JDIH SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Penyusunan Perda	Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) adalah proses pembuatan aturan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang berlaku di wilayah daerah.
2.	Penyusunan Perkada	Perkada adalah peraturan bupati yang merupakan peraturan daerah tingkat II yang dikeluarkan oleh bupati.

Bagian Hukum memiliki 2 sub layanan publik yaitu Penyusunan Perda dan Penyusunan Perkada. Pada layanan JDIH SPBE Aplikasi yang digunakan adalah SIPP DEH dan JDIH.



Gambar 3.4.1.13.1. Penyusunan Perda



Gambar 3.4.1.13.2. Penerbitan Perkada

3.2.3.1.14. Layanan Publik SPB (Bidang Perizinan)

Sebagai upaya untuk menunjang layanan publik SPBE bidang perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dengan fungsi sebagai berikut:

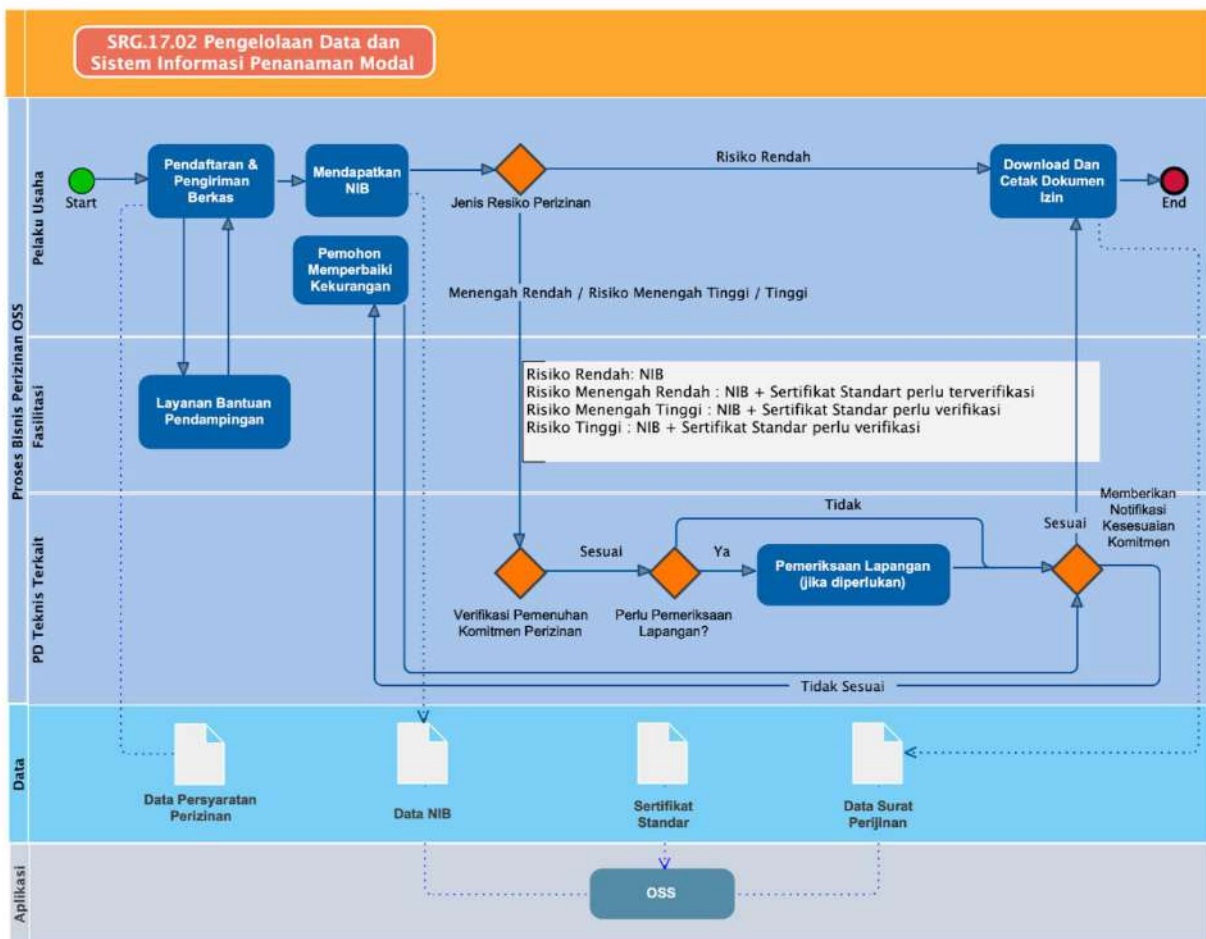
- a. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal;
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas.

Berdasarkan fungsi tersebut, layanan publik perizinan yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

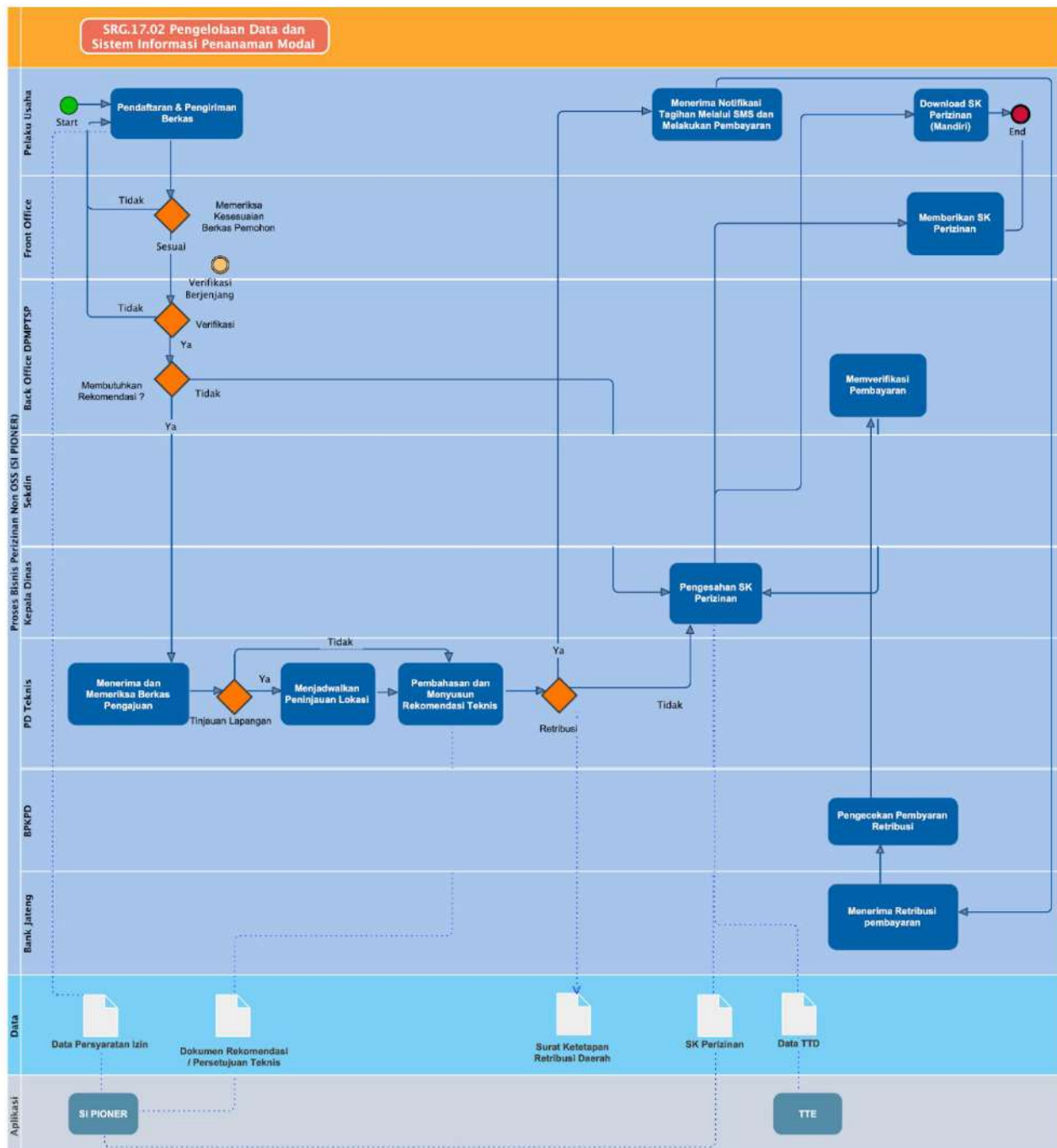
Tabel 3.2.3.1.14.1 Layanan Publik SPBE (Perizinan)

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Perizinan OSS	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>online</i> yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2.	Perizinan SIPIONER	Perizinan SIPIONER adalah Perizinan yang tidak difasilitasi oleh aplikasi OSS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 2 sub layanan perizinan yaitu Perizinan OSS dan Perizinan SIPIONER Adapun aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan ini adalah OSS, TTE dan SIPIONER.



Gambar 3.2.3.1.14.1 Perizinan OSS



Gambar 3.2.3.1.14.2 Perizinan SI PIONER

3.2.3.1.15. Layanan Publik SPB (Bidang Pendidikan)

Pelaksanaan Layanan publik SPBE bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan. Adapun tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan fungsi antara lain:

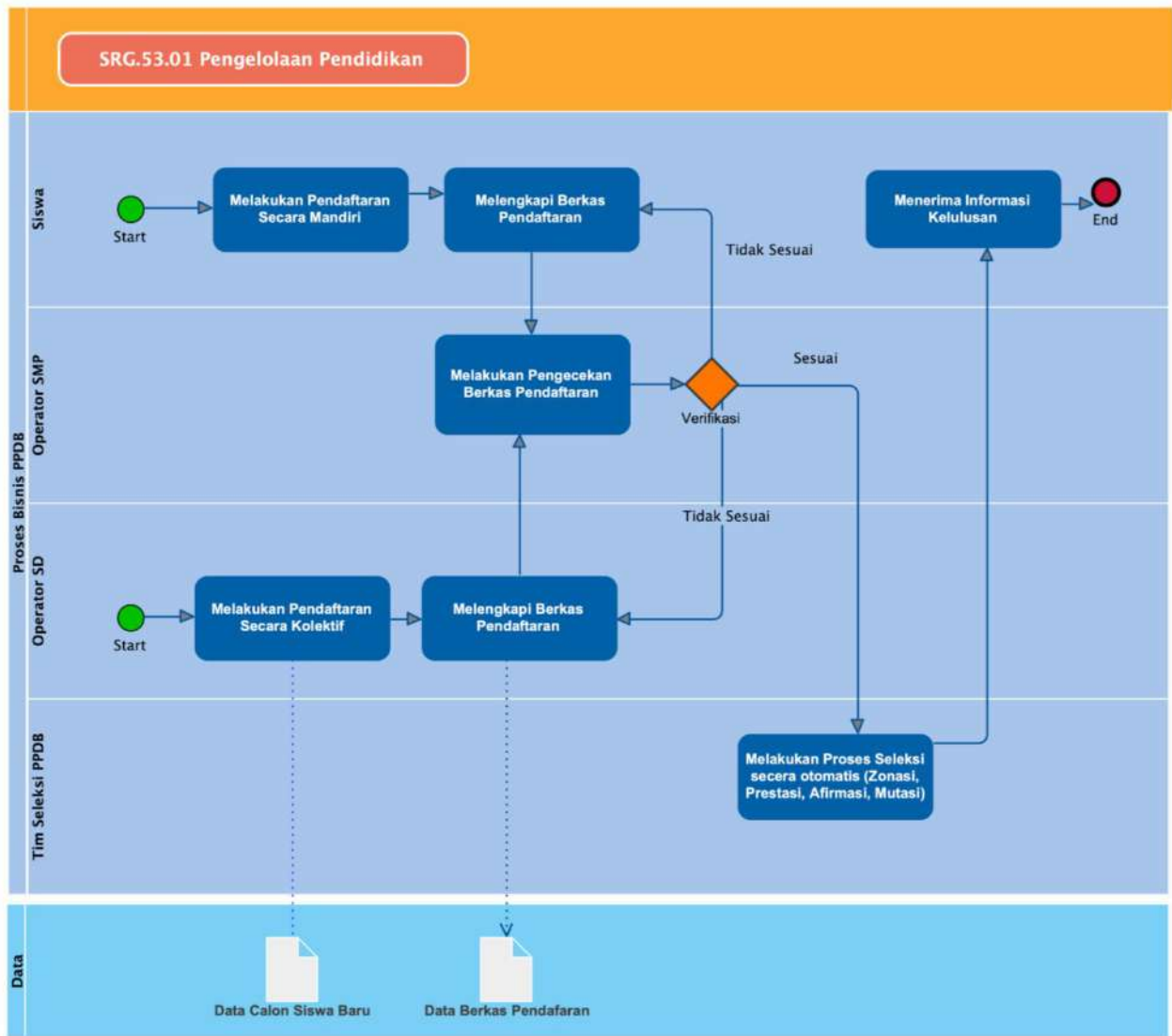
- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan Publik Pendidikan yang terdapat di Dinas Pendidikan adalah:

Tabel 3.2.3.1.16.1 Layanan Publik SPBE (Bidang Pendidikan)

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	PPDB	Layanan PPDB adalah suatu sistem pendaftaran dan seleksi yang dilakukan lembaga pendidikan..

Dinas Pendidikan memiliki 1 Sub layanan yaitu PPDB. Layanan publik bidang pendidikan menggunakan belum menggunakan aplikasi.



Gambar 3.2.3.1.16.1 PPDB

3.2.4. Arsitektur Aplikasi *ksisting*

Arsitektur aplikasi eksisting berisi gambaran mengenai berbagai komponen seperti nama aplikasi, basis aplikasi, basis data. Arsitektur layanan juga menggambarkan keterkaitan antara aplikasi dengan layanan dan output datanya. Arsitektur ini disusun bertujuan untuk menyediakan panduan dan struktur untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat berfungsi secara optimal, memiliki keamanan yang memadai, dan terintegrasi dengan aplikasi lainnya.

3.2.4.1. Katalog Aplikasi *ksisting*

Aplikasi dalam Arsitektur SPBE Nasional merupakan sebuah aplikasi internal daerah maupun instansi pusat yang digunakan dalam menunjang layanan seluruh perangkat daerah. Berikut ini disajikan daftar aplikasi *eksisting* yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen baik aplikasi dari instansi pusat maupun aplikasi internal daerah. Tabel 3.2.4.1.1. merupakan ringkasan dari katalog aplikasi *eksisting* Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun katalog aplikasi *eksisting* selengkapnya ditunjukkan pada link: <https://bit.ly/metadataspbesragen>

Tabel 3.2.4.1.1. Daftar Aplikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-001	e-Cuti	Sistem Informasi Cuti Pegawai	Layanan Cuti Pegawai	Data Cuti Pegawai	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
APL-SRG-002	KARISMA PATEN	Sistem Informasi Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai, Kartu Tanda Pengenal dan Kartu Peserta Taspen	Layanan Kartu Asuransi (KARIS) Layanan Kartu Pegawai (KARPEG) Layanan Kartu Suami/Istri (KARSU) Layanan Tunjangan Hari Tua (TASPEN)	Data Kartu Asuransi (KARIS) Data Kartu Pegawai (KARPEG) Data Kartu Suami/Istri (KARSU) Data Tunjangan Hari Tua (TASPEN)	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-003	SAKTI	Sistem Informasi Kehadiran Pegawai	Layanan Absensi Pegawai	Data Presensi Pegawai	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
APL-SRG-004	SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Layanan Profil Pegawai	Data Profil Kepegawaian	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
APL-SRG-005	ESR Menpan	Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Data RPJMD Data Renstra Data Cascading Data IKU Data RENJA Data RKT Data Perjanjian Kinerja Data Renaksi Data Monev Realisasi Kinerja Data LKJIP Kabupaten Data Hasil Reviu Kabupaten Data LHE Perangkat Daerah Data LPPD	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
APL-SRG-006	SIMANIS	Sistem Informasi TPP	Layanan Kepegawaian	Data Perhitungan TPP	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
APL-SRG-007	SIASN	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Layanan Kepegawaian	Data Usulan Kenaikan Pangkat Data Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Data SK Kenaikan Pangkat	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-008	e-Formasi	Sistem Informasi Kebutuhan Formasi ASN	Layanan Kepegawaian	Data Usulan Formasi	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
APL-SRG-009	SSCASN	Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara	Layanan Kepegawaian	Data SK MenpanRB Data Formasi Data SK Panitia Seleksi Data CASN Data Hasil Ujian CAT	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
APL-SRG-010	e-DOCU	Sistem Informasi Manajemen Dokumentasi ASN	Layanan Kepegawaian	Data Pemberkasan ASN	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
APL-SRG-011	CASN	Sistem Informasi Calon ASN	Layanan Kepegawaian	Data SK MenpanRB Data Formasi Data SK Panitia Seleksi Data CASN Data Hasil Ujian CAT Data SK Pengangkatan CASN Data SK Pengakatan ASN Data SK Persetujuan Teknis	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
APL-SRG-012	I DIS	Sistem Informasi Hukuman Disiplin	Layanan Kepegawaian	Data SK Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat Data SK Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
APL-SRG-013	SRIKANDI MANAH	Strategi Informasi Kewaspadaan Dini	Layanan Pelaporan Potensi Konflik Gangguan Kamtibmas	Data Potensi Konflik Gangguan Kamtibmas	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-014	SI SUSANA	Sistem Informasi Sukowati Sadar Bencana	Layanan Informasi, Komunikasi, dan Edukasi Kebencanaan Layanan Respon Cepat Laporan Kejadian Bencana	Data Informasi Kebencanaan Data Desa Tangguh Bencana Data Kejadian Bencana	Mobile	PostgreS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APL-SRG-015	ALADIN	Sistem Informasi Laporan Agenda Kedinasan	Layanan Penatausahaan Keuangan	Data Dana Transfer DAK Non Fisik	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APL-SRG-016	e-GESER	Sistem Informasi Pergeseran Anggaran	Layanan Pergeseran Anggaran Layanan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Layanan Penyusunan Neraca Layanan Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Layanan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Layanan Penyusunan Laporan Operasional (LO)	Data Arsip Usulan Pergeseran Anggaran Data Pelaporan Penyusunan LRA Data Pelaporan Penyusunan LPSAL Data Pelaporan Penyusunan Neraca Data Pelaporan Penyusunan LAK Data Pelaporan Penyusunan LPE Data Pelaporan Penyusunan CALK Data Pelaporan Penyusunan LO	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APL-SRG-017	e-POS	Sistem Informasi Kas Keuangan	Layanan Penatausahaan Keuangan	Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Data Lembar Verifikasi PPKSKPD Data Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM Data Ceklis SPP	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-018	e-SKPP	Sistem Informasi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Elektronik	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	Data Purna Pensiun Data Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APL-SRG-019	FMIS	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Layanan Penyusunan Neraca Layanan Penyusunan Laporan Operasional (LO) Layanan Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Layanan Perencanaan Anggaran Layanan Penatausahaan Keuangan	Data Anggaran SKPD Data Neraca Data Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) Data Penyusunan Laporan Operasional (LO) Data Penyusunan Laporan Perubahan Entitas (LPE) Data Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Data Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Data STS Data BKU Data SPJ Data Laporan Keuangan unaudited Data Laporan Keuangan Audited Data SPD Data SPP Data SPM Data Rekening Giro OPD / Pihak ke 3 Data Ringkasan SPP Data Rincian SPP	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
				Data Salinan DPA						
APL-SRG-020	OMSPAN	Sistem Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara	Layanan Penatausahaan Keuangan	Data Dana Transfer DAK Fisik Data Dana Desa	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APL-SRG-021	SI INTAN ASRI	SI INTAN ASRI (Sistem Informasi Tanah Aset Sragen Asri)	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Informasi Tanah Milik Pemerintah	Data Informasi Tanah Milik Pemerintah Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APL-SRG-022	SIKD	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikirim dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke Pusat	Layanan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Layanan Penyusunan Neraca Layanan Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) Layanan Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Layanan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Layanan Penyusunan Laporan Operasional (LO)	Data Pelaporan Penyusunan LRA Data Pelaporan Penyusunan LPSAL Data Pelaporan Penyusunan Neraca Data Pelaporan Penyusunan LAK Data Pelaporan Penyusunan LPE Data Pelaporan Penyusunan CALK Data Pelaporan Penyusunan LO	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APL-SRG-023	SIM GAJI	Sistem Informasi Gaji	Layanan Penatausahaan Keuangan	Data Gaji Pegawai	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APL-SRG-024	SIMBAPER	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Persediaan/Barang Habis Pakai	Data Barang Persediaan Data Barang Habis Pakai	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-025	SIMDA BMD	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Aset Tetap	Data Aset Tetap Data Belanja Modal Data Kartu Inventaris Barang Data Kartu Inventaris Ruangan Data SK Penghapusan Aset Data Penghapusan Aset	Desktop	S L Server	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APL-SRG-026	SIMTRADA	Sistem Informasi Transfer Daerah dan Dana Desa	Layanan Penatausahaan Keuangan	Data Dana Transfer	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APL-SRG-027	SINERGI 5/423	Sistem Informasi Data Transaksi Pemerintah Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Layanan Penatausahaan Keuangan	Data Pelaporan Penyusunan LRA	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Pusat	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APL-SRG-028	Si-RENJA	Sistem Informasi Penyusunan Rencana Kerja PD	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Data Dokumen Renja	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
APL-SRG-029	EMONEVRKPD	Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Layanan Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Data Capaian RKPD	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
APL-SRG-030	SENGGUH	Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Program Unggulan	Layanan Pengendalian dan Evaluasi Program Unggulan Bupati	Data Capaian Program Unggulan Bupati	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
APL-SRG-031	SI-RISMA	Sistem Informasi Riset Inovasi Pemerintah dan Masyarakat	Layanan Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi	Data Inovasi Data Nilai Kematangan Inovasi	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-032	KE-KER	Kelola Kinerja	Layanan Pemantauan Kinerja dan Anggaran	Data Kinerja dan Serapan Anggaran	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
APL-SRG-033	SIPD	Sistem Informasi Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Layanan Perencanaan Program dan Kegiatan OPD Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Layanan Penyusunan Penetapan APBD Layanan Penyusunan Perubahan APBD Layanan Penatausahaan Keuangan	Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Data Perbup Penjabaran APBD Data Perbup Perubahan Penjabaran APBD Data Perda APBD Data Perda Perubahan APBD Data Dokumen Renja Data Dokumen Renstra OPD Data Dokumen RKPD Data Dokumen RPJMD Data Perencanaan Program dan Kegiatan OPD Data RKA SKPD Data RAPBD Data APBD Data Rancangan KUA / PPAS Data KUA dan PPAS Data Draft Rancangan Awal Renstra PD Data Draft Rancangan Renstra PD Data Draft Akhir Renstra PD Data Perbup Bupati Renstra PD Data Rancangan Awal RPJMD Data Dokumen Rancangan RPJMD Data Dokumen Akhir RPJMD	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-034	JDIH	Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan Pemberian Informasi Hukum	Data Informasi dan Dokumentasi Hukum Data Salinan Perda Data Metadata Data Salinan Peraturan Kepala Daerah Data Perda Pertanggungjawaban APBD Data Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Bagian Hukum
APL-SRG-035	SIPP DEH	Sistem Informasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Data Penyusunan Produk Hukum Daerah Data Draft Produk Hukum Data Draft Peraturan Kepala Daerah	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Bagian Hukum
APL-SRG-036	e-SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Data Komponen SAKIP Data RPJMD Data Renstra Data Cascading Data IKU Data RENJA Data RKT Data Perjanjian Kinerja	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Bagian Organisasi
APL-SRG-037	SIKOD ELEGAN	Sistem Informasi Kematangan Organisasi dan Evaluasi Kelembagaan	Layanan Kematangan Organisasi Daerah dan Evaluasi Kelembagaan	Data Kematangan Organisasi Daerah Data Kelembagaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Data Monitoring dan Pengendalian Tugas Perangkat Daerah Data Penjaminan Mutu	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Bagian Organisasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
				Pelayanan Perangkat Daerah Data SOP Pelayanan Perangkat Daerah Data Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Data Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah Data Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Data Manajemen Resiko Tugas Aparatur Data Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur Data Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah						
APL-SRG-038	SUKMA	Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat	Layanan Kepuasan Masyarakat	Data Kepuasan Masyarakat	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Bagian Organisasi
APL-SRG-039	ELPPD	Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Bagian Pemerintahan
APL-SRG-040	LKPJ	Sistem Informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Layanan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Bagian Pemerintahan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-041	PENGAMAN SANTET	Sistem Informasi Eks Bondo Desa	Layanan Fasilitas Sewa Tanah Eks Bondo Desa	Data Peta Digital Penggunaan Lahan Sragen	Web Based	S L Server	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Bagian Pemerintahan
APL-SRG-042	SPM	Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimal	Layanan Pemantauan 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Sosial dan Trantibulinmas)	Data Pelayanan Dasar Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Sosial dan Trantibulinmas)	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Bagian Pemerintahan
APL-SRG-043	SIMPAN ASET	Sistem Penyimpanan Arsip Seleksi dan Tender	Layanan Pengarsipan Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL)	Data Dokumentasi Arsip Pengadaan	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
APL-SRG-044	AMEL	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Data Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
APL-SRG-045	LPSE	Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Paket Pengadaan Data Penilaian Kinerja Penyedia Data Penyedia Data Rencana Umum Pengadaan Data Model Dokumen Pemilihan Data Kaji Ulang Data Dokumen Teknis Data Dokumen Kualifikasi Data Dokumen Administrasi Data Dokumen Penawaran Harga Data BA Hasil Non Tender Data Dokumen SPPBJ Data Dokumen Kontrak Data Dokumen PPK Data BA Hasil Tender	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-046	SIKAP	Sistem Informasi Kinerja Penyedia	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Paket Pengadaan Data Penyedia Data Rencana Umum Pengadaan Data Penilaian Kinerja Penyedia	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
APL-SRG-047	SIRUP	Sistem Informasi Sistem Rencana Umum Pengadaan	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Paket Pengadaan Data Penyedia Data Rencana Umum Pengadaan Data Penilaian Kinerja Penyedia	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
APL-SRG-048	SULTAN	Sistem Informasi Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Data Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
APL-SRG-049	INLISLITE	Sistem Informasi Katalog Online	Layanan Online Public Access Catalog Layanan Perpustakaan Umum	Data Arsip Statis Data Katalog Buku Data Peminjaman Buku Perpustakaan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
APL-SRG-050	iSRAGEN	Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan Online	Layanan Perpustakaan Online	Data Koleksi Buku	Mobile	PostgreS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
APL-SRG-051	SRIKANDI	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Layanan Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Data Potensi Konflik Gangguan Kamtibmas Data Arsip Surat Masuk Data Disposisi Surat Data Surat Masuk dan Surat Keluar Data Buku Agenda Keluar Data Kartu Kendali Keluar Data Surat Keluar Data Buku Agenda Masuk Data Kartu Kendali Masuk Data Lembar Disposisi	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Pusat	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-052	BARATA	Sistem Informasi Bayi Lahir Ber-Akta	Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian DUKCAPIL	Data Surat Keterangan Lahir Data Kartu Keluarga (KK)	Web Based	Oracle	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APL-SRG-053	E-OFFICE	Sistem Informasi Pengelolaan Kependudukan	Layanan Dispensasi Pindah Online	Data Surat Keterangan Pindah Data Kartu Keluarga (KK) Data Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Web Based	Oracle	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APL-SRG-054	PANDU ONLINE	Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Terpadu Online	Layanan Pengajuan Pembuatan Dokumen Kependudukan Online	Data Pengajuan Pembuatan Dokumen Kependudukan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APL-SRG-055	PELANDUK POS	Sistem Informasi Pelayanan Antar Jemput Dokumen Admindak Melalui Pos	Layanan Pengiriman Dokumen Admindak Masyarakat	Data Pengiriman Dokumen Admindak Masyarakat	Cloud	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APL-SRG-056	PELITA	Sistem Informasi Pelaporan Kematian Terbit Akta	Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian DUKCAPIL	Data Surat Keterangan Kematian Data Kartu Keluarga (KK) Data Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Web Based	Oracle	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APL-SRG-057	SIANTON	Sistem Antrian On/Off-Line	Layanan Pengambilan Nomor Antrian Online	Data Nomor Antrian Pelayanan Kependudukan	Web Based	Oracle	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APL-SRG-058	TERPANA DOA	Sistem Informasi Tertib Penyimpanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Layanan Digitalisasi Arsip Kependudukan	Data Digitalisasi Arsip Kependudukan	Web Based	Oracle	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APL-SRG-059	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Pengajuan Pembuatan Dokumen Kependudukan	Data Pengajuan Pembuatan Dokumen Kependudukan	Desktop	Oracle	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-060	PSC 119 SUKOWATI/MA WAS SUKOWATI 119	Sistem Informasi Pelaporan Kejadian Kegawatdaruratan Masyarakat (Mapag Warga Sukowati)	Layanan Kegawatdaruratan Medis Terpadu	Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan Data Kejadian Kegawatdaruratan Data Ketersediaan Tempat Tidur Data Laka Lantas Data Posisi Ambulance	Mobile	PostgreSQL	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Kesehatan
APL-SRG-061	SIH AN SEHAT	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Perizinan Fasilitas Kesehatan	Data Rekomendasi Surat Izin Praktik Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Kesehatan
APL-SRG-062	SIPENEBAR	Sistem Informasi Penanggulangan Demam Berdarah Dengue	Layanan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue	Data Kasus Demam Berdarah Dengue Data Penanggulangan Demam Berdarah Dengue	Web Based	MySQL	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Kesehatan
APL-SRG-063	SIPENTURA	sistem Informasi Pendaftaran Kepesertaan JKN	Layanan Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKN)	Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKN)	Web Based	MySQL	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Kesehatan
APL-SRG-064	e-PANEN	Sistem Informasi Pelaporan Potensi Panen	Layanan Informasi Panen	Data Pemetaan Aktivitas Tanam dan Panen	Web Based	MySQL	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Pusat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
APL-SRG-065	ISIKHNAS	Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia	Layanan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Layanan Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD)	Data Vaksinasi Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Data Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD)	Web Based	MySQL	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
APL-SRG-066	REALTIS	Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional	Layanan Pelaporan Pemotongan Hewan Rumah Potong Hewan (RPH)	Data Pelaporan Pemotongan Hewan Rumah Potong Hewan (RPH)	Mobile	MySQL	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-067	SIMLUHTAN	Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian	Layanan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Data Penyuluh pertanian Data Petani	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
APL-SRG-068	SIMPI	Sistem Informasi Manajemen Kuota Pupuk Subsidi	Layanan Pupuk Bersubsidi	Data Alokasi Pupuk Bersubsidi	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Pusat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
APL-SRG-069	ANA A	Sistem Informasi Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Layanan Manajemen TIK	Data Pengajuan Email Data Pengajuan TIK	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-070	BLC	Sistem Informasi Broadband Learning Center	Layanan Fasilitas Pembelajaran IT (Information Technology)	Data Pembelajaran IT (Information Technology)	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-071	DEWAN TIK	Sistem Informasi Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Layanan Manajemen TIK	Data Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-072	DISBOOK	Sistem Informasi Disposisi Maya	Layanan Disposisi Online	Data Disposisi Tepat Waktu	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-073	EVALUASI SMARTCIT (KEMKOMINFO)	Sistem Informasi Formulir Penilaian Smart City	Layanan Evaluasi Smart City	Data Evaluasi Smart City	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-074	EVALUASI SPBE (KEMENPANRB)	Sistem Informasi Penilaian Indeks SPBE	Layanan Evaluasi SPBE	Data Evaluasi SPBE	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-075	INDEKS STATISTIK SEKTORAL	Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Statistik	Layanan Capaian Kemajuan Statistik Sektoral	Data Capaian Kemajuan Statistik Sektoral	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-076	LAPORGUB	Sistem Informasi Portal Laporan Pengaduan Online	Layanan Pengaduan Masyarakat	Data Aduan Masyarakat	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-077	SEROJA	Sistem Informasi Sragen Robot Menjawab	Layanan Pelayanan Publik Terpusat	Data Pelayanan Publik Data Permohonan Informasi	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-078	SIPRONATEL	Sistem Informasi Pelayanan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi	Layanan Sistem Informasi Pelayanan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi	Data Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-079	SITEPLAN	Sistem Pendataan Menara Telekomunikasi (BTS)	Layanan Retribusi Menara Telekomunikasi dan Data Menara Telekomunikasi	Data Menara Telekomunikasi	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-080	SP4N Laporan	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	Layanan Pengaduan Masyarakat	Data Aduan Masyarakat	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-081	SPPD ONLINE	Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas	Layanan SPPD Online	Data SPPD Dalam dan Luar Daerah	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-082	SRAGEN SATU DATA	Sistem Informasi Satu Data Tingkat Daerah	Layanan Satu Data Tingkat Daerah	Data Sektoral	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-083	SUR A	Sistem Informasi Surat Maya	Layanan Kirim dan Terima Surat Online	Data Surat Masuk dan Keluar Antar OPD	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-084	TTE	Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik	Layanan Tanda Tangan Elektronik	Data Dokumen Penggunaan TTE	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
APL-SRG-085	SI BINA SERASI	Sistem informasi Bimbingan Informasi dan Layanan Konsultasi Koperasi	Layanan Peningkatan Pemahaman Koperasi	Data Konsultasi Koperasi	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
APL-SRG-086	SIAPPUBERS	Sistem Informasi Pengaduan Pupuk Bersubsidi	Layanan Aduan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Data Aduan Masyarakat Distribusi Pupuk	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
APL-SRG-087	SIKOPER	Sistem Informasi Koperasi	Layanan Informasi Koperasi	Data Daftar Koperasi	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
APL-SRG-088	SIBARES	Sistem informasi wajib retribusi kebersihan/persampahan	Layanan Pengelolaan Persampahan	Data Lokasi Angkutan Sampah Data Retribusi Sampah	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
APL-SRG-089	e-TICKETING	Sistem Pengelolaan Data Tiket yang masuk ke Pariwisata	Layanan Tiket Destinasi Pariwisata	Data Tiket Pariwisata	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
APL-SRG-090	KENAIKAN GAJI BERKALA	Sistem Pengelolaan Data KGB Dinas Dispora	Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Online	Data Kenaikan Gaji Berkala	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-091	SIDORA	Sistem Informasi Database Keolahragaan	Layanan Informasi Database Keolahragaan	Data Informasi Keolahragaan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
APL-SRG-092	SIMPATI	Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi	Layanan Informasi Pariwisata Terintegrasi	Data Informasi Pariwisata Terintegrasi	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
APL-SRG-093	SIPEPA A	Sistem Informasi Pariwisata Air Panas Bayanan	Layanan Informasi Pariwisata Air Bayanan	Data Informasi Pariwisata Air Panas Bayanan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
APL-SRG-094	SITAGEN	Sistem Informasi Pariwisata Sragen	Layanan Informasi Pariwisata Sragen	Data Informasi Pariwisata Sragen	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
APL-SRG-095	VIRTUAL TOUR LAKASIWISATA	Sistem Pengelolaan Data Virtual Destinasi	Layanan Virtual Tour Destinasi	Data Pengelolaan Virtual Destinasi	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
APL-SRG-096	PATRIOT SRAGEN	Sistem Informasi Aduan Jalan Rusak	Layanan Aduan Jalan Rusak	Data Aduan Jalan Rusak Data Jalan Rusak	Mobile	PostgreS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Pekerjaan Umum
APL-SRG-097	SIMBG	Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung	Layanan Persetujuan Bangunan dan Gedung Layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Layanan Informasi Manajemen Bangunan Gedung	Data Pemohon Bangunan Gedung Data Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Data Persetujuan Bangunan Gedung Data Retribusi Bangunan Gedung Data Retribusi Sertifikat Laik	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Pekerjaan Umum

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
				Fungsi Data Sertifikat Laik Fungsi Data Perizinan Bangunan dan Gedung						
APL-SRG-098	EPDESKEL	Sistem Informasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Layanan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Pusat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
APL-SRG-099	GAPURA DESA	Sistem Informasi Data Perkembangan Desa	Layanan Informasi Desa	Data BUMDes Data Infografis Desa Data Perkembangan Desa	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
APL-SRG-100	INDEKS DESA MEMBANGUN	Sistem Informasi Indeks Desa Membangun	Layanan Infografis Desa Membangun	Data Infografis Desa Membangun	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
APL-SRG-101	KLINIK BUMDES DAS DES	Sistem Informasi Klinik BUMDes	Layanan Klinik BUMDes	Data Klinik BUMDes	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
APL-SRG-102	PRODESKEL	Sistem Informasi Program Desa Kelurahan	Layanan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Data Profil Desa	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Pusat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
APL-SRG-103	SIPADES	Sistem Pengelolaan Aset Desa	Layanan Pengelolaan Aset Desa	Data Pengelolaan Aset Desa	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Pusat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
APL-SRG-104	SIPMONTOK	Sistem Informasi Perencanaan Dinas PMD	Layanan Perencanaan dan Evaluasi Monitoring Keuangan Dinas PMD	Data Perencanaan Dinas PMD	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-105	SISKEUDES	Sistem Informasi Keuangan Desa	Layanan Pengelolaan Keuangan Desa	Data Pengelolaan Keuangan Desa	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Pusat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
APL-SRG-106	SUKAPEDES	Sistem Informasi Kredit Umum Pedesaan	Layanan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Data Kepala Desa dan Perangkat Desa	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
APL-SRG-107	OSS	Sistem Informasi Perizinan Online	Layanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi Lingkungan (SKKLH, PKPLH, dan NIB (SPPL)) Layanan Persetujuan Teknis Kegiatan Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah Layanan Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3 Layanan Perizinan Edar Pangan Layanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (Registrasi PSAT-PDUK) Layanan Perizinan Angkutan Layanan Perizinan Berusaha	Data Perizinan Edar Pangan Data Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Data Registrasi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK) Data Pemenuhan Baku Mutu Emisi Data Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Data Persetujuan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Limbah Data Persetujuan Teknis Kegiatan Pembuangan Limbah Data Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3 Data Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) Data Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Data Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
				Data Nomor Induk Berusaha Data Sertifikat Standar Data Surat Perizinan						
APL-SRG-108	PASTI OL	Sistem informasi perihal persebaran investasi Kabupaten Sragen	Layanan Informasi Persebaran Investasi	Data Persebaran Investasi	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
APL-SRG-109	SI PELANGI	Sistem Informasi Peluang Investasi	Layanan Informasi Peta Peluang Investasi	Data Peta Peluang Investasi	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
APL-SRG-110	SI PIONER	Sistem Permohonan Perizinan	Layanan Izin Trayek Layanan Izin Reklame Layanan Izin Praktik Layanan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Data Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Data Izin Praktik Data Izin Reklame Data Perizinan Trayek Data Persyaratan Perizinan Data Rekomendasi / Persetujuan Teknis Data SK Perizinan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
APL-SRG-111	SIAP	Sistem informasi pengelolaan aduan/ keluhan dari pemohon perizinan	Layanan Aduan Perizinan	Data Aduan Masyarakat Distribusi Pupuk Data Aduan Perizinan Tindak Lanjut Data Aduan Kerusakan Alat Penunjang Kelalulintasan Data Kartu Identitas Pencari Kerja Luar Negeri Data Surat Keterangan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
				Rekomendasi Paspor TKI						
APL-SRG-112	SIPIPO	Sistem Informasi Permohonan Perizinan Penelitian Online	Layanan Pembuatan Surat Keterangan Penelitian Layanan Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN) Layanan Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Data Kegiatan Penelitian Data Peneliti Data Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) Data Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
APL-SRG-113	SKM	Sistem pengelolaan informasi nilai kepuasan masyarakat	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat	Data Survei Kepuasan Masyarakat	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
APL-SRG-114	SSO	Sistem informasi pengelolaan user	Layanan Pengelolaan Akun	Data User Pengguna Aplikasi	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
APL-SRG-115	DAPODIK	Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan	Layanan Pengelolaan Pendidikan	Data Siswa Data Guru Data Sekolah	Web Based	S L Server	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
APL-SRG-116	PPDB-ONLINE	Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Layanan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru	Data Penerimaan Siswa Jalur Afirmasi Data Penerimaan Siswa Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali Data Penerimaan Siswa Jalur Prestasi Data Penerimaan Siswa Jalur onasi Data Calon Siswa Baru Data Berkas Pendaftaran	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-117	SIM TUNJANGAN	Sistem Informasi Tunjangan Profesi Guru	Layanan Tunjangan Profesi Guru	Data SK Guru Penerima Tunjangan Profesi	Web Based	S L Server	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Pusat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
APL-SRG-118	SIMFONI PPA	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Data Korban Penerima Pelayanan Pendampingan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APL-SRG-119	TESIA	Sistem Informasi Pelaporan Korban Kekerasan	Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Data Korban Penerima Pelayanan Pendampingan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APL-SRG-120	NGE-KIR ONLINE	Sistem Pendaftaran Online Pengujian Kendaraan Bermotor	Layanan Pendaftaran dan Pengecekan Hasil Uji KIR Kendaraan Bermotor	Data Hasil Uji Kendaraan Data Nomor Antrian Uji Kendaraan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Perhubungan
APL-SRG-121	ROMANTIS SUKOWATI	Sistem Informasi Robot Keselamatan Berlalu Lintas	Layanan Bot-Pedia Keselamatan Berlalu Lintas Layanan Pengetahuan dan Pembelajaran Keselamatan Berlalu Lintas	Data Bot Berlalu Lintas Data Ensiklopedia Keselamatan Berlalu Lintas Data Pengenalan Rambu Lalu Lintas	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Perhubungan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-122	SIAP-LALIN	Sistem Informasi Aduan Kelalulintasan	Layanan Pengaduan Kelalulintasan	Data Aduan Kerusakan Alat Penunjang Kelalulintasan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Perhubungan
APL-SRG-123	SIM PARKIR	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Perparkiran	Layanan Pengelolaan Perparkiran	Data Pengelolaan Perparkiran	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Perhubungan
APL-SRG-124	PAK TORA	Sistem Informasi Penataan Akses Pada Tanah Objek Reforma Agraria	Layanan Reforma Agraria	Data Reforma Agraria	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
APL-SRG-125	SIAGA SUKOWATI	Sistem Pemakaian Gedung dan Aset Sukowati	Layanan Sewa Gedung	Data Izin Pemakaian Gedung	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
APL-SRG-126	SIPETARUNG	Sistem Informasi Perizinan Tata Ruang Kabupaten Sragen	Layanan Perizinan Tata Ruang	Data Cetak Peta Informasi Tata Ruang Usaha Pertambangan Batuan Data Perizinan Tata Ruang Data Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Data Surat Keterangan Peruntukan Ruang	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
APL-SRG-127	DESA TUMIS	Sistem Informasi Verifikasi dan Validasi data penduduk miskin yang layak menerima terapi bantuan dari APBD Kabupaten Sragen	Layanan Penerima Bantuan	Data Penerima Terapi Bantuan APBD	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Dinas Sosial

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-128	SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Net Generation	Layanan Penanganan Fakir Miskin	Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Data Kartu Indonesia Sehat (KIS) Data Penerima Bansos APBD Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Data Program Keluarga Harapan (PKH)	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Sosial
APL-SRG-129	SIKS-V2 DT Jateng	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Jawa Tengah	Layanan Penanganan Fakir Miskin	Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Data Kartu Indonesia Sehat (KIS) Data Penerima Bansos APBD Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Data Program Keluarga Harapan (PKH)	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Sosial
APL-SRG-130	SIM SARASWATI	Sistem Informasi Penanganan Fakir Miskin	Layanan Penanganan Fakir Miskin	Data Penerima Bansos APBD	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Sosial
APL-SRG-131	e-MAKAR O	Sistem Informasi Bursa Kerja	Layanan Pendataan Informasi Pasar Kerja	Data Pencari Kerja Data Kartu Identitas AK-1	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Tenaga Kerja
APL-SRG-132	LAPPAK SUKOWATI	Sistem Informasi Pelatihan Ketenagakerjaan	Layanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Data Lowongan Pekerjaan Data Pelatihan Tenaga Kerja Data Penempatan Tenaga Kerja	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Dinas Tenaga Kerja
APL-SRG-133	SIAPKERJA	Sistem Informasi Ketenagakerjaan	Layanan Antar Kerja Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)	Data Kartu Identitas Pencari Kerja Luar Negeri Data Surat Keterangan Rekomendasi Paspor TKI	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	Dinas Tenaga Kerja

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-134	GOL KPK	Sistem Informasi Gratifikasi Online	Layanan Gratifikasi	Data Gratifikasi	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Pusat	Inspektorat
APL-SRG-135	SORJAN	Sistem Informasi Manajemen konsultasi pengawasan	Layanan Konsultasi Online	Data Konsultasi Pengawasan	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Inspektorat
APL-SRG-136	WBS	Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran Pemerintah	Layanan Aduan Pegawai	Data Aduan Pegawai	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	Inspektorat
APL-SRG-137	DAFTAR ONLINE	Sistem Informasi Pendaftaran Online Pasien Rawat Jalan	Layanan Pendaftaran Online Pasien RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Data Identitas Pasien	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
APL-SRG-138	SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Layanan Antrian Pelayanan Rawat Jalan Layanan Manajemen Rumah Sakit	Data Nomor Antrian Pasien Data Informasi Pengelolaan Tempat Tidur Data Sebaran Diagnosa Data Kunjungan Data Informasi Laporan Keuangan Rumah Sakit	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
APL-SRG-139	AISHA	Sistem Informasi Artificial Intellegent Support for Hospital Acceleration. AISHA singkatan dari (Artificial Intellegent Support for Hospital Acceleration) merupakan aplikasi perpaduan teknologi	Layanan Promosi dan Edukasi Rumah Sakit	Data Manajerial Direktur Rumah Sakit Data Kritik dan Saran Rumah Sakit	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
		tinggi dalam rangka pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit secara terintegrasi berbasis Kecerdasan Buatan untuk mengatasi berbagai problem yang dihadapi Rumah Sakit khususnya di bidang Promosi, Informasi, Kendali dan Edukasi (PIKE).								
APL-SRG-140	AMAN POLL	Sistem Informasi Maintenance Inventaris dan Pelaporan Online	Layanan Aduan Kerusakan Alat Medis dan Sarpras Rumah Sakit	Data Kerusakan Alat Medis Data Kerusakan Sarpras Rumah Sakit	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-141	APOTIK ONLINE	Sistem Informasi Klaim Obat Kronis	Layanan Ketersediaan Obat	Data Ketersediaan Obat Data Pembelian Obat Data Resep Obat	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-142	e-KLAIM	Sistem Informasi Pengajuan Klaim Rumah Sakit	Layanan Klaim BPJS	Data Klaim BPJS	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-143	e-SEP	Sistem Informasi Surat Eligibilitas Peserta	Layanan BPJS Ketenagakerjaan	Data BPJS Ketenagakerjaan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-144	GEMATI	Gemolong Hospital Chatbot Information	Layanan Informasi Chatbot Rumah Sakit Gemolong Sragen	Data Chatbot Rumah Sakit Gemolong Sragen	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-145	HFIS	Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan	Layanan Informasi Fasilitas Kesehatan	Data Informasi Fasilitas Kesehatan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-146	HORE RAMAH	HORE RAMAH (Home Care Rawat Luka di Rumah)	Layanan Homecare	Data Pasien Homecare	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-147	JIWA KORSA	Jejaring Warga Dan Komunitas Promosi Kesehatan	Layanan Jejaring Warga dan Komunitas Promosi Kesehatan	Data Komunitas Warga Promosi Kesehatan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-148	JKN MOBILE	Sistem Informasi Jaminan Kesehatan	Layanan BPJS Kesehatan	Data BPJS Kesehatan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-149	LANTERA	Sistem Informasi Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian RSUD dr. Soeratno Gemolong	Data Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan Wafat	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-150	LUPIS	Sistem Informasi Klaim Tagihan Rumah Sakit	Layanan Tagihan Rumah Sakit	Data Tagihan Rumah Sakit	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-151	PARAMITA	Sistem Informasi Podcast Promosi Kesehatan	Layanan Podcast Promosi Kesehatan	Data Podcast Promosi Kesehatan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-152	PSC	Sistem Informasi Keselamatan Publik	Layanan Instalasi Gawat Darurat	Data Instalasi Gawat Darurat Pasien	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong

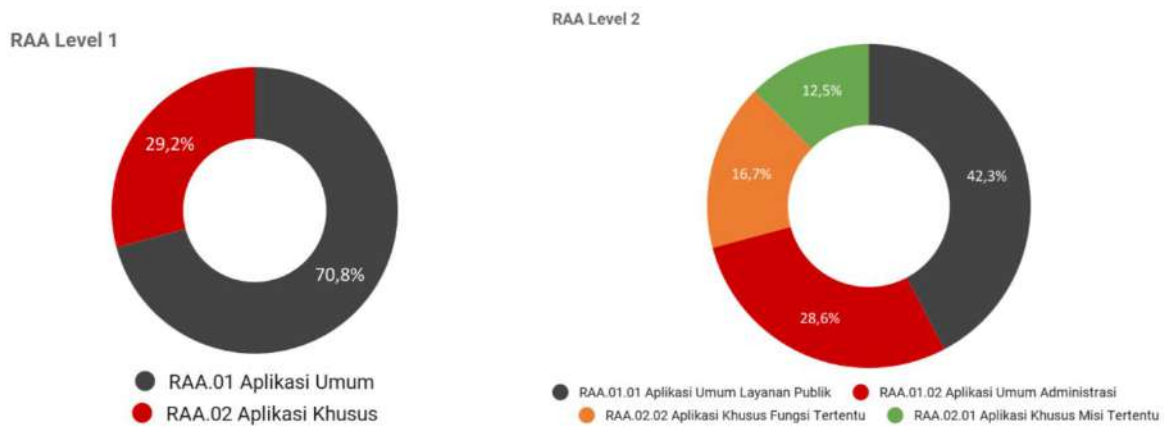
ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-153	SARASWATI	Sistem Informasi Pendataan Warga Miskin	Layanan Penanganan Fakir Miskin Layanan Kesehatan Warga Miskin	Data Penerima Bansos APBD Data Kesehatan Warga Miskin	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-154	SIDATAN	Sistem Informasi Pendaftaran Online	Layanan Pendaftaran Online Pasien RSUD dr. Soeratno Gemolong	Data Nomor Antrian Rumah Sakit	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-155	SIDIAN	Sistem Digitalisasi Arsip Kepegawaian	Layanan Kepegawaian Rumah Sakit	Data Kepegawaian Rumah Sakit	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-156	SIM RS GOS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Generic Open Source)	Layanan Kesehatan Sekunder	Data Electronic Medical Record (EMR) Data Bill Pasien Data Obat	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-157	SIMA A	Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimal RS	Layanan Pengembangan Rumah Sakit	Data Standar Pelayanan Rumah Sakit	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-158	SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara	Layanan Informasi Pelaporan Pemutusan BPJS Ketenagakerjaan	Data Informasi Pelaporan Pemutusan BPJS Ketenagakerjaan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-159	SIPRADITA	Sistem Informasi Dokumentasi Keperawatan Digital. SI PRADITA (Dokumentasi Keperawatan Digital)	Layanan Asuhan Keperawatan	Data Asuhan Keperawatan	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-160	SIRS ONLINE	Sistem Informasi Rumah Sakit Online	Layanan Informasi Rumah Sakit Online	Data Informasi Rumah Sakit Online	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-161	SISDMK	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Kepegawaian Rumah Sakit	Data Kepegawaian Rumah Sakit	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-162	SISRUTE	Sistem Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu	Layanan Rujukan Rumah Sakit	Data Rujukan Pasien	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-163	SIUL	Sistem Informasi Usulan Langsung	Layanan Usulan dan Tracking Barang Medis	Data Usulan Barang Medis Data Tracking Barang Medis	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-164	SOBAT	Sistem Informasi Antar Obat	Layanan Antar Obat	Data Antar Obat Pasien	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-165	V-CLAIM BPJS	Sistem Informasi Klaim BPJS Ketenagakerjaan	Layanan Klaim BPJS	Data Klaim BPJS	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Pusat	RSUD dr. Soeratno Gemolong
APL-SRG-166	SI JAGA SUKOWATI	Sistem Informasi Aduan Pelanggaran Ketertiban, Perda/Perkada, dan Pemadaman Kebakaran serta Evakuasi Lainnya	Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Ketertiban Layanan Penanganan Aduan Kebakaran dan Evakuasi	Data Pemadaman Kebakaran dan Evakuasi Data Pelanggaran Ketertiban, Perda dan Perkada Data Satlinmas	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Instansi Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Unit perasional Teknologi (Dependency)
APL-SRG-167	SI PAKPOL	Sistem Informasi Pelaporan Hasil Kegiatan Anggota Satpol PP dan Damkar	Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Ketertiban Layanan Penanganan Aduan Kebakaran dan Evakuasi	Data Pelanggaran Ketertiban, Perda dan Perkada Data Satlinmas Data Pemadaman Kebakaran dan Evakuasi	Web Based	MyS L	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Instansi Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
APL-SRG-168	SIPPOKIR	Sistem Informasi Pesan Singkat DPRD	Layanan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD	Data Aspirasi Masyarakat	Web Based	MyS L	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Instansi Daerah	Sekretariat Dewan

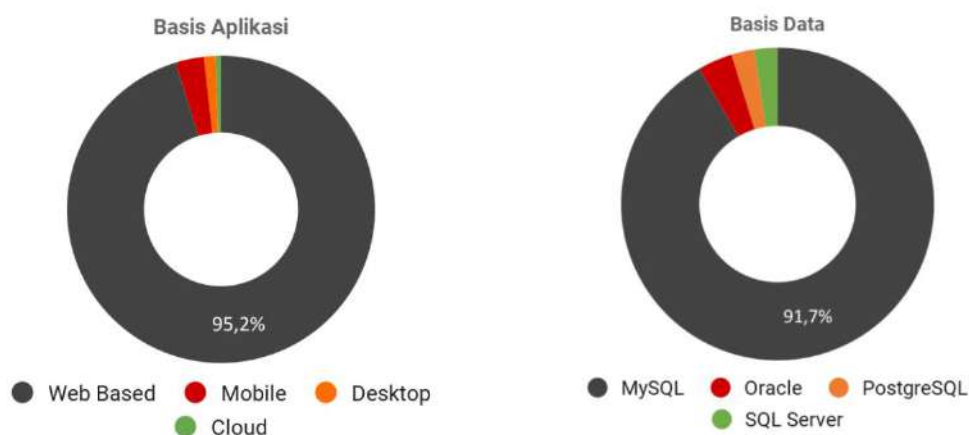
3.2.4.2. Analisis Diagram Aplikasi *ksisting*

Merujuk pada hasil pemetaan aplikasi pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data *eksisting* dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 3.2.4.2.1. Grafik Jumlah Aplikasi Berdasarkan RAL Level 1 & 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Sragen

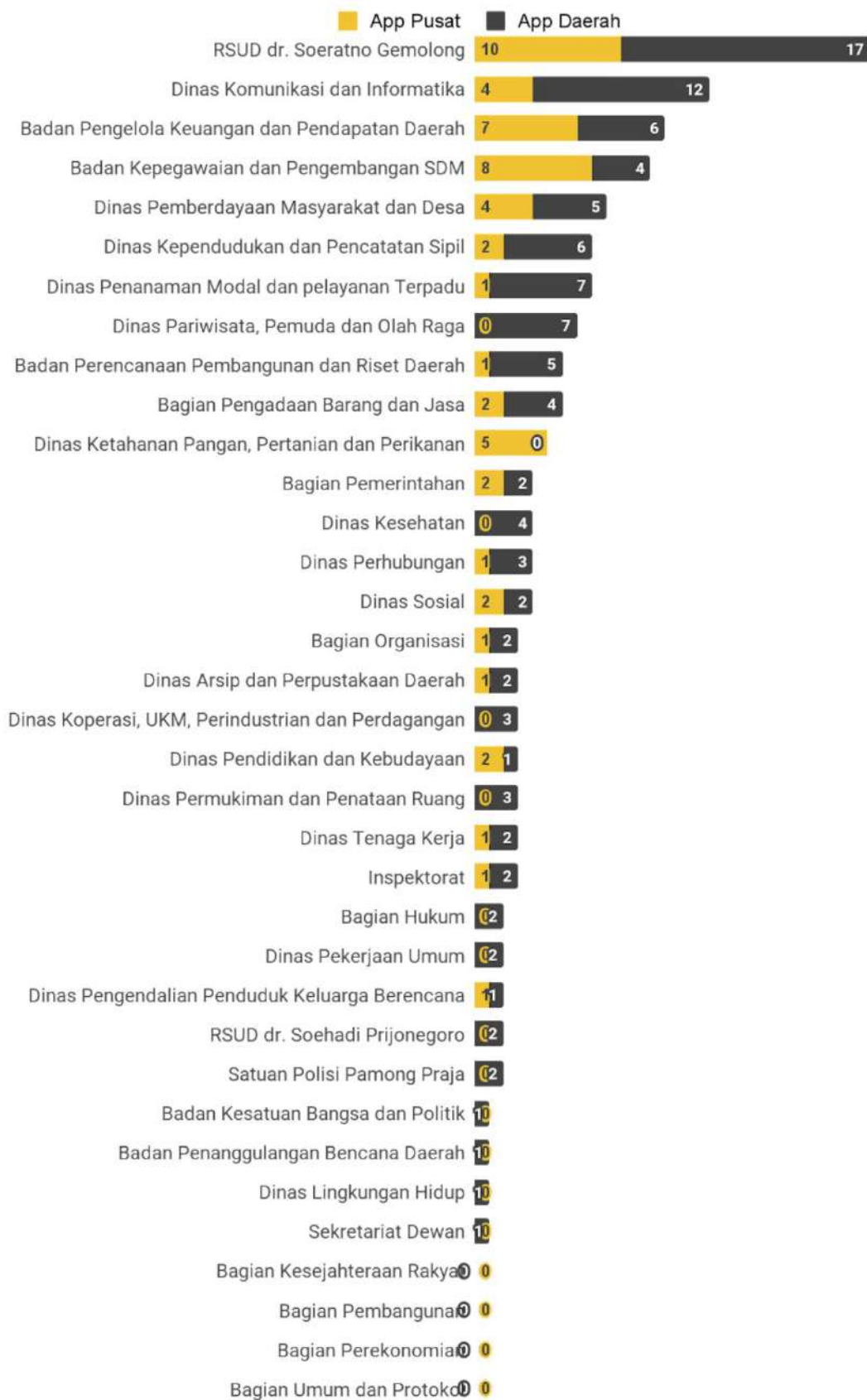
Aplikasi umum didefinisikan sebagai sebuah aplikasi bersama yang digunakan dalam proses administrasi di seluruh perangkat daerah, sedangkan aplikasi khusus merupakan aplikasi yang hanya digunakan oleh suatu perangkat daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Merujuk pada grafik 3.2.4.2.1. dan mengacu pada referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional (RAA Level 1) dari total 168 Aplikasi, 119 Aplikasi (70,8) merupakan RAA.01 Aplikasi Umum dan 49 Aplikasi (29,2) merupakan RAA.02 Aplikasi Khusus. Sedangkan untuk RAA Level 2 terkait RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik sejumlah 71 aplikasi (42,3), RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan sejumlah 48 aplikasi (28,6), RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu sejumlah 28 aplikasi (16,7) dan RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu sejumlah 21 aplikasi (12,5). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis aplikasi yang paling banyak digunakan di Pemerintah Kabupaten Sragen adalah jenis aplikasi khusus fungsi tertentu sehingga diperlukan pengelolaan interoperabilitas data, baik untuk internal maupun untuk instansi pusat.



Grafik 3.2.4.2.2. Grafik Jumlah Aplikasi Berdasarkan dari Basis Aplikasi dan Basis Datanya

Berdasarkan grafik 3.2.4.2.2. menunjukkan bahwa terdapat 160 Aplikasi (95.2) memiliki basis aplikasi Web Based, Mobile sejumlah 5 aplikasi (3), Desktop sejumlah 2 aplikasi (1,2) dan Cloud sejumlah 1 aplikasi (0,6). Hal ini menunjukkan bahwa kedepan perlu dipastikan jumlah *web programmer* pemeliharaan aplikasi yang ada. Sedangkan, kepemilikan untuk basis data MySQL, 91,7 (154 aplikasi), basis data Oracle sejumlah 3, aplikasi, dan basis data PostgreSQL dan SQL Server sejumlah 2,4 (4 aplikasi). Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk menjadikan MySQL sebagai dasar dalam standar pengembangan aplikasi selanjutnya.

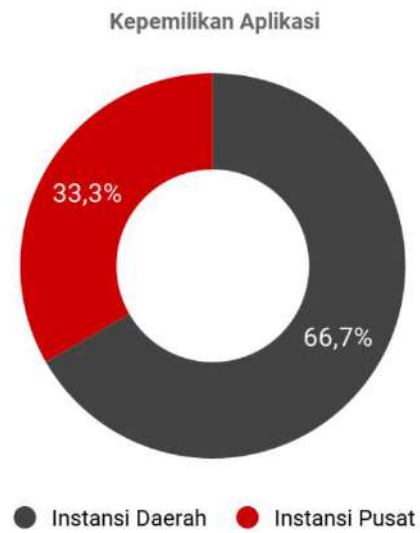
Unit Operasional Teknologi



Grafik 3.2.4.2.3. Grafik Jumlah Aplikasi yang digunakan di Perangkat Daerah

Berdasarkan grafik 3.2.4.2.3. menunjukkan bahwa perangkat daerah yang paling banyak dalam melakukan digitalisasi yaitu RSUD dr. Soeratno emolong dan Dinas Komunikasi dan

n ormatika. Hal ini disebabkan karena Dinas tersebut diberikan mandatori untuk menggunakan aplikasi dari Kementerian.



Grafik 3.2.4.2.4. Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi *ksisting*

Berdasarkan grafik 3.2.4.2.4. menjelaskan bahwa dari total 168 aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sejumlah 66,7 (112 Aplikasi) aplikasi milik Instansi Daerah dan 33,3 (56 Aplikasi) aplikasi milik Instansi Pusat. Berdasarkan grafik diatas perlu dipastikan *programmer* Pemerintah Kabupaten Sragen dapat mengakomodir pemeliharaan sejumlah 112 aplikasi daerah yang ada.

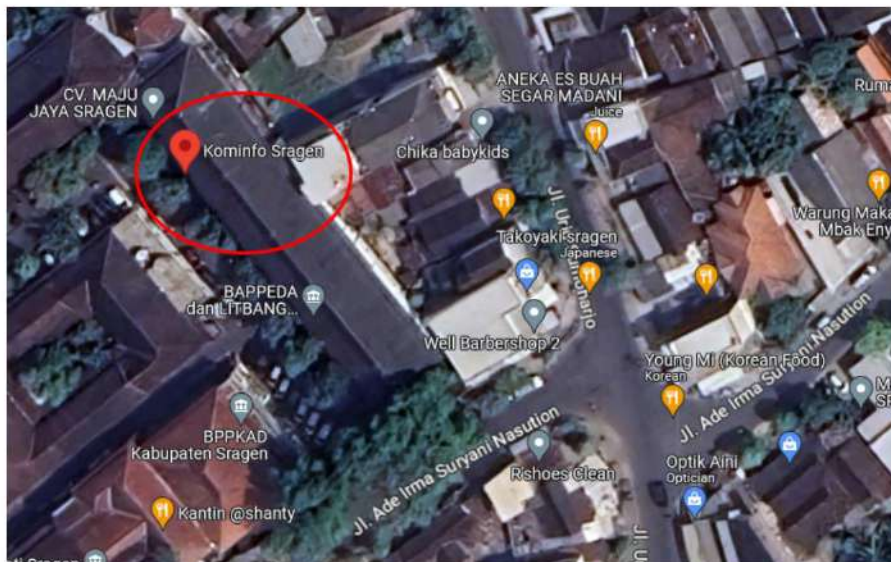
3.2.1. Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE merupakan kerangka kerja yang menggambarkan komponen-komponen teknologi informasi dan jaringan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional aplikasi SPBE. Infrastruktur SPBE yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi: ruang pusat data, jaringan intra pemerintah, jaringan data lokal (*ocal Area etwork-LAN*) perangkat daerah, pusat komputasi dan infrastruktur pendukung. Berikut ini adalah uraian dari komponen infrastruktur SPBE.

3.2.5.1. Pusat Komputasi (Pusat Data)

- **Lokasi Pusat Data Kabupaten**

Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki Pusat Data (Pusat Komputasi) yang berlokasi di Lokasi Gedung kominfo Kabupaten Sragen, Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 894001, Hunting (8 Saluran). Pusat Data difungsikan sebagai tempat untuk menaruh infrastruktur sistem informasi seperti *server*, media penyimpanan, perangkat jaringan, dan perangkat keamanan jaringan. Pusat data terbagi menjadi beberapa ruangan, dan memiliki fasilitas pendukung seperti genset, AC, UPS, dan lainnya.



Gambar 3.2.5.1.1. Lokasi pusat komputasi Kab. Sragen

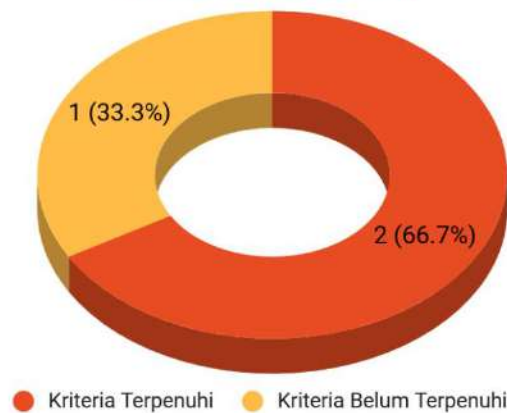
Adapun kondisi saat ini terkait lokasi yang digunakan pusat komputasi Kabupaten Sragen. Ada 3 kriteria yang diajukan yaitu;

- Aman dari rentan bencana alam
- Aman dari area atau lokasi huru-hara
- Aman dari jalur transportasi

Tabel 3.2.5.1.1. Kriteria Lokasi Pusat Data

No	Kriteria Lokasi Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Aman dari rentan bencana alam	a
2	Aman dari area atau lokasi huru-hara	Tidak
3	Aman dari jalur transportasi	a

Kriteria Lokasi Pusat Data (Pusat Komputasi)



Grafik 3.2.5.1.1. Kriteria Lokasi Pusat Data (Pusat Komputasi) Kab.Sragen

Dari tabel 3.2.5.1.1. dapat diperoleh informasi bahwa dari 3 kriteria standar lokasi pusat data atau pusat komputasi, mengacu pada SNI 8799-1 Pusat Data yang sudah terpenuhi sebanyak 2 (dua) kriteria, selebihnya 1 (satu) kriteria belum terpenuhi yakni:

1. Lokasi Pusat Data berada pada lokasi rawan, yang seharusnya lokasi pusat data aman dari lokasi tersebut untuk menghindari kerusakan ketika terjadi permasalahan.

- **Topologi Ruang Pusat Data**

Pusat Data (Pusat Komputasi) Pemerintah Kabupaten Sragen terbagi menjadi beberapa ruangan sesuai dengan fungsinya meliputi:

- Server Room adalah ruang penempatan rak kabinet, storage, perangkat jaringan dan perangkat elektronik lainnya.
- Ruang Kerja Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sragen
- Ruang Kerja Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Sragen
- Ruang Kerja Tim Sekretariat, Kasubag PEP (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan), Kasubah Umum dan Kepegawaian.
- Ruang Kerja Bidang PTIS (Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik).

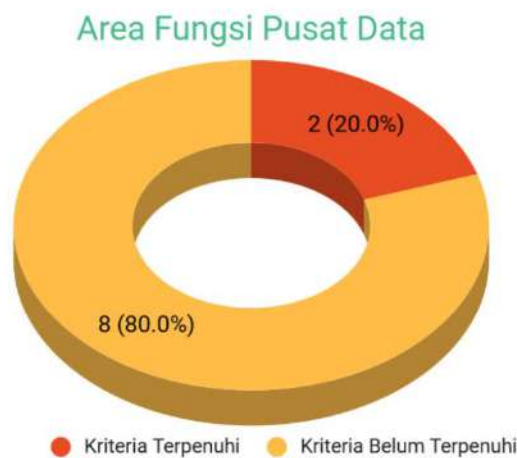


Gambar 3.2.5.1.2. Topologi Ruang Pusat Data Kabupaten

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar Pusat Data Diskominfo Pemerintah Kabupaten Sragen berdasarkan kriteria dari SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.2. Tabel Pemenuhan Standar Topologi Ruang mengacu SNI 8799-1 Pusat Data

No	Area ungsi Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Terdapat Ruang Data Center (Computer room)	a
2	Terdapat Access Provider	Tidak
3	Terdapat Ruang Operasi Personel TI	Tidak
4	Terdapat Staging area (Tempat Konfigurasi untuk System Administrator dan Network Engineer Sebelum operasional)	Tidak
5	Terdapat Ruang Elektrikal/UPS	Tidak
6	Terdapat Ruang Generator	a
7	Terdapat Ruang Administrasi Kunjungan	Tidak
8	Terdapat Ruang Gudang untuk barang baru datang	Tidak
9	Terdapat Ruang Gudang untuk barang tidak fungsi dan tidak terpakai	Tidak
10	Terdapat Area Bongkar Muat	Tidak



Grafik 3.2.5.1.2. Area Fungsi Pusat Data Kab.Sragen

Dari tabel 3.2.5.1.2. dapat diperoleh informasi bahwa dari 10 kriteria standar area fungsi (ruangan pusat data) mengacu pada SNI 8799-1 Pusat Data yang sudah terpenuhi sebanyak 2 (dua) kriteria, selebihnya 8 (delapan) kriteria belum terpenuhi yakni:

- Belum memiliki Ruang untuk Access Provider
- Belum memiliki Ruang Operasi Personel TI (NOC)
- Belum memiliki Staging area (Tempat konfigurasi perangkat untuk System Administrator dan Network Engineer sebelum perangkat beroperasi)
- Belum memiliki Ruang Elektrikal/UPS
- Belum memiliki Ruang Administrasi Kunjungan
- Belum memiliki Ruang Gudang untuk menempatkan datangnya perangkat baru
- Belum memiliki Ruang Gudang untuk menempatkan perangkat yang tidak berfungsi dan tidak terpakai
- Belum memiliki Area Bongkar Muat

- **Sistem Pemadam Kebakaran**

Sistem pemadam kebakaran yang disediakan untuk ruang server atau pusat komputasi berupa alat pemadam api ringan (APAR). Alat tersebut ditempatkan di dekat ruang server.

Tabel 3.2.5.1.3. Sistem Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pemadam	Bahan Pemadam	Penempatan
1	APAR	Powder	Di dalam ruang pusat data



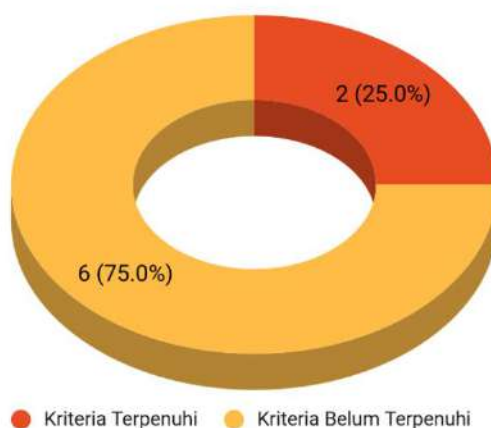
Gambar 3.2.5.1.3. Alat pemadam api ringan

Berdasarkan penilaian sistem pemadam kebakaran menggunakan kriteria dari SNI Pusat data hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.2.5.1.4. Peringatan Kebakaran, Deteksi Asap dan Pemadam Kebakaran

No	Sistem Pemadam Kebakaran	Kriteria Terpenuhi
1	Tersedia pintu darurat di area pusat data yang dapat dibuka keluar	Tidak
2	Tersedia lampu darurat sebagai penanda keluar darurat ketika terjadi bencana seperti kebakaran.	Tidak
3	Bahan bangunan di ruang pusat data tidak mudah terbakar api	a
4	Penerapan sistem deteksi asap bangunan yang diintegrasikan ke satu alarm Bersama.	Tidak
5	Di area pusat tersedia sistem pemadam kebakaran otomatis dan dapat juga diaktifkan secara manual.	Tidak
6	Pemeliharaan rutin dan tercatat pada alat-alat pengendali kebakaran.	Tidak
7	Pelatihan pengendalian api terjadwal kepada personel TI	Tidak
8	Bangunan pusat data dilengkapi dengan sistem proteksi petir untuk menanggulangi kebakaran	a

Sistem Pemadam Kebakaran



Grafik 3.2.5.1.3. Sistem Pemadam Kebakaran Kab.Sragen

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa dari 8 kriteria standar penyediaan sistem penanggulangan kebakaran pusat data, kriteria yang sudah terpenuhi sebanyak 2 kriteria, selebihnya 6 kriteria belum terpenuhi yakni:

- Belum Tersedia pintu darurat di area pusat data yang dapat dibuka keluar
 - Belum Tersedia lampu darurat sebagai penanda keluar darurat ketika terjadi bencana seperti kebakaran.
 - Penerapan sistem deteksi asap bangunan belum diintegrasikan ke satu alarm Bersama.
 - Di area pusat data belum tersedia sistem pemadam kebakaran otomatis dan dapat juga diaktifkan secara manual
 - Belum Telah dilakukan pemeliharaan rutin dan tercatat pada alat-alat pengendali kebakaran.
 - Pelatihan pengendalian api belum terjadwal kepada personel TI.
- **Penyediaan atu Daya**

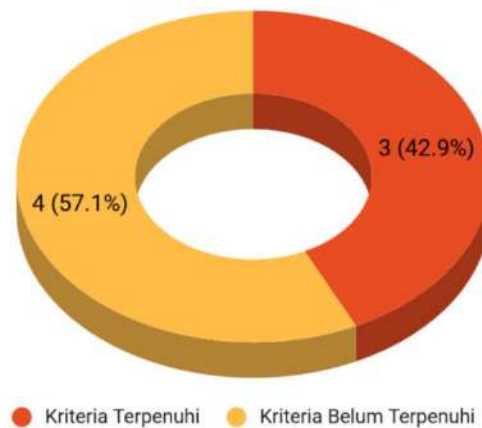
Catu daya memiliki peran yang sangat vital, karena catu daya sebagai sumber energi bagi seluruh komponen elektronik yang ada di ruang pusat komputasi (ruang pusat data). Dalam penyediaan catu daya kondisinya sebagai berikut:

- Personil Pusat Komputasi belum melakukan Pengukuran daya listrik utama yang paling sedikit 20 lebih besar dari proyeksi beban puncak pusat data
- Sumber listrik belum diantisipasi dari dua sumber yang berbeda, Misal dari dua trafo yang berbeda.
- Pengelola Listrik telah menyediakan catu daya listrik alternatif berupa generator.
- Generator dapat menyala otomatis oleh sensor ketika terjadi listrik PLN mati, saat UPS masih mampu menyuplai listrik, sehingga aset TIK tetap menyala
- UPS mampu memasok daya ke *Data enter* ketika listrik PLN mati
- Pergantian listrik PLN ke Genset belum otomatis
- Komputer kerja personil pusat data belum disediakan alternatif catu daya

Tabel 3.2.5.1.5. Kondisi penyediaan catu daya

No	Penyediaan atu Daya	Kriteria Terpenuhi
1	Pengukuran daya listrik utama yang paling sedikit 20 lebih besar dari proyeksi beban puncak pusat data	Tidak
2	Sumber listrik diantisipasi dari dua sumber yang berbeda, Misal dari dua trafo yang berbeda.	Tidak
3	Pengelola Listrik menyediakan catu daya listrik alternatif berupa generator.	a
4	Generator dapat menyala otomatis oleh sensor ketika terjadi listrik PLN mati, kurang dari 10 detik.	a
5	UPS mampu memasok daya ke Data Center ketika listrik PLN mati	a
6	Pergantian sumber listrik dari PLN ke Genset atau sebaliknya menggunakan sistem ATS (Automatic Transfer switch) dan didukung Sistem AMF (A to atic Main ai re) untuk menyalakan mesin genset.	Tidak
7	Komputer kerja personil pusat data disediakan alternatif catu daya	Tidak

Penyediaan Catu Daya



Grafik 3.2.5.1.4. Penyediaan Catu Daya Kab.Sragen

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa dari 7 kriteria standar penyediaan catu daya untuk pusat komputasi (pusat data), kriteria yang sudah terpenuhi sebanyak 3 kriteria, selebihnya 4 kriteria belum terpenuhi yakni:

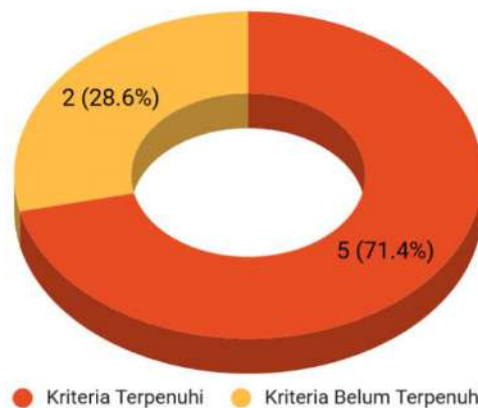
- Personil Pusat Komputasi belum melakukan Pengukuran daya listrik utama yang paling sedikit 20 lebih besar dari proyeksi beban puncak pusat data
 - Sumber listrik belum diantisipasi dari dua sumber yang berbeda, Misal dari dua trafo yang berbeda.
 - Pergantian listrik PLN ke Genset belum otomatis.
 - Komputer kerja personil pusat data belum disediakan alternatif catu daya.
- **Sistem Pendingin Ruang Pusat Data Daerah**

Sistem pendingin pusat komputasi (Pusat data) difungsikan untuk menjaga suhu dan kelembaban ruangan pada tingkat yang stabil, mencegah peralatan server dan perangkat elektronik terlalu panas, yang dapat mengakibatkan kerusakan dan gangguan operasional. Kondisi sistem pendingin dan suhu-kelembaban udara di ruang pusat komputasi sebagai berikut:

Tabel 3.2.5.1.6. Sistem Pendingin dan Suhu Ruang Pusat Data

No	Sistem Pendingin Suhu dan Kelembaban Ruang Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Terdapat alat pengkondisi suhu dan kelembaban udara	a
2	Terdapat alat pemantau suhu dan kelembaban ruang pusat data	a
3	Suhu dingin di ruang pusat data terkontrol antara 18 C-24 C	a
4	Kelembaban udara di ruang pusat data terkontrol antara 40 -60 RH (Relative Humidity).	Tidak
5	Sistem pendingin udara (AC) pusat data dihubungkan dengan daya utama (listrik PLN) satu sumber dengan pusat data.	a
6	Sistem pendingin udara pusat data dihubungkan ke catu daya alternative (seperti generator).	a
7	Sistem Pendingin menggunakan AC presisi atau HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning)	Tidak

Sistem Pendingin dan Suhu Ruang Pusat Data



Grafik 3.2.5.1.5. Sistem Pendingin dan Suhu Ruang Pusat Data Kab.Sragen

Dari tabel 3.2.5.1.6 dapat diperoleh informasi bahwa dari 7 kriteria standar penyediaan sistem pendingin, suhu dan kelembaban udara di pusat data, kriteria yang sudah terpenuhi sebanyak 5 kriteria, selebihnya 2 kriteria belum terpenuhi yakni:

- Kelembaban udara melebihi anjuran yaitu 40 -60 RH. untuk saat ini 65 RH
- AC menggunakan AC Split, belum menggunakan AC Presisi



Gambar 3.2.5.1.1.5. AC Split wall mount ruang server/ pusat data daerah



Gambar 3.2.5.1.1.6. Monitoring suhu dan kelembaban udara ruang server

- **able Management**

Manajemen kabel di pusat data bertujuan untuk mengatur dan mengatur kabel-kabel secara terstruktur guna mencapai tatanan yang rapi, identifikasi yang mudah, serta keamanan dan efisiensi operasional yang optimal. Manfaat dari manajemen kabel meliputi kemudahan dalam pemeliharaan dan perubahan konfigurasi, pengurangan risiko fisik dan potensi gangguan, peningkatan pendinginan yang efisien, serta pengurangan downtime dalam pemeliharaan atau perbaikan. Selain itu, manajemen kabel yang baik juga memberikan tampilan yang profesional, memungkinkan skalabilitas yang lebih baik untuk pertumbuhan, dan berkontribusi pada keseluruhan kinerja pusat data.

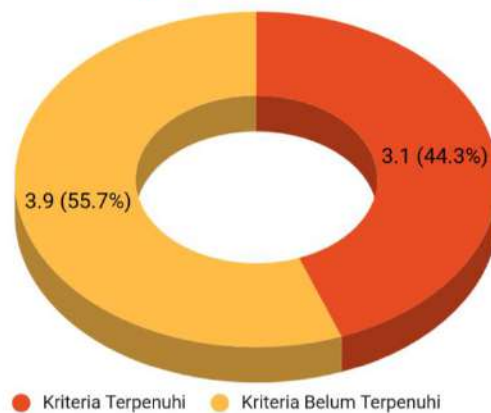
Tabel 3.2.5.1. . Manajemen Kabel di Pusat Data

o	ana emen Kabel di Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Kabel daya (Kabel listrik) dan kabel data tembaga (UTP/STP) diberi jarak antara 30-60 cm	Tidak
2	Kabel yang berada di rack cabinet diatur dengan rapi	Tidak
3	Kabel data (kabel jaringan) yang melewati dinding sebagian besar sudah menggunakan pelindung kabel (cable duct).	a, Sebagian Kecil
4	Kabel-kabel di pusat data diberikan jalur (cable pathways) menggunakan cable tray.	a
5	Kabel jaringan di pusat data telah diberikan label identifikasi (Terkoneksi ke .)	a, Sebagian Besar
6	Setiap Rak perangkat diberikan label informasi terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak	Tidak
7	Terdapat raised oor atau lantai yang ditinggikan	a



Gambar 3.2.5.1. . Manajemen kabel pada perangkat jaringan

Manajemen Kabel



Grafik 3.2.5.1.6. Manajemen Kabel Kab.Sragen

Dari tabel 3.2.5.1.7. dapat diperoleh informasi bahwa dari 7 kriteria standar penyediaan sistem pendingin, suhu dan kelembaban udara di pusat data, kriteria yang sudah terpenuhi sebanyak 4 kriteria, selebihnya 3 kriteria belum terpenuhi yakni:

- Kabel daya (Kabel listrik) dan kabel data tembaga (UTP/STP) belum diberi jarak antara 30-60 cm.
 - Kabel yang berada di rack cabinet belum diatur dengan rapi.
 - Kabel data (kabel jaringan) yang melewati dinding sebagian kecil sudah menggunakan pelindung kabel (cable duct). Perlu diperbaiki lanjut.
 - Kabel jaringan di pusat data sebagian besar telah diberikan label identifikasi (Terkoneksi ke .):
 - Kabel yang berada di rack cabinet belum diatur dengan rapi.
- **Sistem onitoring (Pusat Kendali)**

Sistem monitoring memiliki fungsi utama untuk memantau dan mengawasi berbagai aspek penting dalam lingkungan IT, seperti server, jaringan, keamanan server, keamanan jaringan, serta kondisi udara di pusat data. Sistem Monitoring Server digunakan untuk memantau kinerja dan kesehatan server, memastikan operasional yang optimal, serta mendeteksi masalah atau kerusakan dengan cepat. Sistem Monitoring Jaringan bertugas untuk memonitor koneksi dan

performa jaringan, mendeteksi gangguan atau kegagalan, dan memastikan kelancaran komunikasi data. Sistem Monitoring Keamanan (Security Information Event Management) pada Server, jaringan dan aplikasi memiliki peran dalam mendeteksi ancaman keamanan, melacak aktivitas mencurigakan, dan memberikan perlindungan terhadap serangan siber. Sistem Monitoring dan Alert kondisi Udara di Pusat Data berfokus pada pemantauan suhu, kelembaban, dan kualitas udara di lingkungan pusat data untuk menjaga kondisi optimal guna mencegah overheat dan masalah lingkungan lainnya. Sistem monitoring BBM digunakan untuk mengetahui ukuran ketersediaan BBM pada generator.

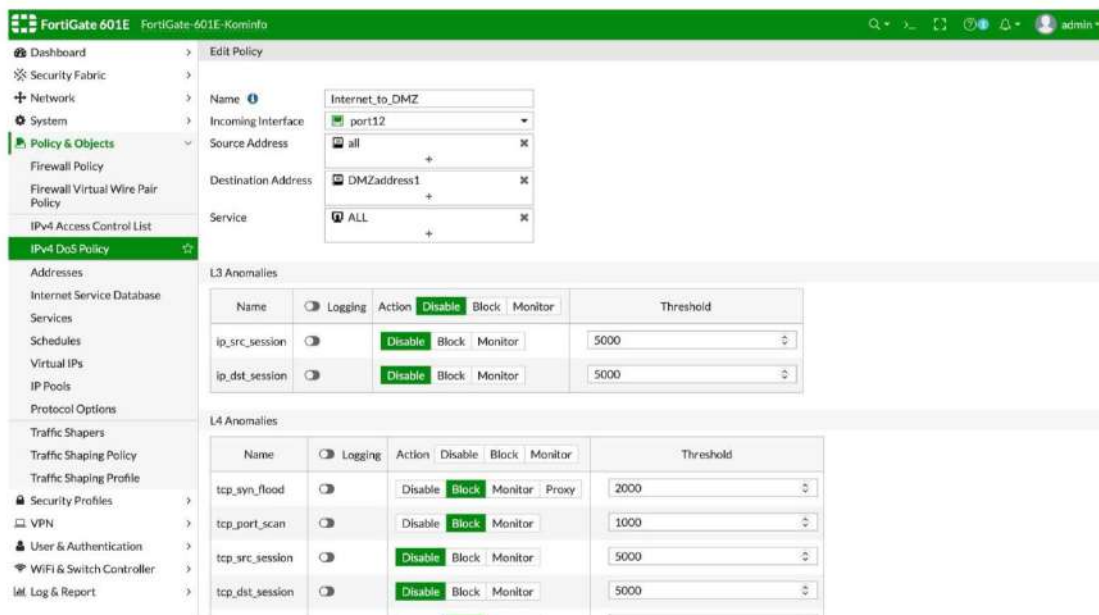
Adapun kondisi pusat kendali TIK di Kabupaten Sragen, sebagai berikut:

Tabel 3.2.5.1. . Sistem Monitoring Sumber Daya Pusat Data

No	Sistem Monitoring Sumber Daya Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Tersedia Sistem Monitoring status (hidup, mati) dan ketersediaan sumber daya (RAM, CPU, HDD) Server	Tidak
2	Tersedia Sistem Monitoring status (hidup, mati) dan ketersediaan sumber daya (RAM, CPU, HDD) jaringan	Tidak
3	Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Server (Security Information and Event Management)	a
4	Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Jaringan (Security Information Event Management)	a
5	Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Aplikasi (Security Information Event Management)	a
6	Tersedia Sistem Monitoring dan Alert kondisi Udara di Pusat Data	Tidak
7	Tersedia Sistem Monitoring pada UPS dan Genset untuk Pusat Data	Tidak
8	Tersedia Sistem Monitoring pada BBM genset untuk Pusat Data	Tidak

Dari tabel di atas ini dapat diperoleh informasi bahwa dari 8 kriteria yang diajukan sebagai standar sistem pemantauan sumber daya TIK di pusat data, 3 kriteria yang dapat dipenuhi, sedangkan terdapat 5 kriteria yang belum terpenuhi, yaitu;

- Belum tersedia Sistem Monitoring Server.
- Belum tersedia Sistem Monitoring Jaringan.
- Belum tersedia Sistem Monitoring dan Alert kondisi Udara (suhu dan kelembaban) di Pusat Data.
- Belum tersedia Sistem Monitoring pada UPS dan Genset untuk Pusat Data.
- Belum tersedia Sistem Monitoring pada BBM genset untuk Pusat Data.



Gambar 3.2.5.1. . Pemantauan keamanan jaringan menggunakan firewall

- **Keamanan Lingkungan Pusat Data Daerah**

Manfaat dari pendekatan Si Layer Security dalam lingkungan pusat data terletak pada kemampuannya untuk memberikan perlindungan holistik dan komprehensif terhadap berbagai ancaman. Dengan mengintegrasikan enam lapisan keamanan yang berfokus pada aspek-aspek yang berbeda, seperti keamanan fisik, otentikasi, deteksi dini, dan pengendalian akses, pendekatan ini memitigasi risiko serangan siber dan fisik serta memberikan respons cepat terhadap insiden keamanan. Selain itu, Si Layer Security juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan yang diperlukan, membangun kepercayaan pelanggan, dan mengurangi dampak serangan. Dengan melindungi pusat data dari berbagai sudut pandang, pendekatan ini memberikan fondasi yang kokoh untuk menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan lingkungan pusat data.

Adapun kondisi sistem pengamanan area gedung pusat data sebagai berikut:

Tabel 3.2.5.1. . Pengamanan Area Gedung Pusat Data

No	Pengamanan Area Gedung Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
Penerapan Si Layer Security pada area Pusat Data		
1	Layer 1 perimeter defense (Area pintu utama kawasan data center)	
1.1	a. Terdapat CCTV pemantau	a
1.2	b. Pagar	a
1.3	c. Petugas keamanan	a
2	Layer 2 clear one. (Area gedung dan parkir kendaraan)	
2.1	a. Tempat parkir untuk pengunjung dan karyawan yang terpisah	Tidak
2.2	b. Terdapat CCTV pemantau	a
2.3	c. Lampu pencahayaan yang mengarah ke pintu masuk Gedung pusat data	a
2.4	d. Terdapat sensor pendeteksi gangguan	Tidak
3	Layer 3 reception area (Area pintu masuk gedung Data enter)	
3.1	a. Terdapat CCTV Pemantau	a
3.2	b. Sistem pengunci manual	a
3.3	c. Sistem pengunci biometrik (finger,kartu,retina)	Tidak
3.4	d. Pos jaga Satpam dan penerima tamu	Tidak

No	Pengamanan Area Gedung Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
4	Layer 4, hallway/gray space (Area menuju pintu utama ruang data center)	
4.1	a. Terdapat sistem manajemen pengunjung	Tidak
4.2	b. Pintu akses ke ruang pusat data	a
4.3	c. Sistem pengunci manual dan biometric sebagai pengontrol akses.	a
5	Layer 5 Data center room/white space. (Pintu utama ruang data center)	
5.1	a. Terdapat video pemantau (CCTV)	a
5.2	b. Sistem pengunci multi. biometric dan manual	a
5.3	c. Tidak terdapat label Ruang Pusat Data	Tidak
6	Layer 6 data center cabinet/white space. (Area utama di rak cabinet data center)	
6.1	a. Terdapat CCTV Dome, memantau 360	Tidak
6.2	b. Terdapat pintu dan pengunci pada rak cabinet.	a

foto menyusul

Gambar 3.2.5.1.1. . CCTV di lingkungan Pusat Data Kabupaten

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa dari 19 kriteria yang diajukan sebagai standar keamanan lingkungan area pusat data. Kondisi yang belum terpenuhi sebagai berikut:

- Pada Layer 2 (Area Gedung dan parkir kendaraan)
 - Belum tersedianya pengaturan dan tempat parkir untuk pengunjung dan karyawan yang terpisah.
 - Belum tersedianya sensor pendeteksi gangguan.
- Pada layer 3 (Area pintu masuk Gedung Data Center)
 - Belum tersedia System pengunci biometrik (finger,kartu,retina)
 - Belum ada petugas Satpam dan penerima tamu
- Pada layer 4, hallway/gray space (Area menuju pintu utama ruang data center)
 - Belum ada sistem manajemen pengunjung pusat data
- Pada layer 5, Data center room/white space. (Pintu utama ruang data center)
 - Pusat komputasi atau pusat data diberi label, seharusnya ruang pusat data tidak diberi label.
- Pada layer 6, data center cabinet/white space. (Area utama di rak cabinet data center)
 - belum tersedia CCTV Dome yang dapat memantau 360°

- **Katalog asilitas Komputasi ksisting**

Sebagaimana dalam ketentuan dalam Surat edaran KeMenPANRB No 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, bahwa kondisi saat ini fasilitas komputasi sebagai berikut:

Tabel 3.2.5.1 . Katalog Fasilitas Komputasi-Pusat Komputasi

ID	Nama Pusat Data	Deskripsi Pusat Data	Jenis Jaringan	Kepeilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas	Tipe Pusat Data	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
SRG-P D-01	Pusat Data Pemerintah Kabupaten Sragen	Ruangan yang digunakan untuk menempatkan sumber daya elektronik seperti server, perangkat jaringan, database di lingkungan Kabupaten Sragen	Fiber Optik dan UTP	Sendiri	Pemerintah Kabupaten Sragen	Diskominfo	1 Gbps dan 10 Gbps	600 Mbps	Lokasi Gedung kominfo Kabupaten Sragen, Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 894001, Hunting (8 Saluran)	Belum memenuhi klasifikasi Tier	Belum menggunakan standarisasi keamanan	Pusat Data Instansi Daerah	RAI 01. Fasilitas Komputasi	RAI 01.02. Pusat Komputasi	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah

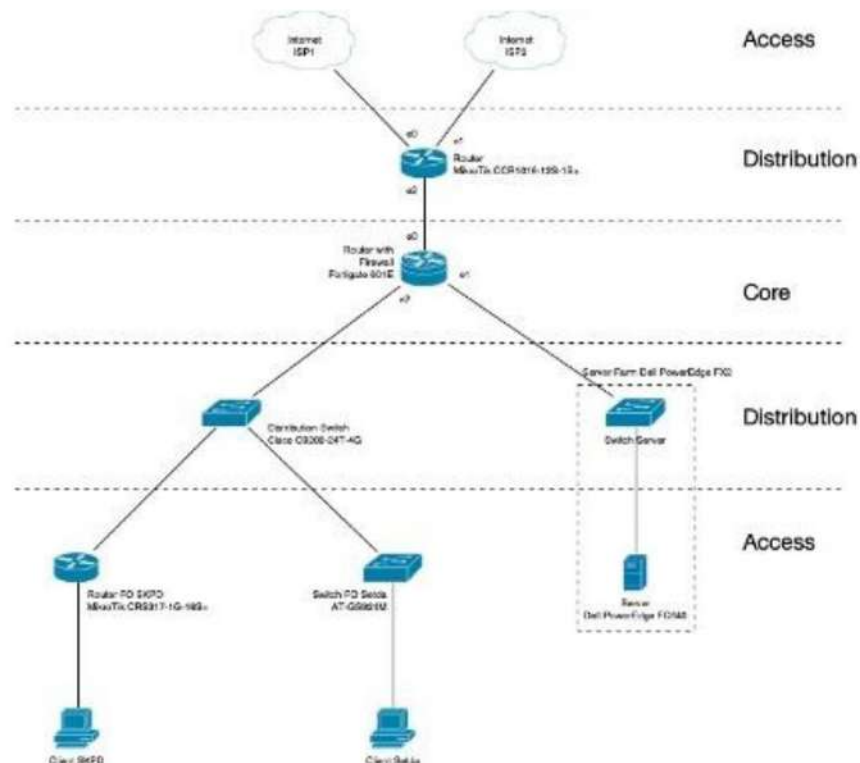
3.2.5.2. Sistem Integrasi

3.2.5.2.1. aringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Kabupaten Sragen dikelola oleh Diskominfo untuk melayani jaringan antar komputer di lingkungan perangkat daerah, akses ke server, akses aplikasi dan akses internet.

A. Topologi aringan

Berikut ini gambar topologi JIP Kabupaten Sragen.



Gambar 3.2.5.2.1.1. Topologi Jaringan Intra Pemerintah - Diagram Logika

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa JIP Kabupaten Sragen bisa dibagi menjadi beberapa zona yakni:

1. Zona Internet

Zona internet adalah zona yang terhubung langsung ke internet melalui penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider* - ISP). Kondisi saat ini koneksi internet disediakan oleh 1 (satu) ISP yakni Biznet dengan kapasitas bandwidth sebesar 500 Mbps dengan media koneksi *fiber optic* (FO). Layanan internet yang digunakan pada website dan beberapa aplikasi menggunakan sumberdaya dari Kemkominfo dengan *Autonomous System* (AS) Number 132634 dan blok IP Public 103.225.242.0/24

IP address details

103.172.109.10

🇮🇩 Sragen, Central Java, Indonesia

WEBSERVER

Q Search an IP or AS number

Summary >

Geolocation

Privacy

ASN

Company

Abuse

Hosted domains

Summary

ASN	AS147136 - Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sragen
Hostname	srg-010.sragenkab.go.id
Range	103.172.109.0/24
Company	Kabupaten Sragen
Hosted domains	1
Privacy	⊗ False
Anycast	⊗ False
ASN type	Business
Abuse contact	kominfo@sragenkab.go.id

Gambar 3.2.5.2.1.2. Detil AS Number Internet Pemkab (sumber: <https://ipinfo.io/147136>)

2. on Jaringan Area Metropolitan (MAN)

Jaringan area metropolitan atau *Metropolitan Area etwork* merupakan jaringan untuk menghubungkan lokasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke Pusat Data atau Pusat Operasi Jaringan (*etwork peration enter* - NOC). Kondisi saat ini sebagian besar lokasi OPD, kecamatan, dan UPT sudah terhubung ke Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Sragen yang dikelola oleh Diskominfo dengan menggunakan media transmisi kabel *fiber optic* (FO) dan wireless.

Tabel 3.2.5.2.1.1. Sebaran Jaringan Intra Pemerintah/MAN

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
1	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas	Terhubung
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas	Terhubung
3	Dinas Kesehatan	Dinas	Terhubung
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sragen	Dinas	Terhubung
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas	Terhubung
6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Terhubung
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas	Terhubung
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas	Terhubung
9	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Dinas	Terhubung
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas	Terhubung
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas	Terhubung
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas	Terhubung
13	Dinas Perhubungan	Dinas	Terhubung
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas	Terhubung
15	Dinas Sosial	Dinas	Terhubung
16	Dinas Tenaga Kerja	Dinas	Terhubung
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas	Terhubung
18	Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas	Terhubung

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan	Terhubung
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan	Terhubung
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan	Terhubung
22	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan	Terhubung
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan	Terhubung
24	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Lemb. Kesehatan	Terhubung
25	RSUD dr. Soeratno Gemolong	Lemb. Kesehatan	Terhubung
26	RSUD Sukowati Tangen	Lemb. Kesehatan	Terhubung
27	Bagian Administrasi Pembangunan	SETDA	Terhubung
28	Bagian Hukum	SETDA	Terhubung
29	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SETDA	Terhubung
30	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	SETDA	Terhubung
31	Bagian Organisasi	SETDA	Terhubung
32	Bagian Pemerintahan	SETDA	Terhubung
33	Bagian Pemerintahan Desa	SETDA	Terhubung
34	Bagian Perekonomian	SETDA	Terhubung
35	Bagian Umum dan Keuangan	SETDA	Terhubung
36	Kecamatan Sragen	Kecamatan	Terhubung
37	Desa Tangkil Kec. Sragen ()	Kantor Desa	Terhubung
38	Kelurahan Karangtengah Kec. Sragen ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
39	Kelurahan Nglorog Kec. Sragen ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
40	Kelurahan Sine Kec. Sragen ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
41	Kelurahan Sragen Kulon Kec. Sragen ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
42	Kelurahan Sragen Tengah ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
43	Kelurahan Sragen Wetan Kec. Sragen ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
44	Kecamatan Karangmalang	Kecamatan	Terhubung
45	Desa Guworejo ()	Kantor Desa	Terhubung
46	Desa Jurangjero ()	Kantor Desa	Terhubung
47	Desa Kedungwaduk ()	Kantor Desa	Terhubung
48	Desa Mojorejo ()	Kantor Desa	Terhubung
49	Desa Pelemgadung ()	Kantor Desa	Terhubung
50	Desa Plosokerep ()	Kantor Desa	Terhubung
51	Desa Puro ()	Kantor Desa	Terhubung
52	Desa Saradan ()	Kantor Desa	Terhubung
53	Kelurahan Kroyo ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
54	Kelurahan Plumbungan ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
55	Kecamatan Kedawung	Kecamatan	Terhubung
56	Desa Bendungan Kec. Kedawung (D)	Kantor Desa	Terhubung
57	Desa Celep Kec. Kedawung (D)	Kantor Desa	Terhubung
58	Desa Jenggrik Kec. Kedawung (D)	Kantor Desa	Terhubung
59	Desa Karangpelem Kec. Kedawung (D)	Kantor Desa	Terhubung
60	Desa Kedawung Kec. Kedawung (D)	Kantor Desa	Terhubung
61	Desa Mojodoyong Kec. Kedawung (D)	Kantor Desa	Terhubung
62	Desa Mojokerto Kec. Kedawung (D)	Kantor Desa	Terhubung
63	Desa Pengkok Kec. Kedawung (D)	Kantor Desa	Terhubung
64	Desa Wonokerso Kec. Kedawung (D)	Kantor Desa	Terhubung
65	Desa Wonorejo Kec. Kedawung (D)	Kantor Desa	Terhubung
66	Kecamatan Sambirejo	Kecamatan	Terhubung
67	Desa Blimbing Kec. sambirejo ()	Kantor Desa	Terhubung
68	Desa Dawung Kec. Sambirejo ()	Kantor Desa	Terhubung
69	Desa Jambeyan Kec. sambirejo ()	Kantor Desa	Terhubung
70	Desa Jetis Kec. sambirejo ()	Kantor Desa	Terhubung
71	Desa Kadipiro Kec. sambirejo ()	Kantor Desa	Terhubung
72	Desa Musuk Kec. sambirejo ()	Kantor Desa	Terhubung
73	Desa Sambi Kec. sambirejo ()	Kantor Desa	Terhubung
74	Desa Sambirejo Kec. sambirejo ()	Kantor Desa	Terhubung
75	Desa Sukorejo Kec. sambirejo ()	Kantor Desa	Terhubung

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
76	Kecamatan Gondang	Kecamatan	Terhubung
77	Desa Bumiaji Kec. Gondang (D)	Kantor Desa	Terhubung
78	Desa Glonggong Kec. Gondang (D)	Kantor Desa	Terhubung
79	Desa Gondang Kec. Gondang (D)	Kantor Desa	Terhubung
80	Desa Kaliwedi Kec. Gondang (D)	Kantor Desa	Terhubung
81	Desa Plosorejo Kec. Gondang (D)	Kantor Desa	Terhubung
82	Desa Srimulyo Kec. Gondang (D)	Kantor Desa	Terhubung
83	Desa Tegalrejo (D)	Kantor Desa	Terhubung
84	Desa Tunggul Kec. Gondang (D)	Kantor Desa	Terhubung
85	Desa Wonotolo Kec. Gondang (D)	Kantor Desa	Terhubung
86	Kecamatan Sambungmacan	Kecamatan	Terhubung
87	Desa Banaran ()	Kantor Desa	Terhubung
88	Desa Banyurip ()	Kantor Desa	Terhubung
89	Desa Bedoro ()	Kantor Desa	Terhubung
90	Desa Cemeng ()	Kantor Desa	Terhubung
91	Desa Gringging ()	Kantor Desa	Terhubung
92	Desa Karanganyar ()	Kantor Desa	Terhubung
93	Desa Plumbon ()	Kantor Desa	Terhubung
94	Desa Sambungmacan ()	Kantor Desa	Terhubung
95	Desa Toyogo ()	Kantor Desa	Terhubung
96	Kecamatan Ngrampal	Kecamatan	Terhubung
97	Desa Bandung Kec. Ngrampal ()	Kantor Desa	Terhubung
98	Desa Bener Kec. Ngrampal ()	Kantor Desa	Terhubung
99	Desa Gabus Kec. Ngrampal ()	Kantor Desa	Terhubung
100	Desa Karangudi Kec. Ngrampal ()	Kantor Desa	Terhubung
101	Desa Kebonromo Kec. Ngrampal ()	Kantor Desa	Terhubung
102	Desa Klandungan Kec. Ngrampal ()	Kantor Desa	Terhubung
103	Desa Ngarum Kec. Ngrampal ()	Kantor Desa	Terhubung
104	Desa Pilangsari Kec. Ngrampal ()	Kantor Desa	Terhubung
105	Kecamatan Tangen	Kecamatan	Terhubung
106	Desa Denanyar Kec. Tangen ()	Kantor Desa	Terhubung
107	Desa Dukuh Kec. Tangen ()	Kantor Desa	Terhubung
108	Desa Galeh Kec. Tangen ()	Kantor Desa	Terhubung
109	Desa Jekawal Kec. Tangen ()	Kantor Desa	Terhubung
110	Desa Katelan Kec. Tangen ()	Kantor Desa	Terhubung
111	Desa Ngrombo Kec. Tangen ()	Kantor Desa	Terhubung
112	Desa Sigit Kec. Tangen ()	Kantor Desa	Terhubung
113	Kecamatan Jenar	Kecamatan	Terhubung
114	Desa Banyurip Kec. Jenar ()	Kantor Desa	Terhubung
115	Desa Dawung ()	Kantor Desa	Terhubung
116	Desa Japoh Kec. Jenar ()	Kantor Desa	Terhubung
117	Desa Jenar Kec. Jenar ()	Kantor Desa	Terhubung
118	Desa Kandang sapi Kec. Jenar ()	Kantor Desa	Terhubung
119	Desa Mlalen Kec. Jenar ()	Kantor Desa	Terhubung
120	Desa Ngepringan Kec. Jenar ()	Kantor Desa	Terhubung
121	Kecamatan Gesi	Kecamatan	Terhubung
122	Desa Blangu Kec. Gesi ()	Kantor Desa	Terhubung
123	Desa Gesi Kec. Gesi ()	Kantor Desa	Terhubung
124	Desa Pilangsari Kec. Gesi ()	Kantor Desa	Terhubung
125	Desa Poleng Kec. Gesi ()	Kantor Desa	Terhubung
126	Desa Slendro Kec. Gesi ()	Kantor Desa	Terhubung
127	Desa Srawung Kec. Gesi ()	Kantor Desa	Terhubung
128	Desa Tanggan Kec. Gesi ()	Kantor Desa	Terhubung
129	Kecamatan Sukodono	Kecamatan	Terhubung
130	Desa Baleharjo Kec. Sukodono (D)	Kantor Desa	Terhubung
131	Desa Bendo Kec. Sukodono (D)	Kantor Desa	Terhubung
132	Desa Gebang Kec. Sukodono (D)	Kantor Desa	Terhubung

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
133	Desa Jati Tengah Kec. Sukodono (D)	Kantor Desa	Terhubung
134	Desa Juwok (D)	Kantor Desa	Terhubung
135	Desa Karanganom (D)	Kantor Desa	Terhubung
136	Desa Majenang Kec. Sukodono (D)	Kantor Desa	Terhubung
137	Desa Newung Kec. Sukodono (D)	Kantor Desa	Terhubung
138	Desa Pantirejo Kec. Sukodono (D)	Kantor Desa	Terhubung
139	Kecamatan Mondokan	Kecamatan	Terhubung
140	Desa Gemantar Kec. Mondokan (D)	Kantor Desa	Terhubung
141	Desa Jambangan Kec. Mondokan (D)	Kantor Desa	Terhubung
142	Desa Jekani Kec. Mondokan (D)	Kantor Desa	Terhubung
143	Desa Kedawung Kec. Mondokan (D)	Kantor Desa	Terhubung
144	Desa Pare Kec. Mondokan (D)	Kantor Desa	Terhubung
145	Desa Sono Kec. Mondokan (D)	Kantor Desa	Terhubung
146	Desa Sumberejo Kec. Mondokan (D)	Kantor Desa	Terhubung
147	Desa Tempel Rejo Kec. Mondokan (D)	Kantor Desa	Terhubung
148	Desa Trombol Kec. Mondokan (D)	Kantor Desa	Terhubung
149	Kecamatan Sumberlawang	Kecamatan	Terhubung
150	Desa Cepoko ()	Kantor Desa	Terhubung
151	Desa hadiluwih ()	Kantor Desa	Terhubung
152	Desa Jati ()	Kantor Desa	Terhubung
153	Desa Kacangan ()	Kantor Desa	Terhubung
154	Desa Mojopuro ()	Kantor Desa	Terhubung
155	Desa Ngandul ()	Kantor Desa	Terhubung
156	Desa Ngargosari ()	Kantor Desa	Terhubung
157	Desa Ngargotirto ()	Kantor Desa	Terhubung
158	Desa Pagak ()	Kantor Desa	Terhubung
159	Desa Pendem ()	Kantor Desa	Terhubung
160	Desa Tlogotirto ()	Kantor Desa	Terhubung
161	Kecamatan Miri	Kecamatan	Terhubung
162	Desa Bagor Kec. Miri ()	Kantor Desa	Terhubung
163	Desa Brojol Kec. Miri ()	Kantor Desa	Terhubung
164	Desa Doyong Kec. Miri ()	Kantor Desa	Terhubung
165	Desa Geneng Kec. Miri ()	Kantor Desa	Terhubung
166	Desa Gilirejo Baru Kec. Miri ()	Kantor Desa	Terhubung
167	Desa Gilirejo Kec. Miri ()	Kantor Desa	Terhubung
168	Desa Girimargo Kec. Miri ()	Kantor Desa	Terhubung
169	Desa Jeruk Kec. Miri ()	Kantor Desa	Terhubung
170	Desa Soko Kec. Miri ()	Kantor Desa	Terhubung
171	Desa Sunggingan Kec. Miri ()	Kantor Desa	Terhubung
172	Kecamatan Gemolong	Kecamatan	Terhubung
173	Desa Brangkal ()	Kantor Desa	Terhubung
174	Desa Genengduwur ()	Kantor Desa	Terhubung
175	Desa Jatibatur ()	Kantor Desa	Terhubung
176	Desa Jenalas ()	Kantor Desa	Terhubung
177	Desa kalangan ()	Kantor Desa	Terhubung
178	Desa Kaloran ()	Kantor Desa	Terhubung
179	Desa Nganti ()	Kantor Desa	Terhubung
180	Desa Peleman ()	Kantor Desa	Terhubung
181	Desa Purworejo ()	Kantor Desa	Terhubung
182	Desa Tegaldowo ()	Kantor Desa	Terhubung
183	Kelurahan Gemolong ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
184	Kelurahan Kragilan ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
185	Kelurahan Kwangen ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
186	Kelurahan Ngembat Padas ()	Kantor Kelurahan	Terhubung
187	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan	Terhubung
188	Desa Banaran Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
189	Desa Bukuran Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
190	Desa Donoyudan Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
191	Desa Jetiskarangpung Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
192	Desa Kalimacan Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
193	Desa Karangjati Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
194	Desa Keden Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
195	Desa Krikilankalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
196	Desa Ngebung Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
197	Desa Sambirembe Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
198	Desa Saren Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
199	Desa Tegalombo Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
200	Desa Trobayan Kec. Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
201	Desa Wonorejo Kalijambe ()	Kantor Desa	Terhubung
202	Kecamatan Plupuh	Kecamatan	Terhubung
203	Desa Cangkol Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
204	Desa Dari Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
205	Desa Gedongan Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
206	Desa Gentanbanaran Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
207	Desa Jabung Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
208	Desa Jembangan Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
209	Desa Karanganyar Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
210	Desa Karangwaru Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
211	Desa Karungan Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
212	Desa Manyarejo Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
213	Desa Ngrombo Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
214	Desa Plupuh Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
215	Desa Pungsari Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
216	Desa Sambirejo Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
217	Desa Sidokerto Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
218	Desa Somomorodukuh Kec. Plupuh ()	Kantor Desa	Terhubung
219	Kecamatan Masaran	Kecamatan	Terhubung
220	Desa Dawungan Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
221	Desa Gebang Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
222	Desa Jati Masaran Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
223	Desa Jirapan Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
224	Desa Karangmalang Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
225	Desa Kliwonan Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
226	Desa Kreet Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
227	Desa Krikilan Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
228	Desa Masaran Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
229	Desa Pilang Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
230	Desa Pringanom Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
231	Desa Sepat Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
232	Desa Sidodadi Kec. Masaran ()	Kantor Desa	Terhubung
233	Kecamatan Sidoharjo	Kecamatan	Terhubung
234	Desa Bentak Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
235	Desa Duyungan Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
236	Desa Jambanan Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
237	Desa Jetak Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
238	Desa Pandak Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
239	Desa Patihan Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
240	Desa Purwosuman Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
241	Desa Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
242	Desa Singopadu Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
243	Desa Sribit Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
244	Desa Taraman Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
245	Desa Tenggak Kec. Sidoharjo (D)	Kantor Desa	Terhubung
246	Kecamatan Tanon	Kecamatan	Terhubung

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
247	Desa Bonagung Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
248	Desa Gabugan Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
249	Desa Gading Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
250	Desa Gawan Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
251	Desa Jono Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
252	Desa Kalikobok Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
253	Desa Karangasem Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
254	Desa Karangtalun Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
255	Desa Kecik Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
256	Desa Ketro Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
257	Desa Padas Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
258	Desa Pengkol Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
259	Desa Sambiduwur Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
260	Desa Slogo Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
261	Desa Suwatu Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
262	Desa Tanon Kec. Tanon ()	Kantor Desa	Terhubung
263	Kecamatan Gemolong	Kecamatan	Terhubung
264	Kecamatan Gesi	Kecamatan	Terhubung
265	Kecamatan Gondang	Kecamatan	Terhubung
266	Kecamatan Jenar	Kecamatan	Terhubung
267	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan	Terhubung
268	Kecamatan Karangmalang	Kecamatan	Terhubung
269	Kecamatan Kedawung	Kecamatan	Terhubung
270	Kecamatan Masaran	Kecamatan	Terhubung
271	Kecamatan Miri	Kecamatan	Terhubung
272	Kecamatan Mondokan	Kecamatan	Terhubung
273	Kecamatan Ngrampal	Kecamatan	Terhubung
274	Kecamatan Plupuh	Kecamatan	Terhubung
275	Kecamatan Sambirejo	Kecamatan	Terhubung
276	Kecamatan Sambungmacan	Kecamatan	Terhubung
277	Kecamatan Sidoharjo	Kecamatan	Terhubung
278	Kecamatan Sragen	Kecamatan	Terhubung
279	Kecamatan Sukodono	Kecamatan	Terhubung
280	Kecamatan Sumberlawang	Kecamatan	Terhubung
281	Kecamatan Tangen	Kecamatan	Terhubung
282	Kecamatan Tanon	Kecamatan	Terhubung
283	Puskesmas Gemolong	Lemb. Kesehatan	Terhubung
284	Puskesmas Gesi	Lemb. Kesehatan	Terhubung
285	Puskesmas Gondang	Lemb. Kesehatan	Terhubung
286	Puskesmas Jenar	Lemb. Kesehatan	Terhubung
287	Puskesmas Kalijambe	Lemb. Kesehatan	Terhubung
288	Puskesmas Karangmalang	Lemb. Kesehatan	Terhubung
289	Puskesmas Kedawung I	Lemb. Kesehatan	Terhubung
290	Puskesmas Kedawung II	Lemb. Kesehatan	Terhubung
291	Puskesmas Masaran I	Lemb. Kesehatan	Terhubung
292	Puskesmas Masaran II	Lemb. Kesehatan	Terhubung
293	Puskesmas Miri	Lemb. Kesehatan	Terhubung
294	Puskesmas Mondokan	Lemb. Kesehatan	Terhubung
295	Puskesmas Ngrampal	Lemb. Kesehatan	Terhubung
296	Puskesmas Plupuh I	Lemb. Kesehatan	Terhubung
297	Puskesmas Plupuh II	Lemb. Kesehatan	Terhubung
298	Puskesmas Sambirejo	Lemb. Kesehatan	Terhubung
299	Puskesmas Sambungmacan I	Lemb. Kesehatan	Terhubung
300	Puskesmas Sambungmacan II	Lemb. Kesehatan	Terhubung
301	Puskesmas Sidoharjo	Lemb. Kesehatan	Terhubung
302	Puskesmas Sragen	Lemb. Kesehatan	Terhubung
303	Puskesmas Sukodono	Lemb. Kesehatan	Terhubung

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
304	Puskesmas Sumberlawang	Lemb. Kesehatan	Terhubung
305	Puskesmas Tangen	Lemb. Kesehatan	Terhubung
306	Puskesmas Tanon I	Lemb. Kesehatan	Terhubung
307	Puskesmas Tanon II	Lemb. Kesehatan	Terhubung
308	Fasilitas Umum (Semua)	Fasilitas Umum	Terhubung Semua
309	Sekolah tingkat SD (Sebagian)	Lemb. Pendidikan	Terhubung Sebagian
310	Sekolah tingkat SMP (Sebagian)	Lemb. Pendidikan	Terhubung Sebagian
311	Polsek (Sebagian)	Lemb. Kepolisian	Terhubung Sebagian
312	Instansi Vertikal (Semua)	Instansi Vertikal	Terhubung Semua
313	BUMD (Semua)	BUMD	Terhubung Semua

3. Zona DeMilitarized Zone (DM)

Zona DM untuk penempatan server - server aplikasi. Switch server langsung terhubung dengan Router Firewall. Akses dari internal maupun eksternal akan disaring (filter) oleh Router Firewall.

3.2.5.2.2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menerapkan sistem penghubung layanan pemerintah atau API gateway sebagai layanan interoperabilitas data (LID) antar aplikasi. Layanan tersebut hanya dapat diakses di jaringan intra pemerintah. adapun alamatnya yaitu mantra.sragenkab.go.id/mantra.

3.2.5.2.3. Katalog Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Ksisting

Tabel 3.2.5.2.2. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Sistem Integrasi - SPLP

ID	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis SPL Kode Referensi Infrastruktur	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
SRG-SP L-01	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Sragen	Sistem layanan interoperabilitas data antar aplikasi yang digunakan untuk pertukaran data. Layanan tersebut hanya dapat diakses di jaringan intra pemerintah. adapun alamatnya yaitu mantra.sragenkab.go.id/mantra	RAI.02 Sistem Integrasi	Sendiri	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jaringan intra Pemerintah Kabupaten Sragen	RAI 02. Sistem Integrasi	RAI 02.02. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah

3.2.5.2.4. Katalog Sistem Integrasi Pada IP ksisting

Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang digunakan di Kabupaten Sragen. Jaringan ini dirancang khusus untuk menghubungkan perangkat daerah seperti Dinas, Badan, UPT, Kecamatan yang ada di lingkungan Kabupaten Sragen. JIP beroperasi sebagai jaringan Area Kota (MAN) yang mencakup area tertentu di dalam Kabupaten. Jaringan ini memiliki kepemilikan yang terbagi antara kepemilikan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan. bertindak sebagai pengelola jaringan. JIP memiliki tujuan untuk mendukung pertukaran data dan komunikasi yang efisien antara perangkat daerah. Dengan adanya jaringan ini, kolaborasi dan koordinasi antara unit-unit pemerintah di Kabupaten Sragen dapat terjalin dengan baik untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi.

Tabel 3.2.5.2.4 Referensi Arsitektur Infrastruktur - Sistem Integrasi - JIP

ID	Nama Jaringan Intra Pemerinta	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola	Bandwid Intranet	Bandwid Internet	Tipe Media Jaringan	Nama Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
SRG-JIP-01	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Sragen	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Sragen	Metro Dedicated	Sendiri	Pemerintah Kabupaten Sragen	Diskominfo Kabupaten Sragen	1 Gbps	600 Mbps	Fiber Optic		RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah
SRG-JIP-02	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Sragen	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Sragen	Metro Dedicated	Sendiri	Pemerintah Kabupaten Sragen	Diskominfo Kabupaten Sragen	100 Mbps	50 Mbps dan 100 Mbps	Gelombang Radio		RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah

3.2.5.3. Platform

Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, istilah platform mengacu pada kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk lingkungan kerja untuk mendukung aplikasi dalam konteks sistem pemerintah berbasis elektronik. Platform ini mencakup infrastruktur teknologi yang melibatkan server, jaringan komunikasi, perangkat penyimpanan data, dan perangkat lunak atau sistem operasi yang dirancang untuk menjalankan aplikasi SPBE. Dalam sistem pemerintah berbasis elektronik, terdapat beberapa platform yang penting untuk mengelola data saat ini, termasuk komputasi awan, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, dan perangkat keras periferal.

3.2.5.3.1. Katalog Komputasi Awan

Pemerintah Kabupaten Sragen belum menggunakan teknologi komputasi awan dalam menyediakan infrastruktur, software berbasis teknologi virtualisasi. Komputasi awan (Government cloud) sebetulnya dapat difungsikan untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang didedikasikan untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten. Dengan memanfaatkan komputasi awan, Pemerintah Kabupaten dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi yang canggih, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada warga.

3.2.5.3.2. Katalog Perangkat Keras Server

Perangkat Keras Server difungsikan sebagai server virtual yang dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemrov Jateng untuk menempatkan aplikasi yang mereka gunakan. Dengan menggunakan server virtual, OPD dapat menjalankan berbagai aplikasi yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk aplikasi administrasi, aplikasi keuangan, atau aplikasi pelayanan publik. Perangkat Keras Server ini memberikan kekuatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan keandalan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut secara efisien dan aman. Dengan menggunakan server virtual, OPD dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan biaya operasional, dan mengelola aplikasi dengan lebih efektif.

Tabel 3.2.5.3.2. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform - Server

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Sistem operasi	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
SRG-SRV-01	SERVER (Dell F 2)	Server Virtualisasi untuk VPS - vmware11.sragenkab.go.id - vmware12.sragenkab.go.id	VMWare	Server Aplikasi	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	VMWare 6.7	RAM 384 GB	Mid End	30 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Sistem perasi	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
SRG-SRV-02	VPS01 (vmware11.sragenkab.go.id)	Server VPS - ns1.sragenkab.go.id - webserver1.sragenkab.go.id - webserver2.sragenkab.go.id - webserver3.sragenkab.go.id - webserver4.sragenkab.go.id - webserver5.sragenkab.go.id - webserver6.sragenkab.go.id - mail.sragenkab.go.id - esignclient.sragenkab.go.id	VMWare	Server Aplikasi	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	VMWare 6.7	RAM 256 GB	Mid End		Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-03	VPS02 (vmware12.sragenkab.go.id)	Server VPS - simpeg - presensi - lpse - perdagangan	VMWare	Server Aplikasi	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	VMWare 6.7	RAM 128GB	Mid End		Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-04	ns1.sragenkab.go.id	DNS Server	FreeBSD	Domain Name Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	FreeBSD 12.2	RAM 2GB	Mid End	20 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-05	webserver1.sragenkab.go.id	Server web sragenkab.go.id	FreeBSD	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	FreeBSD 8.4	RAM 4GB	Mid End	80 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Sistem perasi	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
SRG-SRV-06	webserver2.sragenkab.go.id	Web Server php 5.4	FreeBSD	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	FreeBSD 8.4	RAM 8GB	Mid End	350 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-07	webserver3.sragenkab.go.id	Web Server php 5.6	FreeBSD	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	FreeBSD 10.4	RAM 8GB	Mid End	500 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-08	webserver4.sragenkab.go.id	Web Server php 7.2	FreeBSD	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	FreeBSD 12.1	RAM 8GB	Mid End	400 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-09	webserver5.sragenkab.go.id	Web Server php 7.4	FreeBSD	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	FreeBSD 12.4	RAM 8GB	Mid End	400 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-10	webserver6.sragenkab.go.id	Web Server php 7.4 Intranet	FreeBSD	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	FreeBSD 12.4	RAM 8GB	Mid End	400 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-11	mail.sragenkab.go.id	Email Server	FreeBSD	Mail Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	FreeBSD 10.4	RAM 2GB	Mid End	500 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-12	esignclient.sragenkab.go.id	Server integrasi tte dengan BSSN	CentOS	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	CentOS 7	RAM 8GB	Mid End	50 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-13	simpeg	Simpeg	Windows	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	Win 2022 Server	RAM 8GB	Mid End	200 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-14	presensi	Absen Sakti	FreeBSD	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	FreeBSD 10.4	RAM 32GB	Mid End	400 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-15	lpse	LPSE	Debian	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	Debian 10	RAM 32GB	Mid End	2 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS
SRG-SRV-16	perdagangan	Retribusi	Ubuntu	Web Server	Sendiri	Pemkab Sragen	Diskominfo Sragen	Diskominfo Sragen	Ubuntu 14.04.6	RAM 16GB	Mid End	250 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.03.02 IaaS

3.2.5.3.3. Perangkat Keras Storage

Diskominfo telah memiliki perangkat keras khusus media penyimpanan (*storage server*) dengan tipe *etwork Attached Storage (NAS)*, *Storage Attached etwork (SAN)* dan *DAS (Direct Attached Storage)* berupa tape storage yang digunakan untuk penyimpanan data yang diarsipkan.

Tabel 3.2.5.3.3. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform - Media Penyimpanan

ID	Nama Media Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan Data Input	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Lokasi Storage Mengacu Metadata asilitas Komputasi	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data S aring	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
SRG-STO-1	SAN Storage	Media penyimpanan data di Kabupaten Sragen	- Data yang terkait aplikasi yang harus diupload oleh pengguna - Database aplikasi	Sendiri	Pemerintah Kabupaten Sragen	Diskominfo	Ruang server Kabupaten Sragen di Diskominfo	VMWare	Storage Area Network (SAN)	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
SRG-STO-2	NAS Storage	Media penyimpanan data Dinas Kominfo	Data dokumentasi kegiatan Diskominfo	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo	Ruang server Kabupaten Sragen di Diskominfo	Windows Server 2008	Network Attached Storage (NAS)	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
SRG-STO-3	Tape Storage	Media backup data Dinas Kominfo	Data backup diskominfo	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo	Ruang server Kabupaten Sragen di Diskominfo	Windows desktop	Direct Attached Storage (DAS)	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)

3.2.5.3.4. Perangkat Keras aringan

Tabel 3.2.5.3.5.1. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Perangkat Keras Jaringan

Menyusul

3.2.5.3.5. Perangkat Keras Keamanan

Kabupaten Sragen telah menyediakan perangkat dedicated firewall untuk mendukung keamanan pada jaringan intra pemerintah, server dan aplikasi. Perangkat firewall yang digunakan menggunakan Fortigate.

Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform - Perangkat keamanan

ID	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	Tipe Keamanan Device	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
SRG-PKA-01	Fortigate	Firewall untuk keamanan Jaringan Kabupaten Sragen	Firewall	Diskominfo	Diskominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan

3.2.5.3.6. Katalog Perangkat Perip eral ksisting

Untuk mendukung operasional Pusat Data Diskominfo Kabupaten Sragen, telah disediakan perangkat-perangkat pendukung yang meliputi alat pemadam kebakaran untuk persiapan penanggulangan kebakaran, thermometer untuk mengawasi suhu udara di ruang Data Center, higrometer untuk mengawasi kelembaban udara di ruang Data Center, generator sebagai pembangkit tenaga listrik cadangan jika listrik PLN mengalami gangguan, UPS sebagai media penyimpanan tenaga listrik jika listrik PLN mengalami gangguan, door access menggunakan sensor sidik jari untuk membuka/menutup akses ke dalam ruangan Data Center, serta CCTV dan NVR sebagai alat untuk mengawasi keadaan ruang server dan memproses video dari kamera CCTV. Dengan adanya perangkat-perangkat ini, diharapkan dapat beroperasi dengan aman dan terjaga keandalannya dalam mengelola data-data penting Pemerintah Kabupaten Sragen.

Tabel 3.2.5.3.6 Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform - Peripheral

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
SRG-PRF-01	UPS	Alat untuk menyuplai daya listrik cadangan untuk di ruang server	Output	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
SRG-PRF-02	Doorlock	Alat untuk pengunci ruang server secara digital atau elektronik	Input	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
SRG-PRF-03	APAR	Alat untuk memadamkan API berbahan dasar powder	Output	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
SRG-PRF-04	CCTV	Alat untuk memantau lingkungan ruang pusat data	Input/Output	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
SRG-PRF-05	Higrometer dan Termometer	Alat untuk memantau kondisi suhu ruang dan kelembaban udara	Input/Output	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
SRG-PRF-06	Generator	Alat untuk menyuplai daya listrik cadangan untuk gedung di Pemda Sragen	Input/Output	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
SRG-PRF-08	Tools Kit Jaringan (Tang Krimping dan LAN Tester)	Alat untuk instalasi dan pemeliharaan jaringan	Output	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
SRG-PRF-09	Raised Floor	Lantai yang ditinggikan untuk keperluan ruang kabel jaringan dan kabel listrik.	Output	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
SRG-PRF-10	Rack Cabinet	Perangkat untuk menempatkan server dan perangkat jaringan	Output	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
SRG-PRF-11	AC Split	Alat pendingin ruangan	Output	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
SRG-PRF-12	PDU (Power Distribution Unit)	Alat untuk pembagian dan digunakan sebagai pendistribusian listrik	Output	Ruang server Di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral

3.2.5.3. . Perangkat Lunak

Tabel 3.2.5.3. .1. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *latform* Perangkat Lunak

3.2.2. Arsitektur Keamanan

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Mengacu pada Rancangan Lampiran Peraturan Presiden Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 2021, ada tiga hal yang perlu dilakukan pengecekan kondisi saat ini yaitu;

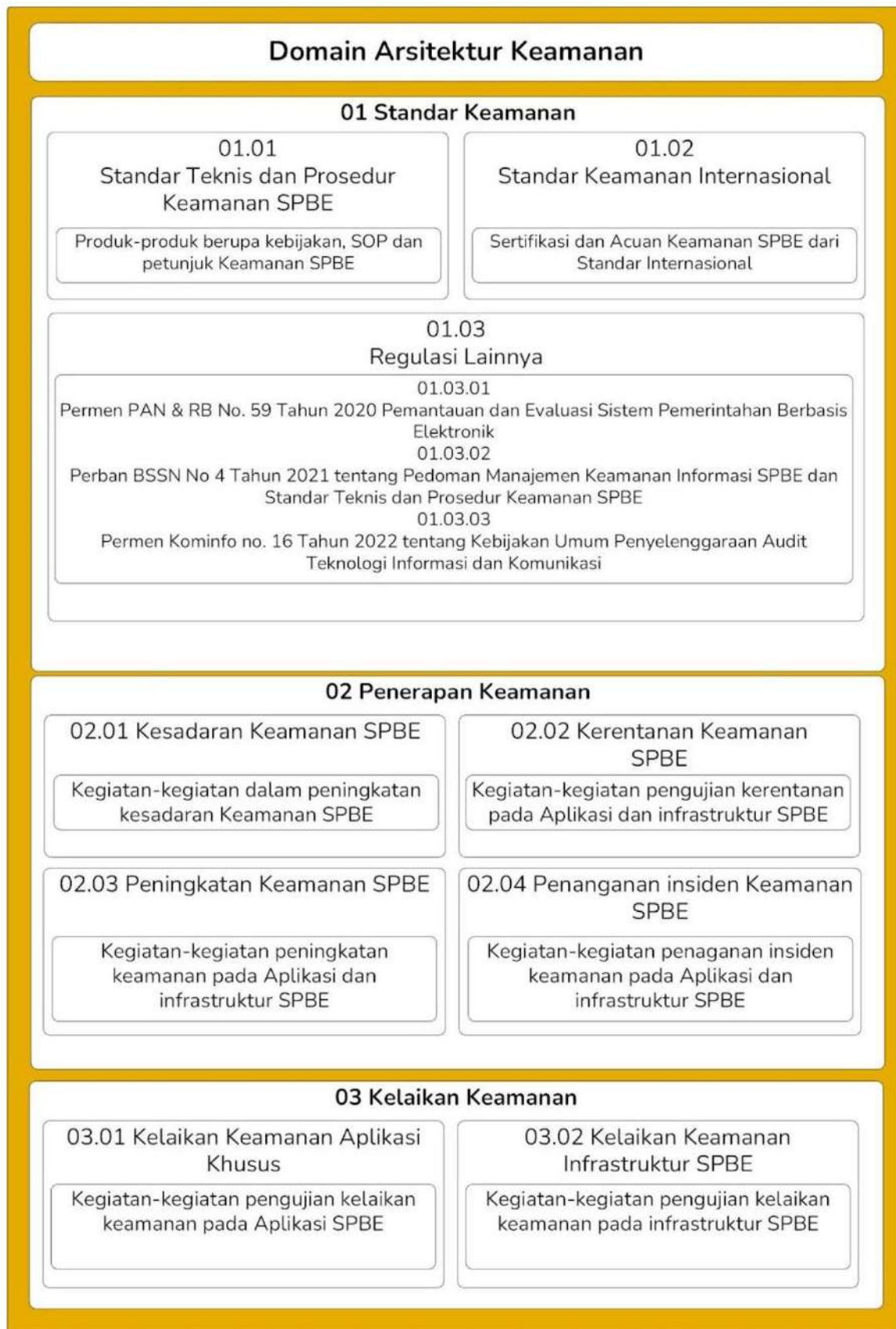
1. Standar keamanan
2. Penerapan keamanan
3. Kelaikan keamanan



Gambar 3.2.6.1 Komponen Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Sragen

Domain arsitektur keamanan selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang ditetapkan.

Secara umum, taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional pada tingkat 1 terdapat 3 domain keamanan yaitu: (1) Standar Keamanan, (2) Penerapan Keamanan, (3) Kelaikan keamanan.



Gambar 3.2.6.2. Domain Arsitektur Keamanan

3.2.6.1. Standar Keamanan

Standar keamanan berdasarkan Peraturan Presiden no 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional terdapat 3 (tiga) hal yaitu:

1. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
2. Standar Keamanan Internasional
3. Regulasi lainnya.

Dinas Kominfo Kabupaten Sragen saat ini telah menyediakan kebijakan dan SOP seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.6.1. Daftar Peraturan Terkait Keamanan Informasi

ID	Nama Standar Keamanan	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan
SRG-STP-01	Perbup SPBE tentang Domain keamanan informasi	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	Peraturan Bupati Sragen tentang SPBE	
SRG-STP-02	SOP Kunjungan Ruang Server Pihak Internal	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	SOP tentang Kunjungan Ruang Server Pihak Internal	Desember 2021
SRG-STP-03	SOP Kunjungan Ruang Server Pihak Eksternal	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	SOP tentang Kunjungan Ruang Server Pihak Eksternal	Desember 2021
SRG-STP-04	SOP Pengajuan Subdomain	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	SOP tentang Pengajuan Subdomain	Desember 2021
SRG-STP-05	SOP Pengajuan hosting	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	SOP tentang Pengajuan hosting	Desember 2021
SRG-STP-06	SOP Penambahan Bandwidth	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	SOP tentang Penambahan Bandwidth	Desember 2021
SRG-STP-07	SOP Gangguan Intranet dan Internet	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	SOP tentang Gangguan Intranet dan Internet	Desember 2021
SRG-STP-08	SOP penambahan jaringan baru	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	SOP tentang penambahan jaringan baru	Desember 2021
SRG-STP-09	SOP kunjungan Command Center Pihak Eksternal	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	SOP tentang kunjungan Command Center Pihak Eksternal	Desember 2021
SRG-STP-10	SOP Pengajuan Pengembangan Aplikasi	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	SOP tentang Pengajuan Pengembangan Aplikasi	Desember 2021
SRG-STP-11	SOP pengajuan email pemerintah	standar dan atau Peraturan Keamanan SPBE	SOP tentang pengajuan email pemerintah	Desember 2021

3.2.6.2. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan sebagai bentuk program kerja Keamanan SPBE di Pemprov Jateng yang dilakukan oleh Diskominfo sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan

informasi, serta infrastruktur dari setiap IPPD masing-masing. Program kerja Keamanan SPBE yang telah diterapkan meliputi:

1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
2. Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
3. Peningkatan Keamanan SPBE
4. Penanganan Insiden Keamanan SPBE
5. Audit Keamanan SPBE

3.2.6.2.1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur TIK. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pelatihan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Sragen. Kegiatan yang belum dilakukan yaitu seperti:

- Sosialisasi keamanan informasi melalui sosial media
- Pelatihan keamanan informasi kepada pengguna TIK dan pengelola TIK

Tabel 3.2.6.2.1 Referensi Arsitektur Keamanan - Edukasi Keamanan

ID	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
SRG-EDU-01	IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Sragen	Sharing pengetahuan dan asesment keamanan informasi layanan elektronik Pemerintah Kabupaten Sragen	26 September 2020

3.2.6.2.2. Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE dilaksanakan melalui kegiatan untuk mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset aplikasi web melalui vulnerability assessment (VA) antara lain:

Tabel 3.2.6.2.2 Referensi Arsitektur Keamanan - Kerentanan Keamanan

ID	Nama Kegiatan Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
SRG-KER-01	Penilaian keamanan informasi menggunakan tools Indeks KAMI	Penilaian keamanan informasi menggunakan tools Indeks KAMI pada aplikasi dan pusat data	
SRG-KER-02	IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Sragen	asesment keamanan informasi layanan elektronik Pemerintah Kabupaten Sragen	

3.2.6.2.3. Peningkatan Keamanan SPBE

Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan Dinas Kominfo antara lain:

Tabel 3.2.6.2.3. Referensi Arsitektur Keamanan - Peningkatan Keamanan

ID	Nama Kegiatan Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
SRG-KER-01	Penilaian keamanan informasi menggunakan tools Indeks KAMI	Penilaian keamanan informasi menggunakan tools Indeks KAMI pada aplikasi dan pusat data	
SRG-KER-02	IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Sragen	asesment keamanan informasi layanan elektronik Pemerintah Kabupaten Sragen	

3.2.6.2.4. Penanganan Insiden Keamanan SPB

Penanganan insiden keamanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan mengidentifikasi sumber serangan, penanganan terhadap serangan, dan melakukan analisis serangan untuk mencegah berulangnya insiden yang serupa maupun lainnya. Adapun penanganan insiden keamanan SPBE antara lain:

Tabel 3.2.6.2.4. Referensi Arsitektur Keamanan - Penanganan Keamanan

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE
SRG-PIN-01	Restore Website dan Layanan OPD	Pemulihan layanan elektronik Pemerintah Kabupaten Sragen dengan melakukan restore file backup	4 Maret 2023

3.2.6.2.5. Audit Keamanan SPB

Beberapa kegiatan audit keamanan SPBE telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022, telah dilakukan audit internal dengan menggunakan tools indeks KAMI.

Tabel 3.2.6.2.3. Referensi Arsitektur Keamanan - Audit Keamanan

ID	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	asil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	Tindak lanjut Audit Keamanan	→ Instansi (Dependency)
SRG-AUD-01	Audit keamanan informasi menggunakan tools Indeks KAMI	a. belum/tidak dilaksanakan	Internal		b. sebagian ditindaklanjuti	Dinas Kominfo

Bab IV Analisa Kesenjangan SPBE

4.1. Analisa Kesenjangan SPBE

Analisa kesenjangan SPBE dilakukan dengan membandingkan antara kondisi *eksisting* dengan kondisi ideal implementasi SPBE. Hal ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan dasar guna perbaikan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun hasil analisa kesenjangan SPBE sebagai berikut.

Tabel 4.1.1. Hasil Analisa Kesenjangan SPBE

No	Domain	Kondisi <i>n</i>	Kondisi Ideal
1.	Kebijakan	Adanya kebijakan SPBE yang lengkap.	Perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan khususnya ketika ada pembaharuan regulasi dari instansi pusat.
2.	Manajemen	Masih dalam Proses dalam penerapan 1 Manajemen SPBE yaitu manajemen Risiko SPBE.	Perlu adanya penerapan 8 manajemen SPBE secara keseluruhan yaitu Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Manajemen Layanan.
3.	Audit TIK	Belum adanya Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan Informasi.	Perlu Melakukan Audit TIK yang terdiri atas Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan Informasi yang sesuai dengan BRIN
4.	Proses Bisnis	Proses bisnis Pemerintah Kabupaten Sragen masih di level makro untuk level mikro belum terpetakan.	Adanya peta proses bisnis yang mencakup seluruh struktural perangkat daerah hingga level bidang.
5.	Data	Penerapan Satu Data Indonesia di seluruh perangkat daerah belum terlalu optimal.	Mengadakan sosialisasi kegiatan Satu Data Indonesia untuk seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sragen yang berkelanjutan.
6.	Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa aplikasi dari pusat belum menyediakan <i>we service</i> agar terintegrasi dengan Aplikasi Internal. Belum adanya dokumentasi API yang menyeluruh. Beberapa aplikasi tidak ada dokumentasi aplikasi dari pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Integrasi antar aplikasi dari Pusat dengan daerah. Mendokumentasikan API dari seluruh aplikasi internal. Kedepan dalam proses pengembangan aplikasi dengan pihak ketiga harus menyertakan dokumentasi aplikasi dari pihak ketiga.
7.	Infrastruktur - Pusat Data	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Pusat Pemulihan Bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan Pusat Pemulihan Bencana menempatkan perangkat cadangan server, dan storage.
8	Infrastruktur - Jaringan Intra Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Koneksi internet hanya dari satu ISP Perangkat yang tergolong kritis seperti <i>ro ter internet ro ter core</i> belum redundansi. 	<ul style="list-style-type: none"> Koneksi internet lebih dari satu ISP dengan konfigurasi aktif - aktif; Pengadaan perangkat <i>ro ter core</i> untuk redundansi dengan konfigurasi <i>ig A ai a e</i> (HA).

No	Domain	Kondisi	Kondisi Ideal
9	Sistem Penghubung Layanan	Pertukaran data antar aplikasi dilakukan secara point-to-point, belum tersedia aplikasi manajemen API (<i>API Management</i>).	Pengembangan aplikasi SPL / API Management dengan pemisahan sesuai metode koneksi <ul style="list-style-type: none"> SPLP Internal untuk melayani integrasi antara aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Sragen melalui koneksi intranet. SPL Eksternal untuk melayani integrasi antara aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Kementerian/Lembaga melalui koneksi internet.
11	Keamanan (Arsitektur Keamanan SPBE)	Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki Kebijakan SPBE. Keamanan SPBE tercantum di Bab I Pasal 25.	Pemerintah Kabupaten Sragen perlu membuat kebijakan atau pedoman manajemen keamanan informasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Kebijakan atau pedoman mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
12.	Standar Keamanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Secara umum Pemerintah Kabupaten Sragen belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi (<i>we dan oie</i>), jaringan intra, dan sistem penghubung layanan, namun perlu diperbaharui. SOP Pembuatan Hosting SOP Pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah SOP Integrasi dan Interop SOP Permohonan Kenaikan Bandwidth SOP Pemeliharaan Jaringan Berkala SOP Maintenance Gangguan Jaringan SOP Pemeliharaan Server SOP Pengembangan Aplikasi Oleh OPD SOP Permohonan Jaringan Baru SOP Update Data Pada Website Kominfo 	Pembuatan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE meliputi <ul style="list-style-type: none"> Keamanan Data dan informasi Keamanan Aplikasi SPBE (<i>we dan oie</i>) Keamanan Sistem Penghubung Layanan Keamanan jaringan intra pemerintah
16.	Penerapan keamanan	Pemerintah Kabupaten Sragen belum menerapkan keamanan informasi seperti kegiatan <i>nera i t assess ent</i> atau pentest pada aplikasi-aplikasi web, server dan jaringan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Membuat agenda secara rutin <i>nera i t assess ent</i> atau <i>entest</i> pada aplikasi-aplikasi perangkat daerah, server dan jaringan pemerintah daerah. Memperluas cakupan kegiatan sosialisasi keamanan TI bagi pengguna.

No	Domain	Kondisi <i>n</i>	Kondisi Ideal
		Selain itu belum ada kegiatan rutin tentang sosialisasi dan peningkatan kesadaran keamanan informasi kepada pengguna TI	<ul style="list-style-type: none"> • Rutin dan mempertahankan peningkatan <i>ski</i> bagi pengelola TI • Menambah atau memperkuat SDM operasional TI dan keamanan TI
17.	Kelaikan Keamanan	Pemerintah Kabupaten Sragen belum melaksanakan kegiatan penilaian kelaikan keamanan informasi seperti Indeks KAMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dokumentasi Keamanan Informasi • Penilaian Kelaikan keamanan informasi secara mandiri dengan tools Indeks KAMI dari BSSN.

Laporan Arsitektur Kondisi Eksisting SPBE ini disusun guna memberikan gambaran sementara kondisi saat ini di Pemerintah Kabupaten Sragen yang kemudian dibandingkan antara dengan kondisi ideal yang perlu dilakukan dalam penerapan SPBE. Secara umum, kondisi eksisting SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen bisa disimpulkan telah terstandar dan mayoritas aplikasi internal yang ada sudah terintegrasi dengan aplikasi internal lainnya maupun dengan aplikasi instansi pusat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sragen dapat memberikan layanan internal dan layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan transparan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh perangkat daerah dalam proses pemerintahan secara elektronik. Hal ini memberikan manfaat besar bagi kemajuan daerah dan kemudahan akses informasi serta layanan publik di era digital saat ini.

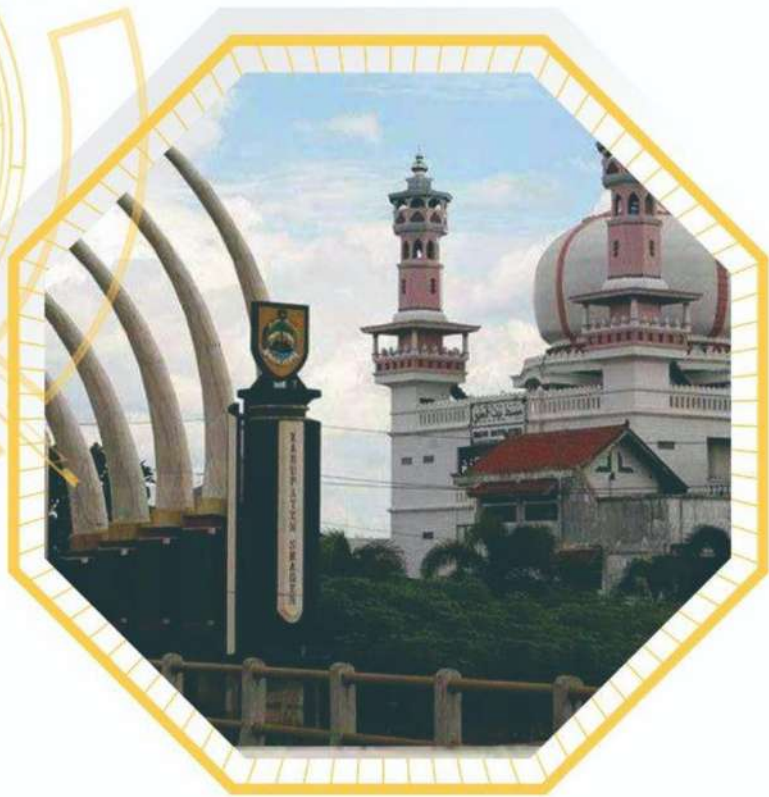
Kedepannya, dalam SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen perlu adanya peningkatan pada domain tata kelola dan manajemen serta integrasi beberapa sarana infrastruktur internal daerah dengan infrastruktur nasional dalam mendukung operasional SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari analisa formulir kuesioner yang disebar ke perangkat daerah, hasil *interview* terhadap seluruh perangkat daerah yang berperan sebagai koordinator dalam tim koordinasi SPBE, maupun data sekunder (referensi dan pengalaman konsultan di institusi sejenis). Substansi dalam laporan Kondisi *ksisting* ini selanjutnya dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan kondisi ideal/target layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Sragen selama 5 (lima) tahun mendatang.



Pemerinta Kabupaten Sragen 2 23

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN ANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (IIG D M T) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGN A SETAHUN SEKALI (A A R I).



Pemerintah Kabupaten Sragen



BUKU II ARSITEKTUR TARGET SPBE 2023



Pemerintah Kabupaten Sragen

Daftar Isi

Bab I Konsep Solusi	5
SPBE. Kondisi Ideal Tata Kelola SPBE	6
1.1.1. Kondisi Ideal Kelembagaan	6
1.1.1.1. Kelompok Kerja (Pokja) SPBE	8
1.1.1.2. Tim Developer Internal	11
1.1.1.3. Kebijakan SPBE	15
1.1.2. Penganggaran SPBE	16
1.2. Tata Kelola SPBE	17
1.2.1. Tata Kelola Arsitektur SPBE	17
1.2.2. Tata Kelola Kebijakan SPBE	19
1.2.3. Tata Kelola Proses Bisnis	21
1.2.4. Tata Kelola Data	23
1.2.5. Tata Kelola Layanan	26
1.2.6. Tata Kelola Aplikasi	27
1.2.6.1. Prinsip Pengembangan Aplikasi	29
1.2.6.2. Pilihan Teknologi	30
A. Ragam Teknologi (Bahasa Pemrograman dan Tools)	30
B. Integrasi Data dengan Platform Interoperabilitas	32
1.2.7. Tata Kelola Infrastruktur	32
1.2.7.1. Pusat Data	33
1.2.7.2. Jaringan Intra Pemerintah	34
1.2.7.3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	35
A. Application Programming Interface (API)	35
1.2.8. Tata Kelola Keamanan	37
1.2.8.1. Arsitektur Keamanan Sistem Informasi	37
1.2.8.2. Arsitektur Keamanan Infrastruktur Layanan	38
1.2.8.3. Arsitektur Keamanan Infrastruktur: Aturan Pusat dan Operasi	38
1.3. Manajemen SPBE	39
1.3.1. Manajemen Risiko SPBE	40
1.3.2. Manajemen Keamanan Informasi	43
1.3.3. Manajemen Data	49
1.3.4. Manajemen Aset TIK	56
1.3.5. Manajemen SDM	58
1.3.6. Manajemen Pengetahuan	60
1.3.7. Manajemen Perubahan	63
1.3.8. Manajemen Layanan	66
1.3.9. Audit TIK	69
Bab II Arsitektur Target	71
SPBE. Arsitektur Aplikasi	72
2.1.1. Desain Arsitektur Aplikasi	72
2.1.2. Integrasi Aplikasi	73
2.1.3. Arsitektur Aplikasi Usulan	74
2.1.3.1. Katalog Aplikasi Usulan	74

2.1.3.2. Analisis Diagram Aplikasi Usulan	78
2.1.3.3. Analisis Effort Impact	80
2.1.4. Portal Layanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen	80
2.2. Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan	85
2.2.1. Tren Teknologi dan Praktek Terbaik (Best Practice)	85
2.2.1.1. Teknologi Virtualisasi	85
2.2.1.2. Hyper Converged Infrastructure (HCI) Pusat Data	89
2.2.1.3. DevOps	90
2.2.1.4. Microservices	97
2.2.1.5. Arsitektur Network Spine-Leaf Pusat Data	100
2.2.1.6. OWASP 10 - 2021	100
2.2.2. Infrastruktur SPBE	103
2.2.2.1. Prinsip-prinsip Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	104
2.2.2.2. Pusat Data	105
A. Kondisi Eksisting Pusat Data	145
B. Usulan Topologi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana (DRC)	145
2.2.2.3. Jaringan Intra Pemerintah	147
A. Topologi Jaringan	148
B. Berjenjang atau hirarki (3-Tier Hierarchy)	148
C. Zonasi (Zoning)	151
D. Redudansi (Redundancy)	153
E. Keamanan (Security)	154
F. Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah	155
G. Usulan Infrastruktur Jaringan Data	156
2.2.2.4. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	160
A. Integrasi Data	161
B. Integrasi Presentasi	164
C. Integrasi Fungsional (Proses Bisnis)	164
D. Kondisi Eksisting Sistem Penghubung Layanan	165
E. Usulan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan	165
2.2.3. Keamanan Informasi SPBE	172
2.2.3.1. Kondisi Eksisting Keamanan SPBE	172
2.2.3.2. Arsitektur Keamanan SPBE	172
2.2.3.3. Manajemen Keamanan Informasi SPBE	173
A. Pilar Manajemen dan Standar Teknis Keamanan SPBE	174
B. SNI ISO 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi	175
2.2.3.4. Standar Teknis dan Prosedur	177
A. Keamanan Data dan Informasi	178
B. Keamanan Aplikasi SPBE	180
C. Keamanan Sistem Penghubung Layanan	185
D. Keamanan Jaringan Intra Pemerintah	186
E. Keamanan Pusat Data	188
2.2.3.5. Aktivitas Keamanan Informasi	190
A. Identifikasi (Identify)	190
B. Proteksi (Protect)	191
C. Deteksi (Detect)	191
D. Respon (Respond)	191
E. Pemulihan (Recover)	191
2.2.3.6. Security Operation Center (SOC)	192
A. Triad SOC	193

B. SOC – People	194
C. SOC – Process	195
D. SOC – Technology	196
E. SIEM	196
F. ELK	198
Bab III Penutup	201

Bab I Konsep Solusi SPBE

1.1. Kondisi Ideal Tata Kelola SPBE

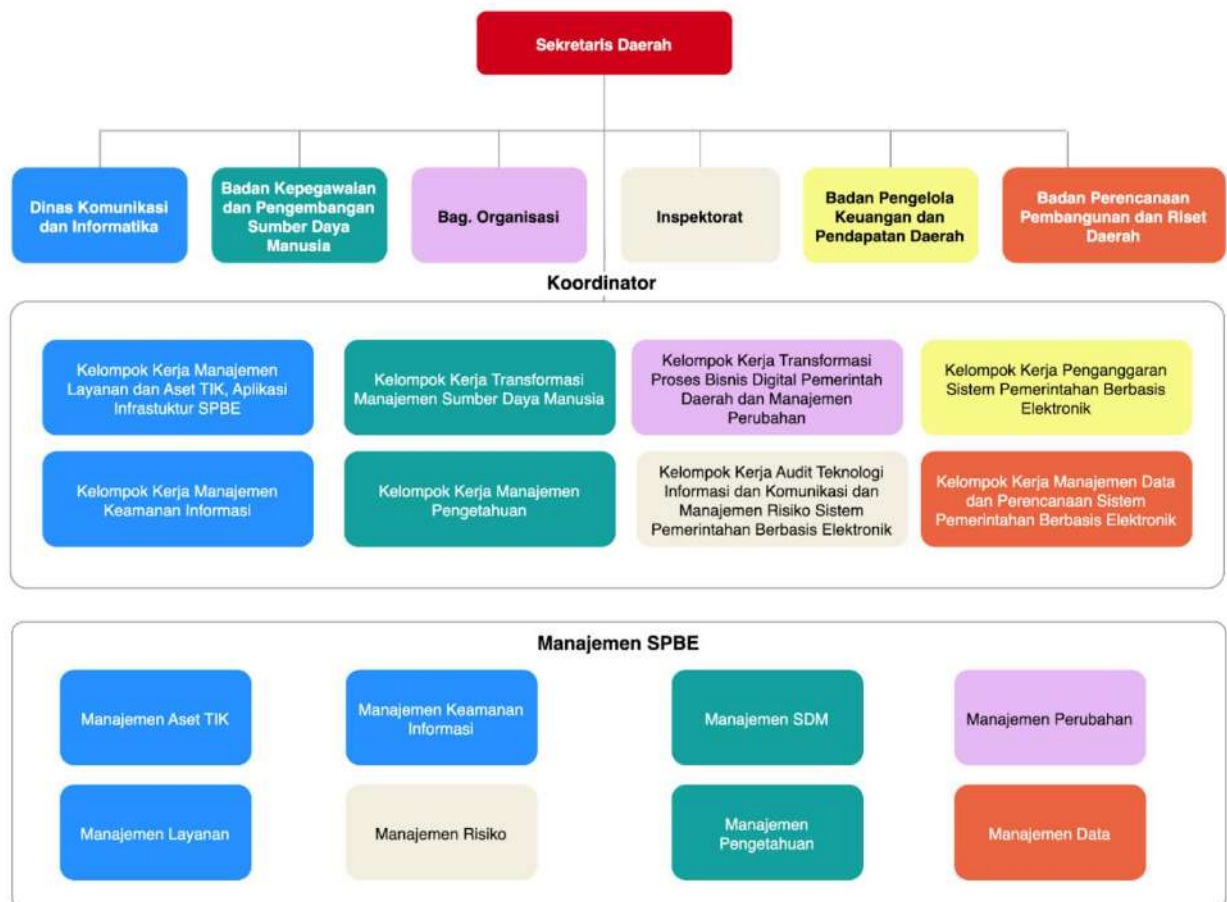
Analisa kondisi ideal dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kondisi yang dapat dicapai dari penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah. Analisa kondisi ideal ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, tren teknologi informasi saat ini, dan tren teknologi informasi yang akan datang. Sesuai dengan amanat Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf tujuan pengembangan SPBE, tiga tujuan utama SPBE, yaitu:

1. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;**
2. **Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan**
3. **Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.**

Kerangka fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan *driver of change* atau agen yang memicu terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian semua tujuan tersebut merupakan perwujudan dari kondisi ideal di mana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat, dunia usaha, maupun layanan antar lembaga pemerintahan. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sragen, secara umum, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menganut prinsip-prinsip dasar sebagai pemicu kesuksesan implementasi SPBE.

1.1.1. Kondisi Ideal Kelembagaan

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen merupakan sebuah perpaduan model sentralisasi. Model sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, dalam penerapan SPBE perlu dibentuk sebuah Tim Koordinasi SPBE, dimana Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.



Gambar 1.1.1.1. Struktur Tim Koordinasi SPBE Ideal (rekomendasi)

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa kondisi ideal dalam struktur Tim Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen terdiri atas Koordinator dan Anggota. Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai tugas:

- Memberikan arahan dan validasi terhadap seluruh inisiatif program dan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi;
- Memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE antar unit;
- Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE; dan
- Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.

Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen terdiri dari seluruh perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab terhadap layanan, data, aplikasi, infrastruktur maupun keamanan informasi. Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai tugas:

- Melaksanakan arahan program dan kegiatan SPBE yang telah diputuskan oleh Koordinator;
- Melakukan optimalisasi proses bisnis;
- Melakukan integrasi data dalam aplikasi dalam rangka penerapan SPBE yang optimal;

- d. Mengelola jaringan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi dan keamanan informasi yang berkelanjutan; dan
- e. Menerapkan manajemen SPBE sebagai budaya kerja.

1.1.1.1. Kelompok Kerja (Pokja)

SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen juga perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE dan membaginya ke dalam delapan kelompok kerja SPBE. Delapan kelompok kerja SPBE ini merupakan kepanjangan tangan dari kelompok kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional. Adapun kedelapan kelompok kerja dijelaskan sebagai berikut.

1. Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital, Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia diketuai oleh Bag. Organisasi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE, melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan SPBE, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan SPBE, melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan SPBE secara berkala, serta melaporkan hasil penerapan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
2. Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyusunan proses bisnis SPBE, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan layanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Kelompok Kerja Penganggaran SPBE diketuai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja SPBE, serta menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyusunan anggaran SPBE dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
4. Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE diketuai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan pengelolaan infrastruktur SPBE, melakukan perumusan standar interoperabilitas antar layanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE, melakukan perumusan kebijakan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi penerapan kebijakan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE, merumuskan pemberian pertimbangan pembangunan dan

- pengembangan aplikasi SPBE yang menggunakan kode sumber tertutup, merumuskan kebijakan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi dalam SPBE, melakukan koordinasi penyiapan pembangunan repositori aplikasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE, merumuskan kebijakan standar teknis dan prosedur pengembangan aplikasi dalam pelaksanaan SPBE, merumuskan kebijakan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE, merumuskan pedoman manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE, serta koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
5. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diketuai oleh Inspektorat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika, merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE, serta koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit TIK dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
 6. Kelompok Kerja Perencanaan SPBE diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan SPBE, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan review arsitektur dan peta rencana SPBE Daerah dalam pelaksanaan SPBE, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi review arsitektur dan peta rencana SPBE Daerah dalam pelaksanaan SPBE, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 7. Kelompok Kerja Manajemen Data diketuai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan domain data dan informasi dalam penyusunan arsitektur SPBE daerah dalam pelaksanaan SPBE, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tata kelola data dan informasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen data dalam pelaksanaan SPBE, serta penetapan kebijakan pedoman manajemen data dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
 8. Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi diketuai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang jaminan keamanan informasi pemerintah, merumuskan domain keamanan SPBE dalam penyusunan arsitektur SPBE, merumuskan pemberian pertimbangan

keamanan jaringan intra pemerintah dalam pelaksanaan SPBE, merumuskan pemberian pertimbangan keamanan sistem penghubung layanan pemerintah dalam pelaksanaan SPBE, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan keamanan, penyelesaian permasalahan keamanan SPBE, merumuskan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, melakukan konsultasi dan asistensi penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah lain dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, merumuskan kebijakan pedoman manajemen keamanan informasi dalam pelaksanaan SPBE, serta melakukan konsultasi dan asistensi penerapan manajemen keamanan informasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah lain dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

9. Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan diketuai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, merumuskan kebijakan internal tentang pedoman manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan SPBE, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

1.1.1.2. Tim *Developer*

Internal Berikut ini dijelaskan kebutuhan tim *developer* internal untuk mendukung pengembangan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Sragen setiap tahunnya.

Tabel 1.1.1.1. Kebutuhan Anggaran Tim *Developer* Internal

Kebutuhan Anggaran SDM			Tahun									
No	Posisi	Gaji/Bulan	2023		2024		2025		2026		2027	
			Orang	Gaji Setahun	Orang	Gaji Setahun	Orang	Gaji Setahun	Orang	Gaji Setahun	Orang	Gaji Setahun
1	System Analyst	Rp4.000.000	1	Rp48.000.000	1	Rp 48.000.000	1	Rp 48.000.000	2	Rp 96.000.000	2	Rp 96.000.000
2	Data Scientist/Engineer	Rp4.000.000	1	Rp48.000.000	1	Rp 48.000.000	1	Rp 48.000.000	1	Rp 48.000.000	1	Rp 48.000.000
3	UI/UX Designer	Rp3.500.000	1	Rp42.000.000	2	Rp 84.000.000	2	Rp 96.000.000	2	Rp 96.000.000	2	Rp 96.000.000
4	Front-End Web Developer	Rp4.000.000	1	Rp48.000.000	2	Rp 96.000.000	3	Rp 144.000.000	4	Rp 192.000.000	4	Rp 192.000.000
5	Front-End Mobile Developer	Rp5.000.000	1	Rp60.000.000	2	Rp 120.000.000	3	Rp 144.000.000	4	Rp 192.000.000	4	Rp 192.000.000
6	Back-End Developer	Rp4.500.000	1	Rp54.000.000	2	Rp 108.000.000	3	Rp 144.000.000	4	Rp 192.000.000	4	Rp 192.000.000
7	Application Support	Rp3.000.000	1	Rp36.000.000	2	Rp 72.000.000	3	Rp 144.000.000	3	Rp 144.000.000	3	Rp 144.000.000
Budget Need / Year			7	Rp336.000.000	12	Rp 576.000.000	16	Rp 768.000.000	20	Rp 960.000.000	20	Rp 960.000.000
Total												

Adapun kompetensi minimum yang dibutuhkan dalam Tim *Developer* Internal Pemerintah Kabupaten Sragen mengadopsi standar dari bursa kerja yang dijelaskan sebagai berikut.

A. *System Analyst*

1. Persyaratan

- Memiliki *background* pendidikan TI/Ilmu Komputer;
- Menguasai *SDLC* dan *Agile* dalam pengembangan aplikasi;
- Memahami logika pemrograman dan *business process modelling*;
- Mampu menganalisis *DFD*, *Use Case*, dan *ERD*;
- Berpengalaman dalam *programming* dan integrasi data menggunakan API serta mendokumentasikannya; dan
- Berpengalaman dalam mendesain *mockup* dan *functional specification document*.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan analisis kebutuhan aplikasi dalam mengembangkan aplikasi berbasis *cloud* pada *platform* dan aplikasi di dalam Tim *Developer* Pemerintah Kabupaten Sragen dengan menghitung dan mengidentifikasi kerentanan atau potensi kegagalan dan ketidaklayakan implementasi aplikasi;
- Berkoordinasi dengan Tim *Programmer*, Tim Data, Tim Produk, Tim Operasional dan *Stakeholder* dalam proses identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis *Cloud* pada *platform* dan aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Sragen; dan
- Mendokumentasikan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis *cloud* pada *platform* dan aplikasi dalam bentuk dokumentasi teknis yang menjelaskan *flowchart*, *database* dan spesifikasi teknis lainnya yang dapat dipahami oleh Tim *Programmer*, sebagai acuan untuk proses pengembangan aplikasi.

B. *Data Scientist/Engineer*

1. Persyaratan

- Lulusan gelar sarjana di bidang teknik, matematika, statistik, riset operasi, atau disiplin terkait lainnya;
- Membuat dan memelihara *data pipeline Architecture* yang optimal;
- Mengotomatiskan proses manual, mengoptimalkan pengiriman data, mendesain ulang;
- Membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pemuatan data yang optimal dari berbagai sumber data menggunakan teknologi *SQL* dan *NOSQL*;
- Bekerja sama dengan Tim *Developer* Internal dalam pengembangan aplikasi untuk membantu masalah teknis terkait data dan mendukung kebutuhan infrastruktur data; dan
- Menguasai *Python*, *Bigquery*, *MySQL*, *PostgreSQL*, dan *Airflow*. Opsional: *MongoDB*, *elasticSearch*, *Cloud Platform (eg: GCP)*, dan *Gitlab*.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Identifikasi sumber data yang berkualitas dan otomatisasi proses pengumpulan;
- Melakukan *preprocessing* data terstruktur dan tidak terstruktur;
- Menganalisis keperluan data untuk pengembangan aplikasi;
- Menyajikan informasi menggunakan teknik visualisasi data;
- Mengusulkan solusi dan strategi untuk tren pengembangan aplikasi; dan
- Berkolaborasi dengan Tim Internal *Developer*.

C. UI/UX Designer

1. Persyaratan

- Berpengalaman dalam *basic design process: research, ideation, user journey*;
- Mampu mempresentasikan *wireframe, prototype* ataupun *UI/UX*;
- Berpengalaman dalam melakukan *testing* terhadap *UI/UX*;
- Mampu mengikuti perkembangan teknik dan *tools design UI/UX*;
- Familiar dengan *tools Figma, Adobe XD, Sketch* atau *tools design* lainnya;
- Menguasai *flow, wireframe* dan *prototype*; dan
- Mengelola *knowledge sharing* para *UI/UX designer*.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Menciptakan desain yang berpusat pada pengguna untuk memahami persyaratan dan kebutuhan bisnis, serta umpan balik yang pengguna berikan;
- Merancang *user flows, wireframes, prototypes, dan mockups*;
- Menunjukkan persyaratan ke dalam *style guides*, aplikasi, pola desain, serta *interface* yang menarik dan nyaman;
- Merancang elemen, seperti: *input controls*, navigasi, dan komponen informasi lainnya;
- Membuat desain grafis yang original;
- Mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait pengalaman pengguna;
- Bekerja secara kolaboratif dengan tim produksi, *developer*, dan manajemen; dan
- Mengevaluasi *feedback* pengguna, metrik penggunaan, serta *usability finding* ke dalam hasil desain untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

D. Front-End Developer (Web & Mobile)

1. Persyaratan

- Lulusan minimum S1 Ilmu Komputer atau Teknik Informatika;
- Menguasai pengembangan *front end* dengan *javascript*;
- Memahami konsep *DOM, HoC, Promise, Async/Await, Event Delegation*, dan *Event Bubbling*;
- Menguasai konsep *UI/UX design pattern* dan responsif desain pada *web* dan *mobile*;
- Familiar menggunakan *code repository management*, seperti: *Git/Gitlab*;
- Memahami penggunaan HTML sesuai *best practice*;
- Memiliki kemampuan untuk membangun aplikasi dengan bahasa pemrograman *javascript* atau *typescript*;

- Memiliki kemampuan dalam menggunakan *CSS/Less/Sass* dengan baik;
- Memiliki kemampuan pengembangan produk menggunakan *Bootstrap/Tailwind/Vuetify/MUI/Framework7/Ant Design*;
- Memiliki kemampuan dalam membangun produk menggunakan *ReactJS,NextJS/Gatsby*, dan *library/framework* berbasis *ReactJS* lainnya;
- Memiliki kemampuan dalam membangun produk menggunakan *VueJS,NuxtJS/Gridsome*, dan *Library/framework* berbasis *VueJS*; dan
- Memiliki kemampuan yang baik dalam memahami konsep, dasar, dan cara menggunakan beberapa jenis *web service/API*, khususnya *REST API*.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Membangun dan merancang aplikasi *front end* sebuah aplikasi/fitur;
- Memastikan kelayakan teknis desain *UI/UX*;
- Memastikan semua *input user* tervalidasi dan terkirim ke *backend*;
- Mengatasi berbagai *bug* dan *error* pada sisi *front end*;
- Menerapkan prinsip pengembangan *front end* yang sesuai (*best practice*) dan memastikan bahwa *front end* dapat berjalan dengan baik di semua perangkat;
- Melakukan *maintenance* dan pembaharuan aplikasi *front end* yang sudah ada;
- Mendukung siklus pengembangan (konsep, desain, pengujian, rilis, operasional);
- Bekerja sama dengan tim untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan performa aplikasi;
- Berkolaborasi dengan tim infrastruktur dan tim *programmer* yang berspesialisasi dalam *DevOps, Backend, QA, System Analyst, Product Owner, UI/UX Designer*, dan
- Berkontribusi dalam membantu pembuatan dokumentasi teknis atau secara manual.

E. Back-End Developer

1. Persyaratan

- Merupakan lulusan S1 Teknik Informatika;
- Memiliki minimum 2 tahun pengalaman terkait bidang pemrograman atau pembangunan aplikasi;
- Memiliki pemahaman yang kuat terkait konsep OOP dan MVC;
- Berpengalaman dalam penggunaan PHP dan *framework* yang relevan (*Laravel, Yii, CI, dll*)/*C# .Net/ASP.Net*;
- Memahami bahasa pemrograman SQL (*SQL pusat data/PostgreSQL/MySQL*);
- Memahami konsep manajemen *source code* seperti *Git*;
- Memahami dan dapat mengimplementasikan *web service/API*;
- Bersedia untuk belajar *framework*, teknologi, atau bahasa pemrograman yang berbeda;
- Dapat membaca dokumen kebutuhan aplikasi; dan
- Memiliki jiwa yang kreatif, berorientasi pada detail dan memiliki *skill* komunikasi yang baik.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan perancangan *database*;
- Melakukan *update* atau pembaharuan struktur data yang telah ada;
- Membuat perancangan alur aplikasi;
- Melakukan pembangunan aplikasi dan *testing* di sisi *backend*;
- Mengatur keamanan aplikasi dan memastikan aplikasi memiliki tingkat keamanan yang baik;
- Melakukan *maintenance*/menemukan *bug* pada aplikasi dan memperbaikinya; dan
- Berkoordinasi dengan tim *frontend* untuk melakukan riset dan evaluasi terkait tampilan desain aplikasi agar sesuai dengan struktur *database* yang dibangun.

F. *Application Support*

1. Persyaratan

- Minimal S1 jurusan Sistem Informasi/ Teknik Informatika;
- Mempunyai Pengalaman dalam bidang *Application Support*;
- Memiliki pengalaman di *ERP System* (Nilai tambah jika memiliki pengalaman di SAP);
- Memiliki pengalaman dalam implementasi *project* aplikasi;
- Memiliki pengalaman dalam dokumentasi aplikasi; dan
- Memiliki pengalaman dalam membuat *user manual* aplikasi.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi;
- Memastikan aplikasi informasi dapat berjalan;
- Monitoring terhadap permintaan bantuan penanganan insiden yang di *submit* melalui *Web Ticketing System (SLA dan troubleshooting)*;
- Menerima *Issue* dari *user* melalui *Web Ticketing System* maupun *Non Ticketing*; dan
- Monitoring Laporan *Daily Log* dari *Team Application Support*.

1.1.1.3. Kebijakan

SPBE Reviu kebijakan perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaan sumber daya TIK. Daftar kebijakan yang perlu direviu, yaitu:

- a. Kebijakan internal arsitektur SPBE;
- b. Kebijakan internal peta rencana SPBE;
- c. Kebijakan internal manajemen data SPBE;
- d. Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE;
- e. Kebijakan internal layanan pusat data;
- f. Kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah;
- g. Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah;
- h. Kebijakan internal manajemen keamanan informasi;
- i. Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
- j. Kebijakan internal tim koordinasi SPBE.

1.1.2. Penganggaran SPBE

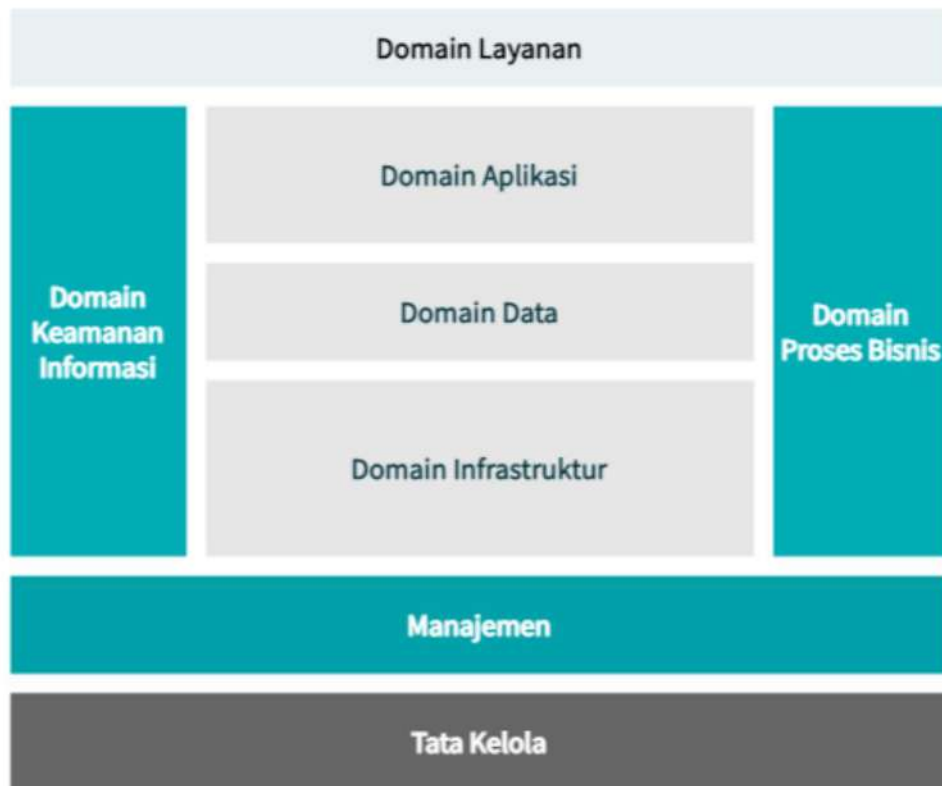
Anggaran dan belanja SPBE disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen yang kemudian dituangkan dalam Peta Rencana SPBE. Anggaran dan belanja SPBE kemudian disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja perangkat daerah. Penyusunan anggaran dan belanja SPBE dikoordinasikan oleh Bappeda dan dibantu dengan Diskominfo. Koordinasi dalam proses penyusunan anggaran dan belanja SPBE dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap rencana anggaran dan belanja SPBE untuk memastikan keterpaduan perencanaan anggaran dan belanja SPBE di seluruh perangkat daerah.

Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertugas untuk memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Sragen. Anggaran dan belanja SPBE harus mendapatkan persetujuan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen yang melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala. Lebih jauh, hasil peninjauan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

1.2. Tata Kelola SPBE

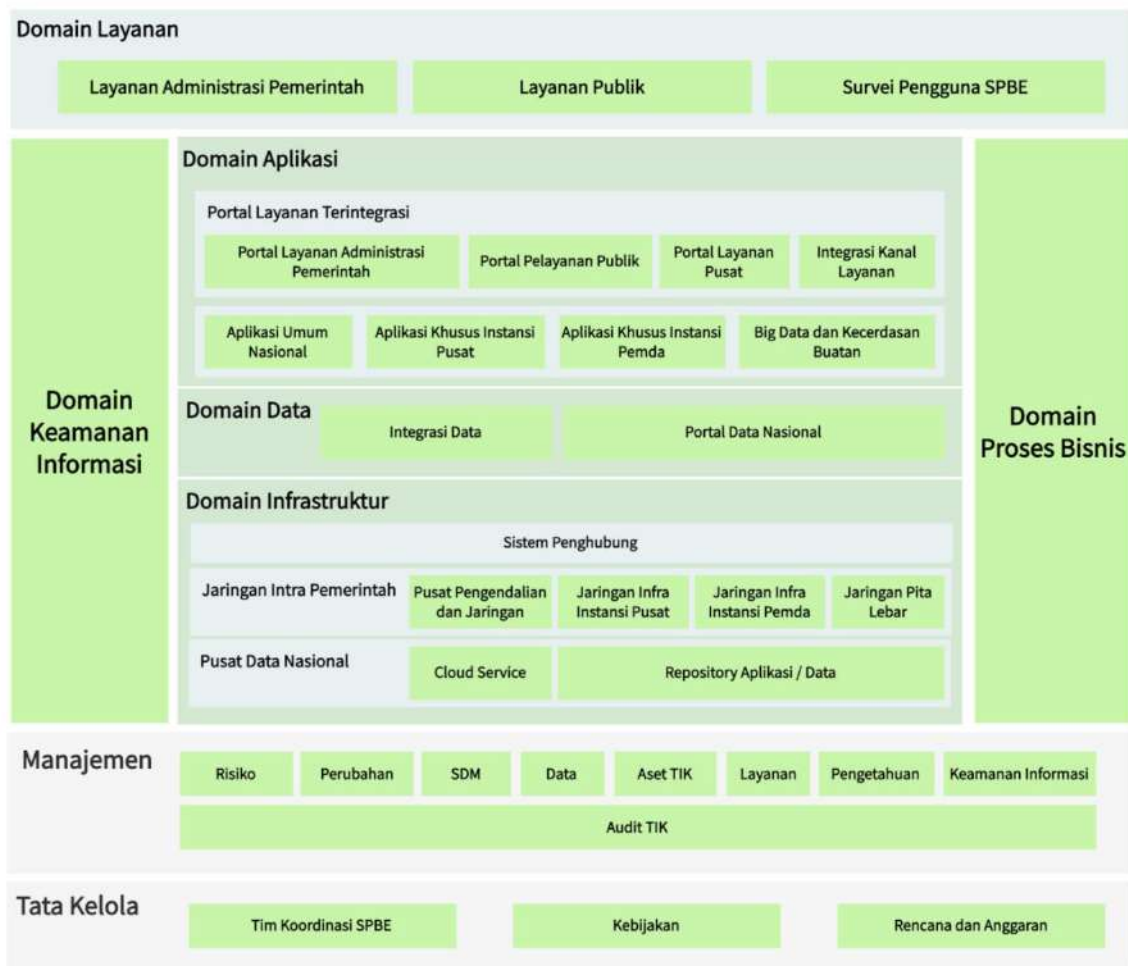
1.2.1. Tata Kelola Arsitektur SPBE

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE merupakan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. Arsitektur memuat beberapa domain yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.2.1.1. Domain Arsitektur SPBE (i)

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari kelima aspek tersebut didukung oleh manajemen yang dikelola dengan baik dan tata kelola yang disusun secara rinci serta terarah. Setiap domain yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain-domain lainnya. Detail dari masing-masing domain dijelaskan dalam Gambar 1.2.1.2. Domain Arsitektur SPBE (ii).



Gambar 1.2.1.2. Domain Arsitektur SPBE (ii)

Proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE diawali dengan domain tata kelola. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam Pemerintah Kabupaten Sragen. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Dalam hal ini, pengembangan arsitektur SPBE bidang tata kelola dimulai dengan membentuk tim koordinasi, menentukan kebijakan, dan menyusun rencana serta anggaran.

Langkah kedua dalam membangun arsitektur SPBE adalah dengan menentukan bentuk-bentuk manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan Tim Koordinasi SPBE untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun 8 (delapan) proses manajemen dalam SPBE mencakup:

1. Manajemen Resiko;
2. Manajemen Perubahan;
3. Manajemen Data;
4. Manajemen SDM;
5. Manajemen Aset TIK;
6. Manajemen Layanan;
7. Manajemen Pengetahuan; dan

8. Manajemen Keamanan Informasi.

Lebih jauh, arsitektur SPBE pada domain SPBE yang perlu dikelola pertama adalah domain proses bisnis. Proses bisnis dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal serta pelayanan paling efektif dan efisien. Domain proses bisnis selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan aplikasi lain. Beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain:

1. Portal layanan administrasi pemerintahan; dan
2. Portal layanan publik.

Berdasarkan penggunaannya, aplikasi dapat dibagi menjadi aplikasi yang bersifat khusus dan aplikasi yang bersifat umum. Setiap pembangunan aplikasi tidak lepas dari adanya integrasi data antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Integrasi data tidak hanya antar perangkat daerah saja tetapi juga dapat dilakukan integrasi ke portal data nasional. Selain itu, domain lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah domain infrastruktur. Domain ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan dalam pelayanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Sragen. Domain infrastruktur dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: infrastruktur jaringan dan infrastruktur pusat data. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada instansi, termasuk didalamnya pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemda, dan jaringan pita lebar. Selanjutnya untuk pusat data nasional didalamnya terdapat *cloud services* dan repositori aplikasi/data. Domain terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah domain keamanan informasi. Aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilingkupi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah aplikasi informasi. Aspek-aspek ini meliputi privasi/kerahasiaan khususnya dalam menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak, kecuali yang memiliki kewenangan.

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen disusun oleh Tim Koordinasi SPBE dan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur SPBE dan peta rencana perlu ditinjau secara berkala minimal satu tahun sekali dan perlu dilakukan perubahan ketika terjadi perubahan terhadap arsitektur SPBE Nasional, dokumen perencanaan pembangunan dan kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen ditahun 2022 menyatakan perlu adanya perubahan substansi kondisi arsitektur SPBE agar disesuaikan dengan Arsitektur SPBE Nasional. Peninjauan tersebut dilakukan oleh Tim Koordinator SPBE. Hasil peninjauan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam mengubah arsitektur SPBE dan peta rencana di Tahun 2023 ini.

1.2.2. Tata Kelola Kebijakan SPBE

Penyusunan kebijakan perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan dan operasional SPBE. Rekomendasi kebijakan yang perlu dibuat mengacu pada Perpres 95/2018 dan pembuatan kebijakan berdasarkan analisis domain, aspek, dan indikator untuk

peningkatan nilai indeks evaluasi SPBE. Adapun rekomendasi kebijakan terkait tata kelola dan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut.

A. Kebijakan internal arsitektur SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal arsitektur SPBE yang memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE (proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, serta layanan SPBE); dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal arsitektur SPBE.

B. Kebijakan internal peta rencana

SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal terkait peta rencana SPBE yang telah mengatur seluruh muatan peta rencana SPBE secara lengkap (tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SBE, dan audit TIK); dan
2. Membuat jadwal reviu dan melakukan evaluasi secara periodik pada kebijakan internal peta rencana SPBE.

C. Kebijakan internal manajemen data

SPBE

1. Menetapkan kebijakan manajemen data yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal manajemen data.

D. Kebijakan internal pembangunan aplikasi

SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE yang mengatur siklus pembangunan aplikasi SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE.

E. Kebijakan internal layanan pusat

data

1. Menetapkan konsep kebijakan internal terkait layanan pusat data yang mengatur interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data Nasional dan/atau mengatur penggunaan layanan pusat data Nasional; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal Layanan Pusat Data.

F. Kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah

1. Menetapkan konsep kebijakan internal terkait layanan jaringan intra yang mengatur interkoneksi layanan jaringan intra Pemerintah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah.

G. Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah

1. Menetapkan konsep kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan yang mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh perangkat daerah & keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan sistem penghubung layanan Pemerintah.

H. Kebijakan internal manajemen keamanan

informasi

1. Menetapkan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi yang mengatur penerapan untuk seluruh perangkat daerah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan manajemen keamanan informasi.

I. Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi

1. Menetapkan kebijakan internal terkait audit TIK yang telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (audit infrastruktur SPBE audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE); dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan audit teknologi informasi dan komunikasi.

J. Kebijakan internal tim koordinasi

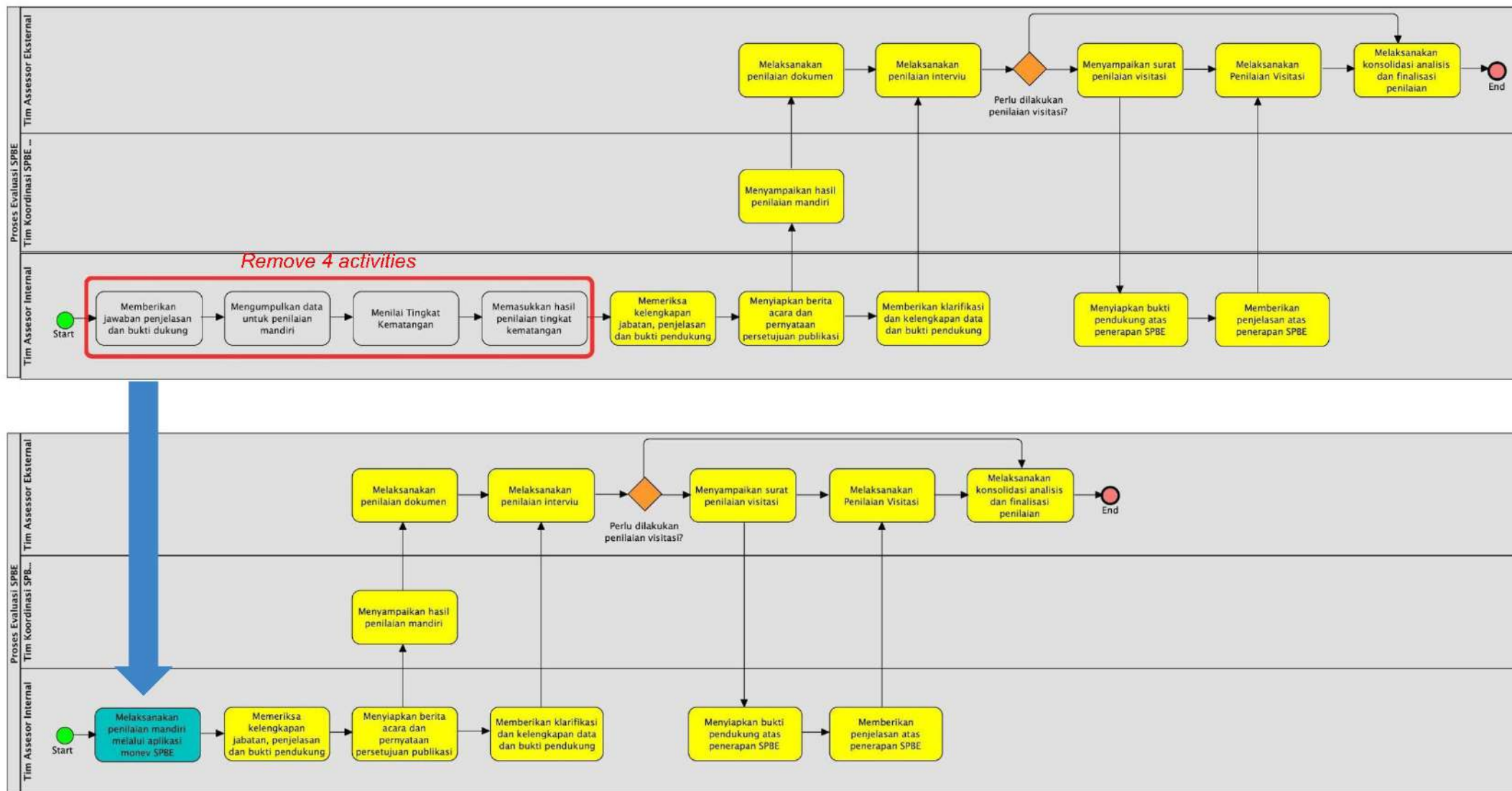
SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE yang telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh perangkat daerah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal tim koordinasi SPBE.

1.2.3. Tata Kelola Proses Bisnis

Proses bisnis pemerintahan perlu dipetakan secara berkala minimal 5 tahun sekali ke dalam bentuk peta proses bisnis yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Dewasa ini, digitalisasi dapat membantu mengoptimalkan proses bisnis pemerintah yang kompleks menjadi lebih efisien dan efektif, sebagai contoh proses evaluasi SPBE yang didalamnya terdapat 10 aktivitas dan dilakukan secara manual. Selanjutnya ketika dilakukan digitalisasi dalam proses evaluasi SPBE tersebut terdapat beberapa aktivitas yang bisa di simplifikasi dari 10 aktivitas menjadi 7 aktivitas. Adapun ilustrasi digitalisasi untuk simplifikasi proses bisnis ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.2.3.1. Ilustrasi Simplifikasi Proses Evaluasi SPBE

1.2.4. Tata Kelola Data

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dengan Instansi Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019). Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Standar data statistik dan data geospasial ditetapkan oleh pembina data yang merupakan salah satu perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Sragen harus menetapkan standar data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan oleh pembina data. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata yang informasinya mengikuti struktur dan format baku yang merujuk pada bagian informasi serta spesifikasi atau standar teknis dari metadata. Adapun standar metadata Pemerintah Kabupaten Sragen, yaitu:

Tabel 1.2.4.1 Standar Metadata

Elemen	Keterangan
Sumber	Nama instansi pemilik data
Author	Bidang di perangkat daerah selaku produsen data
Last Updated	Tanggal data di <i>update</i>
Created	Tanggal data dibuat
Nama Berkas	Nama berkas digital
Ekstensi	Format file (<i>xls, doc, ppt, pdf</i>)

Pemerintah Kabupaten Sragen dapat menetapkan struktur dan format yang baku untuk data yang pemanfaatannya memenuhi kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pembina data. Data dari produsen data harus

memenuhi kaidah interoperabilitas data. Adapun kaidah interoperabilitas data harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
2. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Panduan dasar yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan berkaitan dengan data. Adapun panduan data yang dapat diikuti untuk Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut.

A. Forum Satu Data Indonesia

Mengacu pada Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 10 Ayat (3) huruf a, Forum Satu Data Indonesia akan menyepakati:

1. Kode referensi dan/atau data induk; dan
2. Perangkat daerah yang menjadi produsen data atas kode referensi dan/atau data induk tersebut.

B. Penyelenggara Satu Data Indonesia

Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:

1. Pembina Data Tingkat Kabupaten;
2. Walidata Tingkat Kabupaten;
3. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten; dan
4. Produsen Data Tingkat Kabupaten.

C. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia

Tugas Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, yaitu:

1. Mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan
4. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia.

D. Komposisi Dewan Pengarah Satu Data Indonesia

Dewan Pengarah Satu Data Indonesia terdiri dari:

1. Ketua merangkap anggota, yaitu Sekda; dan
2. Anggota, terdiri atas Kepala Dinas dari masing-masing perangkat daerah.

E. Pembina Data Tingkat Daerah

Tugas Pembina Data Tingkat Daerah, yaitu:

1. Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Daerah;
2. Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Daerah;
3. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Produsen Data

Tugas produsen data tingkat daerah, yaitu:

1. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyebarkan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia;
3. Membantu pembina data dalam membina produsen data;
4. Memberikan masukan kepada pembina data dan Kepala Dinas mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
5. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
6. Menyampaikan data dan metadata kepada produsen data.

Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:

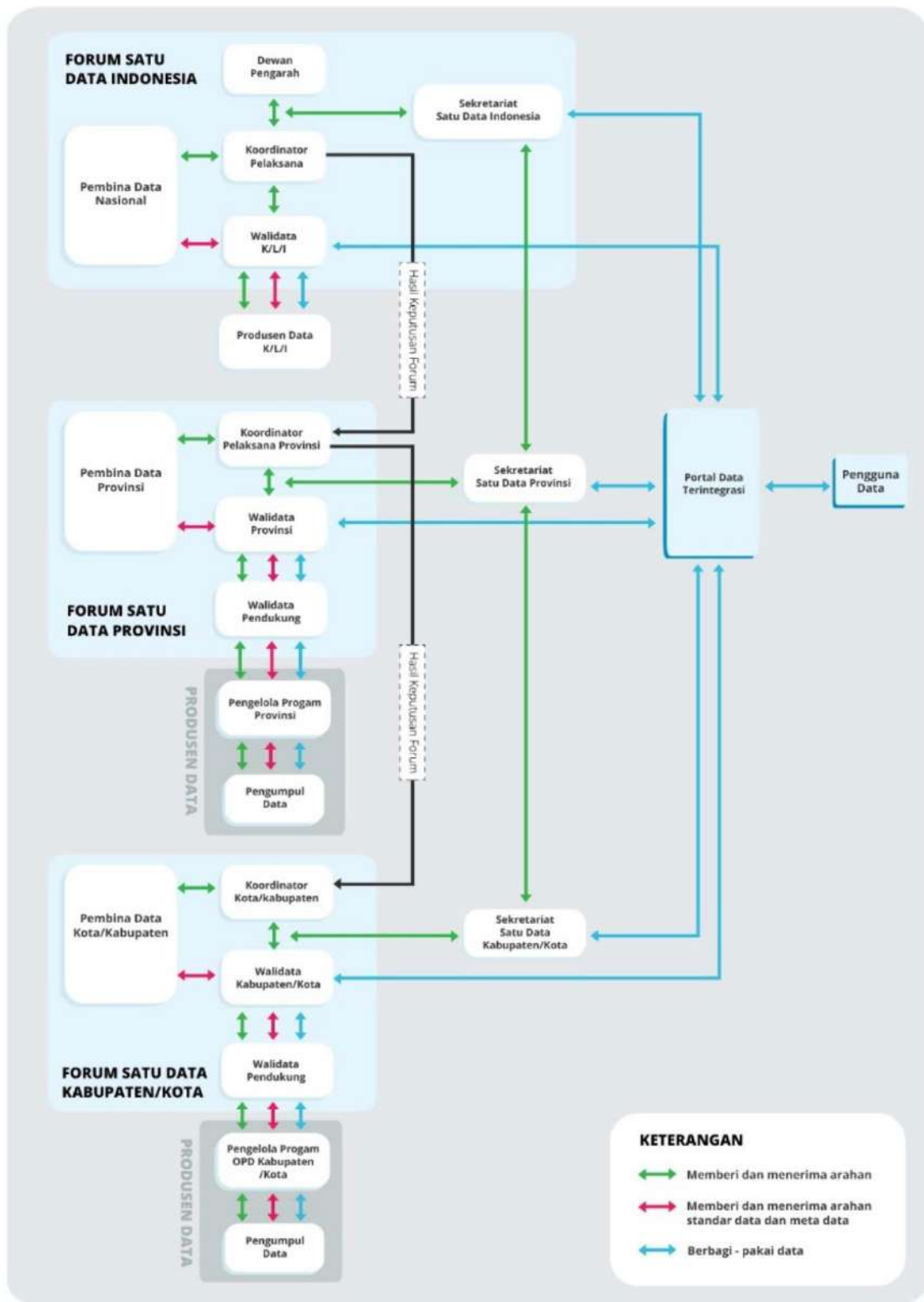
1. Standar data;
2. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
3. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data yang selanjutnya disampaikan kepada produsen data.

G. Pelaksana Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Pelaksana Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilakukan oleh:

1. Pembina data tingkat daerah;
2. Produsen data tingkat daerah;
3. Produsen data pendukung; dan
4. Produsen data tingkat daerah.

Dari panduan dasar untuk implementasi Satu Data Indonesia di atas, maka didapatkan alur koordinasi aktor yang dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 1.2.4.1. Alur Koordinasi Aktor Forum Satu Data

1.2.5. Tata Kelola Layanan

Proses transformasi digital atau tata kelola layanan dalam SPBE merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendigitalkan layanan yang ada untuk mendukung visi, misi dan tujuan SPBE. Layanan SPBE terbagi menjadi 2 kategori yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Berikut merupakan gambaran layanan yang perlu ada dalam SPBE.

Layanan Administrasi Pemerintah	Layanan Publik	
Layanan Perencanaan	Pengaduan Publik	Kesejahteraan Ekonomi
Layanan Penganggaran	Dokumentasi dan Informasi	Pertanian dan Peternakan
Layanan Keuangan	Kependudukan	Ketenagakerjaan
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Perizinan Usaha	Agama
Layanan Kepegawaian	Kebudayaan	Pemukiman
Layanan Kearsipan Dinamis	Pendidikan	Perlindungan Sosial
Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Lingkungan Hidup	Perdagangan
Layanan Pengawasan Internal	Industri	Pariwisata
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Kesehatan	Transportasi
Layanan Kinerja Pegawai	Portal Data	

Gambar 1.2.5.1 Tata Kelola Layanan SPBE

Berdasarkan hasil *assessment* mengenai kondisi *eksisting* layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen, seluruh layanan SPBE telah didukung oleh pemanfaatan aplikasi informasi, hanya saja perlu adanya integrasi antar aplikasi di Pemerintah Kabupaten Sragen, baik integrasi dengan aplikasi internal daerah maupun dengan aplikasi instansi pusat.

1.2.6. Tata Kelola Aplikasi

Secara umum, saat ini Pemerintah Kabupaten Sragen membangun solusi TI dalam beberapa aplikasi yang terpisah / silo, bukan dalam satu kesatuan aplikasi. Hal ini dikarenakan usulan aplikasi biasanya terbagi berdasarkan perangkat daerah, atau berdasarkan proses bisnis yang ada. Hal ini tentunya dapat menimbulkan beberapa masalah ketika terjadi perubahan pada proses bisnis maka perlu menyesuaikan pada beberapa aplikasi terkait. Kedepan, alternatif digitalisasi proses bisnis harus dapat meminimalisir banyaknya aplikasi internal yang ada di Pemerintah Kabupaten Sragen. Sebagai contoh praktik terbaik yaitu adanya sebuah aplikasi layanan kepegawaian milik BKPSDM yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan kepegawaian, seperti: *profiling* pegawai, presensi, izin cuti-sakit, kinerja pegawai, dan lain sebagainya.

Selain itu, masifnya pembangunan aplikasi yang akan dibangun menjadi tantangan di Pemerintah Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode untuk menentukan prioritas aplikasi yang akan diakomodasi. Pemilihan prioritas salah satunya dapat menggunakan *matrix impact-implementation*. Cara membaca tabel prioritas yaitu dimulai dari kanan atas (aplikasi yang mudah diimplementasikan dan memiliki *impact* tinggi) ke bawah, dilanjutkan dengan aplikasi dengan implementasi dan *impact* sedang

menuju ke bagian *impact* tinggi. Aplikasi-aplikasi yang akan dibangun, baik usulan dari perangkat daerah, maupun inisiatif dari Diskominfo dipetakan dalam matriks sebagai berikut.



Gambar 1.2.6.1. *Matrix Easy Implementation*

Pengembangan aplikasi dikategorikan mudah (*easy*) jika:

1. Aplikasi telah ada/pernah digunakan di perangkat daerah lain sebelumnya;
2. Biaya pengembangan aplikasi sama dengan atau lebih kecil dari rata-rata biaya pengembangan aplikasi;
3. *Platform* aplikasi relevan dengan kualifikasi SDM TIK di Diskominfo/perangkat daerah; dan
4. Proses kerja aplikasi tidak terlalu kompleks.

Aplikasi dikategorikan memiliki *impact* yang besar (*high impact*) jika:

1. Aplikasi yang langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (G2C);
2. Aplikasi diusulkan oleh lebih dari satu perangkat daerah;
3. Aplikasi dapat digunakan oleh lebih dari satu perangkat daerah; dan
4. Aplikasi pesanan langsung dari pimpinan (*strategic decision maker*).

Selain menggunakan *matrix impact-implementation* di atas, proses penentuan prioritas pengembangan aplikasi juga dilakukan dengan menggunakan strategi yang digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 1.2.6.2. Bagan Strategi Prioritisasi Pengembangan Aplikasi

Aplikasi yang sifatnya mendukung pelayanan publik dan menyentuh jajaran eksekutif/pimpinan perlu diprioritaskan pengembangannya. Jika hal tersebut telah terpenuhi, prioritas selanjutnya ditujukan untuk aplikasi-aplikasi yang mengefisienkan proses kolaborasi antar perangkat daerah. Terakhir, aplikasi yang diprioritaskan merupakan aplikasi yang sifatnya untuk kalangan bisnis dan investor. Prioritas pengembangan aplikasi tersebut mempertimbangkan kesiapan internal perangkat daerah dari sisi SDM dan anggaran, serta adanya dukungan pimpinan perangkat daerah terhadap pengembangan Layanan SPBE.

Pengembangan aplikasi dapat diinisiasi melalui berbagai kegiatan seperti: 1) penyusunan panduan integrasi antar aplikasi perangkat daerah, 2) pengembangan dan pemeliharaan *platform* integrasi aplikasi (*web services*), 3) pengembangan dan pemeliharaan *data warehouse* dan aplikasi *dashboard*, 4) pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, dan 5) *penetration testing* aplikasi. Secara keseluruhan, kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan berdasarkan perkembangan kesiapan proses bisnis.



Gambar 1.2.6.3. Inisiatif Pengembangan Aplikasi

Sebagai langkah untuk mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi, terdapat 4 (empat) inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penguatan aplikasi *eksisting* untuk meningkatkan reliabilitas aplikasi dan akuntabilitas data;
2. Pengembangan *platform* integrasi berbasis layanan (*services*) guna memastikan tiap perangkat daerah memiliki rujukan untuk interoperabilitas aplikasi maupun data;
3. Kolaborasi bersama dengan inisiatif pengembangan aplikasi di perangkat daerah agar bisa dimanfaatkan pada level nasional; dan
4. Pengembangan *mobile applications* untuk menyajikan layanan publik yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.

1.2.6.1. Prinsip Pengembangan Aplikasi

Prinsip-prinsip pengembangan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Sragen harus meliputi aspek: *Sustainable, Mobile, Agile, Reliability, Transparency* (SMART).

A. *Sustainability*

Aplikasi yang dikembangkan dapat ditingkatkan secara terus menerus (*continuous improvement*) dan berkembang menyesuaikan kebutuhan. Konsep ini dikenal dengan istilah *System Development Life Cycle* (SDLC).

B. Mobile

Aplikasi yang dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Sragen harus dapat meningkatkan fleksibilitas pemanfaatan teknologi dan kemudahan bagi masyarakat.

C. Agile

Pemerintah Kabupaten Sragen cepat tanggap dalam merespon kebutuhan maupun permasalahan dalam implementasi SPBE.

D. Reliability

Aplikasi yang akan dikembangkan harus bisa diandalkan, dalam hal ketepatan proses dan ketepatan informasi.

E. Transparency

Aplikasi yang dikembangkan harus dapat mendukung budaya transparansi di Pemerintah Kabupaten Sragen agar tercipta pelayanan prima kepada masyarakat.

1.2.6.2. Pilihan

Teknologi A. Ragam Teknologi (Bahasa Pemrograman dan Tools)

Terdapat banyak ragam teknologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak saat ini. Beberapa di antaranya termasuk:



Gambar 1.2.6.2.1. Ragam Bahasa Pemrograman

1. Bahasa Pemrograman Umum:

- Python
- Java
- C#
- JavaScript
- Ruby
- Go
- Swift
- Kotlin
- Rust

2. Bahasa Pemrograman untuk Aplikasi *Web*:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- PHP
- Ruby on Rails
- ASP.NET
- Node.js

3. Bahasa Pemrograman untuk Aplikasi Mobile:
 - Java (untuk Android)
 - Swift (untuk iOS)
 - Kotlin (untuk Android)
 - *React Native* (JavaScript *framework* untuk pengembangan aplikasi mobile lintas *platform*)
4. *Relational Database Management System* (RDBMS):
 - Oracle Database
 - Microsoft SQL Server
 - MySQL/MariaDB
 - PostgreSQL.

Berdasarkan hasil survei aplikasi internal di Pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa mayoritas aplikasi merupakan berbasis *web* yang berjumlah 109 aplikasi (94%). Pemilihan *platform web* merupakan hal yang umum mengingat *platform* ini dapat diakses dari *personal* komputer maupun *smartphone* sehingga memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasi dalam mengakses sebuah layanan pemerintah.

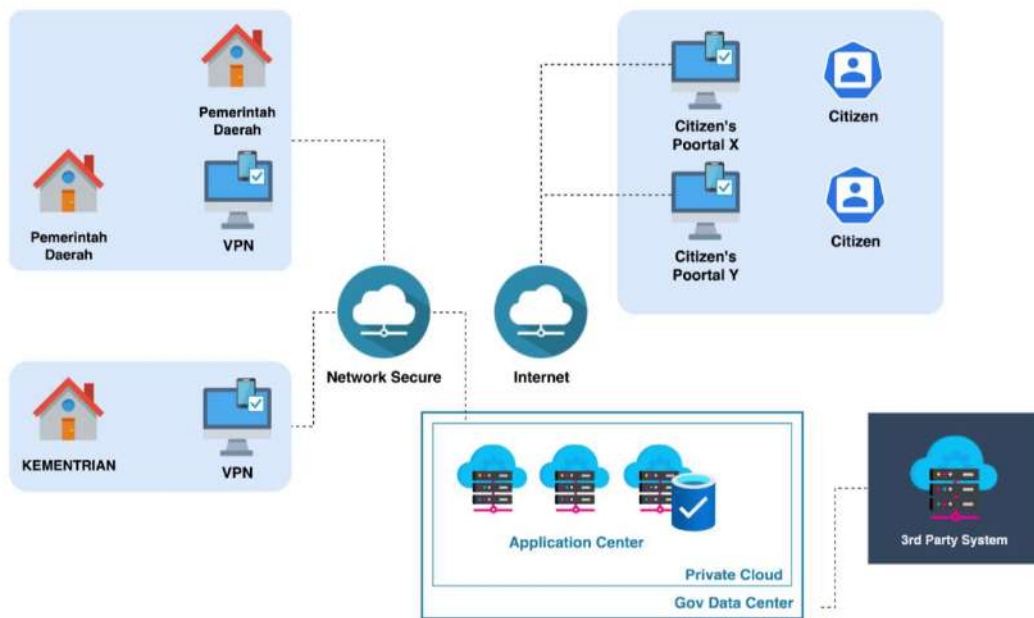
Aplikasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, tentunya akan terus diarahkan dan diproyeksikan menjadi sebuah aplikasi yang mampu mendukung bisnis proses dasar dan pendukung yang ada. Teknologi yang terus berkembang dapat menjawab tantangan kompleksitas bisnis proses agar lebih efisien dengan adanya otomasi. Namun dibalik pesatnya perkembangan teknologi terdapat tantangan yang dihadapi yaitu banyaknya ragam teknologi yang ada perlu didukung dengan SDM yang menguasai teknologi tersebut. Melihat kondisi riil aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Sragen saat ini terhadap penggunaan teknologi yang marak digunakan dan kompetensi programmer yang ada maka perlu ditetapkan standar teknologi yang dapat digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Tabel 1.2.6.2.1. Pilihan Teknologi Pemerintah Kabupaten Sragen

No	Platform	Teknologi
1	<i>Front End Web</i>	HTML, CSS, Js, Vue JS
	<i>Back End Web</i>	PHP
2	<i>Front End Mobile</i>	Flutter, Kotlin
	<i>Back End Mobile</i>	PHP
3	<i>Desktop</i>	C#, Java
4	RDBMS	MySQL, PostgreSQL
5	<i>Interoperability</i>	JSON

B. Integrasi Data dengan Platform Interoperabilitas

WSO2 merupakan *platform* interoperabilitas berlisensi terbuka (*open source*) yang mendukung berbagai jenis layanan integrasi. WSO2 menawarkan keuntungan *platform middleware* berbasis *Service Oriented Architecture* (SOA) yang mudah untuk diintegrasikan dan mendukung layanan berbasis *cloud* serta menyediakan *helpdesk* di dalam produknya. Republik Moldova merupakan salah satu negara yang telah menerapkan WSO2 di dalam penyelenggaraan layanan pemerintah berbasis e-Government guna keperluan *identity management*, *authentication* dan *authorization transaction* untuk berbagai *electronic devices* dan *mobile apps*.



Gambar 1.2.6.2.3. Integrasi Data dengan Platform Interoperabilitas

Gambar di atas mengilustrasikan integrasi data dan pertukaran informasi antar perangkat daerah di dalam mengelola layanannya melalui *secure network* dan menyediakan media penyampaian informasi publik melalui portal masyarakat berdasarkan pusat data pemerintahan.

1.2.7. Tata Kelola Infrastruktur

Infrastruktur SPBE terdiri dari Pusat Data Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pusat Data Kementerian atau Lembaga dapat menjadi Pusat Data Nasional jika memenuhi SNI: 9799-1: 2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data dan SNI: 9799-2: 2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data. Pada Pusat Data terdapat beberapa komponen antara lain *pusat data*, *storage*, perangkat pendukung pusat data, dan teknologi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi.

1.2.7.1. Pusat Data



Gambar 1.2.7.1.1. SNI No: 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

A. SNI No: 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi teknis pusat data.

1. Spesifikasi gedung

Pemilihan lokasi gedung pusat data tidak boleh terletak di wilayah rawan bencana. Referensi wilayah rawan bencana dapat mengacu pada Katalog BMKG melalui

<https://cdn.bmkg.go.id/Web/Katalog-Gempabumi-Signifikan-dan-Merusak-1821-2018.pdf> serta Dokumen Risiko Bencana Indonesia (RBI) dari BNPB melalui <https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-rbi-1.pdf>.

- Ketahanan gempa;
- Ketahanan beban gempa;
- Pembagian ruangan;
- Ketahanan material gedung; dan
- Sistem monitoring gedung.

2. Spesifikasi sistem kelistrikan:

- Catu daya listrik;
- Sistem kelistrikan berkesinambungan;
- Persediaan bahan bakar;
- *Uninterruptible Power Supply* (UPS);
- Analisis sistem listrik;
- Konstruksi panel listrik;
- Jalur kabel listrik;
- Penumaian; dan
- Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (*Power Usage Effectiveness*).

3. Spesifikasi sistem pendinginan:

- Spesifikasi sistem jaringan data;
- Spesifikasi sistem pemadam kebakaran;
- Spesifikasi sistem monitoring lingkungan pusat data; dan
- Spesifikasi sistem keamanan akses fisik.

B. SNI-No: 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat data.



Gambar 1.2.7.1.2. SNI-No 8799-1:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data

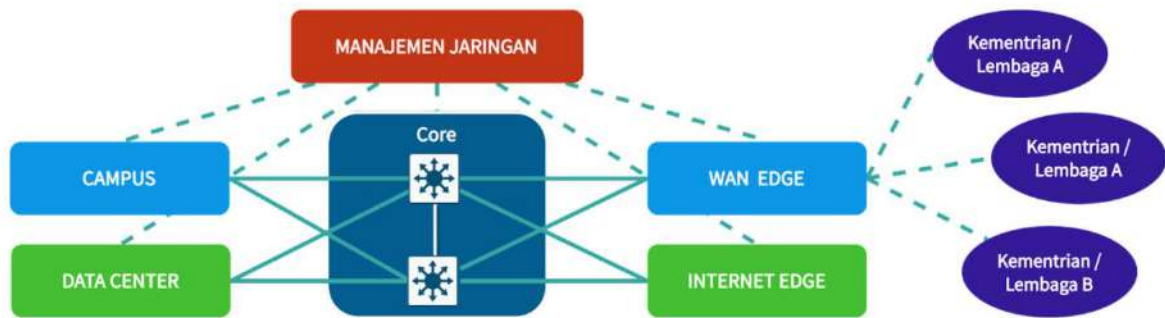
1. Perencanaan
 - Analisis kebutuhan
 - Manajemen risiko dan kesesuaian
2. Operasional
 - Organisasi penyelenggara pusat data
 - Sistem manajemen layanan operasional pusat data
 - Infrastruktur
3. Manajemen layanan
 - Sistem manajemen layanan tingkat lanjut (STML)
 - Manajemen keselamatan
 - Manajemen keamanan
 - Manajemen proyek
4. Manajemen SDM
 - Pengelolaan kompetensi
 - Pelatihan
 - Manajemen kinerja
5. *Monitoring*, pelaporan dan pengendalian
6. Manajemen keberlangsungan
 - Manajemen keberlangsungan kegiatan
 - Manajemen keberlangsungan lingkungan

C. SNI No: 8799-3:2019 beserta amandemennya tentang Panduan Audit Pusat Data

1. Program audit.
2. Kegiatan audit.
3. Penyiapan, pengesahan dan penyampaian laporan audit.
4. Kompetensi auditor.

1.2.7.2. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan intra pemerintah adalah jaringan yang digunakan oleh pemerintah untuk berbagi informasi dan komunikasi antar *stakeholder*. Jaringan ini umumnya tersedia untuk layanan basis data, berbagi dokumen, dan berbagi informasi dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya. Jaringan intra pemerintah juga dapat digunakan untuk mengatur akses ke layanan administratif, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan.

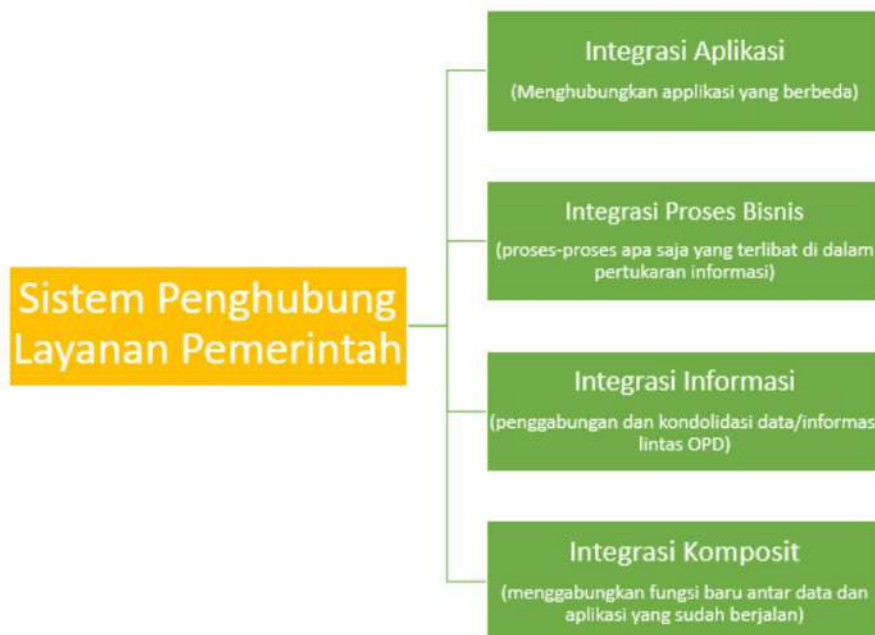


Gambar 1.2.7.2.1. Arsitektur Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Sragen

Dari gambar arsitektur di atas diperoleh informasi bahwa untuk koneksi jaringan intra pemerintah antara jaringan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah Provinsi, Kota/Kabupaten melalui *WAN Edge* dengan menggunakan koneksi yang aman dan terenkripsi. *WAN Edge* didukung oleh perangkat *router WAN* dan *Next-Generation Firewall WAN*.

1.2.7.3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah sistem yang menyediakan akses ke berbagai layanan pemerintah dari satu tempat. Sistem ini dapat berupa portal layanan pemerintah atau antarmuka berbasis *web* yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, seperti pelayanan fiskal, sosial, pengawasan, dan lainnya. Sistem ini menyediakan berbagai fitur seperti verifikasi, pelaporan, dan pemantauan untuk memastikan bahwa layanan yang ditawarkan oleh pemerintah dapat diakses oleh masyarakat,

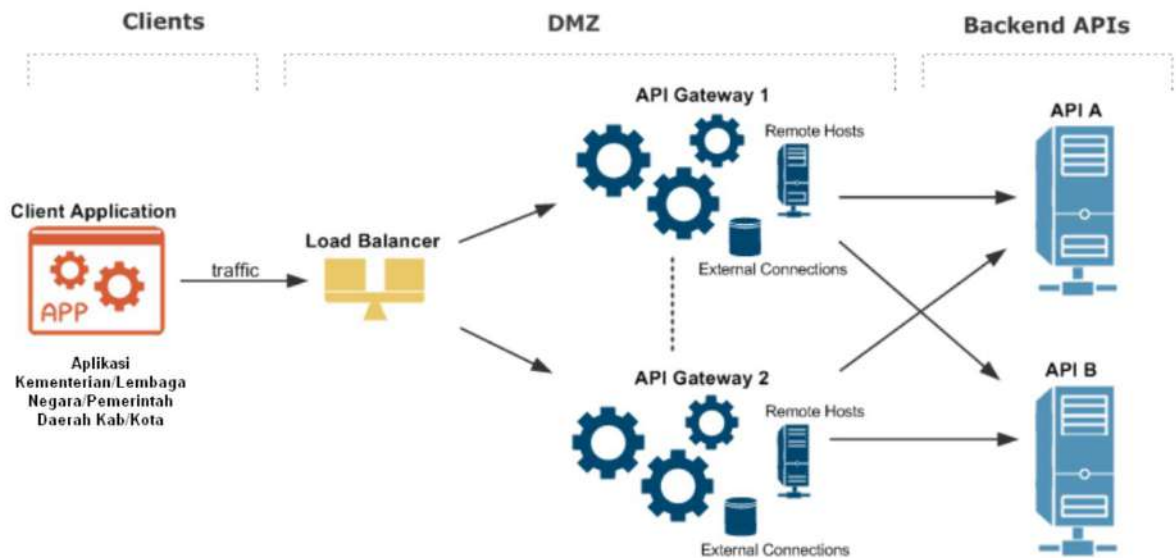


Gambar 1.2.7.3.1. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

A. *Application Programming Interface*

(API) API adalah sekumpulan kode pemrograman yang membantu *developer* melakukan integrasi data antara dua aplikasi berbeda secara bersamaan. API memungkinkan *developer* untuk membuat aplikasi dengan berbagai elemen seperti

function, protocols dan *tools* lain. API dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman.



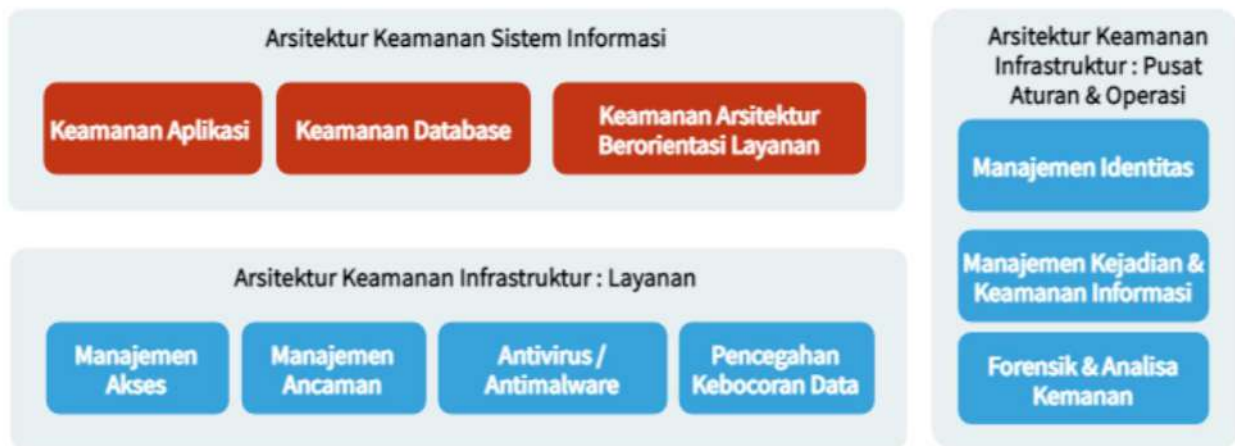
Gambar 1.2.7.3.2. Arsitektur API Gateway dengan konfigurasi *High Availability*

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar Arsitektur API Gateway diatas dengan konfigurasi *High Availability* (HA) sebagai berikut.

1. Aplikasi klien eksternal membuat panggilan masuk melalui protokol pengangkutan pesan tertentu (misalnya, *HTTP*, *JMS*, atau *FTP*) ke penyeimbang beban.
2. Penyeimbang beban melakukan pemeriksaan pada setiap *instance* API Gateway, dan mendistribusikan beban pesan ke *port* di setiap *instance* API Gateway (*default*-nya adalah 8080).
3. Setiap *instance* API Gateway harus memiliki Koneksi Eksternal ke sistem pihak ketiga. Termasuk *database* seperti *Oracle* dan *MySQL*, dan *Authentication Repositories* seperti *CA SiteMinder*, *Oracle Access Manager*, pusat data *Local Directory Access Protocol (LDAP)*, dan sebagainya.
4. Setiap *instance* API Gateway direplikasi menggunakan sistem *caching* berdasarkan *Ehcache*.
5. Setiap *instance* API Gateway memiliki antarmuka *Host Jarak Jauh* yang menentukan koneksi keluar sistem API *backend*.
6. Setiap *instance* API Gateway berisi *database Apache Cassandra* yang disematkan dan digunakan oleh fitur-fitur tertentu untuk penyimpanan data persisten, dimana setiap *instance* API Gateway memiliki kemampuan HA-nya sendiri.
7. Setiap *instance* API Gateway berisi sistem pesan *Apache ActiveMQ* tertanam, yang dapat dikonfigurasi untuk HA dalam sistem file bersama.
8. Setiap API *backend* juga direplikasi untuk memastikan tidak ada kegagalan di tingkat pusat data.

9. *Trace* manajemen yang digunakan oleh *Admin Node Manager*, *API Gateway Manager*, dan *Policy Studio* ditangani secara terpisah di *port* yang berbeda (*default* 8090).

1.2.8. Tata Kelola Keamanan



Gambar 1.2.8.1 Keamanan SPBE

Tata Kelola Keamanan SPBE terdapat beberapa komponen yang mencakup didalamnya, seperti Arsitektur Keamanan Sistem Informasi yang terdiri atas keamanan aplikasi, keamanan *database*, dan keamanan arsitektur berorientasi layanan. Selain itu, juga terdapat arsitektur keamanan infrastruktur: layanan yang didalamnya mencakup manajemen akses, manajemen ancaman, antivirus/antimalware dan pencegahan kebocoran data.

1.2.8.1. Arsitektur Keamanan Sistem Informasi

Terdiri dari keamanan aplikasi, keamanan *database*, dan keamanan arsitektur berorientasi layanan. Setiap data dan informasi yang dikelola oleh satuan kerja wajib dilakukan *backup* secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi. Pusat Data dan Informasi melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur. Tata cara *backup* dan *restore* data dan informasi telah tertuang dalam SOP dan ditetapkan. Kepastian keamanan data dan informasi, perlu dilakukan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

1.2.8.2. Arsitektur Keamanan Infrastruktur

Layanan

Meliputi manajemen akses, manajemen ancaman, antivirus/anti malware, dan pencegah kebocoran data. Dalam memastikan keamanan Infrastruktur SPBE, dilakukan audit keamanan Infrastruktur SPBE. Audit keamanan Infrastruktur SPBE dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun dengan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

1.2.8.3. Arsitektur Keamanan Infrastruktur: Aturan Pusat dan Operasi

Terdiri dari manajemen identitas, manajemen kejadian dan keamanan informasi, dan forensik dan analisa keamanan. Pelaksanaan terhadap Keamanan SPBE mencakup:

1. Penjaminan kerahasiaan.
2. Penjaminan keutuhan.
3. Penjaminan ketersediaan.
4. Penjaminan kenirsangkalan.

Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

1.3. Manajemen SPBE

Perlu adanya manajemen dalam implementasi SPBE dan mengakomodir proses operasional SPBE yang mengacu dari Perpres 95/2018. Secara keseluruhan dalam manajemen SPBE terdapat beberapa lingkup yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.3.1. Lingkup Manajemen SPBE

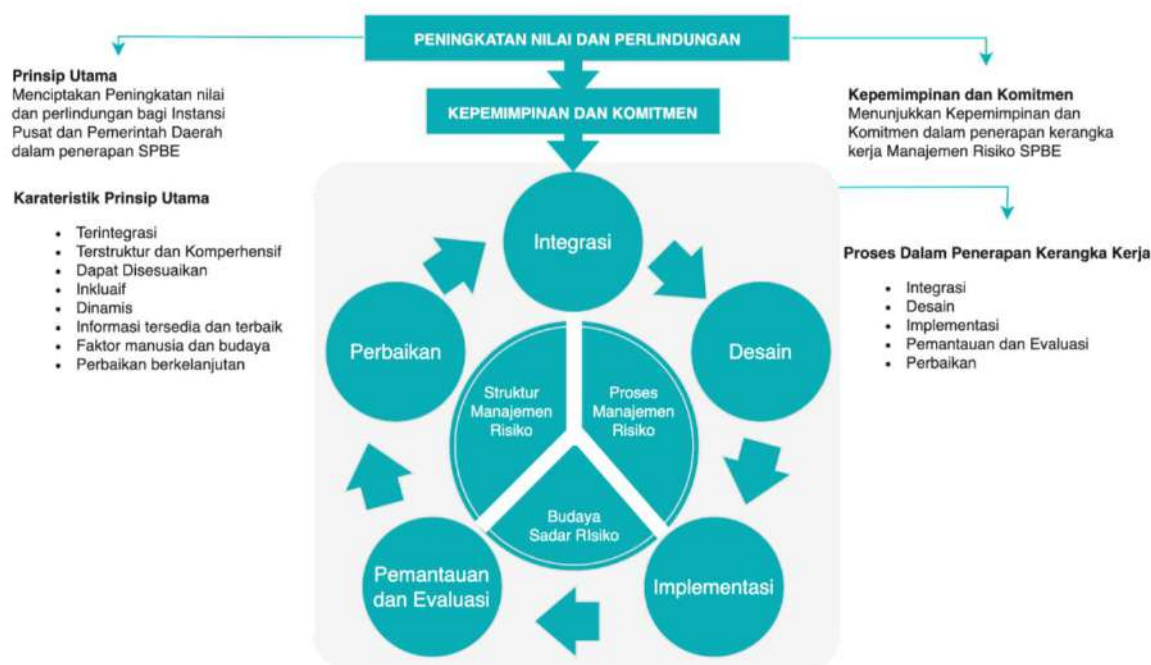
No	Lingkup	Referensi	Kegiatan	Penanggung Jawab
a.	Manajemen Risiko	PermenpanRB 05/2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, International Standardization Organization (ISO) 31000 tentang <i>Risk Management</i> , 27005 tentang <i>Information technology– Security techniques – Information security risk management</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan komite manajemen risiko 2. Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE 3. Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE 4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko 5. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat 6. Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, fgd 7. Penetapan konteks risiko SPBE 8. Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak 9. Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE 10. Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya 11. Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental 	Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika
b.	Manajemen Keamanan Informasi	ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim keamanan informasi 2. Penyusunan SOP keamanan informasi mengacu pada Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 3. Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi 4. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi 	Dinas Komunikasi dan Informatika
c.	Manajemen Data	Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, Permen PPN 16/2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SNI 8799:2019 tentang Pusat Data, International	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim satu data 2. Penyusunan pedoman manajemen data 3. Pembaharuan arsitektur data 4. Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja 5. Pemeriksaan pemenuhan data sektoral 6. Penyebarluasan data sektoral 7. Pembaruan data sektoral secara berkala 8. Penyimpanan data pada portal open data 9. Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data 	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah

No	Lingkup	Referensi	Kegiatan	Penanggung Jawab
		Standardization Organization (ISO) 11179 tentang <i>Metadata Registry</i>		
d.	Manajemen Aset TIK	International Standardization Organization (ISO) 19770-5 tentang Sistem Manajemen Aset TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur) 2. Penyusunan SOP perencanaan aset TIK 3. Penyusunan SOP pengadaan aset TIK 4. Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK 	Dinas Komunikasi dan Informatika
e.	Manajemen SDM	PermenPANRB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, <i>Skills Framework for the Information Age (SFIA) Framework</i> , ISO 30400 tentang <i>Human Resource Management</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK 2. Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK 3. Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK 	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, dan Dinas Komunikasi dan Informatika
f.	Manajemen Pengetahuan	International Standardization Organization (ISO) 30401 tentang <i>Knowledge Management System</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan komite manajemen pengetahuan 2. Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP manajemen pengetahuan) 3. Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi 4. Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan 	Dinas Komunikasi dan Informatika
g.	Manajemen Perubahan	<i>Change Management (ITIL)</i> COBIT 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan komite manajemen perubahan 2. Penyusunan pedoman/ SOP manajemen perubahan SPBE 3. Penyusunan form log manajemen perubahan 4. Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan 	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi
h.	Manajemen Layanan	<i>Information Technology Infrastructure Library (ITIL)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim helpdesk TIK 2. Pengembangan aplikasi ticketing layanan TIK 3. Evaluasi & perbaikan kinerja tim helpdesk TIK 	Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3.1. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko SPBE merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka membangun pondasi kebijakan manajemen SPBE yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan manajemen risiko SPBE pada instansi pemerintah. Manajemen risiko SPBE mengidentifikasi, memahami, mengukur, mengelola, dan memantau risiko yang dihadapi dalam implementasi SPBE. Selain itu, dalam manajemen risiko juga dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, menilai tingkat risiko, mencari cara untuk mengurangi risiko, serta mengawasi risiko secara terus-menerus untuk memastikan bahwa

kegiatan yang dilakukan sudah sesuai. Agar proses dan pengukuran dalam Manajemen Risiko SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan tata kelola Manajemen Risiko SPBE yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari struktur Manajememen Risiko SPBE.



Gambar 1.3.1.1. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen risiko saat ini telah menjadi rujukan utama dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini bisa berupa upaya dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terkait SPBE secara terus-menerus dalam tingkat toleransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Mengacu pada Permen PAN RB 05/2020 tentang pedoman Manajemen Risiko SPBE, tujuan dari Manajemen Risiko SPBE adalah :

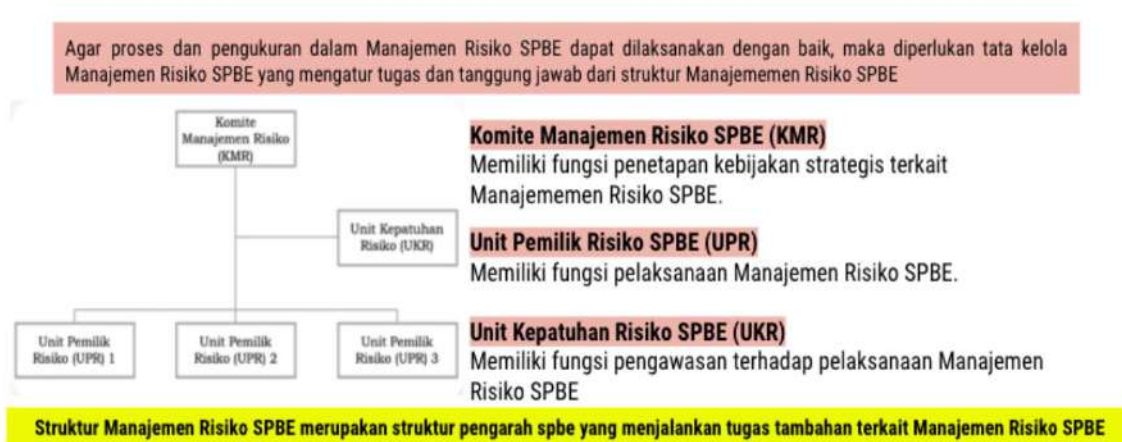
1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.
2. Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai di Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.
3. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Instansi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.
4. Meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE.
5. Menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.

Manfaat dari penerapan Manajemen Risiko SPBE dalam penerapan SPBE adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di Instansi Pemerintah Daerah.
2. Mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Daerah.

3. Meningkatkan kinerja pemerintahan di Instansi Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Pemerintah Daerah.
5. Mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di Pemerintah Daerah.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko SPBE, Pemerintah Kabupaten Sragen perlu menyusun struktur manajemen risiko SPBE sebagaimana yang telah tertuang dalam PermenpanRB No. 05/2020 dan dijelaskan sebagai berikut :



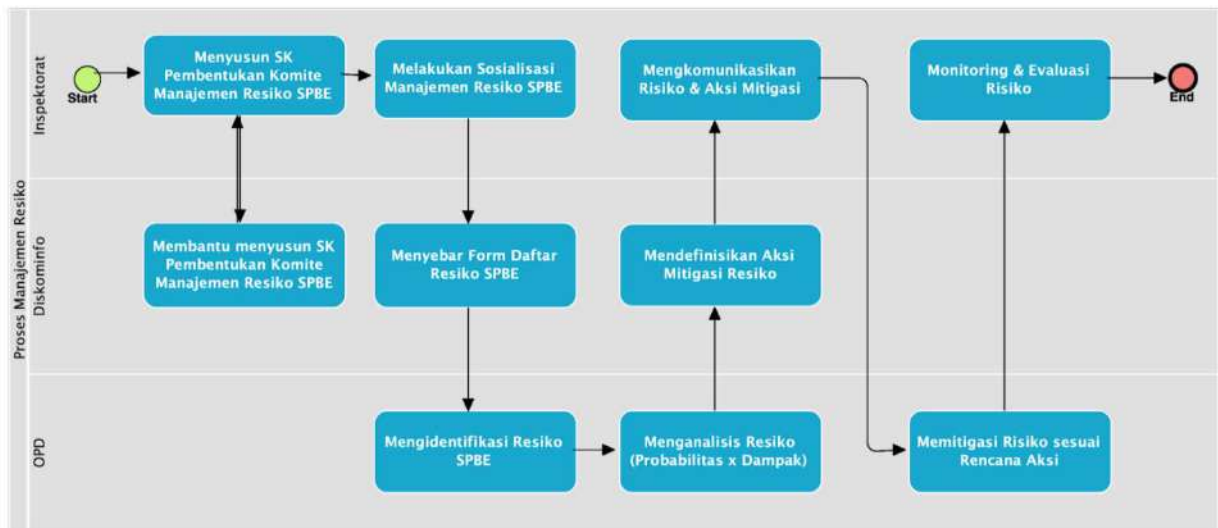
Gambar 1.3.1.2. Pedoman Struktur Manajemen Risiko SPBE Daerah

Mengacu pada gambar di atas maka susunan untuk struktur manajemen risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1.3.1.3. Struktur Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen

Merujuk pada *best practices* yang ada dalam PermenpanRB 05/2020 terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya menjalankan manajemen risiko SPBE yang dijelaskan sebagai berikut :



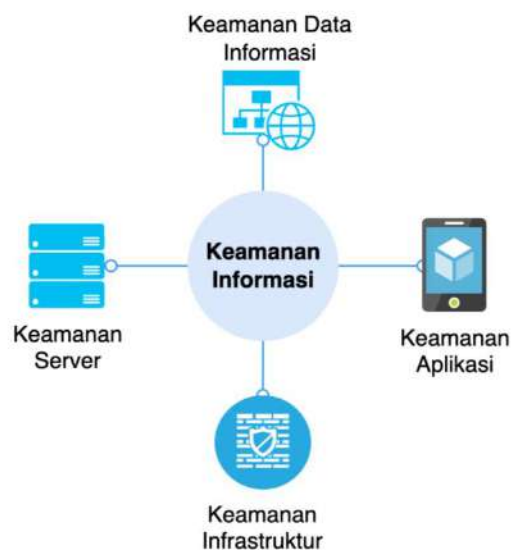
Gambar 1.3.1.4. Alur Proses Manajemen Risiko SPBE

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun SOP dan dokumen terkait manajemen risiko dengan lingkup sebagai berikut :

1. SOP Manajemen Risiko SPBE oleh setiap perangkat daerah; dan
2. Kajian Manajemen Risiko.

1.3.2. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi merupakan kegiatan pengelolaan yang menyediakan perlindungan keamanan informasi pada SPBE. Manajemen keamanan informasi termasuk dalam identifikasi, penetapan, implementasi, dan pemeliharaan kontrol dan prosedur keamanan yang menyediakan perlindungan terhadap penggunaan, distribusi, dan perlindungan informasi yang tersimpan dalam SPBE. Secara umum, ruang lingkup dalam manajemen keamanan informasi meliputi: data/informasi SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan jaringan SPBE di setiap instansi pemerintah.



Gambar 1.3.2.1. Domain Keamanan Informasi

Secara umum terdapat empat domain keamanan SPBE yaitu :

1. Keamanan Data/Informasi

Keamanan data atau informasi adalah proses memastikan bahwa data atau informasi yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan melalui sistem informasi dapat diakses, dirahasiakan, dan digunakan hanya oleh orang-orang yang berwenang. Tujuannya adalah untuk melindungi data atau informasi dari ancaman keamanan seperti kebocoran, peningkatan, pencurian, dan sabotase. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara termasuk penyimpanan data, enkripsi data dan akses yang diatur.

2. Keamanan Aplikasi

Seperangkat prinsip, standar, prosedur, dan operasi yang digunakan untuk melindungi data dan informasi pada aplikasi dari ancaman keamanan. Kontrol keamanan aplikasi bertujuan untuk mencegah atau mereduksi risiko. Secara umum, kontrol keamanan aplikasi, meliputi: enkripsi data, *authentication, authorization, access control, logging & monitoring, and code review & testing*.

3. Keamanan Jaringan

Suatu proses yang dimaksudkan untuk melindungi jaringan komputer dari serangan yang berbahaya dengan mengatur akses ke sistem informasi dan jaringan komputer. Secara umum, *software* keamanan jaringan digunakan untuk melakukan autentikasi *user* dan pengguna yang akan mengakses jaringan melalui sistem enkripsi.

4. Keamanan Infrastruktur

Keamanan infrastruktur mengacu pada *best practices* COBIT 2019. Berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen keamanan informasi yaitu:

- a. Menentukan ruang lingkup dan batas-batas manajemen keamanan informasi dalam hal karakteristik organisasi, lokasi, aset dan teknologi.
- b. Menetapkan manajemen keamanan informasi sesuai dengan kebijakan instansi dan konteks dimana instansi beroperasi.
- c. Menyelaraskan manajemen keamanan informasi dengan pendekatan organisasional secara keseluruhan pada manajemen keamanan.
- d. Mendapatkan otorisasi dari pejabat struktural untuk menerapkan dan mengoperasikan atau mengubah manajemen keamanan informasi.
- e. Mempersiapkan dan memelihara pernyataan penerapan yang menggambarkan ruang lingkup manajemen keamanan informasi.
- f. Menetapkan serta mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.
- g. Mengkomunikasikan pendekatan manajemen keamanan informasi.

1.3.2.1. Urgensi keamanan

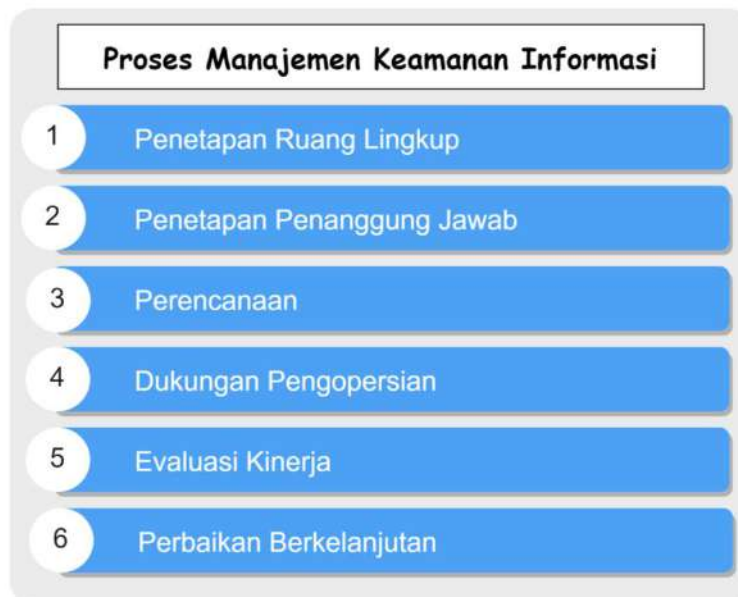


Gambar 1.3.2.1.1. Manajemen Keamanan Informasi

Setiap instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah diwajibkan menyelenggarakan SPBE. Transformasi digital pada setiap layanan menjadi salah satu bentuk penerapan SPBE oleh pemerintah. Namun demikian, penyelenggaraan SPBE tidak terlepas dari berbagai tantangan baru salah satunya pada keamanan informasi. Beberapa masalah yang muncul dalam keamanan informasi antara lain: tingginya risiko penyerangan siber dan minimnya penerapan keamanan SPBE yang didasari pada rendahnya kemampuan SDM pemerintah dalam menangani keamanan informasi SPBE. Berdasarkan kondisi yang ada, BSSN menyusun strategi dan menetapkan kebijakan manajemen serta standar teknis terkait keamanan SPBE agar dapat menjadi panduan dan acuan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan keamanan SPBE. Dengan adanya kebijakan manajemen keamanan SPBE menjadikan teknologi yang digunakan lebih aman serta selaras dengan proses bisnis sesuai dengan persyaratan tugas pekerjaan.

1.3.2.2. Manajemen Keamanan SPBE

Dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat pedoman dalam melakukan manajemen keamanan informasi SPBE. Manajemen keamanan informasi SPBE dilakukan oleh instansi pusat dan daerah. Adapun proses manajemen keamanan informasi meliputi:



Gambar 1.3.2.2.1. Proses Manajemen Keamanan Informasi

1. Penetapan ruang lingkup

Penetapan ruang lingkup manajemen keamanan SPBE dilakukan oleh setiap pimpinan instansi pusat atau Kepala Daerah. Dalam menetapkan ruang lingkup keamanan *cyber* dapat dilakukan berdasarkan 2 hal yaitu isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi dan isu eksternal keamanan informasi SPBE. Isu internal keamanan informasi SPBE adalah area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE. Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE setidaknya meliputi:

- Data dan informasi SPBE;
- Aplikasi SPBE;
- Aset Infrastruktur SPBE; dan
- Kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.

Sedangkan isu eksternal menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan penanggung jawab

Penetapan penanggung jawab pada manajemen keamanan SPBE dilakukan oleh kepala daerah. Penanggung jawab Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi dalam Tim Koordinasi SPBE adalah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya, Kelompok Kerja Manajemen keamanan informasi akan menetapkan pelaksana teknis keamanan SPBE yang terdiri dari:

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan Informasi TIK; dan
- b. Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.

3. Perencanaan

Perencanaan dalam manajemen keamanan SPBE dilakukan oleh pelaksana teknis keamanan SPBE. Tahap perencanaan terdiri dari dua bagian yaitu program kerja

keamanan SPBE dan target realisasi program kerja keamanan SPBE. Adapun program kerja yang dilakukan meliputi:

- a. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE



Gambar 1.3.2.2.2. Contoh Sosialisasi dan Pelatihan

Gambar 1.2.2.4. merupakan salah satu contoh dari sosialisasi atau *spread awareness* yang dilakukan di pemda lain sebagai bentuk dari manajemen keamanan informasi melalui berbagai kegiatan seperti: informasi tips menghindari serangan *man in the middle attack* di *wifi public* dan tips menghindari penipuan atau *scam* melalui sosial media.

- b. Pengukuran Nilai Kerentanan Keamanan SPBE.

Adapun tahapan pengukuran nilai kerentanan keamanan SPBE dapat dilakukan dengan cara:

- Menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur;
- Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; dan
- Mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.

- c. Peningkatan Keamanan SPBE

Adapun upaya dalam peningkatan keamanan SPBE dapat dilakukan dengan cara:

- Menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE; dan
- Menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen keamanan informasi dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Akses Ruang pusat data.
2. SOP Backup dan Restore Data.

3. SOP Hak Akses TIK.
 4. SOP Penanganan Gangguan TIK.
 5. SOP Pengajuan Jaringan Baru.
 6. SOP Pengembangan Sistem Informasi.
 7. SOP Penitipan dan Pengembalian pusat data.
 8. SOP Evaluasi Keamanan SPBE.
- d. Penanganan Insiden Keamanan SPBE
1. Mengidentifikasi sumber serangan;
 2. Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
 3. Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
 4. Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi; dan
 5. Memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.



Gambar 1.3.2.2.3. Alur Proses Penanganan Insiden SPBE

- e. Audit Keamanan SPBE.
- Audit keamanan SPBE perlu dilakukan 2 tahun sekali sesuai dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021 tentang manajemen keamanan informasi, sedangkan untuk target realisasi program kerja ditetapkan oleh masing-masing instansi.
4. Dukungan Pengoperasian

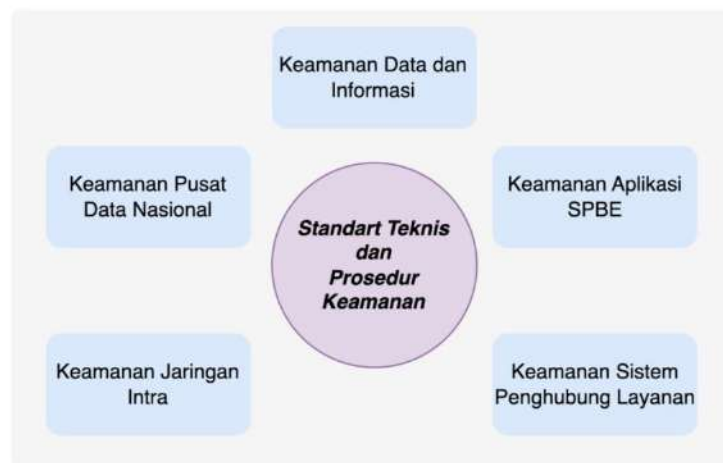
Dukungan pengoperasian dalam kelompok kerja manajemen keamanan informasi harus menyediakan SDM yang berkompeten dan anggaran keamanan SPBE. Kelompok kerja manajemen keamanan informasi harus menyediakan SDM keamanan SPBE yang memiliki kompetensi dalam bidang infrastruktur TIK dan juga keamanan aplikasi. Diperlukan pelatihan atau bimtek untuk SDM yang belum kompeten. Selain itu, anggaran keamanan SPBE yang akan disediakan harus didasarkan pada perencanaan yang telah disusun.
 5. Evaluasi Kinerja

Evaluasi dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun oleh kelompok kerja manajemen keamanan informasi. Evaluasi kinerja keamanan SPBE dapat mencakup hal-hal berikut ini.

 - a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan keamanan SPBE;

- b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
 - c. memformulasi pelaksanaan keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
 - d. menganalisis efektifitas pelaksanaan keamanan SPBE; dan
 - e. mendukung dan merealisasikan program audit keamanan SPBE.
6. Perbaikan Berkelanjutan
- Perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh pelaksana teknis keamanan SPBE. Perbaikan berkelanjutan merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja. Perbaikan berkelanjutan mencakup:
- a. solusi permasalahan dalam pelaksanaan keamanan SPBE; dan
 - b. Perbaikan pelaksanaan keamanan SPBE secara periodik.

Setiap instansi pemerintahan baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan SPBE termasuk didalamnya dalam hal keamanan informasi. Dalam penerapannya, keamanan SPBE juga harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang diatur melalui Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Gambar 1.3.2.2.4. Standar Teknis dan prosedur keamanan

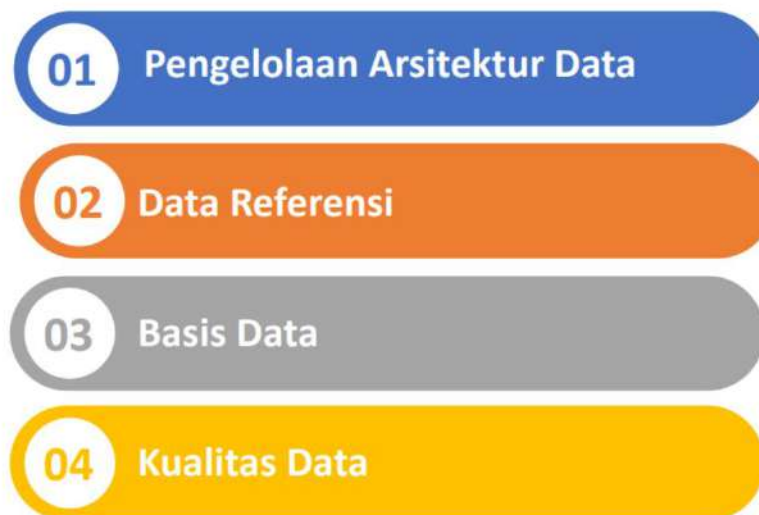
1.3.3. Manajemen Data

Manajemen data merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Manajemen data SPBE memungkinkan pemerintah untuk menyimpan, menganalisis, dan memanfaatkan data sehingga memudahkan pemerintah untuk mengakses dan mengelola data secara efektif, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Manajemen data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Adapun sasaran manajemen data SPBE bagi instansi pusat maupun pemerintah daerah yaitu :

1. memahami kebutuhan data;
2. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas data;
3. meningkatkan kualitas data secara terus menerus; dan
4. memaksimalkan penggunaan data dan memberikan hasil yang efektif.

Tujuan Satu Data Indonesia untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian manajemen data SPBE. Secara umum, penyelenggaraan Satu Data Indonesia merupakan bagian dari penyelenggaraan manajemen data SPBE. Hal tersebut tertuang dalam Permen PPN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Pusat.

Menurut Permen PPN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Pusat, terdapat empat komponen utama yang harus dilakukan dalam melakukan manajemen data khususnya manajemen data SPBE. Komponen tersebut adalah manajemen arsitektur data, manajemen data induk dan data referensi, manajemen basis data, dan manajemen kualitas data.



Gambar 1.3.3.1. Manajemen Basis Data

1. Manajemen arsitektur data

Arsitektur data didefinisikan sebagai model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE. Sedangkan, manajemen arsitektur data merupakan rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen arsitektur data. Manajemen arsitektur data memungkinkan pemerintah untuk membangun dan mengelola data untuk mengakses informasi, serta mengintegrasikan data dan informasi antar aplikasi yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang bermanfaat bagi warga. Selain itu, manajemen arsitektur data juga bermanfaat dalam mengelola pemeliharaan dan peningkatan serta keamanan data.

Arsitektur data sangat penting untuk manajemen data. Data pemerintahan perlu direpresentasikan pada tingkat abstraksi yang berbeda sehingga mudah dipahami dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Artefak Arsitektur Data mencakup spesifikasi yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang ada, menentukan

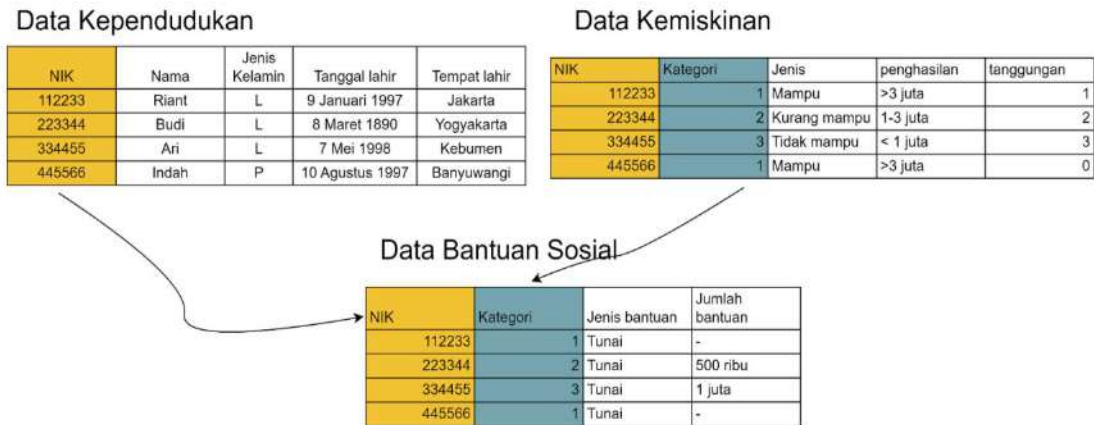
persyaratan data, memandu integrasi data, dan mengontrol aset data seperti yang dituangkan dalam strategi data. Arsitektur Data organisasi dijelaskan melalui kumpulan dokumen desain induk yang terintegrasi pada berbagai tingkat abstraksi, termasuk standar yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diatur, digunakan, dan dihapus. Arsitektur data juga diklasifikasikan berdasarkan deskripsi semua wadah dan jalur yang diambil data melalui sistem Pemerintah Daerah.

Manajemen arsitektur data terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi data (format dan struktur baku untuk data induk dan referensi) dan ketentuan data (tata perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi data). Tujuan manajemen arsitektur data untuk menyediakan data berkualitas tinggi, mengidentifikasi, merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data. Kegiatan manajemen arsitektur data meliputi penyusunan dan penetapan, penyebarluasan, dan review.

2. Manajemen Data referensi

Data referensi merupakan komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain. Lebih jauh, manajemen data referensi didefinisikan sebagai rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data referensi. Manajemen data referensi SPBE memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang relevan, memperbarui informasi yang ada, dan berbagi informasi secara efisien. Data referensi SPBE juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan operasional pemerintahan. Data referensi dapat mencakup hal-hal seperti undang-undang, peraturan, program pemerintah, dan lain sebagainya.

Tujuan manajemen data referensi adalah menyediakan data yang sesuai struktur dan format baku, dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan, serta menghindari duplikasi. Kegiatan dalam manajemen data referensi, meliputi: perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pembaruan data.



Gambar 1.3.3.2. Ilustrasi Manajemen Data

Gambar di atas merupakan contoh dari data bantuan sosial. Data bantuan sosial diperoleh dari data kependudukan dan data kemiskinan. Data kependudukan dan data kemiskinan merupakan data referensi yang diambil oleh data bantuan sosial. Data kependudukan untuk mengetahui data diri penerima bantuan sosial dan data kemiskinan untuk mengetahui kategori dan penghasilan penerima bantuan sosial. Adapun beberapa Kegiatan manajemen data yaitu :

1. Memenuhi persyaratan data Kabupaten Sragen. Beberapa area dalam Pemerintah Kabupaten Sragen memerlukan akses ke kumpulan data yang sama, dengan keyakinan bahwa kumpulan data tersebut lengkap, terkini, dan konsisten. Data induk sering menjadi dasar kumpulan data (misalnya, menentukan apakah suatu analisis mencakup semua perangkat daerah bergantung pada penerapan definisi perangkat daerah secara konsisten).
2. Mengelola kualitas data: inkonsistensi data, masalah kualitas, dan kesenjangan, menyebabkan keputusan yang salah atau kehilangan peluang, Manajemen data induk mengurangi risiko kurangnya kualitas data dengan mengaktifkan representasi yang konsisten dari entitas penting di Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Mengelola biaya integrasi: Biaya integrasi sumber data baru ke dalam lingkungan yang sudah kompleks menjadi lebih tinggi tanpa adanya data induk. Hal ini mengurangi variasi dalam menentukan dan mengidentifikasi entitas penting.
4. Mengurangi risiko: data induk dapat memungkinkan penyederhanaan arsitektur berbagi data untuk mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan lingkungan yang kompleks.

3. Manajemen basis data

Manajemen basis data didefinisikan sebagai proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat data nasional. Manajemen basis data SPBE merupakan sebuah cara untuk mengelola dan menyimpan data yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem informasi pemerintahan. Hal ini termasuk membangun dan mengatur struktur data, membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan data tersedia untuk pembuatan keputusan, mengatur hak akses pengguna, dan memantau kinerja sistem.

Tujuan manajemen basis data adalah menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir dapat dibagi pakaikan, menjamin ketersediaan akses data yang terus menerus, dan menjaga keamanan data. Kegiatannya meliputi mendefinisikan kebutuhan walidata dan produsen data untuk basis data, mengelola basis data di Pusat Data Nasional serta menyebarluaskan basis data melalui portal SDI. Ketentuan penyimpanan data diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

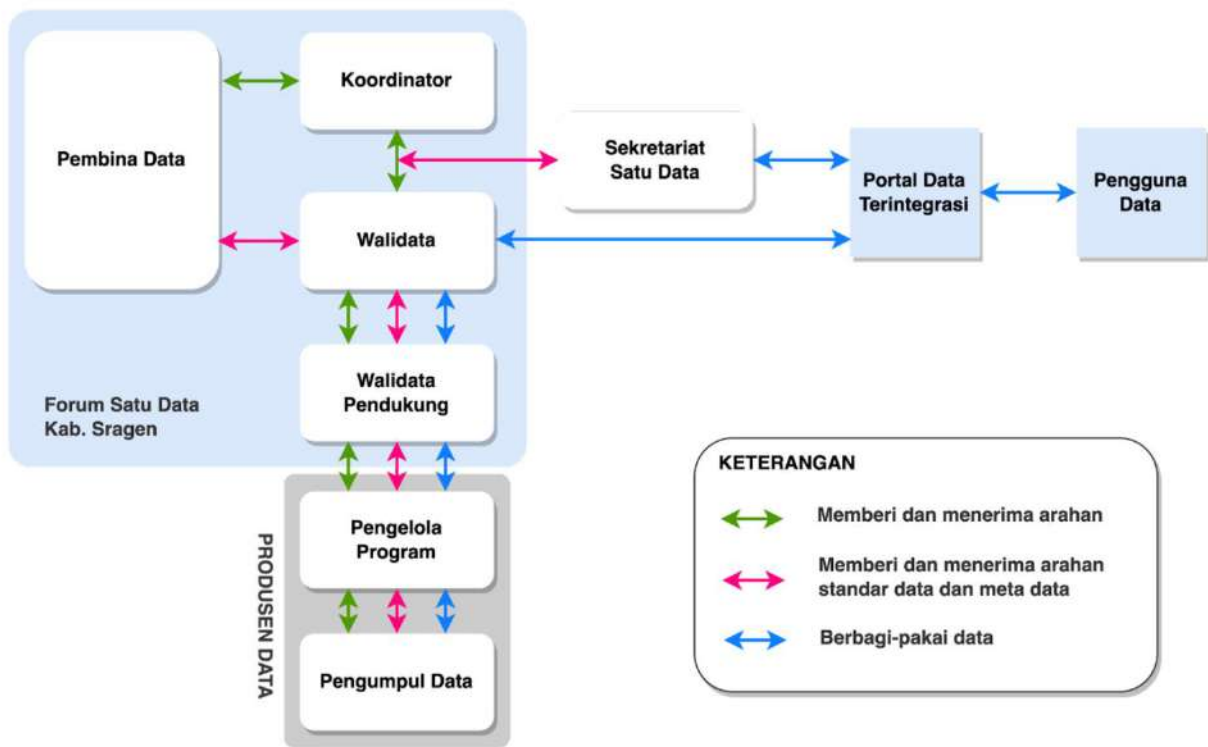
4. Manajemen kualitas data

Manajemen kualitas data didefinisikan sebagai proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Manajemen kualitas data SPBE merupakan sebuah proses untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan kualitas data yang diterima oleh sistem, termasuk dalam hal ini penilaian data, memeriksa konsistensi data, mengevaluasi standar data, memverifikasi integritas data, melacak dan menganalisis masalah kualitas data, dan mengidentifikasi tren kualitas data. Selain itu, proses manajemen kualitas data termasuk dalam mengidentifikasi sumber data dan memahami kontribusi yang diberikan oleh sumber data tersebut.

Tujuan dari manajemen kualitas data adalah untuk menjamin bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data memenuhi prinsip SDI dan diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data. Kegiatan manajemen kualitas data meliputi pengembangan dan promosi kesadaran kualitas, menentukan persyaratan kualitas data, menetapkan profil, menganalisis, dan menilai kualitas data serta menentukan matriks kualitas data. Kualitas data dapat dideskripsikan menjadi 6 bagian yaitu :

- Kelengkapan : Proporsi data yang disimpan terhadap potensi 100%.
- Keunikan : Tidak ada instance entitas (benda) yang akan direkam lebih dari satu kali berdasarkan bagaimana benda tersebut diidentifikasi.
- Ketepatan Waktu : Sejauh mana data mewakili kenyataan dari titik waktu yang diperlukan.
- Validitas : Data valid jika sesuai dengan sintaks (format, type, range) definisinya.
- Akurasi : Sejauh mana data dengan benar menggambarkan objek atau peristiwa "dunia nyata" yang dijelaskan.
- Konsistensi : Tidak adanya perbedaan, ketika membandingkan dua atau lebih representasi dari suatu hal terhadap definisi.

Mengacu pada Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam Penerapan Manajemen Data Kabupaten Sragen perlu menyusun struktur forum satu data seperti berikut :



Gambar 1.3.3.3. Kelembagaan Forum Satu Data Kabupaten Sragen

Penugasan:

Koordinator	SEKDA
Pembina Data	BPS & Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
Walidata	Dinas Komunikasi dan Informatika
Walidata Pendukung	Unsur perangkat daerah/instansi
Produsen Data	Unsur perangkat daerah/instansi

Tugas Pembina Data:

1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Wali Data Tingkat Kabupaten:

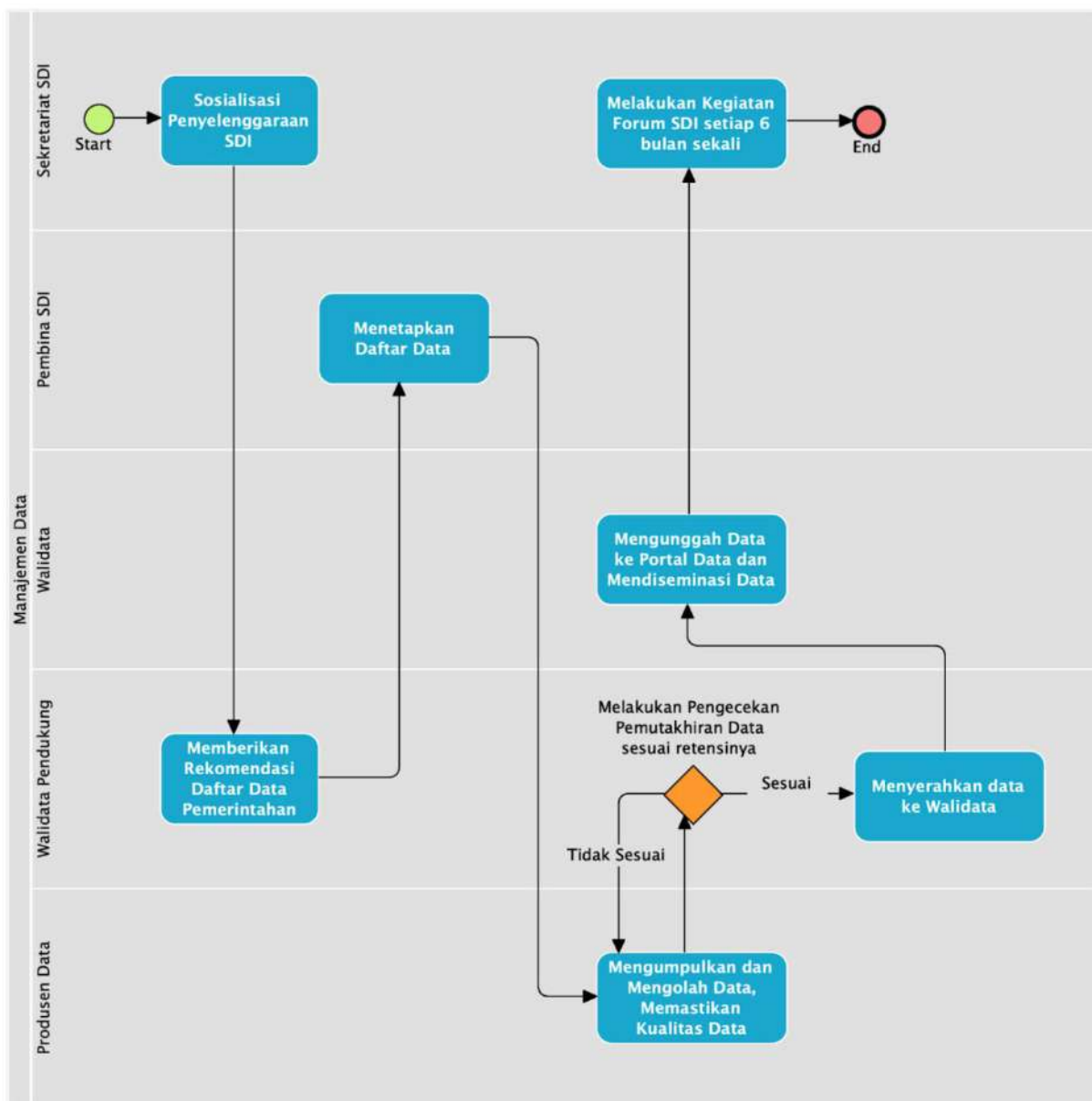
1. bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
2. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);
3. bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan IG;
4. mengoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan IG;

5. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
6. bertanggung jawab dalam penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
7. membantu Pembina Data tingkat Kabupaten dalam membina produsen data tingkat Kabupaten; dan
8. berperan aktif dalam simpul jaringan, Forum Satu Data Pembangunan dan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Tugas Produsen Data Tingkat Kabupaten:

1. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan DG dan IG *berikut* metadatanya, serta pembaruan DG dan IG;
4. bertanggung jawab dalam penyampaian data *berikut* metadata kepada Walidata tingkat kabupaten melalui walidata pendukung tingkat kabupaten di masing-masing perangkat daerah; dan
5. berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Berdasarkan *best practices* di atas, alur pengelolaan implementasi Satu Data Pemerintah Kabupaten Sragen dapat dilaksanakan seperti berikut ini :



Gambar 1.3.3.4. Alur Koordinasi Satu Data

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen data dengan lingkup sebagai berikut :

1. Arsitektur Data yang berisi kamus data dan kewenangan wali data;
2. SOP Validasi dan verifikasi data sebelum masuk ke data *warehouse*;
3. SOP Pengumpulan data;
4. SOP Penyebarluasan data;
5. SOP Pemanfaatan data;
6. SOP Penentuan walidata dan produsen data; dan
7. SOP Pembuatan dan perubahan kamus data metadata.

1.3.4. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset TIK melibatkan pengelolaan

kebutuhan dan kebutuhan yang berubah, mengurangi biaya keseluruhan, dan memastikan ketersediaan sistem yang dibutuhkan. Manajemen aset TIK yang efektif dapat memastikan bahwa layanan teknologi informasi pemerintah berjalan dengan lancar dan berkinerja tinggi. Contoh kasus dalam mengelola pusat data perlu memastikan perangkat terpelihara, terlindungi dengan baik (tersedia *power supply* saat listrik mati, ditempatkan di ruangan ber AC agar tidak *overheat*) serta melakukan peremajaan terhadap perangkat sesuai dengan *life-time*. Mengacu pada *best practices* dalam ISO/IEC 19770-5 tentang *IT Asset Management*, berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen Aset TIK :



Gambar 1.3.4.1. Manajemen Aset TIK

A. Mengidentifikasi kondisi aset TIK saat ini

ini Mencatat seluruh aset TIK (*software & hardware*) beserta kondisi dan *life-time* nya. Selain itu, *software* berbayar perlu dipastikan lisensinya sudah terbayar.

B. Mengelola aset TIK yang penting

Memastikan aset TIK selalu tersedia dan dapat diandalkan untuk dapat digunakan dalam menunjang operasional SPBE.

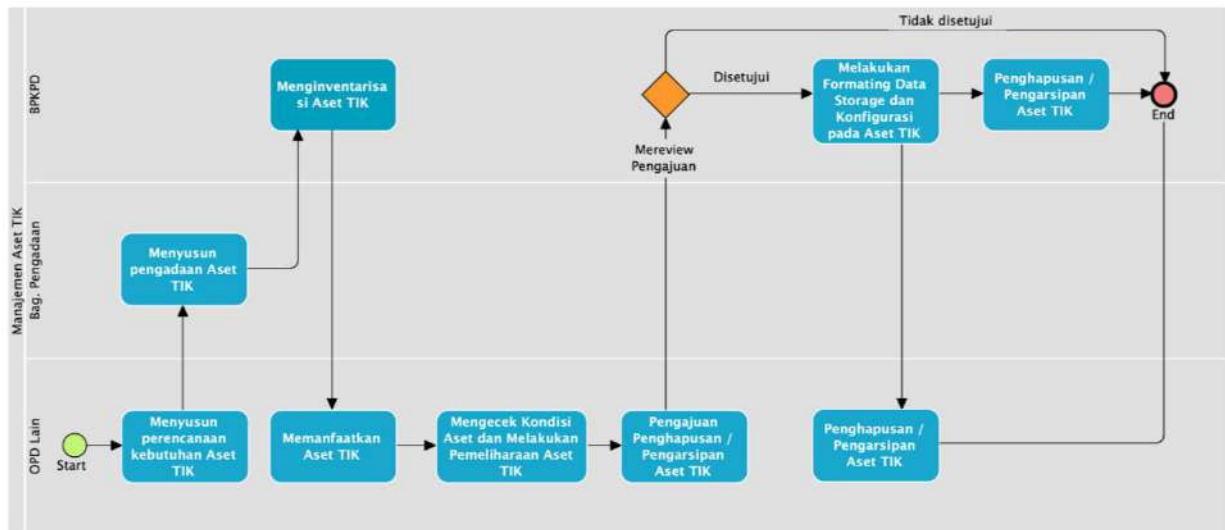
C. Mengelola siklus aset

TIK Mengelola aset mulai dari pengadaan hingga pembuangan dalam arti ketika sudah habis masa pakainya *lifetime* perlu dilakukan pembaharuan aset. Pastikan aset digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi secara fisik sampai akhir *lifetime*.

D. Mengoptimalkan nilai aset

TIK Meninjau aset serta mengidentifikasi bagaimana cara mengoptimalkan aset sesuai kebutuhan proses bisnis SPBE.

Berdasarkan *best practices* di atas Pemerintah Kabupaten Sragen dalam alur proses pengelolaan manajemen aset TIK nya dapat merujuk pada gambar berikut ini :



Gambar 1.3.4.2. Alur Pengelolaan Manajemen Aset TIK

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen Aset TIK dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Pembuatan dan perubahan pengkodean Aset TIK.
2. SOP Inventarisasi & konfigurasi Aset TIK.
3. SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Aset TIK.
4. SOP Penghapusan Aset TIK.

1.3.5. Manajemen SDM

Manajemen SDM merupakan serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE. Manajemen SDM membantu mengelola sumber daya manusia, memberikan dukungan teknis, dan memonitor aktivitas. Selain itu, manajemen SDM membantu dalam melacak kemampuan dan kompetensi pegawai, mengatur tugas dan pekerjaan, menganalisis kinerja, mengatur jadwal, meningkatkan efisiensi operasional, memberikan informasi yang akurat tentang kesiapan SDM TIK, memungkinkan manajemen TIK untuk mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa semua aspek dari SDM TIK berfungsi dengan baik.

Manajemen SDM perlu dilakukan guna menjamin keberlangsungan peningkatan mutu layanan SPBE dan memastikan ketersediaan kompetensi SPBE. Mengacu pada Permen PANRB 38/2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan beberapa aktivitas berikut ini:

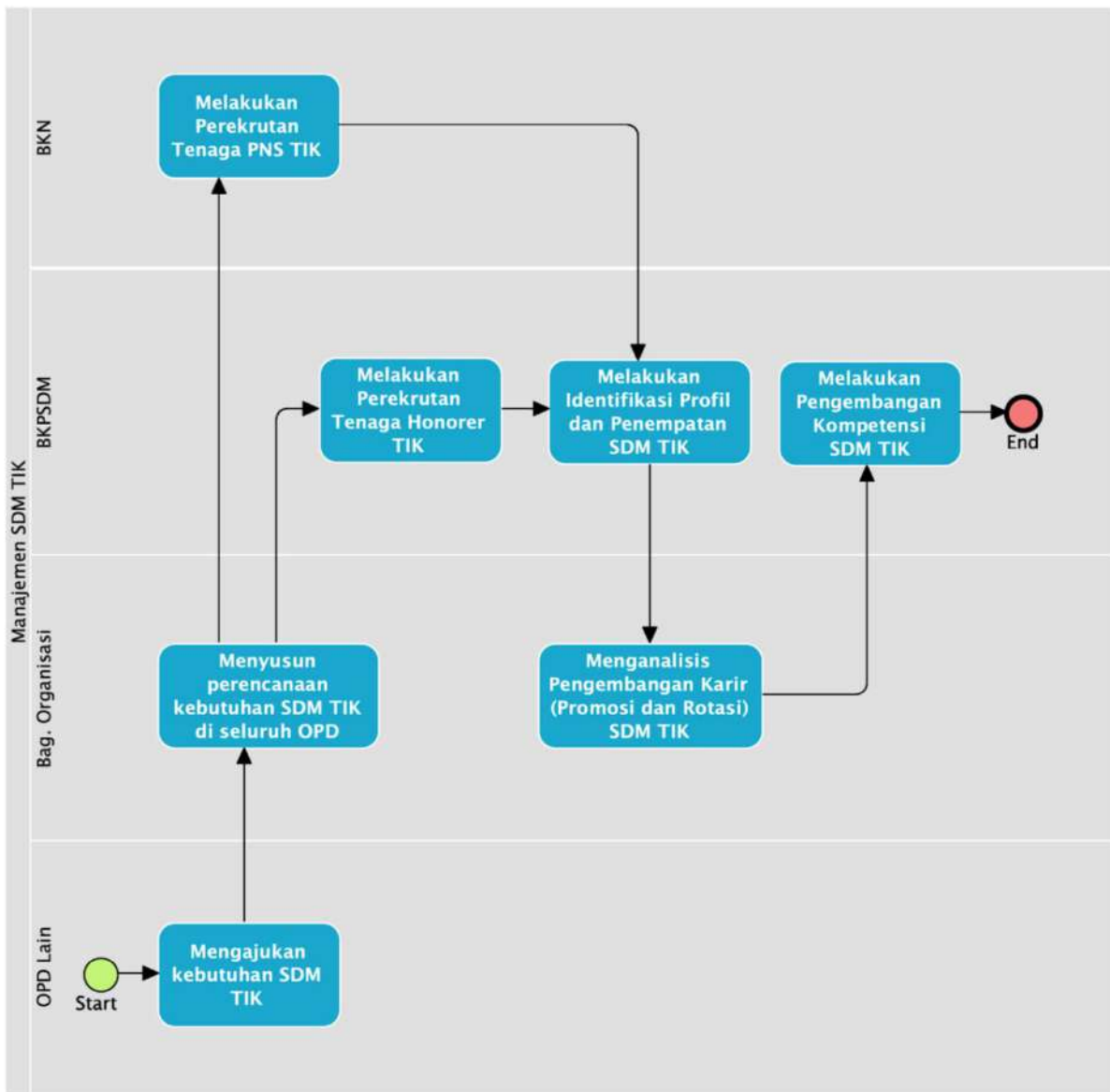
1. Perencanaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Promosi dan/atau mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN);

7. Uji kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Sistem informasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
9. Kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada kondisi ideal setiap perangkat daerah diharapkan memiliki SDM TIK yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi kedinasan masing-masing pegawai. Jenis dan keahlian TIK yang dituntut sangat beragam tergantung posisi dan tugas yang diberikan. Adapun keahlian TIK yang dibutuhkan, meliputi:

1. Kebijakan SPBE: Profesional dalam bidang ini berfokus pada penyusunan kebijakan, dan regulasi terkait penggunaan dan pengembangan SPBE di pemerintahan.
2. Manajemen SPBE: Ini melibatkan perencanaan strategis, pengembangan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pengawasan keseluruhan aspek SPBE dalam lingkungan pemerintahan.
3. *Enterprise Architect*: Ahli transformasi digital berfokus pada merombak proses administratif dan layanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
4. *Project Manager*: Spesialis pengelolaan proyek TIK bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengelola proyek pengembangan atau peningkatan sistem TIK.
5. *System Analyst*: Profesional TIK dengan keahlian dalam menganalisis kebutuhan sistem informasi, merancang solusi berbasis teknologi, dan mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi.
6. *Programmer*: Ahli pengembangan perangkat lunak di pemerintahan bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perangkat lunak yang mendukung berbagai tugas administratif dan layanan publik.
7. *Network Engineer*: Keahlian dalam merancang, mengelola, dan memelihara infrastruktur jaringan, server, dan sistem penyimpanan yang mendasari operasi teknologi di pemerintahan.
8. *IT Security*: Professional keamanan informasi bekerja untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur TIK pemerintahan dari ancaman siber dan pelanggaran keamanan.
9. *Application Support*: Tim dukungan teknis menyediakan bantuan dan solusi teknis bagi pengguna dalam mengatasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan.
10. *Data Scientist*: Ahli dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data di pemerintahan.

Peningkatan kemampuan SDM TIK dibutuhkan dan disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang terlibat. Peningkatan kemampuan personel dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun studi tingkat lanjut. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat jika ia tetap pada pekerjaannya. Dalam hal peningkatan SDM TIK, diperlukan bentuk penghargaan yang berbeda sehingga perlu adanya tenaga ahli TIK di masing-masing perangkat daerah yang bertugas mengelola TIK.



Gambar 1.3.5.1. Alur Prosedur Manajemen SDM

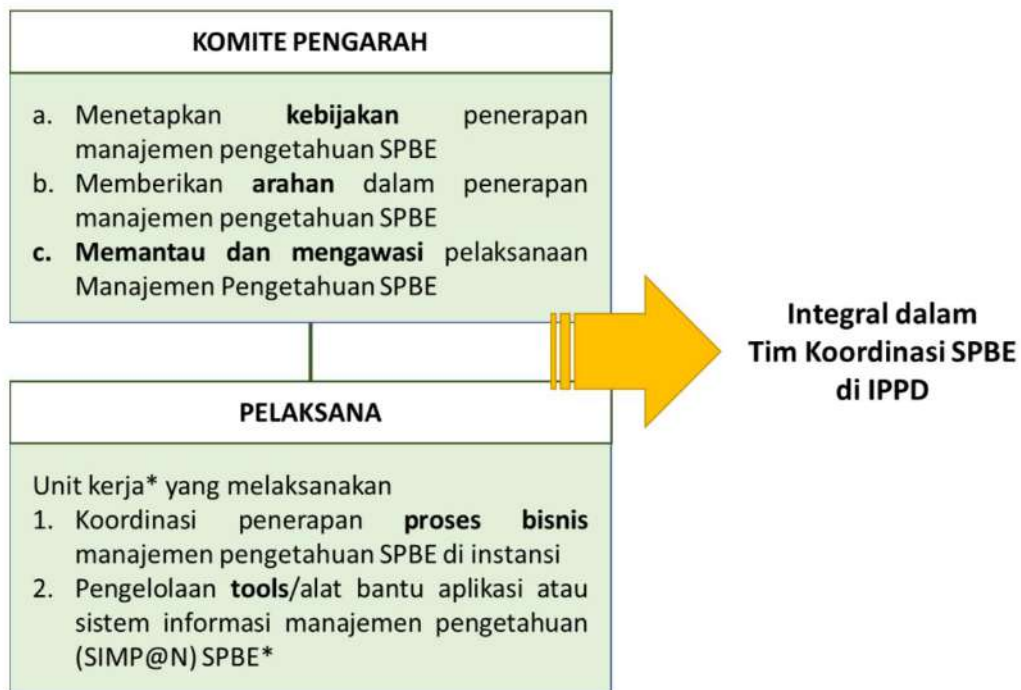
Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen SDM dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Permintaan Kebutuhan SDM TIK perangkat daerah.
2. SOP Pengadaan & Pengelolaan SDM TIK non ASN.
3. SOP Permintaan kebutuhan training, sertifikasi & peningkatan kompetensi SDM TIK.

1.3.6. Manajemen Pengetahuan

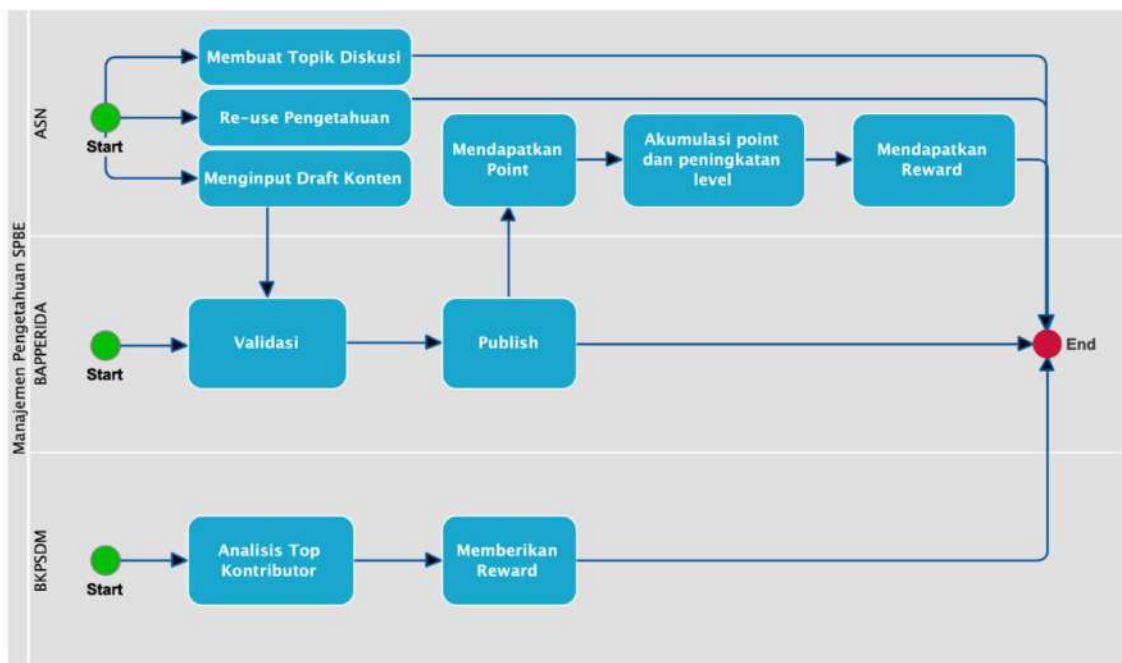
Manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Aktivitas dalam manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual instansi pemerintah daerah. Manajemen pengetahuan menjadi penting karena memuat hasil pekerjaan yang berasal dari pengetahuan yang diterapkan, tumbuhnya *knowledge economies*, pengembangan SDM

yang profesional, perlunya berbagi pengetahuan lintas bagian dalam organisasi, serta risiko pergantian pegawai terhadap organisasi. Adapun struktur komite manajemen pengetahuan SPBE sebagai berikut.



Gambar 1.3.6.1. Struktur Komite Manajemen Pengetahuan

Mekanisme alur proses manajemen pengetahuan SPBE yang perlu ada di Pemerintah Kabupaten Sragen dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.3.6.2. Alur Proses Manajemen Pengetahuan

Implementasi SPBE perlu melakukan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan manajemen pengetahuan SPBE perlu mempersiapkan serangkaian proses :

1. Mensosialisasikan pentingnya manajemen pengetahuan;
2. Membentuk kelompok kerja implementasi manajemen pengetahuan;
3. Menjabarkan visi dan misi dalam implementasi manajemen pengetahuan melalui sosialisasi secara berkala;
4. Merencanakan *Quick-Win* untuk mengatasi keraguan dan resistensi;
5. Melakukan konsolidasi manfaat yang sudah tercapai, untuk mendapatkan momentum; dan
6. Menerapkan budaya "*sharing & re-use*" sebagai cara bekerja yg efektif dan efisien.

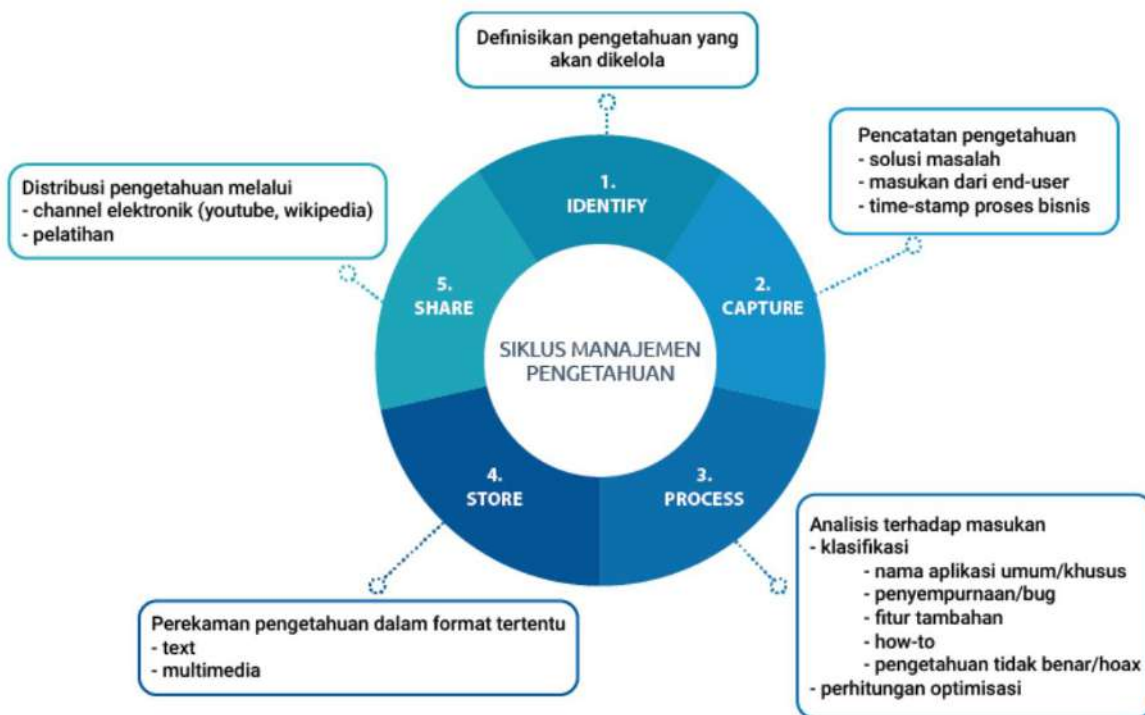


Gambar 1.3.6.3. Manajemen Pengetahuan

Manfaat dari manajemen pengetahuan SPBE sebagai berikut :

1. Mengurangi duplikasi upaya untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau cara kerja.
2. Mengurangi biaya dan waktu operasi layanan SPBE.
3. Meningkatkan kompetensi operator layanan SPBE.
4. Memberdayakan operator, penerima manfaat SPBE, staf TIK dan analis proses bisnis
5. Meningkatkan kualitas layanan SPBE.

Pada manajemen pengetahuan terdapat siklus hidup yang dimulai dari proses identifikasi, pencatatan, pemrosesan, penyimpanan. Adapun siklus manajemen pengetahuan digambarkan sebagai berikut.

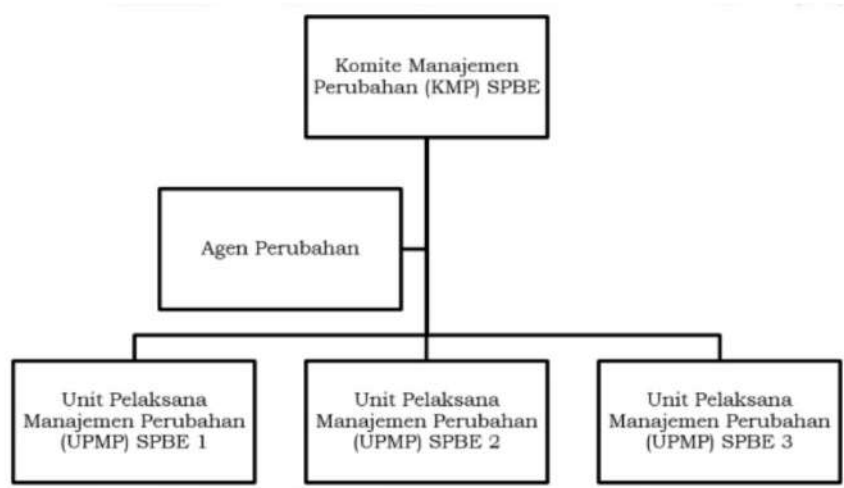


Gambar 1.3.6.4. Siklus Manajemen Pengetahuan

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen pengetahuan dengan lingkup SOP Pencatatan pengalaman & *lesson learned* untuk setiap perangkat daerah.

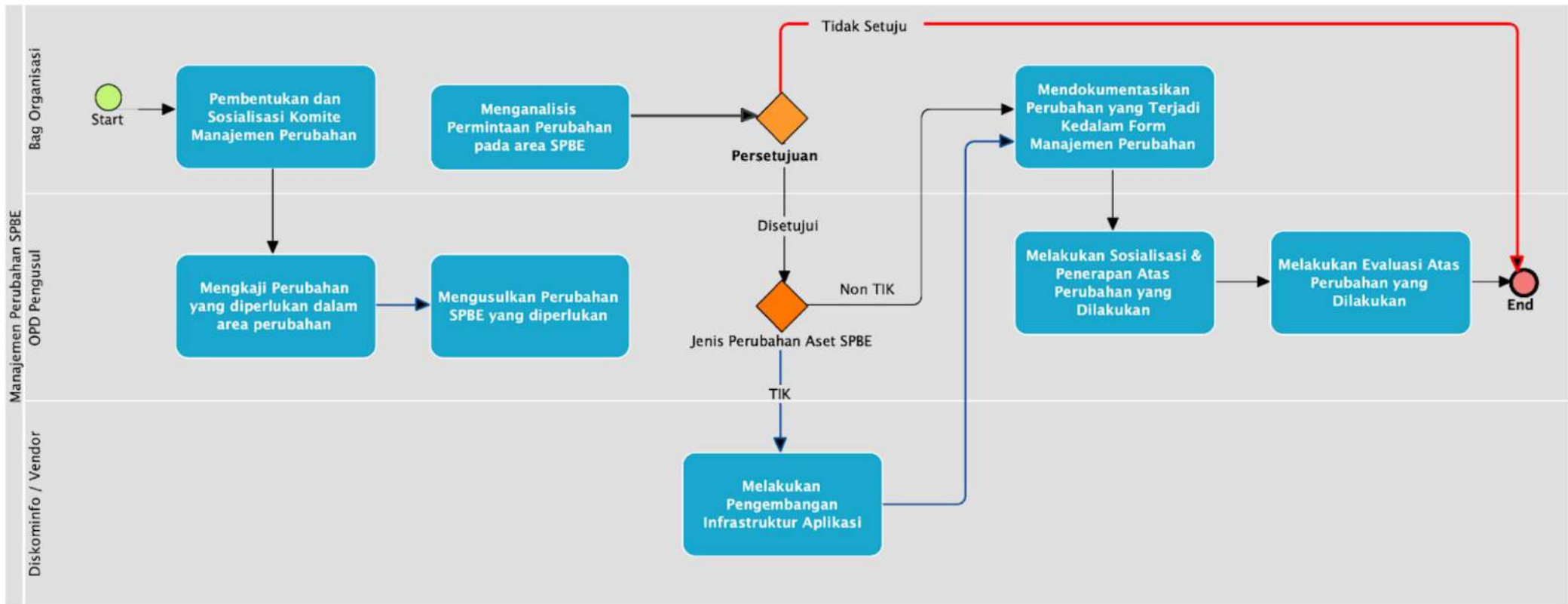
1.3.7. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan merupakan sebuah pendekatan siklus, dan sistematis pada transisi organisasi, program, dan kegiatan dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan dengan target manfaat perubahan yang diharapkan. Manajemen perubahan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan merespon perubahan yang dihadapi. Selain itu, dalam manajemen perubahan digunakan untuk mengidentifikasi perubahan, mengevaluasi dampak perubahan, mengembangkan dan melaksanakan rencana perubahan, dan memonitoring dan mengevaluasi efektivitas perubahan. Oleh karena itu, dalam manajemen perubahan diperlukan sebuah komite manajemen perubahan yang bertanggung jawab untuk membuat rekomendasi, menentukan strategi, dan menciptakan kebijakan untuk memastikan bahwa perubahan berhasil diimplementasikan dengan sukses. Adapun skema komite manajemen perubahan sebagai berikut.



Gambar 1.3.7.1. Komite Manajemen Perubahan SPBE

Setiap perubahan yang terdapat pada visi dan misi/kebijakan/SOTK berimplikasi dengan perubahan pada layanan. Layanan harus mampu mengadopsi perubahan tersebut dengan melakukan manajemen perubahan pada bisnis proses, aplikasi maupun infrastrukturnya. Mekanisme alur perubahan layanan SPBE yang perlu ada di Pemerintah Kabupaten Sragen dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.3.7.2. Alur Proses Manajemen Perubahan SPBE

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen perubahan dengan lingkup SOP Manajemen Perubahan.

1.3.8. Manajemen Layanan

Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas. Manajemen layanan SPBE membantu pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat. Manajemen layanan SPBE memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan, pengujian, dan verifikasi data secara *real-time* sehingga memastikan bahwa layanan yang diberikan tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

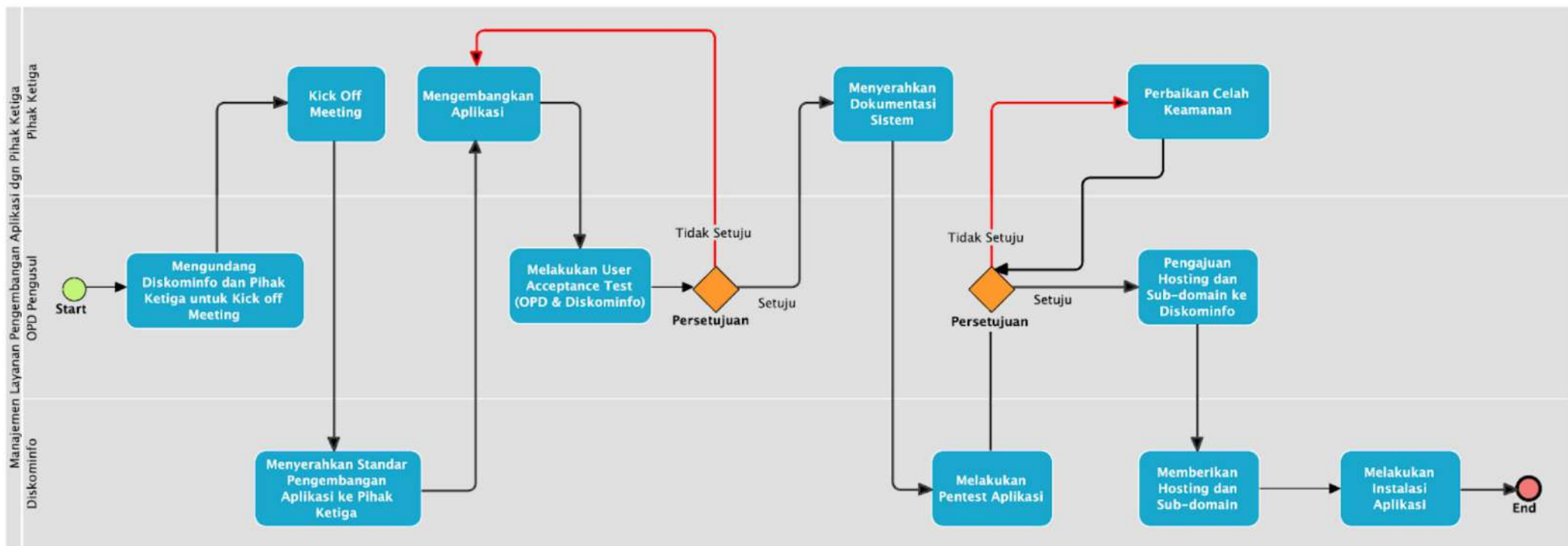
Implementasi SPBE perlu memastikan portofolio layanan SPBE terpelihara dengan baik dengan berbagai cara. Mengacu pada *best practices* yang terdapat dalam pedoman ITIL v.4, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan seperti:



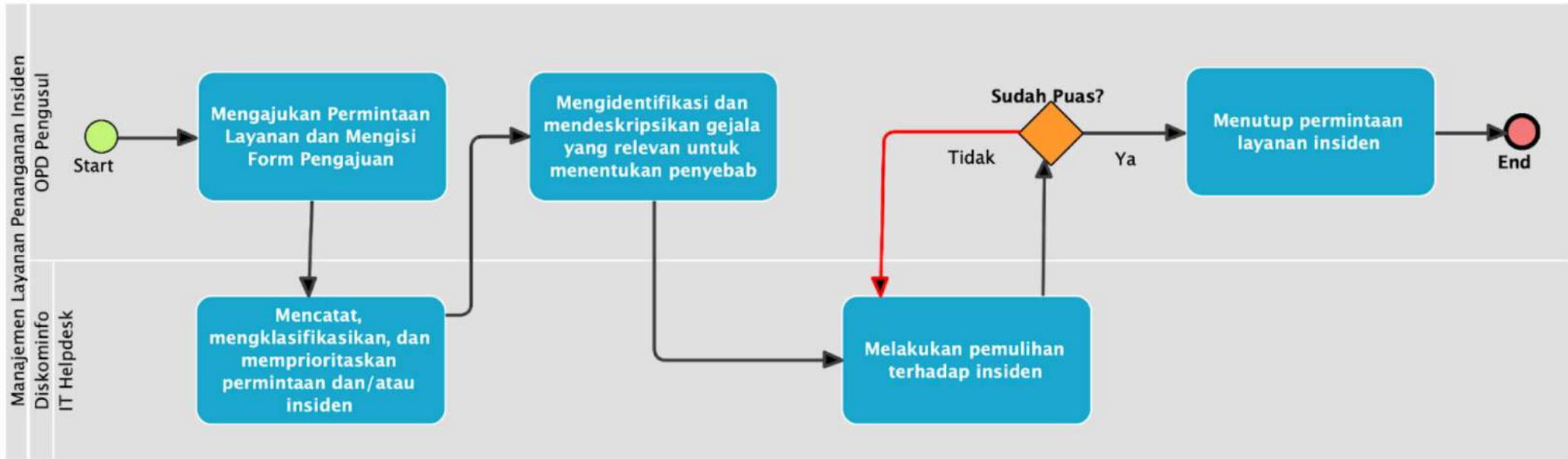
Gambar 1.3.8.1. Manajemen Layanan

1. Mengelola gangguan dengan menyediakan *platform helpdesk* TIK disertai dengan *ticketing* dan monitoring *Service Level Agreement (SLA)*.
2. Melakukan pemeliharaan aplikasi dan infrastruktur TIK secara berkala dan sesuai dengan prioritas risiko.
3. Berpedoman pada metodologi baku seperti ITIL v4 terkait standar manajemen layanan IT.

Berdasarkan *best practices* di atas Diskominfo dapat melakukan pemberian dukungan layanan TI terkait (a.) layanan pengembangan aplikasi dan (b.) layanan penanganan insiden yang dijelaskan pada gambar berikut ini :



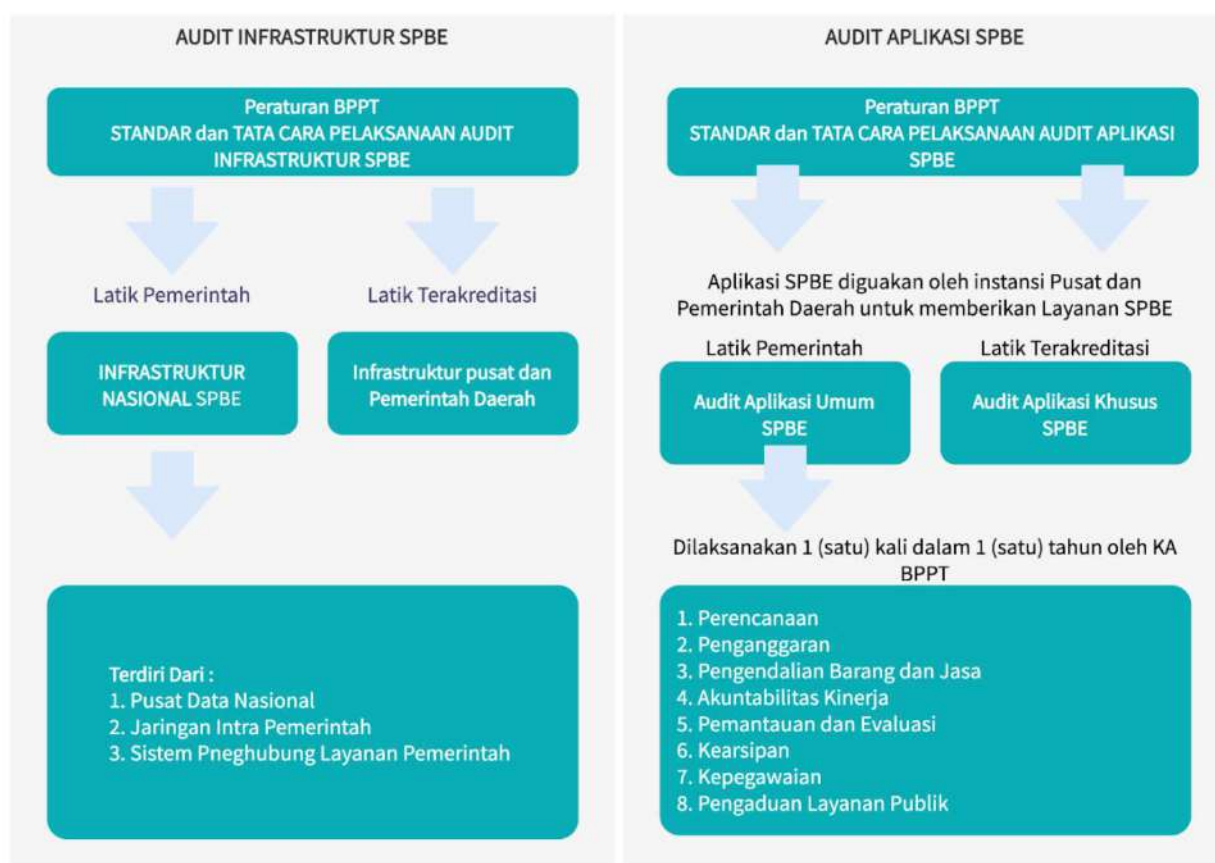
Gambar 1.3.8.2. Layanan Pengembangan Aplikasi



Gambar 1.3.8.3. Layanan Penanganan Insiden

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen layanan dengan lingkup SOP Pengajuan layanan (*Helpdesk*) dan SOP Pengembangan Aplikasi dengan pihak ketiga.

1.3.9. Audit TIK



Gambar 1.3.9.1. Lingkup Audit TIK

(sumber: Paparan KemenpanRB)

Audit TIK merupakan evaluasi secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor teknologi terhadap aset teknologi dalam rangka memberikan nilai tambah (manfaat) kepada pihak yang diaudit atau pemilik kepentingan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi.
2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi.
3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan.
4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam audit teknologi informasi yaitu :

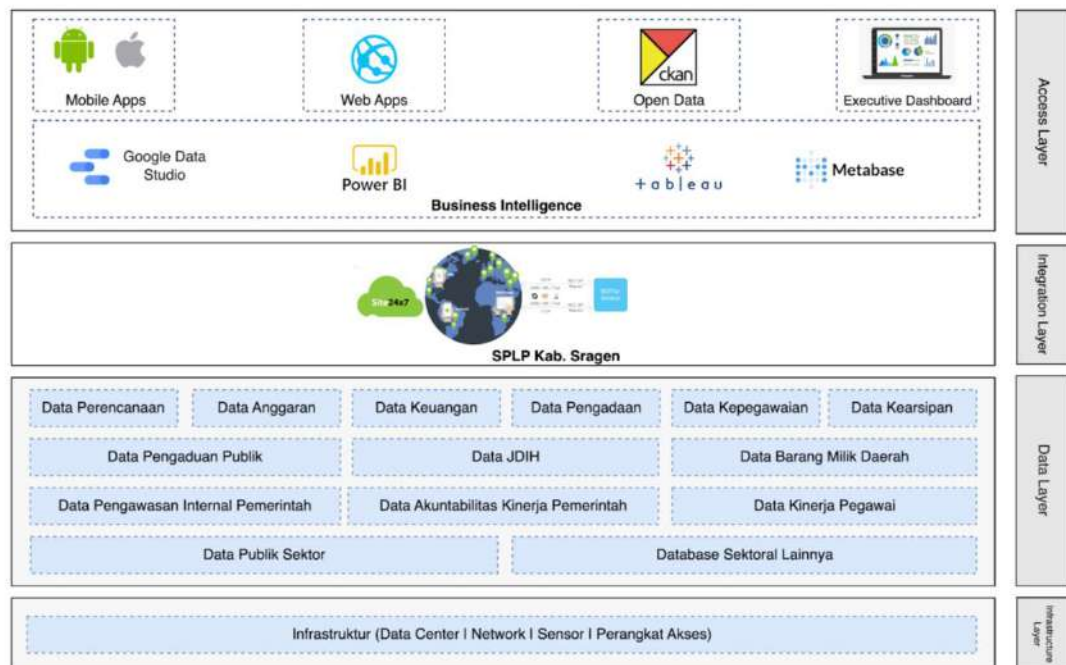
- A. Audit infrastruktur SPBE, merujuk pada Perpres 95/2018 pasal 55 disebutkan:
1. Infrastruktur SPBE Nasional diaudit setiap tahun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
 2. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diaudit setiap dua tahun oleh lembaga audit TIK tersertifikasi atau terdaftar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
 3. Koordinasi dengan Kementerian Kominfo.
- B. Audit Aplikasi SPBE dilakukan dengan mengaudit aplikasi umum setiap tahun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sedangkan audit aplikasi khusus dilakukan setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK yang berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo.
- C. Audit Keamanan Informasi pada infrastruktur SPBE Nasional dan aplikasi umum dilakukan setiap tahun oleh BSSN, sedangkan untuk audit keamanan pada infrastruktur SPBE dan aplikasi khusus di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dilakukan setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK atau perusahaan audit TIK.
- Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Audit TIK dijabarkan sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi;
 2. Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi;
 3. Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi;
 4. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi;
 5. Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi;
 6. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi;
 7. Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi;
 8. Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi;
 9. Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi;
 10. Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi;
 11. Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi;
 12. Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi;
 13. Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi; dan
 14. Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi.

Bab II Arsitektur

Target SPBE

2.1. Arsitektur Aplikasi

2.1.1. Desain Arsitektur Aplikasi



Gambar 2.1.1.1. Desain Arsitektur Aplikasi

Desain arsitektur aplikasi SPBE dijabarkan sebagai berikut:

- **Access Layer**

Bagian ini akan terdapat aplikasi-aplikasi yang akan mendukung perangkat daerah dalam proses operasional utama di perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah akan memiliki aplikasi dengan alur probis (proses bisnis) yang beragam sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Selain itu juga perangkat daerah perlu belajar untuk memanfaatkan *tools business intelligence* dengan tujuan untuk memvisualisasikan data sebagai rangkaian dalam penerapan satu data Indonesia.
- **Integration Layer**

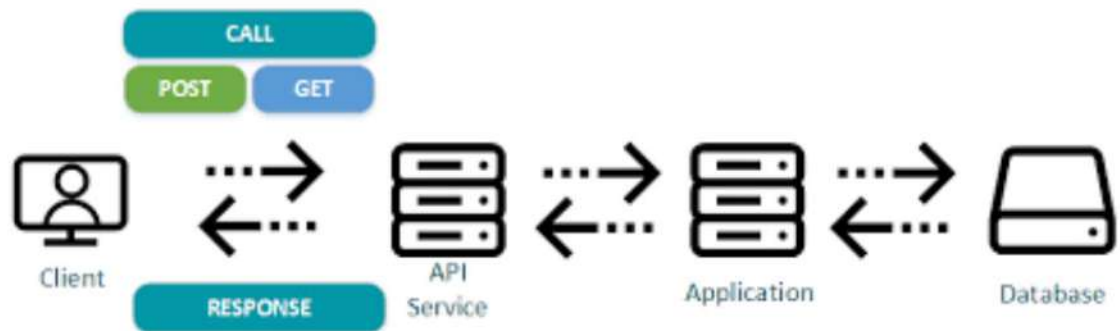
Bagian ini ditujukan untuk aplikasi, *platform, module, services* yang berfungsi sebagai jembatan antara *layer* data dengan *layer* access. Proses pengaturan terhadap akses data juga dikelola oleh layanan pada *layer* ini. Pada *layer* ini akan terdapat *API gateway* yang terhubung dengan masing-masing aplikasi yang berjalan guna mengelola akses integrasi data antar aplikasi.
- **Data Layer**

Bagian data *layer* ini berisi *database* dari data-data pemerintahan sektoral yang berasal dari berbagai aplikasi. Secara umum DBMS yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu MySQL.
- **Layer Arsitektur**

Bagian ini terdapat perangkat jaringan, pusat data dan CCTV guna mendukung operasional aplikasi 24x7 jam.

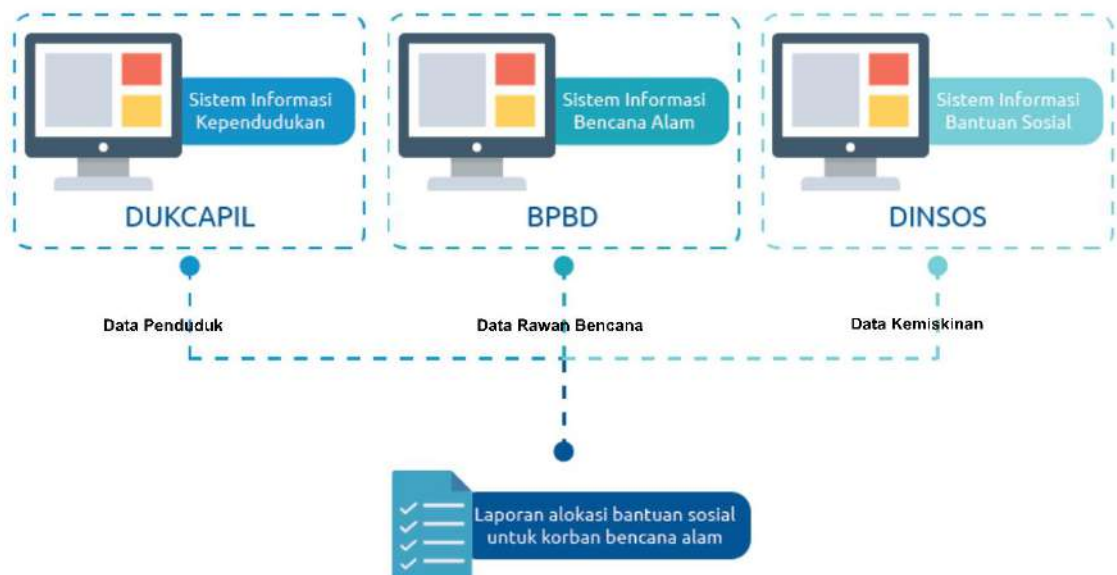
2.1.2. Integrasi Aplikasi

Permasalahan integrasi merupakan kendala yang cukup kompleks dalam implementasi SPBE. Kurang adanya integrasi antar aplikasi berdampak pada ketidak efisienya layanan operasional pemerintahan dan rentan terjadinya duplikasi data. Aplikasi yang dikembangkan harus dapat diintegrasikan dengan menggunakan teknologi *Application Programming Interface* (API).



Gambar 2.1.2.1. Skema Alur Kerja API

API adalah kumpulan fungsi-fungsi untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam *system call* dengan bahasa yang terstruktur. API menyediakan fungsi untuk menghubungkan koneksi antar aplikasi. Secara umum API mampu menerima respon data dalam format JSON dan XML. Sebagai contoh, data kependudukan (DUKCAPIL), data bencana alam (BPBD), dan data bantuan sosial (DINSOS) saling terintegrasi sebagai dasar penyusunan laporan alokasi bantuan sosial untuk korban bencana alam.



Gambar 2.1.2.2. Ilustrasi Integrasi antar Aplikasi

2.1.3. Arsitektur Aplikasi Usulan

2.1.3.1. Katalog Aplikasi

Usulan Katalog ini mempertimbangkan inisiatif aplikasi yang diusulkan oleh masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Sragen untuk di masa mendatang. Inisiatif-inisiatif tersebut akan berkembang dan bertambah seiring dengan kebutuhan bisnis proses di masing-masing OPD. Berikut merupakan pendetailan inisiatif pengembangan aplikasi kedepannya di Pemerintah Kabupaten Sragen, Adapun katalog aplikasi usulan selengkapnya ditunjukkan pada link: <https://bit.ly/metadataspbesragen>.

Tabel 2.1.3.1.1 Katalog Aplikasi Usulan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
APLU-SRG-001	e-Ormas	Sistem Informasi Pendaftaran Ormas	Web Based	Layanan Pencatatan Keberadaan Ormas	Data Surat Keterangan Keberadaan Ormas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
APLU-SRG-002	e-Peta Rawan Bencana	Sistem Informasi Peta Rawan Bencana Terintegrasi	Web Based	Layanan Informasi, Komunikasi, dan Edukasi Kebencanaan	Data Informasi Kebencanaan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APLU-SRG-003	SIMADu	Sistem Informasi Manajemen Aset Terpadu	Web Based	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Aset Tetap	Data Aset Tetap	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
APLU-SRG-004	e-REGISTRASI	Sistem Nomor Hukum Daerah	Web Based	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Data Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Bagian Hukum
APLU-SRG-005	e-LHP	Sistem Informasi Laporan Hasil Pemeriksaan	Web Based	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Inspektorat
APLU-SRG-006	e-Audit	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Internal	Web Based	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Inspektorat
APLU-SRG-007	e-Tracking Pelanggar Ketertiban	Sistem Informasi Tracking Pelanggar Ketertiban	Web Based	Layanan Tracking Pelanggar Ketertiban	Data Tracking Pelanggar Ketertiban	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Bagian Organisasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
APLU-SRG-008	easyRB	Sistem Informasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Web Based	Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Data Capaian Reformasi Birokrasi	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Bagian Organisasi
APLU-SRG-009	e-KLA	Sistem Informasi Manajemen Kabupaten Layak Anak	Web Based	Layanan KLA (Kabupaten Layak Anak)	Data Pendukung Kabupaten Layak Anak (KLA)	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Bagian Organisasi
APLU-SRG-010	e-KB MKJP	Sistem Informasi Manajemen KB MKJP	Web Based	Layanan Pemasangan KB MKJP	Data Masyarakat Penerima Pelayanan KB MKJP Data Identitas Aseptor Pemasangan KB MKJP Data Jenis KB MKJP Data Waktu Pemasangan KB MKJP Data Tanggal Expired Pemasangan KB MKJP	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Bagian Organisasi
APLU-SRG-011	e-Warehouse Kependudukan	Sistem Informasi Dashboard Dikdukcapil	Web Based	Layanan Pengajuan Pembuatan Dokumen Kependudukan	Data Pengajuan Pembuatan Dokumen Kependudukan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APLU-SRG-012	e-Pertanian dan Perikanan	Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan	Web Based	Layanan Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan	Data Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
APLU-SRG-013	e-Usaha	Sistem Informasi Pendampingan Merk dan Izin Edar Usaha	Web Based	Layanan Pendampingan Merk dan Izin Edar Usaha	Data Surat Rekomendasi Merk dan Izin Edar Usaha	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
APLU-SRG-014	e-Harga Bahan Pokok	Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Penting	Web Based	Layanan Informasi Harga Bahan Pokok Penting	Data Harga Bahan Pokok Penting	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

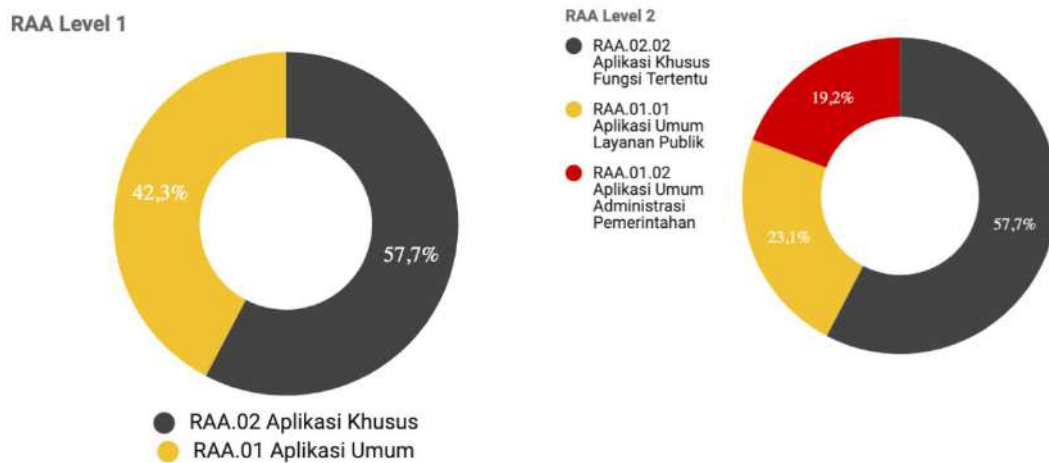
ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
APLU-SRG-015	SIM Pasar	Sistem Informasi Manajemen Pasar	Web Based	Layanan Retribusi Pasar	Data Retribusi Pasar	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
APLU-SRG-016	e-Sewa Tanah Lambiran	Sistem Informasi Sewa Tanah Lambiran	Web Based	Layanan Sewa Tanah Lambiran	Data Retribusi Sewa Tanah Lambiran	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Dinas Pekerjaan Umum
APLU-SRG-017	e-Penyewaan Tanah Bahu Jalan	Sistem Informasi Penyewaan Tanah Bahu Jalan	Web Based	Layanan Penyewaan Tanah Bahu Jalan	Data Retribusi Sewa Bahu Jalan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum
APLU-SRG-018	e-Penyedotan Kakus	Sistem Informasi Penyedotan Kakus	Web Based	Layanan Penyedotan Kakus	Data Pelanggan Penyedotan Kakus	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum
APLU-SRG-019	e-Kinerja	Sistem Informasi Laporan Kinerja	Web Based	Layanan Sistem Informasi Laporan Kinerja	Data Pelaporan Pengamanan Data Pelaporan Kegiatan Perbaikan Data Pelaporan Pengawasan Data Pelaporan Pengendalian Angkutan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Dinas Perhubungan
APLU-SRG-020	e-Pemakaman	Sistem Informasi Izin Pemakaman	Web Based	Layanan Izin Pemakaman	Data Izin Pemakaman	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang
APLU-SRG-021	EMR	Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik	Web Based	Layanan Manajemen Rumah Sakit	Data Rekam Medis Pasien	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
APLU-SRG-022	Telemedicine	Sistem Informasi Konsultasi Pasien dan Dokter	Web Based	Layanan Informasi Rumah Sakit Online	Data Konsultasi Pasien	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RSUD dr. Soeratto Gemolong
APLU-SRG-023	Televisite	Sistem Informasi Jadwal Dokter	Web Based	Layanan Informasi Jadwal Dokter	Data Jadwal Dokter	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	RSUD dr. Soeratto Gemolong

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
APLU-SRG-024	e-RAPAT	Sistem Informasi Notulen Rapat	Web Based	Layanan Pelaksanaan Rapat DPRD	Data Dokumen Perda	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Dewan
APLU-SRG-025	SIKUNJA	Sistem Informasi Kunjungan Tamu DPRD	Web Based	Layanan Kunjungan Kerja DPRD	Data Notulensi Sidang DPRD	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Dewan
APLU-SRG-026	e-RESES	Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat	Web Based	Layanan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD	Data Aspirasi Masyarakat	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Sekretariat Dewan

2.1.3.2. Analisis Diagram Aplikasi

Usulan

Analisa terhadap kondisi aplikasi usulan dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 2.1.3.2.1 Referensi Arsitektur Aplikasi Nasional

Merujuk pada Grafik 2.1.3.2.1. menunjukkan referensi arsitektur aplikasi usulan pada RAA Level 1 dan RAA Level 2. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sesuai dengan Referensi Arsitektur Nasional Level 1 terdapat 42,3% (11 Aplikasi) merupakan RAA.01 Aplikasi Umum, 57,7% (15 Aplikasi) merupakan RAA.02 Aplikasi Khusus, selanjutnya Referensi Arsitektur Nasional Level 2 Aplikasi usulan terbagi menjadi 3 yaitu 23,1% (6 Aplikasi) merupakan RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik, 19,2% (5 Aplikasi) merupakan RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan, 57,7% (15 Aplikasi) merupakan RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu. RAA Nasional Paling Banyak pada RAA.02 Aplikasi Khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis aplikasi yang paling banyak diusulkan adalah aplikasi khusus yang menunjang layanan terkait OPD pengusul aplikasi.

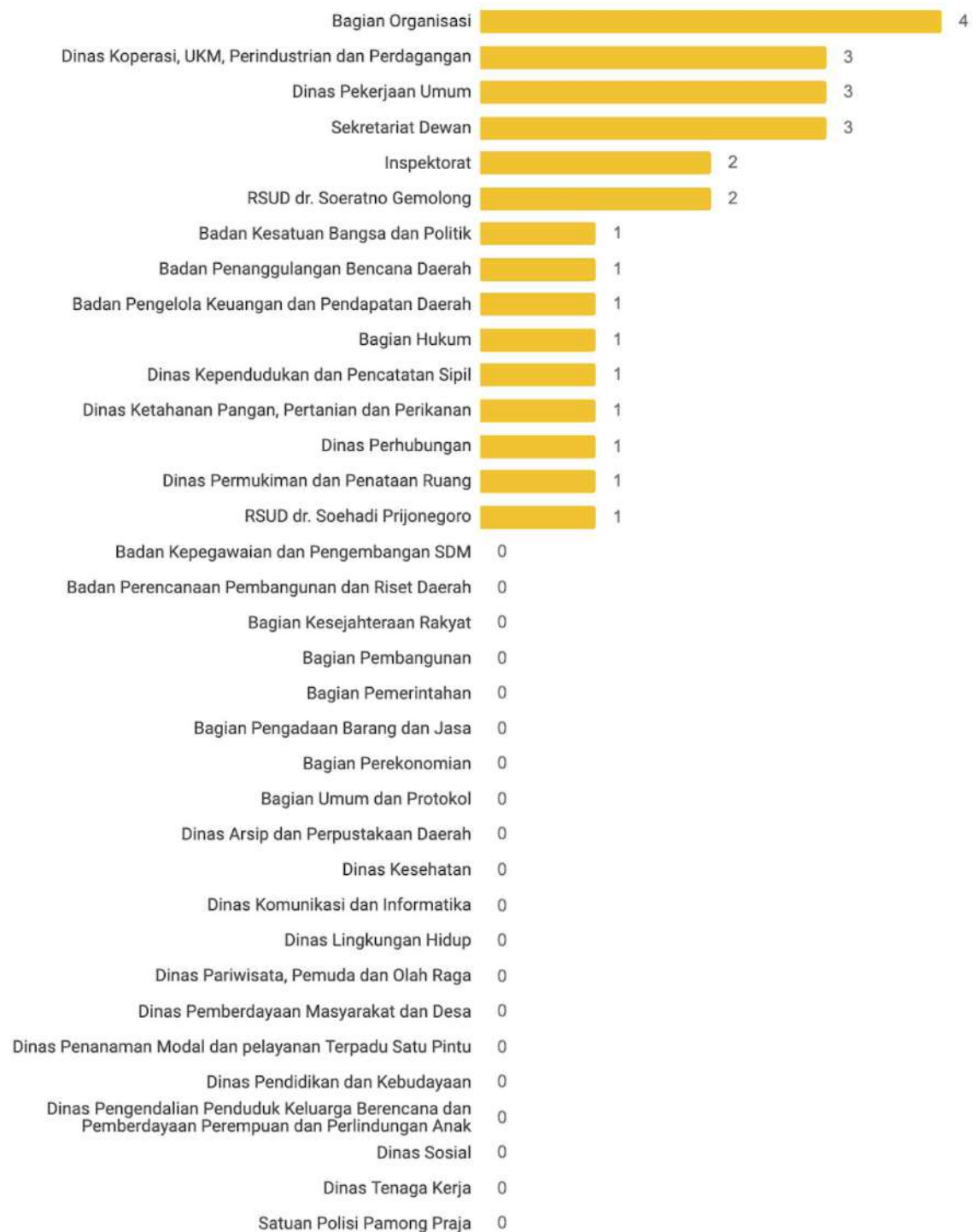


Grafik 2.1.3.2.2. Teknologi Platform Aplikasi Usulan

Berdasarkan Basis aplikasi yang digunakan dalam aplikasi usulan 100% (26 Aplikasi) merupakan Web Based dan untuk Basis Datanya 100% (26 Aplikasi) merupakan MySQL. Berdasarkan kondisi aplikasi yang diusulkan oleh OPD semuanya berbasis Website, karena

mudah untuk di akses di berbagai platform, selanjutnya perlu dipastikan jumlah web programmer dapat mengakomodir pengembangan aplikasi usulan tersebut.

Jumlah Usulan Aplikasi OPD

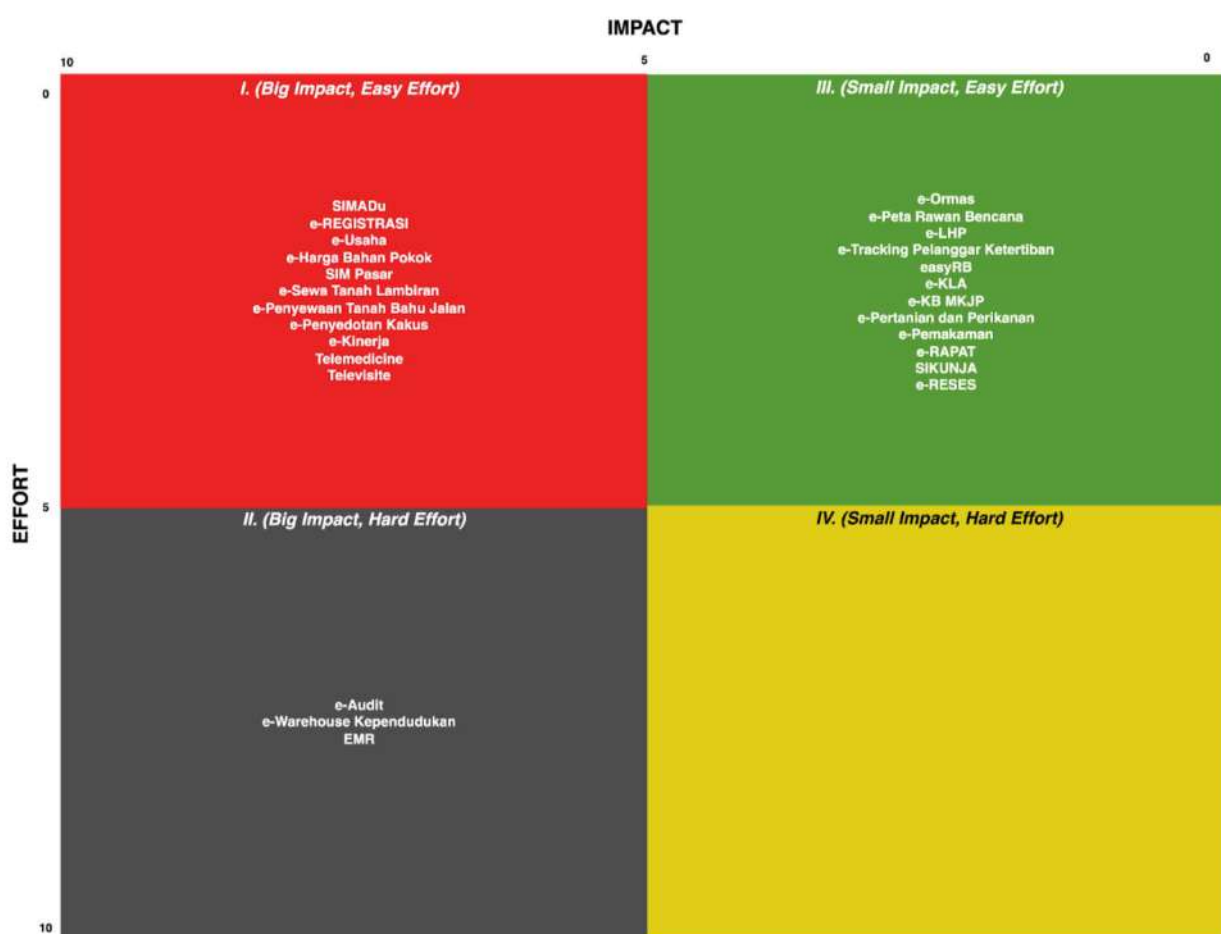


Grafik 2.1.3.2.3. OPD Pengelola Aplikasi Usulan

Merujuk Pada Grafik tersebut dapat dilihat OPD yang paling banyak dalam melakukan usulan yaitu Bagian Organisasi, hal ini perlu dilakukan agar layanan di OPD tersebut bisa terdigitalisasi dan terdapat beberapa OPD yang tidak membutuhkan pengembangan aplikasi untuk 5 tahun kedepan.

2.1.3.3. Analisis E ort Impact

Usulan aplikasi yang direkomendasikan dapat dijadikan dasar untuk pengelolaan SPBE yang sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah Kabupaten Sragen dan memberikan arah bagi pengembangan teknologi informasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian berbagai permasalahan Pemerintah Kabupaten Sragen. Berdasarkan usulan kebutuhan aplikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk strategi implementasinya dengan pertimbangan arahan strategis dan kapabilitas anggaran Pemerintah Kabupaten Sragen. Secara umum dalam implementasi perencanaan SPBE kedepan diprioritaskan ke dalam 4 kuadran utama, yaitu: Kuadran 1 (*High Impact-Low E ort*), Kuadran 2 (*High Impact-High E ort*), Kuadran 3 (*Low Impact-Low E ort*), Kuadran 4 (*Low Impact-High E ort*). Prioritas pengembangan aplikasi disusun menggunakan *matriks E ort-Impact*, seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

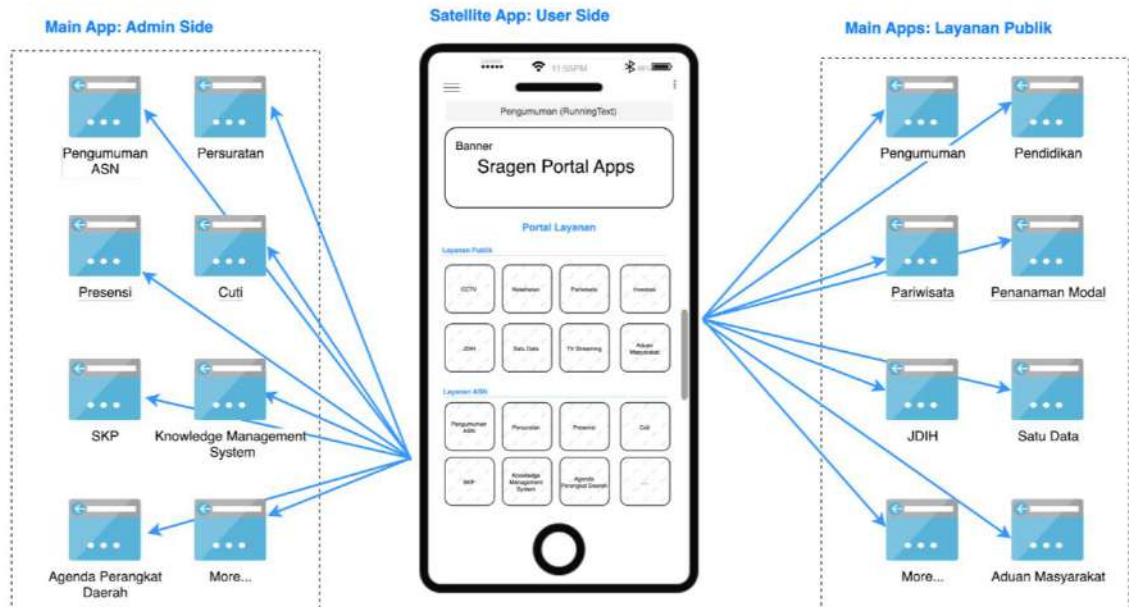


Gambar 2.1.2.1. Matriks E ort-Impact

2.1.4. Portal Layanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen

Jenis layanan yang bervariasi di Pemerintah Kabupaten Sragen menjadi tantangan pengguna (ASN dan masyarakat) dalam memanfaatkan layanan SPBE. Hal ini menjadi perhatian karena pengguna harus mengingat banyaknya laman *web* dan akun login sesuai dengan layanan SPBE yang ingin digunakan. Dengan adanya portal layanan yang mengumpulkan berbagai layanan digital, memudahkan masyarakat dan juga ASN Internal untuk mengakses berbagai layanan hanya dalam satu portal

saja. Gambar dibawah merupakan portal layanan Pemerintah Kabupaten Sragen dapat dibuat untuk menyatukan berbagai layanan yang sudah terintegrasi.



Gambar 2.1.4.1. Arsitektur Sragen Smart Services Portal Layanan Terpadu

Tabel 2.1.4.1. Daftar Layanan dalam Sragen Smart Services Portal Layanan Terpadu

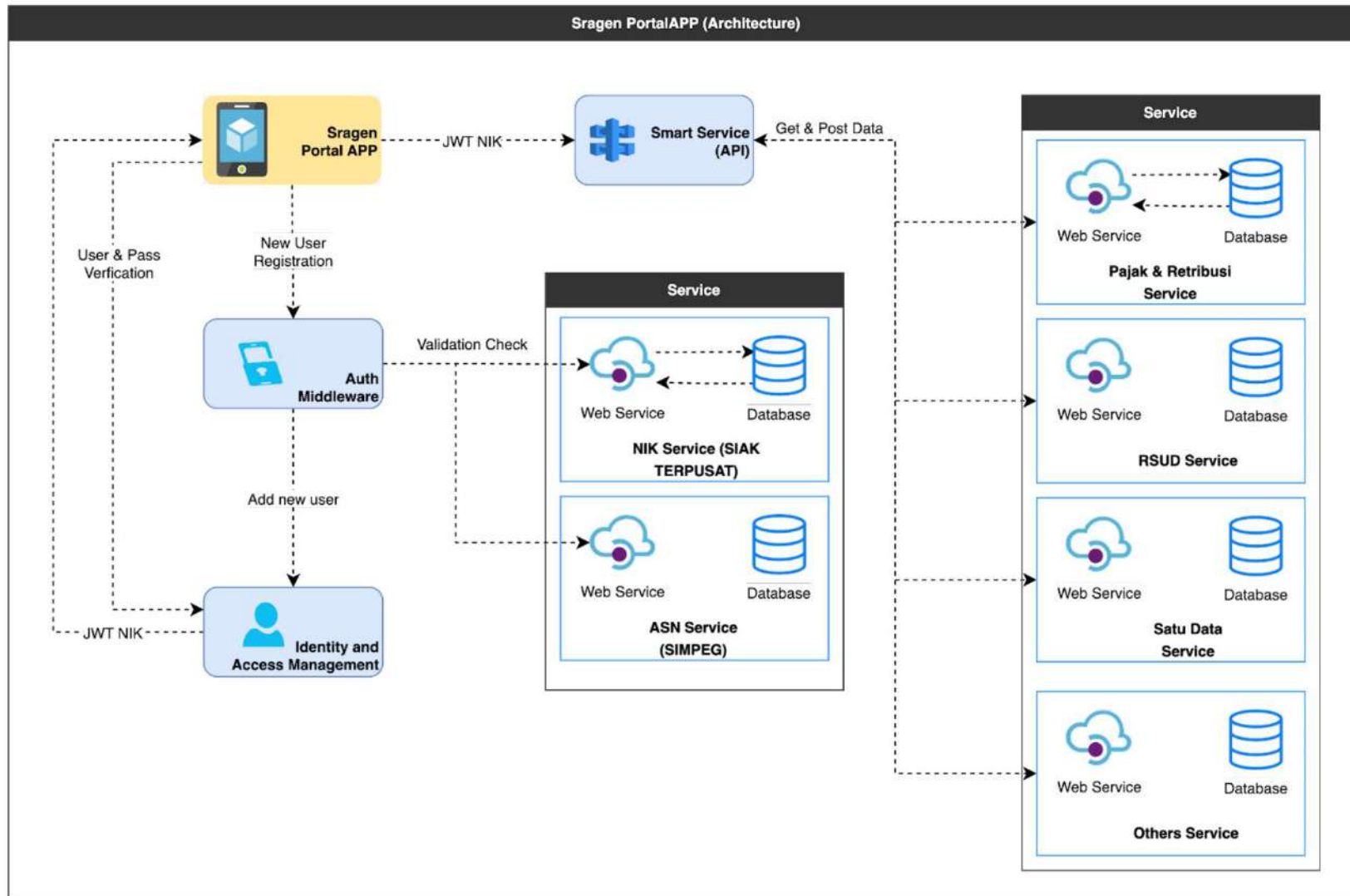
#	Layanan	Sub Layanan	Aplikasi
Layanan Publik			
	Pengumuman		RSS Feed Sragen
2	Berita dan Informasi		RSS Feed Sragen
3	CCTV		CCTV Online Sragen
4	Titik Wifi publik		Wifi Publik Sragen
5	Event		Event Sragen
6	Iklan Layanan Masyarakat		-
7	Kependudukan	Antrian Pendaftaran	SIANTON
		Layanan Kependudukan	PANDU ONLINE
		Admuduk Bayi Lahir	BARATA
		Palayanan Dokumen Kependudukan	PELANDUK POS
8	Ketenagakerjaan	Info Loker	e-MAKARYO LAPPAK SUKOWATI SIAPKERJASISNAKER
		Info Pelatihan	-
9	Pendidikan	PPDB Online	PPDB Online
10	Kesehatan	Pendaftaran Online	Daftar Online
		Info Bed	-
		Jadwal Dokter	-
		Antrian Online	Antrian Online SIMRS
		Penerbitan Akta	LANTERA
		Pendaftaran Pasien Puskesmas	-
11	Hukum	Diseminasi Kebijakan	JDIH dan JDIHN
12	Penanaman Modal	Peluang Investasi	SI PELANGI
		Perizinan	OSS dan SIPIONER
		Perizinan Penelitian	SIPIPO

#	Layanan	Sub	Aplikasi
		Aduan Perizinan	SIAP
13	Pajak & Retribusi	Pembayaran Pajak	-
		Uji Kendaraan Bermotor	NGE-KIR ONLINE
		Informasi Pajak	-
		Retribusi	e-Retribusi
14	Marketplace	Data Koperasi	SIKOPER
		Harga Pangan	-
		UMKM	-
15	Pariwisata	Destinasi Wisata	SIMPATI SIPEPAYA SITAGEN
16	Satu Data	Data Statistik & Geospasial	SRAGEN SATU DATA
17	Aduan Masyarakat		SP4N Laporan LAPORGUB
18	PPID	PPID	PPID Online
19	Transportasi	Informasi Transportasi	API
20	Social Media	Podcast	-
		Instagram	-
21	Televisi	TV Streaming	-
22	Scan QR		-
23	Agenda Perangkat Daerah		-
24	Standart Pelayanan Masyarakat	SPM	e-SPM
25	Survei Kepuasan Masyarakat	SKM	e-SKM
Layanan Internal Pemerintahan			
	Pengumuman ASN		
27	Persuratan	Persuratan	SRIKANDI
		TTE	TTE
28	Kepegawaian	Profil Kepegawaian	SIMPEG
		Presensi	-
		Cuti dan Izin	e-Cuti
		Pengembangan Kompetensi	-
		Kinerja Harian	-
29	Layanan TIK	Layanan TIK	ANAYA
30	Dashboard Pimpinan		-
31	Knowledge Management System		-
32	Push Notification		Firestore
33	Login Page		Keycloak
34	About		
35	FAQ		

Sragen Smart Services perlu dikembangkan secara bertahap dan dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Pengembangan Sragen Smart Services disesuaikan dengan dependensi dari berbagai aplikasi yang sudah ada. Selain itu dalam proses perancangan, desain ini harus disusun prioritas berdasarkan dari analisis

kompleksitas data dan fitur di masing-masing layanan. Pengembangan tahap pertama dimulai dengan mengembangkan *platform* dasar portal layanan. Tahap kedua mengintegrasikan layanan digital yang sudah didukung dengan API. Tahap ketiga membuat API dari layanan digital yang belum didukung dengan API. Tahap keempat terus melakukan *continuous improvement* dengan melakukan penambahan layanan-layanan baru yang dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Sragen.

Sragen Smart Services berperan sebagai aplikasi satelit (*satellite app*)/*aggregator* guna memindahkan *user interface* di sisi pengguna yang ada di masing-masing aplikasi utama (*main apps*) ke dalam portal. Portal tersebut menggunakan teknologi *Single Sign On (SSO)* seperti: *Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)*/*Keycloak* agar memudahkan pengguna yang terbagi menjadi 4 (empat) *roles*: admin, ASN Pemerintah Kabupaten Sragen, warga Sragen dan warga non Sragen yang dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1.4.2. Arsitektur Aplikasi Sragen Smart Services

2.2. Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan

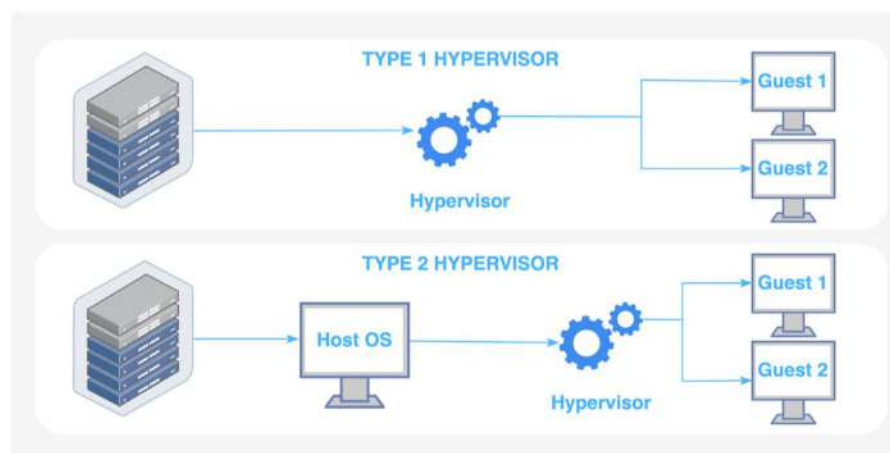
2.2.1. Tren Teknologi dan Praktek Terbaik (*Best Practice*)

2.2.1.1. Teknologi Virtualisasi

Virtualisasi merupakan pembagian pusat data fisik menjadi beberapa *virtual* pusat data yang lebih kecil dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan *resource* pusat data fisik. Dalam virtualisasi pusat data, *resource* dari pusat data fisik disembunyikan dari pengguna virtual pusat data, dan hanya admin yang bisa melihat *resource* asli dari pusat data fisik. Perbedaan arsitektur pusat data modern dengan pusat data tradisional (lama) adalah virtualisasi pusat data menggunakan *hypervisor* yang digunakan untuk membagi *resource* pusat data fisik ke dalam banyak *Virtual Environment* (VE) atau yang sering disebut *Virtual Private pusat data* (VPS), *Guests*, *Instance*, *Container* atau *Emulation*.

Sebuah server fisik bisa dibuat banyak virtual pusat data, VPS, *host* dengan spesifikasi *hardware* yang bisa ditentukan (asal tidak melebihi *resource* fisik) mulai dari jumlah *core CPU*, *RAM*, *Network Interface*, *Storage*, *BIOS* dll. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi *resource* pusat data fisik dapat dimanfaatkan secara optimal karena kita bisa meng-*install* beberapa sistem operasi yang akan dikonfigurasi menjadi pusat data sesuai kebutuhan tanpa membeli *hardware* baru.

Agar dapat mendukung implementasi virtualisasi pusat data, CPU dari sebuah pusat data harus mendukung teknologi virtualisasi, dan *hardware* saat ini sudah mendukung teknologi virtualisasi bahkan untuk komputer biasa pun sudah mendukung teknologi virtualisasi. Pada teknologi virtualisasi, sebuah pusat data dipecah ke dalam *virtual environment* dan setiap *virtual environment* dapat di-*install* sistem operasi yang berbeda dari sistem operasi pusat data fisik atau sistem operasi dari *virtual environment* lainnya. Ketika *virtual environment* berjalan *resource* yang digunakan tidak dapat diidentifikasi sehingga dalam teknologi virtualisasi diperlukan sebuah *Hypervisor* yang mengkoordinasi komunikasi dan instruksi antara *virtual environment* dengan resource fisik/*physical resource*. *Hypervisor* inilah yang dipegang oleh administrator dari sebuah pusat data yang mengimplementasikan teknologi virtualisasi untuk mengatur *virtual environment*.



Gambar 2.2.1.1.1 Dua Jenis *Hypervisor*

Terdapat 2 jenis *hypervisor* dalam dunia virtualisasi saat ini:

- *Hypervisor Type 1 (Bare Metal Hypervisor)*

Hypervisor ini mengakses langsung *hardware* fisik tanpa bantuan sistem operasi, dan biasanya untuk menggunakan *hypervisor* tipe 1 kita harus menginstall *hypervisor* sebagai sistem operasi bukan diinstall dalam sistem operasi.

Contoh *Hypervisor* Type 1 diantaranya: KVM, *Red hat Enterprise Virtualisation (RHEV)*, *XEN/Citrix Xenpusat data*, *Hyper-V, VMware vSphere/ESXi*.

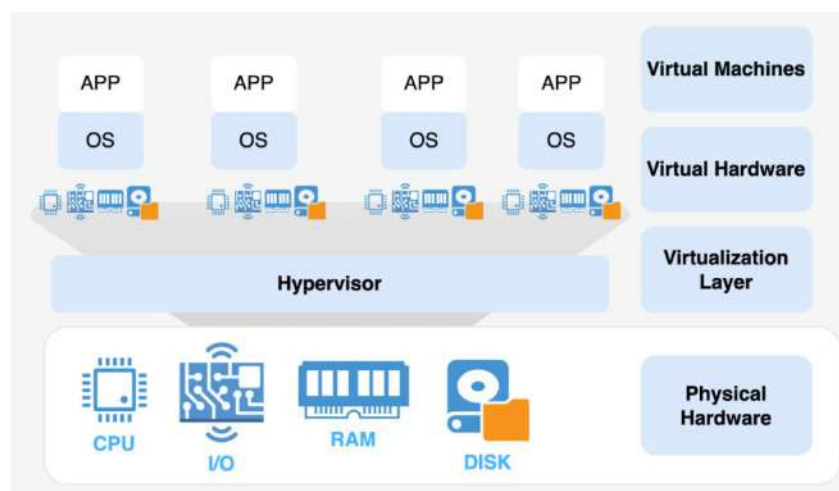
- *Hypervisor Tipe 2 (Hosted Hypervisor)*

Jenis *hypervisor* ini memerlukan sistem operasi untuk berjalan, karena jenis *hypervisor* ini berjalan di atas sistem operasi. Contoh *Hypervisor* Type 2 diantaranya: *VMware Work station, VMware Player*, dan *Virtualbox*.

Perkembangan implementasi dari teknologi virtualisasi meliputi pusat data, *storage*, DC & DRC, serta perkembangan terakhir yakni *container*.

1. Virtualisasi pusat data

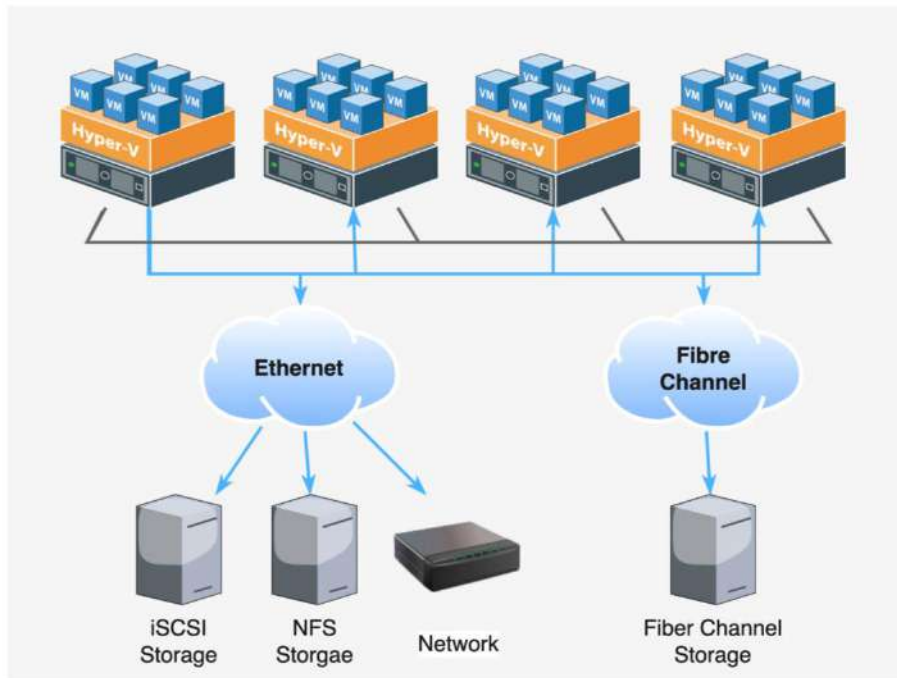
Adalah penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah *resource* fisik pusat data kedalam beberapa virtual pusat data yang nantinya akan diinstall berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan atau bisa juga *virtual* pusat data ini dijual/disewakan oleh pihak *hosting*. Kita sering mendengarnya dengan istilah VPS (*Virtual Private pusat data*) *hosting*.



Gambar 2.2.1.1.2. Lapisan-lapisan Teknologi Virtualisasi pusat data

Virtualisasi pusat data adalah melakukan konsolidasi dan melakukan pengurangan jumlah pusat data dalam bentuk fisik, dengan menciptakan mesin virtual dalam jumlah banyak yang ditempatkan di beberapa *host* fisik, menggunakan *storage* dan jaringan.

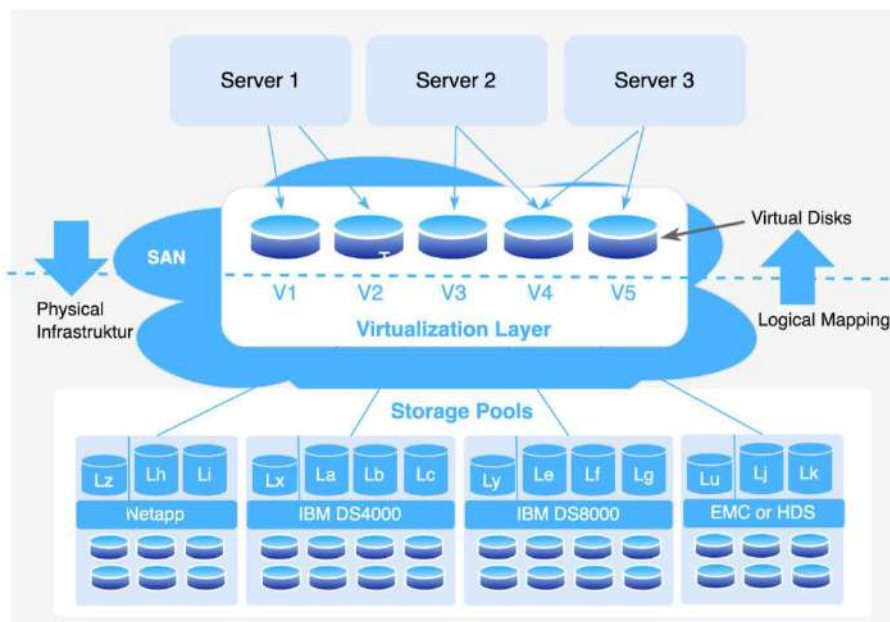
Virtualisasi memudahkan dalam perancangan pusat data dengan tingkat ketersediaan yang tinggi (*high-availability*) dengan teknik *clustering*, redundansi, dan replikasi.



Gambar 2.2.1.1.3 Topologi *Virtualisasi Pusat Data dan Storage* di Pusat Data

2. *Virtualisasi Storage*

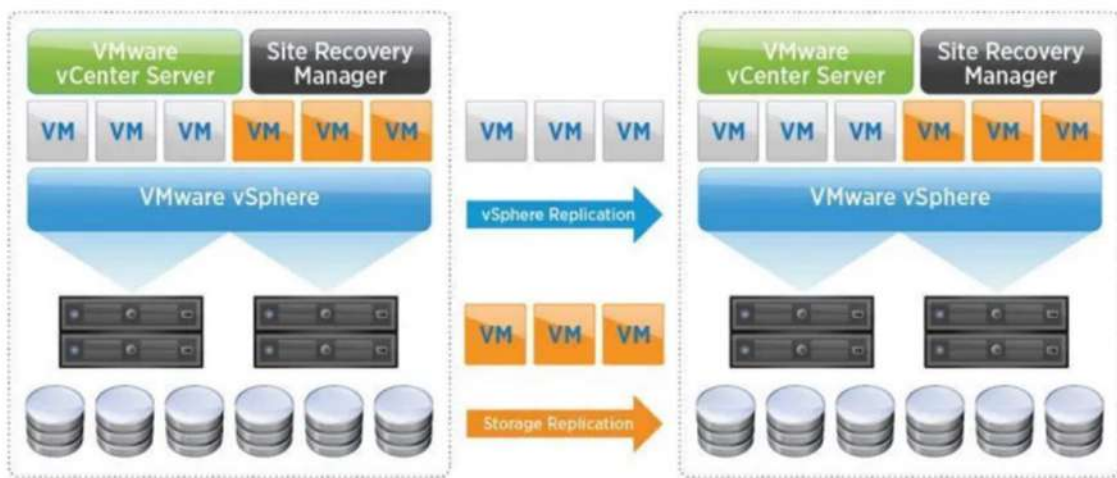
Virtualisasi storage menyediakan media penyimpanan (*storage*) yang terisolasi (terpisah dari *resource* fisik), aman dan mudah dalam *failover* dan *backup*. Salah satu contoh implementasi virtualisasi *storage* yang gampang kita lihat adalah fasilitas *cloud storage*, seperti: *DropBox* dan *Google drive* yang menyediakan/menyewakan *cloud storage* bagi pelanggannya dengan menawarkan *flexibilitas* dimana pengguna bisa mengakses *storage* kapanpun dan dimanapun.



Gambar 2.2.1.1.4 *Virtualisasi Storage*

3. Virtualisasi DC-DRC

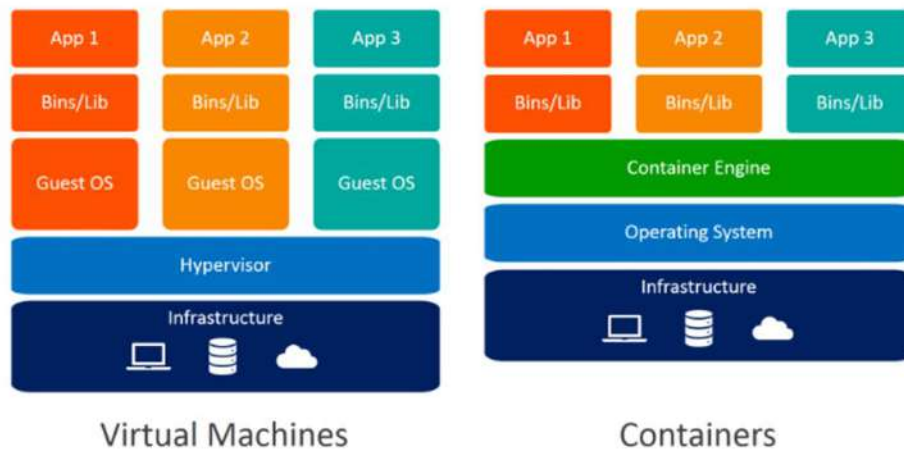
Penggunaan teknologi virtualisasi di pusat data dan *DRC* akan memudahkan dalam proses *backup*, replikasi, dan migrasi pusat data dan aplikasi. Virtualisasi juga memudahkan dalam melakukan *scale-up* atau *scale-down* pusat data sesuai dengan kebutuhan bisnis.



Gambar 2.2.1.1.5 Replikasi Pusat Data dengan Teknologi *Virtualisasi*

4. Container

Perkembangan dari teknologi virtualisasi yakni *container* yang menyatukan aplikasi dengan dependensinya sehingga dapat memberikan sistem yang terisolasi (*isolated environment*) pada level OS yang dijalankan pada satu induk *linux kernel* (*host*). Teknologi *container* merubah cara mengembangkan, mendistribusikan dan menyebarkan perangkat lunak.

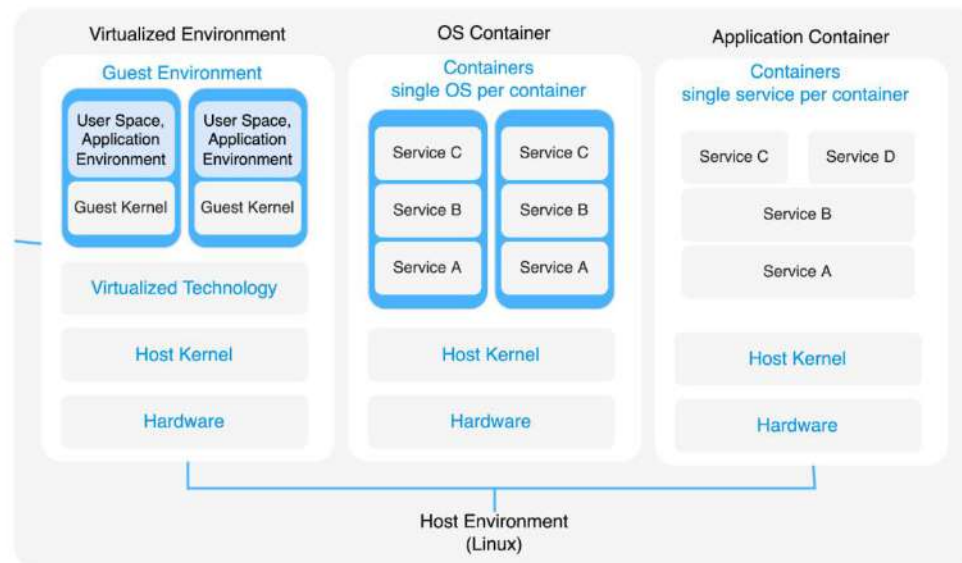


Gambar 2.2.1.1.6 Perbandingan Teknologi *Virtual Machines* dan *Containers*

Saat ini terdapat 2 jenis *container* yang umum dapat kita gunakan, yaitu:

- Container* berbasis sistem operasi (*OS Container*), yakni *container* yang memberikan isolasi pada level sistem operasi dan memanfaatkan kernel yang sama dari suatu induk, contohnya adalah LXC, OpenVZ, Linux Vpusat data, BSD Jails and Solaris zones.
- Container* berbasis aplikasi (*Application Containe*), yakni *container* yang memberikan isolasi pada level aplikasi dengan memanfaatkan beberapa

komponen yang ada pada sistem operasi induk, serta beberapa komponen pada *container-container* lain yang menjadi basis dari berjalannya sebuah aplikasi, contohnya adalah *Docker* dan *Rocket (rkt)*.



Gambar 2.2.1.1.7 Perbandingan Teknologi *Virtualisasi* dan *Container*
(sumber: <https://blog.andi.dirgantara.co/teknologi-kontainer-pengantar-pengenalan-docker-706eafe03269>)

Penggunaan teknologi *container* mempunyai banyak keuntungan, antara lain:

a. Ringan

Container menyediakan virtualisasi yang berbeda konsep dengan virtualisasi perangkat keras yang tersedia di mesin virtual (*Virtual Machine*). Menggunakan *host* dan kernel yang sama *container* berbagi manajemen memori, *management* proses, I/O dll, sementara proses pada tiap *container* terisolasi dan mempunyai dependensi terpisah.

b. Kinerja Maksimal

Karena *container* dikelola pada *host* yang sama, proses pada *container* dijalankan dengan kinerja sama seperti *host*, setiap proses yang dijalankan dalam *container* sebenarnya adalah proses dalam *host* yang di isolasi.

c. Konsumsi Sumber Daya Lebih Rendah

Karena *container* tidak membutuhkan virtualisasi perangkat keras yang penuh, satu *host* dapat mempunyai banyak *container* dibanding VM.

d. Cepat

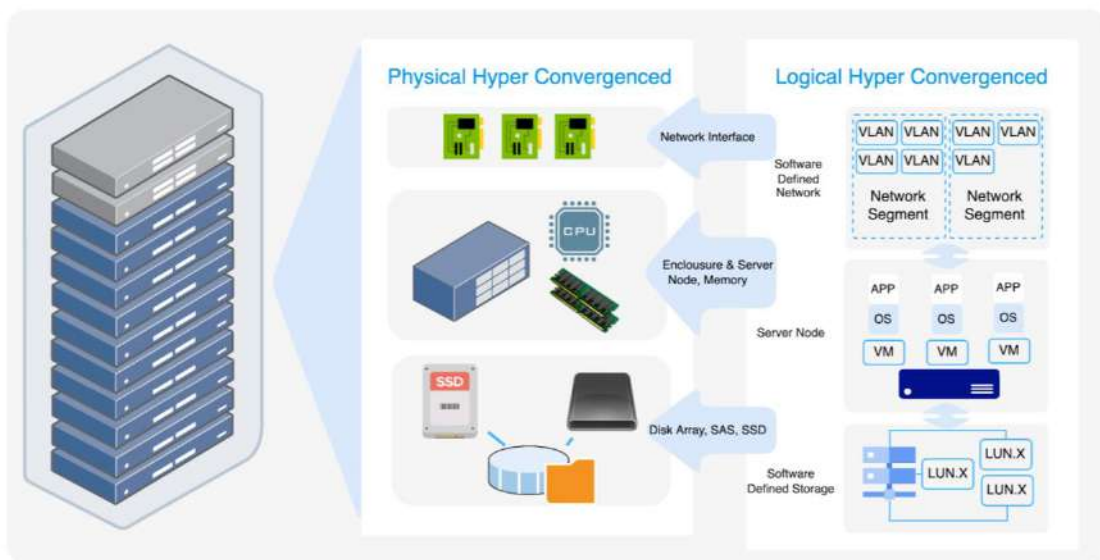
Proses perjalanan penyalan *server* (*booting*) dalam *container* hampir sama dengan proses *booting* pada *host*, dibanding *virtual machine* yang menjalankan proses tunggal namun harus melakukan *booting* pada sistem operasi secara penuh.

2.2.1.2. Hyper Converged Infrastructure (HCI) Pusat Data

Teknologi *hyper-convergence* ini menggabungkan teknologi jaringan (*network*), teknologi pusat data fisik serta teknologi media penyimpanan (*storage*), sehingga ketiganya sudah tersedia menjadi satu perangkat yang dikenal dengan istilah *enclosure*. Teknologi *hyper-convergence* ini memberikan kenyamanan dalam hal pengelolaannya karena jauh lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan tiga perangkat terpisah.

Pengelolaan ini tergabung menjadi satu aplikasi manajemen dan dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan rancangan di setiap organisasi. Adapun dari aspek kapasitas, teknologi ini sangat fleksibel dan mudah untuk ditingkatkan apabila ada kebutuhan tambahan kapasitas.

Pada aplikasi manajemen perangkat HCI dapat dilakukan konfigurasi jaringan berbasis perangkat lunak (*software defined network*), yaitu pengaturan jaringan virtual berbasis aplikasi. Pada aplikasi ini dapat dirancang jaringan yang kompleks walaupun tidak memiliki perangkat biasa. Lalu pada bagian pusat data, *enclosure* ini menyediakan *x86-based* pusat data yang dapat dikonfigurasi dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran informasi. Di samping itu terdapat bagian *storage* atau media penyimpanan yang juga dapat dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan, dengan berbasiskan aplikasi *software defined storage*. Ketiga perangkat ini tergabung menjadi satu sehingga memiliki kinerja yang sangat baik dan mudah untuk dikelola.



Gambar 2.2.1.2.1. Arsitektur pusat data Hyper Converged Infrastructure (HCI)

2.2.1.3. DevOps

1. Pengertian

DevOps adalah kombinasi dari budaya, praktik, dan alat untuk meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan agar proses *delivery* aplikasi dapat dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada proses pengembangan aplikasi secara tradisional. Sesuai dengan namanya, istilah DevOps adalah gabungan dari kata *Development* dan *Operations*. Jadi secara garis besar metodologi DevOps akan menguraikan proses pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang berkualitas tinggi dengan mengotomatiskan dan mengintegrasikan aktivitas dari tim *Development* (pengembang) dan tim *IT Operations* (operasi). Di bawah model DevOps ini, tim pengembang dan operasi akan bekerja bersama di seluruh tahapan daur hidup pengembangan aplikasi (*software development life cycle*) untuk menghasilkan produk digital yang berkualitas secara efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Manfaat

DevOps dirancang untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi yakni kecepatan dalam pemenuhan permintaan klien, dan faktor keamanan yang kadang diabaikan, dengan cara mengintegrasikan semua orang yang terkait dengan *software development* dan *deployment* baik itu *business users*, *developers*, *test engineers*, *security engineers*, *system administrators*, dan lain-lain. Tim ini akan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan fokus utama yaitu *delivery* produk / software berkualitas tinggi yang dapat memenuhi semua user requirements namun tetap mampu menjaga integritas dan stabilitas seluruh sistem. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan yang telah mengimplementasikan DevOps :

A. Perusahaan dapat bergerak dengan cepat

Praktik DevOps memungkinkan perusahaan dapat bergerak cepat dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan demikian, praktik ini mampu mendorong bisnis agar bisa berkembang dengan cepat.

B. Delivery yang cepat

Praktik DevOps dapat membantu perusahaan untuk dapat merilis produk dengan waktu yang lebih cepat. Dengan cara ini, perusahaan memiliki peluang untuk bisa lebih unggul dari kompetitor.

C. Keandalan

DevOps bekerja seperti pada praktik CI/CD (*Continuous Integration / Continuous Delivery*) yang dapat membantu tim memastikan bahwa produk yang dikembangkan memiliki kualitas yang tinggi. Di sisi lain, tim juga dapat mengirim produk yang andal dengan kecepatan tinggi.

D. Kolaborasi tim yang lebih baik

Di bawah model DevOps, tim pengembang dan tim operasi akan berkolaborasi, berbagi tanggung jawab, dan menggabungkan alur kerja mereka. Cara ini dapat membantu tim untuk bekerja secara efektif dan efisien.

E. Aman

Tim dapat mengadopsi model DevOps tanpa perlu mengorbankan keamanan dengan menggunakan alat pengujian keamanan terintegrasi dan otomatis.

3. DevOps Pipeline

Pipeline DevOps adalah sekumpulan proses yang memungkinkan tim developer dan tim IT operations dapat bekerja sama untuk membangun dan menerapkan kode ke

lingkungan produksi (*production environment*). Secara garis besar fase DevOps pipeline meliputi:

A. Plan

Fase ini melibatkan perencanaan untuk seluruh alur kerja yang dibutuhkan sebelum tim pengembang mulai menulis kode. Dalam tahap ini, manajer produk dan manajer proyek akan memainkan peran penting. Mereka akan bekerjasama untuk mengumpulkan requirements dan feedback dari klien ataupun *stakeholders*. Informasi tersebut kemudian akan dikumpulkan untuk membangun lini masa produk untuk memandu proses pengembangan yang akan dilakukan.

B. Code

Setelah rencana dibuat, tim developer dapat mulai menulis kode yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk. Tim developer biasanya akan menggunakan seperangkat *plugin* standar yang dipasang di lingkungan pengembangan mereka untuk membantu proses pengembangan, membantu menerapkan gaya kode yang konsisten, serta menghindari kelemahan keamanan umum dan anti-pattern.

C. Build

Setelah tim developer selesai menulis kode yang dibutuhkan, mereka akan memasukan kode tersebut ke dalam *shared code repository*. Developer akan mengirimkan *pull request*, setelah developer yang lain akan mereview perubahan yang telah dilakukan. Jika kode tidak memiliki masalah, maka developer tersebut akan menyetujui *pull request* yang telah dikirim sebelumnya.

D. Test

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian. Jika ada masalah yang ditemukan pada fase ini, maka masalah tersebut akan dikirim kembali ke tim developer untuk diselesaikan.

E. Release

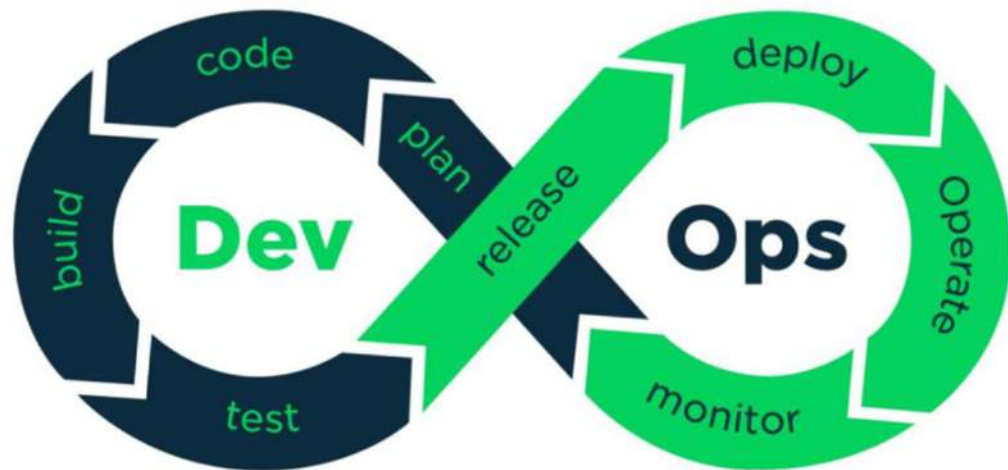
Fase release menjadi tonggak penting dalam DevOps pipeline. Pada tahap ini, setiap perubahan kode telah melewati serangkaian pengujian dan tim IT operations telah memastikan bahwa masalah yang merusak dan regresi sudah teratasi dengan baik.

F. Deploy

Tahap selanjutnya adalah deployment. Setelah *production environment* dibuat dan dikonfigurasi maka versi terakhir dari pengembangan yang telah dilakukan akan diterapkan.

G. Monitor

Pada tahap terakhir ini, tim IT operations akan terus bekerja keras untuk memantau infrastruktur, sistem, dan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan dengan lancar. Mereka juga mengumpulkan data-data penting dari log, analitik, sistem monitoring, serta melihat *feedback* dari pengguna untuk mengetahui jika ada masalah pada kinerja aplikasi.



Gambar 2.2.1.3.1. DevOps Pipeline (Sumber: blog.isostech.com)

4. Praktik Terbaik untuk DevOps yang Efektif

Untuk menjalankan DevOps secara efektif terdapat beberapa praktik yang dapat diterapkan, yaitu:

1. *Continuous Integration* (CI)

Continuous Integration adalah praktik dalam *software development* dimana tim developer akan secara rutin menggabungkan pembaruan kode ke dalam *central repository*. Tujuan utama dari CI adalah menemukan dan mengatasi *bug* lebih cepat, meningkatkan kualitas perangkat lunak, dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memvalidasi dan merilis pembaruan perangkat lunak yang baru.

2. *Continuous Delivery* (CD)

Continuous Delivery adalah praktik dalam *software development* yang memastikan bahwa kode selalu dalam status "*deployable*". Artinya, setiap perubahan yang ada di dalam kode seperti penambahan fitur, perbaikan bug, perubahan konfigurasi, atau yang lain, akan selalu siap untuk diterapkan ke dalam *production environment* atau bahkan ke tangan user dengan cepat, aman, dan berkelanjutan.

3. *Microservices*

Microservice adalah gaya arsitektur yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi yang kompleks. Implementasi arsitektur ini memungkinkan aplikasi yang sedang dikembangkan menjadi sangat mudah dipelihara dan “*testable*”.

4. *Infrastructure as Code (IaC)*

Infrastructure as Code adalah sebuah pendekatan untuk mengelola data center server, storage, dan infrastruktur jaringan. IaC digunakan untuk menyederhanakan konfigurasi dan manajemen skala besar secara signifikan.

5. *Monitoring dan logging*

Monitoring dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan cepat sehingga dapat mencegah munculnya masalah lain yang lebih besar. Dengan cara ini, tim mampu mengukur kinerja aplikasi/ software dan memastikan sistem tetap bekerja secara stabil.

Selain itu, tim juga akan menganalisis log yang dihasilkan oleh aplikasi. Dengan demikian, tim DevOps dapat lebih memahami bagaimana perubahan atau pembaruan perangkat lunak yang telah dilakukan dapat memengaruhi user.

5. Peta Jalan (Road Map)

DevOps

Implementasi DevOps tidak bisa dilakukan secara langsung tetapi harus melalui beberapa tahapan karena DevOps akan merubah pola atau budaya kerja. Peta jalan perlu disusun untuk memudahkan dalam pemantauan dan kontrol.



Gambar 2.2.1.3.2. Peta Jalan Implementasi DevOps

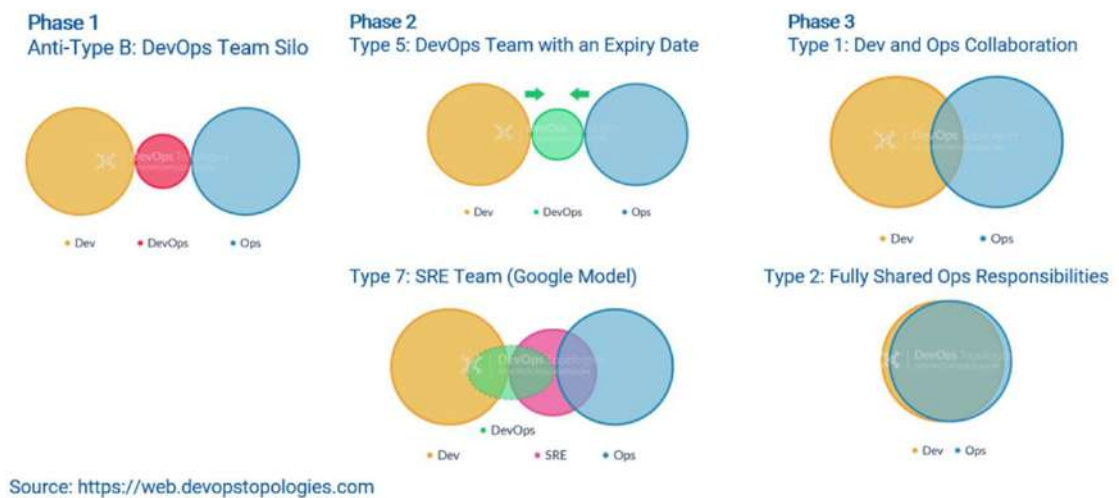
6. Tools DevOps

Untuk mengimplementasikan DevOps diperlukan aplikasi pendukung (tools) antara lain:

1. Version Control
 - a. Github
 - b. Bitbucket
 - c. GitLab
2. Container Management tools
 - a. Docker
 - b. Kubernetes
 - c. Mesos
3. Application Performance Monitoring tools
 - a. Prometheus
 - b. Dynatrace
 - c. AppDynamics
4. Deployment & Server Monitoring tools
 - a. Datadog
 - b. Sensu
5. Configuration Management tools
 - a. Chef
 - b. Puppet
 - c. Ansible
6. CI / Deployment Automation tools
 - a. Bamboo
 - b. Jenkins
 - c. IBM UrbanCode
7. Test Automation tools
 - a. Test.ai
 - b. Ranorex
 - c. Selenium
8. Artifact Management tools
 - a. JFRog Artifactory
 - b. Sonatype NEXUS
9. Codeless Test Automation tools
 - a. Testim.io
 - b. AccelQ

7. Transformasi Tim

Terdapat beberapa metodologi untuk topologi implementasi DevOps khususnya transformasi tim.



Gambar 2.2.1.3.3. Transformasi Tim DevOps

2.2.1.4.

Microservices

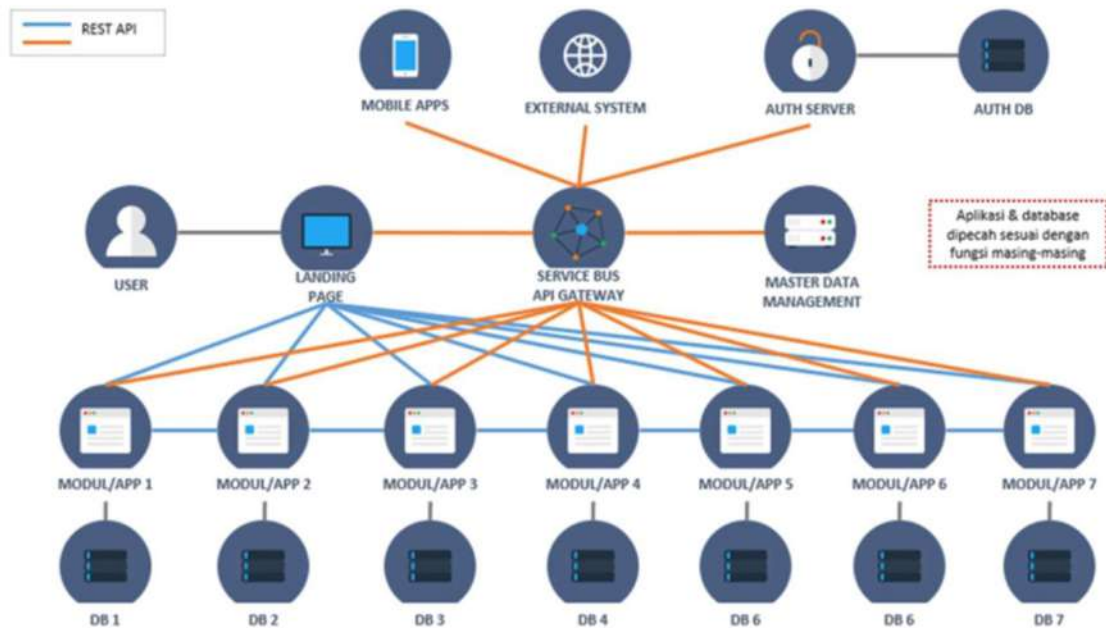
Secara sederhana, arsitektur aplikasi *microservices* menggunakan desain yang memecah aplikasi berdasarkan fungsinya secara spesifik. Aplikasi *microservices* tidak sekedar memisahkan berdasarkan *user-role* atau subdomain saja, tetapi aplikasi akan di *breakdown* lebih rinci lagi dari sisi fungsionalitasnya. Aplikasi akan dirancang agar setiap fungsi bekerja secara independen. Setiap fungsi dapat menggunakan teknologi *stack* yang sesuai dengan kebutuhan, walaupun artinya akan terdapat teknologi yang berbeda-beda dalam satu aplikasi besar. Setiap *microservices* merupakan aplikasi kecil yang memiliki arsitektur heksagonal sendiri yang terdiri dari logika beserta berbagai adaptornya (bahasa pemrograman, dll).

Pola arsitektur *microservices* secara signifikan mempengaruhi hubungan antara aplikasi dan database. Berbagai skema *database* tunggal dengan *services* lainnya memiliki skema *database* tersendiri. Pendekatan ini bertentangan dengan gagasan model data *enterprise-wide* yang sering kali menghasilkan duplikasi beberapa data. Memiliki skema *database* per *service* sangat penting jika ingin mendapatkan keuntungan dari layanan *microservice*. Masing-masing *service* memiliki *database* sendiri. Selain itu, *services* dapat menggunakan jenis *database* dan bahasa pemrograman yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Microservices membagi *service* ke bagian yang lebih kecil dimana *service-service* tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, dalam setiap *services* yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda. Sedangkan untuk implementasi ke *web*, *android*, *iOS* dll tidak bisa secara langsung, pengembang harus membuat terlebih dahulu yang namanya *API Gateway*. *API Gateway* memiliki tugas seperti *load balancing*, *caching*, *access controll*, *API metering*, dan monitoring.

Aplikasi yang dibangun dengan menggunakan arsitektur *microservices* pada setiap modul memerlukan *engine* seperti *web server* serta basis data (*micro database*) yang akan berdampak terhadap peningkatan kinerja aplikasi yang signifikan. Di samping itu

keamanan aplikasi akan lebih terjamin dengan melakukan pengamanan melalui *REST API*, sehingga transaksi dan pertukaran data yang dilakukan akan lebih terjaga.



Gambar 2.2.1.4.1. Arsitektur *Microservices*

Arsitektur *microservices* mempunyai kelebihan sebagai berikut:

A. Komponen Terpisah

Pertama, semua layanan dapat digunakan dan diperbarui secara independen, sehingga memberikan lebih banyak fleksibilitas. Kedua, *bug* dalam satu *microservices* berdampak pada layanan tertentu dan tidak memengaruhi keseluruhan aplikasi. Selain itu, jauh lebih mudah untuk menambahkan fitur-fitur baru ke aplikasi yang dikembangkan dengan arsitektur *microservices* daripada aplikasi yang menggunakan arsitektur monolitik.

B. Pemahaman yang Lebih Mudah

Arsitektur aplikasi dengan *microservices* lebih mudah dipahami dan dikelola karena aplikasi dibagi menjadi komponen yang lebih kecil dan sederhana. Hal ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk fokus hanya pada layanan spesifik yang terkait dengan tujuan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya.

C. Skalabilitas yang Lebih Baik

Keuntungan lain dari pendekatan *microservices* adalah bahwa setiap elemen dapat diskalakan secara independen sehingga proses lebih efektif baik dari segi biaya dan waktu dibandingkan dengan dengan pendekatan *monolitik* dimana seluruh komponen pembentuk aplikasi harus ditingkatkan meskipun hal tersebut tidak diperlukan. Selain itu, setiap arsitektur monolitik memiliki batasan dalam hal skalabilitas komponen infrastrukturnya, sehingga semakin kompleks elemen, maka semakin banyak masalah yang berpotensi muncul.

Selain memiliki keuntungan, arsitektur *microservices* memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut :

A. Kompleksitas Ekstra

Arsitektur layanan *microservices* merupakan sistem terdistribusi dengan kompleksitas ekstra sehingga harus memilih dan mengatur koneksi antara semua modul dan *database*. Lebih lanjut, aplikasi tersebut termasuk layanan independen, semuanya harus dikerahkan secara independen.

B. Distribusi Sistem

Arsitektur layanan *microservices* adalah sistem kompleks dari banyak modul dan basis data sehingga semua koneksi harus ditangani dengan hati-hati.

C. Fungsi Lintas Sektor (Cross-Functional) Bertambah

Saat membuat aplikasi *microservices*, pengembang harus berurusan dengan sejumlah masalah lintas sektoral termasuk konfigurasi eksternal, *logging*, metrik, pemeriksaan kesehatan, dan lainnya.

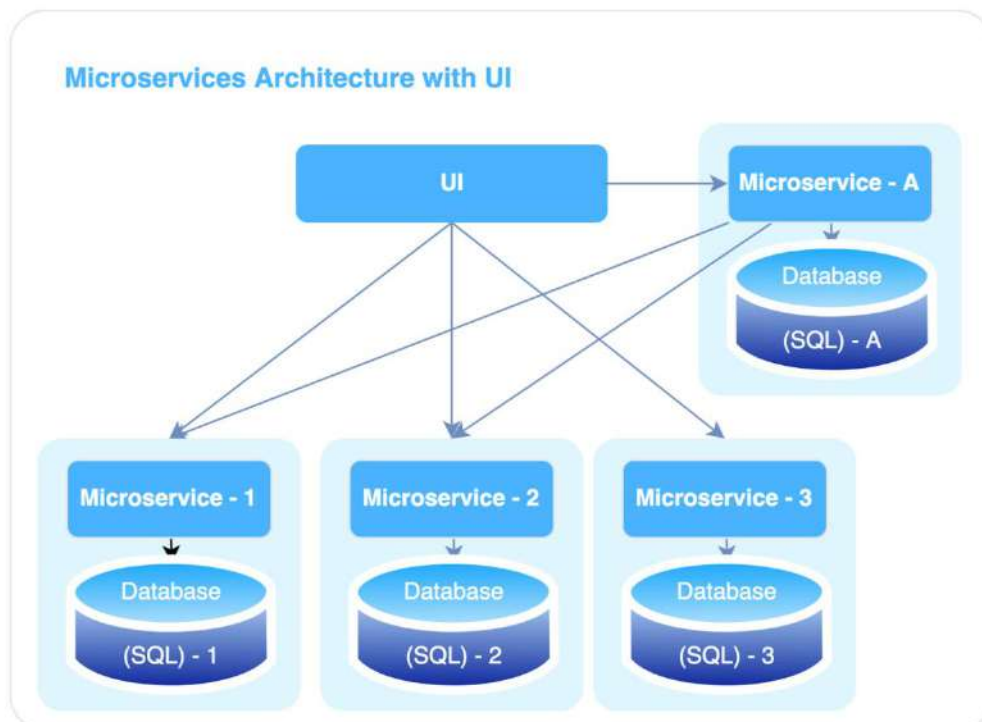
D. Pengujian

Sebagian besar komponen yang dapat digunakan secara terpisah membuat pengujian solusi berbasis layanan jauh lebih sulit.

Arsitektur Pangkalan Data (Database)

Microservices

Arsitektur basis data yang akan diterapkan pada arsitektur aplikasi *microservices* menggunakan *two-tier architecture*, dimana dalam setiap modul aplikasi tersebut memiliki pangkalan data masing-masing sesuai dengan perannya, seperti: terlihat pada gambar berikut.

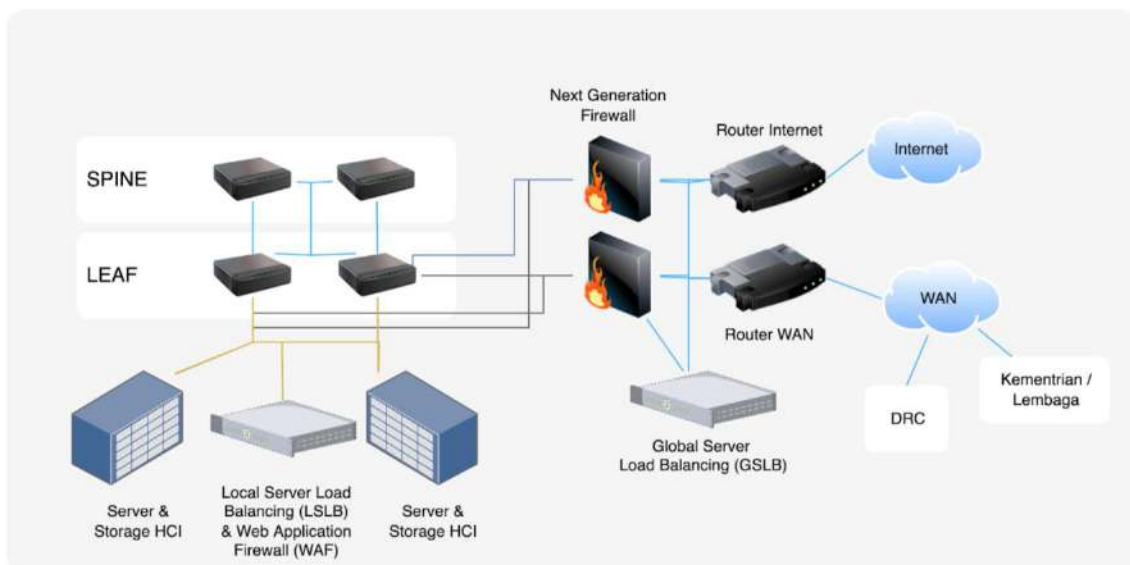


Gambar 2.2.1.4.2. Arsitektur Pangkalan Data *Microservices*

2.2.1.5. Arsitektur *Network Spine-Leaf* Pusat Data

Arsitektur *Spine-Leaf* adalah topologi jaringan pusat data yang terdiri dari dua lapisan *switching*: *Spine* and *Leaf*. *Leaf layer* terdiri dari *switch* akses yang mengumpulkan lalu lintas dari pusat data dan terhubung langsung ke *spine layer* atau jaringan inti. *Switch Spine-Leaf* menghubungkan semua *switch leaf* dalam topologi penuh ke *switch core*.

Prevalensi infrastruktur *cloud* dan *container* di pusat data modern serta lalu lintas jaringan terus meningkat. Lalu lintas pada jaringan bergerak menyamping dari satu pusat data ke pusat data lainnya. Perubahan ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa aplikasi modern memiliki komponen yang didistribusikan di lebih banyak pusat data atau mesin virtual.



Gambar 2.2.1.6.1. Arsitektur *Network Spine-Leaf Datacenter*

2.2.1.6. OWASP 10 - 2021

OWASP TOP 10 atau yang biasa disebut OWASP 10 adalah sebuah daftar teratas kerentanan keamanan yang dapat mengancam keamanan suatu *website* yang dirilis oleh komunitas OWASP (*Open Web Application Security Project*). Daftar ini terus berkembang dan berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi *website/aplikasi web* yang terus berkembang dan versi terakhir adalah 2021. OWASP Top 10 adalah sebuah panduan bagi para *developers* dan *security team* tentang kelemahan-kelemahan pada *web apps* yang mudah diserang dan harus segera disiasati.

Berikut daftar OWASP Top 10:2021:

A. A01:2021-Broken Access Control

Aplikasi tidak akan bekerja dengan baik sesuai fungsinya jika penerapan otorisasi hak akses tidak berjalan efektif. Misalnya, apabila pengguna aplikasi (*user*) berhasil melewati halaman *login*, selanjutnya pengguna dapat bebas menjalankan operasi apabila mengakses tautan web tertentu dalam halaman admin, padahal mereka tidak memiliki akses.

Access control atau lebih sering disebut sebagai otorisasi, adalah suatu proses pemberian akses fungsi atau konten kepada beberapa pengguna, dan tidak kepada pengguna lain dalam suatu aplikasi. Proses ini terjadi setelah pengguna berhasil melakukan otentikasi atau lebih umum dikenal dengan proses *login*. *Access Control* seringkali tidak didefinisikan, dibentuk dan didesain secara keseluruhan pada awal pembuatan aplikasi, melainkan berkembang seiring dengan perkembangan aplikasi itu sendiri. Pada setiap fungsi baru yang ditambahkan, aturan *access control* akan disisipkan. Hal ini menyebabkan aturan *access control* yang terkumpul akhirnya menjadi rumit dan sulit dipahami.

B. A02:2021-*Cryptographic Failures*

Implementasi enkripsi atau kriptografi yang buruk pada sebuah data sensitif, sehingga mengakibatkan permasalahan terhadap perlindungan dan kerahasiaan data, baik saat pengiriman data maupun ketika data disimpan. Permasalahan pada konsep kriptografi yang buruk sering menyebabkan maraknya data *breach*, karena data yang tidak terenkripsi kerap kali dimanfaatkan oleh *attacker* untuk mengakses data yang lebih tinggi lagi.

C. A03:2021-*Injection*

Sistem / program memproses sebuah data yang tidak valid, yang mengakibatkan peretas (*hacker*) yakni orang dengan kemampuan teknis komputer tertentu yang dapat menerobos masuk ke dalam aplikasi web suatu organisasi, dengan cara memecahkan kode-kode atau sandi-sandi melalui jaringan komputer atau internet. Peretas dapat menginputkan kode tertentu kepada program lalu kode tersebut akan membuat program menjalankan perintah yang salah.

D. A04:2021-*Insecure Design*

Insecure Design merujuk pada salah satu daftar kerentanan keamanan yang dirilis oleh OWASP (*Open Web Application Security Project*). Kerentanan ini mengacu pada kelemahan yang terkait dengan desain atau arsitektur aplikasi atau sistem yang memungkinkan serangan atau pelanggaran keamanan. Hal ini dapat terjadi karena pengembang tidak memperhatikan keamanan dalam tahap perancangan atau desain sistem. Dengan demikian pengembang perlu menerapkan prinsip keamanan salah satunya *Secure By Design* pada tahapan awal desain program atau aplikasi. *Secure By Design* dalam dunia *software engineering* adalah sebuah *software* yang seharusnya memiliki kapabilitas *design* yang cukup aman secara fundamental. Setiap *attacker* mendapatkan sebuah informasi sensitif yang terdapat pada pesan *error*, hal tersebut dapat terjadi karena pengembang tidak menggunakan *error handler* dengan baik.

Hal tersebut sering terjadi ketika pengguna salah mengisi *input* seperti tidak sesuai tipe data yang diminta, kurang nya jumlah *character*, atau pengguna tidak sengaja mengisi null pada sebuah *input request*.

E. A05:2021-*Security Misconfiguration*

Security Misconfiguration merupakan kerentanan keamanan yang terjadi karena konfigurasi atau pengaturan sistem yang tidak tepat pada suatu aplikasi atau infrastruktur teknologi informasi. Hal ini dapat terjadi ketika pengembang tidak melakukan konfigurasi atau pengaturan dengan benar, atau tidak memperbarui dan memperbaiki konfigurasi yang sudah ada. Akibatnya, peretas dapat dengan mudah menemukan celah keamanan dan memanfaatkannya untuk melakukan serangan ke sistem atau aplikasi yang rentan tersebut.

F. A06:2021-*Vulnerable and Outdated Components*

Kondisi dimana pengembang masih menggunakan sebuah aplikasi, *framework*, *library*, atau komponen versi lawas (*outdated*), dan pengembang tidak melakukan pengecekan apakah aplikasi sudah dilakukan *patching*, atau *updating*.

G. A07:2021-*Identification and Authentication Failures*

Sebuah kerentanan yang terjadi pada aktivitas pengidentifikasian serta autentikasi. Kerentanan ini disebabkan karena sistem pengidentifikasian dan autentikasi gagal mengidentifikasi pengguna, nantinya akan menyebabkan pengguna dapat terautentikasi sebagai pengguna lain, secara sengaja maupun tidak di sengaja.

H. A08:2021-*Software and Data Integrity Failures*

Gagalnya sebuah *software*/aplikasi memeriksa integritas sebuah data, yang disebabkan tidak terimplementasinya *development life cycle* dengan benar, yang mana beberapa pengembang sering melewatkan proses tes integritas sebuah data sebelum *release*, atau tidak melakukan *code review/static analysis* pada aplikasi yang akan di *deploy* dan di *release* untuk memastikan tidak ada *malicious code* yang tertanam pada *software*/aplikasi.

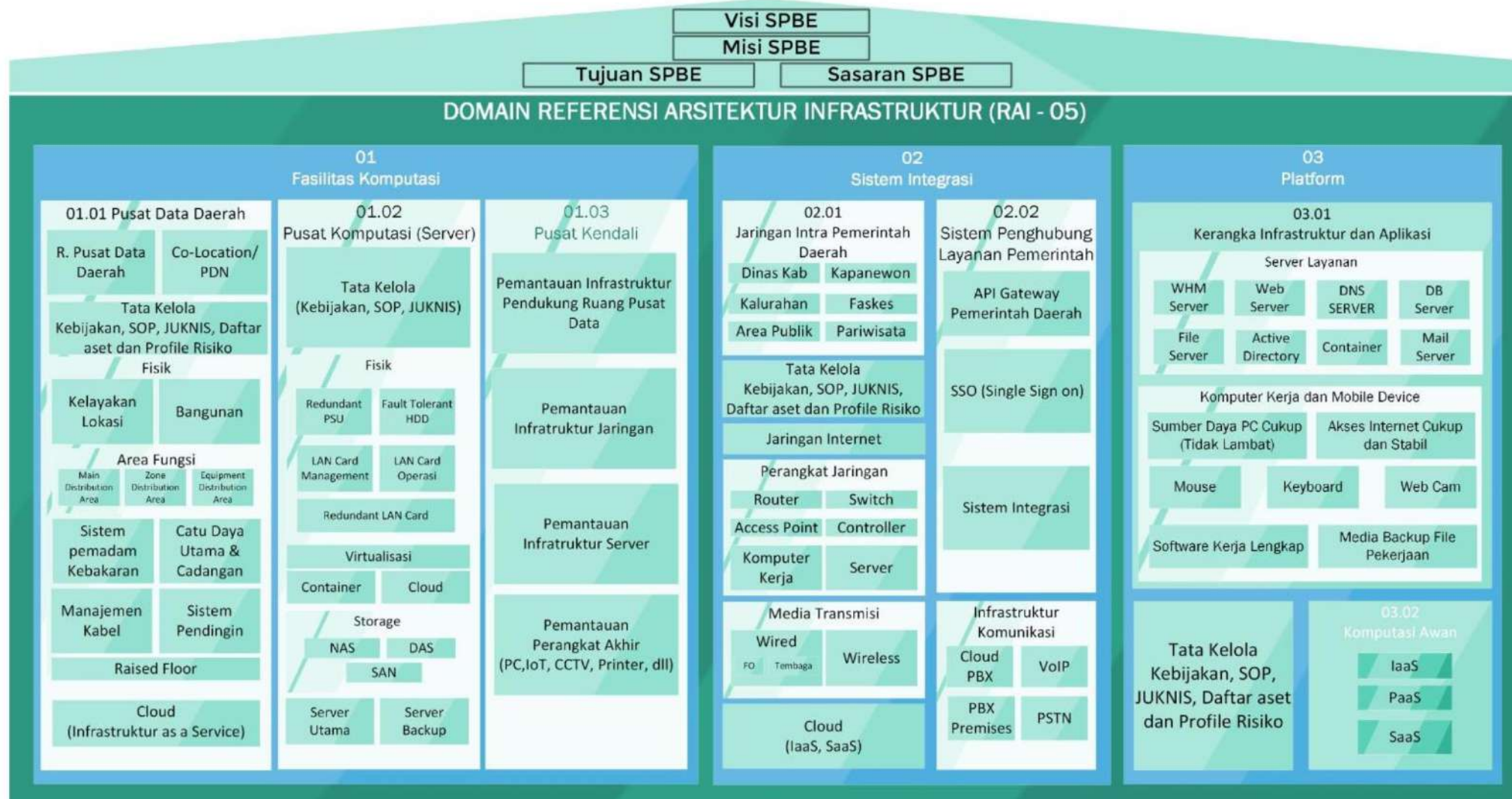
I. A09:2021-*Security Logging and Monitoring Failures*

Kondisi ketika pusat data/aplikasi tidak terpantau dengan baik, biasanya disebabkan karena manajemen rekam jejak (*log management*) yang buruk dan *log* yang tidak terformat dengan baik. Selain itu juga terdapat faktor kesalahan manusia (*human error*), yakni ketika tim *Security Operation Center* (SOC) tidak melakukan pemeriksaan lanjutan atau melakukan analisis *log* secara proaktif terhadap *alert*.

J. A10:2021-*Side Request Forgery*

Kondisi kerentanan saat sebuah aplikasi *web* meminta *remote resource* tanpa melakukan validasi URL. Hal ini menyebabkan *hacker* dapat memaksa aplikasi untuk mengirim *crafted request* ke destinasi yang tidak diharapkan, meskipun sudah dilindungi oleh *firewall*, VPN, atau tipe lain.

2.2.2. Infrastruktur SPBE



Gambar 2.2.2.1. Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen

2.2.2.1. Prinsip-prinsip Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur TI merupakan tulang punggung dalam integrasi proses kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai media transfer data dari pusat data ke pengguna data atau dari sumber data ke pusat data. Untuk menjamin data terkirim dengan baik dan aman, maka pengembangan infrastruktur TI harus memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:



Gambar 2.2.2.1.1 Prinsip Pengembangan Infrastruktur SPBE

A. Peningkatan Kapasitas (*Scalable*)

Kemampuan infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menangani pertumbuhan beban kerja dengan lancar. Data, proses, dan pengguna seiring berjalannya waktu akan semakin bertambah besar dan kompleks sehingga menuntut infrastruktur TI untuk beradaptasi dengan tuntutan bisnis tersebut.

B. Kemudahan Pengelolaan (*Manageable*)

Pengelolaan infrastruktur TI oleh Pemerintah Kabupaten Sragen akan mudah dilakukan melalui alat pengelolaan infrastruktur TI maupun dengan mempelajari infrastruktur yang ada di Pemerintah Kabupaten Sragen. Salah satu contoh kemudahan dalam pengelolaan adalah pengalokasian *IP Address* menggunakan *DHCP (Domain Host Control Protocol)* oleh sistem administrator, sehingga memudahkan dalam mengatur *IP Address* komputer pengguna dalam jumlah besar.

C. Tingkat Ketersediaan Tinggi (*Available*)

Infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Sragen dapat beroperasi sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang telah disepakati atau ditarget. Pencegahan terhadap kegagalan, komponen infrastruktur TI dapat memanfaatkan *redundancy*. *Redundancy* merupakan mekanisme penduplikasian komponen kritis pada infrastruktur TI, sehingga ketika komponen utama mengalami kegagalan fungsinya dapat digantikan oleh komponen cadangan.

D. Kemudahan dalam Perbaikan (*Serviceable*)

Kemampuan infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Sragen dalam kemudahan perbaikan infrastruktur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. *SLA*

terkadang mencantumkan persyaratan *downtime* dari sebuah komponen infrastruktur TI, sehingga kemudahan dalam perbaikan sangat diperlukan untuk mempertahankan SLA tersebut. Kemudahan dalam perbaikan infrastruktur TI (*server, storage, dll*) jika terjadi kerusakan dapat diperoleh dengan memilih teknologi teruji di industri dan memiliki dukungan teknis dari *vendor* yang dapat diandalkan.

E. Keamanan (*Secure*)

Infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Sragen hendaknya dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data maupun sistem. Keamanan tidak hanya melibatkan pencegahan akses yang tidak sah, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui infrastruktur TI terjaga keasliannya. Sebagai contoh, pengguna harus melewati proses otentikasi dan otorisasi sebelum mengakses sistem, dan digital signature dapat digunakan untuk memastikan bahwa data dikirim dengan benar dan tidak berubah selama proses transfer.

2.2.2.2. Pusat Data

Infrastruktur *server, storage*, perangkat jaringan, dan perangkat keamanan jaringan perlu ditempatkan, disimpan pada suatu lokasi yang terstandarisasi untuk sistem elektronik maupun pengolahan data yang disebut pusat data. Selain itu juga untuk menjaga keberlangsungan layanan dan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia maka diperlukan Pusat Pemulihan Bencana (*disaster recovery center*).

Berikut ini adalah prinsip dan kriteria dalam perancangan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana antara lain adalah:

A. Ketersediaan (*Availability*)

Pusat data dibuat untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi suatu perusahaan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Pusat data harus dibuat sebisa mungkin menghindari kegagalan (*zero-failure*) untuk seluruh komponennya.

B. Skalabilitas (*Scalability*)

Pusat data harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika ada servis baru yang harus disediakan oleh pusat data tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi pusat data secara keseluruhan. Selain itu juga kemudahan dalam implementasi tanpa perlu membeli komponen infrastruktur tambahan, dan aplikasi.

C. Keamanan (*Security*)

Pusat data menyimpan berbagai aset perusahaan yang berharga berupa aset fisik (*tangible*) seperti perangkat pusat data, jaringan, dan lain - lain maupun non fisik (*intangible*) yakni data data dan informasi. Oleh karenanya sistem pengamanan

pusat data dibuat seketat mungkin meliputi pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.

D. Kemudahan *Backup dan Recovery*

Pusat data yang ada mudah untuk di *backup* termasuk seluruh konfigurasi sistem. Jika terjadi *crash* atau kerusakan pada *pusat data* maka mudah untuk di *recovery* tanpa perlu instalasi dan konfigurasi sehingga hemat waktu, tenaga dan sumber daya.

E. Kemudahan *Deployment*

Pusat data dapat digandakan (*cloning*) dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi sehingga mempercepat proses implementasi suatu sistem.

F. Fleksibel (*Flexibility*)

Kemudahan dalam pengelolaan pusat data seperti ketika ingin memindah, merubah *resource* bahkan ketika kita ingin melakukan *live migration* atau memindahkan pusat data dalam keadaan hidup tanpa mengalami *down*. Apabila terjadi kerusakan/*error* pada *server, storage* yang ditempatkan di pusat data dapat dilakukan penginstalan dan pemulihan (*recovery*) kembali.

G. Redudansi

Untuk menjamin ketersediaan dan kinerja aplikasi maka diperlukan redudansi aplikasi, basis data (*database*) dengan menggunakan teknik *clustering* dan duplikasi pusat data. *Clustering pusat data* aplikasi dapat membagi beban kerja pusat data (*load sharing*) dan duplikasi pusat data dapat menjaga ketersediaan aplikasi (*fail-over*).

H. Pemulihan Bencana yang Lebih Baik

Memiliki tingkat fleksibilitas dalam rencana pemulihan bencana yang lebih mudah untuk diberlakukan dan memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Jika terjadi bencana yang menyerang pusat data, proses pemindahan pusat data aplikasi ke tempat lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

I. Penghematan

Prinsip penghematan yang dimaksud meliputi:

1. Optimalisasi Pusat Data

Operasionalisasi pusat data akan optimal jika infrastruktur *server, storage*, dan lainnya yang ditempatkan pada ruang *server* sesuai dengan perencanaan kapasitas pusat data.

2. Hemat Listrik dan *Hardware*

Teknologi virtualisasi pusat data dapat menghemat penggunaan sumber daya listrik, dan perangkat keras pendukung pusat data, seperti: sistem pendingin ruangan, dan lainnya.

3. Hemat Ruang/Rack Pusat Data

Semakin sedikit jumlah server fisik berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Jika pusat data ditempatkan pada suatu *colocation* pusat data, akan berimbang pada pengurangan biaya sewa.

4. Tidak Terikat pada Satu Vendor

Pusat Data hendaknya tidak tergantung pada satu vendor, atau *platform* tertentu karena hal ini akan memudahkan proses pengembangan dan pemulihan jika terjadi kerusakan pada aplikasi.

5. Aplikasi Lama Masih Dapat Digunakan

Ketika ada aplikasi lama yang sudah tidak bisa berjalan di modern *Operating System (OS)* saat ini (misalnya aplikasi *DOS*) maka aplikasi tetap dapat dijalankan dengan teknologi tertentu pada pusat data yang ada.

6. Keamanan

Jika terjadi kasus pusat data di *hack* dan data penting dalam pusat data dihapus/dirusak maka proses mengembalikan pusat data dan data penting dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Selain itu untuk menghapus *backdoor* dan *malware* yang ditinggalkan hacker tersebut juga dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Sesuai Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2018 tentang Standarisasi Infrastruktur pusat data, penyelenggara pusat data harus memperhatikan:

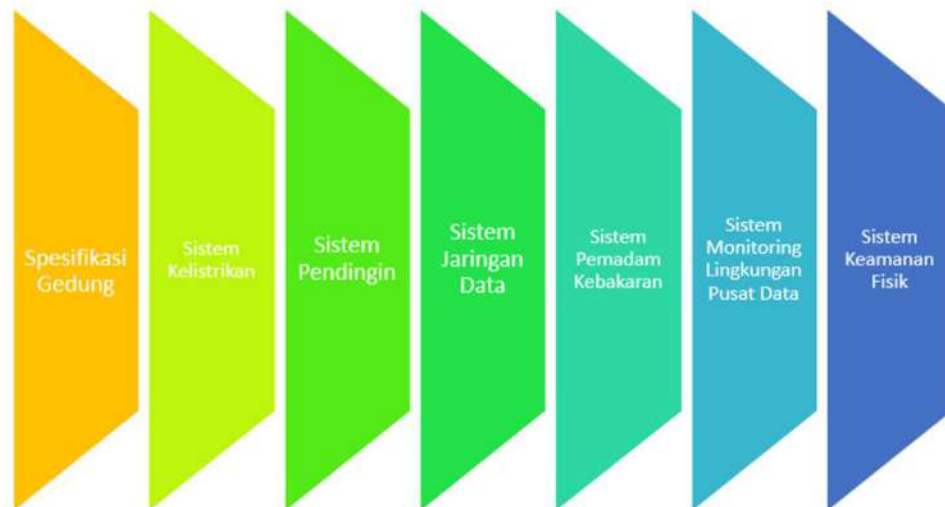
1. Lokasi pusat data hendaknya aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan pusat data.
2. Rancangan dan bangunan pusat data sesuai dengan standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan berdasarkan kajian kebutuhan bisnis dan analisis dampak bisnis (*business impact analysis*).
3. Kapasitas *bandwidth* untuk keperluan komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur komunikasi data alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur (*single point of failure*).
4. Jalur *supply utility* dan logistik untuk keberlangsungan layanan Pusat Data. menyediakan *bandwidth* untuk keperluan komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur komunikasi data alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur (*single point of failure*).
5. Sistem pemantauan lingkungan pusat data (*environment monitoring system*) yang meliputi antara lain monitoring temperatur, kelembaban, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik.
6. Standar operasional prosedur untuk operasi dan perawatan.
7. Rencana keberlangsungan usaha (*business continuity plan*) dan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif

8. SNI Pusat Data

Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pusat data terdiri dari:

1. SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

Bagian seri standar pusat data ini bertujuan untuk memberi panduan spesifikasi teknis pusat data yang diberlakukan di wilayah Indonesia bagi penyedia layanan berbasis elektronik, baik penyedia layanan berbasis elektronik untuk publik maupun yang dipergunakan untuk keperluan sendiri.



Gambar 2.2.2.1 SNI No 8799-1:2019 - Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

Standar Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data merinci persyaratan spesifikasi teknis pusat data sebagai berikut:

a. Spesifikasi gedung

- Lokasi Gedung Pusat Data
Ketentuan lokasi gedung pusat data antara lain tidak berada pada area rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta BMKG, tidak berada pada lokasi rawan huru hara, perkampungan padat atau kumuh, jarak dengan arteri lalu lintas (jalan raya utama dan jalur kereta api) minimal 91 m.
- Ketahanan gempa
Bangunan pusat data memiliki ketahanan terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang-kurangnya kategori resiko II.
- Ketahanan beban gedung
Bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi. Beban dimaksud adalah beban merata bukan hanya pada tulang lantai.
- Pembagian ruangan
Pembagian ruangan meliputi area perkantoran (area publik, pribadi, ruang fasilitas penunjang), area telekomunikasi, dan area pusat data.
- Ketahanan material gedung

Persyaratan ketahanan material gedung meliputi persyaratan ketahanan api dan ketahanan pengembangan.

- Sistem monitoring gedung

Sistem monitoring gedung pusat data memiliki fitur sekurang - kurangnya antara lain pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan operasional gedung, pelayanan penghuni atau tamu, pengelolaan pengamanan dan pengelolaan energi.

b. Spesifikasi sistem kelistrikan

- Catu daya listrik

Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan dari catu daya listrik primer atau catu daya listrik sekunder.

- Sistem kelistrikan berkesinambungan

Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan berkesinambungan dengan catu daya cadangan seperti genset dan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* dengan pemisahan panel-panel distribusi listrik untuk area pusat data hingga perangkat yang berada didalam gedung pusat data.

- Persediaan bahan bakar

Pusat data memiliki tangki bahan bakar penyuplai genset dengan jumlah dan kapasitas minimum tertentu untuk melayani operasi pusat data.

- *Uninterruptible Power Supply (UPS)*

Pusat data memiliki UPS untuk menjaga ketersediaan kelistrikan tidak terputus. Kapasitas Perhitungan kapasitas UPS minimum yakni beban puncak pusat data sebelum arus kelistrikan digantikan oleh arus listrik dari genset. Pusat data memiliki sekurang-kurangnya 120% kapasitas listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pusat data dengan prioritas utama, beserta ruang-ruang lain yang diperlukan dalam operasi pusat data.

Tersedia sambungan langsung otomatis atau manual untuk sistem kelistrikan yang diperlukan dalam perawatan jaringan kelistrikan.

- Analisis sistem listrik

Pusat data memiliki analisis sistem listrik untuk mendapatkan kapasitas ukuran dari pemutus arus sesuai dengan beban yang ada sehingga jika terjadi hubungan singkat pada perangkat teknologi informasi tidak menyebabkan pemutus arus utama terputus.

- Konstruksi panel listrik

Setiap panel listrik memiliki persyaratan konstruksi khususnya untuk panel induk pada masing-masing kategori strata pusat data.

- Jalur kabel listrik

Pusat data memiliki pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik. Setiap kabel memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram.

- Penumbumian

Pusat data memiliki pennumbumian bagi perangkat teknologi informasi, panel elektrikal, perangkat dari bahan metal dan pennumbumian penangkal petir sesuai ketentuan SNI 0225:2011. Pusat data memiliki sistem perlindungan terhadap bahaya petir dan pennumbumian dengan ketahanan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ohm.

- Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (*Power Usage Effectiveness*)

Memiliki perhitungan efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (*Power Usage Effectiveness*) terhadap keseluruhan beban daya maksimum pusat data.

c. Spesifikasi sistem pendinginan

Pusat data memiliki dokumen spesifikasi teknis sistem pendingin, skema diagram sistem pendinginan, jaminan layanan purna jual, nomor kontak layanan, dan kontrak perawatan. Pengoperasian peralatan teknologi informasi di dalam area pusat data dan area telekomunikasi harus memenuhi pengukuran:

- Temperatur ruangan : 18oC – 27oC;
- Tingkat perubahan temperatur ruangan per-jam maksimum : 5oC;
- Kelembaban ruangan : RH (*Relative Humidity*) 60%, titik embun : 5.5oC – 15oC; dan
- Tingkat perubahan kelembaban ruangan maksimum per-jam : 5% RH.

Penyusunan posisi rak pusat data harus mampu memisahkan jalur panas dan dingin. Jalur panas adalah bagian belakang dari rak pusat data. Jalur dingin adalah bagian depan dari rak pusat data sebagai jalur masuk udara dingin dari sistem pendingin.

Bagian pada rak pusat data yang kosong harus ditutup untuk menjaga pendinginan maksimal. Insulasi diperlukan untuk mencegah terjadinya pengembunan yang disebabkan oleh perbedaan temperatur antara ruang pusat data dengan ruang sekitarnya. Insulasi dapat berupa material pelindung berbahan *aluminium foil* berserat dan karet berbahan NBR sesuai ISO 6944-1.

d. Spesifikasi sistem jaringan data

Pusat data memiliki topologi jaringan data terperinci pada area ruang pusat data dan ruang interkoneksi telekomunikasi. Pusat data memiliki topologi distribusi jaringan utama dari ruang pusat data kepada pengguna jasa pusat data. Distribusi jaringan dapat menggunakan berbagai moda kabel dan berbagai perangkat komunikasi serta memiliki label kabel. Pusat data

memiliki sistem monitoring jaringan dengan *fitur* peringatan dini dan alur alternatif sesuai dengan kategori strata pusat data.

e. Spesifikasi sistem kebakaran

Spesifikasi sistem kebakaran ditinjau dari berbagai aspek, seperti pemilihan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran (seperti *sprinkler*, alat pemadam api, dan detektor asap), sistem alarm, konfigurasi jaringan, dan prosedur pengujian dan pemeliharaan. Tujuan dari tinjauan spesifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa sistem kebakaran dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencegah, mendeteksi, dan memadamkan kebakaran terjadi, sehingga dapat melindungi keamanan dan keselamatan manusia serta properti yang berharga. Sistem pemadam kebakaran yang ada di pusat data perlu dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Pusat data hendaknya memiliki sistem monitoring dan deteksi dini bahaya kebakaran yang meliputi deteksi asap dan deteksi panas dengan moda sinar ultra.

f. Spesifikasi sistem *monitoring* lingkungan

Pusat data memiliki sistem *monitoring* lingkungan yang terdiri dari:

- stabilitas tegangan arus listrik dan penggunaan daya listrik yang dapat memberikan peringatan sebelum terjadi kelebihan beban;
- suhu perangkat serta kelembaban relatif ruangan di dalam area pusat data dan area telekomunikasi; dan
- sistem pemipaan dengan *fitur monitoring* kebocoran pipa air atau genangan di bawah *raised floor*.

g. Spesifikasi sistem keamanan fisik

Spesifikasi sistem keamanan fisik mencakup berbagai aspek seperti pemilihan dan pemasangan perangkat keamanan fisik (seperti kamera, sensor gerak, dan alarm), konfigurasi jaringan, sistem kontrol akses, dan prosedur pengujian dan pemeliharaan. Spesifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem keamanan fisik dapat bekerja sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna, serta dapat melindungi aset dan sumber daya dari ancaman keamanan. Moda memasuki pusat data bisa dengan mempergunakan kartu akses elektronik, biometrik atau pemindai jari. Penyambungan interkoneksi telekomunikasi memerlukan persetujuan pihak penyedia jasa telekomunikasi dan pengawas penyedia jasa layanan pusat data untuk keamanan pusat data ditetapkan perimeter tertentu sesuai dengan kategori strata pusat data.

2. SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data

Standar ini bertujuan untuk menyediakan panduan tentang desain dan penetapan pengaturan manajemen pusat data, mengklarifikasi peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama di dalam penyelenggara pusat data, serta menyediakan contoh-contoh untuk dipertimbangkan dalam manajemen pusat data.

Manajemen pusat data perlu diterapkan secara sistematis dan konsisten agar penyediaan layanan pusat data yang berkualitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Standar Panduan Manajemen Pusat Data dapat digunakan oleh penyelenggara yang bertanggung jawab atas manajemen atau pengelolaan Pusat Data, meliputi: perencanaan, operasional, manajemen layanan, manajemen SDM, monitoring, pelaporan dan pengendalian, serta manajemen keberlangsungan.



Gambar 2.2.2.2.2 SNI: No 8799-2:2019-Panduan Manajemen Pusat Data

Panduan Manajemen Pusat Data sebagai berikut :

- a. Perencanaan
Meliputi analisis kebutuhan, serta manajemen risiko dan kesesuaian.
- b. Operasional
Meliputi organisasi penyelenggara pusat data, sistem manajemen layanan operasional pusat data, infrastruktur (lokasi pusat data, manajemen fasilitas pusat data, manajemen aset, manajemen konfigurasi).
- c. Manajemen layanan
Meliputi manajemen layanan pusat data (sistem manajemen tingkat layanan, manajemen keselamatan, manajemen keamanan, dan manajemen proyek).
- d. Manajemen SDM
Meliputi pengelolaan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja.
- e. Monitoring, pelaporan dan pengendalian

Lingkup monitoring meliputi aktivitas pada gedung pusat data, aktivitas yang sedang berlangsung. Pelaporan kejadian tercatat dengan rincian waktu kejadian, waktu pelaporan, dan resolusi akhir kejadian. Perubahan kendali tercatat dalam dokumen pengendalian.

- f. Manajemen keberlangsungan
Meliputi manajemen keberlangsungan kegiatan, dan manajemen keberlangsungan lingkungan.
- g. Pengembangan Pusat Data

1. Topologi Pusat Data

Terdiri dari sistem-sistem pendukung, infrastruktur utama, dan infrastruktur pendukung pusat data. Rincian topologi pusat data sebagai berikut :

- a. Sistem-sistem pendukung pusat data meliputi:
 - Sistem kelistrikan;
 - Sistem pendingin dan kelembaban;
 - Sistem pemadam kebakaran;
 - Sistem pengkabelan;
 - Desain ruang komputer, meliputi: *raised floor, cable tray, dan lokasi rack pusat data*;
 - Sistem keamanan;
 - Sistem pencahayaan; dan
 - Sistem pemantau lingkungan.
- b. Infrastruktur Utama pusat data meliputi :
 - Infrastruktur jaringan;
 - Infrastruktur pusat data & *storage*;
 - Model pusat data; dan
 - Aplikasi pendukung (*Software*).
- c. Infrastruktur Pendukung pusat data meliputi :
 - *Local Area Network*;
 - *Wireless LAN*;
 - WAN;
 - *Remote Access* dan VPN;
 - Internet; dan
 - Telekomunikasi.

2. Ruang Pendukung

Ruang pendukung pusat data adalah ruangan-ruangan untuk menempatkan perangkat-perangkat pendukung operasional pusat data seperti ruang perangkat sistem pendingin & kelembaban, ruang perangkat *fire suppression* dll. Ruang operasional dan pemantauan pusat data juga termasuk ruang pendukung pusat

data. Rincian ruang pendukung pusat data yang direkomendasikan antara lain:

a. *Lobby*

Lokasi ruang tunggu tamu, rekanan, penukaran kartu identitas dengan kartu akses.

b. *Security*

Lokasi ruang operasi keamanan meliputi pemantauan *CCTV*, kontrol akses ke ruangan.

c. *Office*

Ruang kerja administrasi pusat data termasuk ruang kepala pusat data.

d. *Facility Control*

Ruang kontrol fasilitas pusat data seperti kontrol suhu & kelembaban, power, listrik dan lain – lain.

e. *Hall*

Ruang serba guna yang bisa digunakan untuk kegiatan meeting dalam jumlah besar atau lainnya.

f. *Operations Command Center*

Petugas memonitor pusat data melalui *dashboard* yang ditayangkan dalam layar lebar.

g. *Network Room*

Lokasi rak perangkat jaringan dan keamanan jaringan. Semua struktur kabel data baik UTP maupun *Fiber optic* berakhir di ruang jaringan.

h. *Meet Me Room*

Ruang terminasi (akhir) kabel jaringan dari *provider internet* (ISP), dan telekomunikasi.

i. *Network Operating Center*

Ruang pemantauan kinerja jaringan pusat data yang ditayangkan melalui dashboard.

j. *Meeting Room*

Ruang pertemuan untuk rapat atau diskusi pengelola pusat data.

k. *Fire Suppression System*

Ruang untuk menempatkan perangkat – perangkat pendukung sistem pemadam kebakaran (*fire suppression*).

l. *UPS*

Ruang untuk perangkat UPS pendukung catu daya cadangan ruang pusat data, lampu, *cctv*, *access control* dll.

m. *UPS Battery*

Ruang *battery* UPS yang terpisah dari UPS sehingga mudah untuk perawatan dan penggantian *battery*.

- n. *Loading Dock*
Tempat untuk menerima peralatan yang baru datang untuk pusat data.
- o. *Build Room/Staging Area*
Tempat untuk membangun dan mengkonfigurasi peralatan yang akan digunakan bagi pusat data.
- p. *Chiller*
Ruang untuk perangkat *chiller* pendingin suhu.
- q. *Warehouse*
Ruang untuk perangkat listrik.
- r. *Genset Room*
Ruang untuk meletakkan perangkat generator pembangkit listrik cadangan (*genset*).
- s. *Trafo*
Ruang untuk meletakkan trafo listrik dari PLN.
- t. *Solar Tank*
Ruang untuk menyimpan solar sebagai bahan bakar genset.
- u. Ruang Mekanik
Ruang kerja *Mechanical Engineering* (ME).
- v. Ruang *Sparepart*
Ruang gudang penyimpanan suku cadang (*sparepart*) perangkat *mechanical* dan listrik pusat data.

3. Sistem Kelistrikan

Sistem kelistrikan meliputi catu daya utama dan catu daya cadangan. Catu daya utama berasal dari listrik PLN sedangkan catu daya cadangan berasal dari generator, dan UPS. Ketentuan tentang sistem kelistrikan di pusat data sebagai berikut :

- a. Kabel daya masuk ke dalam bangunan pusat data determinasi di ruang kendali penyambungan listrik yang handal;
- b. Daya listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak di mana pusat data berada;
- c. Tersedianya catu daya listrik alternatif seperti *generator standby* dengan kapasitas yang memadai untuk operasional minimal 3 jam selama kejadian gangguan listrik utama;
- d. Perangkat *pusat data, storage, jaringan, keamanan pusat data & jaringan, CCTV, access control*, penerangan harus diproteksi dengan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) atau catu daya cadangan lainnya;
- e. UPS atau catu daya cadangan lainnya harus memiliki kapasitas memadai untuk memasok beban pusat data sampai catu daya

- alternatif mampu memikul beban perangkat pusat data (*steady-state*);
- f. Kapasitas UPS harus lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS;
 - g. UPS memiliki sistem pelaporan, pemantauan kinerja, dan sistem peringatan;
 - h. UPS yang digunakan telah memiliki jaminan dari pabrikan untuk dapat berfungsi sesuai spesifikasinya;
 - i. Bangunan harus dilengkapi dengan sistem proteksi petir;
 - j. Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih (*surge suppressor*) sebelum ke ruang pusat data;
 - k. Ruang pusat data memiliki terminal pbumian (*grounding*) tembaga yang menjadi titik acuan pbumian ruangan tersebut;
 - l. Sistem grounding untuk peralatan pusat data harus dibedakan dengan peralatan lainnya seperti sistem penangkal petir pada bangunan pusat data; dan
 - m. Semua benda logam harus terikat ke tanah termasuk lemari, rak, *PDU*, *CRAC* (*AC* Ruang pusat data), jalur kabel, dan setiap *raised floor* dengan *resistansi grounding* kurang dari 1 Ohm.

Kebutuhan listrik di pusat data untuk mendukung dua komponen yakni peralatan TI dan peralatan pendukung seperti tabel di bawah ini :

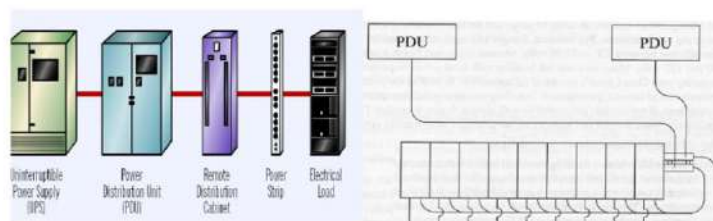
Listrik utk Peralatan IT	Listrik utk Pendukung DRC
<ul style="list-style-type: none"> • UPS • PDU • Cabling • Network Devices • Servers • Storage 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pendingin • Pencahayaan • Fire Suppression • Keamanan – Access Door & CCTV • Generator

Gambar 2.2.2.2.3. Kebutuhan Listrik Pusat Data

4. Distribusi Listrik Ruang Pusat

Data Sistem kelistrikan di pusat data akan didistribusikan ke perangkat utama di dalam ruang komputer pusat data dengan dua teknik yakni:

- a. Distribusi secara langsung dari PDU (*Power Distribution Units*)
Dari PDU listrik akan didistribusikan ke setiap lokasi kabinet tanpa melalui perantara apapun. Namun untuk pusat data yang berkapasitas besar hal ini tidak mungkin dilakukan karena tidak efisien dari segi pengkabelan.
- b. Distribusi melalui *panel circuit*
PDU akan menuju ke *panel circuit* dan dari tempat tersebut akan didistribusikan ke masing-masing lokasi kabinet. Hal ini, jauh lebih efisien dari segi pengkabelan karena dapat meminimalkan jarak yang jauh antara lokasi kabinet pusat data dengan PDU.



Gambar 2.2.2.2.4 Distribusi Listrik dari PDU melalui *Panel Circuit*.

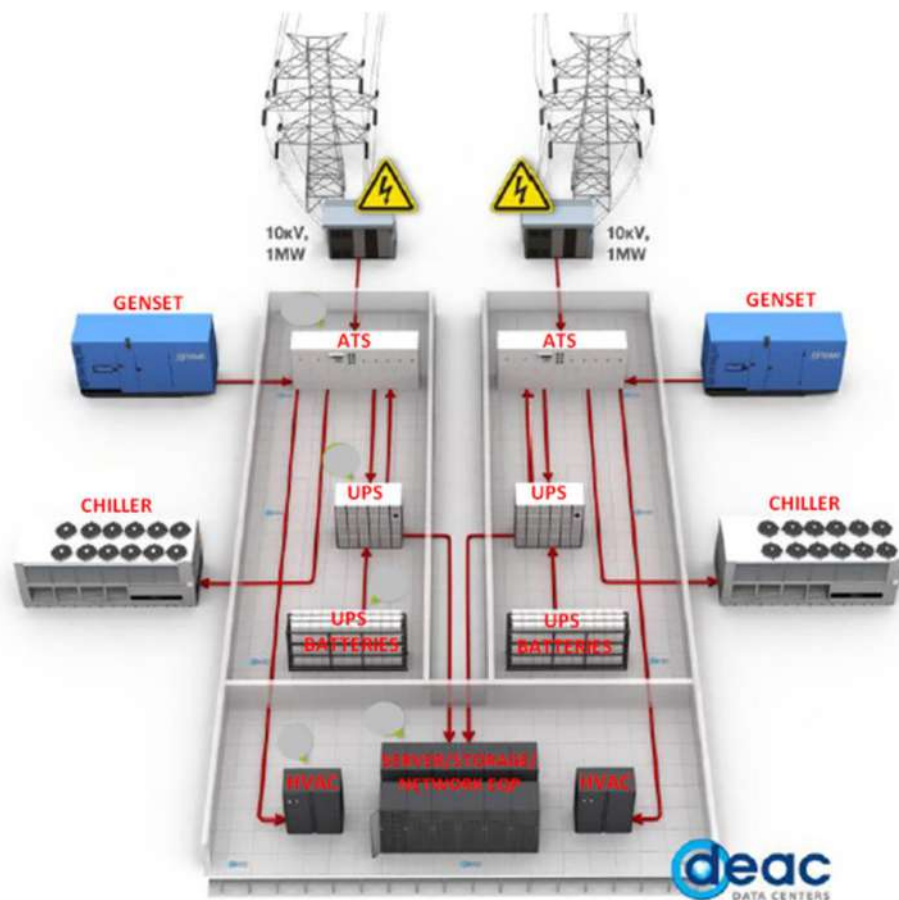
Gambar di atas adalah distribusi listrik dengan menggunakan *panel circuit* yang tersebar di perangkat *remote distribution cabinet* untuk mendistribusikan listrik dari perangkat UPS ke beberapa panel sirkuit melalui *PDU*. *Distribution cabinet power* dari perangkat UPS akan diteruskan ke *PDU* untuk selanjutnya didistribusikan ke beberapa panel circuit (*remote distribution cabinet*). Untuk selanjutnya *power* akan didistribusikan ke *power strip* yang ada di tiap rak *cabinet*. Di setiap *power strip* terdapat perangkat untuk pemantauan beban listrik (*electrical load*).

5. Redudansi Sumber

Listrik Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang tinggi maka diperlukan redudansi pada perangkat utama maupun cadangan dan jalur masuk ke pusat data. Saluran listrik ke lokasi pusat data berasal dari sumber gardu listrik yang berbeda. Selain itu, jalur masuk ke pusat data dari arah yang berbeda juga.

Redudansi sumber listrik utama (PLN) dan sumber listrik cadangan diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dan kehandalan dari pusat data. Redudansi meliputi sumber listrik PLN dari gardu listrik

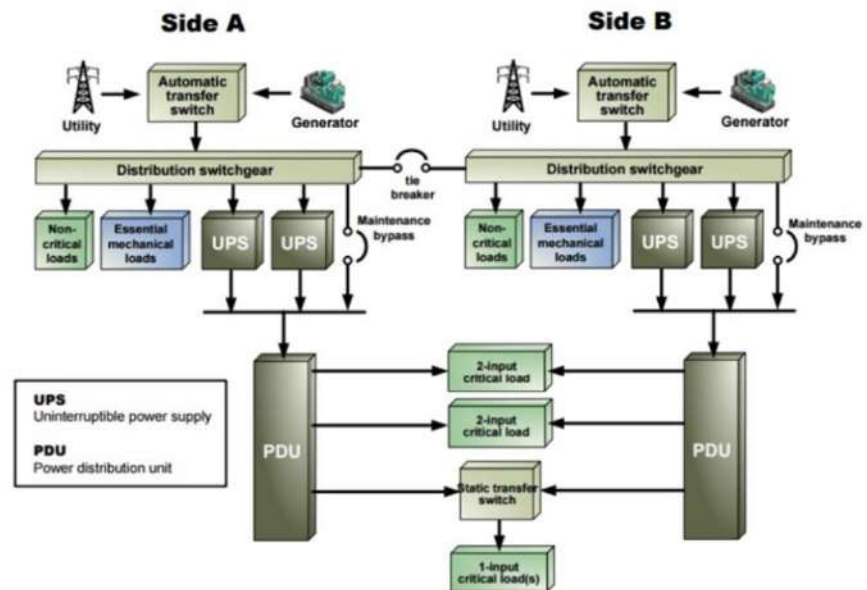
yang berbeda, jalur (lintasan) aliran listrik dari gardu menuju kawasan pusat data. Selain itu juga redundansi dari perangkat sumber listrik cadangan seperti generator, UPS, dan *automatic transfer switch (ATS)*.



Gambar 2.2.2.2.5. Instalasi Jaringan Listrik dan Pendukung DC

Gambar di atas adalah gambar fisik instalasi sistem kelistrikan yang redundan. Listrik utama DC berasal dari dua sumber yang berbeda dengan jalur masuknya pun berbeda. Perangkat pendukung sistem kelistrikan, sistem pendingin diletakkan pada posisi yang berbeda yang memiliki jalur distribusi sendiri. Desain ini untuk menghindari adanya kegagalan pada sistem listrik atau pendingin karena adanya kerusakan pada salah satu jalur. Rak pusat data akan memiliki dua *power strip* dan akan ada *receptacle* yang berbeda juga disetiap pusat data.

Gambar di bawah ini adalah topologi infrastruktur jaringan kelistrikan secara logik. Setiap PDU terhubung ke sumber listrik cadangan (UPS) yang berbeda dengan sumber listrik utama dari dua sumber juga.



Gambar 2.2.2.2.6. Instalasi Logik dari Sistem Kelistrikan

6. Listrik Cadangan (*Standby*

Power)

Sistem listrik yang berperan sebagai *standby power* pada pusat data merupakan sumber tenaga *back-up*-an ketika sistem listrik utama mengalami kegagalan. *Standby power* yang dibuat mempertimbangkan 3 (tiga) aspek yaitu redundansi, kesederhanaan, dan biaya. Berbagai perangkat terkait dengan *standby power* pada pusat data antara lain generator, *UPS*, dan baterai.

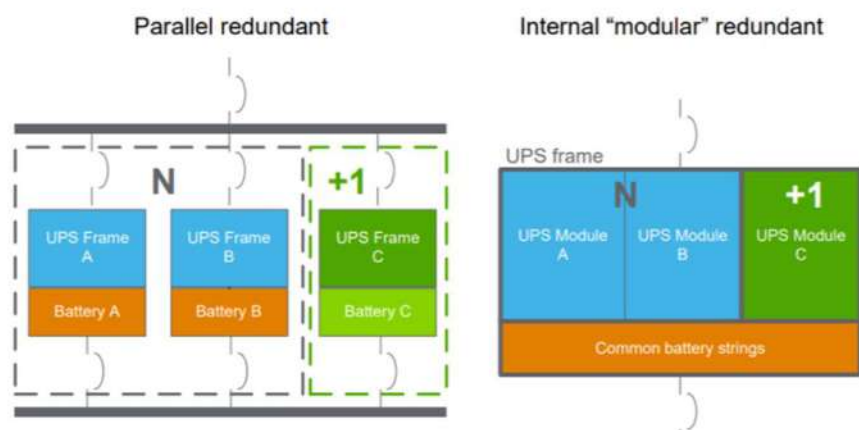
Berdasarkan fungsinya, *UPS* merupakan sebuah perangkat elektronik yang mampu menggantikan sementara, bahkan memperbaiki pasokan listrik yang diterima oleh satu atau beberapa perangkat yang dikoneksikan ke jalur keluaran *UPS*. Topologi *UPS* ada tiga, yaitu *o ine UPS*, *online UPS* atau yang dikenal dengan *line-interactive UPS*, serta *true-online double conversion UPS*. Ketiganya memiliki perbedaan sangat mendasar, terutama pada besaran waktu perpindahan dari sumber listrik utama atau PLN ke sumber listrik *UPS*, yaitu baterai. Jika terjadi putus aliran listrik dari PLN, jika beban yang akan di-*back-up* oleh *UPS* adalah beban yang kritikal, maka sebaiknya menggunakan *True-online Double Conversion UPS* karena waktu perpindahannya adalah nol detik. Selain lamanya waktu perpindahan, yang perlu dicatat adalah kehandalan dari masing-masing tipe terhadap kemampuan menangani permasalahan yang timbul dari jaringan listrik PLN, yaitu antara lain adalah kemampuan menangani tegangan naik atau turun, harmonik, *sag* (mati sesaat atau berkedip), *swell* (lonjakan tegangan), pergeseran fase, dan kemampuan untuk menerima daya dari genset sebagai pengganti listrik PLN untuk

beberapa jam per-hari. *UPS* untuk *DC* sebaiknya memiliki kriteria antara lain:

- *UPS* memiliki *power factor* 0.9% agar efisien dan dapat diandalkan;
- *Runtime UPS* atau kemampuan *UPS* hidup selama sumber utama mati yakni *UPS* dapat bertahan 30 menit sampai 60 menit; dan
- Perhitungan kapasitas *UPS* adalah lebihkan 25% dari beban puncak.

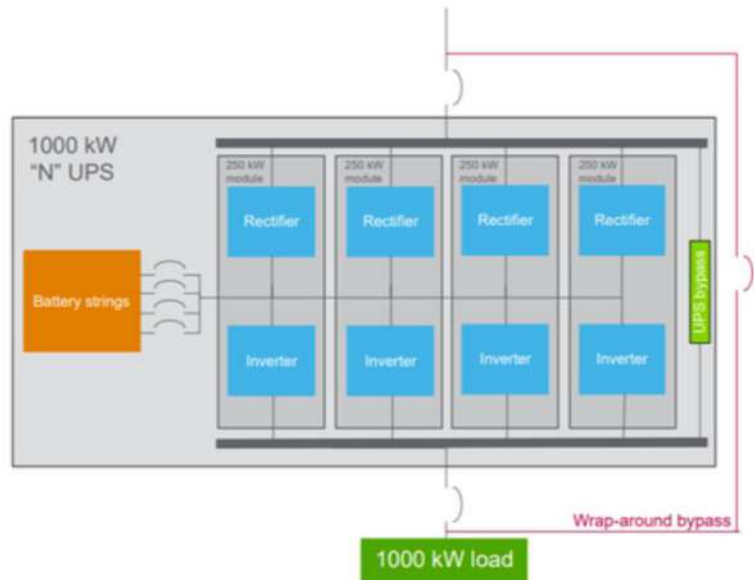
a. Redudansi UPS

Redudansi UPS terdiri dari dua model yakni *parallel redundant* atau *internal modular redundant*. *Parallel redundant* merupakan perangkat *UPS* yang terdiri dari *UPS Module* dengan baterai redundan N1, dimana N adalah jumlah *UPS* pada beban puncak. Selain itu, *internal modular redundant* merupakan jumlah modul *redundant* tanpa baterai. Secara umum, gambar di bawah memberikan informasi topologi perangkat *UPS* dengan dua model, yakni: *parallel redundant* dan *internal modular redundant*.



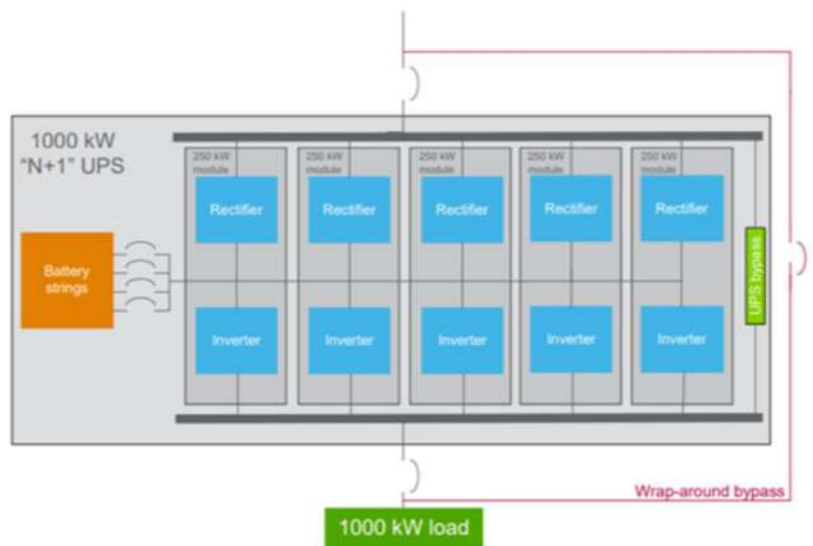
Gambar 2.2.2.7. Perbandingan Dua Model UPS DC

Gambar berikut menunjukkan contoh topologi perangkat UPS dengan kapasitas 1000kW yang terdiri dari 4 modul masing-masing 250kW, dimana *baseline 1N configuration* adalah satu UPS dengan empat modul tanpa *redundant*.



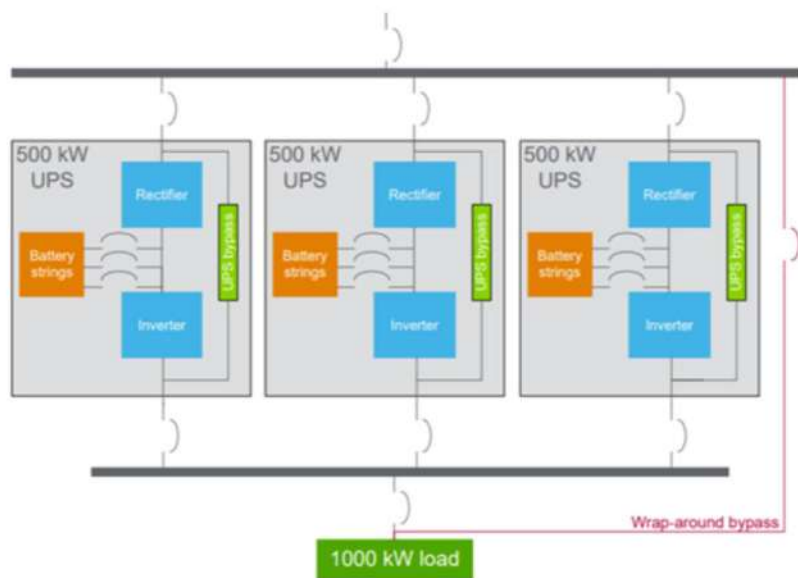
Gambar 2.2.2.2.8. UPS dengan Empat Modul Tanpa Redudansi

Gambar berikut menunjukkan topologi *UPS* dengan konfigurasi N1 yang redundan secara internal dengan model modular. Terdapat lima modul *UPS*, yaitu empat modul utama dan satu cadangan.



Gambar 2.2.2.2.9. UPS dengan *Internally Modular Redundancy*

Gambar berikut menunjukkan topologi *UPS* dengan konfigurasi N1 yang redundan secara paralel. *UPS* utama terdiri dari dua modul dengan masing-masing daya 500 kW, serta satu modul cadangan dengan daya 500 kW.



Gambar 2.2.2.2.10. UPS dengan *Parallel Redundant N+1*

b. *Fault Tolerance* UPS

Fault Tolerance adalah kegiatan yang memungkinkan suatu sistem untuk terus beroperasi (dalam hal ini, mendukung beban TI) jika terjadi kegagalan beberapa komponen. Beberapa *UPS* dirancang dengan tingkat toleransi kesalahan yang lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, dalam pemilihan *UPS* penting untuk mempertimbangkan atribut desain toleransi kesalahan provinsi terutama jika arsitektur yang dipilih terdiri dari satu bingkai *UPS* (seperti pada konfigurasi 1 dan 2). Di bawah ini contoh atribut desain toleransi kesalahan:

- Redudansi modul daya (*inverter*/penyearah);
- Redudansi penggemar;
- Redudansi catu daya pada pengontrol;
- Redudansi *string* baterai;
- Redudansi bus komunikasi;
- Redundansi dalam sistem kontrol; dan
- Saklar statis berukuran lebih besar dari beban maksimum yang diharapkan untuk mengakomodasi muatan *in-rush*/step peralatan IT.

7. **Sistem Pendingin &**

Kelembaban

Sistem pendingin berfungsi untuk menjaga suhu dan kelembaban di ruang pusat data tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika suhu terlalu panas atau terlalu dingin dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat di dalam ruang pusat data.

Kriteria umum untuk sistem pendingin dan kelembaban adalah :

- Temperatur dan kelembaban ruangan dijaga dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan operasional normal perangkat di ruang pusat data yang paling peka;
- Peralatan pengatur temperatur dan kelembaban harus dihubungkan ke catu daya utama (didukung oleh catu daya alternatif);
- Memiliki skalabilitas dan adaptabilitas yang sangat baik; dan
- Sudah terstandarisasi.

Keadaan temperatur dan kelembaban yang harus dijaga di dalam pusat data:

- Temperatur kering: 200C–250C (680F–770F), dengan rata-rata keadaan temperatur normal di set menjadi 220C 100C;
- Kelembaban relatif (*Relative Humidity*) adalah jumlah air di udara pada suhu lingkungan : 40%-50%, dengan titik normal berada pada 45% 5%;
- Titik embun pada rentang 41,90F sampai 590F maksimum: 210C (69.80F); dan
- Perubahan maksimum yang boleh terjadi dari batas suhu sekarang adalah sebesar 50 C (90F) per jam.

Berikut ini adalah penjelasan dari perangkat sistem pendingin, tekanan udara, kelembaban, konsumsi listrik sistem pendingin, dan teknik pendinginan ruangan/pusat data :

Perangkat Sistem

Pendingin

HVAC (*Heating, Ventilation, Air Conditioning*) bertujuan untuk menjaga agar temperatur tetap dalam keadaan rendah dan konstan serta menyebarkan titik-titik panas yang terletak di pusat data. Temperatur yang rendah sangat diperlukan untuk efisiensi operasi pusat data dan perangkat jaringan. Sistem pendingin pada pusat data pada prinsipnya adalah sistem aliran udara dingin, yang terbagi menjadi tiga perangkat utama, yaitu: *air handler*, *chiller*, dan *cooling towers*. Sistem pendingin dapat melakukan reduksi dengan memasang lebih dari satu *air handler* dan menara pendingin tambahan untuk setiap *chiller*. Selain itu, suplai air yang dibutuhkan untuk menciptakan udara dingin juga perlu dijamin keberadaannya dengan cara seperti membangun *container* penyimpanan air yang dapat diandalkan.

Tekanan Udara

Tekanan udara pada pusat data harus dijaga pada level tertentu yang disebut sebagai tekanan statis. Pusat data didesain memiliki tekanan antara 0.2-0.5 *in. wc* guna menjaga agar tekanan udara tetap stabil maka periksa seluruh ruangan apakah telah tertutup dengan baik dan yakin bahwa tidak ada lubang sedikit pun. Mayoritas *handler* membutuhkan *bu er* sekitar 36-42 in (91.4-106.7 cm) sehingga perlu diletakan jauh dari *DC air handler*.

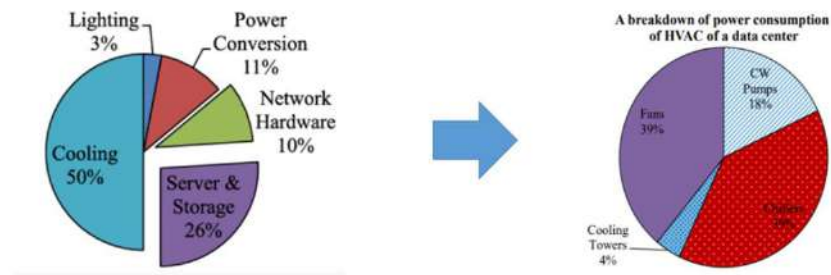
Kelembaban

Kelembaban merupakan konsentrasi uap air di udara. Kelembaban relatif menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga dalam ruangan pusat data. Kelembaban relatif adalah persentase perbandingan dari jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah uap air di udara kering. Perangkat pusat data dan jaringan dapat berfungsi pada rentang level kelembaban yang cukup panjang yaitu sekitar 20%-80%. Menjaga kelembaban relatif dalam keadaan normal berfungsi untuk mencegah terjadinya korosi pada beberapa perangkat di pusat data karena penguapan (kelembaban tinggi) atau mencegah munculnya elektrostatik pada beberapa perangkat metal (kelembaban yang rendah). Cara yang dilakukan adalah melengkapi *Air Handling Unit (AH)* dengan kemampuan humidification atau melalui penggunaan unit-unit *humidification* yang terpisah dari *Air Handling Unit (AH)*. Kelembaban relatif yang memungkinkan untuk suatu ruangan pusat data adalah sekitar 45%-55%, yaitu level kelembaban relatif normal sebesar 50% dengan tingkat sensitivitas sekitar 10%, yang memungkinkan variasi pada level kelembaban sehingga komponen infrastruktur tidak konstan berada level tersebut.

Konsumsi Listrik Sistem

Pendingin

Konsumsi listrik pusat data terbesar adalah pada sistem pendingin & kelembaban (50%), pusat data & *storage* (26%), perangkat jaringan (10%), *power conversion* (11%), dan *lighting* (3%). Untuk sistem pendingin & kelembaban, komponen *chiller* mengkonsumsi daya listrik terbesar (39%), kipas (*fans*) (39%), *CW Pumps* (18%) dan paling kecil adalah *cooling towers* (4%).

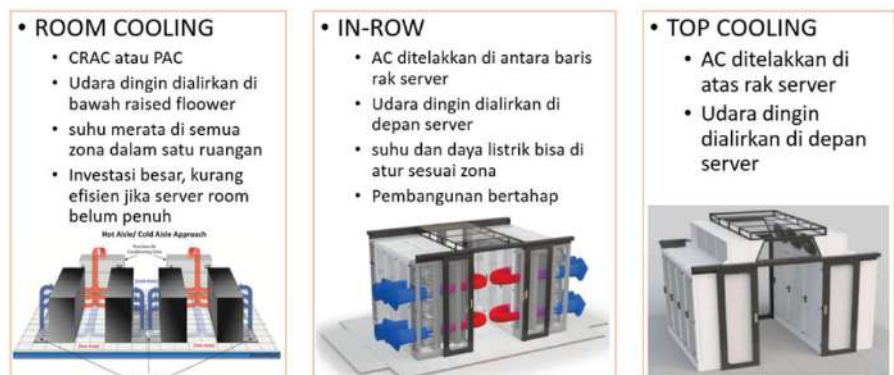


Gambar 2.2.2.2.11. Grafik Konsumsi Listrik di Pusat Data

Dari informasi di atas, diperlukan sistem pendingin & kelembaban yang efisien dan efektif serta dukungan dari perangkat yang ada. Sistem pendingin & kelembaban berfungsi untuk mendinginkan perangkat pusat data, storage, dan perangkat jaringan. Jika kapasitas ruang pusat data belum maksimal, maka diperlukan strategi agar tidak terjadi pemborosan karena prinsipnya adalah mendinginkan pusat data bukan ruang pusat data.

8. Teknik Pendinginan Ruangan/Pusat

Terdapat tiga teknik pendinginan ruangan pusat data atau rak pusat data yakni *Room Cooling* atau *Cooling Room Air Conditioner (CRAC)*, *IN-ROW*, dan *TOP Cooling*.



Gambar 2.2.2.2.12. Perbandingan Keuntungan dari Tiga Model Sistem Pendinginan Pusat Data

a) ROOM-COOLING

- Fungsi mendinginkan seluruh ruangan pusat data secara merata;
- CRAC/PAC disebar di sisi-sisi ruang pusat data;
- Jalur udara dingin (*cold aisle*) mengalir dari bawah *raised floor* naik ke atas melalui lubang – lubang kecil di papan *raised floor* arah depan *rack* pusat data;
- Jalur udara panas (*hot aisle*) yang berasal dari belakang *rack* pusat data akan mengalir ke perangkat CRAC; dan
- Kurang efisien jika ruang *pusat data* belum terisi penuh.

b) *IN-ROW*

- CRAC/PAC tidak lagi disebar di sisi-sisi ruang pusat data tapi sudah disebar di barisan *rack* pusat datanya;
- CRAC/PAC sudah disebar di barisan *rack pusat datanya*, di dalam barisan *rack-rack pusat data* ini di sisipkan *cooling system* yang mendinginkan udara panas di belakang pusat data dan menghembuskan ke sisi depan pusat data;
- Menutup jalur udara panas (*hot containment aisle*) agar tidak bercampur dengan jalur udara dingin, semua udara panas di dalam *hot containment* ini akan didinginkan oleh CRAC yang ada di samping *rack* pusat data; dan
- Tingkat efisiensi tinggi karena pembangunan bisa secara bertahap tergantung kebutuhan *rack* pusat data.

c) *TOP-COOLING*

- CRAC/PAC tidak lagi disebar di sisi-sisi ruang *pusat data* tapi diletakkan di atas *rack* pusat data;
- Di atas *rack-rack pusat data* ini disisipkan *cooling system* yang menghembuskan udara dingin ke sisi depan *pusat data* dan mendinginkan udara panas di belakang pusat data; dan
- Tingkat efisiensi tinggi paling tinggi karena tempat yang dibutuhkan paling kecil, konsumsi daya listrik paling kecil juga di bandingkan dua teknik lainnya.

CRAC (CW)	In-Row (CW)	CoolTop (CW)
<ul style="list-style-type: none"> • 3 CRAC units • cooling capacity 53 kW • air flow 9.000 m³/h • dimensions 950 x 900 mm • consumption 1,8 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 in-row units • cooling capacity 21 kW • air flow 3800 m³/h • dimensions 300 x 100 mm • consumption 0,77 kW max (0,3 kW at capacity 96/6=16 kW per unit) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Topcooling units • cooling capacity 38 kW • air flow 7.700 m³/h) • dimensions 2400 x 600 mm • consumption 0,7 kW max (0,2 kW at capacity 96/4=24 kW per unit)
<ul style="list-style-type: none"> • Occupied floor area = 2,6 m² • Total consumption 3,6 kW (2 running units) 	<ul style="list-style-type: none"> • Occupied floor area = 1,8 m² • Total consumption 1,8 kW (6 low-speed running units) 	<ul style="list-style-type: none"> • Occupied floor area = 0 m² • Total consumption 0,8 kW (4 running units)

Gambar 2.2.2.2.12. Perbandingan Tiga Model Sistem Pendingin Pusat Data

Berdasarkan gambar diatas diperoleh informasi perbandingan teknik pendinginan ruang pusat data, teknik *CoolTop* mengkonsumsi daya listrik paling kecil dibanding dua teknik lainnya sebesar 0,8kW. Selain itu luasan yang digunakan untuk perangkat pendingin juga paling kecil dibandingkan dua lainnya (0 m²) karena perangkat di pasang di atas *rack* pusat data tidak menambah ruang di bawah. Kesimpulannya teknik *CoolTop* memiliki tingkat efisiensi paling tinggi untuk mendinginkan *rack*

pusat data. Pada kondisi ruang *pusat data* yang belum terisi penuh, teknik ini juga sebagai solusi menekan biaya listrik.

9. Fire Suppression System

Perlindungan pusat data dari api mempunyai tiga tujuan utama yakni: identifikasi adanya api (*detection*), pemberitahuan adanya api ke seluruh penghuni Pusat Data dan orang-orang yang berkepentingan (*alarm*), dan memadamkan api (*suppression*). Acuan Standar dalam pembangunan *fire suppression system* menggunakan standar dari *NFPA (National Fire Protection Association)*. Tipe *Suppression System* yang ada antara lain:

a. Gas System

Sistem gas tidak merusak perangkat pusat data dan perangkat lain efektif tetapi waktu singkat.

- *Inert Gas Suppression System* mengurangi kadar oksigen sampai 15% untuk memadamkan api sehingga ruangan masih bisa digunakan untuk bekerja; dan
- *Synthetic Gas Suppression cooling mechanism* untuk memadamkan api dengan menggunakan beberapa tipe gas seperti FM-200, Halon 1301, CO₂.

b. Water sprinklers

Sistem air dapat merusak perangkat pusat data dll, dapat digunakan untuk melindungi bangunan dan memadamkan api. Kriteria *Fire Suppression System* untuk pusat data adalah sebagai berikut :

- **QUICK**

Sistem dapat memberikan respon cepat jika terjadi kebakaran untuk meminimalkan terjadinya kerusakan pada perangkat pusat data dll.

- **CLEAN**

Jika terjadi insiden adanya titik api dan setelah gas dilepas serta proses pemadaman, tidak ada sampah atau sisa gas yang tertinggal.

- **ODORLESS**

Gas yang dikeluarkan tidak menimbulkan bau yang menyengat.

- **NON-TOXIC**

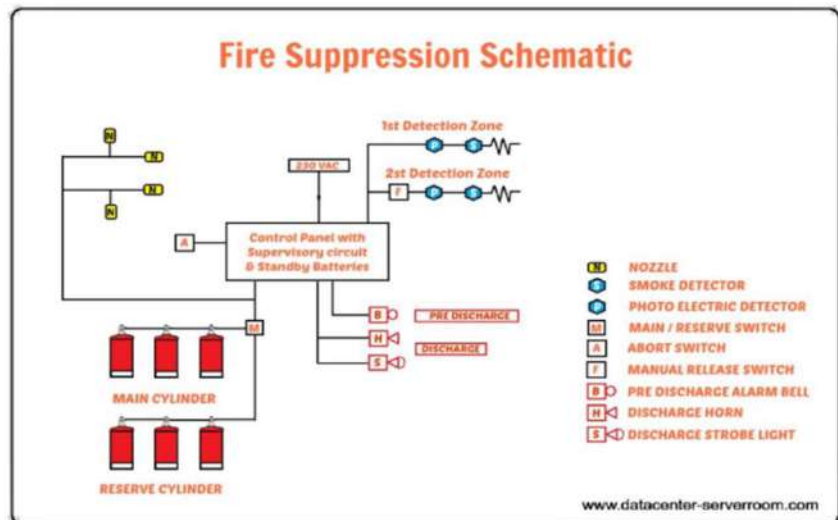
Gas yang dikeluarkan tergolong aman untuk manusia (tidak beracun).

- **NON-CONDUCTIVE**

Gas yang dikeluarkan bukan penghantar panas atau elektrik karena dapat menyebabkan kerusakan.

- **LOW STORAGE SPACE**

Perangkat utama dan pendukung hanya membutuhkan tempat yang kecil.



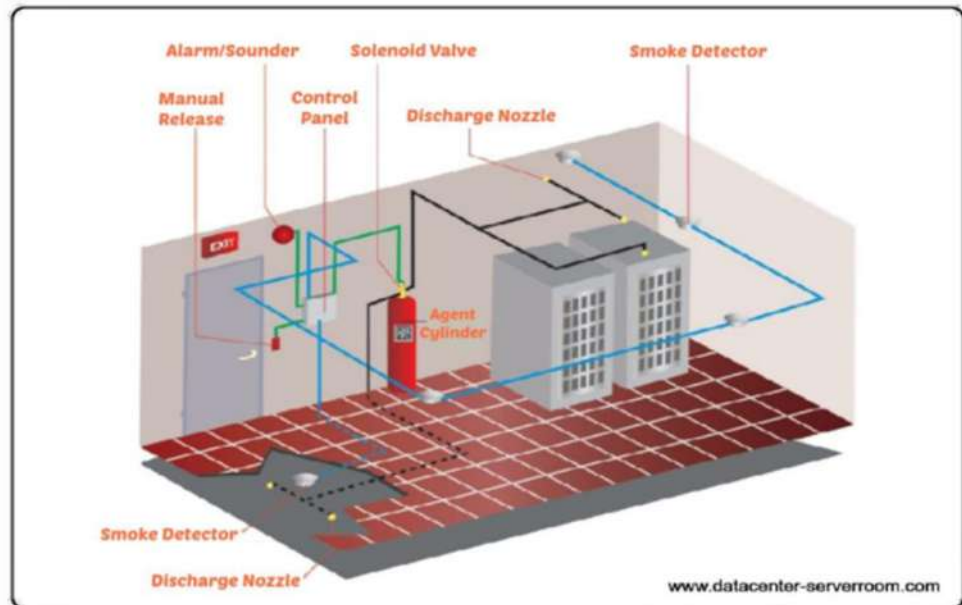
Gambar 2.2.2.2.13. Skema Fire Suppression System DC

Secara umum, sistem *fire suppression* terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut:

1. Deteksi panas yang linier (kabel sensor panas), ditempatkan sepanjang *tray wire* dan jalur elektrik baik diatas maupun dibawah *raised-floor*. Alarm pada sensor dibunyikan pada sistem kontrol bukan untuk memicu bekerjanya sistem *fire suppression*;
2. Deteksi tipe *spot* secara *intelligent* (*photoelectric detector*);
3. Deteksi asap (*smoke detector*);
4. *Portable fire extinguisher*;
5. Agen pembersih sistem *fire suppression*; dan
6. *Pull station*, perangkat sinyal, dan sistem kontrol.

Sistem peringatan proteksi dini sangat penting untuk menghindari kerusakan dan kehilangan yang dapat terjadi selama status kebakaran belum benar-benar terjadi (atau awal terjadinya kebakaran), karena kerusakan peralatan yang signifikan dapat semata-mata terjadi karena asap atau pembakaran produk-produk lain terhadap peralatan elektronik. Contoh sebuah sistem peringatan proteksi dini adalah air sampling *smoke detection systems* yang menyediakan proteksi level lain untuk ruang komputer dan fasilitas-fasilitas pintu masuk terkait, ruang mekanik, dan ruang listrik. Sistem peringatan proteksi dini juga disediakan sebagai pengganti *smoke detectors* biasa, karena sensitivitas dan kapabilitas deteksinya jauh melampaui detektor konvensional.

Gambar berikut adalah topologi *fire suppression system* yang terdiri dari perangkat utama dan pendukung serta topologi instalasinya. Silinder tabung gas terdiri dari silinder utama dan silinder cadangan untuk redudansi. Gambar di bawah adalah instalasi *fire suppression system* di ruang pusat data. *Smoke detector* di pasang di atas rack pusat data dan di bawah *raised floor*.



Gambar 2.2.2.14. Instalasi Fire Suppression System Pusat Data

Ketentuan dalam pembangunan *fire suppression system* pusat data sebagai berikut :

- a. Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pintu darurat kebakaran dapat dibuka ke arah luar;
- c. Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Titik panggil manual harus dipasang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Dinding dan pintu ke ruang pusat data, ruang mekanikal dan kelistrikan, ruang telekomunikasi dan ruangan penting lainnya memiliki tingkat terbakar (*fire-rating*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Ruang komputer harus diproteksi dengan sistem pendeteksi asap. Seluruh sistem deteksi asap bangunan harus diintegrasikan ke dalam satu alarm bersama;
- g. Catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman harus tersedia untuk keperluan pemeriksaan;

- h. Bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran harus tersedia;
- i. Ruang pusat data harus dilindungi dengan sistem pemadam kebakaran. Sistem pemadam kebakaran otomatis harus dapat diaktifkan secara manual;
- j. Alat pemadam kebakaran harus ditempatkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- k. Semua tanda peringatan kebakaran harus ditempatkan pada posisinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran harus didesain dan dipasang oleh tenaga ahli yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi di bidang desain dan pemasangan sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran sesuai standar internasional/nasional atau regulasi nasional;
- m. Jika ruang pusat data, ruang telekomunikasi, ruang mekanikal dan kelistrikan memiliki sistem pemadam api otomatis (*sprinkler*), maka sistem tersebut harus tipe *preaction*; dan
- n. Jika ruang atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi pusat data tidak memiliki sistem pemadam api otomatis (*sprinkler*), maka risiko kebakaran harus dikaji.

10. Sistem Pengkabelan

Sistem pengkabelan mengambil peran dalam komunikasi antar item di dalam pusat data atau ke dunia luar. Sistem pengkabelan infrastruktur jaringan data di pusat data menjadi salah satu hal yang paling rumit untuk merancanginya. Beberapa kriteria sistem pengkabelan yang baik antara lain adalah:

- a. Mampu menyediakan konektivitas yang luas (*wide channel-capacity*) dan terstruktur dengan baik (sesuai dengan ketentuan).
- b. Sederhana, yang berarti struktur pengkabelan yang dibuat tidak rumit sehingga memudahkan relokasi atau *maintenance*.
- c. *Scalable* dan fleksibel, dapat mengakomodasi kebutuhan mendatang dan perubahan yang terjadi, serta keragaman dari aplikasi *user* (servis yang dimiliki pusat data).

Pertimbangan desain sistem pengkabelan yang akan digunakan yaitu:

- a. Kabel menyumbang kurang dari 10 persen dari total biaya infrastruktur jaringan.

- b. Rentang hidup dari sistem kabel yang khas adalah 16 tahun ke atas, sehingga kabel adalah komponen yang terpenting dalam sistem pengkabelan terstruktur.
- c. Hampir 70 persen dari semua jaringan yang bermasalah berasal dari pemasangan kabel yang tak memenuhi standar dan komponen kabel itu sendiri.

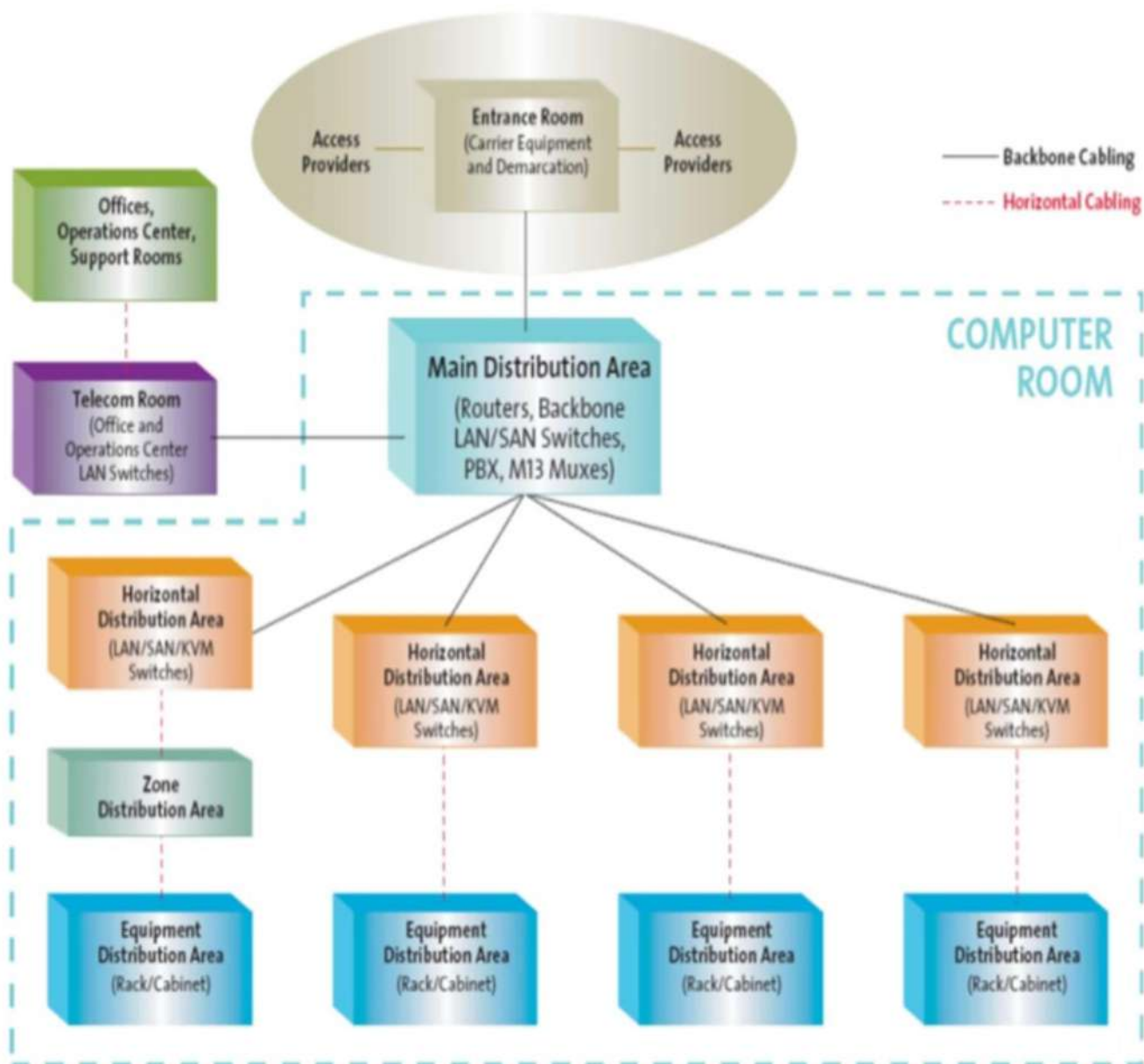
Beberapa ketentuan umum sistem pengkabelan listrik dan data di DC antara lain:

- a. Kabel kelistrikan dan kabel data harus dipisah, beberapa kabel harus diisolasi untuk menghindari gangguan.
- b. Sistem kabel di atas dan dibawah yang terstruktur serta terlindungi, mendukung kemudahan dalam instalasi dan keamanan dari hubungan arus pendek.
- c. Jalur kabel data harus memiliki jarak dari jalur listrik dan jalur *grounding* anti petir sesuai standard ANSI/TIA-469-B.
- d. Infrastruktur kabel sesuai standar TIA-942 :
 - Standar fiber optik jenis *single mode*;
 - Jaringan backbone menggunakan *fiber optic multimode* dengan ukuran 50 *micron* kategori *lazer-optimized*;
 - UTP CAT6;
 - *Backbone fiber optic* maksimal 300 meter; dan
 - Horizontal kabel maksimal 100 meter.

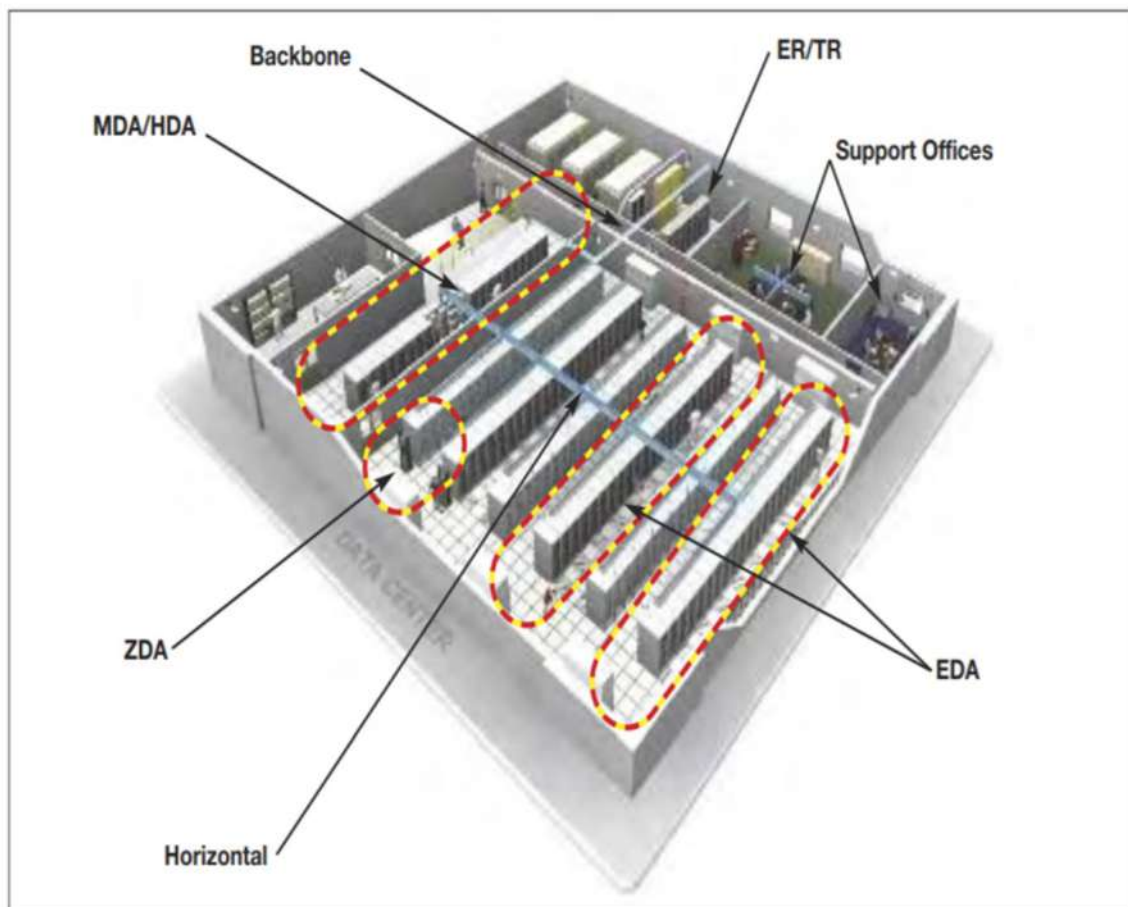
Standar ANSI/TIA/EIA-568-B berisi elemen dasar dari struktur sistem pengkabelan pada pusat data adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengkabelan horizontal (*horizontal cabling*);
2. Sistem pengkabelan *backbone* (*backbone cabling*);
3. *Cross-connect* pada pintu masuk (*entrance room*) atau area kerja (*main distribution area*);
4. *Main cross-connect* (MC) pada area distribusi utama (*main distribution area*);
5. *Horizontal cross-connect* (MC) pada ruang telekomunikasi, *HDA* atau *MDA*;
6. *Zone outlet* atau konsolidasi titik pada zone distribution area; dan
7. *Outlet* pada area distribusi perangkat (*equipment distribution area*).

Gambar di bawah ini adalah elemen fungsional yang saling terhubung satu sama lain pada sistem pengkabelan pusat data.



Gambar 2.2.2.2.15. Topologi Sistem Pengkabelan Pusat Data



Gambar 2.2.2.2.16. Arsitektur Instalasi Sistem Pengkabelan Pusat Data

1. *Horizontal Cabling* (Pengkabelan Horizontal)

Pengkabelan horisontal, sebagaimana ditentukan oleh ANSI/TIA/EIA-568-B, adalah kabel yang membentang dari ruang telekomunikasi ke area kerja dan berakhir di *outlet* telekomunikasi (informasi *outlet* atau dinding). *Wiring horizontal* dijalankan dari setiap *workstation* di suatu lantai yang sama ke ruang telekomunikasi, kemudian berakhir pada pemutusan *punchdown*, atau langsung ke *patch panel*. Di ruang telekomunikasi, peralatan jaringan seperti hub atau *switch* terhubung ke setiap stasiun kabel. Hub atau *switch* kemudian melewati sinyal komputer ke *workstation* lain atau ke pusat data, atau bahkan ruang telekomunikasi lainnya untuk konektivitas utama dengan seluruh jaringan. Pengkabelan horizontal meliputi :

- a. Kabel dari *patch panel* ke area kerja;
- b. Outlet telekomunikasi;
- c. Kabel penghentian;
- d. *Cross-connections* (jika diizinkan);
- e. Pembatasan maksimal pada satu titik transisi;
- f. Komponen jaringan yang spesifik (*switch router*) tidak harus dipasang sebagai bagian dari kabel dengan sistem horizontal (dalam dinding). Perangkat *switch* atau *router*

harus dipasang di ruang telekomunikasi atau area kerja; dan

- g. Titik transisi ANSI/TIA/EIA-568-B memungkinkan untuk satu titik transisi di kabel horisontal. Titik transisi adalah di mana salah satu jenis kabel terhubung ke yang lain, seperti di mana kabel bulat terhubung ke bawah karpet kabel. Sebuah titik transisi juga bisa menjadi titik dimana kabel didistribusikan ke *furniture modular*.

2. *Backbone Cabling* (Pengkabelan *Backbone*)

Kabel *backbone* diperlukan untuk menghubungkan fasilitas pintu masuk, ruang peralatan dan telekomunikasi, pengkabelan *backbone* juga bisa diaplikasikan antara lain untuk pemasangan kabel antara ruang inventaris dengan pintu masuk fasilitas pada bangunan dan koneksi vertikal antar lantai.

3. *Office, Operation Center* (Area Kerja)

Ruang bangunan di mana pengguna menggunakan peralatan telekomunikasi, mencakup semua komponen kabel antara outlet komunikasi (soket dinding) dan peralatan telekomunikasi pengguna akhir, seperti telepon, *workstation* dan printer, termasuk *outlet* komunikasi itu sendiri. Area kerja kabel sistem dirancang agar fleksibel, tapi masih memerlukan manajemen hati-hati. Agar terhindar dari masalah seperti pasangan kabel yang tidak cocok, kita perlu memasang *outlet* area kerja dengan prosedur standar dan menggunakan standar yang sama (T568A atau T568B) di seluruh sistem saat menyelesaikan kabelnya. Standar T568B lebih umum digunakan dalam aplikasi data. Standar ini memerlukan dua lubang *outlet* pada setiap dinding, satu untuk suara, dan satu lagi untuk *data.568B* standar yang lebih umum digunakan dalam aplikasi data.

4. *Telecom Room* (Telekomunikasi)

Daerah tertutup seperti ruang atau lemari, peralatan telekomunikasi perumahan, frame distribusi, terminasi kabel dan lintas menghubungkan kabel jaringan yang masuk dan keluar dari ruangan tersebut. Dengan kata lain, semua perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan kabel horizontal untuk kabel vertikal. Daerah ini sering juga rumah peralatan bantu, termasuk berkas pusat data jaringan. Setiap bangunan harus memiliki minimal satu kabel lemari, dan standar merekomendasikan satu per lantai. Ukuran lemari khusus juga dianjurkan, tergantung pada ukuran area

layanan. Harus ada ruang yang cukup untuk tenaga pelayanan untuk melakukan pemeliharaan dan melaksanakan tugas-tugas lain, serta untuk semua *hardware* yang dibutuhkan. Pencahayaan, pasokan listrik dan kondisi lingkungan juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh standar.

5. *Equipment Room* (Peralatan Kamar)

Setiap rumah tentu perlu membangun sebuah sistem telekomunikasi, seperti: *PBXs*, pusat data, *switch* dll, dan penghentian mekanik dari sistem kabel telekomunikasi. Hal ini dianggap berbeda dari lemari telekomunikasi karena kompleksitas komponen. Ruang peralatan mengambil tempat dari lemari telekomunikasi atau menjadi fasilitas terpisah. Secara umum, fungsi ruang peralatan dapat dimasukkan dalam lemari kabel. Ruang peralatan menyediakan titik terminasi untuk vertikal (*backbone*) kabel yang terhubung ke satu atau lebih lemari telekomunikasi. Hal ini juga dapat menjadi titik *cross-koneksi* utama untuk seluruh fasilitas. Sebagai contoh, di lingkungan kampus, setiap bangunan dapat memiliki ruang dan peralatan sendiri dimana peralatan lemari telekomunikasi saling terhubung. Peralatan di ruangan juga dapat terhubung ke fasilitas kampus yang terhubung ke seluruh kampus.

6. *Entrance Room* (Fasilitas Pintu Masuk)

Berisi pintu masuk layanan telekomunikasi ke gedung, dan mungkin juga mengandung koneksi *backbone*. Hal ini juga berisi titik demarkasi jaringan, yang merupakan interkoneksi untuk fasilitas telekomunikasi pertukaran operator lokal. Titik demarkasi biasanya 12 inci dari fasilitas pengangkut memasuki gedung, tapi *carrier* dapat menunjuk sebaliknya.

7. Administrasi Kabel

Administrasi kabel adalah kegiatan yang mencakup seluruh aspek pengaturan kabel dalam suatu bangunan, seperti: mencatat, mengelola, dan menguji sistem kabel, membuat serta menjaga rencana sistem yang telah dirancang.

A. Kabel Data *Ethernet*

Kabel data yang digunakan menggunakan tipe *UTP Category 6* (*UTP Cat6*) yang mampu meneruskan paket data sampai dengan 10 *Gbps* pada jarak 55 meter atau 1 *Gbps* pada jarak 100 meter. Di bawah ini adalah tabel kategori *UTP* dari yang awal *cat1* sampai dengan terbaru *Cat7*.

UTP Categories - Copper Cable				
UTP Category	Data Rate	Max. Length	Cable Type	Application
CAT1	Up to 1Mbps	-	Twisted Pair	Old Telephone Cable
CAT2	Up to 4Mbps	-	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT3	Up to 10Mbps	100m	Twisted Pair	Token Ring & 10BASE-T Ethernet
CAT4	Up to 16Mbps	100m	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT5	Up to 100Mbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, FastEthernet, Token Ring
CAT5e	Up to 1 Gbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet
CAT6	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT6a	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT7	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (100 meters)

Gambar 2.2.2.17. Kategori Kabel UTP–Ethernet

B. Fiber Optic

Standar ANSI/TIA/EIA-568-B memungkinkan penggunaan kabel serat optik baik yang menggunakan *mode single-mode* maupun *multimode*. Dengan kata lain, standar tersebut mengizinkan kabel serat optik yang memiliki karakteristik dan jenis mode yang berbeda untuk digunakan pada jaringan. Sistem pengkabelan horisontal ditetapkan dengan menggunakan kabel 62.5/125-*micron multimode*, sedangkan pengkabelan *backbone* dapat menggunakan baik kabel optik-serat *multimode* atau *single-mode*. Terdapat dua konektor yang sebelumnya banyak digunakan untuk pemasangan kabel dengan sistem serat optik, yaitu ST dan konektor SC. Banyak instalasi telah menggunakan jenis konektor ST, tetapi standar sekarang mengakui hanya konektor 568SC-jenis. Hal ini pun berubah sehingga serat-optik spesifikasi ANSI/TIA/EIA-568-B dapat menyetujui dengan Standar IEC 11801 yang digunakan di Eropa. Standar ANSI/TIA/EIA-568-B menggunakan *small-form factor* konektor seperti konektor MT-RJ.

Merujuk pada Gambar 2.2.2.18., menunjukkan gambaran singkat mengenai standar kabel serat optik yang digunakan pada pengkabelan premis. Terdapat empat tipe serat optik yang terdiri dari tiga jenis serat *multimode* (OM1, OM2, OM3) dan satu jenis serat *singlemode* (OS1).

Tipe Serat Optik	Panjang Gelombang	Atenuasi dB/Km (maks)	OFL Bandwidth MHz Km (Min)	EFL Bandwidth MHz Km (Min)
OM1 (50/125µm atau 62,5/125 µm)	850 nm	3,5	200	Tidak ditentukan
	1300 nm	1,5	500	Tidak ditentukan
OM2 (50/125µm atau 62,5/125 µm)	850 nm	3,5	500	Tidak ditentukan
	1300 nm	1,5	500	Tidak ditentukan
OM3 (50/125µm)	850 nm	3,5	1500 500	Tidak ditentukan
	1300 nm	1,5		Tidak ditentukan
OS1 (ITU-T G.652)	1310 nm	1,0	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
	1550 nm	1,0	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan

Gambar 2.2.2.2.18. Kategori Tipe Kabel Serat Optik

11. Desain Ruang Pusat

Data a. Desain *Raised Floor*

Disebut juga *access floor* atau *raised access floor*

FUNGSI

- Sistem distribusi udara dingin untuk mendinginkan peralatan IT;
- Jalur kabel data;
- Jalur kabel listrik;
- Jaringan kabel tembaga untuk *grounding* peralatan; dan
- Lokasi untuk mengalirkan air dingin (*chilled water*) atau pipa utilitas lainnya

Ukuran

- *Panel* : 60x60cm;
- Tebal : 28-42 mm; dan
- Tinggi penyangga : 35cm.

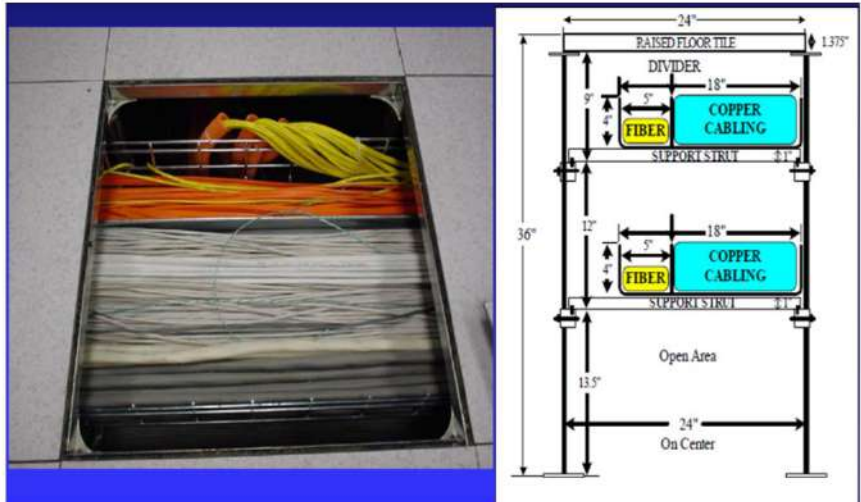


Gambar 2.2.2.2.19. Komponen Pendukung *Raised Floor*

1. Cable Tray

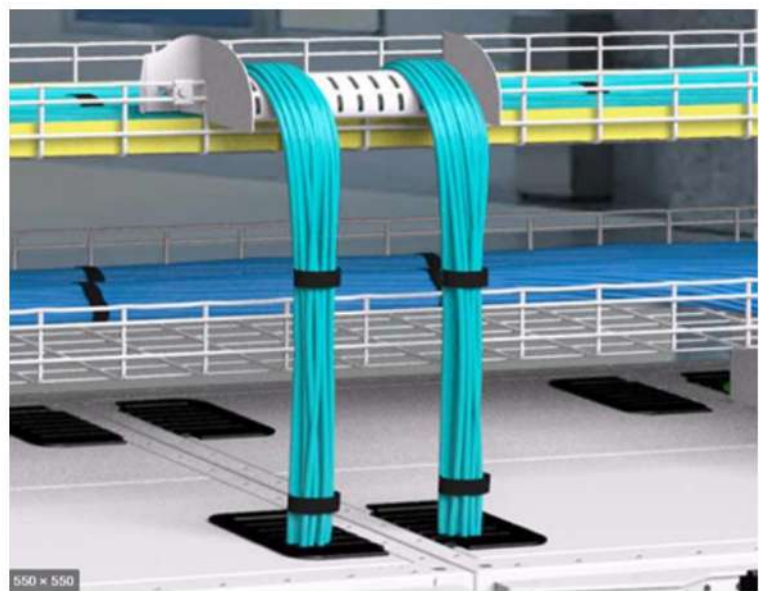
a. Bawah *Raised Floor*

- 2 *cable tray* untuk listrik & data
- Standar TIA-569-B : kabel data dan listrik terpisah minimal 61 cm

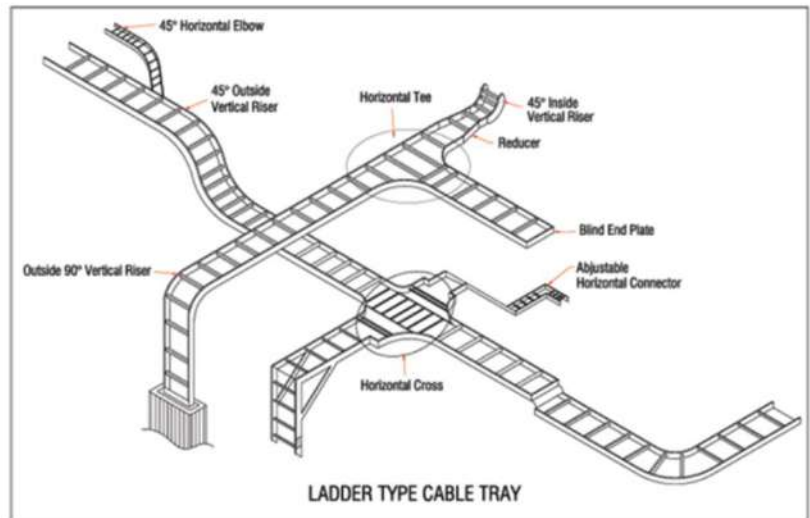


Gambar 2.2.2.20. Instalasi Kabel Data & *Power* di Bawah *Raised Floor*

b. Atas *Rack* Pusat Data



Gambar 2.2.2.21. Instalasi Kabel Data di Atas *Rack* pusat data dengan *Cable Tray*

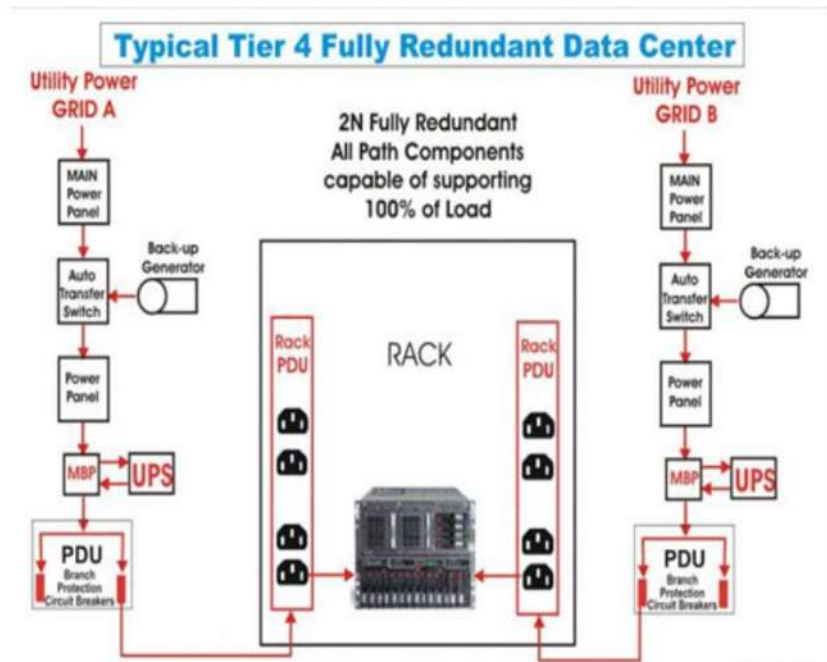


Gambar 2.2.2.22. Type Kabel Tray Untuk Instalasi Sistem Pengkabelan

c. *Rack Location Unit*

- Rack pusat data memenuhi persyaratan *EIA-310 (Electrical Industry Alliance Standards)* pada perangkat *rack 19"*.
- Memiliki jalur akses listrik dan jalur kabel data di bagian atas dan bawah, selain dari bagian depan dan belakang.
- Tata letak kabinet diatur sedemikian rupa untuk dapat mudah diakses oleh para teknisi dan diberikan ruang kosong agar suhu pada *rack* pusat data dapat lebih terkendali.
- Seluruh perangkat pusat data dan peralatan lainnya yang besar diletakan dibagian paling bawah *rack* pusat data.
- Setiap *rack* pusat data memiliki dua *strip power* dengan sumber listrik dari sumber yang berbeda.

Gambar dibawah ini adalah topologi redundansi sistem kelistrikan untuk tipe Tier 4 dengan *mode* aktif-aktif. Dua buah *power strip* yang ada di *rack* pusat data di-supply oleh sumber listrik yang berbeda.



Gambar 2.2.2.23 Instalasi Sistem Kelistrikan Tier-4-Fully Redundant

12. Sistem Keamanan

Fisik terdiri dari sistem pengamanan fisik dan non-fisik pada pusat data. *Fitur* sistem pengamanan fisik meliputi akses user ke pusat data berupa kunci akses memasuki ruangan (kartu akses atau biometrik) dan seluruh petugas keamanan yang mengawasi keadaan pusat data (baik di dalam maupun di luar). Pengamanan fisik juga dapat diterapkan pada seperangkat infrastruktur dengan melakukan penguncian dengan kunci gembok tertentu. Di dalam tabel sistem keamanan fisik pusat data terdiri dari keamanan gedung, keamanan ruang komputer, dan kebijakan serta prosedur keamanan.

Building	Computer Room	Policy & Procedure
<ul style="list-style-type: none"> •Alarms •Security Operation Center •Kamera keamanan •Informasi kegempaan 	<ul style="list-style-type: none"> •Two-factor access control dengan biometric dan kartu akses •Kamera •Catu daya cadangan 	<ul style="list-style-type: none"> •SOP •Rekaman video dan log akses disimpan minimal 30 hari •Audit secara teratur

Gambar 2.2.2.24 Keamanan Pusat Data

Gambar di bawah ini adalah contoh perangkat pendukung sistem keamanan di pusat data untuk keamanan rak pusat data, dan pintu masuk ruang pusat data.



Gambar 2.2.2.25 Perangkat Pendukung Keamanan Fisik Pusat Data

13. Sistem Pencahayaan

Sistem pencahayaan pusat data diperlukan untuk menerangi ruang pusat data utama dan ruang-ruang lainnya termasuk jalur masuk atau lorong. Standar sistem pencahayaan menggunakan TIA-942-A. Lokasi penempatan lampu-lampu antara lain di atas lorong dan di atas antara rak cabinet. Selain lampu utama terdapat juga Lampu dan petunjuk darurat (*emergency lighting & signs*), jalur darurat. Penempatan dan intensitas cahaya lampu pusat data dibagi menjadi tiga lapisan yakni :

- Level 1: untuk lokasi yang tidak dihuni. Pencahayaan tidak perlu untuk mendukung kejelasan penglihatan manusia tetapi peralatan pengawas video harus tetap dapat bekerja dengan baik.
- Level 2: untuk lokasi menuju ruang pusat *Farm* berupa gang-gang dan lorong-lorong yang cukup diterangi untuk pergerakan yang aman dan kamera keamanan dapat bekerja dengan baik.
- Level 3: lokasi utama pusat data *Farm* dll dan ditempati di mana karyawan akan bekerja. Tingkat cahaya bidang horizontal: 500 *lux* dan bidang vertikal: 200 *lux*.

14. Sistem Pemantau

Lingkungan

Fungsi utama dari *EMS (Environment Monitoring System)* adalah memonitor operasional pusat data dari ancaman lingkungan yang ada disekitarnya. Oleh karena operasional pusat data yang *non-stop* maka perlindungan dan monitoring pada fasilitas ini

harus diutamakan. Pada umumnya gangguan yang dimonitor oleh *EMS* ini adalah suhu & kelembaban pada pusat data *room*, kebocoran air di bawah *raised floor* (*Water Leak*) yang diakibatkan kondensasi *AC*, getaran, dan tegangan listrik akibat pemadaman yang tiba-tiba. Untuk memonitoring perangkat *EMS* ini didukung oleh beberapa sensor cerdas yang berupa *modular sensor*. Sensor ini bervariasi, diantaranya *sensor status on/o AC*, *sensor water leak*, *door contact*, *temperature*, *humidity*, *vibration*, *air flow*, *voltage*, *smoke detector*, dll. Sensor ini mendeteksi adanya kelainan pada lingkungan pusat data, yang kemudian informasi tersebut dikirimkan ke perangkat *EMS*. Perangkat ini kemudian akan mengirimkan sinyal peringatan berupa *alarm*, *buzzers*, *e-mail*, *sms*, dan telepon ke *system administrator* atau *network administrator* yang selalu siaga di *NOC*, sehingga masalah tersebut dapat ditangani secepat mungkin. *EMS* akan melakukan pemantauan komponen berikut ini :

- tegangan;
- akses masuk keluar ruangan;
- suhu/*temperatur*;
- kelembaban;
- adanya air di ruangan;
- adanya asap/*smoke* di ruangan;
- memonitor sisa solar di tangki genset;
- mengaktifkan *AC* tambahan; dan
- mendapatkan *alert* melalui *email/SMS* terintegrasi dengan *NMS* yang ada.



Gambar 2.2.2.26. Komponen Lingkungan yang akan di Pantau di Pusat Data

NOTIFICATIONS METHODS



Gambar 2.2.2.27. Metode Notifikasi Sistem Pemantauan Lingkungan Pusat Data

15. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*)

Data dan informasi merupakan "aset" paling berharga bagi organisasi pemerintahan maupun perusahaan. Oleh karena itu, perlu ada perlindungan dan pencadangan terhadap data dan informasi, sehingga data tetap aman apabila terjadi bencana. Dengan begitu aktivitas bisnis tetap berlanjut. Oleh karenanya dibutuhkan Pusat Pemulihan Bencana atau *Disaster Recovery Center (DRC)* untuk membuat data, informasi, dan aplikasi tetap aman dan dapat diakses. *DRC* adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat IT, sistem, aplikasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang diperlukan oleh perusahaan besar dan organisasi pemerintahan. *DRC* diperlukan oleh organisasi pemerintahan maupun perusahaan dengan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Kegagalan mesin dan perangkat keras (*hardware*)
Meskipun perusahaan telah berinvestasi dengan membeli mesin dan perangkat keras (*hardware*) kelas tinggi, bukan berarti tidak perlu membangun *DRC*. Mesin canggih dengan *hardware* tinggi dan *DRC*, akan membuat perusahaan tidak menemukan kegagalan layanan dikarenakan fungsi *hardware*.
2. Faktor kesalahan manusia
Pencegahan terhadap kesalahan manusia (*human error*) seperti penghapusan data atau kesalahan konfigurasi yang tidak disengaja. Organisasi bisa mencadangkan data dan mengembalikannya lagi seperti sebelum dilakukan kesalahan.

3. Faktor alam yang tak bisa diprediksi

Bencana tidak bisa dihindari dan diprediksi, untuk itu, memiliki *DRC* yang berada di beberapa tempat yang secara teori aman terhadap bencana besar.

4. Optimalisasi layanan

Kepemilikan *DRC* berarti memberikan layanan kepada masyarakat yang baik. Saat ini masyarakat ingin mendapatkan layanan cepat, dan itu bisa terjadi jika infrastruktur bisa diakses kapan saja. Keandalan dan kelancaran suatu layanan *DRC* bergantung pada terpenuhinya beberapa syarat bangunan dan arsitektur sebagai berikut:

- Jarak fisik antara Pusat Data utama (*DC*) dan Pusat Pemulihan Bencana (*DRC*) minimal lebih dari 40 km.
- Berada di luar radius mitigasi bencana seperti gunung berapi, tsunami, banjir, dan lain – lain.
- Tidak berada pada jalur patahan geologi.
- Indeks rawan bencana rendah di Indonesia (Sumber: Indeks Rawan Bencana Indonesia BNPB, 2011).
- Akses jaringan internet memadai, mudah dijangkau.
- Bangunan harus memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani keluar - masuk barang/peralatan.

Terdapat 3 (tiga) jenis Pusat Pemulihan Bencana (*DRC*) yakni:

1. *Cold DRC*

Cold DRC adalah jenis yang paling sederhana terdiri dari elemen daya dan kemampuan jaringan serta pendinginan tetapi tidak termasuk elemen perangkat keras lain seperti pusat data dan penyimpanan. Sebelum dapat digunakan, data cadangan bersama dengan beberapa perangkat keras tambahan harus dikirim ke lokasi *DRC* dan diinstal.

2. *Warm DRC*

Warm DRC adalah tipe *DRC* yang standar terdiri dari komputer dengan segala komponennya seperti aplikasi, jalur komunikasi data, serta *backup* data yang paling terbaru, dimana sistem tidak secara otomatis berpindah, tetapi masih terdapat proses manual meskipun dilakukan seminimal mungkin.

Ketika *DC* utama mengalami masalah atau bencana, semua akan dialihkan ke *DC* kedua yaitu *DRC* dan sementara itu *DRC* beroperasi, personel juga mulai memulihkan data yang ada pada *DC* utama agar *DC* utama bisa beroperasi kembali.

3. *Hot DRC*

Hot DRC merupakan tipe *DRC* yang paling cepat dengan mengatur secepat mungkin operasional bisnis, sistem aplikasi, jaringan komunikasi data yang sama sudah dipasang dan sudah tersedia di lokasi *DRC*. Data secara terus menerus (*realtime*) di *backup* menggunakan koneksi antara *DC* dan lokasi *DRC*, dan operasional bisnis akan berjalan pada saat itu juga, tanpa harus mematikan sistem di pusat data lama.

A. Kondisi Eksisting Pusat

Data

Kondisi saat ini server aplikasi Pemerintah Kabupaten Sragen ditempatkan di Pusat Data Diskominfo Pemkab Sragen. Secara bertahap server aplikasi mulai dimigrasikan ke layanan *Virtual Private Server* (VPS) Pusat Data Nasional.

Source aplikasi dicadangkan (*backup*) di *repository server*, sedangkan untuk berkas (file) dan *database* masih dicadangkan di server yang berbeda di Pusat Data Diskominfo.

B. Usulan Topologi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana (DRC)

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Sragen belum memiliki Pusat Pemulihan Bencana atau *DRC*. Sesuai dengan arahan dari Kebijakan Pemerintah untuk memanfaatkan Pusat Data Nasional. Diskominfo dapat memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional sebagai lokasi *DRC*.

Menyusul

Gambar 2.2.2.29 Usulan Topologi DC-DRC

Berdasarkan gambar usulan topologi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di atas, jarak lokasi Pusat Pemulihan Bencana minimal 40 km dari Pusat Data, dan memiliki karakteristik bencana yang berbeda dengan aplikasi di Pusat Data akan dicadangkan (*backup*), direplikasi, dan disinkronisasi dengan Pusat Pemulihan Bencana. Berikut ini usulan topologi untuk replikasi, dan sinkronisasi aplikasi.

Menyusul

Gambar 2.2.2.2.29 Usulan Replikasi pusat data dan Data Antara DC-DRC

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar topologi di atas :

a.Router WAN

Router WAN digunakan untuk menghubungkan pusat data (*DC*) dan *Disaster Recovery Center (DRC)* menggunakan layanan *Wide Area Network (WAN)*, seperti *Metro Ethernet (Metro-E)* atau *Virtual Private Network over Internet Protocol (VPN-IP)* dari pihak ketiga, yang disebut *provider*. Dengan menggunakan layanan *WAN* ini, pusat data dan *Disaster Recovery Center* dapat terhubung dan saling berkomunikasi dalam jaringan yang luas.

b. Load Balancer Aplikasi (HA

Proxy) *Load balancer* aplikasi (*HA Proxy*) digunakan untuk mengatur pembagian beban kerja pada beberapa pusat data aplikasi, sehingga dapat menjaga ketersediaan aplikasi. Dengan menggunakan *load balancer* ini, beban kerja pada aplikasi bisa terdistribusi secara merata dan jika terjadi kegagalan pada salah satu pusat data aplikasi, pusat data aplikasi lainnya masih dapat melayani pengguna. Dengan demikian, sistem akan lebih handal dan tidak terganggu jika terjadi kegagalan pada salah satu pusat data aplikasi.

c.Application pusat data (pusat data

aplikasi) Pusat data aplikasi adalah tempat penyimpanan *file* aplikasi seperti *file .php*, *file* hasil olah aplikasi, dan *file* yang diunggah oleh pengguna seperti *.xls*, *.pdf*, dan *.doc*. Pusat data aplikasi ini menggunakan metode folder sharing dengan protokol *NFS (Network File Sharing)* untuk memudahkan pengaksesan dan penggunaan *file* aplikasi tersebut. Dengan *NFS*, *file-file* tersebut dapat diakses dan digunakan oleh berbagai perangkat dan pengguna yang terhubung ke dalam jaringan.

d.Database pusat data (pusat data pangkalan data)

Pusat data pangkalan data (*database*) terdiri dari beberapa server (*cluster*) yang bekerja bersama dan terhubung secara otomatis. Dalam sistem *cluster*, jika satu pusat data mengalami kegagalan, maka *server* lainnya dapat mengambil alih fungsinya secara otomatis. Pusat data aplikasi dapat mengakses pusat data pangkalan data melalui *load balancer* atau *HA Proxy* dengan menggunakan *IP Virtual*. Hal ini memungkinkan pusat data aplikasi untuk terhubung ke pangkalan data tanpa harus mengetahui alamat *IP* sebenarnya dari setiap pusat data di dalam *cluster*.

2.2.2.3. Jaringan Intra Pemerintah

Prinsip utama dalam penyediaan jaringan data meliputi aspek ketersediaan, keamanan, dan pengendalian. Untuk memenuhi ketiga prinsip tersebut maka pengembangan arsitektur jaringan intra pemerintah di Pemerintah Kabupaten Sragen dapat bertumpu pada empat karakteristik yakni berjenjang atau hirarki (*hierarchy*), zonasi (*zoning*), redundansi (*redundancy*), dan keamanan (*security*). Hierarki dan zonasi memungkinkan pengembangan jaringan yang terdiri dari banyak komponen yang saling terkait secara berlapis dan terstruktur. Model hierarkis dapat membantu untuk

memaksimalkan kinerja jaringan, mengurangi waktu untuk mengimplementasikan dan memecahkan masalah desain, dan meminimalkan biaya.

Desain jaringan redundansi untuk memenuhi persyaratan untuk ketersediaan jaringan dengan menduplikasi komponen jaringan, jalur koneksi jaringan, dan rute jaringan (*routing*). Redundansi dapat menghilangkan satu titik kegagalan pada jaringan. Redundansi juga memfasilitasi pembagian beban, yang meningkatkan kinerja jaringan. Redundansi akan menambah kompleksitas dan biaya pada jaringan, dan harus dirancang dengan hati-hati. Desain keamanan jaringan ditujukan untuk meningkatkan keamanan jaringan Pemerintah Kabupaten Sragen dari serangan yang dilakukan oleh pihak luar. Perangkat *firewall* berfungsi untuk memantau lalu lintas jaringan dan membatasi akses ke dalam jaringan internal, sehingga dapat membantu melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan dan memperkuat sistem keamanan jaringan secara keseluruhan.

A. Topologi

Jaringan Jaringan *LAN* harus dibangun secara terstruktur, baik dari sisi topologi jaringan, segmentasi jaringan, pengalamatan (*addressing*) maupun penggunaan perangkatnya. Dengan memiliki struktur jaringan yang baik maka akan dapat dilakukan pengaturan, pengawasan serta pemanfaatan yang lebih maksimal. Perangkat aktif jaringan sebagai komponen utama di jaringan tentunya harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya jaringan, seperti kapasitas *bandwidth*, menyaring paket data yang lewat (*traffic filtering*), segmentasi jaringan (*VLAN*), mengatur prioritas lalu lintas paket data (*traffic priority*), dan ketahanan jaringan (*network reliability*) yang baik, serta berbagai fungsi pengontrolan lainnya, sehingga pemanfaatan TI dalam proses bisnis organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil yang maksimal.

B. Berjenjang atau hirarki (3-Tier

Hierarchy) Model desain jaringan berjenjang atau hirarki untuk membantu dalam mengembangkan topologi di lapisan *diskrit*. Setiap lapisan atau *tier*, dalam hierarki menyediakan fungsi tertentu yang mendefinisikan perannya dalam jaringan secara keseluruhan. Setiap lapisan dapat difokuskan pada fungsi tertentu, memungkinkan untuk memilih sistem dan fitur yang tepat untuk setiap lapisan.

Setiap lapisan model hirarkis memiliki peran spesifik :

1. Lapisan inti (*Core Layer*)

Menyediakan transportasi optimal antar lokasi. Lapisan inti dari topologi hierarkis tiga lapis adalah tulang punggung berkecepatan tinggi *internetwork*. Karena lapisan inti sangat penting untuk interkoneksi, maka komponen pendukung harus redundansi. Lapisan inti harus sangat andal dan harus beradaptasi dengan perubahan dengan cepat.

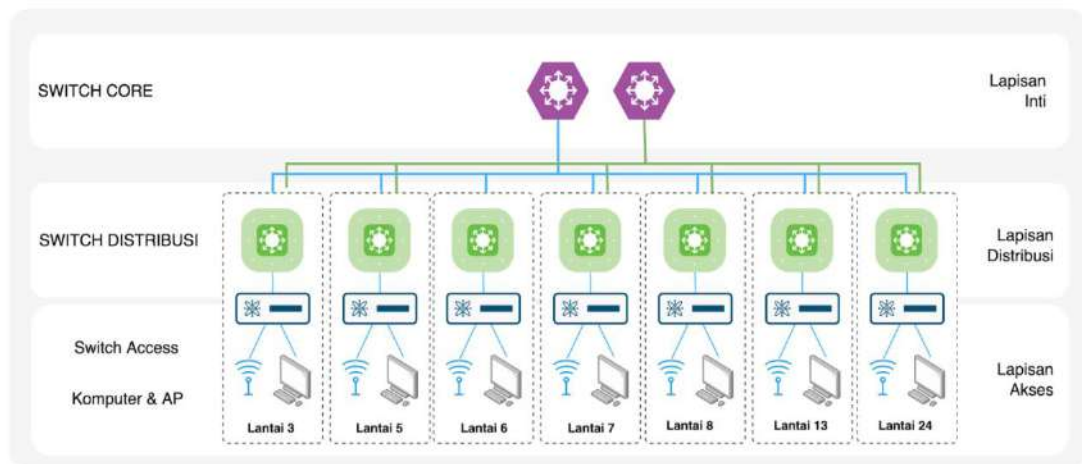
2. Lapisan distribusi (*Distribution Layer*)

Lapisan distribusi dapat berfungsi sebagai penghubung antara layanan jaringan pada lapisan akses dengan lapisan inti, penerapan kebijakan keamanan, lalu lintas paket data, dan perutean (*routing*).

Pada lapisan distribusi dapat dikonfigurasi agar dapat merutekan atau menghubungkan antara satu VLAN dengan VLAN yang lain. Hal ini memungkinkan untuk terciptanya hubungan antar VLAN dalam satu jaringan yang sama, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pengelolaan jaringan secara keseluruhan.

3. Lapisan Akses

Lapisan akses adalah lapisan yang langsung berinteraksi dengan perangkat pengguna seperti komputer desktop, laptop, printer, CCTV, dan lain - lain. Perangkat jaringan yang digunakan pada lapisan akses meliputi *switch access* dan *Access Point (AP)* pada jaringan nirkabel.



Gambar 2.2.2.3.1 Topologi Jaringan 3-Tier Hierarchy

Penggunaan model hirarki dapat membantu untuk meminimalkan biaya. Pembelian perangkat yang sesuai untuk setiap lapisan hierarki, dapat menghindari pengeluaran uang pada *fitur* yang tidak perlu. Pendekatan modular dari desain hierarkis memungkinkan perencanaan kapasitas yang akurat dalam setiap lapisan hierarki, sehingga mengurangi *bandwidth* yang terbuang.

Desain jaringan dengan pendekatan zonasi memungkinkan untuk menjaga setiap elemen desain sederhana dan mudah dipahami. Kesederhanaan meminimalkan kebutuhan untuk pelatihan ekstensif untuk personel operasi jaringan dan mempercepat implementasi suatu desain. Menguji desain jaringan menjadi mudah karena ada fungsionalitas yang jelas di setiap lapisan. Isolasi kesalahan ditingkatkan karena jaringan teknisi dapat dengan mudah mengenali titik transisi dalam jaringan untuk membantu mereka mengisolasi kemungkinan titik kegagalan.

Tabel 2.2.2.3.1 Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (3-Tier Hierarchy)

Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (3-Tier Hierarchy)	
Lapisan Inti (Core Layer)	

Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (3-Tier Hierarchy)

Jaringan pada *core layer* dirancang dengan mempertimbangkan:

- Sebagai tulang punggung (*backbone*) jaringan yang menghubungkan zona-zona jaringan
- Memiliki performansi dan stabilitas yang tinggi
- Memiliki tingkat kompleksitas yang rendah
- Sebagai titik agregasi layer distribusi
- Memiliki skalabilitas yang tinggi untuk pengembangan ke depan
- Memiliki rancangan yang independen dari sisi teknologi (menerapkan *open standard*)

Lapisan Distribusi (*Distribution Layer*)

Jaringan pada layer distribusi dirancang dengan mempertimbangkan:

- *Availability, load balancing, QoS* dan *provisioning*
- Agregasi layer akses dan keterhubungan ke jaringan inti (*uplink*)
- Mengamankan jaringan inti dari permasalahan di jaringan akses
- Penerapan penyederhanaan *routing*, kecepatan konvergensi, jalur *redundant* dan *load sharing*
- redundansi perangkat (HSRP, GLB)

Lapisan Akses (*Access Layer*)

Penerapan teknologi jaringan pada akses layer yang meliputi:

- Jaringan *layer 2/layer 3*, mendukung konvergensi standar jaringan dan *storage, HA, security, QoS, IP multicast*.
- Memiliki kemampuan *Intelligent Network Services: QoS, broadcast suppression, VLAN*
- dan VTP, *internal routing protocol, port aggregation*
- Mendukung fitur *security* yang terintegrasi: *802.1X, CISF, port security, DHCP snooping*.
- Memiliki kompatibilitas interkoneksi dengan perangkat layanan: *Phone Discovery, PoE*,
- Jaringan dikelompokkan menjadi tiga kategori yang disesuaikan dengan karakteristik *auxiliary VLAN*.
kebutuhan implementasi dan layanannya sebagai berikut:

a. Jaringan internal

Local Area Network (LAN), memberikan akses jaringan di semua gedung dengan menggunakan kabel *fiber optic (FO)*. Kabel FO dipilih karena kabel FO memiliki ketebalan terhadap imbas petir dan gangguan elektromagnetik. Sehingga dalam rancangan ini ditetapkan bila jaringan melintas keluar bangunan maka harus memakai kabel FO.

Metropolitan Area Network (MAN) dan *Wide Area Network (WAN)*, memberikan akses jaringan pada *remote site internal* dengan menggunakan interkoneksi yang disediakan oleh penyedia jaringan akses. Titik masuk jaringan WAN diharuskan melalui fasilitas ruang telekomunikasi (*Telecommunication Room Facility*) yang ada di pusat data, yang berfungsi sebagai area demarkasi kepemilikan infrastruktur dan pengamanan masalah fisik.

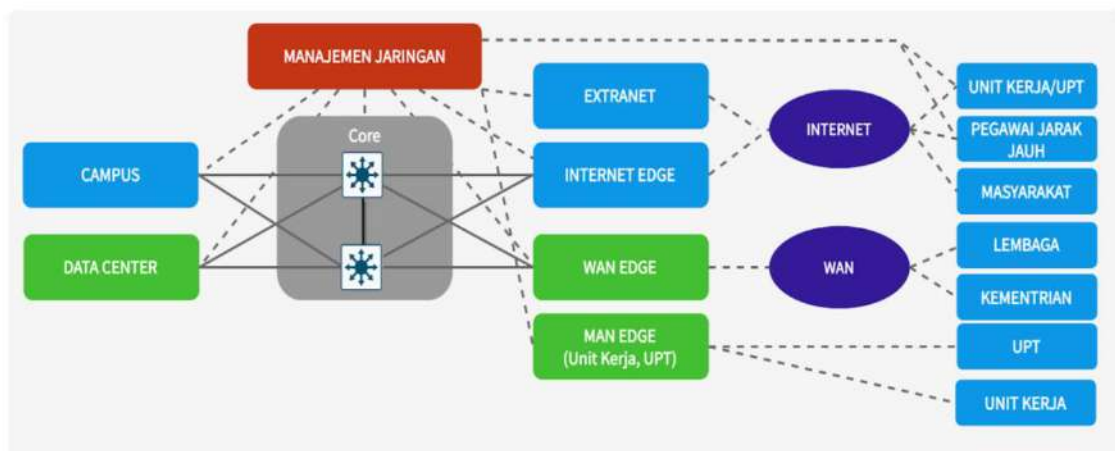
Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (3-Tier Hierarchy)

	<i>Redundancy Link</i> , penerapan jalur berganda pada jaringan LAN dan WAN untuk mendukung ketersediaan layanan yang tinggi pada jaringan data.
	Penggunaan protokol <i>routing</i> internal seperti OSPF digunakan dengan pertimbangan kebutuhan konvergensi yang cepat untuk melayani jaringan internal.
b. Jaringan Pusat Data	
	Jaringan pusat data memberikan akses jaringan untuk semua pusat data yang ada pada pusat data. Jaringan memiliki eksibilitas dalam mendukung konektivitas yang dinamis berbasis modul atau zone, memiliki densitas <i>port interface</i> perangkat yang tinggi dan kemampuan melayani lalu-lintas jaringan dengan <i>bandwidth</i> yang tinggi.
	Memiliki eksibilitas untuk mendukung standar sistem storage berbasis jaringan seperti <i>Network Area Storage</i> (NAS) maupun standar <i>Storage Area Network</i> (SAN) seperti iSCSI dan FcoE.

C. Zonasi

(Zoning)

Proyek desain jaringan besar dan implementasi jaringan besar pada umumnya terdiri dari area yang berbeda atau zona. Setiap zona harus dirancang menggunakan pendekatan sistematis, *top-down*, penerapan hierarki dan redudansi.



Gambar 2.2.2.3.2. Arsitektur Jaringan Berbasis Zonasi (*Zoning*)

Arsitektur Jaringan Berbasis Zonasi (*Zoning*) terdiri dari beberapa zona sebagai berikut:

1. Zona Inti (*Core*)

Zona inti menghubungkan semua zona lainnya dan merupakan infrastruktur berkecepatan tinggi yang menyediakan transportasi *Layer 2* dan *Layer 3* yang andal dan dapat diukur. *Core* biasanya diimplementasikan dengan penggunaan dua unit *switch* (redundant) untuk menghubungkan ke zona kampus, pusat data, *WAN edge*, dan *Internet edge*.

2. Pusat Data

Pusat data menampung server, aplikasi, dan perangkat penyimpanan untuk digunakan oleh pengguna internal. Pusat data juga menghubungkan infrastruktur jaringan. Pusat data tidak bisa diakses langsung oleh masyarakat umum melalui jaringan internet.

3. Kampus (*Campus*)

Jaringan kampus menyediakan akses jaringan ke pengguna dan perangkat akhir (*endpoint*) yang terletak di satu lokasi. Kampus dapat menjangkau beberapa lantai dalam satu bangunan atau beberapa bangunan untuk perusahaan besar. Kampus ini menyelenggarakan layanan data. Desain kampus harus memungkinkan pengguna kampus aman mengakses pusat data dan sumber daya Internet dari infrastruktur kampus.

4. Manajemen

Jaringan manajemen menyediakan pemantauan, analisis, otentikasi, dan layanan rekam jejak (*logging*). pusat data manajemen mendukung *RADIUS*, *Kerberos*, *Protokol Waktu Jaringan (Network Time Protocol)*, *Protokol Manajemen Jaringan Sederhana (Simple Network Management Protocol)*, dan lalu lintas *syslog*.

Tabel 2.2.2.3.2 Aplikasi pusat data Manajemen Jaringan

No	Aplikasi pusat data	Fungsi
1	<i>Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)</i>	pusat data yang memudahkan penyebaran <i>IP Address</i> sebuah jaringan secara merata tanpa perlu dilakukan dengan manual dengan memasukkan <i>IP Address</i> satu persatu ke perangkat.
2	<i>Domain Name (DNS) Lokal</i>	Sistem yang menghubungkan <i>Uniform Resource Locator</i> dengan <i>IP Address</i> . pusat data DNS berisi <i>database</i> alamat IP privat dan nama <i>host</i> terkait. pusat data DNS ini untuk melayani permintaan akses nama domain aplikasi intranet. Dengan adanya DNS Lokal, pengguna tidak perlu menghafal alamat IP dari aplikasi, cukup memasukkan nama domain.
3	<i>Directory Service</i>	pusat data yang memberikan layanan untuk mengelola aturan, hak akses, dan <i>security</i> pada pengguna atau jaringan komputer di perusahaan. <i>Directory Service</i> menyimpan konfigurasi jaringan baik <i>user</i> , <i>group</i> , komputer, <i>hardware</i> , serta berbagai <i>policy</i> keamanan dalam satu <i>database</i> terpusat. Contoh <i>directory service</i> pusat data yakni <i>Active Directory Domain Service (ADDS)</i> pada Windows pusat data, <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)</i> pada sistem terdistribusi.
4	<i>Network Time Protocol (NTP) penunjuk</i>	pusat data untuk memelihara dan sinkronisasi terhadap waktu dalam sebuah sistem komputer dan jaringan. Proses sinkronisasi ini dilakukan di dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP/IP.
5	<i>Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)</i>	In pusat data yang digunakan untuk melayani <i>Authentication</i> , <i>Authorization</i> , dan <i>Accounting (AAA)</i> di dalam sebuah jaringan. Singkatnya RADIUS pusat data ini menyimpan kumpulan <i>user</i> dimana <i>user-user</i> tersebut dapat digunakan oleh <i>client</i> atau <i>user</i> yang berada dalam satu jaringan dengan RADIUS pusat data tersebut.
6	<i>Network Monitoring System(NMS)</i>	Suatu pusat data yang diperuntukan oleh administrator jaringan untuk memantau performansi jaringannya, seperti <i>Memory usage</i> , <i>CPU load</i> , <i>disk usage</i> , <i>service states</i> , <i>running process</i> , dan lain sebagainya. NMS menggunakan protokol <i>SNMP (Simple Network Management Protocol)</i> yang merupakan standar manajemen jaringan pada TCP/IP.

No	Aplikasi pusat data	Fungsi
7	<i>System Logging Protocol (Syslog)</i>	Protokol standar yang digunakan untuk mengirim log atau pesan peristiwa ke pusat data tertentu, yang disebut pusat data syslog. Ini terutama digunakan untuk mengumpulkan berbagai log perangkat dari beberapa mesin berbeda di lokasi pusat untuk pemantauan dan peninjauan.

5. Jaringan Skala Luas (*Wide Area Network*)
WAN adalah bagian dari jaringan yang menghubungkan Pusat Data dengan kantor Kementerian/Lembaga, dan lokasi Pusat Pemulihan Bencana (*DRC*).
6. Jaringan Dalam Kota (*Metropolitan Area Network*)
MAN (*Metropolitan Area Network*) adalah bagian dari jaringan komputer yang menghubungkan beberapa kantor perangkat daerah, dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berada di area kabupaten/kota yang sama dengan pusat data.
7. Internet
Internet adalah infrastruktur yang menyediakan konektivitas Internet dan yang bertindak sebagai pintu gerbang (*gateway*) ke seluruh dunia. Layanan Internet termasuk akses *De-Militerized Zone (DMZ)*, internet pengguna dilindungi Pemerintah Kabupaten Sragen, dan akses jarak jauh *Virtual Private Network (VPN)*.

D. Redudansi (*Redundancy*)

Desain jaringan redudansi untuk memenuhi persyaratan ketersediaan jaringan. Redudansi akan menghilangkan titik tunggal dari kegagalan (*single point of failure*) pada jaringan. Tujuannya adalah untuk menduplikasi komponen yang penting (utama) untuk menghindari aplikasi penting tidak dapat diakses. Komponen tersebut bisa berupa *router*, *switch*, tautan antara dua *switch*, catu daya, *WAN Router*, konektivitas internet, dan sebagainya. Redudansi meliputi:

1. Duplikasi Komponen Kritis (*Duplicating High Critical Component*)
Untuk menjaga ketersediaan layanan dan akses ke aplikasi utama maka komponen jaringan yang kritis seperti *switch core*, *firewall*, *router* internet harus diduplikasi dengan konfigurasi *High Availability (HA)* sehingga jika salah satu perangkat mengalami gangguan maka masih ada perangkat cadangan yang akan menggantikan secara otomatis.
2. Koneksi dan Jalur Cadangan (*Backup Path*)
Untuk menjaga interkoneksi ketika satu atau lebih jalur utama sedang terputus, maka lalu lintas paket data akan melalui jalur cadangan secara otomatis. Untuk melakukan proses otomatisasi perpindahan jalur utama ke cadangan maka diimplementasikan protokol rute (*routing protocol*) tertentu.
3. Pembagian Beban (*Load Sharing*)
Tujuan utama redudansi adalah untuk memenuhi persyaratan ketersediaan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kinerja dengan mendukung pembagian beban lintas tautan paralel. *Load Sharing*, terkadang disebut *load balancing*,

memungkinkan dua atau lebih antarmuka atau jalur untuk dibagikan beban lalu lintas.

E. Keamanan

(Security)

Keamanan adalah tujuan teknis utama, dan desain keamanan adalah salah satu aspek terpenting desain jaringan organisasi. Meningkatnya ancaman baik dari dalam maupun dari luar jaringan organisasi memerlukan aturan dan teknologi keamanan paling mutakhir. Secara keseluruhan tujuan yang dimiliki sebagian besar organisasi adalah bahwa masalah keamanan seharusnya tidak mengganggu operasional organisasi.

Kegiatan perancangan desain keamanan jaringan secara efektif meliputi:

1. Mengidentifikasi Aset Jaringan (*Identifying Network Assets*)

Mengidentifikasi aset yang harus dilindungi, nilainya aset, dan biaya yang diharapkan terkait dengan kehilangan aset ini jika keamanan pelanggaran terjadi. Aset jaringan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan data. Aktiva juga termasuk kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan reputasi perusahaan.

Data yang digunakan perusahaan untuk mencapai misinya adalah aset yang sering diabaikan. Data dapat mencakup *blueprint*, dokumen perencanaan keuangan, hubungan pelanggan informasi, dokumen analisis persaingan, informasi konfigurasi untuk perangkat keras dan perangkat lunak, nomor Jaminan Sosial karyawan, informasi lencana karyawan, dan sebagainya.

Integritas dan kerahasiaan data harus dilindungi dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja. Beberapa aset penting dalam jaringan adalah perangkat jaringan seperti *switch*, *router*, *firewall*, dan sistem deteksi intrusi (IDS) yang memberikan layanan keamanan untuk pengguna jaringan. Oleh karena perangkat-perangkat ini menjadi target bagi peretas, maka perlu diperkuat agar tidak mudah diintervensi terhadap intrusi.

2. Menganalisis Risiko Keamanan (*Analyzing Security Risk*)

Menganalisa ancaman potensial dan mendapatkan pemahaman tentang kemungkinan dampak bisnis mereka. Penyusunan kebijakan keamanan dan desain jaringan yang aman memerlukan proses analisis risiko dan konsekuensinya yang berkelanjutan karena risiko dapat berubah dalam tingkat keparahan dan probabilitasnya.

3. Membangun Kebutuhan Keamanan (*Developing Security Requirements*)

Masalah keamanan seharusnya tidak mengganggu kemampuan organisasi untuk melakukan bisnis. Persyaratan keamanan paling mendasar yang dimiliki setiap organisasi. Keamanan sekunder persyaratannya adalah untuk melindungi aset agar tidak lumpuh, dicuri, diubah, atau dirugikan.

4. Menetapkan kebijakan keamanan (*Developing a Security Policy*)

Kebijakan keamanan memberitahu pengguna dan pimpinan tentang kewajiban mereka untuk melindungi aset teknologi dan informasi. Secara umum, suatu kebijakan setidaknya harus mencakup item-item berikut:

- a. Kebijakan akses yang menetapkan hak dan hak akses. Kebijakan akses harus memberikan pedoman untuk menghubungkan jaringan eksternal, menghubungkan perangkat ke jaringan, dan menambahkan perangkat lunak baru ke sistem. Kebijakan akses mungkin juga membahas caranya data dikategorikan (misalnya, rahasia, internal, dan sangat rahasia).
- b. Kebijakan akuntabilitas yang mendefinisikan tanggung jawab pengguna, staf operasi, dan manajemen. Kebijakan akuntabilitas harus menetapkan kemampuan audit dan memberikan pedoman penanganan insiden yang menentukan apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika kemungkinan intrusi terdeteksi.
- c. Kebijakan otentikasi yang membangun kepercayaan melalui kebijakan kata sandi yang efektif dan mengatur pedoman untuk otentikasi lokasi jauh.
- d. Kebijakan privasi yang menetapkan ekspektasi privasi yang wajar mengenai pemantauan surat elektronik, pencatatan penekanan tombol, dan akses ke file pengguna.
- e. Pedoman pembelian teknologi komputer yang menentukan persyaratan untuk memperoleh, mengkonfigurasi, dan mengaudit sistem dan jaringan komputer untuk kepatuhan dengan kebijakan tersebut.

5. Mengembangkan prosedur untuk menerapkan kebijakan keamanan (*Develop procedures for applying security policies*)

Prosedur keamanan merupakan penerapan dari kebijakan keamanan. Prosedur tersebut meliputi konfigurasi, login, proses audit, dan pemeliharaan. Prosedur keamanan harus ditulis untuk pengguna, administrator jaringan, dan administrator keamanan. Prosedur keamanan juga memuat penanganan insiden yaitu, apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika intrusi terdeteksi.

6. Menguji keamanan secara periodik

Pengujian keamanan jaringan dilakukan secara periodik misal satu tahun sekali untuk memastikan konfigurasi dan perangkat lunak perangkat keamanan jaringan sudah optimal, dan jika ditemukan adanya celah keamanan dapat segera dilakukan perbaikan.

7. Memelihara keamanan (*Maintain security*)

Keamanan harus dijaga dengan menjadwalkan audit independen berkala, membaca audit log, menanggapi insiden, membaca literatur saat ini dan peringatan agen, melakukan pengujian keamanan, pelatihan administrator keamanan, dan memperbarui rencana dan kebijakan keamanan.

Keamanan jaringan harus menjadi proses abadi. Risiko berubah seiring waktu, dan sebagainya harus keamanan. Penerapan, pemantauan, pengujian, dan peningkatan keamanan adalah proses yang tidak pernah berakhir.

F. Kondisi *Eksisting* Jaringan Intra Pemerintah

Kondisi *eksisting* Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Sragen dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zona yakni :

1. Zona internet

Terdiri dari 1 (satu) koneksi ke penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider - ISP*) dengan kapasitas yakni *bandwidth* sebesar 1300 Mbps.

Layanan internet yang digunakan yakni IP Transit karena Diskominfo Sragen telah memiliki *Autonomous System (AS) Number* yakni AS139441 atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sragen. Dengan memiliki AS Number sendiri maka Diskominfo memperoleh IP Publik yang dapat digunakan sebanyak 256 dengan alamat 103.145.27.0/24.

2. Zona Jaringan Area Kabupaten (MAN)

Jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan untuk menghubungkan lokasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke Pusat Data atau Pusat Operasi Jaringan (Network Operation Center - NOC). Kondisi saat ini sebagian besar lokasi OPD, kecamatan, dan UPT sudah terhubung ke Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Sragen yang dikelola oleh Diskominfo dengan menggunakan media koneksi kabel *fiber optic* (FO). Tersisa satu lokasi yang 1 (satu) lokasi OPD yang belum terhubung ke JIP. Infrastruktur fisik jaringan MAN yakni kabel FO dikelola sendiri oleh Diskominfo.

3. Zona DeMilitarized Zone (DMZ)

Zona DMZ untuk penempatan server - server aplikasi. *Switch server* langsung terhubung dengan *Router Firewall*. Akses dari internal maupun eksternal akan disaring (filter) oleh *Router Firewall*.

G. Usulan Infrastruktur Jaringan

Data

Infrastruktur jaringan data yang ada saat ini kurang adaptif terhadap semakin besarnya lalu lintas data, proses, dan pengguna serta keamanan jaringan. Oleh karena itu, arsitektur infrastruktur jaringan perlu didesain dengan menggunakan pendekatan zonasi. Zonasi infrastruktur jaringan akan memudahkan dalam pengembangan skalabilitas (*scalable*) sesuai dengan fungsi atau layanan dari zona tersebut. Zonasi yang diusulkan terdiri dari:

- a. Zona Jaringan Inti (*Core Network*)

Merupakan zona interkoneksi antar zona. Perangkat pendukung zona jaringan inti adalah *Switch Layer 3* dengan kapasitas besar untuk menangani lalu lintas data antar zona. Perangkat *switch Core* ini sebaiknya tidak digunakan untuk fungsi lainnya seperti *DHPC pusat data*, dan lainnya.

- b. Zona Jaringan Antar Gedung (*Campuss Network*)

Jaringan lokal yang ada di setiap gedung-gedung di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Sragen yang berdekatan dengan kantor Diskominfo dapat dikelola dalam satu jaringan lokal yakni jaringan antar gedung (*Campuss Network*).

- c. Zona pusat data (*pusat data Farm*)

pusat data database, file pusat data, storage yang tidak langsung diakses oleh pengguna ditempatkan di zona *pusat data Farm*.

d. Zona Internet (*Internet Edge*)

Zona internet adalah zona yang melayani akses internet pengguna atau akses ke aplikasi *web* internet Pemerintah Kabupaten Sragen.

Selain itu, terdapat *De-Militerized Zone (DMZ)* untuk lokasi pusat data – pusat data yang diakses oleh publik melalui internet seperti *web pusat data, mail pusat data, dan cloud file pusat data*. Interkoneksi dari *web* pusat data ke *database pusat data* atau *file storage* harus difilter terlebih dahulu oleh *firewall*.

e. Zona Jaringan Antar perangkat daerah (MAN)

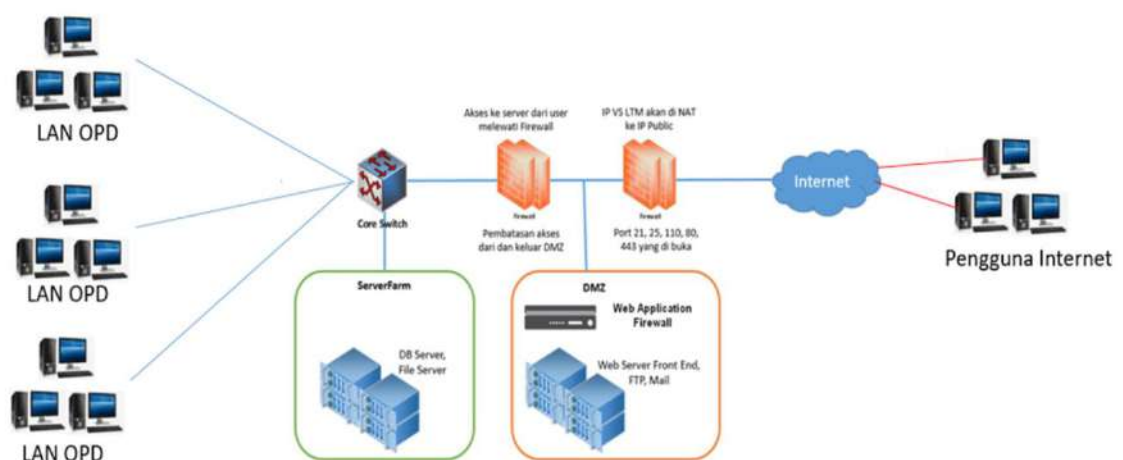
Interkoneksi antara pusat data dengan Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis ada di zona *Metropolitan Area Network (MAN)* dengan koneksi menggunakan kabel jaringan *fiber optic* atau radio link. Setiap perangkat daerah atau UPT memiliki jaringan lokal komputer (*LAN*) sendiri. Sehingga akses ke *pusat data* atau internet dari Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis menggunakan protokol *routing* seperti *static route*.

f. Zona Jaringan Antar Kementerian/Lembaga (WAN)

Interkoneksi antara pusat data dengan kementerian atau lembaga lainnya berada di zona *Wide Area Network (WAN)*. Interkoneksi ini menggunakan jaringan *Metro-E* atau *VPN-IP* dari penyedia layanan *WAN (provider)*. Pembatasan akses ke pusat data – pusat data di Pusat Data seperti alamat *IP, port, dan lainnya* akan dikonfigurasi di *router WAN*.

Server Farm dan DMZ

Topologi *Server Farm* dengan DMZ dapat digambarkan secara sederhana seperti di bawah ini :



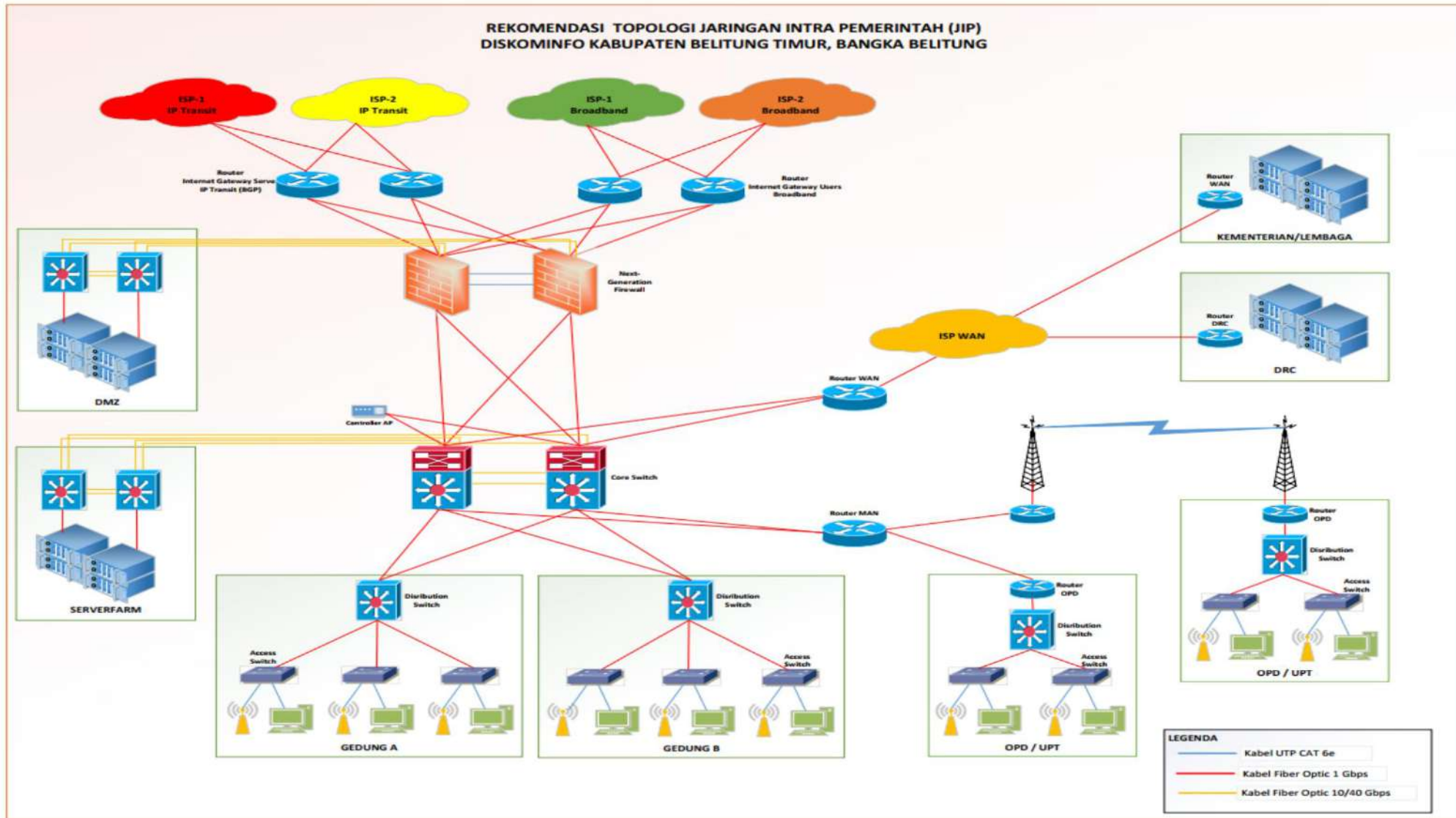
Gambar 2.2.2.3.3 Pemisahan Logik *Server Farm* dengan *DMZ*

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa antara pusat data *Farm* dan *DMZ* dipisahkan oleh perangkat *firewall* dan *Core Switch*. Pengguna – pengguna di perangkat daerah atau UPT akan dibatasi akses ke *server farm* melalui konfigurasi di *router MAN*. Akses aplikasi *web* dari pengguna di perangkat daerah/UPT menggunakan

jaringan lokal (intranet). Akses aplikasi *web* melalui internet akan melewati *firewall* yang telah dikonfigurasi hanya *port* tertentu misal *port* 80 (*http*) atau *port* 443 (*https*) yang dibuka (*open*). *Firewall* secara logik akan dikonfigurasi untuk menyaring akses dari paket data dari *pusat data Farm* ke *DMZ* dan sebaliknya. Di dalam *DMZ* juga terdapat perangkat *Web Application Firewall* untuk perlindungan aplikasi *web* dari serangan seperti *SQL Injection*, *Site Cross Scripting (XSS)*, dan lain-lain. Berikut ini adalah gambar

usulan arsitektur jaringan data Diskominfo Pemerintah Kabupaten Sragen berbasis Zonasi.

Berikut ini adalah usulan topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Sragen.



Gambar 2.2.2.3.4. Usulan Topologi Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan gambar topologi di atas sebagai berikut :

1. koneksi internet dibagi menjadi 2 (dua) layanan yakni :
 - a. IP Transit yang digunakan untuk akses internet pusat data.
 - b. *Broadband* yang digunakan untuk akses internet komputer pengguna, perangkat bergerak (laptop), maupun telepon cerdas (*smartphone*).
2. koneksi internet *IP Transit* maupun *Broadband* menggunakan 2 (dua) penyedia layanan internet (ISP).
3. semua perangkat inti dan kritis sudah *redundant* seperti :
 - a. *router internet IP Transit* maupun *router internet Broadband*;
 - b. *Next-Generation Firewall (NG-Firewall)*;
 - c. *Core Switch*; dan
 - d. *Switch* pusat data.
4. *DMZ* digunakan untuk penempatan pusat data - pusat data yang diakses oleh publik/masyarakat melalui internet seperti *web* pusat data aplikasi, email pusat data, dan *cloud storage*. *Switch* pusat data *DMZ* langsung terkoneksi ke *NG-Firewall*.
5. *Pusat data Fam* digunakan untuk penempatan pusat data - pusat data yang hanya dapat diakses dari dalam jaringan Diskominfo antara lain pusat data Database, File pusat data, DNS pusat data, NTP pusat data, DHCP, dan lain - lain. *Switch pusat data Farm* langsung terkoneksi ke *Switch Core*.
6. Jaringan Lokal (LAN) Gedung A, dan B merupakan koneksi komputer, printer, dan lainnya yang berada satu gedung (Diskominfo) dengan perangkat jaringan utama. Jaringan LAN terdiri dari jaringan kabel (*wired*) dan non-kabel (*wireless*). Pengaturan perangkat *Access Point* pada jaringan *wireless* menggunakan *Wireless Controller* yang terkoneksi dengan *Switch Core*.
7. Jaringan Dalam Kota (*MAN*) merupakan koneksi antar *LAN* di setiap kantor perangkat daerah yang tersebar di beberapa lokasi. Interkoneksi menggunakan media *fiber optic* atau *radio link (wireless)*.
8. Jaringan Skala Luas (*WAN*) merupakan koneksi antara jaringan Diskominfo dengan Kementerian/Lembaga lain. Interkoneksi menggunakan layanan *VPN-IP* atau *Metro-E*.

2.2.2.4. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Seiring dengan adanya perkembangan proses bisnis serta kebutuhan pengguna informasi seperti pertukaran data/informasi antar organisasi di lingkungan pemerintahan, dan teknologi aplikasi yang heterogen maka diperlukan suatu sistem yang memudahkan dalam proses pertukaran data antar organisasi. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik paragraf 7 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pasal 33:

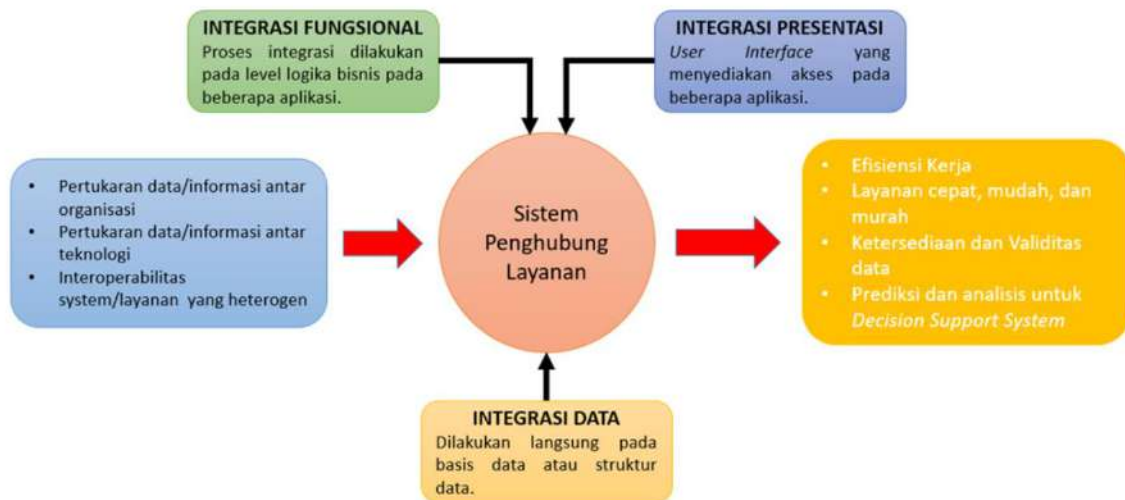
1. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

2. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah sistem yang digunakan untuk menghubungkan berbagai layanan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui satu *platform* atau portal tunggal. Ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah menemukan dan mengakses berbagai layanan pemerintah yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi berbagai situs *web* atau kantor pemerintah yang berbeda. Sistem ini biasanya mencakup *fitur* seperti pengajuan permohonan *online*, informasi status permohonan, dan pembayaran *online* untuk layanan yang ditawarkan.

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dengan tujuan antara lain:

- a. efisiensi kerja;
- b. mewujudkan layanan yang cepat, mudah, dan murah;
- c. meningkatkan tingkat ketersediaan, dan validitas data; dan
- d. dapat melakukan prediksi dan analisis untuk sistem pengambil keputusan (*Decision Support System*).



Gambar 2.2.2.4.1. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Secara umum, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri dari: Integrasi Data (Proses integrasi dilakukan langsung pada basis data atau struktur data dari aplikasi), Integrasi Presentasi (Proses integrasi dengan membuat antarmuka pengguna yang menyediakan akses pada beberapa aplikasi) dan Integrasi Fungsional (Proses integrasi dilakukan pada level logika bisnis pada beberapa aplikasi). Adapun secara detail Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dijabarkan sebagai berikut :

A. Integrasi

Data Integrasi data fokus pada perpindahan data antara aplikasi dengan tujuan membagi data yang sama ke beberapa aplikasi yang berbeda. Dari sudut pandang teknis, integrasi level data ini secara relatif lebih sederhana yang sudah sangat dikenal

oleh kebanyakan pengembang. Mengakses basis data lebih mudah dan ada beberapa *tools* yang memudahkan *sharing* data dan mempercepat. Selain itu, integrasi level data tidak memerlukan perubahan aplikasi. Integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua atau lebih set data agar mempermudah dalam berbagi data rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (*data warehouse*). Integrasi data diperlukan karena adanya berbagai kebutuhan, seperti :

- a. Data yang sama (misalnya: data penduduk) dapat dipakai bersama antar bagian organisasi (antar instansi); dan
- b. Data suatu instansi dapat dipakai bersama oleh instansi-instansi lain yang memerlukan (tidak perlu ada duplikasi data dalam suatu lingkungan organisasi).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses integrasi data antara lain :

- a. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena kesalahan pada integrasi data dapat menghasilkan *output*/keluaran yang tidak sesuai dan berdampak pada pengambilan keputusan.
- b. Syarat integrasi harus dipenuhi dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: konsisten dalam penamaan variabel, konsisten dalam ukuran variabel, konsisten dalam struktur pengkodean dan konsisten dalam atribut fisik dari data. Adapun masalah-masalah yang mungkin ada pada integrasi data yaitu adanya heterogenitas data, otonomi sumber data, kebenaran dan kinerja *query*/permintaan.

Penerapan interoperabilitas data diperlukan kaidah sebagai berikut :

1. Konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
2. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Fokus Pengembangan

SPL SPL dapat dikembangkan dengan berdasarkan pemangku kepentingan yang terlibat seperti pemerintah, swasta baik lokal maupun internasional :

1. G2G: Interaksi sistem antar lembaga atau badan pemerintahan;
2. G2B: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dan bisnis/industri;
3. G2C: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dengan masyarakat;
4. G2Org: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dengan organisasi non pemerintah; dan
5. G2OG: Interaksi sistem badan pemerintahan antar negara.

Application Programming Interface

(API) Aplikasi Perantara Akses Data Elektronik yang berbasis Layanan *Web* umumnya dinamakan Antarmuka Program Aplikasi (*Application Programming Interface/API*) atau disingkat *Web-API*. *API* adalah sekumpulan kode pemrograman yang membantu

pengembang (*developer*) aplikasi melakukan integrasi data antara dua aplikasi berbeda secara bersamaan. *API* memungkinkan *developer* untuk membuat aplikasi dengan berbagai elemen seperti *function*, *protocols* dan *tools* lain. *API* bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman.

Keuntungan memprogram dengan menggunakan *API* adalah:

1. Portabilitas

Programmer yang menggunakan *API* dapat menjalankan programnya dalam sistem operasi mana saja asalkan sudah terinstall *API* tersebut. Sedangkan *system call* berbeda antar sistem operasi, dengan catatan dalam implementasinya mungkin saja berbeda.

2. Lebih mudah dimengerti.

API menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti daripada bahasa *system call*. Hal ini sangat penting dalam hal editing dan pengembangan.

3. Daur ulang (*Reusable*)

Web-API bersifat *reusable* (dapat didaur ulang) tanpa merubah akses layanan yakni alamat dan atribut *end point*.

Web-API digunakan sebagai akses terhadap suatu fungsi/prosedur pengolahan data dalam program aplikasi yang dikomunikasikan dari aplikasi lain yang berbeda *platform* dan lokasi bahkan dengan jarak yang berjauhan melalui jaringan internet umumnya dinamakan *Remote Procedure Call* (*RPC*) atau dengan kata lain *Web-API* dapat mengakses sumberdaya layanan, program, informasi atau data dari tempat yang berbeda.

Web-API berfungsi menterjemahkan bentuk, struktur, dan semantik suatu sumber data ke dalam format data standar yang dapat dibaca oleh semua Aplikasi berupa format data *XML*, *JSON*, *PHP-ARRAY*, *PHP-SERIALIZE*.

Komunikasi data melalui *Web-API* dapat dilakukan melalui beberapa model interkoneksi, diantaranya:

a. *SOAP* (*Simple Object Access Protocol*)



Gambar 2.2.2.4.2 Arsitektur SOAP

Komunikasi data model *SOAP* dilakukan antara Aplikasi *Client/Request* (*SOAP-Client*) dengan *Web-API/Provider* (*SOAP-pusat data*) melalui alamat *Web-API* dengan protokol *HTTPs* (*Hypertext Transfer Protocol/Secure*). Informasi Metadata yang disediakan *SOAP-pusat data* dapat disajikan melalui aplikasi *Web-Browser* dalam bentuk dokumen format *XML* dengan nama *Web Services*

Description Language (WSDL), sementara data permintaan (*SOAP-Request*) dan tanggapan (*SOAP-Response*) dilewatkan diantara *SOAP-Client* dan *SOAP-pusat data* dalam format dokumen *XML SOAP-Envelope* yang dibentuk oleh fungsi *SOAP-pusat data* pada *Web-API*.

b. *REST (Representational State Transfer)*



Gambar 2.2.2.4.3. Arsitektur *REST*

Komunikasi model *REST* dilakukan antara Aplikasi *Client/Requester* dengan *Web-API/Provider* melalui Alamat *Web-API* dengan protokol *HTTPs (Hypertext Transfer Protocol/Secure)*. Informasi Metadata yang disediakan *Web-API* dapat disajikan melalui aplikasi *Web-Browser* dalam bentuk dokumen format *XML/HTML/JSON/CSV* dengan nama *Web Application Description Language (WADL)*, sementara data permintaan (*Adapter-Request*) dan tanggapan (*API-Response*) dilewatkan di antara Aplikasi dan *Web-API* dalam format dokumen standar *XML, JSON, RSS* yang dibentuk oleh *Web-API*.

B. Integrasi Presentasi

Integrasi interaksi pengguna dapat dicapai melalui pembuatan pengguna dengan sistem data yang berbeda. Misalnya menggunakan pintu untuk berinteraksi dengan data dan sistem intelegensi bisnis yang berbeda. Dengan demikian aplikasi dapat terintegrasi sehingga pengguna dapat melakukan operasi dengan *Single Sign On (SSO)*.

Sistem *SSO* merupakan salah satu teknologi yang dapat mengizinkan para penggunanya untuk dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Sistem *SSO* merupakan salah satu solusi untuk *identity management* dan *access control* yang ada di dalamnya. Penerapan sistem *SSO* memberikan kemudahan kepada pengguna dengan cukup melakukan otentikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan yang terdapat di dalam suatu jaringan atau aplikasi.

C. Integrasi Fungsional (Proses Bisnis)

Integrasi proses bisnis dilakukan dengan cara mengkoordinasikan setiap aktivitas melalui proses bisnis, seperti penjualan dan penagihan. Adapun tahapan dalam integrasi proses bisnis yaitu perencanaan dalam menentukan arah perusahaan, menerjemahkan strategi yang dibentuk dalam proses bisnis perusahaan, dan menerapkan serta memastikan bahwa proses bisnis yang direncanakan dijalankan

sesuai dengan strategi perusahaan. Latar belakang diperlukannya integrasi proses bisnis antara lain:

- a. Efisiensi
Beberapa proses bisnis digabungkan menjadi satu proses yang terintegrasi.
- b. Persaingan bisnis
Persaingan instansi lain dengan konsep proses bisnis yang terintegrasi, sehingga integrasi harus dilakukan untuk bersaing
- c. Perkembangan Teknologi Informasi
Semakin berkembangnya teknologi informasi sehingga integrasi proses bisnis semakin lebih mudah dilakukan.

D. Kondisi Eksisting Sistem Penghubung

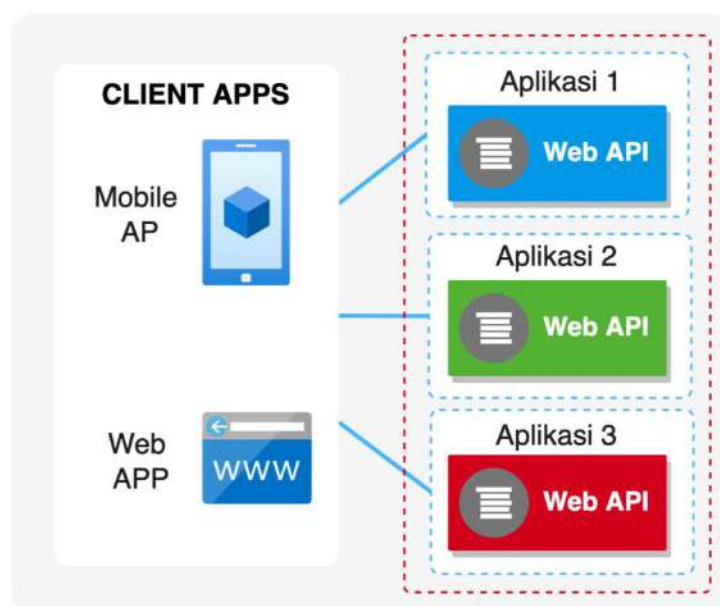
Layanan Kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Sragen sudah mengimplementasikan teknologi *Application Programming Interface* (API) sebagai antarmuka yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya untuk berbagi data. Koneksi API masih *point-to-point* antar aplikasi, dan belum dikelola dalam satu manajemen (API Gateway).

E. Usulan Pengembangan Sistem Penghubung

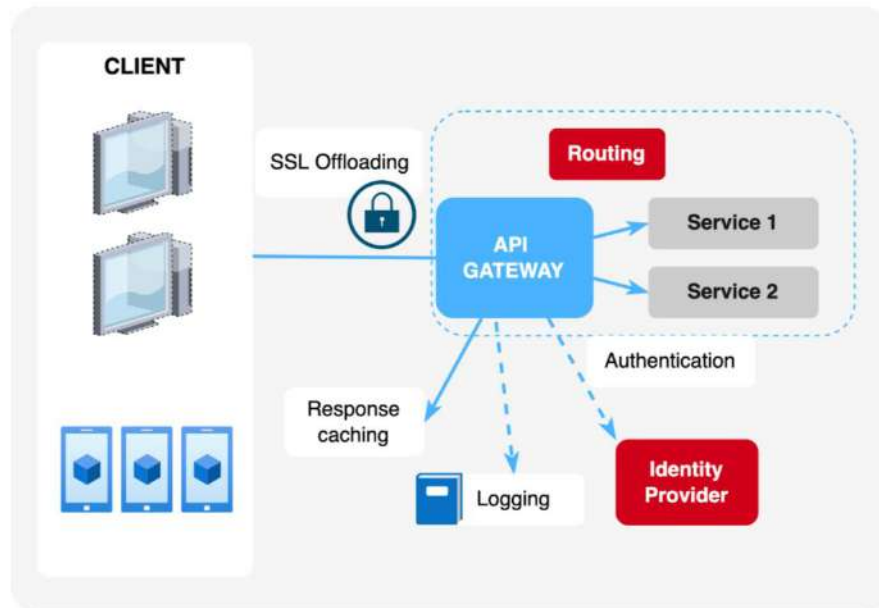
Layanan Terdapat beberapa cara suatu aplikasi mengakses *service* pada aplikasi lainnya. Salah satunya dengan pengaksesan langsung atau *direct access* pada *service* yang dimiliki oleh suatu aplikasi.

Akses langsung pada Web API

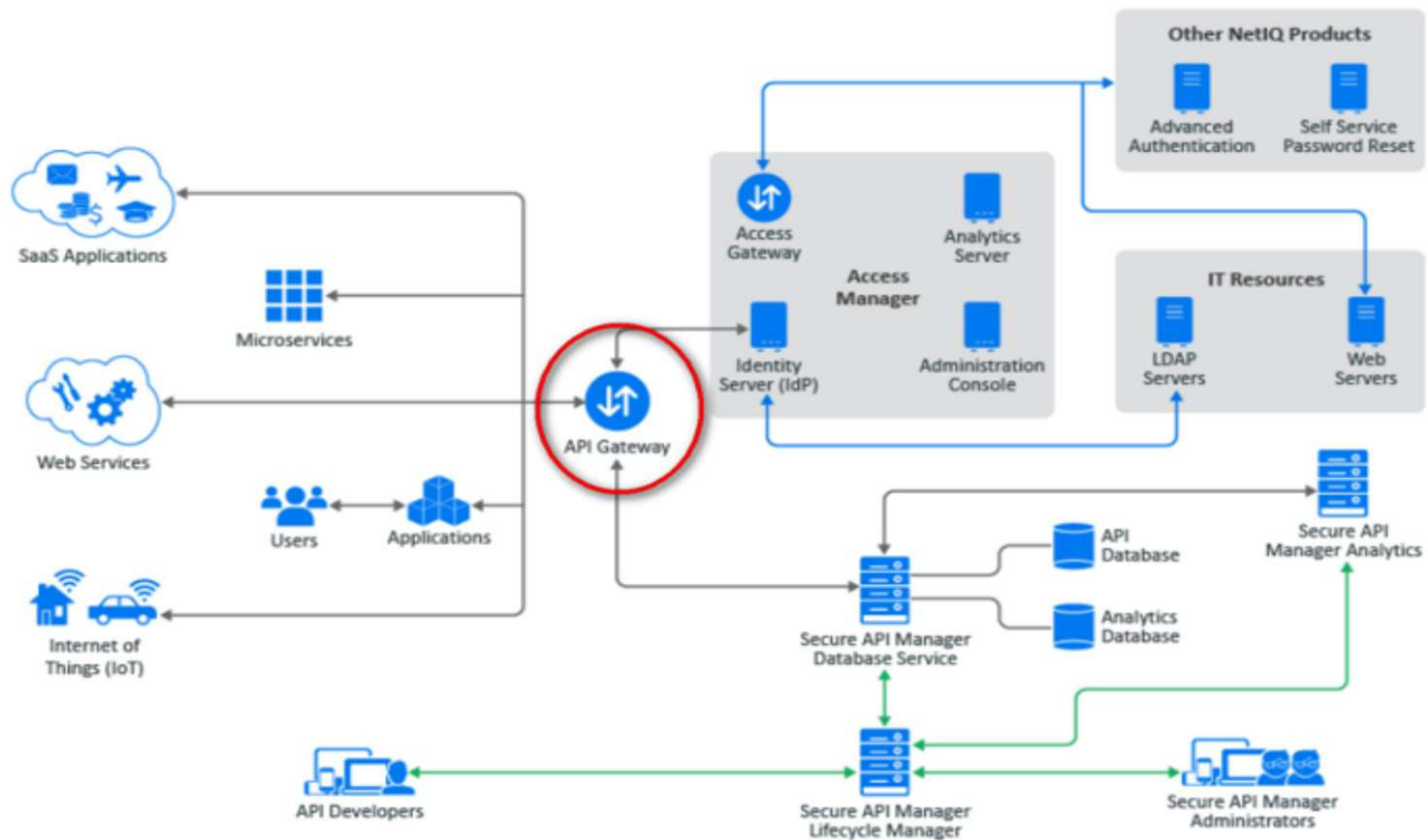
Aplikasi Cara pertama yang sering banyak digunakan, walaupun bukan pendekatan yang terbaik adalah dengan cara mengakses langsung pada setiap *service*. Biasanya setiap *service* memiliki suatu *IP public* yang dapat diakses dari jaringan internet. Terkadang juga dengan satu *IP public* tetapi dibedakan *port* untuk melayani setiap *service*-nya.



Gambar 2.2.2.4.4 Akses Langsung Antar API



Gambar 2.2.2.4.5. Fungsi API Gateway



Gambar 2.2.2.4.6. Arsitektur API Gateway

Berdasarkan diagram di atas maka semua *request* yang datang dari berbagai *platform* akan di *handle* atau melalui *API Gateway*.

Fitur Utama dari API Gateway

Berikut adalah *fitur* utama yang harus ada pada sebuah *API Gateway*.

- *Authentication dan authorization;*
- *Service discovery integration;*
- *Response caching;*
- *Retry policies, circuit breaker, dan QoS;*
- *Rate limiting dan throttling;*
- *Load balancing;*
- *Logging, tracing, dan correlation;*
- *Headers, query strings, dan claims transformation;*
- *IP whitelisting;*
- *Aggregator Request; dan*
- *Reverse proxy.*

API Management

API management adalah proses merancang, menerbitkan, mendokumentasikan, dan menganalisis *API (Application Programming Interface)* dalam lingkungan yang aman. Kebutuhan *API management* mungkin berbeda pada setiap pemangku kepentingan, namun fungsi dasarnya adalah untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses *monitoring*. Dengan memanfaatkan *API management*, perusahaan dapat menjamin bahwa *public* atau internal *API* yang mereka buat aman untuk digunakan.

Fitur Utama API Management

Solusi *API management* biasanya menawarkan beberapa *fitur* utama yang bisa digunakan oleh *user*, diantaranya adalah:

- *API design*
API design memberi *user* dari *developer* hingga *partner* kemampuan untuk merancang, menerbitkan, menerapkan *API* serta merekam dokumentasi, kebijakan keamanan, batas penggunaan, dan informasi relevan lainnya.
- *API gateway*
Solusi *API management* pada umumnya juga berfungsi sebagai *API gateway*, yang bertindak sebagai *gatekeeper* untuk semua *API* dengan menegakkan kebijakan dan permintaan keamanan *API* yang relevan, serta menjamin keamanan.
- *API store*
API Store memungkinkan *user* untuk menyimpan *API* di lokasi dimana mereka dapat memperlihatkannya kepada pihak internal atau eksternal. *API store* ini berfungsi sebagai tempat untuk *API*, dimana *user* dapat berlangganan *API*, mendapatkan dukungan dari *user* lain dan masih banyak lagi.

- *API analytics*

Fungsi *API analytics* memungkinkan *user* untuk memonitor penggunaan *API*, *load*, *transaction logs*, data historis, dan metrik lain yang menginformasikan status serta keberhasilan *API* yang tersedia.

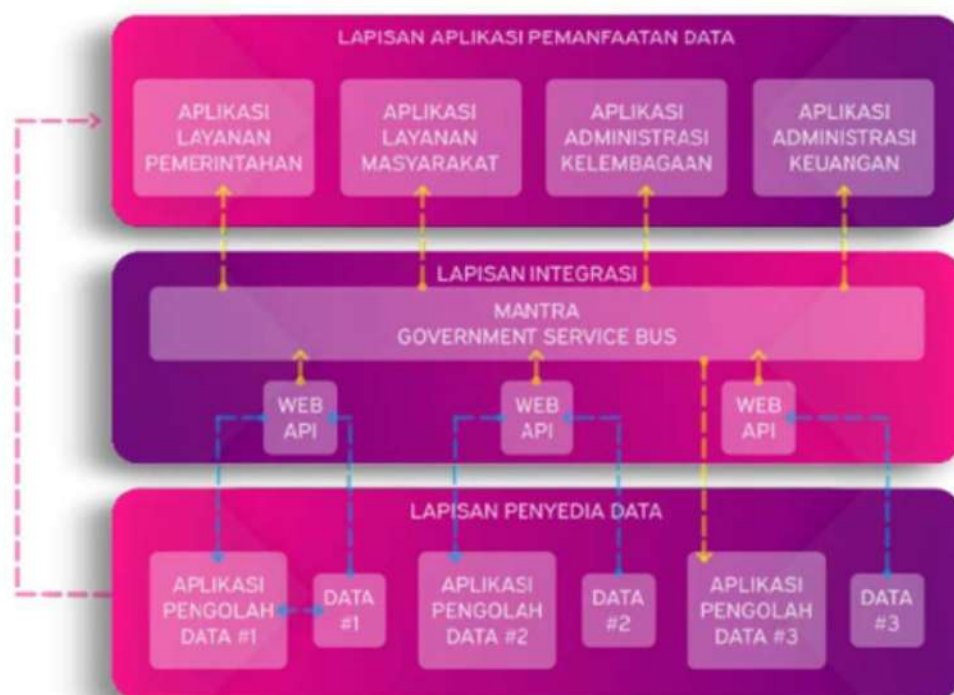
Platform API Management

Saat ini telah tersedia *platform API Gateway* yang sudah siap digunakan :

1. Zuul (<https://github.com/Netflix/zuul>);
2. Kong (<https://konghq.com/kong/>);
3. Krakend (<https://www.krakend.io/>);
4. Tyk (<https://tyk.io/>);
5. Spring Cloud Gateway (<https://spring.io/projects/spring-cloud-gateway>); dan
6. MANTRA-WSO2(Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data)-Kominfo.

Sejak 2011, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan aplikasi MANTRA yang berfungsi sebagai manajemen dan kanal pertukaran data antar instansi pemerintah, atau dikenal dengan *Government Service Bus (GSB)*. MANTRA menerapkan prinsip arsitektur berbasis sumber daya (*Resource Oriented Architecture/ROA*) yang memanfaatkan teknologi Web-API (*Web Application Programming Interface*) untuk memfasilitasi pertukaran data.

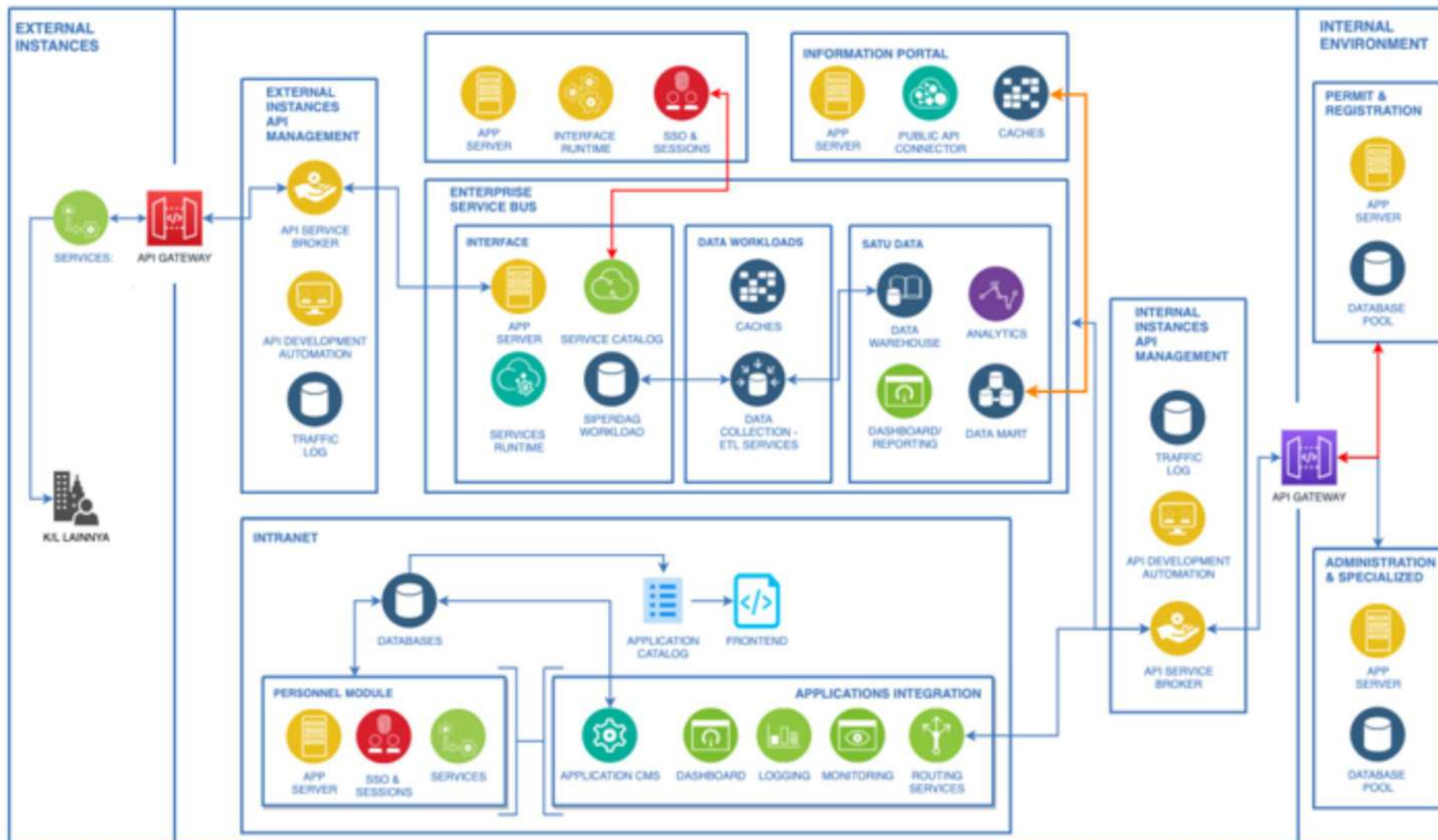
Aplikasi MANTRA dikembangkan dengan menerapkan teknologi dan pemrograman berbasis standar terbuka (*open standard*), antara lain PHP, SOAP (*Simple Object Access Protocol*), REST (*Representational State Transfer*), HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), dan menggunakan format data XML (*Extensible Markup Language*) dan JSON (*JavaScript Object Notation*).



Gambar 2.2.2.4.7. Arsitektur API Gateway MANTRA

Usulan Sistem Penghubung Layanan

Untuk menjaga keamanan pertukaran data, dan tingkat ketersediaan *API Manager* maka pengembangan *API Gateway* dapat menyesuaikan dengan proses bisnis dan kebutuhan serta keamanan. *API Gateway* internal dapat digunakan untuk pertukaran data yang terjadi di lingkungan internal pusat data (intranet). Sedangkan *API Gateway* eksternal digunakan untuk pertukaran data dengan pihak lain seperti Kementerian/Instansi Pemerintah Daerah lain melalui melalui jalur internet.



Gambar 2.2.2.4.8. Arsitektur API Gateway Internal dan Eksternal

Gambar di atas, memperlihatkan bahwa terdapat dua API *Gateway* yakni API *Gateway* Eksternal (kotak warna merah sebelah kiri) untuk melayani akses ke Kementerian/Lembaga dan API *Gateway* Internal untuk melayani akses *service* internal/intranet.

2.2.3. Keamanan Informasi

SPBE

2.2.3.1. Kondisi Eksisting Keamanan

SPBE

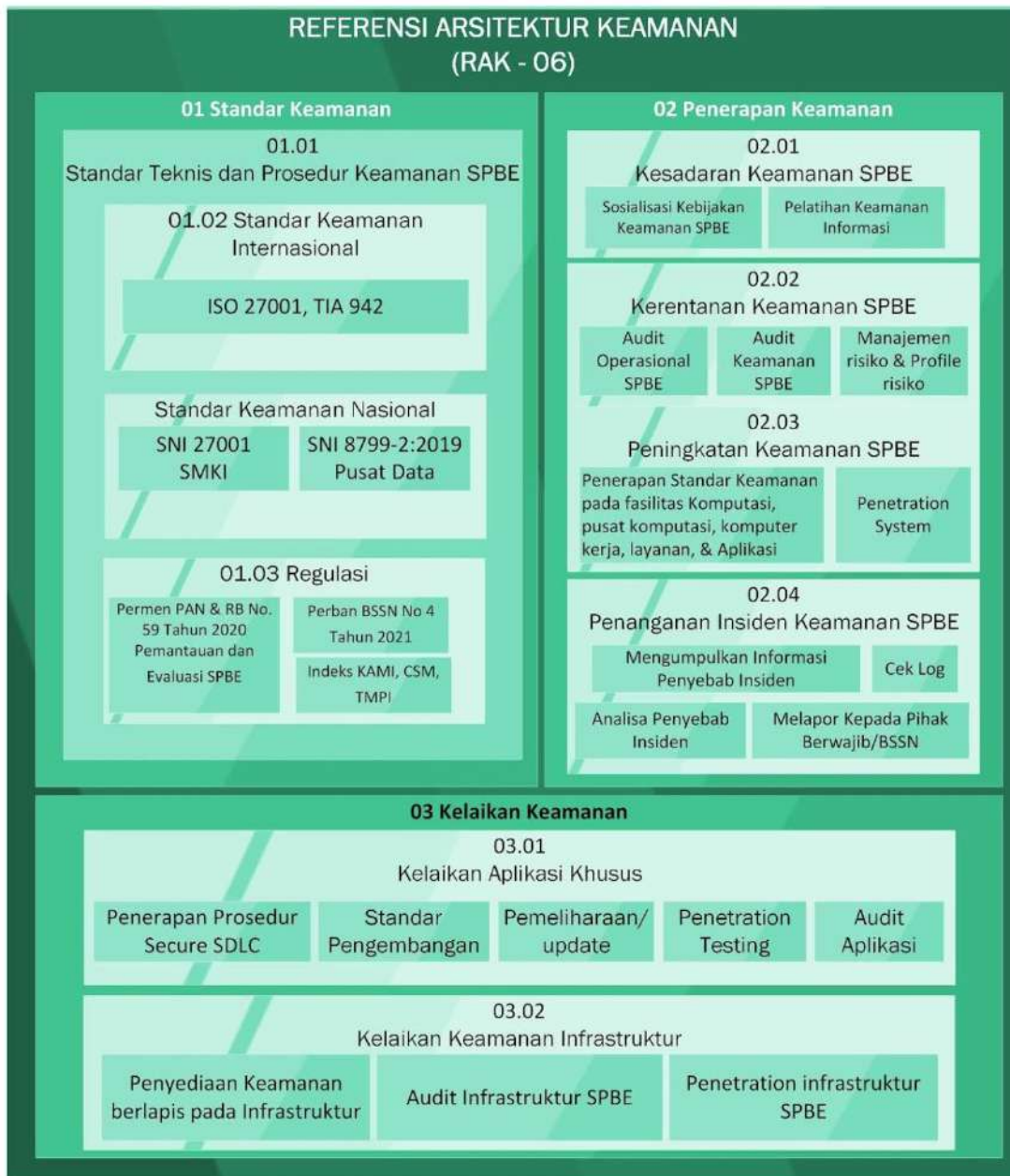
Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Sragen belum memiliki kebijakan, standar, maupun prosedur keamanan informasi. Selain itu kegiatan seperti sosialisasi, peningkatan keamanan, dan penilaian mandiri keamanan informasi belum dapat dilaksanakan.

2.2.3.2. Arsitektur Keamanan

SPBE

Arsitektur keamanan merupakan aspek vital dalam usaha organisasi untuk melindungi aset-aset penting yang dimiliki. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen dan tata letak kontrol-kontrol keamanan yang diterapkan pada infrastruktur TI organisasi. Arsitektur keamanan bisa berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, bergantung pada subsistem, produk dan aplikasi-aplikasi yang dikelola/digunakannya. Perbedaan kondisi tersebut pada gilirannya akan menyebabkan perbedaan pendekatan dalam menerapkan pertahanan mendalam (*defense in depth*).

Arsitektur keamanan mengilustrasikan bagaimana sebuah organisasi menerapkan pertahanan mendalam, serta bagaimana lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-kontrol keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks. Setiap komponen pada arsitektur keamanan juga mengandung risiko keamanan. Mengingat kondisi yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, maka analisis dan desain arsitekturnya harus mempertimbangkan variabel dan risiko spesifik yang mungkin terjadi pada masing-masing organisasi.



Gambar 2.2.3.1.1. Arsitektur Keamanan SPBE

2.2.3.3. Manajemen Keamanan Informasi SPBE

Adapun dasar hukum dari manajemen keamanan informasi SPBE yakni:

- a. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Permenpan-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- d. Peraturan BSSN Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan SPBE dan Standar Teknis & Prosedur Keamanan SPBE.

Perpres 95 menyebutkan bahwa Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan

informasi. Selanjutnya, dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 3 disebutkan bahwa pedoman manajemen keamanan informasi merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE.

A. Pilar Manajemen dan Standar Teknis

Keamanan SPBE

Standar teknis dan prosedur keamanan digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa persyaratan keamanan minimal terpenuhi. Standar tersebut mencakup standar nasional dan internasional, serta peraturan regulasi yang berkaitan dengan keamanan SPBE. Penyusunan pedoman manajemen dan keamanan informasi berbasis risiko yang artinya melibatkan proses asesmen, identifikasi, dan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi di SPBE yang dapat digambarkan sebagai pilar seperti di bawah ini.



Gambar 2.2.3.2.1. Pilar Manajemen dan Standar Teknis Keamanan SPBE

Proses penyusunan manajemen keamanan SPBE dapat mengacu pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.2.3.2.2. Proses Manajemen Keamanan Informasi SPBE

B.SNI ISO 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi

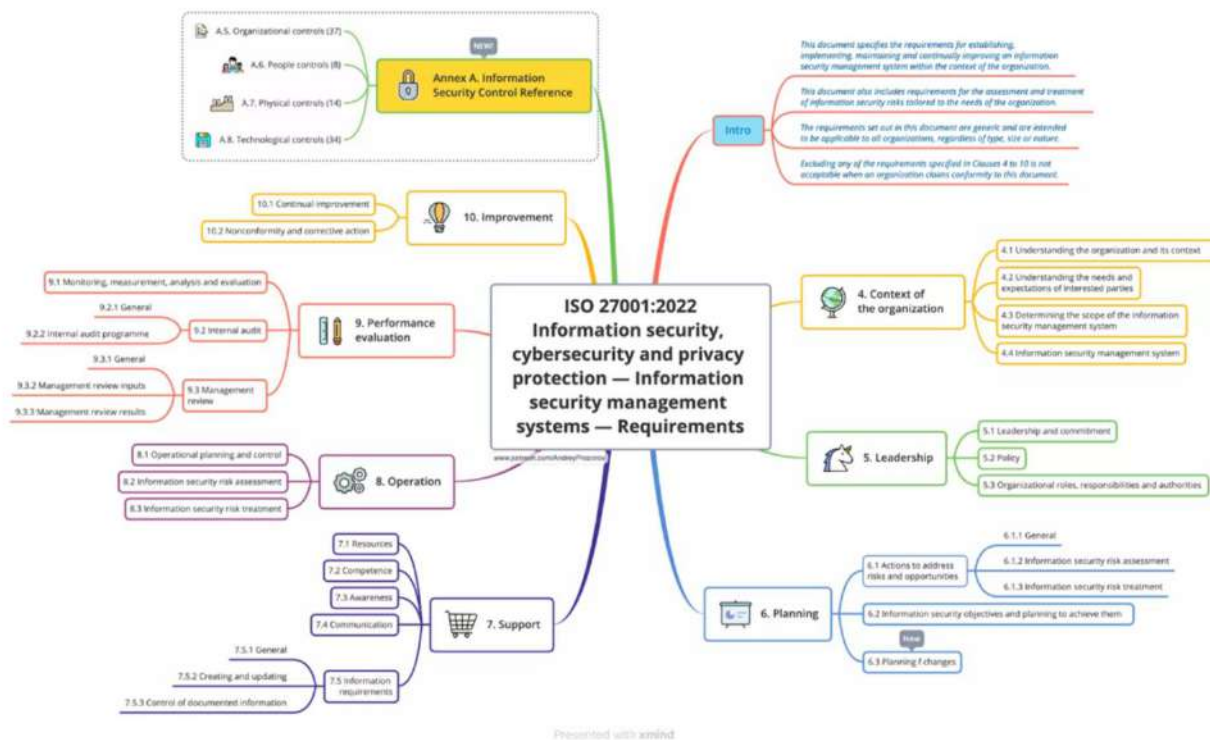
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah cara untuk melindungi dan mengelola informasi berdasarkan pendekatan risiko bisnis yang sistematis untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi. Proses dalam SMKI disusun berdasarkan risiko pendekatan bisnis untuk merencanakan (*Plan*), mengimplementasikan dan mengoperasikan (*Do*), memonitor dan meninjau ulang (*Check*) serta memelihara dan meningkatkan atau mengembangkan (*Act*).

Tabel 2.2.3.2.1. Peta PDCA dalam Proses SMKI

Plan (Penetapan SMKI)	Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SMKI yang sesuai untuk pengelolaan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan.
Do (Penerapan dan Pengoperasian SMKI)	Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SMKI yang sesuai untuk pengelolaan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan.
Check (Pemantauan dan Pengukuran SMKI)	Mengakses dan apabila berlaku mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran SMKI dan pengalaman praktis dan hasilnya kepada manajemen untuk pengkajian.
Act (Peningkatan dan Pemeliharaan terkait SMKI)	Mengambil tindakan korektif dan pencegahan berdasarkan hasil internal audit SMKI dan tinjauan manajemen atau informasi lainnya, untuk mencapai perbaikan berkesinambungan dalam SMKI.

Lingkup dan tujuan sistem manajemen keamanan aplikasi dari SNI ISO 27001:2022 meliputi :

- Mendefinisikan persyaratan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meningkatkan secara berkesinambungan terhadap sistem manajemen keamanan informasi;
- Persyaratan dalam standar ini bersifat umum dimaksudkan agar dapat diterapkan oleh organisasi tanpa membatasi jenis, ukuran, serta sifat organisasi;
- Merupakan standar dengan pendekatan berbasis risiko, artinya melibatkan asesmen serta manajemen risiko terkait keamanan informasi; dan
- Merupakan standar internasional dengan sasaran melindungi informasi dalam kontak CIA (*Confidentiality, Integrity, dan Availability*).



Gambar 2.2.3.2.3 Struktur SNI ISO 27001:2022

Berbeda dengan ISO/IEC 27001:2013, judul lengkap versi 2022 ini adalah ISO/IEC 27001:2022 Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection. Bagian yang mengalami perubahan paling signifikan adalah Annex A ISO/IEC 27001 yang selaras dengan pembaruan ISO/IEC 27002:2022. Annex A dari ISO/IEC 27001:2022 berisi perubahan pada keduanya, jumlah kontrol, dan daftarnya dalam grup. Judul Lampiran juga telah berubah dari “tujuan dan kontrol-kontrol referensi” menjadi “referensi kontrol keamanan informasi”. Oleh karena itu, tujuan referensi dari setiap kelompok-kontrol yang ada di versi standar sebelumnya, sekarang telah dihapus.

Jumlah kontrol Annex A telah berkurang dari 114 menjadi 93. Penurunan jumlah kontrol sebagian besar berasal dari penggabungan banyak kontrol. 35 kontrol tetap sama, 23 kontrol diganti namanya, 57 kontrol digabungkan menjadi 24 kontrol, dan 1 kontrol telah dibagi menjadi 2 kontrol. 93 kontrol telah direstrukturisasi menjadi empat grup kontrol.

5. Organizational controls	6. People controls	8. Technological controls
5.1. Policies for information security 5.2. Information security roles and responsibilities 5.3. Segregation of duties 5.4. Management responsibilities 5.5. Contact with authorities 5.6. Contact with special interest groups 5.7. Threat intelligence 5.8. Information security in project management 5.9. Inventory of information and other associated assets 5.10. Acceptable use of information and other associated assets 5.11. Return of assets 5.12. Classification of information 5.13. Labelling of information 5.14. Information transfer 5.15. Access control 5.16. Identity management 5.17. Authentication information 5.18. Access rights 5.19. Information security in supplier relationships 5.20. Addressing information security within supplier agreements 5.21. Managing information security in the ICT supply chain 5.22. Monitoring, review and change management of supplier services 5.23. Information security for use of cloud services 5.24. Information security incident management planning and preparation 5.25. Assessment and decision on information security events 5.26. Response to information security incidents 5.27. Learning from information security incidents 5.28. Collection of evidence 5.29. Information security during disruption 5.30. ICT readiness for business continuity 5.31. Legal, statutory, regulatory and contractual requirements 5.32. Intellectual property rights 5.33. Protection of records 5.34. Privacy and protection of PII 5.35. Independent review of information security 5.36. Compliance with policies, rules and standards for information security 5.37. Documented operating procedures	6.1. Screening 6.2. Terms and conditions of employment 6.3. Information security awareness, education and training 6.4. Disciplinary process 6.5. Responsibilities after termination or change of employment 6.6. Confidentiality or non-disclosure agreements 6.7. Remote working 6.8. Information security event reporting 7. Physical controls 7.1. Physical security perimeter 7.2. Physical entry 7.3. Securing offices, rooms and facilities 7.4. Physical security monitoring 7.5. Protecting against physical and environmental threats 7.6. Working in secure areas 7.7. Clear desk and clear screen 7.8. Equipment siting and protection 7.9. Security of assets off-premises 7.10. Storage media 7.11. Supporting utilities 7.12. Cabling security 7.13. Equipment maintenance 7.14. Secure disposal or re-use of equipment	8.1. User endpoint devices 8.2. Privileged access rights 8.3. Information access restriction 8.4. Access to source code 8.5. Secure authentication 8.6. Capacity management 8.7. Protection against malware 8.8. Management of technical vulnerabilities 8.9. Configuration management 8.10. Information deletion 8.11. Data masking 8.12. Data leakage prevention 8.13. Information backup 8.14. Redundancy of information processing facilities 8.15. Logging 8.16. Monitoring activities 8.17. Clock synchronization 8.18. Use of privileged utility programs 8.19. Installation of software on operational systems 8.20. Network security 8.21. Security of network services 8.22. Segregation of networks 8.23. Web filtering 8.24. Use of cryptography 8.25. Secure development life cycle 8.26. Application security requirements 8.27. Secure system architecture and engineering principles 8.28. Secure coding 8.29. Security testing in development and acceptance 8.30. Outsourced development 8.31. Separation of development, test and production environments 8.32. Change management 8.33. Test information 8.34. Protection of information systems during audit testing

*New control, 2022

Gambar 2.2.3.2.4 Struktur SNI ISO 27001:2022

A.5 Kontrol organisasi (*organizational*) - berisi 37 kontrol

A.6 Kontrol orang (*people*) - berisi 8 kontrol

A.7 Kontrol fisik (*physical*) - berisi 14 kontrol

A.8 Kontrol teknologi (*technology*) - berisi 34 kontrol

ISO/IEC 27001:2022 juga telah menambahkan 11 kontrol baru yang disebutkan di bawah ke Annex A:

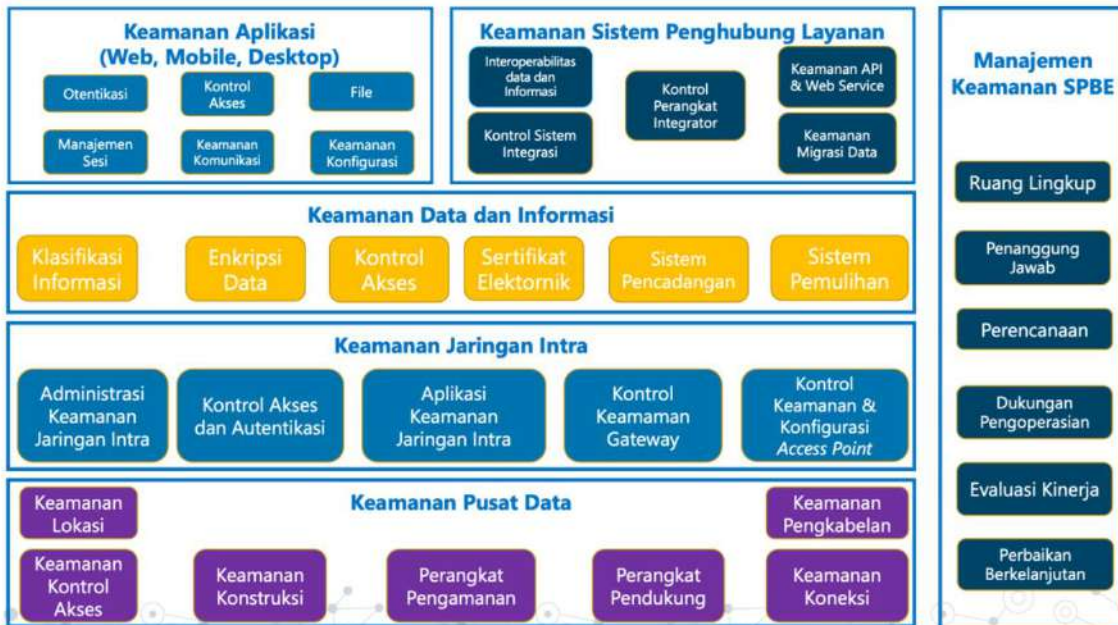
1. *Threat Intelligence* (A.5.7)
2. *ICT readiness for business continuity* (A.5.30)
3. *Information security for cloud services* (A.5.23)
4. *Physical security monitoring* (A.7.4)
5. *Configuration management* (A.8.9)
6. *Information deletion* (A.8.10)
7. *Data masking* (A.8.11)
8. *Data leakage prevention* (A.8.12)
9. *Monitoring activities* (A.8.16)
10. *Web filtering* (A.8.23)
11. *Secure coding* (A.8.28)

Perusahaan yang sudah tersertifikasi ISO 27001:2013 harus menyelesaikan transisi ke ISO 27001:2022 sebelum 31 Oktober 2025. Sedangkan bagi Badan sertifikasi harus mulai mensertifikasi perusahaan dengan standar ISO 27001:2022 paling lambat 31 Oktober 2023.

2.2.3.4. Standar Teknis dan Prosedur

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah

diterapkan oleh IPPD masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Saat ini telah terbit Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Gambar 2.2.3.3.1. Fungsi - Fungsi pada Standar Teknis Keamanan SPBE

A. Keamanan Data dan Informasi

Fungsi - fungsi yang ada di dalam standar teknis keamanan data dan informasi meliputi aspek: (a) Kerahasiaan (*Confidentiality*), (b) Keaslian (*Authentication*), (c) Keutuhan (*Integrity*), (d) Kenirsangkalan (*Non-Repudiation*), dan (e) Ketersediaan (*Availability*). Berikut ini adalah rincian beberapa prosedur untuk memenuhi fungsi standar teknis.

- a. Kerahasiaan dengan menerapkan:
 - Klasifikasi informasi;
 - Enkripsi dengan sistem kriptografi; dan
 - Kontrol akses atau pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penerapan klasifikasi informasi dapat mengacu pada Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Tabel 2.2.3.3.1 Klasifikasi Informasi

Klasifikasi Informasi	Penjelasan
SANGAT RAHASIA	Jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa

Klasifikasi Informasi	Penjelasan
RAHASIA	Jika diketahui oleh tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
TERBATAS	Jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan.
PUBLIK	Jika dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Date	Minimum of Strength	Symmetric Algorithms	Factoring Modulus	Discrete Logarithm Key	Discrete Logarithm Group	Elliptic Curve	Hash (A)	Hash (B)
(Legacy)	80	2TDEA*	1024	160	1024	160	SHA-1**	
2016 - 2030	112	3TDEA	2048	224	2048	224	SHA-224 SHA-512/224 SHA3-224	
2016 - 2030 & beyond	128	AES-128	3072	256	3072	256	SHA-256 SHA-512/256 SHA3-256	SHA-1
2016 - 2030 & beyond	192	AES-192	7680	384	7680	384	SHA-384 SHA3-384	SHA-224 SHA-512/224
2016 - 2030 & beyond	256	AES-256	15360	512	15360	512	SHA-512 SHA3-512	SHA-256 SHA-512/256 SHA-384 SHA-512 SHA3-512

Gambar 2.2.3.3.2 Standar Kriptografi untuk Enkripsi

- b. Keaslian
 - Mekanisme verifikasi;
 - Mekanisme validasi; dan
 - Menerapkan sistem *hash function*.
- c. Keutuhan
 - Penerapan pendeteksian modifikasi; dan
 - Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- d. Kenirsangkalan
 - Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
 - Penjaminan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.
- e. Ketersediaan
 - Penerapan sistem pencadangan secara berkala;
 - Pembuatan perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; dan
 - Penerapan sistem pemulihan.

B. Keamanan Aplikasi

SPBE

Keamanan aplikasi SPBE meliputi aplikasi berbasis *web* dan aplikasi berbasis *mobile*. Fungsi yang ada di dalam standar teknis keamanan aplikasi berbasis *web* meliputi aspek :

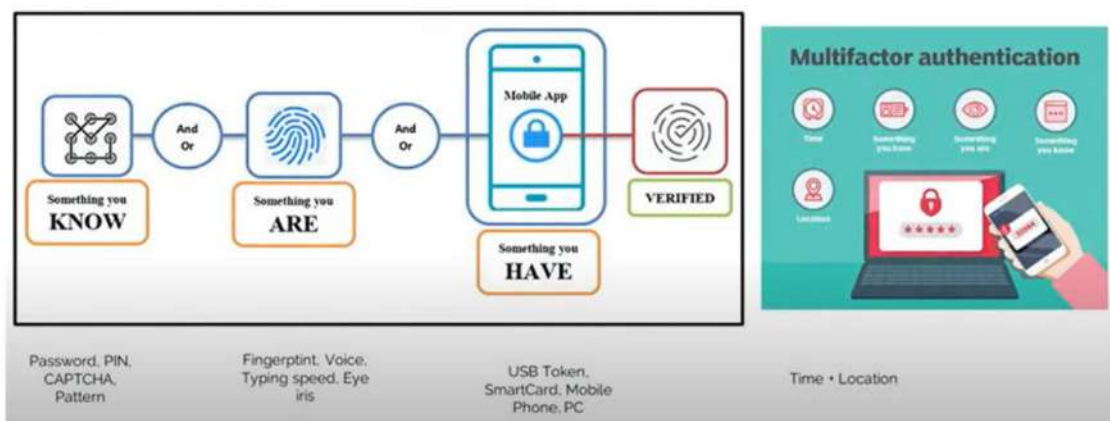
1. Autentikasi;
2. Manajemen sesi;
3. Persyaratan kontrol akses;
4. Validasi *input*;
5. Kriptografi pada verifikasi statis;
6. Penanganan *error* dan pencatatan *log*;
7. Proteksi data;
8. Keamanan komunikasi;
9. Pengendalian kode berbahaya;
10. Logika bisnis;
11. *File*;
12. Keamanan *API* dan *web service*; dan
13. Keamanan konfigurasi.

Pemenuhan beberapa aspek standar keamanan aplikasi berbasis *web* diperlukan prosedur – prosedur seperti berikut ini :

1. Autentikasi

- menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi;
- menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi pusat data;
- mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;
- mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan kata sandi;
- mengatur mekanisme pemulihan kata sandi;
- menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi; dan
- menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi.

MULTI FACTOR AUTHENTICATION



Gambar 2.2.3.3.3. Multi Factor Authentication

2. Manajemen sesi

- menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi;
- menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi;
- mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi;
- mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi;
- validasi dan pencantuman *session id*;
- perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi; dan
- perlindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna.

3. Persyaratan kontrol akses

- menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses;
- mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus-menerus pada fungsi;
- mengatur antarmuka pada sisi administrator; dan
- mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan.

4. Validasi input

- menerapkan fungsi validasi *input* pada sisi pusat data;
- menerapkan mekanisme penolakan *input* jika terjadi kesalahan validasi;
- memastikan *runtime environment* aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi *input*;
- melakukan validasi positif pada seluruh *input*;
- melakukan *filter* terhadap data yang tidak dipercaya;
- menggunakan *fitur* kode dinamis;
- melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip; dan
- melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data.

5. Kriptografi pada verifikasi statis

- menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan autentikasi data yang dienkripsi;
- menerapkan manajemen kunci kriptografi; dan
- membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.

6. Penanganan *error* dan pencatatan *log*

- mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan;
- menggunakan metode penanganan *error* untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga;
- menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani;
- tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan *log*;
- mengatur cakupan *log* yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden;
- mengatur perlindungan *log* aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah;

- melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi *log*; dan
 - melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar.
7. Proteksi data
- melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan;
 - melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi;
 - melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan;
 - melakukan penentuan jumlah parameter;
 - memastikan data disimpan dengan aman;
 - menentukan metode untuk menghapus dan mengekspor data sesuai permintaan pengguna; dan
 - membersihkan memori setelah tidak diperlukan.
8. Keamanan komunikasi
- menggunakan komunikasi terenkripsi;
 - mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna;
 - mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya; dan
 - mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Pengendalian kode berbahaya
- menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya;
 - memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan;
 - mengatur izin terkait *fitur* atau sensor terkait privasi;
 - mengatur perlindungan integritas; dan
 - mengatur mekanisme *fitur* pembaruan.
10. Logika bisnis
- memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;
 - memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validasi;
 - memonitor aktivitas yang tidak biasa;
 - membantu dalam kontrol anti otomatisasi; dan
 - memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa.
11. File
- mengatur jumlah *file* untuk setiap pengguna dan kuota ukuran *file* yang diunggah;
 - melakukan validasi *file* sesuai dengan tipe konten yang diharapkan;
 - melakukan perlindungan terhadap metadata *input* dan metadata *file*;
 - melakukan pemindaian *file* yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya; dan
 - melakukan konfigurasi pusat data untuk mengunduh *file* sesuai ekstensi yang ditentukan.

12. Keamanan API dan *web service*

- melakukan konfigurasi layanan *web*;
- memverifikasi *uniform resource identifier* API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan;
- membuat keputusan otorisasi;
- menampilkan metode *RESTful hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
- menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input;
- menggunakan metode perlindungan layanan berbasis *web*; dan
- menerapkan kontrol anti otomatisasi.

13. Keamanan konfigurasi

- mengkonfigurasi pusat data sesuai rekomendasi pusat data aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan;
- mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi;
- menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan;
- memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal; dan
- menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman.

Standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile terdiri dari:

- a. penyimpanan data dan persyaratan privasi;
- b. kriptografi;
- c. autentikasi dan manajemen sesi;
- d. komunikasi jaringan;
- e. interaksi *platform*;
- f. kualitas kode dan pengaturan *build*; dan
- g. ketahanan.

Prosedur-prosedur yang dapat diterapkan untuk memenuhi standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile meliputi:

- a. penyimpanan data dan persyaratan privasi
 - menyimpan seluruh data dan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial sistem;
 - membatasi pertukaran data dan informasi yang dikecualikan dengan *third party*;
 - menonaktifkan *cache keyboard* pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan;
 - melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi *inter process communication*; dan
 - melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui antarmuka pengguna.
- b. Kriptografi
 - menghindari penggunaan kriptografi simetrik dengan *hardcoded key*;
 - mengimplementasikan metode kriptografi yang sudah teruji sesuai kebutuhan;

- menghindari penggunaan protokol kriptografi atau algoritma kriptografi yang obsolet;
 - menghindari penggunaan kunci kriptografi yang sama; dan
 - menggunakan pembangkit kunci acak yang memenuhi kriteria keacakan kunci.
- c. Autentikasi dan manajemen sesi
- menerapkan autentikasi pada *remote endpoint* terhadap aplikasi yang menyediakan akses pengguna untuk layanan jarak jauh;
 - menggunakan *session identifier* yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna apabila menggunakan *stateful* manajemen sesi;
 - memastikan pusat data menyediakan token yang telah ditandatangani menggunakan algoritma yang aman apabila menggunakan autentikasi *stateless* berbasis token;
 - memastikan *remote endpoint* memutus sesi yang ada saat pengguna *log out*;
 - menerapkan pengaturan sandi pada *remote endpoint*;
 - membatasi jumlah percobaan *log in* pada *remote endpoint*;
 - menentukan masa berlaku sesi dan masa kadaluarsa token pada *remote endpoint*; dan
 - melakukan otorisasi pada *remote endpoint*.
- d. Komunikasi jaringan
- menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* yang tidak obsolet secara konsisten; dan
 - memverifikasi sertifikat *remote endpoint*.
- e. Interaksi *platform*
- memastikan aplikasi hanya meminta akses terhadap sumber daya yang diperlukan;
 - melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna;
 - menghindari pengiriman fungsionalitas sensitif melalui skema *custom uniform resource locator* dan fasilitas *inter process communication*;
 - menghindari penggunaan *JavaScript* dalam *WebView*;
 - menggunakan protokol *hypertext transfer protocol secure* pada *WebView*; dan
 - mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman.
- f. Kualitas kode dan pengaturan *build*
- menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang valid;
 - memastikan aplikasi dalam *mode rilis*;
 - menghapus simbol *debugging* dari *native binary*;
 - menghapus kode *debugging* dan kode bantuan pengembang;
 - mengidentifikasi kelemahan seluruh komponen *third party*;
 - menentukan mekanisme penanganan *error*;
 - mengelola memori secara aman; dan
 - mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia.

g. Ketahanan

- mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi yang tidak sah;
- mendeteksi dan merespons *debugger*;
- mencegah *executable file* melakukan perubahan pada sumber daya perangkat;
- mendeteksi dan merespons keberadaan perangkat *reverse engineering*;
- mencegah aplikasi berjalan dalam *emulator*;
- mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memori;
- menerapkan fungsi *device binding* dengan menggunakan *properti* unik pada perangkat;
- melindungi seluruh *file* dan *library* pada aplikasi; dan
- menerapkan metode *obfuscation*.

C. Keamanan Sistem Penghubung

Layanan

Standar keamanan pada Sistem Penghubung Layanan untuk memastikan penerapan kontrol sistem yang menghubungkan antara Aplikasi SPBE dengan aplikasi SPBE lainnya, atau antara Aplikasi SPBE dengan web pusat data, meliputi:

a. Keamanan interoperabilitas data dan informasi

- menerapkan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pengamanan dokumen dan surat elektronik;
- menerapkan sistem enkripsi data;
- memastikan data dan informasi selalu dapat diakses sesuai otoritasnya; dan
- menerapkan sistem *hash function* pada file.

b. Penerapan kontrol sistem integrasi

- menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* versi terkini pada sesi pengiriman data dan informasi;
- menerapkan *internet protocol security* untuk mengamankan transmisi data dalam jaringan berbasis *transmission control protocol/internet protocol*;
- menerapkan sistem anti *distributed denial of service*;
- menerapkan autentikasi untuk memverifikasi identitas eksternal antar Layanan SPBE yang terhubung;
- menerapkan manajemen keamanan sesi;
- menerapkan pembatasan akses pengguna berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan;
- menerapkan validasi input;
- menerapkan kriptografi pada verifikasi statis;
- menerapkan sertifikat elektronik pada *web authentication*;
- menerapkan penanganan *error* dan pencatatan *log*;
- menerapkan proteksi data dan jalur komunikasi;
- menerapkan pendeteksi virus untuk memeriksa beberapa konten file;
- menetapkan perjanjian tingkat layanan dengan standar paling rendah 95% (sembilan puluh lima per seratus); dan

- memastikan sistem integrasi tidak memiliki kerentanan yang berpotensi menjadi celah peretas.
- c. Penerapan kontrol perangkat integrator
- menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak dengan *security patches* terkini;
 - menggunakan anti virus dan *anti-spyware* terkini;
 - mengaktifkan fitur keamanan pada peramban *web*;
 - menerapkan *firewall* dan *host-based intrusion detection systems*;
 - mencegah instalasi perangkat lunak yang belum terverifikasi;
 - mencegah akses terhadap situs yang tidak sah; dan
 - mengaktifkan *sistem recovery* dan *restore* pada perangkat integrator.
- d. Keamanan *API* dan *web service*
- menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* di antara pengirim dan penerima *API*;
 - menerapkan protokol *open authorization* versi terkini untuk menjembatani interaksi antara *resource owner*, *resource pusat data* dan/atau *third party*;
 - menampilkan metode RESTful *hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
 - melindungi layanan *web* RESTful yang menggunakan *cookie* dari *cross-site request forgery*; dan
 - memvalidasi parameter yang masuk oleh penerima *API* untuk memastikan data yang diterima valid dan tidak menyebabkan kerusakan.
- e. Keamanan migrasi data
- memastikan migrasi data dilakukan secara bertahap dan terprogram oleh sistem;
 - memastikan aplikasi yang menggunakan sistem basis data lama tetap dipertahankan sampai sistem pendukung basis data baru dapat berjalan atau berfungsi dengan normal;
 - mendokumentasikan format sistem basis data lama secara rinci;
 - melakukan pencadangan seluruh data yang tersimpan pada sistem sebelum melakukan migrasi data;
 - menerapkan teknik kriptografi pada proses penyimpanan dan pengambilan data; dan
 - melakukan validasi data ketika proses migrasi data selesai.

D. Keamanan Jaringan Intra

Pemerintah

Standar teknis keamanan jaringan intra diterapkan pada Jaringan Intra Pemerintah (JIP), dan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (JIPPD).

Standar teknis keamanan jaringan intra meliputi :

1. aspek administrasi keamanan jaringan intra;
2. kontrol akses dan autentikasi;
3. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;

4. kontrol keamanan *gateway*;
5. kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel; dan
6. kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel.

Beberapa aspek pemenuhan standar teknis keamanan jaringan intra diperlukan prosedur-prosedur seperti berikut ini:

1. Aspek administrasi keamanan jaringan

- intra.**
- menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur jaringan intra;
 - mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan;
 - menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait pemeliharaan keamanan jaringan intra; dan
 - membuat laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik.

2. Kontrol akses dan autentikasi

- menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona terpisah;
- menggunakan autentikasi untuk mengakses jaringan intra;
- menerapkan pembatasan akses dalam jaringan intra;
- mematikan atau membatasi *protocol*, *port*, dan layanan yang tidak digunakan;
- menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses ke situs berbahaya;
- menerapkan fungsi *honeypot* untuk menganalisis celah keamanan berdasarkan jenis serangan;
- menerapkan *virtual private network* dan mengaktifkan fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan;
- memberikan kewenangan hanya kepada administrator untuk menginstal perangkat lunak dan/atau mengubah konfigurasi sistem dalam jaringan intra;
- menerapkan *secure endpoint*;
- memblokir layanan yang tidak dikenal;
- menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* versi terkini pada jalur akses jaringan Intra; dan
- menerapkan pusat data perantara saat *client* mengakses pusat data *database* dalam rangka pemeliharaan.

3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra

- menggunakan perangkat *security information and event management* untuk *network logging* dan *monitoring*;
- menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan perangkat jaringan;
- menggunakan perangkat *firewall*;
- menggunakan perangkat *intrusion detection systems* dan *intrusion prevention systems*;
- menerapkan *virtual private network* terenkripsi untuk penggunaan akses jarak jauh secara terbatas;
- menerapkan kontrol *update patching* pada infrastruktur jaringan intra dan sistem komputer;

- menggunakan perangkat *web application firewall*;
- menggunakan perangkat *load balancer* untuk menjaga ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi;
- memperbarui teknologi keamanan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meminimalisasi celah peretas;
- mengunduh perangkat lunak melalui *enterprise software distribution system*; dan
- menerapkan sertifikat elektronik.

4. Kontrol keamanan *gateway*

- menerapkan *content filtering*;
- menerapkan *inspection packet filtering* untuk memeriksa *packet* yang masuk pada Jaringan Intra;
- menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak jauh perangkat *gateway*;
- memastikan perangkat *gateway* yang menghubungkan antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan jaringan publik;
- melaksanakan manajemen *trac gateway*; dan
- memastikan *port* tidak dibuka secara *default*.

5. Kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel

- menerapkan protokol keamanan *access point* nirkabel dan teknologi enkripsi terkini;
- menerapkan *media access control* pada *address filtering*;
- menerapkan *dedicated service set identifier*;
- menerapkan pembatasan jangkauan radio transmisi dan pengguna jaringan;
- menerapkan pembatasan terkait penambahan perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah;
- menerapkan manajemen *vulnerability* secara berkala dan berkelanjutan; dan
- melakukan *patching firmware* secara rutin.

6. Kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel

- menggunakan kata sandi yang kuat;
- menggunakan protokol model *authentication authorization* dan *accounting* pada perangkat infrastruktur jaringan untuk *management user* atau otentikasi administrator *access point*;
- memastikan fitur akses konfigurasi jarak jauh hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat dengan menerapkan kontrol keamanan;
- mengisolasi atau melakukan segmentasi jaringan area lokal nirkabel; dan
- menonaktifkan antarmuka nirkabel, layanan, dan aplikasi yang tidak digunakan.

E. Keamanan Pusat

Data

Standar teknis keamanan Pusat Data yakni persyaratan keamanan fisik dan persyaratan koneksi ke perangkat pusat data. Persyaratan keamanan fisik pusat data

mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yakni SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data:

a. Lokasi

- Tidak berada pada area rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta BMKG;
- Tidak berada pada lokasi rawan hurahara seperti perkampungan padat atau kumuh;
- Jarak dengan arteri lalu lintas, jalan raya utama dan jalur kereta api umata minimal lebih dari 91 meter; dan
- Jarak ke bandara utama dan/atau pelabuhan minimal lebih dari 1,6 km.

b. Kontrol Akses

- Pusat data merupakan area kunjungan terbatas dan diperuntukan bagi yang telah mendapat izin memasuki area pusat data;
- Moda memasuki pusat data bisa dengan mempergunakan kartu akses elektronik, biometrik atau pemindai jari;
- Penyambungan interkoneksi telekomunikasi memerlukan persetujuan para pihak penyedia jasa telekomunikasi dan pengawas penyedia jasa layanan pusat data; dan
- Untuk keamanan pusat data ditetapkan perimeter tertentu sesuai dengan kategori strata pusat data.

c. Konstruksi

- Bangunan pusat data memiliki ketahanan terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang – kurangnya kategori risiko II;
- Bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi. Beban dimaksud adalah beban merata bukan hanya pada tulang lantai; dan
- Memenuhi persyaratan ketahanan material gedung meliputi ketahanan api, dan pengembunan.

d. Perangkat Pengamanan dan Pendukung

- CCTV;
- Access door;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Sistem pendinginan; dan
- Sistem monitoring lingkungan (suhu, kelembaban relatif ruangan, genangan air).

e. Pengkabelan

- Pusat data memiliki pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik;
- Setiap kabel memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram; dan
- Pusat data memiliki topologi distribusi jaringan utama dari ruang pusat data kepada pengguna jasa pusat data. Distribusi jaringan dapat mempergunakan

berbagai moda kabel dan berbagai perangkat komunikasi serta memiliki label kabel.

Persyaratan keamanan koneksi ke pusat data meliputi:

1. Memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional.
2. Memutus akses fisik atau logik dari perangkat yang tidak terotorisasi.
3. Memastikan akses tingkat *administrator* ke pusat data dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara *remote*.

2.2.3.5. Aktivitas Keamanan Informasi

Guna menjalankan keamanan SPBE, Pemerintah Kabupaten Sragen dapat menerapkan keamanan SPBE yang mengacu pada Kerangka Kerja Keamanan Siber (*Cyber Security Framework*) yang dipublikasikan oleh lembaga *US National Institute of Standards and Technology* (NIST). Pada kerangka kerja tersebut terdapat 5 (lima) aktivitas yang perlu dilakukan oleh setiap organisasi dalam menghadapi serangan siber yakni identifikasi (*identity*), proteksi (*protect*), deteksi (*detect*), respon (*respond*), dan pemulihan (*recover*). Masing-masing aktivitas tersebut memiliki tujuan dan manfaat serta kegiatan atau inisiatif yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsinya.



Gambar 2.2.3.3.4. Fungsi dan Kategori Aktivitas Keamanan Informasi

A. Identifikasi (*Identify*)

Pada tahap ini Diskominfo perlu mengidentifikasi sistem, data, aset informasi, dan kemampuan yang harus dilindungi sesuai dengan tingkat kritikalitas dan prioritas yang ditentukan. Kegiatan dalam tahap identifikasi antara lain:

1. Manajemen aset;
2. Lingkungan bisnis;
3. Tata kelola;
4. Penilaian risiko; dan
5. Strategi manajemen risiko.

B. Proteksi

(Protect)

Pada tahap ini Diskominfo perlu melakukan tindakan mengembangkan dan menerapkan perlindungan terhadap seluruh aset informasi sesuai dengan kategori keamanan data yang telah ditentukan. Kegiatan dalam tahap proteksi antara lain:

1. Akses kontrol;
2. Pemahaman dan pelatihan;
3. Keamanan data;
4. Proses dan prosedur proteksi informasi; dan
5. Pemeliharaan.

C. Deteksi

(Detect)

Pada tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi terjadinya serangan siber. Kegiatan dalam tahap deteksi antara lain:

1. Anomali dan kejadian;
2. Pemantauan Keamanan berkelanjutan; dan
3. Proses deteksi.

D. Respon

(Respond)

Pada tahap ini Diskominfo diharapkan dapat melakukan tindak lanjut terhadap insiden keamanan yang terdeteksi atau terjadi. Kegiatan dalam tahap respon antara lain:

1. Rencana Respon;
2. Komunikasi;
3. Analisis;
4. Mitigasi; dan
5. Improvisasi.

E. Pemulihan

(Recover)

Pada tahap ini Diskominfo diharapkan dapat memperbaiki atau memulihkan kemampuan, layanan, dan kondisi bisnis kembali seperti sedia kala yang mengalami gangguan keamanan/siber. Kegiatan dalam tahap pemulihan antara lain:

1. Rencana Pemulihan;
2. Improvisasi; dan
3. Komunikasi.



Gambar 2.2.3.3.5. Aktivitas Keamanan Informasi

Aktivitas dan kegiatan dari identifikasi sampai dengan pemulihan dapat dilaksanakan oleh *Security Operation Center* (SOC). Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, SOC berpedoman pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Untuk selanjutnya SOC bisa bekerja sama dengan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang dibentuk bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). CSIRT adalah tim yang menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber, pada suatu wilayah (*constituency*) yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Tim CSIRT akan bertanggung jawab penuh untuk memonitor dan mengelola berbagai isu-isu terkait dengan keamanan internet untuk menjaga aset informasi dan komunikasi dari seluruh unit-unit aktivitas organisasi. Laporan Arsitektur Kondisi Target SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini disusun guna memberikan gambaran kondisi kedepan yang perlu diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Kondisi target yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa kesenjangan dari kondisi eksisting dan kondisi yang ingin dicapai.

2.2.3.6. *Security Operation Center* (SOC)

Meningkatnya serangan dan insiden siber mendorong Pemerintah Kabupaten Sragen untuk mengimplementasikan berbagai solusi keamanan TI yang mencakup banyak bidang area. Pemerintah Kabupaten Sragen merupakan salah satu lembaga yang menjadi target untuk banyak jenis serangan, sehingga perlu mengetahui kondisi keseluruhan postur keamanan saat ini dan melindunginya. Unit *Security Operation Center* (SOC) dibentuk untuk melakukan pemantauan dan perlindungan terhadap aset Pemerintah Kabupaten Sragen dari serangan siber. SOC menyediakan fungsi penting dalam memantau dan mendeteksi setiap kejadian yang dapat mengancam, dimana hal ini sangat penting bagi keamanan Pemerintah Kabupaten Sragen. Fungsi – fungsi umum yang dilakukan oleh SOC meliputi :

1. Pengelolaan Log

2. Pemantauan Proaktif berkelanjutan
3. Peringkat dan manajemen peringatan
4. Investigasi penyebab insiden
5. Respon ancaman
6. Penyempurnaan dan peningkatan keamanan
7. Pemulihan dan remediasi
8. Manajemen kepatuhan

A. Triad SOC

Triad CSOC yang mencakup yakni:

- *People* untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai fungsi;
- *Technology* berupa produk keamanan yang berbeda; dan
- *Process* terdiri dari berbagai proses dan prosedur.



Gambar 2.2.3.6.1. Triad SOC

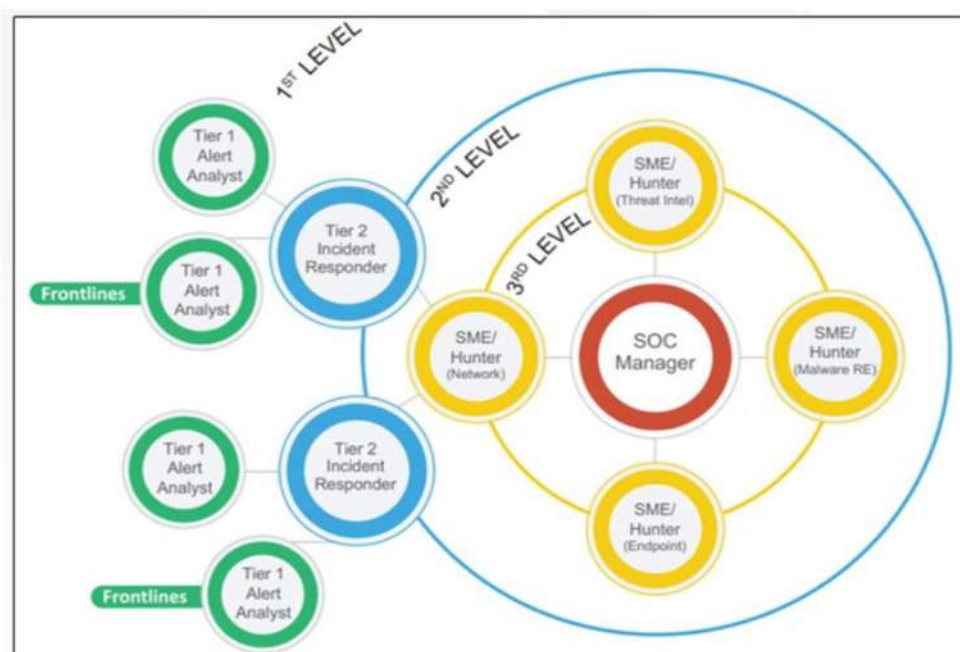
Perangkat keamanan TI yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sragen seperti firewall, *Intrusion Prevention System (IPS)*, *Web Application Firewall (WAF)*, *Antivirus* dan lain - lain memiliki fungsi utama untuk melindungi aset Pemerintah Kabupaten Sragen dari jenis serangan siber tertentu. Karena dengan banyaknya solusi keamanan TI yang tersedia dan diimplementasikan, ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan dan mengatur semua solusi tersebut untuk manajemen keamanan

yang lebih baik. Solusi *Security Information and Events Management* (SIEM) untuk mendapatkan informasi tentang kondisi keamanan TI secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sragen dapat mendeteksi dan bereaksi lebih baik dan lebih cepat terhadap serangan siber.

B. SOC – People

Operasional SOC dapat dibagi menjadi 4 (empat) tingkat atau level yakni:

- *Tier 1 (Frontliner)*
Monitoring dan menganalisa alert, monitoring sensor keamanan dan endpoint, mengumpulkan data penting untuk di eskalasikan ke Tier 2.
- *Tier 2 (Incident Responder)*
Melakukan analisa insiden secara mendalam dengan menghubungkan data dari berbagai sumber, menentukan jika ada sistem atau data yang terkena impact, memberi saran terkait remediasi, menyediakan metode analisa untuk mendeteksi ancaman.
- *Tier 3 (SME/Hunter)*
Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai jaringan, endpoint, threat intelligence, forensik, dan malware reverse engineering, melakukan threat hunting, melakukan tuning dan implementasi threat detection analytics.
- *Tier 4 (SOC Manager)*
Mengelola sumber daya termasuk personil, anggaran, penjadwalan shift, dan strategi teknologi untuk memenuhi SLA.



Gambar 2.2.3.6.2. Hirarki Tugas dan Tanggung Jawab SOC

Untuk pemenuhan SDM untuk operasional SOC diperlukan pengetahuan dan kompetensi seperti tabel di bawah ini.

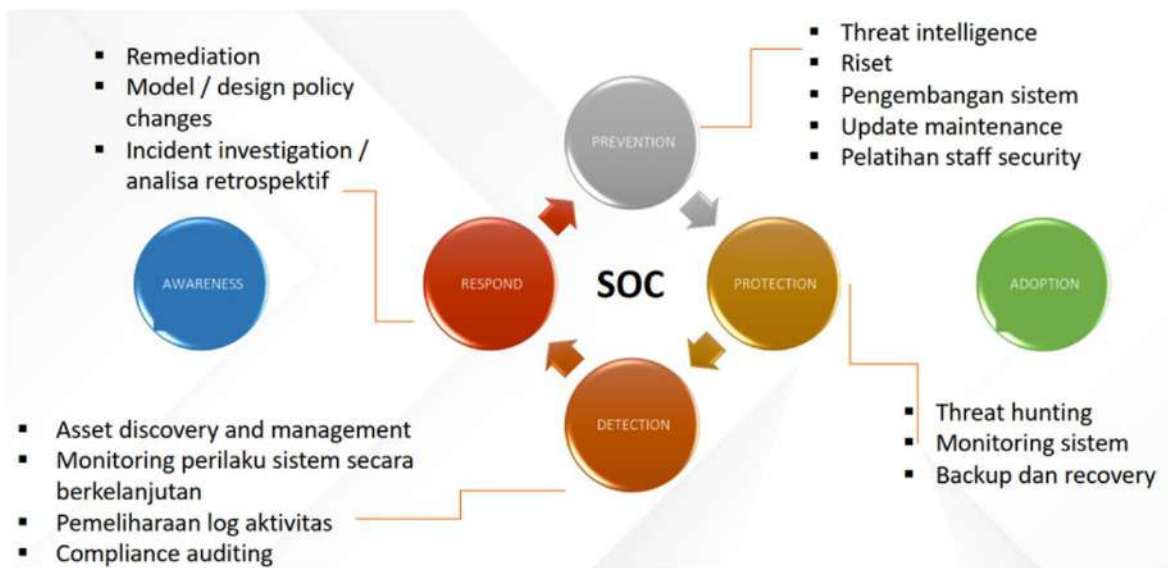
Tabel 2.2.3.6.1. Pengetahuan dan Kompetensi SDM untuk SOC

Knowledge & Skill Level	Tier-1	Tier-2	Tier-3
Basic	<ul style="list-style-type: none"> • CompTIA Security+ • MITRE ATTACK Framework (fundamental) 	<ul style="list-style-type: none"> • CompTIA Security + • MITRE ATTACK Framework (fundamental) 	<ul style="list-style-type: none"> • CompTIA Security+ • MITRE ATTACK Framework (fundamental)
Intermediate		<ul style="list-style-type: none"> • CompTIA CySA+ • CompTIA PenTest+ • MITRE ATTACK Framework (Intermediate) 	<ul style="list-style-type: none"> • CompTIA CySA+ • CompTIA PenTest+ • MITRE ATTACK Framework (Intermediate)
Advance		<ul style="list-style-type: none"> • Cyber Intrusion Detection and Analysis • Incident Response 	<ul style="list-style-type: none"> • CompTIA CASP+ • Incident Response

C. SOC – Process

Tahapan kegiatan yang ada di SOC terdiri dari:

- A. Deteksi (*Detection*), meliputi aktivitas:
 - Pengumpulan dan Manajemen aset;
 - Pemantauan perilaku sistem secara berkelanjutan (anomali dan kejadian);
 - Pemeliharaan log aktivitas;
 - Proses deteksi;
- B. Proteksi (*Protection*), meliputi aktivitas:
 - Akses kontrol
 - Pemantauan sistem
 - Rekam cadang (backup) dan pemulihan (recovery)
 - *Threat hunting*
 - Keamanan data
- C. Respon (*Respond*), meliputi aktivitas:
 - Rencana respon
 - Komunikasi
 - Remediasi
 - Investigasi/analisa retrospektif
- D. Pencegahan (*Prevention*), meliputi aktivitas:
 - Riset
 - Pengembangan sistem
 - Pemeliharaan pembaruan sistem
 - Pelatihan staf SOC
 - *Threat intelligence*



Gambar 2.2.3.6.3. Tahapan Kegiatan di SOC

D. SOC – Technology

SOC mengumpulkan data – data dari perangkat jaringan, server, dan lainnya seperti :

- *Network Device (Firewall, router)*
- *Security tools*
- *SaaS (Microsoft 365, Gsuite)*
- *User device (laptop, PC)*
- *Server / virtual machine*
- *Workstation*
- *Active Directory, LDAP, DHCP*
- *Web application*
- *Digital asset (Domain, company name, Brand name, VIP email, etc)*

Pilihan teknologi yang dapat diimplementasikan di SOC antara lain :

- *SIEM (Security Information & Event Management)*
- *IDPS*
- *Security Monitoring dan Analytic*
- *Security Incident Management*
- *SOAR (Security Orchestration, Automation, Response)*
- *Threat Intelligence*
- *Threat Hunting*
- *Vulnerability management*
- *Log data management*

E. SIEM

SIEM (*Security Information and Event Management*) pada dasarnya menyediakan analisis real-time dari *security alert* yang dihasilkan oleh aplikasi, server, perangkat security

dan network. Dengan memiliki data (berbentuk *logs* dan *events*) dari berbagai perangkat IT, SIEM dapat digunakan untuk deteksi dini terhadap *targeted attack* dan pencurian data, serta untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, menyelidiki dan melaporkan data kejadian untuk respons insiden, forensik dan kepatuhan terhadap peraturan (*regulatory compliance*). Cara SIEM melakukan fungsi di atas adalah dengan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber, mengidentifikasi penyimpangan dari data normal dan mengambil tindakan yang tepat (peringatan dan pelaporan). Untuk mencapai tujuan utamanya, SIEM perlu melakukan beberapa tugas dan fungsi yang menjadi kemampuan utamanya, yaitu :

A. *Log Management*

Manajemen log dari semua data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat, seperti *server, database, aplikasi* dan perangkat *security*.

B. *Data aggregation*

Log Management mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk *network, security, database* dan aplikasi, menyediakan kemampuan untuk mengkonsolidasi data yang dimonitor, sehingga membantu untuk mencegah hilangnya data/*event* yang penting.

C. *Correlation*

Mencari atribut yang bersifat umum, dan menghubungkan peristiwa bersama menjadi informasi yang bermakna. Teknologi ini menyediakan kemampuan untuk melakukan berbagai teknik korelasi untuk mengintegrasikan berbagai sumber, untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Korelasi biasanya merupakan fungsi dari bagian Manajemen Event Keamanan dari solusi SIEM penuh.

D. *Alerting*

Analisis otomatis dari sebuah kejadian yang terkait dan membuat peringatan, untuk memberi tahu kepada pihak yang terkait dengan segera. *Alert* dapat ditampilkan ke *dashboard*, atau dikirim melalui saluran pihak ketiga seperti *email, telegram*.

E. *Dashboards*

Perangkat SIEM dapat mengambil data peristiwa dan mengubahnya menjadi informasi berbentuk grafik untuk membantu dalam melihat pola, atau mengidentifikasi aktivitas diluar pola standar.

F. *Compliance*

Perangkat SIEM dapat digunakan untuk mengotomatisasi pengumpulan data terkait kepatuhan (*compliance*), menghasilkan laporan yang beradaptasi dengan proses keamanan, tata kelola dan audit yang ada.

G. *Searching*

Mencari ke semua log berdasarkan bermacam kriteria untuk tujuan analisa forensik dan melihat data lampau.

H. *Retention*

Menyediakan penyimpanan data historis jangka panjang untuk memfasilitasi korelasi data dari waktu ke waktu, dan untuk menyediakan retensi yang diperlukan untuk persyaratan kepatuhan. Retensi data log jangka panjang sangat penting dalam penyelidikan forensik karena amat jarang untuk menemukan pelanggaran jaringan akan terjadi pada saat pelanggaran terjadi.

I. *Security & Forensic analysis*

Kemampuan untuk mencari di log pada berbagai *node* dan periode waktu berdasarkan kriteria tertentu. Ini mengurangi beban, dimana harus mencari melalui ribuan bahkan jutaan log.

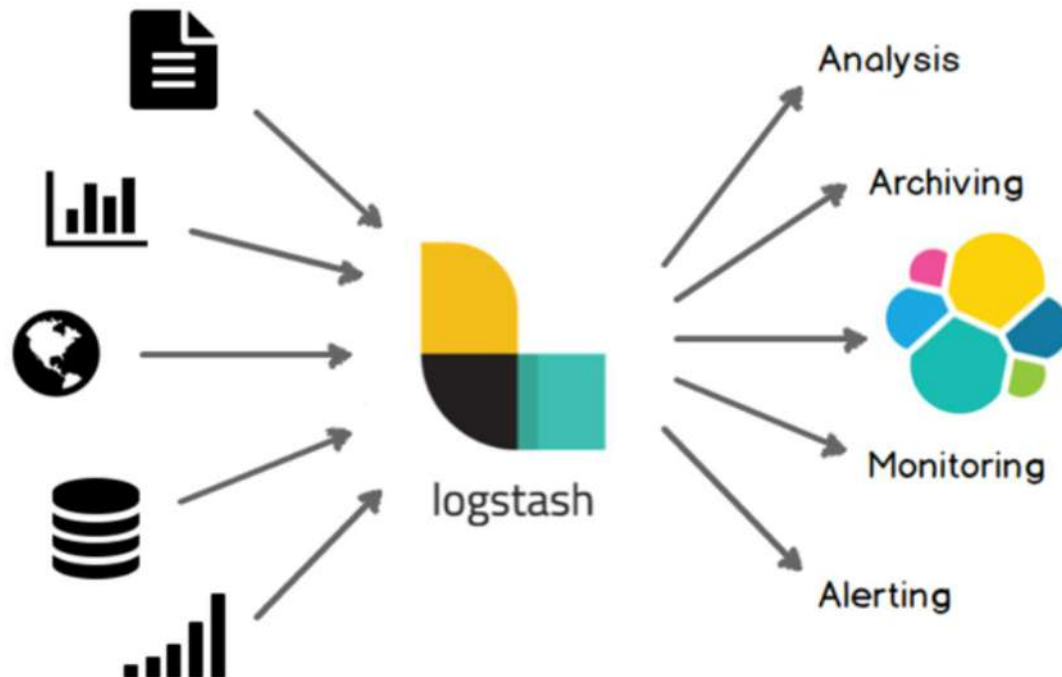
Berdasarkan uraian di atas SIEM memegang peran penting dalam implementasi dan operasi dari *Security Operation Center* (CSOC). Bersama dengan alat pemantauan, forensik dan analisis lain seperti *network forensic* dan End Point Detection and Response (EDR), analisis keamanan di SOC akan melakukan pemantauan dan analisis postur keamanan organisasi, untuk menemukan ancaman apa pun yang mungkin membahayakan dan melakukan mitigasi yang diperlukan.

Terdapat beberapa solusi *proprietary platform* SIEM seperti LogRhythm, Splunk, dan ArcSight. Solusi ini cukup mahal, khususnya untuk pemakaian jangka panjang dan organisasi yang besar. Selain itu juga tersedia solusi open source platform antara lain AlienVault OSSIM, ELK Stack, OSSEC, Wazuh, SIEMOnster, dan lain – lain.

F. ELK

ELK terdiri dari 3 jenis perangkat lunak: *Elasticsearch*, *Logstash* dan *Kibana*. Semua perangkat lunak itu akan berkolaborasi satu sama lain secara *native*, mulai dari menerima log dan informasi dari berbagai sumber, sampai melaporkan, memberikan *alert* serta memvisualisasikan hasilnya. Komponen pertama yang menerima informasi adalah Logstash. Logstash adalah seperti pipa pengolahan data (*server-dise*) yang menerima data dari banyak sumber secara bersamaan, mengubahnya sesuai keinginan, dan kemudian mengirimkannya ke "penyimpanan" favorit. Logstash mendukung berbagai *input* yang mengambil *event* dari banyak sumber yang umum, semua secara *realtime*. Logstash juga dapat dengan mudah menerima data berbentuk log, metrik, aplikasi web, *data stores*,

secara terus menerus, secara streaming. Ketika data berpindah dari sebuah sumber ke tempat lain, Logstash memfilter dan mengurai setiap peristiwa, mengidentifikasi *named fields* untuk membuat *structure*, dan mengubahnya menjadi kumpulan format yang umum untuk tujuan analisis, dan mendapatkan nilai bisnis yang lebih mudah dan lebih cepat.



Gambar 2.2.3.6.4. Logstash

Setelah menerima, mengurai, dan mengubah data, Logstash akan mengirim data ke tujuan dan format apa pun. Logstash memiliki berbagai output yang memungkinkan mengirimkan data kemana saja, memberikan fleksibilitas untuk banyak *use-case*. Setelah log diterima, diubah dan diformat ulang oleh Logstash, akan mengirim *output* ke Elasticsearch. Elasticsearch adalah mesin pencarian dan analisis terdetail, berbasis RESTful, yang mampu memecahkan semakin banyak *use-case*. Sebagai inti dari *Elastic Stack*, Elasticsearch menyimpan data secara tersentralisasi, sehingga dapat menemukan data yang diinginkan dan mengungkap data tak terduga. Elasticsearch dapat digunakan untuk mencari semua jenis dokumen. Elasticsearch dapat melakukan dan menggabungkan banyak jenis pencarian - terstruktur, tidak terstruktur, geometrik, dan lain sebagainya.

Stack ELK terakhir sebagai SIEM dan alat *Log Management* adalah Kibana. Kibana adalah platform *analytics* dan *visualization* berbasis OSS yang dirancang untuk bekerja dengan Elasticsearch. Dengan Kibana dapat memvisualisasikan data Elasticsearch dan menavigasi *Elastic Stack*. Kibana untuk mencari, melihat, dan berinteraksi dengan data yang disimpan dalam indeks Elasticsearch.



Gambar 2.2.3.6.5. Hubungan antar Stack pada ELK

Bab III Penutup

Dokumen kondisi target ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Sragen selama 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam dokumen Arsitektur *Eksisting* SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen.



**Pemerintah Kabupaten Sragen,
2023**

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGN A SETAHUN SEKALI (*ANNUAL REVIEW*).



Pemerintah Kabupaten Sragen



BUKU III PETA RENCANA SPBE 2023



Pemerintah Kabupaten Sragen

Daftar Isi

Bab I Portofolio Inisiatif SPBE	4
1.1. Tata Kelola	5
1.1.1. Kebijakan Arsitektur SPBE	5
1.1.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE	5
1.1.3. Kebijakan Manajemen Data	6
1.1.4. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	6
1.1.5. Kebijakan Pusat Data	7
1.1.6. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7
1.1.7. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat	8
1.1.8. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	8
1.1.9. Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	9
1.1.10. Kebijakan Tim Koordinasi	9
1.1.11. Pembentukan Komite/Forum SPBE	10
1.1.12. Kolaborasi Penerapan SPBE	10
1.1.13. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE	11
1.2. Manajemen SPBE	12
1.2.1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko	12
1.2.2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data	13
1.2.3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK	13
1.2.4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK	14
1.2.5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK	14
1.2.6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan	15
1.2.7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan	15
1.2.8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	16
1.3. Layanan SPBE	17
1.3.1. Survey Pengguna SPBE	17
1.3.2. Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi	17
1.3.3. Pengembangan Portal Layanan Internal	19
1.4. Aplikasi SPBE	21
1.4.1. Pembangunan Aplikasi	21
1.4.2. Integrasi Aplikasi	23
1.4.3. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (API Gateway)	24
1.4.4. Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data)	25
1.4.5. Pemeliharaan Aplikasi	25
1.5. Infrastruktur SPBE	27
1.5.1. Peningkatan Kapasitas Ruang dan Fasilitas Pendukung Pusat Data	27
1.5.2. Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Server dan Storage	28
1.5.3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana	28
1.5.4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik	29
1.5.5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	30
1.5.6. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kota Interkoneksi OPD/UPT	31
1.5.7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi	31

1.5.8. Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	33
1.6. Keamanan Informasi	34
1.6.1. Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE	34
1.6.2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi	35
1.6.3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE	36
1.6.4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	38
1.6.5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah	39
1.6.6. Pengembangan Platform Helpdesk TIK	40
1.6.7. Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001)	41
1.6.8. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi	42
1.6.9. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE	42
1.7. Audit SPBE	43
1.7.1. Pelaksanaan Audit TIK	43
1.8. SDM SPBE	44
1.8.1. Pembentukan Tim Developer Internal	44
1.8.2. Penyelenggaraan Kompetensi SDM SPBE	44
Bab II Roadmap & Estimasi Anggaran	48
2.1. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Sragen 2023-2027	49
Bab III Penutup	68
LAMPIRAN	70

Bab I Portofolio Inisiatif SPBE

1.1. Tata Kelola

1.1.1. Kebijakan Arsitektur SPBE

Tabel 1.1.1.1. Program Kerja Kebijakan Arsitektur SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Arsitektur SPBE untuk mengatur implementasi Arsitektur SPBE yang memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 132 Tahun 2021.
Detail	: <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Arsitektur SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil <i>assesment</i> SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Arsitektur SPBE.2. Kebijakan Arsitektur SPBE di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali.3. Melakukan pembaharuan kebijakan Arsitektur SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Keterangan	: Kebijakan Arsitektur SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 1.

1.1.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE

Tabel 1.1.2.1. Program Kerja Kebijakan Peta Rencana SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Peta Rencana SPBE untuk mengatur implementasi Peta Rencana SPBE yang mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
Detail	: <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Kebijakan Peta Rencana SPBE2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Peta Rencana SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil <i>assesment</i> SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Peta Rencana SPBE.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali.3. Melakukan pembaharuan kebijakan Peta Rencana SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Hukum

Keterangan : Kebijakan Peta Rencana SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 2.

1.1.3. Kebijakan Manajemen Data

Tabel 1.1.3.1. Program Kerja Kebijakan Manajemen Data

Deskripsi	: Kebijakan Manajemen Data untuk mengatur implementasi Manajemen Data yang telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permen PPN/Bappenas Nomor 16 Tahun 2020
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Data 2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Manajemen Data sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Manajemen Data. 2. Kebijakan Manajemen Data dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Manajemen Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: DISKOMINFO, BAPPEDA dan Bag. Hukum
Keterangan	: Kebijakan Manajemen Data SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 3.

1.1.4. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE

Tabel 1.1.4.1. Program Kerja Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE untuk mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah.
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE 2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE. 2. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.

Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Keterangan	: Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 4.

1.1.5. Kebijakan Pusat Data

Tabel 1.1.5.1. Program Kerja Kebijakan Pusat Data

Deskripsi	: Kebijakan Pusat Data untuk mengatur Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Pusat Data 2. Reviu dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pusat Data
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Pusat Data. 2. Kebijakan Pusat Data dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Pusat Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Keterangan	: Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 5.

1.1.6. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Tabel 1.1.6.1. Program Kerja Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Deskripsi	: Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah untuk mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah 2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah. 2. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Keterangan	: Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 6.

1.1.7. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat

Tabel 1.1.7.1. Program Kerja Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat

Deskripsi	: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat untuk mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat 2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat 2. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat
Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Keterangan	: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 7.

1.1.8. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Tabel 1.1.8.1. Program Kerja Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi untuk mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perban BSSN Nomor 04 Tahun 2021.
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. 2. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1

	: tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Keterangan	: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 8.

1.1.9. Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 1.1.9.1. Program Kerja Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Deskripsi	: Program Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
Detail	: 1. Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2. Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi <i>di-evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Keterangan	: Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 9.

1.1.10. Kebijakan Tim Koordinasi

Tabel 1.1.10.1. Program Kerja Kebijakan Tim koordinasi SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Tim Koordinasi SPBE untuk mengatur implementasi Tim Koordinasi SPBE yang mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada KepmenpanRB Nomor 962 Tahun 2021
Detail	: 1. Penyusunan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE. 2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Tim Koordinasi SPBE.

	2. Melakukan pembaharuan kebijakan Tim Koordinasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: DISKOMINFO, BKPSDM dan Bag. Hukum
Keterangan	: Kebijakan Tim Koordinasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 10. Adapun usulan jadwal program kerja Tim Koordinasi Pemerintah Kabupaten Sragen selama setahun dijelaskan pada lampiran 1.

1.1.11. Pembentukan Komite/Forum SPBE

Tabel 1.1.11.1. Program Kerja Pembentukan Komite/Forum SPBE

Deskripsi	: Membentuk Komite/Forum manajemen SPBE, sejauh ini sesuai arahan dari Kemenpan-RB perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE, Komite/Forum Manajemen Data, Komite/Forum Manajemen Risiko dari ketiga hal tersebut yang belum dibentuk yakni Komite/Forum Manajemen Risiko
Detail	: Membentuk Komite/Forum Manajemen SPBE yang mengacu pada pedoman nasional tentang manajemen SPBE
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Evaluasi Perbup / SK Tim Koordinasi SPBE 2. Penyusunan dan Evaluasi Perbup / SK Komite Forum Satu Data 3. Penyusunan dan Evaluasi Perbup / SK Komite Manajemen Risiko 4. Penyusunan dan Evaluasi Perbup / SK Komite Manajemen Perubahan 5. Penyusunan dan Evaluasi Perbup / SK Komite Manajemen Pengetahuan 6. Penyusunan dan Evaluasi Perbup / SK Pokja Manajemen Layanan 7. Penyusunan dan Evaluasi Perbup / SK Pokja Manajemen Keamanan Informasi
Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Keterangan	: Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

1.1.12. Kolaborasi Penerapan SPBE

Tabel 1.1.12.1. Program Kerja Kolaborasi Penerapan SPBE

Deskripsi	: Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berarti kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak lainnya untuk menerapkan sistem ini secara efektif dan efisien.
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE 2. Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal

Indikator Pencapaian	: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik, dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data pemerintah. penerapan SPBE juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Keterangan	: Kolaborasi bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Instansi Pemerintah lain, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat. Kolaborasi SPBE dilakukan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 20.

1.1.13. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE

Tabel 1.1.13.1. Program Kerja Monev Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Deskripsi	: Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE secara berkala mengikuti pedoman SPBE dari Instansi Pusat terkait.
Detail	: Adapun evaluasi dan revisi tata Kelola SPBE dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Arsitektur dan Peta Rencana merupakan <i>living document</i> sehingga perlu dilakukan pembaharuan setiap tahunnya untuk mengikuti perubahan kondisi yang terjadi. 2. Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Perlu adanya Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis sesuai Perubahan setiap tahunnya. 3. Evaluasi dan Revisi Layanan SPBE Perlu adanya Evaluasi dan Revisi Layanan SPBE agar setiap tahunnya Layanan SPBE semakin efektif dan efisien.
Indikator Pencapaian	: Tersedianya Dokumen Arsitektur SPBE
Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Keterangan	: Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait. Revisi Arsitektur dan Peta Rencana dilakukan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 11 dan 12.

1.2. Manajemen SPBE

1.2.1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko

Tabel 1.2.1.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko

Deskripsi	: Manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah proses identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah, Pedoman yang dapat mengacu pada Permenpan-RB 05/2020.
Spesifikasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan komite manajemen risiko2. Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE3. Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko5. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat6. Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, fgd.7. Penetapan konteks risiko SPBE8. Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak9. Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE10. Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya11. Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none">1. SK Komite Manajemen Risiko SPBE.2. SOP Manajemen Risiko SPBE.3. Penerapan Manajemen Risiko SPBE.4. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Pelaksana	: INSPEKTORAT dan DISKOMINFO
Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Risiko SPBE mengikuti arahan kebijakan terkait Manajemen SPBE yang berlaku seperti (Permenpan-RB 05/2020) Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 21.

1.2.2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data

Tabel 1.2.2.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data

Deskripsi	: Manajemen data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sangat penting untuk memastikan informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh pemerintah memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya, dan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
Spesifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim satu data 2. Penyusunan pedoman manajemen data 3. Pembaharuan arsitektur data 4. Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja 5. Pemeriksaan pemenuhan data sektoral 6. Penyebarluasan data sektoral 7. Pembaruan data sektoral secara berkala 8. Penyimpanan data pada portal open data 9. Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data
Indikator Pencapaian	: Penerapan Manajemen Data
Pelaksana	: DISKOMINFO dan BAPPERIDA
Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Data mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku seperti (Permen PPN/ Bappenas 16/2020). Manajemen Data SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 23.

1.2.3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK

Tabel 1.2.3.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK

Deskripsi	: Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
Spesifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim <i>helpdesk</i> TIK 2. Pembentukan SOP layanan TIK 3. Evaluasi & perbaikan kinerja tim <i>helpdesk</i> TIK
Indikator Pencapaian	: Penerapan Manajemen Layanan.

Pelaksana	:	DISKOMINFO
Keterangan	:	Dalam penyusunan Manajemen Layanan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Layanan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 28.

1.2.4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK

Tabel 1.2.4.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM

Deskripsi	:	Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan yang ada. Manajemen SDM TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK 2. Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK 3. Analisis SOP manajemen SDM 4. Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen SDM TIK
Pelaksana	:	DISKOMINFO dan BKPSDM
Keterangan	:	Dalam penyusunan Manajemen SDM TIK mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen SDM TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 25.

1.2.5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK

Tabel 1.2.5. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK

Deskripsi	:	Manajemen aset dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah proses pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan publik secara efektif dan efisien. Aset TIK meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan infrastruktur pendukung lainnya yang digunakan untuk mendukung operasi dan layanan publik. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur) 2. Penyusunan SOP perencanaan aset TIK 3. Penyusunan SOP pengadaan aset TIK

	4. Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK
Indikator Pencapaian	1. Penerapan Manajemen Aset TIK 2. Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK
Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	Pada penyusunan Manajemen Aset TIK SPBE mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Aset TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 24.

1.2.6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Tabel 1.2.6.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Deskripsi	: Manajemen Pengetahuan yaitu pengelolaan informasi dan pengetahuan dalam sebuah sistem pemerintahan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempertahankan pengetahuan yang telah didapatkan dari pengalaman operasional instansi pemerintahan.
Spesifikasi	: 1. Pembentukan komite manajemen pengetahuan 2. Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP) 3. Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi 4. Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan
Indikator Pencapaian	: 1. Penerapan Manajemen Pengetahuan 2. Aplikasi <i>Knowledge Management System</i> (SIMPAN-SPBE) digunakan secara optimal.
Pelaksana	: DISKOMINFO dan BKPSDM
Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Pengetahuan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 26.

1.2.7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan

Tabel 1.2.7.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan

Deskripsi	: Manajemen Perubahan yaitu pendekatan siklus, dan sistematis pada transisi organisasi, program, dan kegiatan dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan dengan target manfaat perubahan yang diharapkan.
Spesifikasi	: 1. Pembentukan komite manajemen perubahan 2. Penyusunan pedoman / SOP manajemen perubahan SPBE

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan form log manajemen perubahan 4. Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Manajemen Perubahan. 2. Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan.
Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Organisasi
Keterangan	<p>: Dalam penyusunan Manajemen Perubahan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.</p> <p>Manajemen Perubahan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 27.</p>

1.2.8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Tabel 1.2.8.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	<p>: Manajemen keamanan informasi dalam SPBE bertujuan untuk melindungi informasi pemerintahan yang sensitif dan penting dari serangan siber, kebocoran data, atau penggunaan yang tidak sah. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan informasi yang mungkin timbul dalam operasi SPBE. Manajemen Keamanan Informasi penetapan ruang lingkup meliputi: Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE di setiap OPD.</p>
Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim keamanan informasi 2. Penyusunan SOP keamanan informasi mengacu pada perban BSSN no. 4 tahun 2021 3. Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi 4. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Audit Keamanan SPBE 2. SOP Keamanan Informasi
Pelaksana	: DISKOMINFO
Keterangan	<p>: Pada penyusunan Manajemen Keamanan Informasi mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.</p> <p>Manajemen Keamanan Informasi SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 22.</p>

1.3. Layanan SPBE

1.3.1. Survey Pengguna SPBE

Tabel 1.3.1.1. Program Kerja Survey Penggunaan SPBE

Deskripsi	:	Melakukan survey kepada ASN dan Bisnis dan Masyarakat yang menggunakan layanan SPBE.
Spesifikasi	:	1. Survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Layanan Pemerintahan 2. Survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Layanan Publik
Detail	:	Melakukan survei dengan metode pengukuran efektivitas layanan SPBE
Indikator Pencapaian	:	Telah dilakukannya pengukuran layanan SPBE dan melakukan perbaikan atas masukan yang ada.
Pelaksana	:	DISKOMINFO dan Bag. Organisasi
Keterangan	:	Survey kepuasan pengguna SPBE juga perlu disandingkan dengan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di masing-masing jika diperlukan.

1.3.2. Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi

Tabel 1.3.2.1. Program Kerja Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi

Deskripsi	:	Aplikasi Portal Layanan Publik Terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik dalam satu platform.
Spesifikasi	:	1. Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan 2. Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik
Detail	:	<i>Platform : Web Mobile</i> <i>Technology : LDAP, Keycloak untuk Single Sign On</i>



#	Layanan	Sub Layanan	Aplikasi
Layanan Publik			
1	Pengumuman		RSS Feed Sragen
2	Berita dan Informasi		RSS Feed Sragen
3	CCTV		CCTV Online Sragen
4	Titik Wifi publik		Wifi Publik Sragen
5	Event		Event Sragen
6	Iklan Layanan Masyarakat		-
7	Kependudukan	Antrian Pendaftaran	SIANTON
		Layanan Kependudukan	PANDU ONLINE
		Admindak Bayi Lahir	BARATA
		Palayanan Dokumen Kependudukan	PELANDUK POS
8	Ketenagakerjaan	Info Loker	e-MAKARYO LAPPAK SUKOWATI SIAPKERJASISNAKER
		Info Pelatihan	-
9	Pendidikan	PPDB Online	PPDB Online
10	Kesehatan	Pendaftaran Online	Daftar Online
		Info Bed	-
		Jadwal Dokter	-
		Antrian Online	Antrian Online SIMRS
		Penerbitan Akta	LANTERA
		Pendaftaran Pasien Puskesmas	-
11	Hukum	Diseminasi Kebijakan	JDIH dan JDIHN
12	Penanaman Modal	Peluang Investasi	SI PELANGI
		Perizinan	OSS dan SIPIONER
		Perizinan Penelitian	SIPIPO
		Aduan Perizinan	SIAP
13	Pajak & Retribusi	Pembayaran Pajak	-
		Uji Kendaraan Bermotor	NGE-KIR ONLINE
		Informasi Pajak	-
		Retribusi	e-Retribusi
14	Marketplace	Data Koperasi	SIKOPER
		Harga Pangan	-
		UMKM	-
15	Pariwisata	Destinasi Wisata	SIMPATI SIPEPAYA SITAGEN
16	Satu Data	Data Statistik & Geospasial	SRAGEN SATU DATA
17	Aduan Masyarakat		SP4N Lapor LAPORGUB
18	PPID	PPID	PPID Online
19	Transportasi	Informasi Transportasi	API
20	Social Media	Podcast	-
		Instagram	-
21	Televisi	TV Streaming	-
22	Scan QR		-
23	Agenda Perangkat Daerah		-
24	Standart Pelayanan Masyarakat	SPM	e-SPM
25	Survei Kepuasan Masyarakat	SKM	e-SKM

Indikator Pencapaian	: Terimplementasikannya portal layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi layanan publik internal pemerintah daerah
Pelaksana	: DISKOMINFO
Keterangan	: Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi layanan publik internal Pemerintah Daerah dan menjadikan API Kependudukan sebagai primary key di seluruh aplikasi layanan publik yang ada.

1.3.3. Pengembangan Portal Layanan Internal

Tabel 1.3.3.1. Program Kerja Pengembangan Portal Layanan Internal

Deskripsi	: Pengembangan Portal Layanan Internal yang memudahkan ASN dalam mengakses layanan Administrasi Pemerintahan Internal dalam satu platform.																																																				
Spesifikasi	: 1. Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan 2. Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Internal																																																				
Detail	: Platform : Web Mobile Technology : LDAP, Keycloak untuk Single Sign On																																																				
Fitur	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Layanan Internal Pemerintahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengumuman ASN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Persuratan</td> <td>Persuratan TTE</td> <td>SRIKANDI TTE</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3</td> <td rowspan="5">Kepegawaian</td> <td>Profil Kepegawaian</td> <td>SIMPEG</td> </tr> <tr> <td>Presensi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuti dan Izin</td> <td>e-Cuti</td> </tr> <tr> <td>Pengembangan Kompetensi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kinerja Harian</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Layanan TIK</td> <td>Layanan TIK</td> <td>ANAYA</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dashboard Pimpinan</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Knowledge Management System</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Push Notification</td> <td></td> <td>Firestore</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Login Page</td> <td></td> <td>Keycloak</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>About</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FAQ</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Layanan Internal Pemerintahan				1	Pengumuman ASN			2	Persuratan	Persuratan TTE	SRIKANDI TTE	3	Kepegawaian	Profil Kepegawaian	SIMPEG	Presensi	-	Cuti dan Izin	e-Cuti	Pengembangan Kompetensi	-	Kinerja Harian	-	4	Layanan TIK	Layanan TIK	ANAYA	5	Dashboard Pimpinan		-	6	Knowledge Management System		-	7	Push Notification		Firestore	8	Login Page		Keycloak	9	About			10	FAQ		
Layanan Internal Pemerintahan																																																					
1	Pengumuman ASN																																																				
2	Persuratan	Persuratan TTE	SRIKANDI TTE																																																		
3	Kepegawaian	Profil Kepegawaian	SIMPEG																																																		
		Presensi	-																																																		
		Cuti dan Izin	e-Cuti																																																		
		Pengembangan Kompetensi	-																																																		
		Kinerja Harian	-																																																		
4	Layanan TIK	Layanan TIK	ANAYA																																																		
5	Dashboard Pimpinan		-																																																		
6	Knowledge Management System		-																																																		
7	Push Notification		Firestore																																																		
8	Login Page		Keycloak																																																		
9	About																																																				
10	FAQ																																																				
Indikator Pencapaian	: Terimplementasinya portal layanan internal yang terintegrasi dengan aplikasi administrasi pemerintahan internal																																																				
Pelaksana	: DISKOMINFO																																																				
Keterangan	: Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi Administrasi Pemerintahan Internal																																																				



terkait dan menjadikan API Kepegawaian sebagai *primary key* di seluruh aplikasi Administrasi Pemerintahan internal yang ada.

1.4. Aplikasi SPBE

1.4.1. Pembangunan Aplikasi

Tabel 1.4.1.1. Program Kerja Pembangunan Aplikasi

Deskripsi	: Pengembangan aplikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi prioritas utama (yang paling mudah untuk diimplementasikan dan memberikan <i>impact</i> yang signifikan). Aplikasi yang bersifat pelayanan publik juga menjadi prioritas utama pengembangan.
Spesifikasi	: Daftar aplikasi usulan perangkat daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: Tahap 1 (Tahun 2023): <ol style="list-style-type: none">1. SIMADu2. e-REGISTRASI3. e-Usaha4. e-Harga Bahan Pokok5. SIM Pasar6. e-Sewa Tanah Lambiran7. e-Penyewaan Tanah Bahu Jalan8. e-Penyedotan Kakus9. e-Kinerja10. Telemedicine11. Televisite Tahap 2 (Tahun 2024): <ol style="list-style-type: none">12. e-Audit13. e-Warehouse Kependudukan14. EMR Tahap 3 (Tahun 2025): <ol style="list-style-type: none">15. e-Ormas16. e-Peta Rawan Bencana17. e-LHP18. e-Tracking Pelanggar Ketertiban19. easyRB20. e-KLA21. e-KB MKJP22. e-Pertanian dan Perikanan23. e-Pemakaman24. e-RAPAT25. SIKUNJA26. e-RESES
Indikator Pencapaian	: Terimplementasinya aplikasi-aplikasi yang direncanakan.
Pelaksana	: DISKOMINFO

	OPD terkait
Keterangan	<p>Estimasi Anggaran Kebutuhan Pengembangan Aplikasi dijelaskan pada Lampiran 2. Pengembangan dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan DISKOMINFO, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor). Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan.</p>
	<p>Pengembangan aplikasi seyogyanya berkoordinasi dengan DISKOMINFO dan mengikuti standar pengembangan teknologi milik Kabupaten Sragen untuk menghindari lock-in vendor.</p>

1.4.2. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (API Gateway)

Tabel 1.4.2.1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (api gateway)

Deskripsi	:	Guna untuk menghubungkan satu aplikasi ke aplikasi lainya maka perlu ada pembuatan API
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Analisis Kebutuhan API Gateway2. Pengembangan dan Pengujian API Gateway3. Dokumentasi API Gateway
Indikator Pencapaian	:	Integrasi antar aplikasi sudah menggunakan API dan telah didokumentasikan dengan baik.
Pelaksana	:	DISKOMINFO dan OPD terkait
Keterangan	:	

1.4.3. Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data)

Tabel 1.4.3.1. Pengembangan Portal Data dan Dashboard Analytics (Big Data)

Deskripsi	:	Guna mendukung pemanfaatan data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan maka perlu <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard Analytics</i> .
Spesifikasi	:	Aplikasi <i>dashboard</i> dan <i>data warehouse</i> setidaknya akan memiliki fitur: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Report builder</i>, memiliki kemampuan menyusun laporan secara <i>custom</i> sesuai kebutuhan pimpinan.2. <i>Data mining</i> dan <i>warehousing</i>, memiliki kemampuan kustomisasi sumber data, dan memiliki <i>local temporary data</i>.3. Integrasi <i>back office application</i>, yang secara default pengambilan data terintegrasi dengan aplikasi <i>back office</i> yang berjalan.4. Aplikasi dashboard harus memiliki kualitas yang baik/<i>user friendly</i> saat diakses dari perangkat <i>mobile</i> maupun PC.
Indikator Pencapaian	:	Implementasi aplikasi <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard</i>
Pelaksana	:	DISKOMINFO dan OPD terkait
Keterangan	:	Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pengembangan aplikasi. Layanan Data Terbuka diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 43

1.4.4. Pemeliharaan Aplikasi

Tabel 1.4.4.1. Program Kerja Pemeliharaan Aplikasi

Deskripsi	: Pemeliharaan dan <i>upgrade</i> untuk seluruh sistem yang telah dimiliki perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan kontinuitas penggunaannya.
Spesifikasi	: Aktivitas pemeliharaan/ <i>upgrade</i> terdiri atas: <ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi (<i>web server, database server, application server</i>) menggunakan aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain - lain.2. Melakukan perbaikan pada saat ditemukan <i>error/bug</i>3. Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal4. Melakukan <i>upgrade patch</i> keamanan, maupun <i>patch</i> performa sistem
Indikator Pencapaian	: Aplikasi berjalan lancar secara <i>realtime</i>
Pelaksana	: DISKOMINFO
Keterangan	: Pemeliharaan Aplikasi dilakukan ketika terjadi perubahan pada proses bisnis atau regulasi yang ada.

1.5. Infrastruktur SPBE

1.5.1. Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Fasilitas Pendukung Pusat Data

Tabel 1.5.1.1. Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Fasilitas Pendukung Pusat Data

Deskripsi	: Pusat data merupakan lokasi penempatan perangkat <i>server</i> , <i>storage</i> , jaringan, dan keamanan jaringan. <i>Server-server</i> aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo Pemerintah Kabupaten Sragen berada di pusat data. Pusat Data Diskominfo perlu dipelihara untuk menjaga ketersediaan (<i>availability</i>), dan kinerja (<i>performance</i>) dari layanan infrastruktur <i>server</i> , dan jaringan. Pemeliharaan Pusat Data meliputi perangkat utama seperti <i>server</i> , <i>storage</i> , jaringan, dan keamanan jaringan. Selain itu fasilitas pendukung juga perlu pemeliharaan secara rutin seperti catu daya listrik cadangan (Genset, dan UPS), sistem pendingin udara (AC), sistem penanganan kebakaran (APAR), kelistrikan, dan lain-lain.
Spesifikasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Letak Pusat Data berada gedung Diskominfo Kabupaten Sragen.2. Pembagian ruangan area ruang <i>server</i>, <i>staging</i>, kelistrikan, UPS dan <i>Battery</i>, AC Presisi dan <i>Fire Suppression System</i>.3. Sistem Kelistrikan.4. Sistem Pendingin.5. Sistem Jaringan Data.6. Sistem Penanganan Kebakaran.7. Sistem Pemantau Kondisi Lingkungan.8. Sistem Keamanan Fisik.9. Pemeliharaan perangkat utama seperti <i>server</i>, <i>storage</i>, perangkat jaringan, dan keamanan meliputi Sistem Operasi, <i>firmware</i>, <i>patch</i>, dan suku cadang.
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none">1. Pembagian ruangan pusat data mengikuti standar dari SNI Pusat Data atau standar ANSI/TIA-942.2. Fasilitas pendukung pusat data mengikuti standar dari SNI Pusat Data seperti adanya sistem pendingin ruangan terpusat, sistem pemadam kebakaran, dan lainnya.3. Perlunya jalur khusus kabel data yang terpisah dengan kabel daya listrik dengan jarak minimal 40 - 60 cm. Kabel data perlu diberikan penanda (<i>labelling</i>).4. Fasilitas utama dan fasilitas pendukung Pusat Data Diskominfo dipelihara secara mandiri atau menggunakan jasa pihak ketiga.5. Sistem operasi, <i>firmware</i>, <i>patch</i> perangkat <i>server</i>, <i>storage</i>, jaringan, dan keamanan jaringan adalah versi yang stabil atau direkomendasikan oleh pabrikan dan tidak ada celah keamanan.6. Laporan pemeliharaan perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data Diskominfo secara periodik.
Pelaksana	: DISKOMINFO
Keterangan	: Pusat Data diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 16.

1.5.2. Penyusunan Rencana Kapasitas (*Capacity Plan*) Infrastruktur Utama *Server* dan *Storage*

Tabel 1.5.2.1. Program Kerja Rencana Kapasitas Infrastruktur Utama *Server* dan *Storage*

Deskripsi	: Penyusunan rencana kapasitas (<i>Capacity Plan</i>) dilakukan untuk menjaga agar perangkat infrastruktur utama dan fasilitas pendukung pusat data dapat tetap beroperasi dengan normal. Kegiatan ini untuk menjaga ketersediaan dan keandalan dari layanan sistem informasi yang dikelola oleh Diskominfo. Rencana kapasitas meliputi kebutuhan spesifikasi teknis <i>server</i> , <i>storage</i> , infrastruktur jaringan, perangkat keamanan jaringan, dan fasilitas pendukung (sistem kelistrikan, luar ruangan, sistem pendingin).
Spesifikasi	: Kegiatan penyusunan rencana kapasitas infrastruktur utama <i>server</i> dan <i>storage</i> meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. perangkat utama <ul style="list-style-type: none"> - <i>server</i>; - <i>storage</i>; - perangkat jaringan; dan - perangkat keamanan jaringan. 2. fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> - sistem kelistrikan (<i>UPS</i>, <i>Genset</i>); - sistem pendingin ruangan (<i>AC</i>); - sistem pemadam kebakaran (<i>Fire Suppression</i>, <i>APAR</i>); dan - pengendali keamanan (<i>access door</i>, <i>CCTV</i>).
Indikator Pencapaian	: Dokumen hasil rencana kapasitas infrastruktur utama <i>server</i> dan <i>storage</i> meliputi kondisi utilisasi perangkat minimal tiga bulan terakhir berdasarkan alat pemantau (<i>monitoring tools</i>), rencana pengembangan aplikasi/sistem, dan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas.
Pelaksana	: DISKOMINFO
Keterangan	: -

1.5.3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana

Tabel 1.5.3.1. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana

Deskripsi	: Untuk menjaga tingkat ketersediaan dan kinerja layanan sistem informasi maka diperlukan lokasi cadangan penempatan <i>server</i> dan lainnya di Pusat Pemulihan Bencana. Sehingga jika terjadi kegagalan pada sistem informasi di pusat data maka operasionalisasi sistem aplikasi dipindah ke Pusat Pemulihan Bencana. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server</i> , <i>storage</i> , jaringan, dan keamanan di Pusat Pemulihan Bencana harus sama dengan yang ada di pusat data.
-----------	---

Spesifikasi	: 1. Jarak fisik lokasi Pusat Pemulihan Bencana minimal lebih dari 40 km dari Pusat Data Diskominfo. 2. Aplikasi/sistem yang tergolong kritis sudah dilakukan replikasi/ <i>backup</i> ke Pusat Pemulihan Bencana. 3. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server</i> , <i>storage</i> , infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di Pusat Data khususnya untuk server aplikasi yang tergolong kritis.
Indikator Pencapaian	: 1. Pemilihan lokasi pusat pemulihan bencana minimal dengan jarak 40 km dari pusat data saat ini; 2. Lokasi pusat pemulihan bencana bisa menggunakan jasa dari pihak ketiga (<i>provider</i>); 3. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server</i> , <i>storage</i> , infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di pusat data khususnya untuk <i>server</i> aplikasi yang tergolong kritis. 4. Aplikasi/sistem yang tergolong kritis sudah dilakukan <i>backup</i> /replikasi ke Pusat Pemulihan Bencana.
Pelaksana	: DISKOMINFO
Keterangan	: -

1.5.4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik

Tabel 1.5.4.1. Program Kerja Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik

Deskripsi	: Untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan Sistem Informasi di Pusat Pemulihan Bencana maka perlu dilakukan uji coba Rencana Pemulihan Bencana (<i>Disaster Recovery Plan - DRP</i>) secara periodik minimal satu tahun sekali. Kegiatan ini untuk memastikan <i>backup</i> dan replikasi yang sudah dilakukan dapat digunakan dan sesuai dengan harapan.
Spesifikasi	: 1. Tersedianya Pusat Pemulihan Bencana (DRC). 2. Spesifikasi dan jumlah server terutama yang tergolong kritis sama dengan yang ada di Pusat Data. 3. Aplikasi/Sistem Informasi terutama yang tergolong kritis sudah dilakukan <i>backup</i> dan replikasi <i>real time</i> ke Pusat Pemulihan Bencana.
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya dokumen Kebijakan, Standar, dan Prosedur Rencana Pemulihan Bencana (DRP). 2. Status <i>backup</i> dan replikasi aplikasi, file, dan <i>database</i> dari pusat data ke Pusat Pemulihan Bencana berjalan normal. 3. File <i>backup</i> dan replikasi dapat digunakan dan sesuai dengan kondisi terakhir. 4. Infrastruktur dan layanan aplikasi di Pusat Pemulihan Bencana dapat digunakan untuk menggantikan yang ada di Pusat Data selama rentang waktu tertentu.

	5. Dokumentasi dan evaluasi kegiatan pemulihan bencana dari Pusat Data ke Pusat Pemulihan Bencana.
Pelaksana	: DISKOMINFO
Keterangan	: -

1.5.5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah

Tabel 1.5.5.1. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	: Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Sragen meliputi jaringan internet, jaringan antar pusat data, jaringan di perangkat daerah/UPT, dan interkoneksi dengan lembaga lain. Infrastruktur JIP perlu dipelihara untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan JIP kepada pengguna internal maupun eksternal (masyarakat).
Spesifikasi	: Infrastruktur JIP terdiri dari perangkat jaringan (<i>router, switch, access point</i>), perangkat keamanan jaringan (<i>next-generation firewall</i>), koneksi internet dari <i>provider</i> internet, jaringan kabel <i>fiber optic</i> , dan radio link yang menghubungkan ke perangkat daerah/UPT dan lokasi lainnya, kabel UTP, dan lainnya. Perangkat - perangkat yang tergolong kritis seperti <i>router internet</i> dan <i>switch core</i> terdiri dari 2 (dua) unit (<i>redundant</i>), dengan konfigurasi <i>High Availability</i> (HA). Perangkat lainnya seperti <i>switch access</i> menggunakan <i>manageable switch</i> sehingga dapat dipantau, dan dikonfigurasi.
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya koneksi jaringan internet lebih dari satu penyedia jasa layanan internet (ISP), dan dikonfigurasi aktif semua; 2. Tersedianya perangkat jaringan inti, seperti: <i>router, switch</i> inti, <i>next generation firewall</i> yang redundan. 3. Perangkat jaringan menggunakan yang <i>manageable</i> sehingga dapat dipantau melalui alat pemantau, dan dikonfigurasi secara jarak jauh (<i>remote</i>). 4. Berfungsinya perangkat jaringan untuk melayani interkoneksi jaringan intra pemda dan jaringan internet.
Pelaksana	: DISKOMINFO
Keterangan	: Jaringan Intra Pemerintah Daerah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 17.

1.5.6. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kota Interkoneksi OPD/UPT

Tabel 1.5.6.1. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kota Interkoneksi OPD/UPT

Deskripsi	Koneksi jaringan dalam kota (<i>Metropolitan Area Network</i>) yang menghubungkan <i>Network Operation Center</i> Diskominfo dengan kantor perangkat daerah/UPT di beberapa lokasi perlu terus dipelihara untuk menjaga ketersediaan, keandalan, dan keamanannya.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. OPD/UPT sudah terkoneksi dengan NOC Diskominfo.2. Akses aplikasi intranet berjalan dengan lancar.3. Akses internet kantor perangkat daerah/UPT melalui NOC Diskominfo.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none">1. Semua perangkat daerah/UPT sudah terkoneksi dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo.2. Infrastruktur jaringan koneksi antar perangkat daerah/UPT dalam masa pemeliharaan baik oleh pihak Diskominfo atau menggunakan pihak ketiga.3. Jika pemeliharaan diserahkan kepada pihak ketiga, Diskominfo dan pihak ketiga menetapkan garansi layanan (SLA) dan waktu tanggap.4. SLA yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.
Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	-

1.5.7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (*WiFi*) Terintegrasi

Tabel 1.5.7.1. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (*WiFi*) Terintegrasi

Deskripsi	<p>Layanan jaringan data nirkabel (<i>WiFi</i>) yang dikelola oleh Diskominfo tersedia di kantor perangkat daerah/UPT, dan area umum tertentu. Pengguna yang menggunakan jaringan data nirkabel tersebut dapat mengakses aplikasi intranet, internet, maupun keduanya.</p> <p>Untuk menjamin ketersediaan, dan kinerja dari layanan jaringan data nirkabel maka infrastruktur jaringan data nirkabel perlu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lalu lintas data, proses, dan pengguna yang semakin besar serta untuk melindungi keamanan lalu lintas data.</p>
-----------	--

Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan <i>wifi</i> menggunakan protokol keamanan <i>WPA2-Enterprise (Wireless Fidelity Protected Access 2-Enterprise)</i>. Protokol ini menggunakan autentikasi 802.1X atau <i>EAP (Extensible Authentication Protocol)</i>. <i>EAP</i> merupakan protokol <i>layer 2</i> yang menggantikan <i>PAP</i> dan <i>CHAP</i>. 2. <i>Setting security WPA enterprise/corporate</i> ini membutuhkan sebuah server khusus yang berfungsi sebagai pusat autentikasi seperti <i>Server RADIUS (Remote Authentication Dial-In Service)</i>. Dengan adanya radius server ini, otentikasi akan dilakukan per-client sehingga tidak perlu lagi memasukkan <i>passphrase</i> atau <i>network key</i> yang sama untuk setiap <i>client</i>. 3. <i>Server RADIUS</i> dapat menggunakan <i>Active Directory</i> atau <i>LDAP</i>. 4. <i>Acces Point</i> mendukung mode <i>roaming</i> yakni jika pengguna berpindah tempat maka koneksi ke <i>Access Point</i> akan menyesuaikan dengan yang terdekat tanpa perlu melakukan otentikasi lagi. 5. Terdapat perangkat <i>WiFi Controller</i> untuk pengelolaan dan operasional (manajemen) <i>Access Point</i> dan lainnya.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perangkat <i>Wireless LAN Controller (WLC)</i> melakukan <i>setting</i> dan konfigurasi beberapa perangkat <i>access point</i> pada satu perangkat <i>controller</i>. 2. Otentikasi pengguna <i>WiFi</i> sudah menggunakan protokol keamanan <i>WPA2-Enterprise</i> berdasarkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang tersimpan di <i>Server LDAP</i> atau <i>Active Directory</i>. 3. Pengguna yang berpindah tempat tidak perlu lagi melakukan otentikasi ulang.
Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	-

1.5.8. Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Tabel 1.5.8.1. Pembangunan SPLP

<p>Deskripsi</p>	<p>Sistem penghubung layanan pemerintah Kabupaten Sragen adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Kabupaten Sragen dan dengan pemerintah pusat. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.</p> <p>Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Integrasi Data Proses integrasi dilakukan langsung pada basis data atau struktur data dari aplikasi dengan mengabaikan presentasi atau <i>business logic</i> ketika membuat integrasi. b. Integrasi Presentasi Proses integrasi dengan membuat antarmuka pengguna (<i>user interface</i>) yang menyediakan akses pada beberapa aplikasi. c. Integrasi Fungsional Diskominfo telah memiliki salah satu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yakni integrasi data dengan menggunakan teknologi API dan telah memiliki infrastruktur API <i>Management</i>. <p>Sistem Penghubung Layanan Pemerintah perlu diamankan untuk menjaga integritas dari data yang dipertukarkan serta untuk menjaga ketersediaan dari layanan.</p>
<p>Spesifikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. API Gateway Intranet untuk layanan <i>service</i> aplikasi internal dengan koneksi intranet. 2. API Gateway Ekstranet untuk layanan <i>service</i> aplikasi Kementerian/Lembaga dengan koneksi internet. 3. Pengembangan portal dengan basis <i>Single Sign On</i> (SSO). 4. Perangkat perlindungan keamanan API Gateway.
<p>Indikator Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya perangkat atau aplikasi untuk pengamanan SPL (API Gateway, SSO) yakni <i>Web Application Firewall</i> (WAF). 2. API Gateway, dan Sistem SSO terlindungi oleh WAF.
<p>Pelaksana</p>	<p>DISKOMINFO</p>
<p>Keterangan</p>	<p>Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 18.</p>

1.6. Keamanan Informasi

1.6.1. Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE

Tabel 1.6.1.1 Program Kerja Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE

Deskripsi	<p>Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.</p> <p>Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.</p> <p>Penerapan Keamanan Informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.</p>
Spesifikasi	<p>Penyusunan Kebijakan Keamanan dan Manajemen SPBE meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penetapan ruang lingkup- penanggung jawab- perencanaan: penyusunan program, pendokumentasian, manajemen resiko- dukungan pengoperasian: penganggaran- evaluasi keamanan- perbaikan berkelanjutan <p>Referensi yang dapat digunakan yakni Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,</p>
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen kebijakan dan manajemen keamanan SPBE sesuai dengan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021.
Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	-

1.6.2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Tabel 1.6.2.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Deskripsi	Standar Teknis keamanan data dan informasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan; 2. Keaslian; 3. Keutuhan; 4. Kenirsangkalan; dan 5. Ketersediaan.
Spesifikasi	Daftar SOP mengacu pada Standar Teknis pada Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SOP Klasifikasi Informasi; <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Enkripsi (dengan sistem kriptografi); 2. SOP Pembatasan Akses terhadap Data dan Informasi; 3. SOP Verifikasi, dan Validasi Keaslian Data dan Informasi; 4. SOP Implementasi <i>Hash Function</i>; 5. SOP Pendeteksian Modifikasi; 6. SOP Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi; 7. SOP Sistem Pencadangan (<i>backup</i>); dan 8. SOP Sistem Pemulihan (<i>recovery</i>).
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan. 3. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan data dan informasi sesuai dengan rincian di spesifikasi.
Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	-

1.6.3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE

Tabel 1.6.3.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE

Deskripsi	<p>Standar teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis <i>web</i> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Autentikasi.2. Manajemen sesi.3. Persyaratan kontrol akses.4. Validasi <i>input</i>.5. Kriptografi pada verifikasi statis.6. Penanganan <i>error</i> dan pencatatan <i>log</i>.7. Proteksi data.8. Keamanan komunikasi.9. Pengendalian kode berbahaya.10. Logika bisnis.11. File.12. Keamanan API dan <i>web service</i>, dan13. Keamanan konfigurasi. <p>Standar Teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis <i>mobile</i> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyimpanan data dan persyaratan privasi;2. Kriptografi;3. Autentikasi dan manajemen sesi;4. Komunikasi jaringan;5. Interaksi <i>platform</i>;6. Kualitas kode dan pengaturan <i>build</i>; dan7. Ketahanan.
Spesifikasi	<p>Standar dan prosedur keamanan aplikasi berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kata sandi (<i>password</i>) meliputi jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;2. SOP Klasifikasi Data, untuk data tergolong rahasia seperti kata sandi maka penyimpanannya dengan mekanisme kriptografi;3. SOP Jalur Komunikasi Aplikasi yang Aman;4. SOP Kontrol Akses Aplikasi;5. SOP Kriptografi;6. SOP Rekam Jejak;7. SOP <i>Error Handling</i> Aplikasi;8. SOP Pertukaran, Penghapusan, dan Audit Informasi;9. SOP Sertifikat Elektronik; dan10. SOP Konfigurasi <i>Server</i>;

<p>Indikator Pencapaian</p>	<p>a. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi <i>web</i> meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Autentikasi, ○ Manajemen sesi; ○ Persyaratan kontrol akses; ○ Validasi <i>input</i>; ○ Kriptografi pada verifikasi statis; ○ Penanganan <i>error</i> dan pencatatan <i>log</i>; ○ Proteksi data; ○ Keamanan komunikasi; ○ Pengendalian kode berbahaya; ○ Logika bisnis; ○ File; ○ Keamanan API dan <i>web service</i>; dan ○ Keamanan konfigurasi. <p>b. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi web sesuai dengan rincian di spesifikasi;</p> <p>c. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi mobile meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ penyimpanan data dan persyaratan privasi; ○ kriptografi; ○ autentikasi dan manajemen sesi; ○ komunikasi jaringan; ○ interaksi <i>platform</i>; ○ kualitas kode dan pengaturan <i>build</i>; dan ○ ketahanan. <p>d. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi mobile sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p>
<p>Pelaksana</p>	<p>DISKOMINFO</p>
<p>Keterangan</p>	<p>-</p>

1.6.4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Tabel 1.6.4.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Deskripsi	<p>Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keamanan interoperabilitas data dan informasi 2. kontrol sistem integrasi 3. kontrol perangkat integrator 4. keamanan API dan <i>web service</i> 5. keamanan migrasi data
Spesifikasi	<p>Standar dan prosedur Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Dokumen dan Surat Elektronik 2. SOP <i>Update</i> Sistem Operasi dan Perangkat Lunak 3. SOP Sistem <i>Recovery</i> dan <i>Restore</i> pada perangkat integrator 4. SOP Migrasi Data 5. SOP Implementasi Kriptografi pada proses Penyimpanan dan Pengambilan Data 6. SOP Validasi Data ketika Proses Migrasi Data Selesai
Indikator Pencapaian	<p>Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keamanan interoperabilitas data dan informasi 2. kontrol sistem integrasi 3. kontrol perangkat integrator 4. keamanan API dan <i>web service</i> 5. keamanan migrasi data <p>Tersedianya dokumen SOP keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p>
Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	SOP SPLP Daerah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 18.

1.6.5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Tabel 1.6.5.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	<p>Standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aspek administrasi keamanan jaringan intra;2. Kontrol akses dan autentikasi;3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra;4. Kontrol keamanan <i>gateway</i>;5. Kontrol keamanan <i>access point</i> pada jaringan nirkabel; dan6. Kontrol konfigurasi <i>access point</i> pada jaringan nirkabel.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen arsitektur jaringan intra2. Dokumen aset infrastruktur jaringan3. SOP Pemeliharaan keamanan jaringan intra4. Laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik5. SOP akses perangkat jaringan6. SOP konfigurasi perangkat jaringan7. SOP layanan <i>Virtual Private Network (VPN)</i>8. SOP akses <i>server database</i>9. Aplikasi <i>security information and event management</i> untuk <i>network logging, monitoring, dan analytics</i>10. Perangkat <i>next generation firewall</i> (termasuk IPS atau IDS)11. SOP pembaruan sistem operasi, <i>firmware</i>, dan <i>patch</i> perangkat jaringan12. Perangkat <i>load balancer</i> koneksi jaringan dan aplikasi <i>web</i>13. Perangkat <i>Web Application Firewall (WAF)</i>14. Pemasangan sertifikat elektronik15. Penerapan <i>content filtering</i>16. SOP akses jarak jauh17. SOP layanan akses <i>WiFi</i>18. Implementasi <i>SSID</i> untuk jaringan nirkabel

Indikator Pencapaian	<p>Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek administrasi keamanan Jaringan Intra 2. Kontrol akses dan autentikasi 3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra 4. Kontrol keamanan <i>gateway</i> 5. Kontrol keamanan <i>access point</i> pada jaringan nirkabel 6. Kontrol konfigurasi <i>access point</i> pada jaringan nirkabel <p>Tersedianya dokumen SOP keamanan Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p> <p>Terdapat perangkat pendukung keamanan jaringan Intra meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Next Generation Firewall</i> termasuk didalamnya fitur IPS/IDS 2. <i>Web Application Firewall (WAF)</i> 3. <i>Load Balancer</i> untuk koneksi jaringan 4. <i>Load Balancer</i> untuk aplikasi <i>web</i> 5. Perangkat <i>Content Filtering</i> 6. Sertifikat SSL
Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	SOP Jaringan Intra Pemerintah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 17.

1.6.6. Pengembangan Platform Helpdesk TIK

Tabel 1.6.6.1. Program Kerja Pengembangan Platform Helpdesk TIK

Deskripsi	<p>Semakin berkembangnya layanan Diskominfo kepada perangkat daerah/UPT perlu didukung layanan bantuan penanganan masalah secara cepat, tepat, dan terdokumentasi. Untuk melaksanakan layanan penanganan masalah diperlukan tata kelola dan alat bantu (<i>tools</i>).</p>
Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola Layanan Penanganan Masalah (<i>Helpdesk</i>) TIK - <i>Tools</i> atau aplikasi pendukung untuk pencatatan dan sebagai manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) - Petugas <i>helpdesk</i>
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pedoman, standar, dan prosedur layanan penanganan gangguan/masalah (<i>helpdesk</i>) TIK - Tersedianya aplikasi untuk pencatatan dan sebagai manajemen pengetahuan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan - Tersedianya petugas <i>helpdesk</i> yang menerima, mencatatkan, dan melakukan penanganan masalah pada tingkat pertama

Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	Jaringan Intra Pemerintah Daerah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 17.

1.6.7. Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001)

Tabel 1.6.7.1. Program Kerja Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001)

Deskripsi	Layanan TIK SPBE (Aplikasi, Jaringan, <i>Data Center</i>) perlu disertifikasi keamanannya untuk menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan dari pengguna. Standar sertifikasi dapat mengacu pada standar internasional keamanan informasi yakni ISO 27001.
Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Lingkup Sertifikasi - Asesmen awal menggunakan Indeks KAMI - Pendampingan Sertifikasi - Sertifikasi ISO 27001 oleh lembaga yang sudah tersertifikasi KAN (Komite Akreditasi Nasional)
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Pedoman, Standar, dan Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi - Nilai Indeks KAMI sudah memenuhi untuk sertifikasi - Tersedianya pendamping sertifikasi dari pihak eksternal - Sertifikasi ISO 27001
Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	-

1.6.8. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi

Tabel 1.6.8.1. Program Kerja Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi

Deskripsi	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (<i>Vulnerability Assessment and Penetration Testing - (VAPT)</i>) terhadap jaringan, <i>server</i> , dan aplikasi yang dikelola oleh DISKOMINFO.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kerentanan (<i>Vulnerability Assessment</i>) jaringan, <i>server</i>, dan aplikasi <i>web</i> 2. <i>Penetration Testing</i> terhadap jaringan, <i>server</i>, dan aplikasi <i>web</i> menggunakan metode <i>black box</i> 3. Dokumen hasil asesmen dan <i>penetration testing</i> beserta rekomendasinya
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (<i>Vulnerability Assessment and Penetration Testing - (VAPT)</i>) dilakukan secara periodik minimal satu tahun sekali 2. Tersedia dokumen hasil penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi beserta rekomendasinya 3. Pelaksanaan hasil rekomendasi 4. Tersedia dokumen hasil penilaian kerentanan ulang dan pengujian penetrasi ulang
Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	-

1.6.9. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE

Tabel 1.6.9.1. Program Kerja Edukasi Keamanan SPBE

Deskripsi	Serangan siber akan terus meningkat frekuensinya dan tekniknya. Objek yang paling rentan terhadap serangan keamanan siber adalah manusianya. Oleh karena itu kesadaran keamanan informasi harus selalu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan strategi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 2. Pembentukan tim pelaksana 3. Implementasi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 4. Evaluasi hasil implementasi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 5. Tindak lanjut dari hasil evaluasi
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen strategi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 2. Tersedianya tim pelaksana 3. Implementasi edukasi keamanan SPBE melalui kegiatan webinar, <i>focus group discussion</i> (FGD), simulasi, dan lain - lain 4. Implementasi sosialisasi keamanan SPBE melalui sosial media (instagram, WA Group, Facebook, dll) secara periodik 5. Tersedianya dokumentasi evaluasi 6. Tersedianya dokumentasi tindak lanjut

Pelaksana	DISKOMINFO
Keterangan	-

1.7. Audit SPBE

1.7.1. Pelaksanaan Audit TIK

Tabel 1.7.1.1. Program kerja Audit TIK

Deskripsi	: Melakukan Audit TIK secara berkala
Spesifikasi	: Audit SPBE dilakukan secara internal dan eksternal, Audit TIK terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim audit aplikasi SPBE b. Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE e. Perbaiki aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit 2. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim audit infrastruktur SPBE b. Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE e. Perbaiki infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit 3. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim audit keamanan SPBE b. Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE e. Perbaiki keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit
Indikator Pencapaian	: Terlaksananya Audit SPBE secara periodik
Pelaksana	: DISKOMINFO & Inspektorat
Keterangan	: Audit TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 29-31.

1.8. SDM SPBE

1.8.1. Pembentukan Tim *Developer* Internal

Tabel 1.8.1.1. Program Kerja Pembentukan Tim *Developer* Internal

Deskripsi	: Pembentukan Tim <i>Developer</i> Internal dalam rangka untuk mengakomodir permintaan / kebutuhan pengembangan (<i>development</i>) bidang TI di seluruh perangkat daerah
Detail	: <ol style="list-style-type: none">1. Perekrutan Tim <i>Developer</i> Internal dengan posisi: (<i>System Analyst, Data Scientist/Engineer, UI/UX Designer, Front-End Web Developer, Front-End Mobile Developer, Back-End Developer, Application Support</i>)2. Peningkatan kompetensi Tim <i>Developer</i> Internal
Spesifikasi	: Kebutuhan SDM TIK: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Project Manager</i>2. <i>Enterprise Architect</i>3. <i>System Analyst</i>4. <i>UI/UX Designer</i>5. <i>Front-End Developer</i>6. <i>Back-End Developer</i>7. <i>Application Support</i>8. <i>Data Scientist/Engineer</i>9. <i>Network Engineer</i>10. Teknisi IT11. <i>Digital Media Specialist</i>
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none">1. Tim <i>Developer</i> Internal mampu mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan seluruh OPD2. Pemeliharaan aplikasi dapat dilakukan lebih <i>agile</i>
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2023 - 2027
Keterangan	: -

1.8.2. Penyelenggaraan Kompetensi SDM SPBE

Tabel 1.8.2.1. Program Kerja Peningkatan Kompetensi SDM SPBE (i)

Deskripsi	: Penyelenggaraan <i>training</i> SDM SPBE dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dalam bidang SPBE untuk peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan dalam organisasi.
Spesifikasi	: Lihat pada Tabel 1.8.2.2
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya pelatihan2. Jumlah peserta pelatihan

Pelaksana	: BKPSDM dan DISKOMINFO
Keterangan	: Penyelenggaraan Training SDM SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 25.

Tabel 1.8.2.2. Program Kerja Peningkatan Kompetensi SDM SPBE (ii)

#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Tingkat Jabatan	Waktu Pelaksanaan
1	Tata Kelola & Manajemen SPBE	<i>Project Management Professional</i>	<i>Project Manager</i>	ahli utama / ahli madya	Menyesuaikan
		COBIT 2019	<i>Project Manager & Enterprise Architect</i>	ahli utama / ahli madya	Menyesuaikan
		Manajemen SPBE meliputi : - Manajemen risiko SPBE - Manajemen keamanan informasi SPBE - Manajemen data - Manajemen SDM TIK - Manajemen aset TIK - Manajemen pengetahuan - Manajemen perubahan - Manajemen layanan	Umum	ahli utama / ahli madya / ahli muda	Menyesuaikan
		Peta Proses Bisnis dengan BPMN	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		Transformasi Digital <i>Framework</i>	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	ahli utama / ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>Enterprise Architecture Foundation (TOGAF)</i>	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	ahli utama / ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>Enterprise Architecture Advanced (TOGAF)</i>	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>Scrum Master</i>	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
2	Data	<i>Data Management With DMBOK</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>Database Administrator (MCDBA)</i>	<i>Programmer</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Visualisasi Data dengan <i>Business Intelligence</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Pemrograman untuk Pengolahan Data dengan <i>Python & R Programming</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Data Analytic With Machine Learning</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Big Data Analytic In Practice</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan

#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Tingkat Jabatan	Waktu Pelaksanaan
3	Aplikasi	<i>Backend Web API Programming</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Frontend Web Development</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Mobile Frontend With PWA</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Back-end Web Programming With Laravel</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Front-end Web Development With Vue JS</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Android Secure Programming</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Mobile Programming With Flutter</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>IT Service Management</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>IT Quality Assurance</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Software Testing Implementation</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Software Testing Plan</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
4	Layanan	<i>IT Service Management</i>	<i>Enterprise Architect</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
5	Infrastruktur	<i>Network Security with Mikrotik</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Traffic Management with Mikrotik</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Linux Fundamental</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Linux Network Services</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>DevOps Introduction & Docker</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Docker Administration With Kubernetes</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Microservices In Development</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Penetration Testing Method</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
<i>CompTIA ITF</i>	Teknisi IT	ahli muda	Menyesuaikan		
6	Keamanan Informasi	<i>Ethical Hacking (CECH)</i>	<i>Auditor</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>IT Auditor Fundamental</i>	<i>Auditor</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>ISO 31000 (IT Risk And Controls)</i>	<i>Auditor</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>ISO 27001 (Information Security Management)</i>	<i>Auditor</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>Certified Information System Auditor</i>	<i>Auditor</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan

#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Tingkat Jabatan	Waktu Pelaksanaan
7	Komunikasi Publik	Etika Komunikasi / <i>Public Speaking</i>	<i>Digital Media Specialist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Penulisan Artikel (<i>Storytelling</i>)	<i>Digital Media Specialist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Fotografi dan Videografi	<i>Digital Media Specialist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Publikasi <i>Social Media</i>	<i>Digital Media Specialist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Search Engine Optimization</i>	<i>Digital Media Specialist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan

Bab II Roadmap & Estimasi Anggaran

2.1. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Sragen 2023-2027

Tabel 2.1.1. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi							
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)							
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan							
Sasaran 2.2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	60.59	60.79	60.90	61.39	61.59	61.79
Indikator	Indeks SAKIP	70.20	70.30	70.40	70.50	70.60	70.70
Indikator	Indeks SPBE	3.35	3.4	3.45	3.5	3.5	3.5

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE: Layanan Internal dan Publik yang Optimal dan Efisien									
1	Tata Kelola								
	A Kebijakan SPBE								
	1 Kebijakan Arsitektur SPBE								
	- Penyusunan kebijakan arsitektur SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Reviu dan tindak lanjut kebijakan arsitektur SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	2 Kebijakan Peta Rencana SPBE								

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	- Penyusunan kebijakan peta rencana SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Reviu dan tindak lanjut kebijakan peta rencana SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	3 Kebijakan Manajemen Data								
	- Penyusunan kebijakan manajemen data	DISKOMINFO, BAPPEDA dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Reviu dan tindak lanjut kebijakan manajemen data sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	DISKOMINFO, BAPPEDA dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	4 Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE								
	- Penyusunan kebijakan pembangunan aplikasi SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Reviu dan tindak lanjut pembangunan aplikasi SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	5 Kebijakan Pusat Data								
	- Penyusunan kebijakan pusat data	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Reviu dan tindak lanjut pengelolaan pusat data	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	6 Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah								
	- Penyusunan kebijakan jaringan intra pemerintah daerah	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Reviu dan tindak lanjut pengelolaan jaringan intra pemerintah	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	7 Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat								
	- Penyusunan kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	- Reviu dan tindak lanjut kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
8	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi								
	- Penyusunan kebijakan internal manajemen keamanan informasi	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Reviu dan tindak lanjut kebijakan internal manajemen keamanan informasi	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
9	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi								
	- Penyusunan kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Reviu dan tindak lanjut kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
10	Kebijakan Tim koordinasi SPBE								
	- Penyusunan kebijakan tim koordinasi SPBE	DISKOMINFO, BKPSDM dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Reviu dan tindak lanjut kebijakan tim koordinasi SPBE	DISKOMINFO, BKPSDM dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
B	Pembentukan Komite/Forum								
	1 Penyusunan dan evaluasi perbup / sk tim koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah Ada						
	2 Penyusunan dan evaluasi perbup / sk komite forum satu data	Tim Koordinasi SPBE	Belum ada	1 Kegiatan					
	3 Penyusunan dan evaluasi perbup / sk komite manajemen risiko	Tim Koordinasi SPBE	Belum ada	1 Kegiatan					
	4 Penyusunan dan evaluasi perbup / sk komite manajemen perubahan	Tim Koordinasi SPBE	Belum ada	1 Kegiatan					
	5 Penyusunan dan evaluasi perbup / sk komite manajemen pengetahuan	Tim Koordinasi SPBE	Belum ada	1 Kegiatan					
	6 Penyusunan dan evaluasi perbup / sk pokja manajemen layanan	Tim Koordinasi SPBE	Belum ada	1 Kegiatan					
	7 Penyusunan dan evaluasi perbup / sk pokja manajemen keamanan informasi	Tim Koordinasi SPBE	Belum ada	1 Kegiatan					

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
C	Kolaborasi									
	1	Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah ada	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	
	2	Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal	Tim Koordinasi SPBE	Sudah ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
D	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE									
	1	Evaluasi dan revisi arsitektur dan peta rencana SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	2	Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis	Tim Koordinasi SPBE	Sudah dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	3	Evaluasi dan revisi layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
2	Manajemen									
A	Penyusunan Pedoman Manajemen									
	1	Pedoman Manajemen Risiko								
		- Pembentukan komite manajemen risiko	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		- Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
		- Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
		- Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
		- Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		- Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, fgd	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	- Penetapan konteks risiko SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	2 Pedoman Manajemen Data								
	- Pembentukan tim satu data	DISKOMINFO	Sudah Ada						
	- Penyusunan pedoman manajemen data	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	- Pembaharuan arsitektur data	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja	DISKOMINFO	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Pemeriksaan pemenuhan data sektoral	DISKOMINFO	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Penyebarluasan data sektoral	DISKOMINFO	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Pembaruan data sektoral secara berkala	DISKOMINFO	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Penyimpanan data pada portal open data	DISKOMINFO	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	3 Pedoman Manajemen Layanan TIK								
	- Pembentukan tim helpdesk TIK	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	- Pembentukan SOP layanan TIK	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	- Evaluasi & perbaikan kinerja tim helpdesk TIK	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	4 Pedoman Manajemen SDM TIK								
	- Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK	Bag. Organisasi	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK	BKPSDM, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Analisis SOP manajemen SDM	BKPSDM, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK	BKPSDM, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	5 Pedoman Manajemen Aset TIK								
	- Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur)	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Penyusunan SOP perencanaan aset TIK	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	- Penyusunan SOP pengadaan aset TIK	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	- Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	- Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	6 Pedoman Manajemen Pengetahuan								

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	- Pembentukan komite manajemen pengetahuan	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	- Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP)	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	- Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	7 Pedoman Manajemen Perubahan								
	- Pembentukan komite manajemen perubahan	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	- Penyusunan pedoman / SOP manajemen perubahan SPBE	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	- Penyusunan form log manajemen perubahan	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	- Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	8 Pedoman Manajemen Keamanan Informasi								
	- Pembentukan tim keamanan informasi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	- Penyusunan SOP keamanan informasi mengacu pada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	- Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	3 Bulan Sekali	3 Bulan Sekali	1 Bulan Sekali	1 Bulan Sekali	1 Bulan Sekali	
	- Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
3	Layanan									
	A Survey Penggunaan SPBE									
	1	Survey kepuasan penggunaan aplikasi internal	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	2	Survey kepuasan penggunaan aplikasi publik	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi									
	1	Penyusunan konsep desain integrasi layanan	DISKOMINFO	Belum dilakukan						
	2	Pengembangan aplikasi portal layanan publik	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C Pengembangan Portal Layanan Internal									
	1	Penyusunan konsep desain integrasi layanan	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	2	Pengembangan aplikasi portal layanan internal	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
4	Aplikasi									
	A Pembangunan aplikasi									
	1	SIMADu	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		1 Kegiatan					
	2	e-REGISTRASI	Bagian Hukum		1 Kegiatan					
	3	e-Usaha	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		1 Kegiatan					
	4	e-Harga Bahan Pokok	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		1 Kegiatan					

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	5	SIM Pasar	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		1 Kegiatan					
	6	e-Sewa Tanah Lambiran	Dinas Pekerjaan Umum		1 Kegiatan					
	7	e-Penyewaan Tanah Bahu Jalan	Dinas Pekerjaan Umum		1 Kegiatan					
	8	e-Penyedotan Kaku	Dinas Pekerjaan Umum		1 Kegiatan					
	9	e-Kinerja	Dinas Perhubungan		1 Kegiatan					
	10	Telemedicine	RSUD dr. Soeratno Gemolong		1 Kegiatan					
	11	Televisite	RSUD dr. Soeratno Gemolong		1 Kegiatan					
	12	e-Audit	Inspektorat			1 Kegiatan				
	13	e-Warehouse Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1 Kegiatan				
	14	EMR	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro			1 Kegiatan				
	15	e-Ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1 Kegiatan			
	16	e-Peta Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				1 Kegiatan			
	17	e-LHP	Inspektorat				1 Kegiatan			
	18	e-Tracking Pelanggar Ketertiban	Bagian Organisasi				1 Kegiatan			
	19	easyRB	Bagian Organisasi				1 Kegiatan			

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	20	e-KLA	Bagian Organisasi				1 Kegiatan			
	21	e-KB MKJP	Bagian Organisasi				1 Kegiatan			
	22	e-Pertanian dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				1 Kegiatan			
	23	e-Pemakaman	Dinas Permukiman dan Penataan Ruang				1 Kegiatan			
	24	e-RAPAT	Sekretariat Dewan				1 Kegiatan			
	25	SIKUNJA	Sekretariat Dewan				1 Kegiatan			
	26	e-RESES	Sekretariat Dewan				1 Kegiatan			
	C	Pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah (api gateway)								
	1	Penyusunan Analisis Kebutuhan API Gateway	DISKOMINFO	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	2	Pengembangan dan Pengujian API Gateway	DISKOMINFO	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	3	Dokumentasi API Gateway	DISKOMINFO	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	D	Pengembangan portal data dan dashboard (big data)								
	1	Pengembangan Report builder, Data mining dan warehousing, Integrasi back office application	DISKOMINFO	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	E	Pemeliharaan aplikasi								
	1	Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi (web server, database server, application server) menggunakan	DISKOMINFO, Perangkat Daerah terkait	Berkelanjutan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain - lain.								
2	Melakukan perbaikan pada saat ditemukan error/bug	DISKOMINFO, Perangkat Daerah terkait	Berkelanjutan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
3	Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal	DISKOMINFO, Perangkat Daerah terkait	Berkelanjutan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
4	Melakukan upgrade patch keamanan, maupun patch performa sistem	DISKOMINFO, Perangkat Daerah terkait	Berkelanjutan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
5 Infrastruktur									
A	Peningkatan Kapasitas Ruang dan Perangkat Pendukung Ruang Server	DISKOMINFO							
1	Asesmen kondisi saat ini ruangan dan perangkat pendukung ruang server (sistem pendingin ruangan, sistem pemadam kebakaran, ups, genset)	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
2	Identifikasi rencana pengembangan aplikasi/sistem informasi ke depan	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
3	Penyusunan rencana pengembangan ruangan dan perangkat pendukung ruang server	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
4	Pelaksanaan pengembangan ruangan dan perangkat pendukung ruang server	DISKOMINFO	Belum dilakukan		1 Kegiatan	1 Kegiatan			
B	Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Server dan Storage	DISKOMINFO							
1	Asesmen kondisi utilisasi dan kinerja server dan storage saat ini	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
2	Identifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi/sistem informasi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
3	Penyusunan rencana kapasitas server dan storage untuk 4 tahun ke depan	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	C Peningkatan Kapasitas Pusat Pemulihan Bencana								
	1 Asesmen kondisi utilisasi dan kinerja server dan storage di pusat pemulihan bencana	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	2 Identifikasi aplikasi/sistem informasi yang sudah atau belum dicadangkan di pusat pemulihan bencana	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	3 Penyusunan kebutuhan server dan storage untuk aplikasi/sistem informasi yang belum dicadangkan di pusat pemulihan bencana	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	4 Pengadaan server, storage, perangkat lunak, perangkat jaringan dan lain - lain untuk cadangan aplikasi/sistem informasi di pusat pemulihan bencana	DISKOMINFO	Belum dilakukan		1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	D Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik								
	1 Penyusunan dokumen rencana kontinuitas bisnis (business continuity plan) dan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan)	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	2 Penyusunan skenario uji coba pemulihan bencana	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	3 Uji coba pemulihan bencana	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	4 Evaluasi hasil uji coba pemulihan bencana	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	E Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah								
	1 Asesmen kondisi saat ini utilisasi kapasitas dan kinerja infrastruktur jaringan intra pemerintah	DISKOMINFO	Sudah Ada tetapi belum redundan	1 Kegiatan					
	2 Identifikasi kendala atau permasalahan yang terjadi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	3 Identifikasi kebutuhan layanan jaringan intra pemerintah 4 tahun ke depan	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	4 Penyusunan rencana pengembangan kapasitas dan keandalan jaringan intra pemerintah	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	5	Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah	DISKOMINFO	Belum dilakukan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	6	Evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah	DISKOMINFO	Belum dilakukan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	F	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi								
	1	Asesmen kondisi infrastruktur jaringan data nirkabel saat ini	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	2	Identifikasi kendala, permasalahan dan isu keamanan jaringan data nirkabel	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	3	Identifikasi target pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (implementasi protokol WPA2-enterprise, fitur roaming, dll)	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	4	Penyusunan rencana pengembangan dan kebutuhan anggaran infrastruktur jaringan data nirkabel	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Dokumen					
	5	Pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel	DISKOMINFO	Belum dilakukan		1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	6	Evaluasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel	DISKOMINFO	Belum dilakukan		1 Kegiatan	1 Kegiatan			
6	Keamanan									
	A	Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001)								
	1	Identifikasi ruang lingkup untuk standar keamanan informasi (indeks KAMI/ISO 27001)	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	2	Pendampingan sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	3	Sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI	DISKOMINFO	Belum dilakukan		1 Kegiatan			1 Kegiatan	

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	4	Reviu tahunan implementasi sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan		
B		Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi								
	1	Identifikasi ruang lingkup penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	2	Pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	3	Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
C		Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Postingan per bulan	1 Postingan per bulan	1 Postingan per bulan	1 Postingan per bulan	1 Postingan per bulan	
7	Audit TIK									
A		Pelaksanaan Audit TIK								
	1	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE								
		- Pembentukan tim audit infrastruktur SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		- Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
		- Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
		- Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	- Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
2	- Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE								
	- Pembentukan tim audit aplikasi SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	- Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
	- Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan			1 Kegiatan		1 Kegiatan	
	- Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
	- Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
3	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE								
	- Pembentukan tim audit keamanan SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	- Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
	- Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
	- Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
	- Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
8	SDM TIK								
A	Pembentukan Tim Developer Internal								

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	Perekrutan Tim Developer Internal dengan posisi: (System Analyst, Data Scientist/Engineer, UI/UX Designer, Front-End Web Developer, Front-End Mobile Developer, Back-End Developer, Application Support)	DISKOMINFO	Belum dilakukan	7 SDM	12 SDM	15 SDM	20 SDM	20 SDM	
	2	Peningkatan kompetensi Tim Developer Internal	DISKOMINFO	Belum dilakukan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
	B Penyelenggaraan Training SDM SPBE (Basic)									
	1	Penyelenggaraan Training SDM SPBE	DISKOMINFO	Belum dilakukan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
	2	Evaluasi Pelaksanaan Training SDM SPBE	DISKOMINFO	Belum dilakukan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	

Bab III Penutup

Laporan Peta Rencana SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini disusun guna memberikan rencana yang perlu diimplementasikan di Kabupaten Sragen. Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa kondisi target yang selanjutnya diterjemahkan dalam rencana program kerja terkait SPBE.

Laporan Peta Rencana SPBE ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Kabupaten Sragen selama 5 (lima) tahun mendatang dan juga substansi yang terdapat dalam peta rencana ini perlu dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun berikutnya.



Pemerintah Kabupaten Sragen, 2023

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGNYA SETAHUN SEKALI (*ANNUAL REVIEW*).

LAMPIRAN

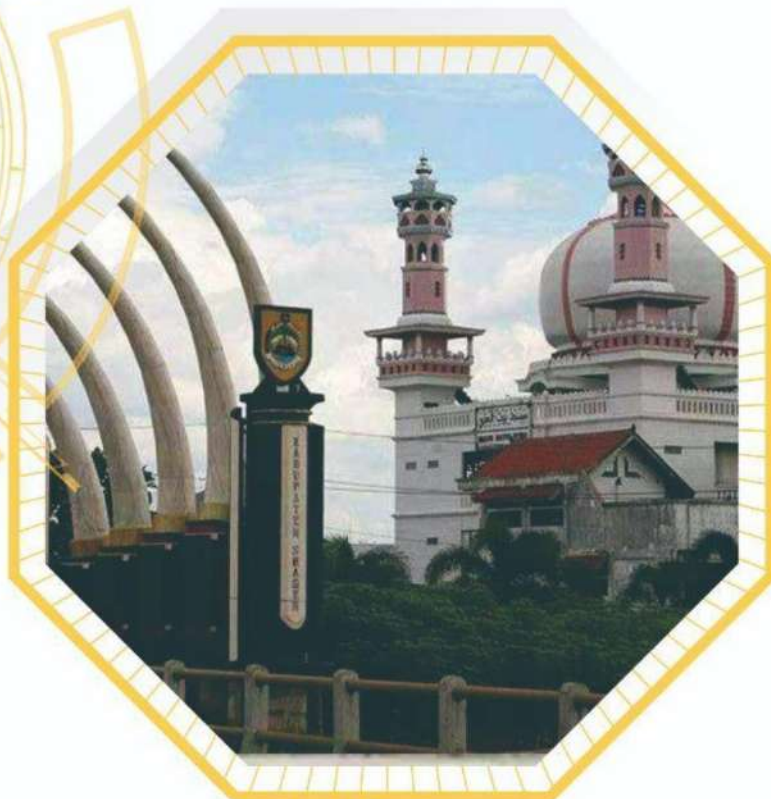
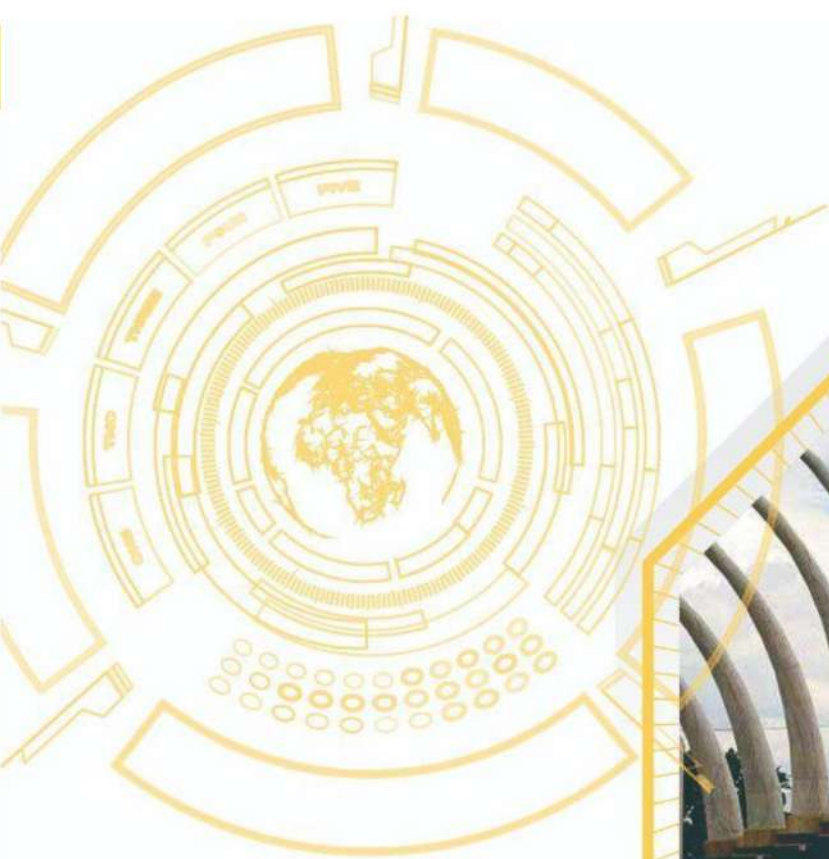
lampiran 2 Estimasi Anggaran Kebutuhan Pengembangan Aplikasi

Aplikasi	Nama Aplikasi	Urutan Aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Operasional Teknologi (Dependency)	SKEMA	Tahun	Kategori	Durasi (Bln)	Resource										Total				
									PM	SA	BE	FE (Mobile)	FE (Web)	AS	Total SUM	PM	System Analyst	Back-End Developer		Front-End Developer (Mobile)	Front-End Developer (Web)	Application Support	
U 6R0 001	e-SMAdu	Sistem Informasi Manajemen Aset Terpadu	Web Based	Bidang Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inhouse	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 002	e-REGISTRASI	Sistem Nomor Hukun Daerah	Web Based	Bagian Hukum	Inhouse	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 003	e-Uraha	Sistem Informasi Pendampingan Merek dan Labeler Usaha	Web Based	Diras Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Inhouse	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 004	e-Harga Bahan Pokok	Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Penting	Web Based	Diras Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Inhouse	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 006	e-SP Passer	Sistem Informasi Manajemen Passer	Web Based	Diras Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Inhouse	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 006	e-Sewa Tanah Lembang	Sistem Informasi Sewa Tanah Lembang	Web Based	Diras Pekerjaan Umum	Inhouse	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 007	e-Penyediaan Tanah Bahu Jalan	Sistem Informasi Penyediaan Tanah Bahu Jalan	Web Based	Diras Pekerjaan Umum	Inhouse	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 008	e-Penyedotan Kalus	Sistem Informasi Penyedotan Kalus	Web Based	Diras Pekerjaan Umum	Inhouse	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 009	e-Kerja	Sistem Informasi Laporan Kerja	Web Based	Diras Perhubungan	Inhouse	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 010	Telemedicine	Sistem Informasi Konsultasi Pasien dan Dokter	Web Based	RSUD dr. Soeraino Gemolong	Outsource	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 011	Tele site	Sistem Informasi Jadwal Dokter	Web Based	RSUD dr. Soeraino Gemolong	Outsource	2023	Mudah	Besar	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 012	e-Audit	Sistem Informasi Manajemen Pergawasan Internal	Web Based	Inspektorat	Outsource	2024	Sulit	Besar	2	1	1	2	0	2	1	7	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 9.000.000	Rp 0	Rp 8.000.000	Rp 3.500.000	Rp 61.000.000
U 6R0 013	e-Warehouse Kependudukan	Sistem Informasi Dashboard Dikdukcapil	Web Based	Diras Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inhouse	2024	Sulit	Besar	2	1	1	2	0	2	1	7	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 9.000.000	Rp 0	Rp 8.000.000	Rp 3.500.000	Rp 61.000.000
U 6R0 014	EMR	Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik	Web Based	RSUD dr. Soehadi Pajajaran	Outsource	2024	Sulit	Besar	3	1	1	2	0	2	1	7	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 9.000.000	Rp 0	Rp 8.000.000	Rp 3.500.000	Rp 91.500.000
U 6R0 016	e-Ormas	Sistem Informasi Pendaftaran Ormas	Web Based	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 016	e-Pata Rawan Bencana	Sistem Informasi Peta Rawan Bencana Terintegrasi	Web Based	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 017	e-LHP	Sistem Informasi Laporan Hasil Pemeriksaan	Web Based	Inspektorat	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 018	e-Tracking Pelanggaran Keterlibatan	Sistem Informasi Tracking Pelanggaran Keterlibatan	Web Based	Bagian Organisasi	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 019	e-ayakR	Sistem Informasi Penilaian Informasi Brokera	Web Based	Bagian Organisasi	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 020	e-KLA	Sistem Informasi Manajemen Kabupaten Layak Anak	Web Based	Bagian Organisasi	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 021	e-K3 MKJP	Sistem Informasi Manajemen KB MKJP	Web Based	Bagian Organisasi	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 022	e-Peradilan dan Perikanan	Sistem Informasi Peradilan dan Perikanan	Web Based	Diras Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Inhouse	2028	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 023	e-Perumahan	Sistem Informasi Lain Perumahan	Web Based	Diras Perumahan dan Perencanaan Ruang	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 024	e-RAPAT	Sistem Informasi Notulen Rapat	Web Based	Sekretariat Dewan	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 025	SIRI NUA	Sistem Informasi Kuripan Tamu DPRD	Web Based	Sekretariat Dewan	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000
U 6R0 026	e-RESSES	Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat	Web Based	Sekretariat Dewan	Inhouse	2026	Mudah	Kecil	2	1	1	1	0	1	1	5	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 44.000.000

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



Pemerintah Kabupaten Sragen